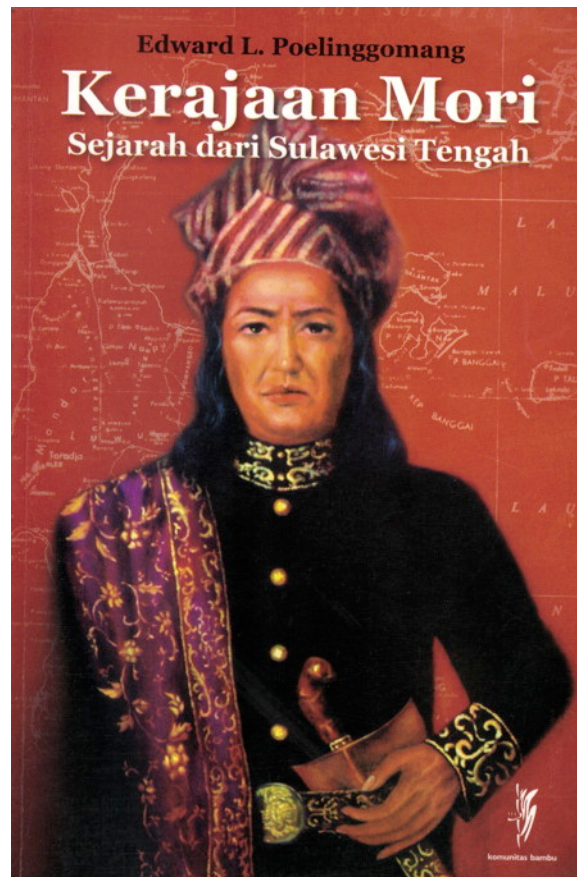


# LOBO

Annals of Sulawesi Research

2019

No. 3, Suplemen 3



Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah

This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



**LOBO/ York Centre for Asian Research  
2020**

**ISSN 2563-2418**

**diterbitkan ulang dengan permisi dari edisi pertama**

Edward L. Poelinggomang **Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah**  
(Jakarta: Komunitas Bambu, 2008) ISBN 979-3731-30-3 © Dhira Y. Marunduh/  
Murdan U. Marunduh

**Diterbitkan dengan bantuan**

**York Centre for Asian Research (YCAR)**

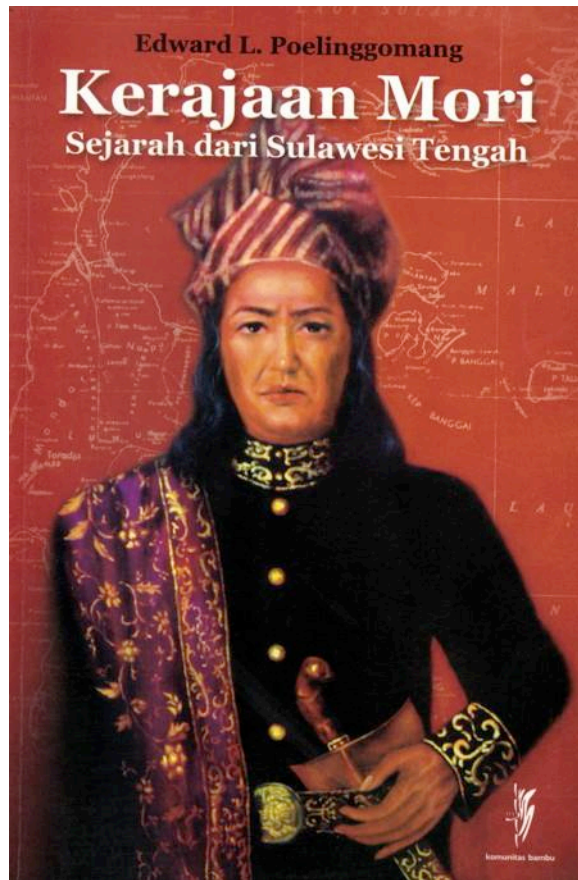
York University

Toronto, Canada

(<https://ycar.apps01.yorku.ca>)

# **Kerajaan Mori** **Sejarah dari Sulawesi Tengah**

Edisi Kedua



Oleh

*Edward L. Poelinggomang*

**LOBO:**  
Annals of Sulawesi Research

**Jilid 3 (2019)**

**Suplemen 3**

**DAFTAR ISI**

---

Glosarium	v
Pengantar Penulis	vi
Mars Wita Mori Teks Asli (1 April 1943)	xi
Terjemahan Teks Asli Mars Wita Mori ke Bahasa Indonesia	xii
Revisi Mars Wita Mori	xii
Peta Sulawesi	xiii
Peta Kerajaan Mori	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar dan Objek Penulisan	3
Catatan Metodologis	8
Pokok-Pokok Bahasan	11
<b>BAB II: MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>15</b>
Fakta Geografis	16
Gambaran Penduduk	19
Kehidupan Sosial-Ekonomi	23
Stratifikasi Sosial	27
Kehidupan Budaya Politik	32
<b>BAB III: PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN KERAJAAN</b>	<b>39</b>
Ligisa: Pemukiman dan Organisasi Pemerintahan Awal	40
Karua Moiki dan Mokole Wawontuko	43
Penyerangan Kerajaan Luwu: Tahun 1670	49
Struktur Pemerintahan Kerajaan (Awal)	53
<b>BAB IV: PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN</b>	<b>58</b>
Pusat Pemerintahan Baru: dari Wawontuko ke Pa'antoule	60
Pembenahan Organisasi Pemerintahan	64
Kehidupan Pemerintahan Setelah Sungkawawo	69

<b>BAB V: PERANG MORI PERTAMA DAN KESUDAHANNYA</b>	75
Persiapan Perang Mori Pertama, 1856	77
Jalannya Perang Mori Pertama	81
Kesudahan Perang Mori Pertama	92
Perjanjian Tompira	96
<b>BAB VI: PERANG MORI KEDUA DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA</b>	99
Pemberontakan Lagonda	100
Perlawanan Raja Marunduh Datu ri Tana (Perang Mori II)	104
Penataan dan Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial	121
Perubahan Politik dan Sosial	128
<b>BAB VII: TENTARA PENDUDUKAN JEPANG: 1942-1945</b>	134
Persiapan Menghadapi Serangan Militer Jepang	136
Perlawanan Terhadap Invasi Militer Jepang	138
Reaksi Perlawanan De Jong (Gerilya di Mori)	143
Pemerintahan Militer Jepang	158
<b>BAB VIII: PERJUANGAN KEMERDEKAAN</b>	167
Mori Pada Periode Perang Kemerdekaan	169
Mori Bergolak: Periode Negara Indonesia Timur	176
Republiken versus Federalis	185
Swapraja Mori Sesudah Raja Owolu Marunduh	196
<b>BAB IX: PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI</b>	200
Daerah Sulawesi Tengah	201
Pembentukan Kabupaten Morowali	204
Rencana Pemekaran Kabupaten Morowali	206
<b>EPILOG</b>	211
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	216
<b>Lampiran-Lampiran</b>	220
Lampiran No. 1: Silsilah Raja-Raja Mori	220
Lampiran No. 2: Surat Raja Mori kepada Menteri Kesehatan NIT (salinan)	220
Lampiran No. 3: Surat dari Para Kepala Kampung kepada Raja Mori (salinan)	220
Lampiran No. 4: Surat Permohonan M. Tumakaka, dkk (salinan)	222

Lampiran No. 5: Surat Gugatan kepada M. Rumampuo (Wakil Raja Mori) salinan	223
Tentang Penulis	227
Profil Penggagas	

## GLOSARIUM

ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
ARA	<i>Algemeen Rijksarchief</i>
BFO	<i>Bijeenkomst voor Federale Overleg</i>
Biro PPRI	Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia
BNI	Barisan Nasional Indonesia
BPM	<i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i>
BPR	Badan Perwakilan Rakyat
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BU	Budi Utomo
CAA	<i>Civil Affaire Agreement</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	Daerah Pengaliran Sungai
GKSS	Gerilya Kesatuan Sulawesi Selatan
IS	<i>Indische Staatsblad</i>
KMB	Konferensi Meja Bundar
KNIL	<i>Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger</i>
KPN	Kepala Pemerintahan Negeri - kontrolir
KPS	Kepala Pemerintah Swapraja - Raja
NICA	<i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
NIT	Negara Indonesia Timur
NZG	<i>Nederlandsch Zendeling Genootschap</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMT	Persatuan Mori Terpelajar
PPA	Perkumpulan Pembacaan Alkitab
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPPA	Perkumpulan Pemuda Pembaca Alkitab
RI	Republik Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
UU	Undang Undang

## Pengantar Penulis

Di penghujung tahun 2005, saya mendapat kunjungan dari seorang Bapak yang datang dari Jakarta yang belum saya kenal sebelumnya, namun ia tampaknya mengenal saya karena menyebut nama saya dengan lengkap. Saya menyambut kehadirannya dengan santun dan kami duduk sambil berbincang di ruang tamu. Ia kemudian membuka percakapan dengan memperkenalkan diri dengan nama Murdan U. Marunduh. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa ia mengetahui diri saya ketika membaca profil saya yang dimuat dalam koran Kompas dan sejak itu ia bertekad suatu saat nanti akan berusaha mengunjungi saya karena yakin bahwa sayalah orang yang ia pikirkan dapat memenuhi keinginannya kelak untuk menulis buku tentang Sejarah Kerajaan Mori.

Informasinya itu mengingatkan saya kembali pada saat saya diwawancarai oleh saudari Reny Sri Ayu Taslim yang dipublikasikan dalam koran Kompas edisi Sabtu 24 Mei 2003, pada halaman 12 dengan judul "Tak Rela bila Sejarah Terpotong-potong". Saya tersanjung dengan publikasi itu, namun kini menjadi terpukau seraya merenungkan apakah mungkin saya mampu merealisasikan makna dibalik judul tulisan itu, yang telah menghantar kehadiran tamu saya ini. Tidak dapat disangkal, dengan perkenalan awal itu mengisyaratkan kepada saya, kehadirannya ini pasti berhubungan dengan penulisan sejarah. Dugaan itu ternyata benar, karena beliau melanjutkan dengan memberitahukan tentang rencananya untuk melakukan penulisan Sejarah Kerajaan Mori. Sehubungan dengan itu, saya menghaturkan terima kasih kepada saudari Reny Sri Ayu Taslim dan Dewan Redaksi koran Kompas atas pemberitaannya.

Ketika disampaikan rencananya itu, saya tertegun seraya berusaha untuk mengingat-

ingat dan menghitung-hitung sumber sejarah yang telah saya miliki sambil mempertimbangkan apakah telah memadai untuk menerima tawaran penulisan sejarah tentang kerajaan itu. Tampaknya keinginan untuk menyusun buku sejarah tentang kerajaan itu sangat bergelora, sehingga saya diberi informasi bahwa Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan yang besar di pesisir timur Sulawesi dan baru dapat ditaklukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907. Namun informasi tentang kerajaan itu sangat kurang, dan hanya ada satu artikel dari seorang zendeling yang dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia, yaitu artikel dari Albert Christian Kruyt dengan judul Sejarah Kerajaan Mori. Saya yakin Bapak dapat memenuhi dan merealisasikan keinginan saya itu ucapnya.

Dengan santun saya menyampaikan bahwa saya telah mencoba untuk mengingat-ingat sumber sejarah yang saya miliki tentang kerajaan itu, namun tampaknya tidak memadai untuk memulai suatu kegiatan penulisan sejarah. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan menyangkut faktor utama yang mendukung suatu penulisan sejarah dan mencoba dengan santun menolak tawaran itu, tamu saya yang terhormat dan memiliki kesadaran sejarah yang kritis itu langsung menyela dengan menyatakan: "Bapak tidak perlu kuatir, Saya dan puteri saya, Dhira Yudini Marunduh (Dini), akan sepenuhnya membantu Bapak untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah menyangkut Kerajaan Mori". Pernyataan disertai dengan tekad yang membara ini menyentak saya untuk keluar dari keraguan dan menjadi yakin akan memperoleh sumber-sumber sejarah yang memadai guna menulis Sejarah Kerajaan Mori.

Sepuluh hari setelah pertemuan itu saya mulai mendapat kiriman paket pertama dari Jakarta yang berisi sumber-sumber Sejarah Kerajaan Mori, berupa buku, manuskrip

maupun artikel dan makalah. Pada minggu-minggu berikutnya paket-paket dari Jakarta terus berdatangan hingga semua sumber berhasil terkumpul. Dengan demikian pekerjaan yang saya lakukan adalah membaca, mengkritisi sumber, dan merangkaikan menjadi kisah sejarah. Karena itu dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Murdan U. Marunduh dan Dhira Y. Marunduh yang telah mengambil alih peran saya untuk melakukan kegiatan heuristik dengan sangat baik dan sempurna sehingga penulisan buku ini dapat terwujud.

Usaha untuk dapat menghimpun sumber sejarah Kerajaan Mori ini tidak luput dari jaringan kerja yang secara profesional dibangun oleh keduanya untuk memperoleh informasi tentang sumber sejarah. Pola yang dilakukan oleh Bapak Murdan U. Marunduh dan Dhira Y. Marunduh itu serupa tetapi tidak sama dengan sampel bola salju (*snowball sampling*). Jika teknik penentuan sampel ini dalam kegiatan penelitian ilmu sosial lainnya lebih tertuju pada gelindingan bola salju untuk mendapat informan yang dapat memberikan informasi menyangkut objek penelitian, maka dalam kegiatan heuristik yang dilakukan oleh Ayah dan puterinya ini tertuju kepada informan yang dapat memberikan informasi tentang sumber sejarah dan memungkinkan membantu untuk mendapatkan sumber sejarah yang diketahui oleh informan itu. Sehubungan dengan itu, tidak dapat disangkal andil informan sumber sejarah itu telah memungkinkan terwujudnya buku ini. Oleh karena itu kami patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: Ny. Agatha Parsidi, Sekretaris *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV) di Jakarta, Bapak Albert Jan Dekker LL.M., pustakawan *Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development*, Fakultas Hukum Universitas Negeri

Leiden, Belanda, Bapak Donald P. Tick, Sekretaris Pusat Dokumentasi Kerajaan-Kerajaan di Indonesia "Pusaka" di Vlaardingen, Belanda, Bapak Theo Tumakaka, mantan Pembantu Bupati Wilayah Kolonodale (1989-1992) atas informasi yang diberikan untuk melengkapi data penulisan buku ini, dan saudara Hendra Victoria Marunduh, pegawai pemerintah daerah Morowali di Kolonodale. Kami juga patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Sarnadi Adam, Dosen Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah membantu membuat lukisan foto Raja Mori X Tosaleko dan Raja Mori XI Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi sebagaimana terpampang dalam buku ini. Terima kasih dan penghargaan yang sama saya sampaikan pula kepada saudara Zudal Vianes atas bantuannya yang tulus memberikan fasilitas website bagi buku ini.

Saudara Hendra Victoria Marunduh, di samping mencari dan mengirimkan sumber-sumber sejarah, ia juga banyak membantu ketika saya, didampingi oleh penggagas penulisan buku ini, melakukan studi lapang ke Mori. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan pelayanan anda yang tulus dan santun. Kami juga patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Hosana Sarungallo Marunduh, yang melapangkan kami untuk mengunjungi Istana Kerajaan Mori seraya menjamu makan siang di istana itu dan memfasilitasi kami berkunjung ke bekas Benteng Matanda'u dengan melayari Sungai Laa serta mengunjungi makam Raja Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi di Sampalowo. Selama dalam penelitian lapangan ini, kami juga telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh Mori yang menerima kami dengan ramah dan bersedia memberikan informasi kesejarahan yang penting. Sehubungan dengan itu, kami



mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kumampu Marunduh, pensiunan Hakim di Kolonodale, dan Bapak L. Hambuako, SH, pensiunan Hakim yang saat ini berdiam di Beteleme. Dalam perjalanan pulang ke Makassar dari kegiatan penelitian lapang di Mori, kepenatan dan ketegangan menjadi sirna sama sekali berkat uluran tangan yang santun dan ramah dari keluarga Herman Tjuatja Dharma - Hosiana Marunduh di Soroako, yang telah menghantar kami ke pusat kegiatan pelayanan mereka yang indah dan menawan, "Rumah Makan Lesehan Lembololo", seraya memberikan pelayanan pada hidangan makan malam yang lezat.

Saya juga patut berterimakasih kepada Ibu Iwanah Marianne Marunduh-Talasa dan Saudari Sonia Natasha Marunduh atas dukungan moril dan doa demi terealisasinya penulisan buku ini. Juga kepada Ikatan Keluarga Owolu Marunduh dan Perkumpulan Keluarga Besar Marunduh Tumakaka (Martum) saya ucapkan terimakasih. Mudah-mudahan dengan selesainya penulisan buku ini dapat diterima sebagai pemenuhan secercah harapan yang dapat memberikan makna dalam melangkah dan menatap masa depan. Akhirnya saya juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang begitu banyak untuk disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan bagi penulisan buku ini, khususnya kepada seluruh masyarakat Mori yang begitu mendambakan adanya informasi kesejarahan mereka yang gemilang.

Rampungnya penulisan buku ini seperti yang kini dapat dibaca telah diperbaiki berdasarkan komentar dan saran oleh Bapak Murdan U. Marunduh (putra ke empat Pirau Marunduh, Wakil Raja Mori XIII, Mokole Owolu Marunduh), Bapak John Marunduh (putra sulung Bapak Pirau Marunduh) dan Bapak Theo Tumakaka (putera sulung A.K.

Tumakaka). Komentar dan saran bapak-bapak itu sangat bernilai dan telah saya perhitungkan dalam menata seluruh rangkaian penulisan kisah Sejarah Kerajaan Mori. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan dan bantuan bapak-bapak bagi perbaikan penulisan awal. Harapan saya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengenalan diri, bermakna bagi integrasi bangsa, dan pembangunan masyarakat Indonesia ke depan, khususnya rakyat Wita Mori.

Sejarah Kerajaan Mori menampilkan kisah yang unik dalam panggung sejarah Nasional Indonesia. Kerajaan ini tampil memikat dan memukau dengan prinsip perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negerinya. Penguasa kerajaan ini tidak rela bila kemerdekaan dan kedaulatan negeri dan rakyatnya terusik oleh pengaruh kekuasaan lain. Itulah sebabnya ketika Kerajaan Luwu berhasil menawan Raja Mori III, Ratu Wedange, dan putera mahkota kerajaan dan membawa mereka ke Palopo, ia menolak dipulangkan kembali sebagai ratu kerajaan taklukan (*palili*). Sikap itu mengisyaratkan bagi pejabat karua, pejabat kerajaan yang salah satu tugasnya adalah memilih dan mengangkat pengganti pemegang kendali politik kerajaan (raja atau ratu), memilih dan mengangkat Anamba menjadi Raja Mori IV, di luar campurtangan Kerajaan Luwu. Strategik politik ini dipandang sebagai cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Luwu. Itulah sebabnya kerajaan ini secara tegas menyatakan tidak pernah menjadi kerajaan *palili*, meskipun Kerajaan Luwu memandangnya pernah menjadi salah satu kerajaan *palilinya*.

Sikap yang serupa terungkap pula ketika pecah Perang Mori I, pada tahun 1856. Pemerintah Hindia Belanda mengirim satu pasukan ekspedisi yang besar dengan kekuatan

2.690 orang (tidak termasuk pasukan yang menjadi awak kapal) untuk menaklukkan kerajaan ini. Pengiriman pasukan ekspedisi yang besar itu berkaitan dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh pemegang kendali politik kerajaan ini yang tidak bersedia memenuhi tuntutan pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui kedudukan kekuasaannya. Meskipun jumlah pasukan ekspedisi ini sangat banyak, sekitar 45 kali lebih banyak dari pasukan pertahanan Kerajaan Mori yang bersiaga di benteng terdepan, Ensaondau, sementara jumlah pemberani Mori yang bertahan di benteng ini hanya 60 orang, namun ketika kurir yang dikirim oleh pasukan ekspedisi Hindia Belanda itu menyampaikan pesan untuk menyerah, dijawab dengan tantangan untuk berperang. Setelah kurir itu kembali, pasukan pemberani kerajaan Mori mulai memukul genderang perang dan pertempuran sengit pun berkobar. Dalam pertempuran itu pihak pasukan pemberani Mori patut mengakui keunggulan kekuatan militer Hindia Belanda, bukan karena jumlah personilnya yang jauh lebih banyak, tetapi lebih kepada tembakan-tembakan mortir yang mencapai sasaran dan memporakporandakan pertahanan di benteng itu, benteng Ensaondau. Akhirnya Sangaji, panglima perang Mori mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Pernyataan menyerah dari Sangaji itu tidak dapat diterima oleh dua orang pemberani yang diutus oleh raja membantu pasukan pertahanan benteng Ensaondau, karena sikap itu bertentangan dengan perintah raja untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu mereka melakukan tindakan amuk untuk membunuh penduduk di benteng Ensaondau. Untung ketika itu komandan ekspedisi telah mengirim satu regu pasukannya untuk mengibarkan bendera di benteng itu dan menjaganya, sehingga mereka dapat mengam-

bil tindakan menembak mati pelaku amuk itu sehingga hanya sejumlah orang yang mati terbunuh oleh pengamuk.

Tragedi yang unik ini mendorong komandan ekspedisi meminta penjelasan dari Sangaji, panglima pasukan pemberani Ensaondau. Sangaji menginformasikan bahwa para penguasa dan rakyat Mori pantang menyatakan menyerah apabila telah terlibat dalam perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaannya. Patut diakui bahwa informasi ini juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh komandan ekspedisi untuk mengakhiri perang, tanpa bergiat lebih lanjut untuk memaksa pemegang kendali politik kerajaan ini menyatakan takluk dan tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Prinsip pantang menyerah dalam perang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan dan rakyat itu dibuktikan lagi dalam Perang Mori II. *Casus belli* perang ini adalah tindakan tegas dari raja yang memerintahkan rakyatnya untuk membunuh semua personil militer Belanda yang ditugasi mengawasi kerja rodi pembuatan jalan raya di Mori, pada tahun 1907. Hal itu mendorong pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukan marsose untuk memerangi dan menaklukkan Kerajaan Mori. Dalam perang ini Raja Mori XI, Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi bersama para *tadulako* dan pasukan pemberaninya yang tampil dengan gagah perkasa melakukan perlawanan dan berperang tanpa mengenal menyerah hingga gugur sebagai pahlawan kesuma bangsa. Gugurnya para patriot kemerdekaan, kedaulatan Kerajaan Mori ini mengakhiri kehidupan politik kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan Mori akhirnya diduduki oleh pasukan militer Hindia Belanda dan dijadikan bagian dari wilayah

kolonialnya, dengan predikat sebagai swapraja (*zelfsbestuur landschap*).

Keunikan kisah sejarah kerajaan ini secara detail dapat dibaca dalam buku ini. Saya berharap buku ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang memadai bagi keinginan untuk mengenal dan memahami masyarakat Mori dalam proses kesejarahannya dan dapat memetik pelajaran berharga untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan masyarakat Mori pada khususnya. Mudah-mudahan buku ini dapat menyumbang informasi yang berharga bagi penulisan sejarah nasional Indonesia yang kita cintai yang diperkaya dengan sejarah daerah yang belum masuk dalam sejarah nasional. Akhirnya dengan penuh suka cita, saya ingin mempersembahkan buku ini kepada Bapak Murdan U. Marunduh dan Saudari Dhira Y. Marunduh yang telah tampil bagaikan seorang sejarawan profesional dalam menjejaki, mencari, hingga memperoleh sumber-sumber sejarah bagi penyelesaian penulisan buku ini. Walaupun demikian, semua kesalahan dan kekeliruan dalam buku ini sepenuhnya adalah tanggungjawab saya selaku penulis.

# Mars Wita Mori

(Teks Asli)

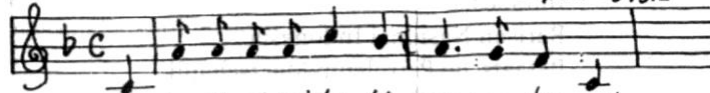
## Wita Mori.

Ragam dan Sjaiz oleh:

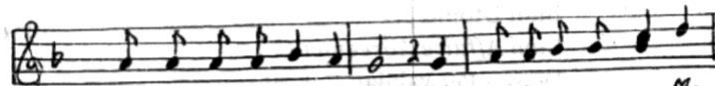
A.K. TOMARAKA.

1 April 1943.-

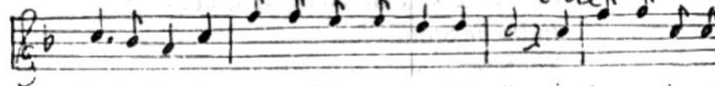
TEKS ASLI



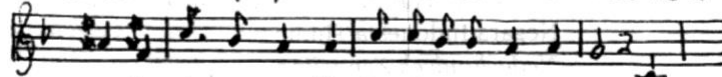
1. Wi ta Mori Wi ta hi na a ku Wi-
2. To mpe te nu nu mo ndi C nda e Mo-
3. Do tu wu me la i Mo ko le to Sa-



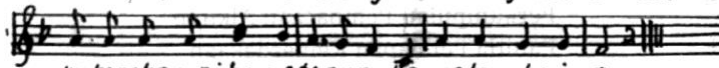
ta ki ne ke wo i ku Nde. po i a nga do Mo-  
 ko le Wa wa I ni a To mengkoia ha ko no  
 ru wi ta ka pa li li Ondse At-ko ngko-  
 e Uēh



ko le to Sa ru ita pa li li i tu u i mo  
 kole Sa ru mi a mo ta u ku i tu a i mo  
 wita to ka ne e do Mo ko le to Tompe dandi bi-  
 mido I a pe pa re nta a do ka i ka na mo ke u-



pe nta de a ku Me ka ri a o ne e no A  
 a Sa a zo a Tu wu me te me mo ro ko Me  
 no a pa li mo tu ngko te bangku ano kai



ku kongko mpi ha me te nu nu ka me langka i o  
 rumpi a ko i ra U e to Sa ru Wi ta Mo ri  
 ka na tu u mo pe re ut do me nta de mo ro so

## **Mars Wita Mori**

(Terjemahan bebas dari Teks Asli ke Bahasa Indonesia)

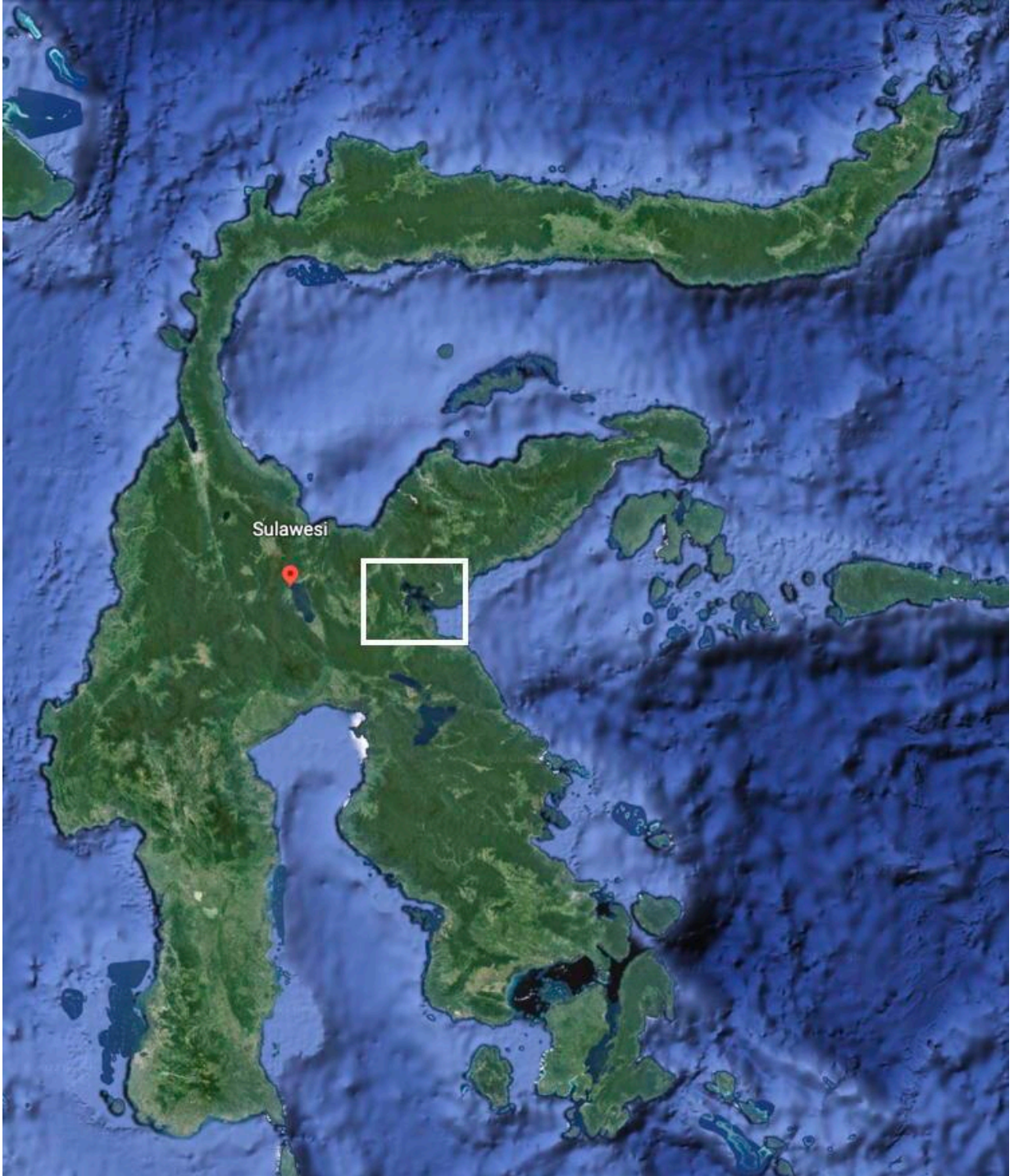
1. Tanah Mori tempat kelahiranku  
Tanah yang aku cintai  
Karena tempat Rajaku  
Serta orang tuaku  
Disanalah aku berdiri  
Menjaga namanya  
Aku tetap setia  
Dan menghormatinya
2. Setialah kepadanya  
Raja yang memimpin negeri  
Pertahankanlah tanah air kita  
Serta nama Raja  
Mari kita berjanji: bersatu hati  
Hidup dan mati kita bersama-sama  
Bersama-sama dengan Raja kita  
Dan Tanah Mori
3. Kiranya umur panjanglah Raja kita  
Seluruh tanah dan rakyatnya  
Tuhan menolong dia  
Didalam pemerintahanya  
Bagaikan sebatang pohon beringin  
Sukar ditumbangkan  
Demikianlah hendaknya  
Berdiri dengan teguh

## **Mars Wita Mori**

(Revisi dari teks asli oleh A.K Tumakaka di Manado tanggal 1 Agustus 1962 dan versi revisi inilah yang dinyanyikan sampai sekarang)

1. Wita Mori wita hinaaku  
Wita kinekewoiku  
Nde po'iangado pe'etuku  
Saru mia mota'uku  
Itu'aimo pentadeaku  
Mekariao neeno  
Aku kongko mpiha metenunu  
Ka melangkaio
2. Topada mambe'o'orimami  
A nsusa manangaia  
To mengkorahakono witato  
Saru pepe'etuato  
Tompedandi te'asa aroa  
Tuwu mate memoroko  
Merumpiakono Wita Mori  
Sintuwu moroso
3. Topada mentuwu melai  
Saru wita kapalili  
Ondae i Ue kongkomito  
Ia posintuwuato  
Kai kanamo keuno apali  
Motungko tebangkuano  
Kai kanatuumo sintuwuto  
Wita Indonesia

# PETA SULAWESI





## BAB I

# PENDAHULUAN

Penulisan sejarah pada umumnya dan penulisan sejarah lokal pada khususnya tidak dapat dipisahkan dengan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah menunjuk pada pandangan tentang sejarah dan dunia, sikap harga diri dan motivasi untuk menentukan arah dan proses kesejarahan serta dinamika sejarah. Kesadaran ini pada gilirannya mendorong kegiatan untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah, karena merangsang kesadaran untuk menempatkan diri terlibat dan turut bertanggungjawab baik dalam pembuatan sejarah maupun dalam penulisan sejarah. Berpangkal pada kesadaran inilah, Taufik Abdullah menyatakan bahwa kesadaran sejarah menunjuk pada kesadaran diri. Kesadaran diri itulah yang pada gilirannya mendorong Murdan U. Marunduh dan Dhira Y. Marunduh mengupayakan kegiatan penelitian dan penulisan Sejarah Kerajaan Mori.

Upaya penelitian dan penulisan sejarah itu didasarkan atas kesadaran bahwa sejarah dapat menuntun kita dalam mengatasi kabut kegelapan, ketidakmengertian yang meliputi kekini-

an, proses pemikiran yang digunakan orang untuk mengerti diri sendiri dalam kerangka waktu, kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tampak kemudian merupakan proses yang dialami dalam perjalanan waktu, dan masa lampau bermakna bagi pembangunan masa depan. Dalam hubungan inilah Moh. Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama menyatakan, dalam pidatonya pada waktu Kongres Pemuda tahun 1955 “marilah kita mengambil pelajaran masa lampau untuk membangun masa depan yang lebih baik”. Hubungan dan percakapan yang dilakukan dengan masa lampau melahirkan ulasan, tafsiran, dan penjelasan untuk menyimak makna masa lampau bagi kepentingan kekinian. Dalam hubungan inilah Edward Halett Carr merumuskan pengertian sejarah adalah percakapan yang tiada putus-putusnya antara masa kini dengan masa lampau, suatu hubungan yang tiada berkesudahan antara sejarawan dan sumber-sumber yang memberikan informasi



tentang masa lampau.<sup>1</sup>

Dalam hubungan ini pula, meskipun Sejarah Nasional Indonesia telah dipublikasikan (enam jilid) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975, namun dalam perkembangan akhirakhir ini (2004) kembali diprogram untuk melakukan penelitian dan penulisan ulang. Hal itu bukan hanya berkaitan dengan persoalan metodologis seperti yang dilontarkan oleh Bambang Purwanto,<sup>2</sup> atau juga perbaikan data, fakta, dan penjelasan yang berpihak yang disinyalir oleh Asvi Warman Adam dengan gagasan pelurusan sejarah.<sup>3</sup> Persoalan yang menurut saya sangat penting harus dilakukan terdahulu adalah meneliti dan mengungkapkan proses kesejarahan masyarakat Indonesia yang masih belum terjamah dalam penulisan sejarah lokal di Indonesia. Penelitian dan penulisan sejarah lokal dapat menyumbangkan informasi kesejarahan yang berharga bagi penyusunan sejarah nasional.

Penulisan sejarah nasional pada dasarnya bukan kumpulan dari sejarah-sejarah lokal. Di lain pihak adalah tidak wajar apabila proses kesejarahan suatu masyarakat dijadikan landasan generalisasi untuk kesatuan masyarakat lainnya. Keanekaragaman latar kesejarahan dan kebudayaan bangsa kita sejak awal pembentukan negara ini diakui, dan disimbolkan dengan *bhineka tunggal ika*. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki wilayah yang luas, mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang

terbentang dari timur ke barat yang berjumlah 17.508 pulau,<sup>4</sup> dahulu terdapat sejumlah besar kesatuan pemerintahan (kerajaan) yang merdeka dan berdaulat sebagai satu negara. Kesatuan pemerintahan itu, yang disebut kerajaan membangun tatanan politik, kehidupan sosial dan budaya, dan sistem ekonomi tersendiri, yang berbeda dengan yang lainnya.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini, menurut Koentjaraningrat, menyimpan sejumlah sumber-sumber konflik antara suku bangsa atau golongan. Sumber konflik yang dirumuskannya adalah: pertama, konflik dapat terjadi kalau warga dari satu suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencarian hidup yang sama; kedua, konflik juga dapat terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suku bangsa lain; ketiga, konflik yang sama dasarnya, tetapi lebih fanatik dalam wujudnya, dapat terjadi kalau warga dari satu suku bangsa memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama; keempat, konflik jelas akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politik dan kelima adalah potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku bangsa-suku bangsayang telah bermusuhan secara adat.<sup>5</sup> Pada sisi lain para ilmuwan sosial tentang konflik mengungkapkan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kon-

---

<sup>1</sup> Edward H. Carr, *What is History?* (Harmonsworth: Pelican Books, 1965), hal. 29. Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan, Makassar 1906-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hal. vi-vi.

<sup>2</sup> Bambang Purwanto, "Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiograf: Sebuah Otokritik", dalam: Nursam, (ed), *Menggugat Historiograf Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hal. 1-58.

<sup>3</sup> Asvi Warman Adam, "Pelurusan Sejarah dan Historiografi Alternatif", dalam: Nursam (ed), *op.cit.*,

hal. 59-136.

<sup>4</sup> Sarwono Kusumaatmadja, "Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil", dalam: Sudibyakto, dkk (peny.), *Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2000), hal. 2.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, "Aneka warna manusia dan kebudayaan Indonesia dalam Pembangunan", dalam: Koentjaraningrat, (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1975), hal. 377-378.

flik, seperti Ralf Dahrendorf yang menekankan (1) kondisi teknis meliputi tampilnya seorang pemimpin dan pembentukan ideologi, (2) kondisi politik dengan menekankan unsur kebebasan, dan (3) kondisi sosial dengan menekankan tingkat komunikasi antar anggota kelompok.<sup>6</sup>

Kondisi politik negara kita yang menganut paham demokrasi dengan sendirinya melapangkan unsur kebebasan, baik dalam kebebasan berkumpul, menyampaikan pikiran, dan berpolitik maupun kebebasan dalam bidang lain, seperti kebebasan beragama, dan membentuk lembaga sosial-budaya. Faktor kebebasan dalam kehidupan politik demokrasi ini dengan sendirinya melapangkan peluang terjadinya konflik. Kondisi negara kita pada dasawarsa akhir milenium kedua dan memasuki dasawarsa pertama milenium ketiga tampak diwarnai dengan panorama konflik etnis, seperti yang terjadi di provinsi Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam kondisi yang demikian sering muncul dalam pikiran kesalahan sejarah apakah yang telah diperbuat sehingga bangsa yang dikenal murah senyum, sangat toleransi dan simpatik itu berubah menjadi garang dan anarkhis. Apakah hal itu terjadi karena kita telah melupakan sejarah sehingga kebersamaan, persatuan, dan keutuhan yang telah dibangun dalam kurun waktu yang cukup lama itu telah memudar atau karena kita tidak memiliki lagi pengetahuan tentang

kearifan lokal dan proses kesejarahan masyarakat kita pada masa lampu sehingga kondisi-kondisi yang memungkinkan letupan konflik yang keras tidak dapat dikelola demi mencegah terjadinya kekerasan konflik.

Dalam kondisi yang demikian, usaha untuk meneliti dan mengkaji proses kesejarahan dinamika internal kelompok masyarakat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita sangat diperlukan. Konflik-konflik internal yang terjadi di berbagai negara di dunia setelah Perang Dunia II, seperti yang diungkapkan para pakar yang merampungkan buku pedoman bagi para negosiator,<sup>7</sup> bersumber dari berbaurnya konsep-konsep identitas, bangsa, dan nasionalisme yang berakar pada persaingan dalam memperebutkan sumber daya, pengakuan, dan kekuasaan. Rekonstruksi sejarah dari kelompok masyarakat dapat memperjelas identitas kelompok itu dan proses kehidupan politik, sosial, dan budaya dalam membangun integrasi, solidaritas, dan simpati dalam kelompok dan hubungan bilateral dan kerjasama dengan kelompok lain. Selain itu juga dapat mengungkapkan proses penanganan konflik internal dan eksternal, baik melalui tindakan peredaman dan penyelesaian maupun melalui proses pengelolaan konflik.

## Latar dan Objek Penulisan

Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berkembang sekitar abad ke-16.<sup>8</sup> Wilayah kerajaan ini sekarang menjadi

<sup>6</sup> Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 186-187.

<sup>7</sup> Baca: Peter Harris dan Ben Reilly, (ed.), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator* (Stockholm: IDEA, 2000).

<sup>8</sup> L. Tolesa, "Sejarah Hadat Kebudayaan To Ngusumbatu" (Tinompo: Makalah Seminar Adat Kebudayaan

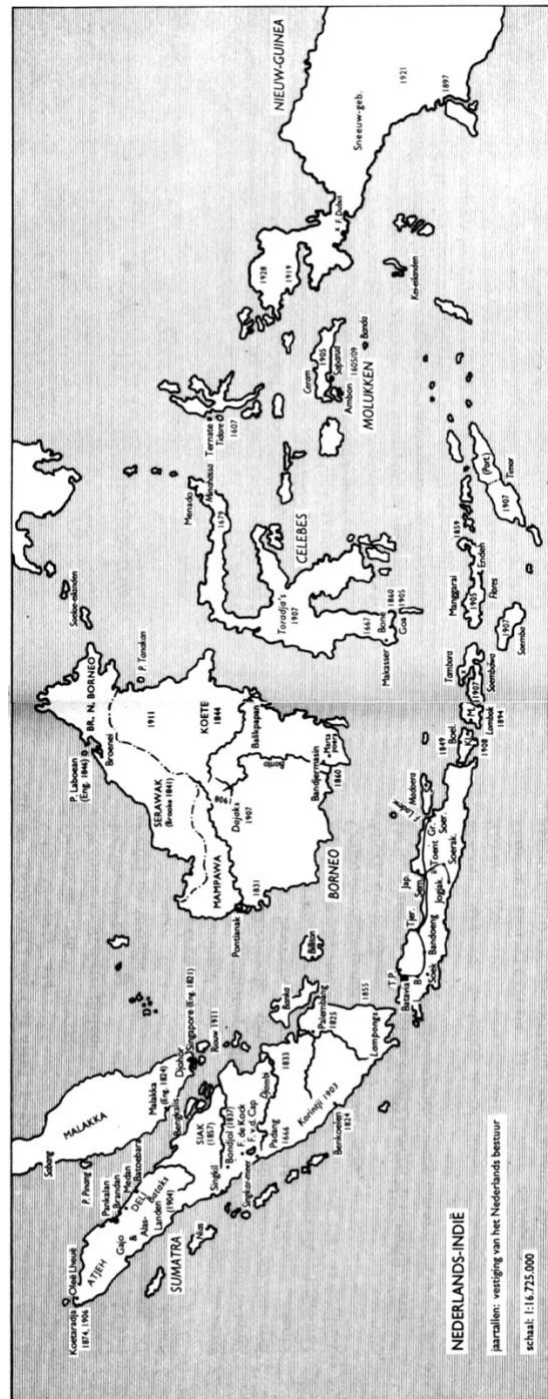
To Ngusumbatu, 15 September 1993), hal. 4. Sementara Romus M. Kalaena memperkirakan Kerajaan Mori telah terbentuk pada abad ke-14, baca: Romus M. Kalaena, "Perang Wulandari (Agustus 1907)" (Palu; Skripsi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, 1995), hal. 26. Informasi ini sepaturnya dipandang tentatif, dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

bagian dari wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayahnya terletak pada pesisir timur, pada silangan jazirah tenggara dan jazirah timur laut Pulau Sulawesi, yang membentuk Teluk Tolo, yang juga dikenal dengan sebutan Teluk Tomori. Dipandang dari letaknya, wilayah ini strategis bagi kegiatan perdagangan, karena memiliki wilayah laut yang aman dari muson barat laut yang ganas.

Jika kita membuka pustaka untuk mempelajari sejarah Kerajaan Mori baik menyangkut perkembangan politik, sosial, dan budaya masyarakat, maka kesan yang muncul adalah daerah ini terabaikan dari penelitian ilmiah, atau dengan kata lain tidak ada karya anak bangsa Indonesia tentang kerajaan ini. Salah satu karya dalam bahasa Indonesia yang dapat dibaca hanyalah sebuah terjemahan dari karangan misionaris Belanda dari lembaga *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (NZG, Lembaga Misionaris Belanda), yaitu tulisan dari Albert C. Kruyt yang berjudul *Het Rijk van Mori*.<sup>9</sup> Tulisan Kruyt ini (29 halaman) hanya memberikan informasi yang penting tentang fakta geografi wilayah kerajaan dan diskripsi singkat tentang keadaan sosial, budaya, religi, dan keadaan politik pada periode kunjungannya, yaitu pada tahun 1899. Patut disadari bahwa tulisan Kruyt itu bukan dimaksudkan untuk menulis tentang sejarah Kerajaan Mori, tetapi merupakan laporan tentang kunjungannya ke kerajaan itu dalam hubungan dengan tugas yang diembankan kepadanya sebagai seorang Misionaris.

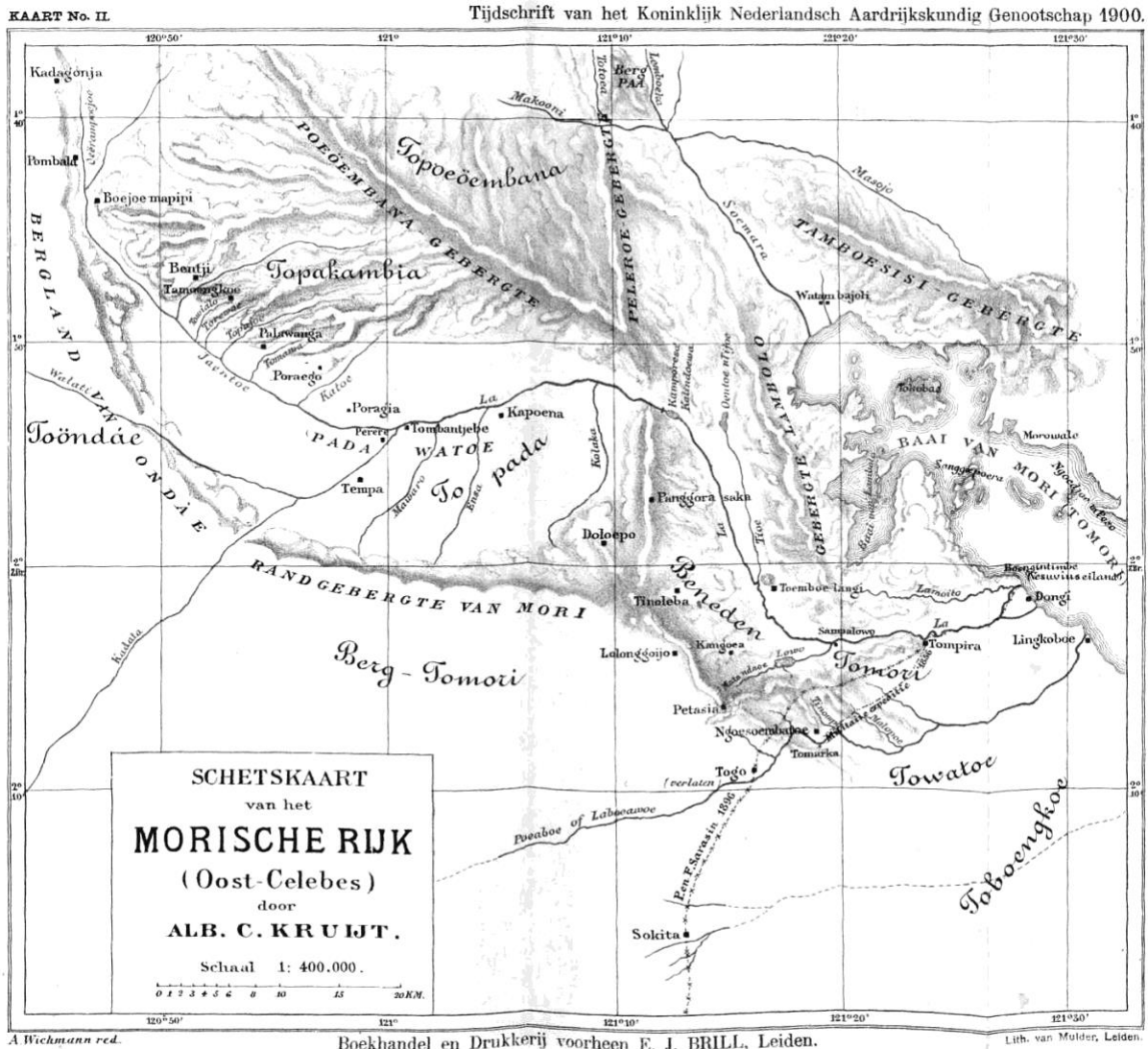
Informasi ringkas tentang Kerajaan Mori dapat juga dibaca dalam buku *Sejarah Poso*.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tim penulis buku itu

Kepulauan Nusantara: 1620-1801 awalnya menjadi wilayah dagang VOC tetapi setelah 1801-1942 menjadi wilayah jajahan Belanda.



<sup>9</sup> Tulisan itu diterjemahkan oleh B. Panjaitan dan diterbitkan oleh Yayasan Idayu. Albert C. Kruyt, *Kerajaan Mori* (Jakarta: Idayu, 1979).

<sup>10</sup> Hasan, dkk. *Sejarah Poso* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hal. 79-81.



memandang dan menempatkan wilayah kerajaan ini sebagai bagian dari wilayah Poso, yang pada gilirannya dapat menunjukkan dan dipandang bagian dari Kerajaan Poso. Sebenarnya Kerajaan Mori adalah satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh dan dalam perkembangannya tidak berada dalam pengaruh kekuasaan kerajaan lain tetapi memiliki hubungan politik dengan kerajaan lain. Dalam buku Sejarah Poso tersebut, ditampilkan informasi yang memberikan kesan yang timpang dengan menyatakan bahwa “kerajaan Wita Mori berasal dari pengembangan Kerajaan

Luwu”<sup>11</sup> Pernyataan itu menunjukkan bahwa wilayah kerajaan ini bukan hanya berada dalam pengaruh kekuasaan tetapi juga menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi kesejarahan tentang Sejarah Kerajaan Mori tidak didasarkan pada kegiatan penelitian yang dilakukan secara saksama dan ilmiah.

Suatu usaha kompilasi yang mengungkap informasi kesejarahan dan budaya masyarakat Mori adalah karya William Friets Taroreh<sup>12</sup> yang diberi judul “Himpunan bahan tentang negeri dan kepahlawanan rakyat Mori

<sup>11</sup> Ibid. hal. 80.

<sup>12</sup> W.F. Taroreh, “Himpunan Bahan tentang negeri dan

kepahlawanan rakyat Mori (Sulawesi Tengah) melawan Penjajah” (Meno: Manuskrip, 1992).

(Sulawesi-Tengah) melawan Penjajah” Karya ini tampak dikerjakan setelah ia pensiun dari keanggotaan kepolisian dengan pangkat Kolonel Polisi. Usaha dan karyanya diawali dengan menerjemahkan sejumlah karangan berbahasa Belanda tentang sejarah dan budaya masyarakat dan diakhir dari manuskrip ini dimuat satu makalah yang ia presentasikan dalam Seminar Tentang Kepahlawanan Rakyat Mori yang diselenggarakan pada tahun 1992 dengan judul: “Kepahlawanan Suku Bangsa Mori Dalam Perang Ensaondau dan Wulanderi Sebagai Bagian dari Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan Belanda.” Bila diperhatikan judul-judul artikel dan bab-bab tertentu dari buku berbahasa Belanda yang diterjemahkan itu, tampak bahwa ia mendambakan adanya usaha penelitian dan penulisan sejarah kerajaan itu. Dukungan dan sumbangan yang dapat diberikan adalah memanfaatkan kemampuan Bahasa Belanda yang dimilikinya untuk menyediakan bahan referensi bagi peneliti sejarah yang tidak dapat membaca sumber-sumber berbahasa Belanda.

Meskipun karya tulis tentang sejarah kerajaan ini belum ada, namun sejumlah tulisan dalam edisi bahasa Belanda dapat membantu untuk merekonstruksi dan mengungkapkan kembali sejarah kerajaan itu. Salah satu karya yang cukup memikat perhatian adalah studi etnograf yang dilakukan oleh J. Kruyt dan diterbitkan dalam *Bjidragen tot de Taal-Landen Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*.<sup>13</sup> Karya ini memuat berbagai catatan etnograf, baik menyangkut sejarah, dengan berbagai versi yang berkembang khususnya menyangkut awal pembentukan kerajaan yang diwarnai dengan legenda dan mitos, maupun

tentang pembentukan komunitas Mori, hukum yang berlaku pada masyarakat hukum adat), kegiatan pertanian, dan upacara kematian.

Selain itu karya Michiel Hegener<sup>14</sup> tentang perlawanan terhadap tentara Jepang di Kerajaan Mori tidak hanya merekonstruksikan gerakan perlawanan pada waktu pendudukan Jepang, tetapi juga mengungkapkan secara singkat usaha pemerintah Hindia Belanda menduduki daerah itu dengan mengirimkan ekspedisi penaklukan pada 30 Mei 1856 dan ekspedisi kedua pada 19 Mei 1907. Ekspedisi pertama ini, dalam berbagai penulisan disebut Perang Ensaondau, namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa perang yang terjadi itu merupakan perang penaklukan Kerajaan Mori, sehingga dalam penulisan ini dinyatakan dengan Perang Mori I. Ekspedisi militer Belanda itu dilakukan berkaitan dengan kepentingan ekonomi pemerintah Hindia Belanda setelah menetapkan sejumlah pelabuhan niaga di wilayah Hindia Belanda bagian timur menjadi pelabuhan bebas-wilayah bagian timur ini kemudian dalam pengaturan wilayah pemerintahan pada 1938 dinyatakan menjadi satu provinsi dengan sebutan *Gouvernement van Grote-Oost* (Provinsi Timur Besar). Oleh karena itu, meskipun pasukan ekspedisi militer tahun 1856 berhasil menduduki daerah Tompira dan merebut Benteng Ensaondau, namun dengan pertimbangan tertentu, ekspedisi militer itu dihentikan tanpa membuahkan hasil untuk menaklukan kerajaan ini. Jika dicermati laporan militer tentang ekspedisi ini yang ditulis oleh L.H.W.M. de Stuers yang berjudul *De Expeditie tegen Morie, op de Oostkust van Celebes (April-Juli 1856)*, menunjukkan bahwa penghentian ekspedisi penaklukan itu

<sup>13</sup> J. Kruyt, “*De Moriers van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes)*”, dalam BKI (No. 80, 1924), hal. 8-213. Diterjemahkan di LOBO 2019 3(S2) “*To Mori dari Tinompo: Sulawesi Tengah Timur*”

<sup>14</sup> Michiel Hegener, *Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de Tweede Oorlog*. (Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1990).



didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.

Pertimbangan kemanusiaan yang menjadi alasan penghentian ekspedisi penaklukan itu didasarkan pada kenyataan: pertama, dua pertiga dari para kuli yang mengangkut barang-barang logistik dan peralatan perang jatuh sakit, kedua, ekspedisi ini berlangsung pada musim hujan sehingga sulit untuk bergerak menguasai seluruh wilayah kerajaan dan memaksa penguasa kerajaan takluk kepada pemerintah Hindia Belanda; ketiga, tidak memiliki informasi yang baik tentang medan perang. Selain faktor-faktor ini, dengan menelusuri secara cermat laporan militer tentang ekspedisi ini tampak bahwa ada sejumlah alasan tambahan penghentian ekspedisi penaklukan ini, antara lain: pertama, orang Mori memiliki keahlian memasang ranjau, sehingga di semua lini pertempuran pasti telah dipasang ranjau; kedua, kenyataan yang dialami dalam perang perebutan Benteng Ensaondau menunjukkan bahwa mata panah dan sumpitan sangat berbahaya karena beracun; ketiga, menurut informasi yang diperoleh dari Sangaji, kepala pasukan di benteng itu yang menyerah, bahwa penguasa Mori sangat sulit diajak berdamai apabila telah terlibat dalam perang, dan, keempat juga diungkapkan bahwa taktik dan strategi yang dilakukan oleh penguasa bila daerah kedudukannya diserang adalah mengundurkan diri dari kampung ke kampung untuk memancing lawan terus mengejarnya hingga memasuki daerah pedalaman dan kemudian menyerang balik secara bergerilya. Patut diakui bahwa pengalaman awal dalam perang perebutan benteng pertahanan Ensaondau dan informasi dari Sangaji itu juga telah menjadi bahan pertimbangan militer Belanda untuk menghentikan tindakan penaklukan. Gambaran ini memberikan kesan bahwa ada keraguan akan keberhasilan memaksa penguasa kerajaan ini takluk dan tunduk pada

kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan bahkan pertimbangan kemungkinan korban jiwa di pihak pasukan ekspedisi akan semakin bertambah banyak apabila diteruskan ekspedisi penaklukan.

Meskipun ekspedisi ini tidak berhasil memaksa penguasa kerajaan itu untuk tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda dan dihentikan, namun direkayasa bukti untuk menyatakan bahwa wilayah ini merupakan daerah kekuasaannya karena telah ditaklukan, yaitu dengan mengibarkan bendera Belanda di Tompira dan di Benteng Ensaondau. Metoda pembuktian ini yang umum digunakan oleh para pengembara dan pedagang dari Eropa untuk menyatakan bahwa wilayah itu telah menjadi miliknya karena telah lebih dahulu mengibarkan bendera negaranya di wilayah itu, meskipun tidak pernah menaklukannya. Pengibaran bendera itu menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi daerah kekuasaannya, meskipun Kerajaan Mori tetap menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat dan tidak pernah ditaklukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sementara ekspedisi kedua yang berlangsung pada tahun 1907 berkaitan dengan kebijakan Gubernur Generaal Joannes Benedictus van Heutsz (1904-1909) yang merencanakan penguasaan secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda dengan kebijakannya yang disebut “Politik Perdamaian” (*Pacificatie politiek*). Dalam hubungan dengan itu, dikirim ekspedisi militer ke Sulawesi pada Juni 1905, ekspedisi militer itu disebut *Zuid-Celebes Expeditie* (Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan). Ekspedisi ini mendapat tugas menaklukan dan menguasai semua kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat dan memaksakan penguasa kerajaan untuk menandatangani “pernyataan pendek” (*korte verklaring*). Tampaknya perintah itu hanya untuk wilayah

*Gouvernement van Celebes en Onderhorigeden*. Itulah sebabnya pasukan yang dikirim untuk menaklukan Poso pada 03 Oktober 1905 dan kemudian Kerajaan Mori pada 19 Mei 1907 tidak memaksa kerajaan ini menandatangani pernyataan pendek tetapi memberikan status kedudukan kerajaan taklukan itu wilayah pemerintahan swapraja (*zelfbesturende land-schappen*). Peristiwa itu dalam penulisan ini disebut Perang Mori I, karena perang ini merupakan perang perlawanan rakyat wita Mori terhadap rencana penaklukan pemerintah Hindia Belanda. Dalam beberapa tulisan terdahulu peristiwa itu disebut Perang Wulanderi.

Ketiadaan buku menyangkut sejarah kerajaan ini dan tersedianya informasi dari para ilmuwan dan pejabat pemerintah kolonial, skripsi, dan makalah<sup>15</sup> serta dorongan untuk memperoleh buku sejarah yang memadai, mendorong usaha penelitian dan penulisan sejarah kerajaan ini. Penulisan ini dimaksudkan untuk menghasilkan buku tentang perkembangan kerajaan itu dari awal hingga kerajaan itu meleburkan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dengan kata lain hingga berakhirnya periode pemerintahan kerajaan, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dengan demikian batasan temporal penulisan buku ini bermula sejak terbentuknya kesatuan pemerintahan yang disebut Kerajaan Mori dan berakhir ketika status swapraja berakhir pada tahun 1957. Namun dengan mempertimbangkan agar dapat memberikan informasi tentang keadaan wilayah bekas Kerajaan Mori dalam perkembangan terakhir ini, maka dalam penulisan ini juga diungkapkan secara ringkas sejarah pembentukan Kabupaten Morowali, yang wilayahnya meliputi wilayah bekas kerajaan itu.

Penulisan yang demikian dalam ilmu sejarah disebut sejarah total. Sejarah total menunjuk pada usaha rekonstruksi sejarah jangka panjang dengan menelusuri awal pembentukannya pada masa lampau hingga pada masa berakhirnya. Penelusuran sejarah jangka panjang itu menuntut pula penelusuran berbagai aspek yang mendasari perkembangannya dan proses perubahan yang terjadi. Dalam hubungan dengan itu perhatian diarahkan juga untuk mengungkapkan dan menjelaskan kondisi-kondisi internal dan eksternal serta aspek-aspek sosial, kultural, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap proses perkembangannya.

Sehubungan dengan itu, buku ini diawali dengan memaparkan dan menjelaskan proses awal pembentukan masyarakat dan pembentukan pemerintahan kerajaan. Selanjutnya direkonstruksi perkembangan kerajaan dengan mengungkapkan dan menjelaskan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan. Dalam pokok pembahasan ini diungkapkan dan dijelaskan pula usaha awal pemerintah kolonial Belanda untuk menaklukan (1856) dan proses pekabaran Injil (1899) di kerajaan ini. Kedudukan kerajaan ini sebagai satu negara tidak dapat terus dipertahankan karena dalam perkembangan kemudian pihak pemerintah kolonial Belanda berhasil menaklukan dan menjadikan bagian dari wilayah kolonialnya (1907). Periode pemerintahan kolonial Belanda ini (1907-1942) berakhir ketika tentara pendudukan Jepang berhasil merebut wilayah kolonial Belanda pada tahun 1942. Periode pendudukan Jepang (1942-1945) berlangsung singkat, karena pada 15 Agustus 1945, kekaisaran Jepang menyatakan kapitulasi terhadap pihak Sekutu, setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 06 Agustus 1945 dan

---

<sup>15</sup> Buku, artikel, skripsi, dan makalah menyangkut daerah ini, lihat dalam daftar pustaka.

Nagasaki 09 Agustus 1945.<sup>16</sup> Periode Jepang ini dijadikan bagian dari pembahasan khusus, karena kehadiran tentara pendudukan Jepang itu mendapat perlawanan yang keras di daerah ini dengan aksi gerilya hingga memasuki proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diikuti dengan pembentukan negara Republik Indonesia.

Pada periode kemerdekaan ini diungkapkan dan dijelaskan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik pada awal proklamasi kemerdekaan, maupun ketika wilayah itu menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT). Selain itu ditelusuri dan diungkapkan pula pergolakan politik yang terjadi dalam hubungan dengan penataan pemerintahan Swapraja Mori hingga kedudukannya itu berakhir. Sesungguhnya status daerah swapraja telah menghapuskan kedudukan daerah ini sebagai satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat, dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah pemerintahan yang lebih luas, wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian status swapraja itu berlandas pada pemberian otonomi dengan mempertahankan pola pemerintahan tradisional kerajaan sehingga masih dapat dipandang sebagai pemerintahan kerajaan namun tidak merdeka dan berdaulat. Hal itu menunjukkan bahwa pola pemerintahan kerajaan yang berbasis pada sistem administrasi primordial masih tetap dipertahankan.

### Catatan Metodologis

Dalam tatanan kehidupan selalu diperdengarkan pernyataan tua dari masyarakat Yunani yang menyatakan bahwa “Sejarah adalah guru

kehidupan” (*historia magistra vitae*), suatu ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan kesejarahan dan juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, sejarah telah menjadi pedoman bagi setiap orang. Oleh karena itulah dalam tulisan para sejarawan sering menampilkan pernyataan bahwa setiap orang adalah sejarawan bagi dirinya sendiri, karena setiap orang, dalam bertindak ataupun merencanakan sesuatu, selalu mengambil pelajaran baik dari pengalamannya sendiri maupun dari pengalaman orang lain, atau dengan kata lain senantiasa mengambil pelajaran dari masa lampau. Carl L. Becker bahkan menjadikan ungkapan itu menjadi judul bukunya, *Everyman His Own Historian*.<sup>17</sup> Dalam konteks inilah Edward Hallet Carr menyatakan bahwa sejarah adalah percakapan yang tiada berakhir antara masa kini dengan masa lampau, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara sejarawan dengan sumber-sumbernya.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana proses percakapan itu dilaksanakan untuk menghasilkan kisah sejarah masa lampau. Hal ini telah menjadi perdebatan yang cukup serius dalam kalangan sejarawan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa penulisan sejarah harus berpegang pada prinsip kronologis. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa setiap peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor kondisional yang melatarinya dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kondisionalnya, meskipun diakui adanya faktor eksternal. Karena itu persoalannya harus diteliti secara cermat dinamika internal masyarakatnya sendiri. Hal itu yang menyebabkan sejarawan kurang berkeinginan melakukan studi banding peristiwa sejenis untuk melahirkan teori, melainkan menyatakan menyediakan materi bagi

<sup>16</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995), hal. 314-315.

<sup>17</sup> Carl L. Becker, *Everyman His Own Historian* (New York: 1935).



kaum teoritis untuk membangun teori. Sejarawan berprinsip bahwa setiap peristiwa pada masyarakatnya bercorak partikularistik dan unik.

Sehubungan dengan itu penulisan ini juga kelak berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, dengan dasar pada “penulisan sejarah jangka panjang.” Hal itu didasarkan pada temporal penulisan ini yang menelusuri perkembangan sejarah dari periode awal hingga kekiniannya dalam arti kurun waktunya sangat lama. Namun demikian perhatian ditujukan pula pada dinamika internal masyarakat dalam proses kesejarahannya, dalam arti tidak hanya memperhatikan permukaan peristiwa saja tetapi juga menelusuri konteks kultural yang melatarinya sehingga dapat mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.

Sejarah sebagai salah satu bidang keilmuan menempatkan objek materialnya pada berbagai catatan tertulis tentang perbuatan manusia di masa lampau, semenjak jejak masa lampau yang tidak tertulis menjadi objek material arkeologi. Sementara objek formalnya adalah menelusuri, mengungkapkan, menjelaskan dan menyimak makna dari perbuatan umat manusia pada masa lampau. Atas dasar inilah sejarawan sering mendefinisikan pengertian sejarah adalah percakapan yang tidak henti-hentinya antara sejarawan dengan sumber-sumbernya, suatu percakapan yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Sementara yang lainnya mencoba menyoroti dari konteks dimensi waktu dengan mengungkapkan bahwa sejarah adalah usaha untuk mempelajari masa lampau agar dapat memahami kekinian untuk membangun masa depan.<sup>18</sup>

Berpangkal pada dasar keilmuan itu, kegiatan penelitian yang dilakukan itu terarah

pada penelitian kepustakaan dan penelitian arsip, tahapan kegiatan yang disebut heuristik. Dalam hal ini seorang sejarawan diharapkan dapat mengumpulkan berbagai keterangan dari jejak-jejak perbuatan manusia dari berbagai sumber. Hal ini diwajibkan karena seorang sejarawan diharapkan mampu mengolah keterangan untuk dijadikan dasar pengungkapan dengan melakukan kritik sumber.

Dalam sejarah dikenal dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Semua dokumen yang ingin digunakan terlebih dahulu harus diteliti, apakah dokumen itu asli atau palsu, selain itu juga kemungkinan terjadi timulat, penulisan ulang namun terkandung unsur perubahan. Setelah lolos seleksi (kritik eksternal), langkah selanjutnya adalah melakukan kritik internal. Dalam hal ini diharapkan sejarawan dapat melepaskan arti subjektifitas dari setiap keterangan. Dalam hubungan ini, diharapkan dalam melakukan penelitian sumber mencari dan berusaha menemukan sebanyak-banyaknya sumber informasi agar dapat membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya agar dengan mudah menyimak arti subyektif dan merumuskan keterangan yang objektif. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap keterangan terkandung unsur subjektif. Setelah lolos seleksi inilah sejarawan melangkah untuk merumuskan fakta sejarah. Dengan model kerja inilah fakta sejarah dalam pandangan kelompok awam dipandang sama dengan kenyataan. Namun sesungguhnya rumusan fakta itu adalah gambaran mental (*mental image*) sejarawan berdasarkan jejak dan keterangan.

Fakta-fakta yang telah dirumuskan itu yang selanjutnya dirangkaikan untuk mengungkapkan kisah perbuatan manusia dan menjelaskan

---

<sup>18</sup> Untuk mengetahui beberapa definisi sejarah, baca: Taufik Abdullah, “Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia” dalam: Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah*

*Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hal. 1-12.

arti dan maknanya, yang merupakan tahapan kerja akhir yang disebut historiograf. Dalam hubungan inilah penelusuran dan penulisan sejarah harus memperhatikan proses waktu. Itulah sebabnya ilmu sejarah merumuskan prinsip penulisan sejarah adalah kronologis. Prinsip ini juga dibangun atas pertimbangan bahwa suatu peristiwa dapat menjadi sebab bagi munculnya peristiwa berikutnya, karena peristiwa terdahulu merupakan kondisional bagi peristiwa berikutnya. Patut disadari bahwa usaha untuk memahami kondisional yang mendasari perbuatan manusia, kejadian dan peristiwa itu menuntun sejarawan untuk selalu berusaha memahami latar budaya, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat agar dapat mengungkapkan dinamika internal yang mendasari kejadian atau peristiwa.

Patut dinyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi dalam menelusuri dan mengungkapkan masa lampau kerajaan ini, khususnya pada periode yang tua adalah kurangnya sumber-sumber tertulis. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya tradisi meninggalkan catatan tertulis menyangkut kehidupan pemerintahannya. Informasi yang membuka tabir kegelapan sejarah kerajaan ini terkuak berkat diterbitkannya sejumlah karya tulis para misionaris dari *Nederlandsch Zendelingen Genootschap*, antara lain oleh A.C. Kruyt<sup>19</sup> dan J. Kruyt.<sup>20</sup> Selain itu juga sejumlah laporan dari pejabat militer pemerintah Hindia Belanda yang melancarkan

ekspedisi militer terhadap kerajaan itu dan karya tulis dari pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pernah bertugas di kerajaan ini.

Selain informasi kesejarahan dari karya tulis para misionaris, para pimpinan militer, dan pejabat pemerintah, dapat pula dijumpai pula atrikel-artikel lepas yang ditulis oleh tokoh-tokoh lokal yang menaruh perhatian pada sejarah dan kebudayaan lokal.<sup>21</sup> Karya-karya itu sangat fragmentaris sehingga kurang memberikan gambaran yang jelas menyangkut sejarah daerahnya. Artikel yang paling dominan adalah usaha mereka untuk menyusun silsilah raja-raja Kerajaan Mori dan mokole-mokole di kerajaan itu dan gambaran adat istiadat perkawinan. Pada dasarnya artikel-artikel lepas ini dimanfaatkan sebagai sumber bandingan untuk memahami hasil karya para penulis berkebangsaan Belanda.

## Pokok-Pokok Bahasan

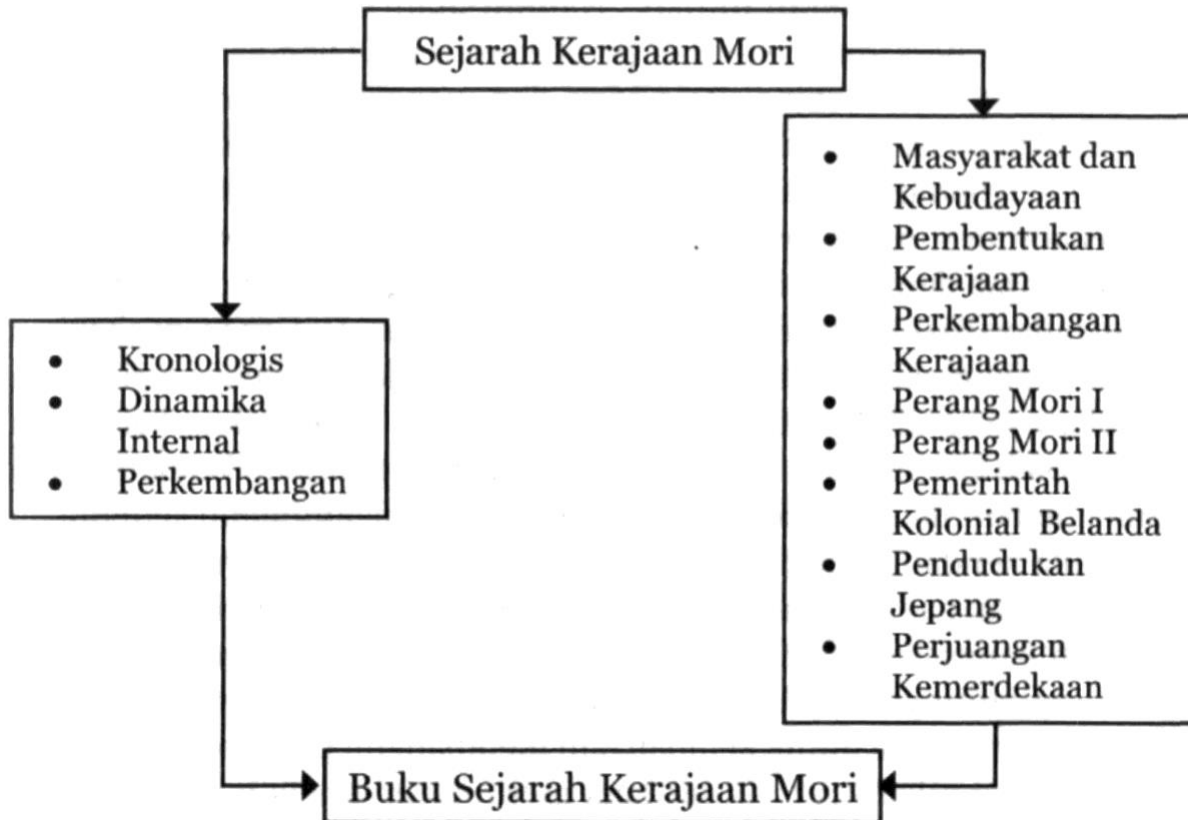
Kita tidak dapat memahami dinamika internal yang mendasari proses kesejarahan Kerajaan Mori tanpa mengetahui dan memahami landasan sosial-budaya masyarakatnya. Sehubungan dengan dasar pemikiran itu, maka mendahului pengungkapan sejarah kerajaan ini, pada pokok bahasan kedua (Bab II), Masyarakat dan Kebudayaan, diungkapkan keadaan sosial-budaya masyarakat Mori. Dalam pokok bahasan ini ditelusuri dan diung-

<sup>19</sup> A.C. Kruyt, *Kerajaan Mori*, (Jakarta: P.T. Inti Idayu Press: 1978); *De West-Toradjas op Midden-Celebes* (Amsterdam; N.V. Hollandsche Uitgevers-Maatschappij: 1938); "De Hoofden in Midden Celebes onder het Nederlandsch-Indisch Gouvernement", dalam: *Koloniaal Tidschrift*, (No. 13: 1924) hal. 23-44. Ia datang ke Sulawesi Tengah (Poso) pada tahun 1892 dalam tugas penginjilan. Selain itu melakukan juga penyelidikan tentang sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

<sup>20</sup> J. Kruyt, "*De Moriers van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes)*", dalam: BKI, (No. 80. 1924) hal. 33-213: Diterjemahkan di LOBO 2019 3(S2) "*To Mori dari Tinompo: Sulawesi Tengah Timur*": *Kabar Keselamatan di Poso*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 1977); "Het Landschap Mori". Ia tiba di Sulawesi Tengah pada tahun 1916.

<sup>21</sup> Artikel-artikel itu dapat dibaca dalam Daftar Pustaka.

Gambar I  
Bagan Materi Penulisan



kapkan fakta geografi, asal-usul penduduk, stratifikasi sosial, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan budaya politik lokal. Pokok bahasan selanjutnya menyangkut sejarah Kerajaan Mori, secara ringkas tergambar dalam gambar bagan No. 1 dibawah.

Skema ini memperlihatkan bahwa setelah pokok bahasan Pembentukan Pemerintahan Kerajaan (Bab III), diungkapkan dan dijelaskan tentang perkembangan pemerintahan hingga terbentuknya Kabupaten Morowali.

Pembentukan pemerintahan Kerajaan Mori, sesuai dengan ingatan kolektif masyarakat yang terkisahkan dalam legenda, diperkirakan kerajaan ini mulai terbentuk sekitar paruh kedua abad ke-16. Dalam perkembangannya,

kerajaan ini mendapat serangan dari Kerajaan Luwu sekitar tahun 1670. Dalam perang itu, Kerajaan Mori berhasil dikalahkan dan dijadikan kerajaan *palili*, dengan menawan Raja Mori III Ratu Wedange, dan putera mahkota kerajaan, Sungkawawo, bersama Karua Moiki dan puteranya di Palopo. Dalam perkembangan kemudian, pemerintah Kerajaan Luwu ingin membebaskan Wedange, namun ia menolak untuk kembali memerintah kerajaannya yang berkedudukan sebagai kerajaan *palili*. Oleh karena itu Karua Moiki bersama puteranya yang dibebaskan dan kembali ke negerinya. Penolakan Ratu Wedange itu mengisyaratkan kepada Karua Moiki untuk mengurus proses pergantian penguasa kerajaan. Itulah sebabnya

ia memilih dan menobatkan salah seorang putera Wedange yang tidak ditawan, Anamba, menjadi Raja Mori IV menggantikan ibunya, tanpa persetujuan pemerintah Kerajaan Luwu.

Pihak pemerintah Kerajaan Luwu memandang terjadi kevakuman pemerintahan di Kerajaan Mori, apabila ratu dan puteranya tetap berada di Palopo. Oleh karena itu ditawarkan pembebasan tanpa jaminan, namun tawaran itu tetap ditolak. Namun akhirnya putera Wedange, Sungkawawo, bersedia menerima pembebasan itu. Oleh karena itu Datu Luwu melantiknya menjadi Raja Mori dan mengizinkan kembali ke Wawontuko, pusat pemerintahan kerajaan, dengan kewajiban setiap tahun datang menghadap dengan membawa upeti dua orang gadis.

Kehadiran Sungkawawo yang telah dilantik oleh Datu Luwu itu ternyata tidak diterima dengan baik oleh pemerintah Kerajaan Mori, walaupun ia adalah putera mahkota, pewaris takhta pemerintahan. Hal itu menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugas sebagai raja *palili*. Ia menyadari bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Karua Moiki itu merupakan kehendak ibunya. Oleh karena itu ia tidak berniat untuk menghimpun kekuatan atau memohon bantuan Kerajaan Luwu agar dapat mengambil alih kedudukan pemegang kendali politik tetapi memilih meninggalkan kerajaannya dan pergi menetap pada keluarganya di Matano. Kepergiannya itu mendorong sejumlah bangsawan dan pemimpin kelompok kaum datang ke Matano dan memohonnya kembali ke kerajaannya. Pada pertemuan itulah dicapai kesepakatan untuk kembali dan membangun pusat pemerintahan baru di Paantoule. Strategik ini juga merupakan langkah politik untuk membangun pemerintahan yang merdeka dan

berdaulat bebas dari kekuasaan Kerajaan Luwu. Pembahasan ini merupakan bagian dari pokok bahasan Perkembangan Pemerintahan (Bab IV).

Pada masa pemerintahan Raja Sungkawawo ini, Kerajaan Mori berhasil memperluas pengaruh kekuasaan dan membenahi organisasi pemerintahannya. Periode pemerintahan raja-raja berikutnya hingga paruh kedua abad ke-19 merupakan sisi gelap sejarah kerajaan ini. Artikel-artikel yang ditulis oleh para pemerhati sejarah dan kebudayaan masyarakat daerah ini hanya didominasi oleh informasi silsilah raja-raja, para *mokole*, dan *bonto* serta tata cara adat perkawinan. Tabir kegelapan ini mulai memancarkan titik cerah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda melancarkan serangan terhadap kerajaan ini pada tahun 1856, peristiwa ini kemudian disebut Perang Mori I. Meskipun ekspedisi militer ini berhasil menguasai benteng pertahanan Ensaondau, namun tidak meneruskan tindakan penyerangan terhadap kedudukan Raja Mori, Tosaleko, dan menguasai kerajaan ini. Itu berarti kerajaan ini tidak berhasil ditaklukan sehingga tetap berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Perang ini menjadi pokok bahasan khusus (Bab V)

Tindakan penaklukan dan penguasaan atas kerajaan ini baru terjadi pada awal abad ke-20 dimulai dengan serangkaian tindakan militer yang dilaksanakan oleh Ekspedisi Sulawesi Selatan 1905 (*Zuid Celebes Expeditie 1905*) yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal J. B. Van Heutsz.<sup>22</sup> Peristiwa penaklukan ini dikenang oleh rakyat Mori dengan sebutan Perang Wulanderi (Agustus 1907) namun dalam penulisan ini disebut Perang Mori II. Dalam perang ini Raja Mori XI, Marunduh

<sup>22</sup> Baca: Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan, Makassar 1906-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hal. 46; Michiel

Hegener, *Guerrilla in Mori. Het verset tegen de Japanners in de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1990), hal. 13-14.

Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi, gugur sebagai kesuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negerinya. Sejak itu wilayah kerajaan ini secara *de facto* dan *de jure* dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung hingga 1942. Kisah ini yang diungkapkan dalam Bab VI, Pemerintahan Kolonial Belanda.

Pokok bahasan selanjutnya adalah periode pemerintahan militer Jepang (Bab VII) yang berlangsung selama tiga setengah tahun, 1942-1945. Sejarah pemerintahan tentara pendudukan Jepang di Mori ini menampilkan kisah yang unik. Kapitulasi pemerintah Hindia Belanda kepada tentara pendudukan Jepang itu tidak berlangsung mulus di Mori. Hal itu disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam pengambilalihan wilayah itu sehingga menimbulkan perlawanan dari detasemen militer Hindia Belanda yang ditempatkan di Sulawesi Tengah, khususnya di *Onderafdeling* Kolonodale. Akibatnya terjadi perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang di Mori secara gerilya yang dipimpin oleh Letnan J.A. de Jong, komandan detasemen Kolonodale. Periode pemerintahan tentara pedudukan Jepang itu berlangsung singkat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang menyatakan kapitulasi kepada pihak Sekutu, pernyataan menyerah tanpa syarat untuk mengakhiri Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh pihak Jepang.

Berakhirnya perang itu telah mendorong tokoh-tokoh politik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk negara Republik Indonesia. Keberadaan negara baru yang terbentuk itu kemudian terusik dengan kehadiran *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), organ pemerintah Belanda, sebagai lembaga intendant dalam pasukan Sekutu untuk menyelesaikan persoal-

an akhir perang. Personil NICA bergiat untuk memulihkan kedudukan kekuasaan kolonial Belanda sehingga menimbulkan perlawanan rakyat. Oleh karena itu mereka kemudian bergiat merancang pembentukan negara federal dengan jalan memilah-milah wilayah Indonesia dan membentuk negara-negara kecil yang kemudian dihimpun dalam satu bentuk negara federal. Persoalan-persoalan ini diungkapkan dan dijelaskan dalam pokok bahasan Perjuangan Kemerdekaan (Bab VIII).

Bagian penutup dari sejarah Kerajaan Mori ini diungkapkan secara ringkas sejarah pembentukan Kabupaten Morowali. Wilayah kabupaten ini meliputi wilayah bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku, yang pada periode pemerintahan kolonial Hindia Belanda dijadikan satu wilayah *onderafdeling* yang disebut *Onderafdeling* Kolonodale. Kabupaten Morowali ini baru terbentuk pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang No. 51 tahun 1999. Berdasarkan undang-undang ini ditetapkan bahwa ibukota kabupaten berkedudukan di Bungku (Pasal 10 ayat 2.), namun dengan pertimbangan prasarana dan sarana di kota Bungku belum memadai maka untuk sementara ibukota pemerintahan berkedudukan di Kolonodale (Pasal 22 ayat 1.), sementara ayat (2) mengisyaratkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, ibukota definitif yang diamanatkan undang-undang itu definitif difungsikan. Penetapan ibukota sementara dan ibukota definitif ini kemudian menimbulkan persoalan yang dalam perkembangan kemudian mengkristal keinginan pemekaran Kabupaten Morowali. Hal-hal itu juga diungkap dalam pokok bahasan terakhir ini.

## BAB II

# MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

Orang Mori diidentifikasi sebagai penduduk Kerajaan Mori yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di sekitar Teluk Tomori atau juga lazim disebut Teluk Tolo, yang diapit oleh jazirah tenggara dan jazirah timur laut Pulau Sulawesi. Dari sisi etnologi, penduduk kerajaan ini memiliki hubungan genealogis dengan penduduk Kerajaan Bungku, yang berada di bagian selatan kerajaan ini pada pesisir timur jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Christian Pelras mengungkapkan bahwa dari analisis linguistik menunjukkan bahwa penghuni Austronesia pertama di Sulawesi Selatan memiliki hubungan dengan mereka yang saat ini menghuni bagian tengah dan tenggara Sulawesi. Mereka ini menggunakan bahasa yang tergolong kedalam kelompok bahasa: Kaili-Pamona, Mori-Bungku, dan Muna-Buton. Bahasa mereka itu

merupakan substratum bagi bahasa-bahasa yang kini digunakan oleh penduduk Sulawesi Selatan.<sup>1</sup>

Pendapat ini menarik untuk diteliti lebih lanjut menyangkut lintas budaya niaga (*cross cultural trade*) yang terjadi yang berdampak adanya serapan kosakata dari penutur kelompok bahasa, khususnya kelompok bahasa Mori-Bungku oleh mereka yang berkompeten dalam studi antropologi budaya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan politik dan kultural dijumpai sejumlah istilah yang sama, seperti *datu* dan *mokole* yang juga dijumpai penggunaannya di Kerajaan Luwu dan Toraja, *ata* (budak) yang umum digunakan di Sulawesi Selatan, atau *bonto* di Kerajaan Gowa. Meskipun studi ini tidak diarahkan untuk mengkaji persoalan linguistik ataupun budaya, namun pengungkapan ini dapat menunjukkan

---

<sup>1</sup> Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2006), hal. 42-43.

bahwa istilah yang digunakan di Kerajaan Mori itu bukan diserap dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tetapi sebaliknya. Bahkan Pelras menyatakan bahwa kata-kata tertentu dari kelompok bahasa yang telah disebutkan terdahulu masih ditemukan dalam bahasa: Makassar, Toraja, Bugis dan bahasa Bugis pendeta bissu.

Pokok bahasan ini sesungguhnya diarahkan untuk mengungkapkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya orang Mori. Menurut pemikiran saya informasi tentang hal-hal itu penting dan bermanfaat sebagai dasar untuk memahami dinamika internal dalam proses kesejarahannya. Oleh karena itu dalam pokok bahasan ini diungkapkan fakta geografis sebagai langkah awal untuk mengetahui dan mengenal batasan spasial penulisan ini. Selanjutnya untuk mengenal dan memahami masyarakatnya diungkapkan fakta-fakta menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

## **Fakta Geografis**

Kerajaan Mori terletak pada pesisir timur, pada silangan jazirah tenggara dan jazirah timur laut Pulau Sulawesi. Wilayah kerajaan ini kini menjadi bagian dari Kabupaten Morowali, salah satu kesatuan pemerintahan otonomi dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah kabupaten ini, secara administrasi pemerintahan, berbatasan pada bagian utara dengan wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai, pada bagian selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian timur berbatasan dengan perairan Teluk Tolo, dan pada bagian barat berbatasan dengan wilayah

Kabupaten Poso. Letak wilayah kabupaten ini pada koordinat 121°2'224" hingga 123°5'36" Bujur Timur dan antara 01°31'12" hingga 03°46'48" Lintang Selatan.<sup>2</sup>

Wilayah kabupaten ini, bila ditinjau dari segi kesejarahannya, merupakan penyatuan wilayah bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku (*Tobungku*). Wilayah yang merupakan bekas wilayah kerajaan yang disebutkan terakhir kini menjadi wilayah kecamatan: Bungku Utara, Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bungku Barat, dan Menui Kepulauan, sementara lima kecamatan lainnya adalah bekas wilayah Kerajaan Mori, yaitu kecamatan: Petasia, Mori Atas, Lembo, Soyojaya, dan Bahodopi. Penduduk wilayah pegunungan sangat jarang sehingga dijadikan satu kecamatan, sementara penduduk wilayah dataran rendah cukup padat sehingga terbagi dalam empat wilayah kecamatan. Luas wilayah pegunungan adalah 2.557,74 Km<sup>2</sup>, atau mencapai 16,51% dari seluruh luas kabupaten, sementara luas wilayah dataran rendah adalah 4.635,57 Km<sup>2</sup> atau mencapai 30,05% dari keseluruhan luas Kabupaten Morowali. Gambaran luas wilayah dua kerajaan itu dapat dicermati pada tabel 1 berikut.

Secara kultural, wilayah Kerajaan Mori pada masa lampau diklasifikasikan atas tiga bagian.<sup>3</sup> Yang pertama adalah Mori Atas (*Boven Mori*) yang merupakan daerah pemukiman orang Mori di bagian barat. Wilayah ini yang berbatasan dengan wilayah Kerajaan Poso, yang kini menjadi Kabupaten Poso. Pada bagian utara dan barat laut daerah ini terbentang padang ilalang yang luas, dan pada

<sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Morowali, "*Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali 2003-2013*" *Fakta dan Analisa* (Kolnodale: Pemd Kabupatn Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, 2003), hal. 13.

<sup>3</sup> Baca: J. Kruyt, "*De Moriers van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes)*", dalam: BKI (No. 60), hal. 33-35: Diterjemahkan di LOBO 2019 3(S2) "*To Mori dari Tinompo: Sulawesi Tengah Timur*".

**Tabel No. 1**  
Luas Wilayah Kecamatan dari Kabupaten Morowali Tahun 2003

No.	Pemerintahan Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase
1	Menui Kepulauan	223,63	1,44
2	Bungku Selatan	1.271,19	8,21
3	Bungku Tengah	1.112,80	7,18
4	Bungku Barat	1.783,40	11,51
5	Lembo	1.332,84	8,60
6	Mori Atas	2.557,74	16,51
7	Petasia	1.625,24	10,61
8	Bungku Utara	3.885,79	25,09
9	Soyojaya	596,51	3,86
10	Bahodopi	1.080,98	6,98
11	Kabupaten Morowali	15.490,12	100,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Morowali, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali 2003-2013: Fakta dan Analisa (Kolondale: Pemda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, 2003), hal. 13.

bagian selatan daerah ini terbentang deretan pegunungan. Wilayah pegunungan bagian selatan ini tidak berpenghuni, tetapi pada wilayah pegunungan ke arah tenggara, Pegunungan Morokopa, terdapat sejumlah perkampungan mereka. Sementara wilayah dataran yang terbentang pada bagian timur dan tenggara dari wilayah Mori Atas ini dikategorikan wilayah Mori Bawah (*Beneden Mori*). Daerah ini merupakan dataran rendah yang luas sehingga mereka menyebutnya Lembo.<sup>4</sup> Pada bagian selatan dari deretan pegunungan itu, yang merupakan wilayah ketiga disebut daerah Danau Malili, atau juga dikenal dengan daerah Nuha. Di daerah ini terdapat tiga danau yaitu Danau Matano, Danau Moholona, dan Danau Towuti. Daerah ini cukup indah dan menawan karena dihiasi dengan gunung-gunung yang tinggi dan di

antaranya terbentang dataran tinggi, antara lain dataran tinggi Weula dan Landangi. Wilayah Nuha yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Mori itu kini telah menjadi kecamatan Nuha dari Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Batas wilayah kerajaan ini pada bagian utara berbatasan dengan wilayah Kerajaan Poso (sekarang Kabupaten Poso) dan Tojo, dan pada bagian barat berbatasan dengan wilayah pemukiman kelompok suku Pasa (*Topasa*), Lamusa (*Tolamusa*), dan Palande (*Topalande*). Kelompok kaum itu berada dalam dominasi kekuasaan Kerajaan Poso. Pada bagian selatan berbatasan dengan bekas wilayah Kerajaan Luwu (sekarang secara khusus berbatasan dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur)<sup>5</sup> dan wilayah Kerajaan Bungku yang kini menjadi Kecamatan Bungku Selatan. Pada bagian timur

<sup>4</sup> *Lembo* secara harafiah menurut Bahasa Mori artinya "dataran", namun karena penyebutan itu digunakan untuk menunjukan wilayah itu sehingga daerah dataran itu disebut Lembo. Daerah itu kini menjadi satu wilayah pemerintahan kecamatan, dengan nama Kecamatan Lembo.

<sup>5</sup> Bekas wilayah Kerajaan Luwu, sebelum pemekaran wilayah adalah satu kabupaten dengan nama Kabupaten Luwu. Dalam perkembangan kemudian, sesuai dengan pemekaran penataan wilayah pemerintahan kabupaten/kota terbagi menjadi empat kabupaten/kota, yaitu kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.





Desa Sampalowo di Sungai Laa: Panjangnya 96,30 km. Sumber air berasal dari Mori Atas dan bermuara di Teluk Tomori.

berbatasan dengan Teluk Tomori (Teluk Tolo) dan bagian wilayah dari Kerajaan Bungku yang kini menjadi Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali.

Daerah ini juga diairi sejumlah sungai. Sungai yang terpanjang dan terbesar adalah Sungai Laa. Panjang sungai ini adalah 96,30 Km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah 2.875,63 Km<sup>2</sup>. Panjang dan luasnya sungai ini berkaitan erat dengan aliran air dari daerah Mori Atas ke sungai itu. Sungai lainnya yang penting adalah Sungai Tam-balako. Panjang sungai ini mencapai 83,7 Km dan luas DPS adalah: 1.045,62 Km<sup>2</sup>. Aliran air sungai ini berasal dari dataran Mori Bawah. Sungai-sungai ini merupakan infrastruktur yang menghubungkan daerah pedalaman dengan daerah pesisiran, dengan menggunakan sarana angkutan berupa sampan atau rakit. Selain itu masih terdapat pula sejumlah sungai yang dapat dilayari dengan menggunakan sampan, seperti Sungai Tiu, Sungai Lowo (Ngango Lowo), Sungai Puabu, dan Sungai Samura. Disamping sungai-sungai yang dilayani, tercatat pula sejumlah sungai-sungai



Jembatan gantung yang terbentang di atas Sungai Laa desa Sampalowo (2006). Koleksi pribadi: Murdan U. Marunduh, Jakarta.

kecil lainnya, seperti sungai: Lambuka, Karangkuni, Korompoyo (Karampalia), Kamaba, Palia, Yaentu, Bahombelu, Matandau, dan Bahomohoni. Kondisi iklim daerah kerajaan ini tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Daerah ini mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga bulan September, sementara musim penghujan berlangsung antara bulan Oktober hingga bulan Maret. Curah hujan cukup tinggi, yaitu berkisar 2500 mm hingga 3000 mm setiap tahunnya. Temperatur udara rata-rata setiap harinya adalah 27,50°C dengan variasi antara 25,80°C hingga 28,40°C. Data ini menunjukkan bahwa suhu udara di daerah ini tidak terlalu panas.

### Gambaran Penduduk

Penduduk kerajaan ini tergolong kelompok yang majemuk dan multikultural. Albert Christian Kruyt mengklasifikasikan penduduk kerajaan ini dalam dua kategori.<sup>6</sup> Kategori pertama adalah penduduk pribumi (*inheemsche bevolking*), yaitu mereka yang telah lama menetap dan telah menjadi warga Kerajaan Mori. Penduduk pribumi ini selanjutnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu orang Mori asli, penduduk asli bukan orang Mori (suku-suku lain) yang mendiami wilayah kerajaan, dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad yang lalu melakukan eksodus dan menetap di wilayah kerajaan Mori.

Orang Mori asli masih dikategorikan atas orang Mori Atas dan orang Mori Bawah. Kategori ini berdasarkan pada wilayah pemukiman mereka. Orang Mori Atas umumnya

menetap pada daerah pegunungan, karena itu sering juga disebut orang Mori Gunung. Sementara kelompok yang lain mendiami wilayah dataran, sehingga disebut Mori Bawah. Dua kelompok ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan bahasa yang sama, sehingga dipandang sebagai satu kelompok etnis. Wilayah orang Mori cukup luas sehingga memiliki lahan yang tersedia sangat cukup bagi usaha pertanian. Anugerah alam ini yang mendasari mata pencaharian mereka adalah petani ladang sehingga suka berpindah-pindah sesuai dengan pembukaan ladang baru. Walaupun demikian, bila ada ancaman dari luar mereka segera berkumpul di kampung induk. Dari kelompok inilah dalam perkembangan kemudian muncul kemokolehan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Mori.

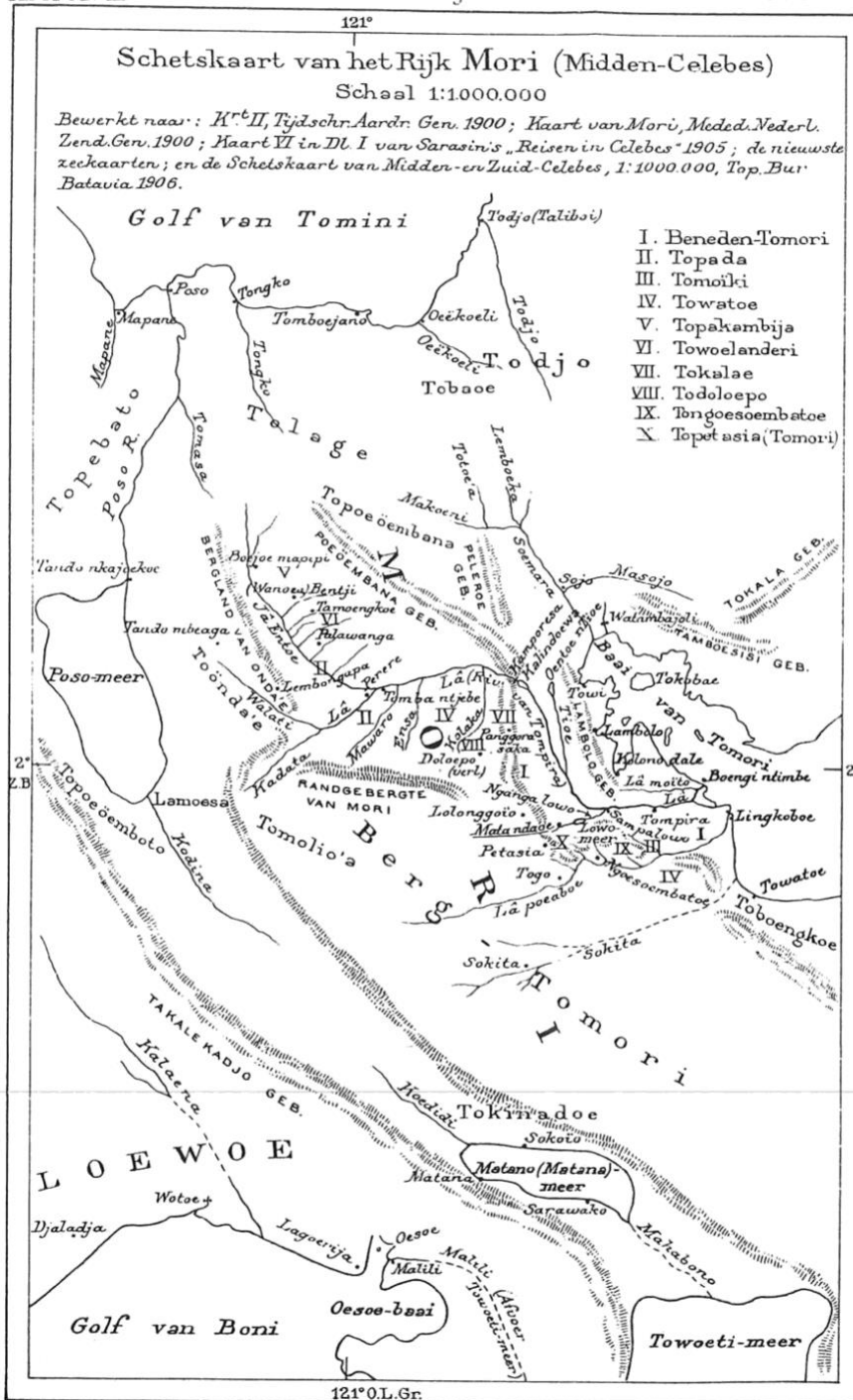
Penduduk asli bukan orang Mori terdiri dari beberapa kelompok etnis. Etnis Moiki mendiami sebagian daerah Mori Bawah, antara Togo dan Tompira. Kelompok etnis ini memiliki andil penting dalam proses pembentukan kerajaan sehingga tidak dipandang sebagai daerah taklukan (*palili*). Kepala suku kelompok ini diberikan kedudukan sebagai *karua*,<sup>7</sup> sehingga kepala pemerintahannya disebut Karua Moiki. Etnis Wotu mendiami tiga wilayah pemukiman yaitu di Lembo, Baturede dan Malupu. Oleh karena itu mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Wotu Lembo, orang Wotu Baturede, dan orang Wotu Malupu. Mereka ini mendiami wilayah aliran Sungai Puabu dan Sungai Sokita. Etnis lainnya adalah orang Molongkuni, Uluwoi, dan Lasi. Etnis Lasi sesungguhnya terdiri dari tiga kelompok suku, yaitu suku Lasi, Mobahono, dan Reai. Mereka ini bersama-sama mendiami

<sup>6</sup> Alb. C.. Kruyt, "[Het Rijk Mori](#)" *Tijdschrift KNAG 2nd series*, 17(1900): 450.

<sup>7</sup> *Karua* adalah jabatan tinggi kerajaan yang mengurus persoalan pergantian pimpinan kerajaan dan pejabat-

pejabat daerah, mengurus perbendaharaan kerajaan, melaksanakan tugas kerajaan dalam hubungan dengan daerah kekuasaan, dan dalam keadaan darurat perang bertindak sebagai panglima perang.





Peta Kerajaan Mori (Maengkom 1908).

daerah Mori.

Orang Molongkuni, Uluuwoi, dan Lasi sesungguhnya masih tergolong kelompok etnis Kinadu, satu kelompok etnis yang secara adat merupakan musuh bebuyutan dari etnis Toraja Bare'e. Orang Toraja Bare'e dikenal sebagai kelompok etnis yang senang mengayau, memenggal kepala manusia. Hal itu yang menyebabkan mereka melakukan eksodus dan tinggal di wilayah Kerajaan Mori. Meskipun mereka telah berpindah jauh, namun belum berarti mereka telah terbebas dari ancaman tindakan pengayauan dari musuh mereka. Menurut informasi, pada tahun 1899, penduduk salah satu kampung orang Uluuwoi terbunuh habis oleh para pengayau dari Toraja Bare'e.

Kelompok penduduk bukan Mori ini bergabung dalam pemerintahan Kerajaan Mori, karena mereka mendiami wilayah kedaulatan Mori dan ditaklukan.

Oleh karena itu wilayah kelompok etnis itu berkedudukan sebagai daerah *palili*. Setiap tahun mereka berkewajiban membawa dan mempersembahkan upeti kepada Raja Mori, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada

wilayah bagian selatan Mori, karena itu disebut saja etnis Lasi. Etnis Uluuwoi mendiami kawasan hulu Sungai Sokita dan daerah pegunungan di sekitarnya, sementara etnis Molongkuni mendiami daerah bagian utara dan selatan jejeran pegunungan yang menjadi batas

pemerintahannya. Selain itu jika keluarga kerajaan mengalami kedukaan, mereka juga berkewajiban untuk mengantarkan persembahan kepada keluarga yang berduka.

Kelompok penduduk Mori dari kelompok etnis lain yang melakukan eksodus dan menetap di wilayah Mori adalah kelompok penutur Bahasa Toraja Bare'e. Kelompok ini diidentifikasi sebagai orang Pakambia. Puumbana, Pada, Watu, Tananda, dan Kalal. Mereka berasal dari dua daerah dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Poso. Orang Pakambia berasal dari daerah Ondal (*Ondae*); hal ini didasarkan atas pernyataan sejumlah orang Pakambia bahwa mereka adalah penduduk Ondae. Sementara kelompok lainnya berasal dari daerah Lage. Hal ini terbukti dari setiap kegiatan pesta syukuran (upacara keagamaan) senantiasa dihadiri oleh tamu-tamu dari Lage, penguasa dan para tua hadat dan keluarga mereka.

Orang Watu, Tananda, dan Kalal mendiami bagian timur dari dataran rendah pada kawasan aliran Sungai Laa. Sementara orang Pada mendiami bagian tengah dari dataran rendah itu. Orang Puumbana mendiami daerah pegunungan yang terletak pada bagian selatan jajaran pegunungan Peleru, dan orang Pakambia mendiami daerah pegunungan bagian barat daerah pemukiman orang Puumbana, di kawasan aliran Sungai Junto, salah satu sungai dari tiga sungai besar yang aliran air sungainya menjadi satu dengan aliran air Sungai Laa.

Meskipun mereka memiliki hubungan genealogi dengan penduduk Kerajaan Poso, namun mereka mengakui kedudukan kekuasaan dan tunduk serta patuh kepada Raja Mori, Mokole Petasia. Setiap tahun mereka memenu-

hi kewajiban untuk datang ke istana kerajaan untuk menunjukkan sikap patuh dan taat kepada kekuasaan raja dan menyerahkan kewajiban upeti mereka. Daerah kekuasaan para kepala suku ini juga merupakan daerah palili Kerajaan Mori.

Kategori kedua adalah orang asing (*vreemdelingen*). Kategori ini menunjuk pada kelompok kaum yang datang dari luar Mori, bukan dengan tujuan untuk menetap dan menjadi penduduk Mori. Mereka adalah orang-orang yang bermata-pencaharian sebagai peramu dan pedagang. Kehadirannya ke daerah ini berkaitan dengan perkembangan perdagangan di wilayah Hindia Belanda, khususnya wilayah luar Jawa dan Madura. Perkembangan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial membuka kawasan ini menjadi kawasan perdagangan bebas dan membuka beberapa pelabuhan sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1847.<sup>8</sup> Kebijakan pemerintahan kolonial ini berdampak semakin bervariasi jumlah serta jenis komoditi yang diperdagangkan. Wilayah kerajaan ini memiliki kekayaan alam berupa berjenis-jenis kayu, damar, rotan dan berbagai hasil hutan lainnya.

Kawasan Indonesia yang oleh Kenneth R. Hall disebut Zona Perdagangan Laut Jawa yang terbentuk sekitar abad ke-13, pada awalnya (abad ke-13 hingga abad ke-17) hanya memasarkan jenis komoditi yang terbatas pada rempah-rempah (cengkeh, pala, dan bunga pala), kayu cendana, beras, tekstil, dan budak. Ketika pemerintah kolonial membuka hubungan perdagangan dengan Cina pada tahun 1736, muncul permintaan komoditi baru, khususnya produksi laut, antara lain: teripang, sirip ikan hiu, agar-agar, kerang mutiara, lola,

<sup>8</sup> Baca: Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hal. 48-94.; Singgih Tri Sulistiyono, *The Java Sea Net-*

*work: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s* (Leiden: Disertasi Universitas Leiden, 2003).

sisik (kulit penyu) dan produksi hutan seperti lilin dan madu. Dalam perkembangan kemudian tercatat pula komoditi damar dan rotan yang diperoleh dari wilayah Kerajaan Mori.

Kebijakan perdagangan bebas yang dilaksanakan pada paruh kedua abad ke-19 telah membuka peluang bagi permintaan komoditi baru, antara lain: kopi, teh, tembakau, kopra, rotan dan damar. Wilayah Kerajaan Mori tergolong daerah penghasil berjenis-jenis kayu, rotan dan damar. Kekayaan akan komoditi hutan itu yang telah memikat penduduk dari daerah-daerah lain datang untuk mengumpulkan komoditi itu, yang pada gilirannya juga memikat para pedagang datang ke negeri ini. Diantara mereka terdapat kelompok orang Lolaki yang berasal dari daerah Laiwui (Sulawesi Tenggara), orang Poso (Sulawesi Tengah), orang Luwu dan Bugis (Sulawesi Selatan). Meskipun mereka datang dan menetap, akan tetapi mereka tetap dipandang sebagai rakyat gubernemen (rakyat pemerintah Hindia Belanda). Sehubungan dengan itulah kelompok pendatang yang menetap di Mori ini dikategorikan dengan penduduk asing.

Orang Lolaki yang berada di wilayah Mori diperkirakan berjumlah sekitar 150 orang pria yang potensial. Sekitar 80 orang hingga 90 orang bermukim di sebelah utara Sungai Laa, dan sisanya bermukim di daerah hulu Sungai Puabu dan Sungai Sokita. Orang Luwu dan Poso yang merupakan kelompok orang asing yang terbanyak; jumlah lelaki yang potensial dari kelompok ini sekitar 800 orang. Kebanyakan mereka tidak membangun pemukiman. Setelah dua atau tiga tahun bergiat mengumpulkan dan menjual produksi hutan, disamping usaha pertanian kecil-kecilan, mereka kembali ke negerinya masing-masing. Sementara orang Bugis sebanyak 200 orang; kelompok itu umumnya berprofesi sebagai pedagang sehing-

ga bermukim di pusat-pusat pasar, seperti Tambayoli, Towi, Bungintimbe, dan Lingkobu. Sebagian dari mereka melakukan usaha pertanian di daerah tepian Sungai Laa. Sehubungan dengan profesi mereka itu, umumnya mereka menetap dan menikah dengan puteri-puteri Mori, dan bergiat menjalin hubungan dengan penguasa setempat.

Untuk mengorganisasi rakyat gubernemen itu, pemerintah kolonial mengangkat salah seorang menjadi pemimpin mereka dengan jabatan sebagai kapiten. Ketika Alb. C. Kruyt melakukan penelitian di daerah ini pada dasawarsa pertama abad ke-20, yang menjabat sebagai kapiten penduduk gubernemen adalah Haji La Gangka. Jika terjadi perselisihan antara penduduk Mori dan rakyat gubernemen, maka persoalannya diselesaikan oleh kepala pemerintahan daerah dimana dia bermukim dan menyampaikan kepada Raja Mori. Namun bila perselisihannya tidak dapat diselesaikan karena menyangkut tindakan kriminal, maka keputusannya dimintakan dari Kapiten Haji La Gangka, pemimpin penduduk gubernemen.

Para penduduk gubernemen ini tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan upeti tahunan, tetapi berkewajiban membayar pajak pengelolaan hasil hutan (*buangtana*). Semua penduduk gubernemen yang mengelola produksi hutan di kerajaan ini wajib membayar *buangtana* kepada Raja Mori. Kecuali orang Lolaki, tidak hanya membayar *buangtana* kepada Raja Mori, tetapi juga kepada Raja Bungku. Dalam perkembangan kemudian, kegiatan penduduk gubernemen di kerajaan ini diwajibkan pula membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda, yang ditangani oleh perwakilannya yang berdiam di Bungku. Untuk pedagang-pedagang Bugis dikenakan wajib pajak sejak tahun 1894, sementara peramu produksi hutan lainnya, orang Lolaki, Luwu, dan Poso baru dikenakan wajib pajak

pada tahun 1901.

Jumlah penduduk Kerajaan Mori tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal itu disebabkan kerajaan ini, sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia, tidak memiliki tradisi melakukan sensus penduduk. Potensi penduduk yang dihitung hanyalah jumlah penduduk laki-laki yang dipandang berpotensi sebagai pemberani kerajaan untuk melindungi kerajaan dari ancaman pihak luar. Potensi laki-laki pemberani yang dituturkan oleh Raja Mori X, Marunduh Datu ri Tana (1870-1907) kepada Alb. C. Kruyt sebelum Perang Mori II (Perang Wulanderi, 1907) adalah sebagai berikut: jumlah laki-laki potensial daerah Mori Bawah sebanyak 258 orang, Mori Atas sebanyak 1618 orang, orang Kinadu sebanyak 834 orang, orang Moiki sebanyak 159 orang, orang Watu sebanyak 370 orang, dan penduduk berbahasa Baree sebanyak 800 orang: total seluruhnya 4.030 orang.<sup>9</sup>

### **Kehidupan Sosial-Ekonomi**

Wilayah Mori tergolong wilayah yang subur. Kondisi ini yang mendasari kegiatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengolah lahan pertanian. Curah hujan cukup tinggi dan berlangsung sepanjang tahun, dengan curah hujan terbanyak pada bulan Januari dan Juli. Meskipun daerah ini memiliki wilayah dataran rendah dan aliran sungai yang cukup banyak, namun tidak terdapat usaha pertanian sawah (lahan basah). Mereka adalah petani ladang berpindah. Ladang yang dibuka, umumnya ditanami tanaman padi. Disamping itu mereka juga sering mengusahakan tanaman jagung, tembakau, kapas, dan beberapa jenis kacang-kacangan.

Pengerjaan ladang tanaman padi tidak berlangsung serentak di daerah ini, karena

adanya variasi musim penghujan. Penduduk pada daerah dataran mulai mengolah ladang mereka pada bulan September, dan pada saat yang bersamaan petani peladang yang berada di daerah pegunungan telah memasuki masa panen. Lahan ladang yang dibuka itu, biasanya dikelola selama dua atau tiga tahun, dan setelah itu ditinggalkan dan mencari serta membuka lahan baru. Pola peladangan berpindah ini diikuti pula dengan pemindahan tempat hunian. Umumnya mereka membangun tempat hunian mereka pada lokasi ladang mereka. Oleh karena itu mereka dipandang sebagai penduduk yang selalu berpindah-pindah tempat tinggalnya dan tersebar. Walaupun demikian mereka mengenal pemukiman induk. Dalam hal-hal tertentu, seperti ancaman dari kelompok suku lain maupun dari luar, mereka segera meninggalkan tempat hunian mereka yang tersebar dan berkumpul di perkampungan induk.

Selain usaha pertanian, daerah ini juga memiliki hutan sagu yang banyak, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang dibudidayakan. Hutan sagu di daerah ini pada umumnya dikuasai oleh para penguasa, baik raja dan *bonto* maupun para penguasa daerah yaitu para *mokole* dan *mia mota'u*, karena hutan sagu merupakan sumber kesejahteraan mereka. Meskipun demikian pengelolaannya dapat dilakukan oleh penduduk dengan sistem bagi hasil. Umumnya pengelolaan sagu dilaksanakan setelah panen, dan setelah menyimpan produksi padi mereka di lumbung masing-masing. Produksi pertanian padi ini tidak semata untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Produksi pertanian padi itu juga dipersiapkan untuk memenuhi upeti kepada penguasa mereka yaitu Raja Mori, untuk persiapan upacara inisiasi (pesta kelahiran, pernikahan, atau kematian) dan juga diperdagangkan untuk

<sup>9</sup> Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal. 536.

mendapatkan komoditi yang tidak dihasilkan sendiri.

Sehubungan dengan itu, setelah panen hasil pertanian, mereka mulai melakukan kegiatan pengolahan sagu. Produksi pengolahan sagu itu yang umumnya menjadi makanan pokok mereka sehari-hari. Lauk untuk penganan sagu adalah ikan air tawar yang dengan mudah dapat ditangkap dari perairan sungai yang hampir tersebar luas di wilayah mereka. Kerajaan ini memiliki sungai-sungai yang besar dan dapat dilayari. Hingga sekarang, aliran sungai tetap menjadi infrastruktur yang penting dalam menjalin hubungan antara daerah pemukiman yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu penduduk banyak mengusahakan sarana angkutan dengan sampan bermotor, yang dalam kehidupan mereka dikenal dengan sebutan *katinting*.

Selain bergiat dalam bidang pertanian, mereka juga beternak babi, kambing, ayam, dan itik, hewan-hewan ini dibiarkan berkeliaran dalam kampung. Orang Mori juga memiliki ternak kerbau akan tetapi tidak digembalakan dengan baik. Kelompok suku yang beternak kerbau secara besar-besaran hanya orang Pada, karena mereka memiliki padang rumput yang luas. Ternak ini dibiarkan berkeliaran di hutan-hutan, sehingga menjadi hewan liar. Mereka baru menangkapnya, apabila ingin menyelenggarakan pesta. Ternak peliharaan yang diperdagangkan hanyalah babi, kambing, ayam, dan itik. Babi tergolong hewan yang dipandang bernilai tinggi, oleh karena itu dijual dengan harga yang mahal.

Sebagian penduduk kerajaan ini juga bergiat dalam industri rumah tangga, seperti kerajinan pengolahan besi, tembaga, tembikar, pengolahan bahan pakaian dari kulit kayu, dan kerajinan anyam-anyaman. Bahan baku pengolahan besi diperoleh dari daerah pegunungan di sekitar Danau Matano. Hasil kerajinan besi

yang sangat populer adalah pedang. Pedang Mori dikenal keampuhannya karena sekali ditebaskan pada seseorang dapat langsung memisahkan kepala dari tubuhnya. Produk ini umumnya tidak diperdagangkan sehingga hanya dijadikan simbol budaya senjata tradisional. Oleh sebab itu, setiap lelaki Mori yang keluar dari kampungnya ke tempat lain, seperti ke kebun atau ke kampung lainnya, selalu membawa sebilah pedang dan sebilah tombak. Produk kepandaian melebur besi lainnya berupa sejumlah peralatan perang, seperti mata tombak dan mata panah, peralatan kerja dan rumah tangga, seperti parang dan pisau.

Tembaga adalah jenis logam yang sangat dihargai penduduk. Hal ini mungkin berkaitan dengan penemuan tokoh yang kemudian diangkat menjadi *mokole* yang dipandang turun ke bumi dan duduk di atas dulang tembaga. Oleh karena itu peralatan dari tembaga dan mata uang tembaga yang diperoleh lewat perdagangan dilebur dan diolah kembali menjadi barang-barang perhiasan, seperti: gelang, cincin, dan giring-giring. Seorang Mori akan bangga apabila memiliki sebuah giring-giring tembaga yang dipasang tali dan dililitkan di pinggang. Anggota keluarga perempuannya memakai gelang dan cincin yang terbuat dari tembaga. Sementara pada penguasa, raja, *mokole*, dan *bonto*, menggantungkan giring-giring tembaga pada puannya (tempat sirinya) sebagai simbol kekuasaannya. Produk perhiasan tembaga Mori ini juga dipasarkan ke daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah.

Produk kerajinan pembuatan tembikar, seperti: tempayan, periuk, dan piring hanya diperuntukan bagi kebutuhan rumah tangga domestik. Demikian juga kerajinan pengolahan bahan pakaian dari kulit kayu dan barang-barang anyaman. Produk dari kerajinan ini

umumnya merupakan hasil kegiatan kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri.

Selain itu sebagian penduduk, khususnya penduduk daerah palili bergiat mengumpulkan madu dari lebah hutan. Produksi madu ini merupakan salah satu hasil usaha yang diserahkan oleh para penguasa daerah *palili* kepada raja sebagai upeti, disamping hasil produksi pertanian, seperti beras, dan usaha peternakan seperti kerbau dan babi. Di samping penyerahan upeti tahunan, para penguasa daerah *palili* juga dibebankan kewajiban mengantar madu, beras, dan kerbau apabila ada seorang raja, *mokole*, atau keluarganya meninggal dunia. Ketika kegiatan perdagangan semakin berkembang memasuki dunia Kerajaan Mori, mereka juga semakin bergiat mengolah madu dan mengolah sarang lebah menjadi bahan lilin dan dipasarkan ke pusat-pusat perdagangan yang berada di wilayah pesisir.

Dalam perkembangan kemudian, memasuki paruh kedua abad ke-19, ketika ada permintaan produksi hutan berupa rotan dan damar dalam dunia pasar di Zona Perdagangan Laut Jawa (perdagangan di Hindia Belanda), penduduk Mori juga mulai bergiat meramu produksi hutan. Kegiatan meramu produksi hutan ini merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan setelah panen. Kegiatan meramu produksi hutan itu dipengaruhi oleh kehadiran para peramu dari luar kerajaan, seperti: orang Tolaki, Luwu, Poso, dan Bugis. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Alb. C. Kruyt, para peramu dari daerah luar itu diterima dengan baik, karena Kerajaan Mori tidak memiliki riwayat permusuhan dengan kerajaan-kerajaan dari para peramu hutan yang datang ke negerinya.<sup>10</sup> Selain produksi hutan yang telah

disebutkan itu, daerah ini juga menghasilkan sejumlah jenis kayu yang masuk dalam dunia perdagangan ketika itu, seperti: kayu binti (*citex cofasus*) dan kayu cempaka (*michelia ep.*).

Perdagangan produksi hutan ini berdampak bagi terbukanya sejumlah pusat-pusat pasar perdagangan di daerah pesisir, antara lain: Tambayoli, Towi, Bungintimbe, dan Linkobu. Di pusat-pusat pasar itu dijumpai para pedagang dari Sulawesi Selatan: pedagang Bugis, Tomboku, Arab, dan Cina. Dengan demikian, semakin menyemarakkan kegiatan pasar tradisional yang sejak lama berkembang, seperti pasar Sampalowo dan Sakoyo. Pasar Sampalowo dilakukan seminggu sekali, sementara pasar Sakoyo setiap 20 hari sekali. Menurut informasi, pasar di Sakoyo diramalkan oleh pengunjung pasar yang kadang mencapai jumlah sekitar 1.000 orang. Keramaian itu tentu berkaitan dengan banyaknya peramu hutan dari daerah luar dan para pedagang yang datang mengais keuntungan dari perdagangan produksi hutan di pusat-pusat pasar di daerah pesisir.

Perkembangan perdagangan produksi hutan itu menciptakan sumber kesejahteraan baru bagi raja dan para *mokole*, karena setiap peramu produksi hutan wajib membayar pajak produksi hutan kepada Raja Mori dan juga kepada *mokole* jika mereka meramu produksi hutan di daerah kemokolean. Menurut perkiraan Alb. C. Kruyt, Raja Mori, Marunduh Datu ri Tana (Marunduh III) setiap tahunnya memperoleh *buangtana* sebanyak fl. 1.000,- (seribu *gulden*), sementara beberapa *mokole* yang memungut *buangtana* diperkirakan masing-masing dapat memperoleh sekitar fl 300,- (tiga ratus *gulden*). Pendapatan Raja Marunduh Datu ri Tana yang lebih banyak itu didasarkan pada

<sup>10</sup> [Ibid. hal. 561-2.](#)



ketetapan bahwa peramu hutan di daerah kemokolean dan palili juga wajib membayar buangtana kepada Raja Mori.

Selain itu, kebijakan pemerintah kerajaan untuk membuka daerahnya bagi kegiatan perdagangan itu telah memungkinkan kerajaan dan kemokolean memperkuat kedudukan kekuasaannya dengan pembelian persenjataan modern. Menurut perkiraan Alb. C. Kruyt, ada sekitar 100 pucuk senjata api yang terdapat di Mori, diantaranya Raja Mori sendiri memiliki 30 pucuk senjata api dari berbagai jenis. Masuknya senjata api di kerajaan ini menunjukkan bahwa para pedagang yang bergiat di pusat-pusat pasar produksi hutan di kerajaan ini juga melakukan hubungan perdagangan langsung dengan pelabuhan bebas Singapura. Pada pusat-pusat perdagangan di Hindia Belanda, termasuk pusat perdagangan yang berstatus pelabuhan bebas, seperti: Makassar, Kaili (Donggala), Manado, Ternate, Banda, dan Amboina, dilarang memperdagangkan senjata perang, amunisi, dan juga candu. Hal itu menunjukkan bahwa persenjataan yang dimiliki itu diperoleh dari luar Hindia Belanda. Salah satu pusat perdagangan yang memiliki hubungan perdagangan dengan Hindia Belanda yang memperdagangkan persenjataan perang secara bebas adalah Singapura.<sup>11</sup> Pedagang-pedagang Inggris yang berniaga di Singapura memasarkan produksi itu secara bebas dan mengajarkan pula cara menggunakan dan merawat senjata api itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa impor senjata api ke Mori sudah pasti dilakukan oleh pedagang-pedagang yang melakukan hubungan perdagangan langsung dengan Singapura.

Senjata yang dimiliki oleh raja dan para *mokole* itu pada awalnya merupakan hadiah

yang dianugerahkan oleh para pedagang Bugis atau Cina yang ingin mengais keberuntungan di daerah ini. Hal itu sudah merupakan tradisi niaga orang Bugis dan Cina yang suka memberikan hadiah yang memikat kepada penguasa setempat agar diterima dan dilindungi kegiatan niaga mereka.<sup>12</sup> Hadiah yang diberikan itu pada gilirannya mendorong untuk memperbanyak kepemilikan senjata api. Akhirnya terjadilah transaksi perdagangan senjata api dan amunisi antara para pedagang Bugis dan Cina yang menjalin hubungan niaga langsung ke Singapura dengan raja dan para *mokole*.

Berkembangnya perdagangan senjata api dan amunisi di daerah ini pada gilirannya menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran produksi hutan dari daerah ini tidak hanya ke pusat-pusat perdagangan di Hindia Belanda saja, tetapi juga langsung diekspor ke Singapura. Itu berarti produksi daerah ini juga diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Mori langsung ke Singapura, dengan demikian berlangsung hubungan perdagangan antara Mori - Singapura. Selain itu juga memperlihatkan bahwa perdagangan produksi hutan di daerah ini masih bebas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda.

Wilayah atau kerajaan yang masih bebas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda dan bebas menjalin hubungan komersial dengan Singapura itu yang mendorong pemerintah Hindia Belanda bergiat untuk menaklukkannya dan mengontrolnya. Kerajaan Mori termasuk salah satu kerajaan yang hingga pertengahan tahun 1907 masih merdeka dan berdaulat penuh. Keinginan untuk menaklukan kerajaan-kerajaan yang merdeka itu didasarkan atas beberapa faktor:

<sup>11</sup> Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819 dengan status pelabuhan bebas (*free port*). Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 59.

<sup>12</sup> Baca: Philip O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa* (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan: 1977).

1. Kerajaan-kerajaan merdeka dan berdaulat itu dapat memperkuat kedudukan militernya dengan membeli persenjataan perang dengan melakukan hubungan perdagangan langsung dengan pedagang Inggris di Singapura;

2. Kemajuan persenjataan dari kerajaan merdeka dan berdaulat merupakan ancaman bagi kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

3. Para country trader, pedagang Inggris bekas pegawai *British East India Company* (British EIC) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah Kerajaan Inggris untuk memasarkan produksi Inggris, dalam kegiatannya tidak hanya memasarkan produksi industri, tetapi juga bergiat mendapatkan koloni bagi imperium Inggris.

Atas dasar itulah, pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Kerajaan Mori. Peristiwa ini akan diungkapkan dan dijelaskan pada pokok bahasan Perang Mori I atau yang lazim juga disebut Perang Ensaondau.

## Stratifikasi Sosial

Pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat Mori berkaitan erat dengan legenda mereka tentang pemimpin yang diturunkan ke bumi, yang memiliki kewenangan untuk memegang kendali politik dan memiliki kemampuan untuk menguasai dan memerintah rakyat. Kisahnya bermula ketika penduduk Ligisa berpindah dan menetap di Moiki. Di tempat pemukiman yang baru ini hasil usaha pertaniannya berlimpah, dan ternak mereka berkembang biak dengan baik. Pada suatu hari, pada siang hari dibawah terik sinar matahari, tiba-tiba turun hujan. Situasi yang demikian diyakini oleh penduduk sebagai suatu pertanda akan terjadi peristiwa yang luar biasa yang menggembarakan atau dapat juga merupakan suatu malapetaka. Oleh karena itu seluruh pen-

duduk datang berkumpul di tempat kediaman pemimpin mereka, Numunuo. Ketika semua penduduk telah berkumpul, hujanpun reda. Sekonyong-konyong mereka menemukan seorang anak di samping rumah kepala suku mereka, duduk di atas sebuah dulang tembaga yang berkaki, yang ditutupi dengan selembar tenunan mawa. Tali pusat anak itu terbuat dari emas yang dililitkan pada bahunya dan sebuah gong sebagai penutup kepalanya.

Anak yang ditemukan itu dipandang oleh mereka sebagai seorang putera yang diturunkan ke bumi oleh Sang Pencipta, untuk menjadi penguasa atas mereka sehingga mereka menyebutnya *mokole*. Oleh karena tempat di mana ia diturunkan adalah di Moiki sehingga putera itu disebut atau diberi predikat sebagai Mokole Moiki. Ketika anak itu menjadi dewasa, ia berkeinginan dapat mempersunting perempuan yang memiliki derajat yang setara dengannya yang berdiam di Matano, yang dikenal dengan sebutan Mokole Mohainga. Konon puteri yang menjadi Mokole Mohainga itu adalah juga seorang puteri yang diturunkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi penguasa atas penduduk Mohainga. Keturunan dari perkawinan inilah yang membentuk satu kelompok strata bangsawan, yang dalam masyarakat Mori disebut strata mokole.

Strata bangsawan *mokole* ini terbagi atas dua kategori, yaitu *mokole motaha* dan *anano mokole*. *Mokole motaha* adalah keturunan *mokole* yang lahir dari ayah dan ibu yang berdarah murni *mokole*, atau antara ayah yang berdarah murni *mokole* dengan ibu yang berdarah murni *bonto*. Kelompok strata ini yang dipandang menjadi pewaris sah kedudukan *mokole*, atau Raja Mori. Sementara *anano mokole* adalah keturunan *mokole* yang lahir dari ayah seorang bangsawan *mokole* yang berdarah murni dengan perempuan dari strata yang lebih rendah, dengan kata lain ibunya dari

keturunan kepala suku (*mia mota'u*), rakyat biasa atau seorang budak. Yang juga termasuk strata *anano mokole* adalah keturunan dari strata ini, baik yang memperisteri perempuan dari strata yang sama atau dengan mereka yang berada pada strata bawah. Laki-laki dari strata *anano mokole* dilarang keras mempersunting perempuan dari strata *mokole motaha*, sebaliknya seorang perempuan dari *anano mokole* dapat dipersunting oleh laki-laki dari golongan *mokole motaha*. Dalam hal ini tampak bahwa kedudukan perempuan dalam masyarakat Mori adalah sebagai ibu pemelihara kedudukan kelompok stratanya. Pantang bagi seorang perempuan berstrata tinggi menikah dengan mereka yang kedudukan stratanya lebih rendah. Bila hal itu terjadi maka ia dikenakan sanksi berupa pengasingan ke luar Kerajaan Mori.

Penataan strata kebangsawanan *mokole* ini erat berkaitan dengan penataan kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kerajaan. Secara konvensional ketentuan ini terus dipertahankan dan diakui bahwa kelompok yang berada pada strata yang lebih rendah tidak diperkenankan memerintah dan melaksanakan kekuasaan terhadap mereka yang berada pada strata yang lebih tinggi. Dalam hubungan inilah, pilihan utama untuk menjadi raja atau *mokole* haruslah dari mereka yang berdarah *mokole motaha*. Sebagai ilustrasi, ketika Raja Mori XIII Mokole Owolu Marunduh menunjuk Pirau Marunduh sebagai Putra Mahkota yang tergolong *mokole motaha* yang secara tradisional akan menjadi pewaris tahta kerajaan untuk menggantikannya kelak. Dalam hal-hal yang luar biasa, misalnya tidak ada keturunan bangsawan yang berdarah murni *mokole motaha*, atau karena masih muda usia, maka pilihan dapat diambil dari mereka yang berdarah *anano mokole*, dalam posisi sebagai pejabat perwalian. Apabila pilihan ini harus terjadi, maka setelah ia dewasa dan dipandang telah di-

pandang telah cukup mampu untuk berperan sebagai pemegang kendali politik kerajaan, maka raja atau *mokole* yang berdarah *anano mokole* harus meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada yang diutamakan mengemban kedudukan itu (*mokole motaha*).

Kelompok bangsawan yang lebih rendah dari strata *mokole* adalah keturunan *bonto*. Keturunan ini sesungguhnya adalah keturunan dari seorang kepala suku Maruruno, akan tetapi pada periode pemerintahan Raja Mori IV, Sungkawawo (1680-1720), ia mengangkat kepala suku itu sebagai pejabat *bonto*, panglima perang kerajaan, dan menetap dekat istana kerajaan. Dalam kedudukannya sebagai pejabat terdekat/ pendamping raja, pejabat itu bergiat memperluas pengaruhnya sehingga pada akhirnya dipandang juga sebagai kelompok strata bangsawan, namun kedudukannya berada di bawah strata *mokole*. Keturunan *bonto* yang dipandang berdarah murni *bonto* adalah keturunan yang lahir dari ayahnya adalah seorang keturunan *bonto* dengan perempuan dari keturunan *mia mota'u*. Sementara keturunan yang lahir dari perkawinan keturunan *bonto* dengan perempuan yang berderajat lebih rendah, seperti orang kebanyakan atau budak dipandang tidak berdarah murni *bonto*. Laki-laki dari kelompok strata ini, menurut tradisi, pantang mempersunting perempuan dari strata *mokole*. Bila hal itu terjadi maka hukuman pembuangan berlaku atas pasangan pernikahan itu.

Dalam sejarah Mori tercatat suatu kisah cinta yang mengharubiru tatkala putera Tabota, pejabat *bonto*, yang bernama Kaori yang menjalin hubungan cinta dengan puteri Raja Mori, Mokole Petasia, yang bernama Welena. Oleh karena Kaori dari strata bangsawan yang lebih rendah sehingga Mokole Petasia menolak keinginan mereka untuk menikah. Akibatnya Kaori bunuh diri karena tidak diperkenankan mempersunting gadis yang dicintainya dengan

tulus. Peristiwa ini menyedihkan Tabota sehingga ia berkeinginan meninggalkan jabatannya dan kembali berkumpul dengan kaumnya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Mokole Wawontuko untuk memikat Bonto Tabota agar pindah dari Petasia dan menetap di Wawontuko. Sejak saat itu, pejabat *bonto* tidak lagi menetap di Petasia.<sup>13</sup>

Strata berikutnya adalah orang kebanyakan atau orang merdeka (*vrijen*). Dalam studi yang dilakukan oleh Jan Kruyt, dia tidak membedakan kelompok ini. Akan tetapi bila dicermati pengungkapannya menyangkut aturan perkawinan dalam strata yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa dalam kelompok ini juga dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu orang kebanyakan yang terpandang dan rakyat biasa. Orang kebanyakan yang terpandang itu adalah keturunan *karua* dan *mia mota'u*. Hal ini berkaitan dengan pengungkapannya, bahwa jika keturunan *bonto* menikah dengan anak perempuan dari kelompok ini (orang kebanyakan yang terpandang, *karua* dan *mia mota'u*), maka keturunannya dipandang berdarah murni *bonto*. Mereka yang berdarah murni inilah yang diutamakan kelak untuk dipilih menduduki jabatan *bonto*. Sebaliknya jika menikah dengan anak perempuan dari rakyat kebanyakan (rakyat biasa) atau budak (*ata*) maka keturunannya dipandang tidak berdarah murni *bonto*. Oleh karena itu tidak berhak dipilih untuk menjabat kedudukan *bonto*.

Masyarakat Mori juga mengenal strata budak (*ata*). Pada awalnya lapisan masyarakat ini hanya dimiliki oleh Raja Mori dan para *mokole* yang menjadi kepala pemerintahan daerah. Namun dalam perkembangan kemudian, *bonto*, melalui strategik perluasan kekuasaannya, juga memiliki budak. Budak-budak itu

tinggal dalam lingkungan istana dan mengabdikan diri sepenuh pada tuannya.

Strata *ata* terbagi atas dua golongan, yaitu *ata pu'u* dan *ata labira*. Golongan budak yang disebutkan pertama adalah budak warisan, yang menurut ingatan kolektif mereka, ketika terbentuknya kemokolean telah mengabdikan sepenuhnya kepada keluarga *mokole*. Sementara golongan budak yang disebut terakhir adalah golongan budak yang diperoleh kemudian. Mereka diperoleh bukan karena dibeli dalam arti yang sesungguhnya, tetapi diperoleh karena mereka adalah orang-orang yang diancam hukuman mati, sehingga menyatakan diri menjadi budak *mokole* agar keselamatannya dilindungi. Dalam kehidupan masyarakat Mori, berlaku ungkapan gigi ganti gigi, darah ganti darah. Oleh karena itu, bila seseorang melakukan pembunuhan, maka dibenarkan keluarga dari yang terbunuh melakukan balas dendam untuk membunuh si pembunuh. Oleh karena itu pembunuh dengan segera berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke istana *mokole* untuk memohon perlindungan (*me'ensa*). Selain itu, bila seseorang, baik lelaki maupun perempuan yang secara adat dinyatakan sebagai "orang kejaran" dan dapat dibunuh, hanya dapat menyelamatkan diri dengan mengajukan *me'ensa* kepada *mokole*. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai *ata labira*. Tidak ada aturan secara kultural yang memungkinkan kelompok strata ini, baik yang pertama kali datang *me'ensa* maupun anak-anaknya dan keturunannya untuk memperoleh pembebasan diri dari statusnya.

Dalam tatanan kultural masyarakat ini juga terdapat aturan tindakan balas dendam terhadap pembunuh atau orang kejaran. Mereka hanya dapat dibunuh apabila belum berada di rumah *mokole* atau *bonto*. Juga dalam keadaan

<sup>13</sup> Baca: [J. Kruyt, op.cit., hal. 72-73 dalam terjemahan.](#)

terdesak, bila kelompok pengejar sudah hampir dapat menangkap orang kejarannya sebelum mencapai masuk ke rumah *mokole*, maka ia dapat mengambil batu atau sepotong kayu di depannya dan melemparkannya ke rumah *mokole* atau *bonto*. Jika lemparan batu atau sepotong kayu itu sampai ke halaman rumah penguasa itu, maka ia telah selamat dan terbebas dari kelompok pengejar. Oleh karena secara kultural dipandang lemparan batu atau sepotong kayu yang berada di halaman rumah penguasa itu mewakili keberadaan dirinya, sehingga pantang orang kejaran itu dibunuh oleh pengejar. Apabila terjadi pembunuhan, maka tindakan itu dipandang sebagai perbuatan menghina *mokole* dan atau *bonto*, sehingga para pemegang kendali politik itu dapat mengirim ekspedisi penghukuman terhadap keluarga atau kesatuan masyarakat yang melakukan pengejaran dan pembunuhan atas orang kejaran itu.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tuan mereka, tidak tampak adanya perbedaan antara *ata pu'u* dan *ata labira*. Mereka melakukan pekerjaan dan tugas pengabdian yang sama kepada tuannya. Tugas pengabdian yang membedakannya adalah tugas atau pekerjaan yang diembankan untuk dilakukan di tempat yang jauh dari lingkungan tuannya. Pada dasarnya kelompok *ata labira* tidak diperkenankan melakukan tugas dan pekerjaan ke tempat yang jauh. Jika ada tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan keluar lingkungan tuannya atau ke tempat lain, maka yang diberikan tugas melakukannya adalah *ata pu'u*. Kelompok budak ini juga secara tradisional pantang dibunuh oleh siapapun dengan menggunakan senjata yang terbuat dari logam besi, apabila mereka melakukan kesalahan. Jika hal itu terjadi, dipandang sebagai perbuatan menghina tuannya, sehingga *mokole* atau raja dapat mengambil tindakan penghukuman atas

pelaku pembunuhan *ata pu'u*-nya. Ketentuan adat hanya membenarkan membunuh seorang *ata pu'u*, baik oleh tuannya (*mokole*) maupun oleh pihak lain karena kesalahan yang dibuatnya, hanya dengan mencekik lehernya hingga tewas (*inonggo*).

Ketentuan adat ini tidak berlaku bagi kelompok *ata labira*. Kelompok ini bebas dari hukuman pembunuhan ketika berada di lingkungan istana raja. Mereka dapat dibunuh apabila ke luar dari lingkungan istana. Oleh karena itu raja tidak akan memberikan tugas pada mereka, jika ada urusan ke luar istana. Di luar istana raja, kelompok *ata labira* tetap merupakan orang kejaran lawannya dan dapat dibunuh.

Selain stratifikasi sosial yang telah diungkapkan itu, dalam masyarakat Mori juga dikenal satu kelompok kaum yang berada langsung dalam kewenangan keluarga *bonto* yang disebut *ihi inia*. Kelompok ini sesungguhnya tergolong "orang merdeka" sama seperti penduduk lainnya, akan tetapi memiliki hubungan yang khusus dengan tuannya sehingga dilindungi. Pada dasarnya mereka adalah penduduk yang berhasil diselamatkan oleh *bonto*, dalam perang antara kelompok kaum, ataupun kelompok penduduk yang berhasil diselamatkan dari serangan pihak luar. Atas jasa dari *bonto* itulah, kelompok ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka hanya kepada keluarga *bonto*, sehingga raja dan *mokole* tidak dapat mencampurinya. Hubungan timbal-balik mereka ini tidak dapat dipandang sebagai hubungan patron-klien, tetapi lebih ke arah hubungan antara protektor dengan protektorian, atau memandang kelompok *ihi inia* sebagai *palili* (baca: orang taklukan) yang mendapat perlindungan khusus dari *bonto*.

Kelompok *ihi inia* ini sesungguhnya tidak

tergolong sebagai satu strata, walaupun menurut Jan Kruyt kelompok ini membentuk satu strata yang terpisah. Pada dasarnya kelompok ini tergolong strata "orang merdeka" akan tetapi memperoleh perlakuan khusus karena dilindungi oleh tuannya. Kelompok ini diciptakan sebagai satu strategik untuk memperluas pengaruh kekuasaan dan memperoleh sumber kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada kewajiban para anggota kelompok ini untuk tunduk dan patuh sepenuhnya kepada *bonto* dan berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasil usaha mereka hanya kepada tuannya, sebagai imbalan atas perlindungan yang diperolehnya.

Gambaran stratifikasi sosial ini kini telah berubah. Hembusan perubahan mulai terjadi ketika daerah ini berhasil diduduki dan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907. Pada akhir paruh pertama abad ke-19, atas desakan pihak Inggris yang melaksanakan kebijakan anti perbudakan, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijakan melarang perdagangan budak dan membebaskannya. Meskipun strata budak di kerajaan ini bukan tergolong budak yang dapat diperjualbelikan, namun kebijakan melarang perbudakan mendorong pemerintah bergiat membebaskannya. Oleh karena itu kini tidak ada lagi strata budak dalam kehidupan masyarakat Mori, namun perasaan untuk mengabdikan kepada keturunan bekas tuannya masih belum sirna sepenuhnya, meskipun keturunan bekas tuannya memandang dan memperlakukan mereka sebagai keluarga dan makhluk yang setara dihadapan Tuhan. Akan tetapi bantuan dan pertolongan yang diberikan dengan maksud untuk mensejahterakan atau meningkatkan pendidikan mereka membuat mereka tetap merasa ada ketergantungan pada pemberi jasa.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan kolonial diterapkan sistem birokrasi.

Pola ini membutuhkan sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan dalam urusan administrasi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, dianjurkan dan didorong keluarga bangsawan dan rakyat pada umumnya untuk dapat menyekolahkan putera dan puteri mereka agar kelak dapat masuk dalam jajaran birokrasi. Pendidikan tampaknya menjadi wahana untuk masuk dalam birokrasi pemerintahan. Hal itu telah mengubah sistem pemerintahan kerajaan yang bersifat administrasi primordial, yang hanya memberikan peluang kepada strata bangsawan untuk masuk dalam sistem pemerintahan. Tidak dapat disangkal dampak dari birokratisasi pemerintahan dan penyelenggaraan pendidikan telah melapangkan terjadinya mobilisasi sosial. Jika dahulu raja dan kerabatnya yang mendominasi kegiatan pemerintahan, maka pada periode kolonial itu tingkat pendidikan dan kemampuan dalam bidangnya yang menjadi persyaratan utama untuk masuk dalam jajaran birokrasi, meskipun yang lebih diutamakan adalah mereka yang berdarah bangsawan. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya tidak jarang terjadi tampilnya seorang pejabat birokrasi dari kalangan rakyat biasa yang dapat memerintah dan melaksanakan kekuasaan atas bawahannya, yang juga ada yang berdarah bangsawan.

Perubahan persyaratan untuk masuk dalam lingkungan birokrasi dan peluang yang terbuka luas bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dalam perkembangan kemudian mempengaruhi tatanan kultural masyarakat. Konvensi yang pada periode kerajaan menekankan bahwa hanya mereka yang berada pada strata yang lebih tinggi yang boleh melaksanakan kekuasaan atas kelompok yang berstrata lebih rendah secara perlahan-lahan memudar dan tidak berlaku lagi. Hal itu berpengaruh pula terhadap pola hubungan

antara bangsawan dan orang merdeka, meskipun dalam kehidupan kekinian masih dapat teridentifikasi keberadaannya.

### **Kehidupan Budaya Politik**

Masyarakat Mori banyak menyimpan ingatan kolektif mereka dalam bentuk legenda. Legenda-legenda menyangkut awal kejadian bumi ini, awal adanya penghuni dunia, dan juga keturunan para penguasa yang disebut *mokole*. Legenda-legenda itu berpengaruh terhadap pandangan hidup masyarakat dan menjadi norma yang mengatur perilaku mereka, karena mengandung unsur kepercayaan. Namun dalam banyak hal kisah legenda itu ditampilkan secara fragmentaris sehingga perlu dicari jalinan kisahnya untuk dapat memahami ide dan gagasan dibalik kisah itu. Hal-hal ini yang mendapat perhatian untuk mengungkapkan ide-ide, gagasan, dan aturan (*ideas*) yang berkaitan dengan kehidupan politik. Oleh karena itu dalam sub pokok bahasan ini tidak diungkapkan dan dipaparkan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas serta tindakan berpola (*activities*) dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya mereka (*artifacts*).<sup>14</sup>

Orang Mori menyimpan legenda tentang kejadian bumi ini. Menurut kisahnya, sebelum bumi dan segala sesuatu di bumi ini ada, segala sesuatu itu menyatu dan tidak terpisah; langit (*langi*), air (*uwoi*) dan bumi (*wita*) masih bercampur. Satu-satunya yang telah terpisah

adalah tiga tempat bermukimnya angin, yaitu angin timur (*timoe*), angin sibu-sibu dan angin barat (*lau*). Tiga jenis angin ini saling berjumpa di laut yang dalam (*i tongano ndalango*). Disana juga telah berkumpul segala jenis sampah (barang rongsokan, tanaman yang mati, dan sejenisnya) dan bercampur dengan pasir yang bersih, yang menimbulkan gelombang laut hingga terbentuklah bumi (*wawo wita*). Kemudian tumbuh pohon-pohonan, dan turun bina-tang-binatang liar (*ka itii kondehora*).

Ketika segala sesuatu telah jadi, turunlah berbagai jenis manusia (*tii mopagiu-giu mia*): manusia Matahari terbit (*anu te'inso to mata'oleo* - mungkin berarti datang dari sebelah timur), manusia halilintar (*to api-api langi*), orang Purikia, orang Matahari terbenam (*to sooka oleo* - datang dari barat). Terakhir diturunkan datu bersama isterinya. Sepasang manusia ini (*datu* dan isterinya) hidup dalam suasana kesepian tanpa orang lain. Ke mana saja mereka pergi mengembara tampak kemudian kembali pada tempat semula, bagaikan mereka berada dalam kungkungan sebuah taman dan tidak dapat keluar dari taman itu.<sup>15</sup> Kisah ini bagaikan kisah penciptaan manusia awal dengan kehadiran Adam dan Hawa di Taman Firdaus, namun tidak menghubungkan dengan penciptaan oleh Allah.

Kisah tentang kehidupan di dunia sana (*langi*) yang memiliki hubungan dengan dunia sini (bumi) merupakan legenda khusus, namun

---

<sup>14</sup> Menyangkut wujud kebudayaan, baca: Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hal. 186-189.

<sup>15</sup> Baca: [J. Kruyt, op.cit., hal. 106-107](#) dalam terjemahan. Selain legenda tentang penciptaan alam ini, masyarakat ini juga memiliki kisah tentang air bah. Konon ada seorang bapak yang mendengar tentang akan adanya air bah (*lolowi*), sehingga ia membuat sebuah perahu yang besar yang bagian atasnya juga dapat ditutup (*bangka kinunsi*). Setelah selesai ia

bersama isteri dan ketujuh anaknya (3 pria dan 4 puteri) naik ke dalam perahu itu. Mereka juga memuat sejumlah hewan dan tumbuhan, diantaranya juga beras. Ketika air bah terjadi semua makhluk di bumi mati. Air bah itu disebut juga *bomba osio* (sembilan gelombang), karena sembilan kali perahunya diempas oleh gelombang terangkat naik ke langit dan kemudian sembilan kali diempas turun kembali ke bumi. Setelah berakhirnya air bah itu, mereka turun dan meninggalkan perahu dan menghuni bumi ini.

menurut pemikiran saya merupakan suatu yang saling berhubungan. Hanya saja kisah ini ditampilkan untuk memberikan gambaran alam ideal dan gagasan secara terpisah sebagaimana diungkapkan oleh J. Kruyt secara fragmentaris. Legenda tentang hubungan antara penghuni langit sebagai satu dunia yang berada jauh di ketinggian sana (*langi*), bukan suatu abstractum, yang dihuni oleh manusia yang disebut *Lahumoa*. Penghuni dunia sana itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki kekuasaan serta pengaruh yang luar biasa besarnya bila dibandingkan dengan makhluk yang berdiam di bumi ini.

Di langit tinggal seorang penguasa bernama *Lahumoa (Ue Lahumoa)*<sup>16</sup> dan di bumi ini menetap seorang *Datu*. *Ue Lahumoa* memiliki seorang putera, sementara *Datu* memiliki seorang puteri. Pada suatu ketika, putera dari *Ue Lahumoa* melakukan suatu kunjungan ke bumi. Dalam kunjungan itu ia sangat kagum dan terpikat dengan kecantikan dari puteri *Datu*. Oleh karena itu ia langsung kembali ke *Langi* dan menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia ingin menikah dengan puteri dari *Datu*. Ayahnya mengabulkan permintaan puteranya itu, dan mengirimkan utusan ke bumi untuk melamar puteri *Datu* itu. Pada waktu utusan menyampaikan lamaran, *Datu* menjawab: "Saya tidak berani menolak dan saya tidak berani menyetujui" (*Weigeren durf ik niet en toestemmen waag ik niet*). Jawaban atas lamaran itu diinterpretasikan sebagai pernyataan menerima lamaran. Oleh karena itu diperkenankan puteranya turun kembali ke bumi dengan didampingi oleh 10 orang budak yang terdiri dari 5 pria dan 5 perempuan.

*Datu* menyambut kehadiran mempelai laki-laki itu dengan senang hati dan menyeleng-

garakan pesta pernikahan yang sangat meriah. Setelah upacara pernikahan selesai, dibangunlah sebuah rumah yang megah untuk kedua mempelai itu. Konon pengikat lintangan balok tidak menggunakan rotan atau tali, tetapi menggunakan tali emas (*enu-enu*). Di rumah yang indah ini, pasangan rumah tangga yang baru itu yang merupakan pernikahan antara dunia atas dan dunia bawah membangun kehidupan rumah tangga mereka. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 9 orang putera. Ketika putera-putera mereka telah dewasa, masing-masing tersebar dan menjadi pemimpin kaum dengan predikat *mokole*. Karena itu keturunan merekalah yang dipandang berwenang memegang kendali kekuasaan politik untuk melaksanakan kekuasaan atau perintah kepada orang lain. Itulah sebabnya yang selalu dipilih menjadi penguasa atau pemimpin adalah mereka yang berdarah atau keturunan *mokole*.

Pada suatu ketika, putera dari *Ue Lahumoa* kemudian kembali ke Dunia Atas (*Langi*) dengan membawa serta isterinya (puteri dari *Datu*). Sepuluh orang budak (*ata*) yang menyertainya ketika turun ke bumi ditinggalkan dan konon mereka inilah yang menjadi dayang-dayang istana bagi putera-puteri dari buah pernikahan itu dan menjadi penghuni negeri Mori bersama penduduk lain yang sejak lama menjadi penghuni bumi. Oleh karena itu rakyat memandang kelompok *ata* ini yang dikenal dengan sebutan *ata pu'u* sebagai bagian dari kelompok yang berdarah kayangan. Itulah sebabnya aturan adat menetapkan bahwa kelompok *ata pu'u* pantang dibunuh dengan menggunakan senjata yang dibuat di bumi. Pembunuhan atas mereka dengan menggunakan senjata dipandang menghina dan menghujat sang raja (*mokole*) sehingga patut

<sup>16</sup> *Ibid. hal. 106*. Penguasa Langit itu sering disebut juga *Mokole Langi*.



mendapat tindakan penghukuman.

Legenda ini, secara tersirat, dapat menjelaskan mengapa penguasa di kerajaan Mori tidak menggunakan gelar *datu* dan menyebut penguasa mereka dengan gelar *mokole*. Sementara sebelum berlangsungnya perkawinan antara penghuni dunia atas dan dunia bawah, penguasa bumi disebut *datu*. Tampak penyebutan kedudukan kekuasaan itu menunjuk pada kedudukan kepemimpinan dari keturunan penghuni dunia (*datu*) adalah seorang pemimpin yang tidak memiliki sifat keilahan, atau dengan kata lain tidak memiliki kekuasaan yang disakralkan. Selain itu juga sesuai dengan gambaran ideal mereka bahwa kepemimpinan dari penghuni dunia atas (*mokole*) yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa bila dibandingkan dengan penghuni dunia bawah (*datu*) dan menjadi pemimpin yang menguasai kekuasaan supernatural. Terjadi proses sakralisasi kedudukan kekuasaan *mokole*. Hal itu menunjukkan bahwa kepemimpinan *datu* berada pada peringkat kepemimpinan duniawi dan tidak bersifat religius magis, karena tidak memiliki darah *Lahumoa*.

Keturunan dari perkawinan antara putera *Ue Lahumoa* dan puteri *datu* yang disebut *mokole* yang kemudian menjadi pemegang kendali kehidupan pemerintahan, menempati posisi yang lebih tinggi. Ketinggian kedudukannya itu berkaitan dengan anggapan bahwa dia dan keturunannya mengalir darah penghuni dunia atas, darah *Lahumoa*. Dalam hubungan ini pula keturunannya kemudian mendapat kedudukan khusus dalam masyarakat sebagai kelompok tersendiri yang dapat melaksanakan kekuasaan atas rakyat, dan menempati strata bangsawan yang tertinggi. Mereka ditempatkan sebagai tokoh yang dapat menghubungkan dunia atas dan dunia nyata (dunia bawah) sehingga memiliki kekuatan supernatural yang dapat menciptakan ketertiban dan kesejahteraan

rakyat.

Kedudukan kekuasaan mereka (*mokole*) dipandang bersifat keilahan, dan memegang kendali kekuasaan yang bersifat religius magis. *Mokole* bukan hanya sebagai pemegang kendali politik dalam kehidupan pemerintahan tetapi juga sebagai penghubung antara kehidupan duniawi dan kehidupan religius. Oleh karena itu segala titah dan perintah dipandang sebagai hukum yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. Pelanggaran atau pengingkaran atas titah dan perintah dipandang sebagai sikap penghinaan atas kedudukannya dan hal itu akan berdampak malapetaka. Oleh karena itu rakyat menunjukkan ketaatan mutlak dan pengakuan kedudukan *Mokole* sebagai penguasa mereka yang mampu menciptakan ketentraman dan kesejahteraan.

Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan kisah yang terjadi ketika berlangsung Perang Mori I (Perang Ensaondau). Raja Mori X Tosaleko (1840-1870) memerintahkan kepada Sangaji, pemimpin pasukan pertahanan pada benteng itu untuk berjuang hingga pemberani yang terakhir. Perintah itu tidak dilaksanakan dengan murni dan konsisten, karena diketahui bahwa jumlah pasukan ekspedisi Belanda sangat banyak (sekitar 3000 orang tentara), sementara pasukan yang dipimpin oleh Sangaji di benteng Ensaondau hanya berjumlah 60 orang sementara pasukan lawan menggunakan kombinasi serangan mortir, sejenis senjata yang ketika itu dipandang aneh dan tidak tertandingi sementara mereka hanya menggunakan panah, tombak, dan pedang, sehingga tidak meneruskan perlawanan. Pemimpin pasukan, Sangaji, menyatakan menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Tindakan itu dipandang sebagai penghinaan terhadap *mokole* sehingga dua orang utusan raja yang tergabung dalam pasukan pertahanan itu mengambil tindakan amuk dengan membunuh penduduk yang

berada di benteng itu. Tindakan mereka itu berhasil dihentikan oleh pasukan penjaga bendera Belanda dengan menembak mati pengamuk itu.<sup>17</sup> Selain itu, Sangaji yang menyadari bahwa tindakannya itu menyalahi ketentuan yang berlaku, dengan segera memohon kepada panglima ekspedisi militer Belanda agar dia dan pengikutnya dapat dibawah keluar dari Kerajaan Mori, karena takut akan pembalasan Raja Mori.

Penghinaan terhadap *mokole* dapat pula dikenakan sanksi dalam bentuk denda yang berat atau menjadi budak. Denda yang berlaku adalah 4 ekor kerbau, dan jika yang bersangkutan tidak memiliki kerbau, maka dapat digantikan dengan 4 lembar sarung dan 16 lembar kain katun, dengan perhitungan seekor kerbau ketika itu bernilai sama dengan empat lembar kain katun.<sup>18</sup> Namun demikian keputusan denda atau menjadi budak bergantung pada keinginan sang penguasa. Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan kasus yang terjadi pada periode pemerintahan Raja Mori V Sungkawawo (1680- 1720). Pada suatu pesta *woke* yang dilenggarakan oleh raja yang dihadiri oleh para penguasa lokal, termasuk kepala-kepala suku yang merupakan daerah taklukan, Raja Mori menyatakan bahwa ia merasa dihina oleh Kalambi, kepala suku Maruruno, karena telah

meminum dari gelasny. Kalambi tidak dapat mengelak karena kenyataan gelas itu berada di depannya, sehingga dengan rendah hati memohon maaf dan berjanji akan menebus kesalahannya itu dengan memberikan sejumlah kerbau dan emas. Raja menolak untuk menerima denda yang ditawarkan itu dan hanya menginginkan agar Kelambi menjadi budaknya. Keputusan itu tidak dapat ditolak, sehingga ia menyatakan bersedia menerima keputusan itu. Ia kemudian dijadikan pembantu utama raja dengan mengangkatnya menjadi *bonto*, panglima perang kerajaan.<sup>19</sup>

Ketinggian derajat darah yang mengalir dalam tubuh *mokole* dan keturunannya itu menyebabkan mereka pantang dibunuh dengan menggunakan senjata yang terbuat dari besi, atau dengan kata lain terbunuh dengan senjata buatan manusia. Sanksi yang berat bagi seluruh rakyat, apabila seorang *mokole* atau salah satu keturunannya terbunuh dengan senjata manusia, maka darahnya yang tertumpah di bumi ini dipandang akan mengggersangkan bumi. Hal itu disimbolkan dengan menyatakan bahwa apabila darah *mokole* menetes di bumi maka rakyat tidak boleh menanam dan memanen dalam jangka waktu 3 tahun. Pernyataan itu dapat pula berarti terjadi perkabungan massal untuk memohon ampun kepada *Ue Lahumoa* agar

<sup>17</sup> L.H.W.M. de Stuers, "De Expeditie tegen Tomorie, op de Oostkust van Celebes (April- Juli 1856)", dalam: [Militaire Spectator \(Thn I, Vol III, 1856\), hal. 542.](#)

<sup>18</sup> [J. Kruit, op. cit., hal. 102 dalam terjemahan.](#) Perhitungan dengan sarung dan tekstil (kain katun) ini sebagai pengganti kerbau itu tampak baru terjadi kemudian, ketika kerajaan ini sudah terlibat dalam perdagangan dengan pihak luar, khususnya ketika produksi hutan daerah ini, seperti damar, rotan, dan kayu kuning mulai memasuki pasar. Karena sebelum abad ke-19, penduduk daerah ini hanya memiliki bahan pakaian yang terbuat dari kulit kayu.

<sup>19</sup> [Ibid. hal. 72-3 dalam terjemahan.](#) Peristiwa ini sesungguhnya disengaja oleh raja, karena menurut

pertimbangannya, Kalambi adalah seorang pemberani yang tangguh dan memiliki kemampuan diplomasi yang ulung. Karena itu untuk dapat menguasainya maka raja sengaja meletakkan tempat minumannya di depan tempat duduk Kalambi, ketika ia keluar sejenak. Pada waktu ia kembali duduk di tempatnya semula, raja sengaja menyatakan bahwa ia telah minum dari cawannya. Kalambi tidak dapat membela dirinya karena cawan raja itu berada di depannya sehingga bersedia menerima dan mengikuti keinginan raja.

lahan pertanian mereka dapat kembali menjadi subur. Ketentuan adat yang berlaku bagi *mokole* atau salah seorang keturunannya bila membuat pelanggaran adat maka mereka harus diasingkan ke luar Kerajaan Mori. Kenyataannya hukuman pengasingan yang sering dilakukan adalah mengasingkan pelaku pelanggaran adat dengan menyeberangkan lewat Danau Matano ke daerah di seberang danau. Orang Mori mengidentikkan pengasingan dengan penyeberangan melewati air itu sebagai simbol telah dibunuh dan mati. Oleh karena itu pantang bagi mereka yang diasingkan untuk kembali ke negerinya.

Hal yang sama pula berlaku bagi budak warisan (*ata pu'u*) para *mokole*. Hal itu berdasarkan pandangan bahwa budak *mokole* itu adalah budak yang menemani putera *Ue Lahumoa* ketika turun ke bumi. Oleh karena itu, meskipun status sosialnya dipandang rendah, sebagai budak, namun memiliki kekebalan hukum. Apapun kesalahan yang dibuat oleh *ata pu'u*, pantang dibunuh dengan menggunakan senjata yang terbuat dari besi. Bahkan *mokole* juga tidak boleh membunuh *ata pu'u* dengan senjata apabila ia dipandang menghina, menolak atau mengingkari perintah raja. Atas pelanggaran itu, ia dapat dikenakan hukuman mati, namun dibunuh dengan mencekik lehernya hingga meninggal. Ketentuan ini digunakan untuk menghindari darahnya tertumpah ke bumi, yang dapat berdampak tidak menanam dan menuai selama tiga tahun.

Meskipun *mokole* memiliki darah keturunan *Ue Lahumoa*, namun mereka tidak memandang penguasa langit itu sebagai nenek moyang orang Mori, melainkan memujanya sebagai sang Pencipta penguasa mereka di bumi. Orang Mori percaya bahwa ada empat orang *mokole* yang berada dibawah perintah sang Pencipta. Para *mokole* itu ditempatkan sebagai dewa-dewa mereka, yang disebut: *Ue Alemba* atau

*Sumangapae*, *Ue-ue Wulaa*, *Auambulaa*, dan *Ue Rini* atau *Bisoku*. Dalam kehidupan kepercayaan mereka, keempat dewa yang merupakan bawahan dari sang Pencipta itu yang dipuja dan disembah, dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu menyelenggarakan upacara pemujaan.

*Ue Alemba* atau *Sumangapae* disembah sebagai dewi padi atau dewi pertanian. Upacara pemujaan biasanya dilakukan pada saat akan menanam dan menuai. Upacara itu dipimpin oleh seorang wanita yang menyiapkan sesajian (*powataki*). Setelah upacara itu selesai baru dimulai menanam tanaman padi, demikian juga ketika akan melakukan panen. Dewa *Ue-Ue Wulaa* adalah dewa penyakit cacar. Dewa ini yang sangat ditakuti penduduk. Apabila dewa ini turun ke bumi dan berjalan dari satu kampung ke kampung lain menyebarkan penyangkit cacar (*ue-ue*), pertanda bahwa ia datang untuk mencari siapa yang dapat dijadikan budaknya. Konon orang yang meninggal karena menderita penyakit cacar itulah yang dibawa ke langit untuk dijadikan budaknya. Untuk mengantisipasi penduduk umumnya berkumpul dan memanggil dukun (*sando*) untuk melakukan upacara dengan mempersembahkan sesajian seraya memohon kiranya penduduknya terbebas dari penyakit yang mematikan itu. Ketakutan akan kematian akibat penyakit cacar itu didasarkan pada cara pandang mereka bahwa dunia arwah manusia itu bukan di kayangan (*langi*), tempat bersemayamnya para dewa tetapi di dunia arwah yang mereka kenal berada dalam kewenangan *Ue Ntonuana*.

Dewa yang mendatangkan malapetaka lainnya adalah *Ue Rini*. Orang Mori memiliki pandangan bahwa apabila kita melihat ke atas cakrawala, maka dapat dibedakan dua wilayah. Yang pertama yang mereka sebut *Langi*, tempat bersemayam makhluk *Lahumoa* yang

berada dalam kekuasaan *Ue Lahumoa*. Wilayah yang lainnya adalah *Laro Menee*, tempat bersemayamnya *Ue Rini*. Tempat kedua ini dapat diidentifikasi ketika matahari terbenam di ufuk barat, dimana tampak berwarna-warni itu adalah daerah *Laro Menee*. Dewa ini tidak dipandang bagaikan manusia tetapi sebagai api yang berkobar (*melanga kana api*). Apabila langit di saat matahari terbenam itu berwarna kemerah-merahan, itu pertanda sang dewa turun ke bumi bersama pengikut-pengikutnya. Para pengikutnya menebar penyakit yang mematikan (*meduhu*) manusia dan ternak terutama kerbau. Oleh karena itu para pengikut dan pengiring dewa inilah yang sangat ditakuti.

*Auambulaa* adalah *mokole Ue Lahumoa* yang mendatangkan kesejahteraan sekaligus pula malapetaka, ia juga melipatgandakan keturunan dan hewan peliharaan. Dalam kehidupan orang Mori, apabila mereka menderita sakit atau mengalami gagal panen, mereka selalu berkaul kepada sang dewa ini. Mungkin dewa ini yang dipandang dewa yang baik, yang bersedia mengabulkan permohonan. Upacara pemujaan untuk memohon kebaikan juga sangat sederhana, tidak seperti upacara sesajian kepada dewa *Ue-Ue Wulaa*, yang membutuhkan altar penyembahan dan sesajian yang banyak. Cukup hanya menebar payung hujan di atas tanah dan berdiri di atasnya sambil memohon doa kepada sang dewa. Doa itu diawali dengan pemujaan kepada *Ue Lahumoa*, dan kemudian secara khusus kepada *Auambulaa*.<sup>20</sup>

Penduduk Mori yakin bahwa kehadiran empat dewa yang berada dalam kewenangan *Ue Lahumoa* ke bumi dan menyebarkan malapetaka itu berhubungan dengan pengabdian, penghormatan, dan ketaatan mereka kepada

*mokole* yang adalah keturunan dari *Ue Lahumoa* dan menjadi wakilnya memerintah di bumi dan menjadi penguasa mereka. Oleh karena itu rakyat sangat takut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan adat kelakuan yang berlaku dalam hubungan dengan pengabdian, penghormatan, dan ketaatan kepada *mokole*. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat menempatkan *mokole* mereka sebagai seorang dewa-raja. Pelanggaran terhadap tata tertib hubungan dengan *mokole* dapat berakibat turunnya para dewa penyebar malapetaka ke bumi, demikian pula sebaliknya. Jika perlakuan rakyat tetap pada tatanan kultur politik, itu artinya rakyat akan memperoleh ketentraman dan kesejahteraan, serta terhindar dari malapetaka.

Pandangan ini yang mendasari mengapa rakyat Mori menunjukkan ketaatan yang mutlak dan mengabdikan sepenuhnya kepada *mokole* mereka. Pelanggaran terhadap perintah *mokole* berdampak timbulnya malapetaka. Oleh karena itu setiap penduduk yang tidak melaksanakan perintah raja, dengan segera diambil tindakan penghukuman dengan membunuh. Peristiwa amuk dua orang utusan raja di Benteng Ensandau dan permintaan Sangaji, kepala pasukan Benteng Ensandau, kepada komandan pasukan ekspedisi untuk membawa seluruh warganya ke luar dari Mori merupakan bukti nyata bahwa rakyat takut melakukan pelanggaran terhadap perintah raja. Hal ini menunjukkan bahwa tertib politik akan menjamin tertib sosial, yang pada gilirannya akan mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat.

Gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Mori pada masa dahulu, sebelum masuknya siar agama Kristen, menganut kepercayaan politeis, kepercayaan kepada banyak dewa,

dibacakan oleh dukun (*sando*) pada upacara-upacara pemujaan tertentu.

<sup>20</sup> Baca: [J.Kruyt, op.cit., hal. 108-109 dalam terjemahan](#). Kruyt memaparkan secara detail proses pemujaan dengan baik, serta syair-syair doa yang

dengan corak tersendiri. Dewa-dewa yang dipuja itu dipandang sebagai *Mokole* dari *Ue Lahumoa*, yang dipandang sebagai pencipta atau pembentuk keturunan *mokole*, sebagai pemimpin di bumi. Oleh karena itu kedudukan *mokole* sangat dimuliakan, disanjung, dihormati, dan ditaati. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *mokole* adalah pemegang kendali politik. Segala perintahnya dilaksanakan oleh pendampingnya, yang menjabat karua. Bila dalam wilayahnya terjadi perselisihan antara satu daerah *palili* dengan daerah *palili* lainnya, *mokole* tidak segera turun tangan untuk menyelesaikannya, tetapi menunggu hingga kelompok yang bersengketa datang memohonnya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pada umumnya keputusan yang diambil dalam proses perdamaian itu tidak dapat dibantah oleh pihak-pihak yang bersengketa, melainkan diterima dan ditaati. Proses perdamaian itu umumnya dilakukan menurut tatanan kultural yang bersifat religius magis.

Ketaatan mutlak dari rakyat itu didasarkan kepada tatanan budaya politik yang menempatkan raja pada kedudukan dewa-raja, keturunan dewa yang memerintah di bumi. Penolakan terhadap keputusan raja akan mendatangkan malapetaka. Hal itu pula yang diyakini oleh para *mokole* sehingga mereka tidak perlu mengontrol rakyatnya, karena diyakini bahwa setiap kesalahan yang dibuat oleh rakyatnya pasti dilaporkan karena mereka takut akan akibatnya jika tidak segera diselesaikan oleh *mokole*. Keyakinan akan adanya hubungan erat antara tertib politik, tertib sosial, dan tertib alam itu, menyebabkan tatanan kultur yang berlaku senantiasa ditaati dan dipertahankan karena dipandang memiliki kekuatan abstrak, kekuatan yang melindungi maupun yang merusak tatanan sosial dan politik.

## BAB III

# PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN

Sejarah pembentukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi umumnya cenderung bermula dari kisah kehadiran tokoh luar biasa. Di Sulawesi Selatan misalnya, dijumpai konsep *tumanurung*<sup>1</sup> sebagai wacana dalam pembicaraan tentang pembentukan pemerintahan kerajaan. *Tumanurung* adalah nama yang diberikan kepada tokoh yang dijumpai secara luar biasa dan karena itu dipandang sebagai tokoh yang berhak memegang kendali politik. Sehubungan dengan itulah, para pemimpin kaum sepakat untuk memohon kepada tokoh luar biasa itu agar bersedia tetap tinggal di negeri mereka dan memegang tampuk kepemimpinan atas mere-

ka. Hasil dialog dan kesepakatan yang dicapai itu dituangkan dalam kontrak pemerintahan (*governement contract*) yang dalam kehidupan pemerintahan selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelantikan raja-raja berikutnya.

Kontrak pemerintahan itu memuat kesepakatan menyangkut hak, kewajiban dan kewenangan tokoh yang ditempatkan menjadi pemegang kendali politik dan hak dan kewajiban rakyat yang patut dilindungi oleh penguasa. Selain itu pula dalam kontrak pemerintahan itu dinyatakan bahwa *Tumanurung* ditempatkan menjadi raja, namun dengan syarat bahwa: "Yang Dipertuan (raja) tidak

---

<sup>1</sup> *Tumanurung* adalah satu konsep yang umumnya digunakan dalam kisah pembentukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Penyebutan *Tumanurung* kepada tokoh pertama yang menjadi raja dinyatakan dijumpai secara luar biasa dan dinamakan demikian karena tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa namanya. *Tumanurung* inilah yang kemudian dinobatkan menjadi raja dengan suatu kontrak pemerintahan, atau kontrak politik yang dibuat antara

*Tumanurung* dan para kepala kaum (*galarang*). Kelompok kepala kaum itu selanjutnya berkedudukan sebagai anggota dewan hadat yang mendampingi raja. Baca: H.A. Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1998), hal. 27; Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17* (Makassar: Inninawa, 2004), hal. 17.

menetapkan peraturan dalam negeri tanpa kehadiran *Galarang*, *Galarang* tidak menetapkan permakluman perang tanpa (kehadiran) Yang Dipertuan (raja)".<sup>2</sup> Dalam hubungan dengan ketetapan inilah, sehingga setelah penetapan *Tumanurung* menjadi raja, maka pemimpin kaum (para *galarang*) ditetapkan menjadi kepala pemerintahan daerah (*kegalarangan*) dan merangkap anggota dewan hadat. Dewan ini bertugas mendampingi raja, memberikan pertimbangan kepada raja, dan dalam perkembangannya menjadi dewan pemilih calon pengganti raja. Pembentukan struktur organisasi pemerintahan pada saat pelantikan tokoh yang dijumpai secara luar biasa itu mendasari pernyataan awal terbentuknya pemerintahan kerajaan.

Kisah penemuan tokoh luar biasa ini juga terdapat dalam legenda rakyat Mori, namun memiliki corak dan karakter yang berbeda. Tokoh yang hadir secara luar biasa itu diterima dan ditempatkan untuk memangku jabatan *mokole*. Jabatan itu secara kultural menunjukkan kedudukan kepemimpinan atas kelompok kaum. Namun legenda kehadiran tokoh yang ditempatkan menjadi *mokole* itu memberikan sumber pengabsahan utama untuk menempatkannya menjadi pemimpin atas pemimpin kaum, dan pada gilirannya mengabsahkan status sosial kelompoknya pada strata yang utama dan tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu proses kehadiran dan penerimaannya dalam kelompok menjadi dasar pertimbangan perumusan struktur pemerintahan awal, sehingga legenda ini juga bermakna sebagai pengabsahan pembentukan

pemerintahan awal. Dalam hubungan dengan itu, pengungkapan pembentukan pemerintahan ini akan diawali dengan penelusuran legenda masyarakat Mori tentang kehadiran tokoh yang diposisikan menjadi *mokole* dan pembentukan pemerintahan kerajaan.

## **Ligisa: Pemukiman dan Organisasi Pemerintahan Awal**

Kisah kelompok kaum yang menjadi cikalbakal pembentukan pemerintahan kerajaan adalah kelompok kaum yang menempati dataran Melai. Kelompok kaum ini dipimpin oleh seorang tokoh yang berpengaruh yang dinyatakan diturunkan (dilahirkan) untuk memimpin mereka. Tokoh itu dikenal dengan nama Numunuo.<sup>3</sup> Tokoh ini kemudian menikah dengan Welena, seorang puteri dari kelompok kaum itu. Hasil perkawinan itu dikarunia seorang puteri yang dinamai Wamenti. Pemimpin kaum ini dihormati dan disegani oleh seluruh penduduk, karena itu mereka sangat patuh kepada perintahnya. Ia sangat memperhatikan tata kehidupan rakyatnya dan bergiat secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan kaumnya dengan bijak sehingga keadaan sosial-kultural penduduk digambarkan senantiasa rukun dan damai.

Pada suatu waktu, pemimpin kaum itu memerintahkan seluruh penduduknya untuk bersama-sama mengembara mencari hutan sagu yang menjadi sumber pangan. Mereka kemudian eksodus dengan membawa isteri, anak, dan harta mereka. Tidak berapa lama kemudian ditemukan hutan sagu yang lebat

---

<sup>2</sup> Kutipan ini adalah bagian akhir dari kontrak pemerintahan Kerajaan Gowa. Baca: H.A. Mattulada, *op.cit.*, hal.33. *Galarang* adalah gelar pemimpin kelompok kaum, atau sering juga disebut kepala pemerintahan daerah yang menjadi bagian wilayah

kerajaan. Kerajaan Gowa terbentuk dari sembilan daerah pemerintahan *kegalarangan* (*galarangschap*).

<sup>3</sup> Kisah tokoh ini dapat dibaca dalam: J Kruyt, "*De Moriers van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes)*", dalam *BKI* (No. 80, 1924), hal. 61-66 dalam [terjemahan](#).

dekat Matandau. Berhentilah mereka di tempat itu dan mulai bergiat mengolah tepung sagu dan mempersiapkan penganan. Setelah penganan sagu telah siap, disadari bahwa mereka tidak memiliki wadah (*bolusa*) untuk penganan. Dalam kondisi yang demikian, muncul gagasan salah seorang diantara mereka untuk membuat tempat penganan dari daun boku. Untuk mempersiapkan lauk bagi penganan sagu, mereka mencari ikan di aliran sungai dekat hutan sagu itu dengan menggunakan tombak dari kayu. Peristiwa itu diabadikan dengan memberi nama hutan sagu itu Tambunga i Boku, dan aliran sungai dekat hutan sagu itu dengan nama Tangka Tombak (*Harpoensteel*).

Setelah memberi nama hutan sagu dan sungai yang mengalir dekatnya, sebagai pernyataan pemilikannya, mereka kemudian mencari tempat pemukiman di sekitar hutan sagu itu. Mereka memilih daerah perbukitan dekat hutan sagu itu untuk dijadikan lokasi pemukiman. Mereka membat hutannya dan membangun tempat pemukiman baru. Mereka membangun pertama-tama rumah khusus diperuntukan bagi pemimpin mereka dan kemudian membangun rumah-rumah sebagai tempat tinggal mereka. Tempat pemukiman baru itu mereka namakan Ligisa. Dikisahkan bahwa di tempat pemukiman baru itu mereka hidup dengan tenteram, sejahtera, dan damai.

Pada suatu ketika, di pekarangan rumah pemimpin mereka, tumbuh satu tunas bambu (jenis bambu *tulangbatu*) yang unik. Tunas bambu itu begitu besar sehingga tidak terpeluk oleh seorang dewasa. Keanehan itu mendorong mereka ingin mengetahui bagaimana akar tunas itu. Ketika mereka mengorek tanah di sekitar tunas itu, diketahui bahwa tunas itu tidak berakar. Pemimpin kaum itu akhirnya memerintahkan agar seluruh penduduk tanpa kecuali untuk berkumpul. Pada kesempatan itu ia menyampaikan bahwa tunas bambu ini adalah

satu tumbuhan yang aneh. Karena itu tidak boleh ada yang berniat memotongnya. Kita harus membiarkan tunas ini tumbuh menjadi besar. Tunas itu akhirnya tumbuh menjadi sebatang pohon bambu yang sangat besar.

Di suatu siang, ketika terik sang mentari menyinari bumi Ligisa, tiba-tiba turun hujan lebat yang disertai dengan hujan anak panah yang tidak diketahui dari mana asalnya. Penduduk mengira ada serangan dari musuh, sehingga semua penduduk berlarian menghindari hujan anak panah dan berusaha berkumpul di kediaman pemimpin mereka. Meskipun anak panah menghujani perkampungan mereka namun anehnya tidak ada seorangpun dari mereka yang terkena panah. Ketika semua penduduk telah berkumpul, hujan pun reda dan hujan panahpun juga berhenti. Disaat mereka tengah memikirkan dan mencari jawaban atas keanehan itu, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras. Ledakan itu menyebabkan mereka ketakutan. Dalam kondisi itu pemimpin mereka memerintahkan pemberaninya untuk menyelidiki apa gerangan yang menyebabkan ledakan yang dahsyat itu. Ketika diselidiki ternyata tunas bambu ajaib itu telah terbelah dan di dekatnya berdiri seorang pemuda yang tampan. Pemuda itu berpakaian kuning keemasan sambil berdiri di atas bentangan tenunan kain mawa dan di belakangnya terletak dua blok kain sutra.

Kenyataan itu dengan segera disampaikan kepada Numunuo sebagai pemimpin kaum. Ia kemudian keluar untuk melihat keajaiban yang dilihat oleh pemberaninya itu. Tanpa disadari, ketika ia melihat sang pemuda yang tampan itu, ia langsung memberi hormat dan menyambut pemuda tampan itu seraya memohon sudikiranya berkenan untuk berkumpul bersama mereka. Ketika ia menghampiri pemuda itu sambil memberi hormat, dan memohon untuk bergabung dengan kaumnya, pemuda itu tidak



langsung menjawab permohonan pemimpin kaum itu tetapi merespon dengan permintaan agar ia dapat mengambil dua blok kain sutra itu, dan satu blok sutera dipaparkan pada tempat duduk yang dipersiapkan untuknya dan yang lainnya dibentangkan di bagian atas tempat duduk itu. Setelah segala sesuatu dipersiapkan sesuai dengan permintaan pemuda itu, maka Numunuo mempersilakan pemuda itu untuk masuk dan duduk di atas singgasana yang telah dipersiapkan itu.

Meskipun pemuda itu tidak memberikan jawaban langsung atas permohonan pemimpin kaum itu, namun kesediaannya untuk masuk ke dalam rumah pemimpin kaum itu mengisyaratkan bahwa ia bersedia bergabung dengan kelompok kaum itu. Oleh karena itu pemimpin kaum memerintahkan kepada rakyatnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pesta penyambutan yang meriah, sebagai bukti tanda penerimaan dan penghormatan kepada tamu luar biasa itu. Dalam pesta jamuan makan dan minum arak itu, pemuda itu barulah mulai berkata kepada pemimpin kaum itu. Ia menyatakan: "baiklah Numunuo, janganlah kiranya berkeberatan jika saya menikahi puterimu Wamenti". Numunuo tersanjung mendengar permintaan pemuda itu. Permohonannya itu merupakan suatu pernyataan untuk menjadi bagian dari kelompok kaum. Oleh karena itu pemimpin kaum itu menjawab: "Jika paduka menghendaki demikian, yang mulia, maka hal itu baik adanya dan oleh karena itu saya menyetujuinya".<sup>4</sup> Atas perkenan Numunuo pemuda itu akhirnya dinikahkan dengan Wamenti dan bersama kelompok itu menetap di Ligisa. Atas permintaan kelompok kaum dengan persetujuan seluruh anggota kelompok

kaum ia kemudian dinobatkan menjadi *mokole*.

Legenda ini memberikan informasi yang menarik tentang organisasi pemerintahan yang baru dengan memberikan predikat kepada pemegang kendali politik atas negeri itu dengan predikat *mokole*. Dalam menata kedudukan kekuasaannya, *mokole* kemudian mengangkat Numunuo menjadi pejabat *karua*. Pengangkatan ini berkaitan erat dengan ikatan kekeluargaan dan kedudukannya sebagai pemimpin kelompok kaum, yang pada gilirannya menetapkan kewenangannya. Secara kekeluargaan, *karua* ini adalah ayah mertua dari *mokole* dan ayah dari permaisuri *mokole*, sehingga dipandang peletak dasar (ibu) keluarga penguasa. Itulah sebabnya *karua* memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pengganti *mokole*, namun tidak memiliki hak untuk menjadi raja apabila kepala pemerintahan berhalangan tetap. Dalam hubungan dengan kedudukannya sebelumnya, pemberian jabatan itu menunjuk posisinya berada di atas pemimpin kelompok kaum dan menjadi pejabat penghubung antara *mokole* dan para pemimpin kaum (kepala suku) lainnya. Dalam hubungan ini, *karua* yang mengatur segala kewajiban pengabdian para pemimpin bawahan, berupa penyerahan hasil usaha untuk kepentingan pemerintahan *mokole*. Sehubungan dengan itu kedudukan *karua* dapat dipandang setara dengan jabatan mangkubumi dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Kedudukan pemerintahan di Ligisa itu tidak berlangsung lama karena dalam perkembangan kemudian pemerintah dan rakyatnya melakukan eksodus ke Moiki, sehingga bekas pemukiman awal ini tidak berpenghuni. Menurut Jan Kruyt tempat pemukiman Ligisa

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 61 dalam terjemahan. Percakapan itu diterjemahkan dari tulisan J. Kruyt sebagai berikut: ia berkata kepada Numunuo: "*Wel Noemoenoeo, het zou werkelijk niet kwaad zijn, wanneer ik maar met je*

*dochter Wamenti trouwde*". Jawabannya dinyatakan: "*Waneer U dit wenscht, heer, dan is het goed, dan stem ik erin toe*".

itu masih meninggalkan bekas sebagai suatu benteng.<sup>5</sup> Menurut informasi dari penduduk, di tempat itu kadang masih dapat ditemukan benda berupa peninggalan para penghuni dahulu seperti: benda-benda yang terbuat dari besi dan tembaga, tembikar, dan emas. Penduduk di sekitar daerah ini percaya bahwa Ligisa memiliki hubungan dengan kekuatan alam. Hal itu bukan hanya didukung oleh legenda tentang kehadiran *mokole*, tetapi juga oleh kisah-kisah unik menyangkut daerah itu yang konon dialami oleh penduduk yang memasuki kawasan pemukiman lama itu.

## **Karua Moiki dan Mokole Wawontuko**

Kehidupan rakyat di Ligisa cukup tenteram dan aman tiba-tiba terusik oleh kehadiran armada perahu yang menyusuri Sungai Laa menuju ke wilayahnya. Dari atas bukit Ligisa, *mokole* dan rakyatnya mengamati iringan armada perahu yang memuat para pemberani yang diperlengkapi dengan persenjataan kelewang, tombak, dan panah. Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa armada perahu itu adalah armada perang yang ingin menyerang negerinya. Armada perang itu ternyata adalah armada perang dari *Mokole* Lembo.

Kenyataan itu mendorong *Mokole* Ligisa memerintahkan para pemberaninya untuk bersiaga mempertahankan negerinya untuk memukul mundur pasukan penyerang. Ketika iringan perahu pasukan Lembo mendekat, perintah penyergapan diteriakkan oleh *Mokole* Ligisa, sehingga pertempuran seru segera berkobar. Panah-panah dilepaskan dengan gencar dari kubu pertahanan Ligisa untuk melapangkan gerak maju pemberani yang ber-

perlengkapan pedang dan tombak. Meskipun pemberani Lembo juga melancarkan serangan panah ke kubu Ligisa, namun gerak maju pasukan Ligisa untuk menggempur iringan armada perahu tidak dapat dibendung. Akhirnya armada Lembo berhasil diporandakan dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Dalam keadaan yang terdesak, sisa-sisa pemberani Lembo yang masih selamat bersama *mokolenya*, berusaha meloloskan diri dari serangan pemberani Ligisa. Mereka naik ke perahu mereka kemudian melarikan diri secepatnya. Mereka yang tidak berkesempatan menjangkau perahu, melarikan diri dengan mengikuti aliran sungai. Teriakan-teriakan para pemberani bergema tanda berakhirnya pertempuran dengan kemenangan di pihak para pemberani Ligisa.

Kemenangan pemberani Ligisa itu disambut meriah oleh rakyatnya. Pesta kemenangan pun diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan medan laga yang kembali dengan pekik sorak kemenangan. Pesta kemenangan dan kegembiraan itu berlangsung beberapa hari menyebabkan mereka lupa untuk mengumpulkan jenazah para korban perang, terutama dari kubu lawan (pemberani Lembo). Itulah sebabnya, setelah beberapa hari kemudian, ketika jenazah-jenazah itu mulai membusuk, aroma amis jenazah meliputi udara wilayah pemukiman penduduk. Dalam kondisi itu Numunuo berkata "kita tidak dapat tinggal disini, karena bangkai-bangkai orang Lembo yang dikalahkan itu baunya sangat menyengat. Untuk mencegah dampaknya terhadap penduduk, maka *mokole* memutuskan, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melakukan eksodus.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Jan Kruyt lahir di Gorontalo pada tahun 1893, putera dari Dr. Albertus Christian Kruyt. Ia mengawali kariernya di daerah Poso dan Mori pada tahun 1916.

<sup>6</sup> Kisah eksodus ini dijadikan ingatan kolektif penduduk berbentuk legenda. Konon ketika Numunuo menyatakan kepada *mokole* kita tidak dapat tinggal

Penguasa dan rakyat Ligisa akhirnya berangkat meninggalkan negerinya untuk menempati wilayah pemukiman yang baru agar terhindar dari penyakit dan bau bangkai jenazah. Dalam pengembaraan mencari daerah pemukiman baru itu, mereka menyusuri Sungai Laa dan kemudian berkumpul di wilayah dataran antara aliran Sungai Opusi yang memasuki Sungai Laa, yang kemudian mereka namakan tempat berkumpul itu Morokopa.<sup>7</sup> Tidak berapa lama kemudian mereka pindah ke Wawo'inia, dan membangun tempat pemukiman dan menetap di sana. Di tempat pemukiman baru ini kehidupan mereka lebih aman dan makmur. Hasil usaha pertanian mereka melimpah, ternak peliharaan mereka berkembang biak dengan pesatnya, dan pertambahan penduduk terus meningkat.

Pada suatu ketika, pada waktu siang hari di musim kemarau, secara tiba-tiba turun hujan. Hal ini secara tradisional diyakini sebagai tanda akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu diperintahkan agar seluruh rakyat berkumpul. Ketika semua rakyat telah berkumpul, hujanpun reda. Sekonyong-konyong tampak di samping rumah Numunuo, seorang anak, yang duduk di atas dulang tembaga yang berkaki dan dibungkus dengan kain tenunan mawa. Anak itu masih memiliki tali pusar yang terbuat dari emas yang dililitkan pada bahu, dan kepalanya ditutupi dengan sebuah gong. Legenda ini menunjukkan bahwa bayi yang dijumpai itu juga adalah *mokole* yang turun dari kayangan. Hal yang unik adalah tidak adanya berita tentang kelanjutan keturunan dari hasil

---

disini lagi karena membusuknya mayat sehingga berkeinginan mengantar penduduknya meninggalkan Ligisa, datang seekor burung dari arah Sungai Laa dan hinggap di atas rumah *mokole*, dan berseru: "Di Moiki adalah tempat yang baik untuk bermukim". Hal itu mendorong *mokole* memerintahkan pemberaninya untuk mengikuti arah burung itu ke tempat yang

pernikahan *mokole* dengan Wamenti. Oleh karena itu kisah ini dapat diinterpretasi sebagai sumber legitimasi kharismatik kedudukan sang putera, yang lahir dari perkawinan itu, dan menjadi sang penerus pemegang kendali politik.

Dalam hubungan ini kisah kehadiran bayi itu juga dihubungkan dengan prosesi penjemputan sang bayi, yang bila disimak secara saksama bermakna bagi penataan kedudukan dan kewenangan dalam pemerintahan. Dikisahkan bahwa ketika diketahui kehadiran bayi itu, *Mokole* keluar untuk mengangkat anak itu namun begitu mendekat anak itu langsung menangis sehingga *mokole* membatalkan niatnya. Kemudian karua tampil untuk mengangkat anak itu, sebelum sampai ke tempat anak itu, *karua* telah mengangkat kedua tangannya, bagaikan ingin menjemput dan ia memeluk anak itu, mengangkat dan membawanya ke dalam rumah. Anak ini juga diberikan predikat *mokole*. Oleh karena itu dalam pengungkapan kisah ini *mokole* yang keluar dari bambu di Ligisa disebut *mokole* Ligisa dan *mokole* yang baru ini disebut *Mokole* Moiki. Kisah ini yang terjabar dalam kehidupan politik di Kerajaan Mori, yang secara konvensional menetapkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menobatkan *mokole* adalah *karua*.

Selain itu juga lanjutan kisah legenda ini memberikan makna bahwa segala urusan rumah-tangga *mokole* diembankan sepenuhnya kepada *karua*. *Mokole* tidak berurusan langsung dengan rakyat. Tata aturan itu diungkapkan melalui kisah pemeliharaan anak itu.

disebut Moiki. Setelah mengetahui tempat yang dimaksud atas petunjuk burung itu mereka kembali menjemput seluruh rakyat untuk bereksodus ke Moiki. [J. Kruyt, op.cit., hal. 63-64 dalam terjemahan.](#)

<sup>7</sup> *Morokopa* berasal dari kata *moroko* yang berarti berkumpul. *Morokopa* berarti tempat berkumpul.

Hal itu diungkapkan dengan menyatakan bahwa ketika karua memanggil ibu-ibu yang telah melahirkan untuk membantu menyusui anak itu, tetapi sang anak menolak menyusui pada mereka. Akhirnya dikumpulkan anak gadis untuk menyusui tetapi tetap ditolaknya. *Karua* dalam kebingungan memikirkan bagaimana cara agar dapat menyusui anak itu, tiba-tiba anak itu telah menangkap buah dada *karua* bagian kanan dan menyusui, dan ternyata menghasilkan susu. Oleh karena itu, untuk menjaga agar air susunya tetap banyak maka setiap hari ketika menyusui anak itu, ia duduk dekat tungku masak, kebiasaan ini yang secara tradisional dipandang dapat memperlancar air susu seperti pada seorang ibu. Seorang laki-laki tidak akan mungkin menghasilkan air susu sebagaimana layaknya seorang ibu untuk bayi. Oleh karena itu legenda ini harus dicermati makna dibalik kisah itu. Memberi air susu berarti memberi makan yang pada gilirannya menunjukkan pada kehidupan. Itu berarti kisah ini memberikan nilai vitalitas. Karena itu jelas merupakan wujud pernyataan tugas karua untuk mengurus kehidupan rumah tangga kerajaan.

Ketika anak yang ditemukan secara ajaib itu mencapai usia dewasa, ia juga sering dikisahkan memperoleh predikat *Mokole* Moiki. Numunuo (*karua*) bertanya kepadanya, apakah ia tidak ingin menikah? *Mokole* Moiki menjawab bahwa ia tidak ingin menikah dengan perempuan yang tidak sederajat. Ia hanya ingin menikah dengan perempuan yang memiliki derajat yang sama dengannya, yaitu perempuan dari kayangan yang turun ke bumi. Pada waktu itu karua pernah mendengar bahwa di Mohainga, di daerah sekitar danau Matano, terdapat seorang *mokole* perempuan (orang yang turun ke bumi). Oleh karena itu ia mengutus dua orang pemberaninya ke Mohainga untuk meninjau keadaan dan

berusaha bertemu dengan *mokole* itu dan melamarnya seraya membujuknya untuk keluar dari negerinya dan menikah dengan *Mokole* Moiki. Ketika utusan itu tiba, rakyat sedang melaksanakan pesta *woke* yang meriah, sehingga dengan mudah kedua pemberani tersebut berhasil lolos dan masuk untuk menemui *Mokole* Mohainga. Pada perjumpaan itu disampaikan tujuan kehadiran mereka. Tampaknya mereka tidak bertepuk sebelah tangan, karena lamaran untuk menikah dengan Numunuo diterima.

Utusan *karua* itu selanjutnya mengajak *Mokole* Mohainga untuk mengikuti mereka ke Moiki. Ia menyatakan tidak berkeberatan, tetapi memohon kiranya terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya untuk menjadi permaisuri *Mokole* Moiki kepada *karua*. Utusan itu kemudian bergegas meninggalkan Mohainga, dan segera kembali untuk menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan *Mokole* Mohainga kepada *karua*. Berita itu menggembirakan *karua* (Numunuo) sehingga ia langsung berangkat dengan sejumlah pemberaninya untuk menculik *Mokole* Mohainga. Menjelang subuh, mereka memasuki Mohainga dan menculik *mokole*-nya. Para penduduk dan pemberani yang melindungi *mokole* tidak mengetahui bahwa telah terjadi penculikan *mokole* mereka karena semuanya tertidur pulas akibat kelelahan setelah mengikuti acara pesta *woke*.

Setelah Numunuo berhasil membawa *Mokole* Mohainga ke luar wilayahnya, para pemberani yang menyertainya bersorak-sorai dengan yel-yel kemenangan. Hal ini tentu saja mengagetkan yang serta merta membangunkan para pemberani Mohainga, yang kemudian sadar bahwa *mokole* mereka telah diculik. Oleh karena itu dengan segera mereka melengkapi diri dengan persenjataan perang dan mengejar para penculik. Ketika mereka

berhasil mendekati kelompok penculik dan ingin memulai pertempuran untuk merebut kembali *mokole* mereka, Numunuo berbalik dan berkata kepada para pemberani Mohainga: "saudara-saudaraku, jangan kalian marah kepada kami, oleh karena kami datang untuk mengambil seorang anggota keluarga kalian; hal ini kami lakukan bukan karena keinginan kami, tetapi keinginan dari *Mokole* Moiki, dia juga seorang *mokole* yang diturunkan ke bumi."<sup>8</sup> Ketika mendengar pernyataan Numunuo itu, redalah amarah para pemberani Mohainga, dan dengan berat hati mereka harus menerima kenyataan itu dan kembali ke negerinya.

Setelah menghantar calon permaisuri *Mokole* Mohainga ke Moiki, Numunuo segera memerintahkan kepada rakyatnya untuk mempersiapkan upacara pernikahan yang meriah. Para kepala suku tetangga diundang untuk menghadiri upacara pernikahan pasangan *mokole* itu. Upacara pernikahan ini diwarnai pula dengan penyebaran informasi bahwa di Moiki ada *mokole*, tokoh yang diturunkan ke bumi dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memerintah. Itulah sebabnya tidak berapa lama setelah pernikahan itu datang dua orang kepala suku dari daerah pegunungan yang bernama Ruruhako dan Tandu Rumburumba ke Moiki dan memohon agar diperkenankan untuk memenuhi permohonan mereka untuk membawa *Mokole* Moiki untuk berdiam bersama mereka di Wawontuko dan menjadi raja mereka.

Permohonan dua kepala suku itu dipenuhi oleh *Mokole* Ligisa, dengan berpesan pertama-tama kepada kepala suku itu, sebagai berikut: "Baik adanya, apabila dia (*mokole*) akan tinggal di Wawontuko; tetapi ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa ibunya tinggal di Moiki, peralatan dapur dan makannya ada

disini. Apabila hendak menunjuk seorang *mokole* menjadi penggantinya, pertama-tama ia harus datang kepada ibunya (dalam hal ini adalah *karua*) untuk memperkenalkan kepadanya calon yang akan menggantikannya. *Karua* akan membangun sebuah rumah dan akan tinggal di rumah itu sambil menantikan puteranya, dan ia akan mempersiapkan pakaian untuk puteranya yang kelak menjadi *mokole*..." Setelah berpesan kepada kepala suku itu, ia kemudian berbicara dengan *Mokole* Moiki, yang dalam pesan ini disebut sebagai anaknya. Ia menyatakan: "anakku, saya perintahkan engkau pergi dan menetap di Wawontuko. Apabila ada seorang *mokole* yang meninggal, segera beritahukan kematian itu kepada *karua*, karena ialah yang akan menangi dan menciptakan keheningan atas kematianmu. Talipusar emasmu harus ditinggalkan di Moiki karena *karua* yang harus menyimpannya. Jika ada *mokole* yang meninggal, jenazahnya harus disimpan dalam kelambu."<sup>9</sup>

Kisah ini memberikan informasi kepada kita bahwa dalam perkembangan kemudian, setelah kematian *Mokole* Ligisa, tidak lagi menjadi *kemokolean* tersendiri. Hal itu didasarkan atas kisah bahwa puteranya yang menjadi *mokole* telah berpindah ke Wawontuko. Dengan demikian *kemokolean* yang ada adalah *Kemokolean* Wawontuko, dan yang menjadi *mokole* pertama adalah *Mokole* Moiki, yang kemudian lebih lazim disebut *Mokole* Wawontuko. Perpindahan itu menunjukkan pula pemindahan pusat pemerintahan kerajaan dari Moiki ke Wawontuko, dan penetapan Moiki menjadi tempat pemukiman pejabat *karua*, pejabat kerajaan yang berwenang untuk mengurus upacara kematian, upacara pemilihan dan pelantikan dan urusan rumah tangga *mokole*.

Legenda menyangkut cikal bakal pembed-

<sup>8</sup> [Ibid., hal. 64 dalam terjemahan.](#)

<sup>9</sup> [Ibid., hal. 65 dalam terjemahan.](#)

tukan Kerajaan Mori ini tampak menunjukkan bahwa pembentukan pemerintah dan penetapan pusat pemerintahan awal bermula di Wawontuko. Kota ini menjadi pusat administrasi pemerintahan Kerajaan Mori yang pertama, dan Mokole Moiki dapat dipandang sebagai Raja Mori yang pertama, dan ber-predikat sebagai Mokole Wawontuko. Raja Mori I ini, berdasarkan beberapa sumber, disebut Marunduh I, sekitar 1580-1620.<sup>10</sup> Penetapan ini juga didasarkan pada kisah bahwa sejumlah kepala-kepala kelompok kaum telah menggabungkan diri kepada *Kemokolean* Wawontuko yang menunjukkan perluasan pengaruh kekuasaan atas sejumlah wilayah kelompok kaum di wilayah Mori. Namun demikian yang patut dipahami adalah perenungan proses kelampauan ini berlandas pada legenda penduduk Mori, sehingga sangatlah sulit untuk dapat mengetahui waktu yang tepat menyangkut pembentukan kerajaan, periode pemerintahannya, dan hal ikhwal pemerintahan raja pertama ini. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Mori tidak meninggalkan catatan kronik kerajaan, dan dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut kegiatan kerajaan. Informasi yang berlandaskan pada legenda hanya memberikan keterangan tentang hasil perkawinannya dengan Mokole Mohaing, dikaruniai tujuh orang anak: enam orang putera dan seorang puteri.

Meskipun demikian, dengan memperhatikan kisah penyerangan Kerajaan Luwu atas kerajaan ini yang dipimpin oleh Datu Palopo, maka dapat dipastikan bahwa peristiwa itu terjadi pada periode pemerintahan Datu Luwu, Setiaraja Matinroe ri Tompotika (1663-1704). Hal ini didasarkan pada sejarah Luwu yang mengkisahkan bahwa ia adalah datu Luwu

yang bergiat memperluas pengaruh kekuasaannya. Dengan demikian dapat diperkirakan peristiwa penyerbuan ke Kerajaan Mori berlangsung pada tahun 1670.

Penyerangan Luwu itu terjadi pada periode pemerintahan Ratu Wedange, pemegang kendali politik Kerajaan Mori ke 3. Dengan berpatokan pada kisah itu dapat dipastikan bahwa pembentukan Kerajaan Mori itu terjadi pada paruh kedua abad ke 16. Dengan demikian dapat diperkirakan periode pemerintahan Raja Mori yang pertama, Marunduh I, sekitar tahun 1580-1620.

Ketika raja telah uzur dan tidak berdaya lagi melaksanakan kekuasaan, maka ia membagi wilayah-wilayah kekuasaannya kepada putera-puteranya. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik diantara mereka dalam memperebutkan kedudukan pemegang kendali politik atas Kerajaan Mori. Yang ditunjuk untuk kelak menggantikan ayah mereka adalah puteranya yang tertua. Ia yang tetap tinggal di Wawontuko. Lima puteranya yang lain, masing-masing memerintah wilayah-wilayah bagian lainnya, yang tidak diketahui dengan jelas nama wilayah pemerintahannya. Sementara puterinya dipersunting oleh putera mahkota Banggai, sehingga dalam ingatan kolektif masyarakat Mori dinyatakan menjadi *mokole* di Banggai. Siapa sesungguhnya nama putera yang menggantikan Marunduh I itu tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu, dalam penulisan ini disebut Raja Marunduh II (1620-1650).

Penelitian J. Kruyt menyangkut Kerajaan Mori ini tidak memberikan informasi yang jelas menyangkut wilayah pemerintahan lima putera *mokole* itu. Namun dalam kehidupan kerajaan dikenal ada dua kelompok kaum yang memiliki

<sup>10</sup> Baca: W.F. Taroreh, "Silsilah Mokole-Mokole Mori" (Menado: manuskrip, 1992), hal. 3; Romus M. Kalaena, "Perang Wulanderi (Agustus 1907)" (Palu:

Skripsi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, 1995), hal. 20.

pemimpin mereka dengan gelar *mokole*, yaitu kelompok kaum yang disebut To Sangua yang bermukim di daerah Sarombu dan kelompok kaum yang bermukim di Pampawu atau Tolitoli. Mokole Sarombu dan Mokole Pampawu dipandang sederajat dan memiliki hubungan keluarga dengan Mokole Wawantuko dan Mokole Petasia. Dalam urusan-urusan pemerintahan yang sangat penting, seperti peperangan atau perjanjian persahabatan dengan kerajaan lain, keempat *mokole* ini berkumpul bersama dengan dua orang *karua* dan seorang *bonto* untuk memecahkan persoalan dan memutuskan kesepakatan kebijakan politik di istana Mokole Petasia.<sup>11</sup> Dalam rapat hadat ini, Mokole Petasia yang dipandang sebagai ketua hadat dan para *mokole*, *karua*, dan *bonto* sebagai anggota dewan hadat. Atas dasar ini dapat diinterpretasikan bahwa diantara lima putera yang tidak dikisahkan dalam legenda itu, dua diantaranya diangkat menjadi *mokole* di Sarombu dan Pampawu, dan dalam perkembangan selanjutnya keturunannya yang kelak mewarisi kedudukan *mokole* di daerah itu.

Interpretasi ini didukung pula oleh keterangan yang dihimpun oleh J. Kruyt tentang siapa calon pengganti Mokole Marunduh III (Marunduh Datu ri Tana 1870-1907) yang ketika itu telah berusia sekitar 60 tahun yang memegang kendali politik Kerajaan Mori apabila kelak berhalangan tetap. Dinyatakan bahwa ada empat orang bangsawan yang memiliki derajat kebangsawanan yang layak menjadi Raja Mori, yaitu (1) Mokole Pumbeu, Mokole di Sarombu; salah seorang puteranya menikah dengan seorang keturunan raja Matandau (Petasia), (2) Mokole Sampalea yang menetap di Sarombu; (3) Mokole La Getie yang menjadi Mokole di

Pampawu; kemenakan perempuannya menikah dengan saudaranya Mokole Marunduh III; (4) Mokole Landika yang menikah dengan Wegili, saudara perempuan Mokole Ede (*Mokole* di Wawontuko). Mokole Ede tidak diperhitungkan karena ketika itu telah terjadi perselisihan dengan Raja Mori sehubungan dengan tindakannya menceraikan isterinya yang adalah saudara perempuan dari Mokole Marunduh III.

Periode pemerintahan Raja Marunduh II tampaknya tidak terjadi hal-hal yang istimewa dalam kerajaan yang boleh direkam dalam ingatan kolektif masyarakat, kecuali kisah menyangkut terputusnya hubungan antara Kerajaan Mori dengan Kerajaan Banggai. Yang memerintah Kerajaan Mori adalah putera tertua, sementara yang menjadi *mokole* di Banggai adalah puterinya yang bungsu dari raja Mori I. Putera sulung, karena telah ditetapkan oleh raja kelak mewarisi takhta, maka kepadanya diwariskan seekor anjing kerajaan yang dinamakan Totopalo.<sup>12</sup> Konon anjing ini memiliki gigi yang terbuat dari tembaga serta memiliki kesaktian. Selain itu sebagai pengganti raja, ia juga mewarisi sumber kesejahteraan kerajaan berupa hutan sagu. Oleh karena itu sebelum raja meninggal ia berpesan kepada puteranya yang sulung agar memperhatikan adik perempuannya yang menjadi *mokole* di Banggai. Selain itu, ia juga berpesan apabila ada seorang *mokole* di Banggai meninggal maka rakyat Mori patut menghantarkan persembahan berupa hasil sagu dan *bola* (anyaman dari daun sagu yang digunakan sebagai dinding pondok yang dibangun untuk para pelayat pada upacara perkabungan). Pesan itu pada intinya mengandung makna bahwa puteri bungsunya yang berada di Banggai itu juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari produksi sagu

<sup>11</sup> Baca: Alb.C. Kruyt, "[Het Rijk Mori](#)", *op.cit.* hal. 455.

<sup>12</sup> Anjing itu dinamakan Totopalo karena telah dipotong ekornya.

dari Mori.

Rakyat Mori dikisahkan hidup makmur dan tidak pernah terjadi gangguan keamanan. Penduduk semakin bertambah banyak. Demikian juga ternak berkembang biak. Pada suatu ketika datang utusan dari Mokole Banggai menghadap baginda raja. Utusan itu menyampaikan pesan dari saudara perempuannya, untuk memohon diberikan Totopalo karena di negerinya muncul seekor babi hutan yang berantai dan menyeruduk rakyatnya sehingga banyak yang meninggal. Mokole Wawontuko mengabulkan permintaan adiknya itu sehingga menyerahkan anjing saktinya itu dan menitipkan pesan untuk adiknya bahwa apabila kelak Totopalo terbunuh, maka ambilah giginya dan kirimkan ke Wawontuko. Setelah itu utusan Mokole Banggai itu kembali ke negerinya dengan membawa Totopalo dan pesan untuk *mokolenya*.

Mokole Banggai tampak gembira ketika melihat utusannya kembali dengan membawa Totopalo. Setelah menyerahkan anjing sakti itu, utusan itu juga menyampaikan pesan dari Mokole Wawontuko. Tidak berapa lama setelah anjing sakti itu berada di Banggai, pada suatu pagi yang cerah ketika fajar mulai menyingsing, muncul lagi babi hutan yang berantai itu. Dengan segera *mokole* melepaskan Totopalo. Anjing itu berlari kencang menuju ke arah babi hutan itu dan meloncat menerkamnya sehingga terjadilah perkelahian antara dua hewan sakti itu. Dikisahkan bahwa dalam pertarungan antara dua hewan sakti itu berlangsung selama tiga hari, yang berakhir dengan kedua hewan itu rebah ke tanah dan tidak bergerak lagi. Penduduk kemudian datang untuk melihatnya dan ternyata dua hewan sakti itu sudah mati, dengan kaki terbujur lurus ke depan. Sesuatu yang unik terjadi bahwa tidak ada tanda-tanda luka pada badan kedua hewan itu, walaupun dalam pertarungan itu tampak

saling menggigit dan menerkam.

Ketika Raja Marunduh II mendengar berita tentang kematian anjing saktinya itu, ia langsung mengirim pesan kepada adiknya agar dapat mengirimkan kepadanya gigi-gigi Totopalo. Permintaannya itu ternyata tidak dipenuhi oleh Mokole Banggai sehingga ia menjadi murka. Ia akhirnya mengutus budaknya untuk menyampaikan pesan kepada adiknya di Banggai, yang intinya adalah rakyat Mori tidak akan memberikan penghormatan kepada Mokole Banggai dan mempersembahkan sagu dan *bola*. Itu berarti adiknya yang berada di Banggai kehilangan hak atas hasil produksi sagu di Mori. Peristiwa ini berakibat merenggangnya hubungan politik antara dua kerajaan itu.

### **Penyerangan Kerajaan Luwu: Tahun 1670**

Legenda rakyat Mori yang dapat menuntun untuk memecahkan dan menerangkan kabut kegelapan informasi tentang Kerajaan Mori tampaknya bersifat fragmentaris. Hal itu disebabkan karena pemerintah dan rakyat belum memiliki tradisi membuat kronik. Akibatnya ingatan kolektif yang dituangkan dalam bentuk legenda hanyalah peristiwa-peristiwa yang dipandang penting dan berkesan. Hal itu pula menyebabkan kesulitan untuk menelusuri nama raja-raja dan ratu-ratu dan kehidupan pemerintahan kerajaan. Legenda yang tertua hanya memberikan informasi ringkas tentang pembentukan *Kemokolean* Wawontuko yang dapat dipandang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Mori. Legenda berikutnya hanya memberikan informasi tentang hubungan antara Kerajaan Mori dengan Kerajaan Banggai dan kisah penyerangan pasukan Kerajaan Luwu dari Sulawesi Selatan terhadap kedudukan pemerintahan Kerajaan Mori hingga pemindahan pemerin-



tahan ke Pa'antoule (Petasia).

Pada masa pemerintahan Raja Mori III, Ratu Wedange (1650-1670), datang seorang utusan dari Datu Palopo (Datu Luwu) menghadap ratu. Ia menyampaikan pesan dari Datu Luwu mengundang ratu agar datang ke Matano untuk menemuinya. Setelah utusan itu kembali, ratu memerintahkan kepada *karua* untuk menelusuri faktor apa gerangan yang mendorong Datu Luwu mengundangnya ke Matano. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Matano telah direbut oleh Datu Luwu. Kenyataan itu menjadi alasan bagi ratu untuk tidak bersedia menemui Datu Luwu, karena dapat diperkirakan bahwa bila memenuhi panggilan itu maka ia akan dipaksa untuk tunduk dan patuh kepadanya dan dijadikan kerajaan taklukan (kerajaan *palili*). Sehubungan dengan pertimbangan itu maka ratu mengirim Karua Kelo untuk memenuhi panggilan itu.

Penyebutan Datu Palopo pada Datu Luwu, itu menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Luwu ketika itu telah berpindah ke Kota Palopo. Itu berarti Datu Luwu yang telah merebut Matano, ingin memaksa Kerajaan Mori juga tunduk kepada kekuasaan datu yang berkedudukan di Palopo. Pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Luwu ke Palopo terjadi pada periode Datu Pati Pasaung Sultan Abdullah (1615-1637). Namun pada periode pemerintahannya raja ini giat membantu Kerajaan Gowa-Tallo (Kerajaan Makassar) menyiarkan ajaran Islam ke kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Usaha perluasan pengaruh kekuasaan ke luar, baru dilakukan pada periode pemerintahan Datu Setiaraja Matinroe ri Tompotika (1667-1704). Oleh karena itu diperkirakan penyerangan ke kerajaan Mori berlangsung pada periode pemerintahannya, sekitar tahun 1670.

Setelah tiba di Matano, ia langsung menghadap dan memperkenalkan diri sebagai

*karua* Kerajaan Mori. Datu Luwu langsung bertanya kepadanya, dimana rajamu ? Dengan tenang dijawab: "Saya adalah Kelo, ibu dari *mokole*". Oleh karena itu dia menyuruh saya untuk memenuhi panggilan datu. Mendengar jawaban itu Datu Luwu menjadi geram dan menyatakan: "mengapa engkau tidak mau takluk?" Kembali Kelo dengan tenang merespon ucapan datu itu dengan menyatakan: "jika hal ini bergantung kepada keputusan saya, maka saya akan menyatakan takluk; tetapi *mokole* mungkin tidak bersedia takluk kepada Luwu. Datu Luwu kemudian menyatakan kepada utusan itu, sekarang pulanglah dan sampaikan kepada *mokole*-mu agar datang menemui utusan-utusan saya di Uluanso empat hari kemudian, karena saya ingin tahu apakah kamu mau takluk atau tidak.

Karua Kelo kembali dan menyampaikan pesan itu kepada ratunya. Ketika berita itu disampaikan, ia menjadi berang dan menyatakan: "Saya lebih baik mati daripada takluk kepada seseorang yang memiliki derajat yang sama seperti saya sebagai pemegang kendali politik kerajaan". Oleh karena itu ia kembali mengutus Karua Kelo pergi ke Uluanso untuk menemui utusan Datu Luwu. Ketika tiba di tempat yang disepakati itu, ternyata utusan dari datu tidak berada di tempat. Kenyataan itu mengisyaratkan kepadanya bahwa Datu Luwu telah memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap kedudukan kekuasaan Kerajaan Mori. Karena itu ia segera kembali untuk menyampaikan hal itu kepada ratu.

Datu Luwu cukup mengenal watak para pemegang kendali politik Kerajaan Mori yang tidak pernah menyerah dan tunduk kepada penguasa lain. Ia yakin bahwa sang ratu pasti tidak akan datang menemui utusannya, karena itu ia langsung memutuskan dan memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan terhadap pusat pemerintahan kerajaan

di Wawontuko. Ratu Mori juga menyadari bahwa sikapnya itu pasti mendorong Datu Luwu menyerang negerinya sehingga bergiat mengorganisasikan para pemberani untuk mempertahankan negerinya dari serangan pihak lawan. Dugaan itu terbukti, karena pasukan Luwu telah diperintahkan mengepung pusat pemerintahan, sehingga perang pun berkobar. Dalam pertempuran yang sengit itu, para pemberani Mori tidak berhasil memukul mundur pasukan penyerang, sehingga pasukan Kerajaan Luwu berhasil mengepung daerah pertahanan Mori dan menduduki Wawontuko. Ratu dan putera tertuanya yang menjadi putera mahkota bersama Karua Kelo dan saudara lakilakinya ditawan dan diangkut ke Palopo. Sementara anggota keluarga ratu yang lainnya dibiarkan tetap menetap di Wawontuko. Penawanan ratu dan karua itu sebagai bukti untuk menyatakan bahwa kerajaan ini telah ditaklukan dan menjadi kerajaan taklukan (*palili*) dari Kerajaan Luwu.

Setelah berapa lama menjadi tawanan politik kerajaan Luwu, Karua Kelo berniat untuk mengurus biaya tebusan agar dapat bebas dan kembali ke negerinya. Rencana itu disetujui oleh Datu Luwu, akan tetapi Mokole Wedange tetap menolak untuk kembali ke negerinya yang ditaklukan itu. Oleh karena itu sang ratu dan puteranya tetap menetap di Palopo, sementara Karua Kelo dan saudaranya dapat dibebaskan kembali ke negeri mereka setelah diberikan biaya penebusan.

Sikap keras kepala dari ratu itu jelas menunjukkan bahwa ia tidak bersedia menjadi Ratu Mori yang takluk kepada Kerajaan Luwu. Dengan tidak kembali ke negerinya pasti dapat memaksa penguasa Luwu untuk terus sibuk

mengurus keberadaannya sebagai tahanan politik. Agar tidak langsung memenuhi dan melayani kelangsungan hidup tahanan politik itu, maka Datu Luwu memutuskan menyediakan satu lahan pertanian tanaman padi, sejumlah ekor ayam peliharaan, dan sejumlah ekor babi sebagai sumber kehidupan ratu dan puteranya. Namun demikian karena kebenciannya terhadap tindakan penaklukan itu, dan semua pemberian kerajaan itu dipandang sebagai penghinaan sehingga tidak dikelola sebagaimana mestinya. Rumput-rumput yang tumbuh diantara tanaman padi dibiarkan tumbuh subur, sementara tanaman padi dicabut; ayam-ayam diberi makanan biji-bijian yang telah dicampur racun sehingga semuanya mati; demikian juga dengan babi peliharaan diberikan umbian yang beracun sehingga semuanya mati.

Tindakan ratu itu menyadarkan pemerintah kerajaan sehingga menawarkan untuk membebaskan mereka kembali ke negerinya tanpa tebusan. Tawaran itu tetap tidak diterima oleh ratu karena tidak rela kembali ke kerajaannya yang ditaklukan itu. Hal ini menunjukkan bahwa sang ratu menghendaki agar kedudukan kekuasaan dipulihkan kembali dengan mengakui bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Jika itu diberikan maka dia bersedia kembali memegang kendali politik Kerajaan Mori. Pada sisi lain, putera Wedange, Sungkawawo,<sup>13</sup> bersedia menerima tawaran itu. Oleh karena itu Datu Luwu menyatakan kepadanya: "Mokole boleh pulang tetapi jangan lupa membawa upeti dua orang budak perempuan setiap tahun". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak Kerajaan Luwu mengakui putera Wedange sebagai Mokole

<sup>13</sup> Romus M. Kalaena, *op.cit.*, hal. 27. Menurut Kalaena, kembalinya putera Wedange itu atas keinginan rakyat dengan mengutus Tadulako Rorohako yang bergelar Tandu Rumarumba untuk menyerang pihak

Kerajaan Luwu agar bersedia mengembalikan Wedange. Namun Wedange tidak ingin kembali dan mengutus puteranya yang bernama Sungkawawo bersama kakaknya, Rumampuo.

Kerajaan Mori dan kesediaan memenuhi penyerahan upeti itu menunjukkan bahwa ia bersedia menjadi raja atas kerajaan yang berstatus kerajaan taklukan (*palili*).

Kembalinya putera Wedange ke Wawontuko itu bukannya kembali menghidupkan pemerintahan Kerajaan Mori melainkan digambarkan kondisi kehidupan rakyat menjadi khaos. Dimana rakyat berjumpa mereka saling berkelahi dan membunuh. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan politik di kerajaan ini telah terpecah dalam dua kelompok. Karena itu serang menyerang diantara kelompok faksi itu tidak dapat diselesaikan. Kondisi yang khaos itu akhirnya memaksa putera Wedange meninggalkan negerinya dan pergi ke Matano dan tinggal pada keluarganya.

Hal ini mengingatkan kepada kita kembalinya Karua Kelo mendahului kembalinya putera Wedange. Pejabat *karua* dalam struktur pemerintahan kerajaan memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat raja (*mokole*). Ia kembali ke Moiki setelah memberi gantirugi pembebasannya, sehingga berkewenangan kembali untuk memilih salah seorang keluarga raja, Anamba (1670-1680) untuk menjadi *mokole* baru, Raja Mori IV, menggantikan ratu yang menjadi tawanan politik di Palopo. Perubahan politik yang terjadi itu tidak mendapat reaksi protes dari Kerajaan Luwu, sehingga kehidupan politik Kerajaan Mori dipandang sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh.

Dalam hubungan inilah, kehadiran putera mahkota, Sungkawawo dapat diterima menjadi pengganti ibunya dipandang merubah status kerajaan yang merdeka dan berdaulat menjadi kerajaan taklukan. Selain itu ia ditetapkan menjadi *mokole* oleh Datu Luwu, dan bukan oleh *karua*, dengan kewajiban menyerahkan upeti setiap tahun. Itulah sebabnya Mokole Wawontuko (Anamba) yang didukung oleh

sejumlah bangsawan dan rakyat tidak menghendaki perubahan pemegang kendali politik kerajaan, walaupun ia adalah putera mahkota, yang secara tradisional memiliki legitimasi untuk menggantikan ibunya (legitimasi tradisional). Faksi yang menentang Sungkawawo jauh lebih dominan sehingga menjadi penghalang baginya untuk memulihkan kedudukan kekuasaannya secara tradisional, meskipun sejumlah bangsawan, tokoh masyarakat, dan rakyat mendukung untuk mengambilalih kendali politik kerajaan. Keadaan itu memaksanya untuk memilih meninggalkan negerinya dan pergi ke Matano. Sikap ini pada gilirannya merupakan strategik politik untuk menempatkan kerajaannya sebagai kerajaan merdeka dan berdaulat, karena sebagai raja yang berada dipengasingan, ia tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan upeti kepada Kerajaan Luwu.

Kepergian Sungkawawo sebagai raja *palili* Mori ke Matano, daerah *palili* Kerajaan Luwu itu pada gilirannya juga menunjukkan bahwa Kerajaan Mori menolak kedudukannya dipandang sebagai daerah *palili* Kerajaan Luwu. Kerajaan Mori telah mengangkat seorang raja baru menurut tradisi pemerintahan lokal, tanpa campur tangan pemerintah Luwu, yaitu penobatan Anamba menjadi Raja Mori IV untuk menggantikan Ratu Wedange. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekspedisi penaklukan Luwu terhadap Kerajaan Mori itu tidak berhasil (gagal) menempatkan kerajaan itu menjadi kerajaan *palili* dari Kerajaan Luwu. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kembalinya Karua Kelo, setelah membayar ganti rugi atas penahanannya, menunjukkan bahwa ia kembali bukan sebagai utusan Kerajaan Luwu, melainkan sebagai tokoh yang telah bebas sebagai seorang tahanan politik; (2) Usaha untuk memulangkan Ratu Wedange untuk kembali memegang kendali

politik Kerajaan Mori sebagai kerajaan *palili* ditolak mentah-mentah oleh sang ratu; (3) ketika terjadi kevakuman pemerintahan, Karua Kelo, yang didukung oleh bangsawan lokal, telah berinisiatif memilih dan menobatkan Anamba menjadi pengganti Ratu Wedange tanpa sepengetahuan pemerintah Kerajaan Luwu; (4) Raja Mori, Sungkawawo, yang dinobatkan menjadi pengganti Ratu Wedange tidak diterima (ditolak) menjadi Raja Mori, sehingga ia meninggalkan Wawontuko dan pergi menetap di Matano, wilayah kekuasaan Kerajaan Luwu.

Tindakan penaklukan Kerajaan Luwu dan strategik politik untuk membebaskan kerajaan dari pengaruh kekuasaan Luwu itu menyebabkan terdapat informasi yang berbeda dalam sejumlah karangan menyangkut kerajaan ini. Bagi mereka yang hanya memperhatikan tindakan penaklukan memandang Kerajaan Mori pernah menjadi kerajaan *palili*, termasuk pihak pemerintah Kerajaan Luwu. Itulah sebabnya dalam perkembangan kemudian, ternyata pihak pemerintah Kerajaan Luwu mengumumkan pembebasan status kerajaan itu sebagai kerajaan *palili* menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh. Sikap pemerintah Kerajaan Luwu itu sesungguhnya berkaitan dengan sikap penguasa Kerajaan Mori yang tidak ingin memenuhi kewajiban menyerahkan upeti. Sikap penolakan itu sesungguhnya berhubungan dengan keberhasilan strategik politik yang telah mereka lakukan, yang secara sepihak untuk membebaskan diri. Oleh karena para penguasa Mori dan bangsawannya tidak pernah memandang bahwa kerajaannya menjadi kerajaan *palili*, melainkan satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat secara penuh.

## Struktur Pemerintahan Kerajaan (Awal)

Gambaran kesejarahan pada periode awal pemerintahan ini menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan Kerajaan Mori, sejak pemerintahan Marunduh I hingga Raja Anamba masih sangat sederhana. Struktur pemerintahan masih mengikuti pola struktur yang dibangun oleh kelompok kaum di Ligisa ketika mereka memperoleh seorang *mokole*, yang lebih dikenal dengan sebutan Mokole Ligisa, yaitu raja hanya didampingi oleh seorang *karua*, yaitu kepala kelompok kaum yang dikenal dengan nama Numunuo. Perpindahan kelompok kaum itu ke Moiki mendasari penyebutan Karua Numunuo menjadi Karua Moiki.

Marunduh I, yang pada awalnya merupakan pemimpin kaum di Moiki, dalam perkembangan kemudian setelah mempersunting Mokole Mohainga, berhasil memperluas pengaruhnya terhadap kelompok kaum lainnya di wilayah Mori. Oleh karena itu dikisahkan bahwa kedua orang *mia mota'u* datang menunjukkan kesetiaan mereka dan memohon kepadanya untuk menjadi pemimpin mereka. Hal ini yang mendorong Mokole Moiki pindah ke Wawontuko dan menjadikan daerah itu sebagai pusat pemerintahan baru. Kedudukannya bukan lagi disebut sebagai Mokole Moiki, karena daerah Moiki telah diberikan kewenangannya kepada Karua Moiki, Numunuo. Namun demikian wilayah Moiki tetap merupakan wilayah kekuasaannya. Selain itu beberapa daerah kelompok kaum juga telah menjadi wilayah kekuasaannya, karena mereka secara sukarela menggabungkan diri dan memandang Marunduh I sebagai penguasanya.

Kenyataan itu mendorongnya memperkuat kedudukan kekuasaannya dengan menetapkan putera-puteranya menjadi pemimpin kelompok kaum yang telah menggabungkan diri dan

menyatakan wilayahnya berada dalam kekuasaannya. Berdasarkan legenda, seharusnya terdapat lima *kemokolean* baru yang menjadi daerah kekuasaannya setelah menempatkan putera-puteranya menjadi pemimpin kelompok kaum yang menggabungkan diri kepada *Kemokolean* Wawontuko. Namun demikian, informasi yang diketahui hanya ada dua *kemokolean*. Hal ini sehubungan juga dengan kedatangan dua orang *mia mota'u* memohon *mokole* untuk menjadi penguasa mereka. Oleh karena itu dua orang puteranya ditempatkan menjadi pemimpin di dua kelompok kaum itu sehingga kedudukan kelompok kaum itu memiliki pemimpin keturunan *mokole* sehingga menjadi wilayah pemerintahan *kemokolean*. Dua *kemokolean* baru itu adalah *Kemokolean* Pampawu dan *Kemokolean* Sarombu.

Berdasarkan gambaran ini nampak bahwa Kerajaan Mori awal terdiri dari empat wilayah pemerintahan daerah, yaitu *Kemokolean* Wawontuko, *Kekaruaan* Moiki, *Kemokolean* Pampawu dan *Kemokolean* Sarombu. *Mokole* Wawantuko, dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan daerah itu, berkedudukan pula sebagai Raja Mori yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kendali politik atas daerah-daerah kekuasaannya. *Karua* Moiki, disamping menjadi kepala pemerintahan atas Moiki, ia juga berkedudukan sebagai pendamping raja dalam segala urusan pemerintahan, antara lain mengelola pergantian kepala pemerintahan baik kedudukan raja maupun kepala pemerintahan daerah, menyampaikan titah raja kepada kepala-kepala pemerintahan daerah, mengurus rumah tangga kerajaan, dan menjadi kepala perang bila terjadi sengketa dengan kelompok kaum lainnya. Sementara dua kepala pemerintahan *kemokolean* lainnya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan daerah yang tunduk pada Raja Mori.

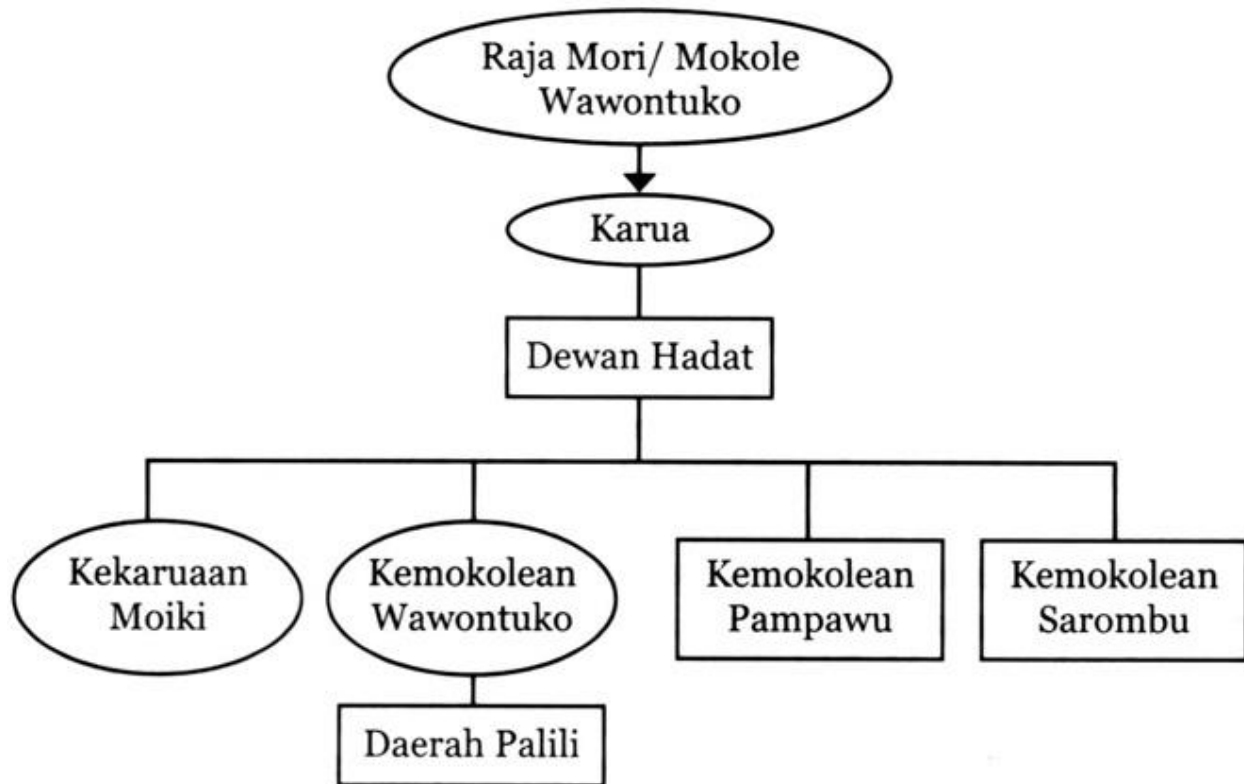
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, para

pejabat pemerintahan ini juga menjadi anggota dewan hadat pemerintahan. Yang menjadi ketua dewan hadat itu adalah *Mokole* Wawontuko, karena dia yang berkedudukan sebagai pemegang kendali politik dari *kemokolean* dan *kekaruaan*. Pertemuan dewan hadat ini senantiasa dilakukan di istana kerajaan di Wawontuko. Dewan hadat ini bukan berkedudukan sebagai lembaga legislatif karena keanggotaannya adalah raja dan kepala-kepala pemerintahan lokal yang bukan berkedudukan sebagai daerah *palili*. Lembaga ini baru berfungsi apabila raja mengundang mereka untuk melakukan pertemuan dalam rangka memperoleh solusi bagi persoalan yang dihadapi, seperti hubungan dengan kerajaan lain atau perang. Dalam hubungan ini, lembaga ini dapat dipandang sebagai lembaga penasihat raja dalam urusan-urusan pemerintahan.

Struktur pemerintahan awal Kerajaan Mori ini masih bersahaja. Semua urusan kerajaan dilakukan sendiri oleh raja, dan bila ada kegiatan ke luar, seperti menghubungi pejabat *karua*, atau kepala pemerintahan dibawahnya, maka ia menugaskan itu kepada budaknya (*ata pu'u*). Struktur organisasi pemerintahan itu dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini.

Skema struktur pemerintahan ini menunjukkan bahwa *Karua* Moiki, meskipun bukan keturunan *mokole* akan tetapi merupakan pejabat utama dalam struktur pemerintahan, dan yang terutama dari *mokole-mokole* daerah pemerintahan. Hal ini pada dasarnya berpangkal pada legenda tentang pengangkatan *mokole* oleh *karua*. Itulah sebabnya kedudukannya juga dipandang sebagai ibu kerajaan. Sementara para *mia mota'u* tidak dilibatkan dalam lembaga dewan hadat karena dipandang sebagai daerah taklukan yang berkewajiban memberikan upeti hanya kepada *Mokole* Wawontuko, sehingga kedudukan mereka tidak dapat

**Gambar II**  
**Struktur Pemerintahan Kerajaan Mori Awal**



disetarakan dengan para *mokole* daerah pemerintahan lainnya.

Gambar struktur pemerintahan ini lebih menunjuk pada hubungan kekuasaan dengan kerajaan. Karena itu kampung-kampung, atau daerah pemukiman penduduk terkecil dari setiap *kemokolean*, *kekaruaan*, dan daerah *palili* tidak dimasukkan dalam gambar struktur ini. Pada umumnya pembentukan kampung itu berkaitan dengan berpindahnya penduduk untuk menetap dekat dengan lahan pertaniannya, yang kemudian berkembang biak dan membentuk suatu pemukiman yang besar. Walaupun demikian mereka tidak memisahkan diri dari kelompok kaumnya pada pemukiman awal karena memiliki hubungan genealogis dengan pimpinan pemerintahan daerah-daerah itu.

Setiap kelompok kaum (anak suku) itu

hanya mengenal seorang figur pemimpin yang disebut dengan berbagai penyebutan seperti: *ana mokole*, *mokole palili*, *karua*, dan *mia mota'u*. Namun untuk mempertahankan dan melindungi kesatuan kaumnya, mereka juga mengorganisasikan penduduknya yang berpotensi sebagai pelindung dan penjaga ketentraman dan keamanannya, dan bersedia berperang apabila diserang atau untuk mempertahankan kedudukan kelompok kaumnya. Hal itu disebabkan karena sering terjadinya perang akibat perselisihan antar kelompok kaum dan atau perang akibat permusuhan yang turun-temurun.

Perang akibat perselisihan antara kelompok kaum itu umumnya disebabkan karena pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan menyangkut pembunuhan salah satu anggota

kelompok kaum, tidak bersedia membayar dendanya, atau penghinaan oleh salah satu dari kelompok yang bertikai. Hal ini dapat berdampak kelompok yang merasa tidak puas melakukan penyerangan terhadap lawannya. Kelompok yang mengawali serangan itu biasanya disebut *metoleba*. Jika orang dari kelompok A yang mengawali permusuhan dengan kelompok B maka disebut *domelako to A metoleba ndi to B*. Kelompok yang diserang juga berkewajiban kembali menyerang kelompok penyerang. Kelompok yang merespon penyerangan awal itu disebut *mombalo* (membalas dendam).

Perang antara kelompok kaum ini dicirikan dengan keberhasilan memenggal kepala musuh. Pemberani yang berhasil memenggal kepada lawan secara mandiri meningkat predikatnya menjadi *tadulako*.<sup>14</sup> Umumnya ekspedisi yang dikirim oleh setiap kelompok kaum untuk berperang baru akan kembali setelah berhasil memenggal kepala musuhnya sebagai tanda kemenangan. Dengan demikian mereka diterima kembali dengan upacara penyambutan yang meriah.

Perang akibat perselisihan antara dua kelompok kaum ini umumnya dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat. Penyelesaian damai itu dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak ingin berdamai. Hal itu ditandai dengan pengiriman bendera putih kepada kelompok yang netral dalam perselisihan itu, dan yang paling umum dikirimkan kepada *mokole* untuk menyelesaikan persengketaan itu. Dalam hubungan ini *karua* akan ditugaskan untuk menghubungi kedua kelompok yang bersengketa untuk berbicara tentang kapan dan dimana kelak dilaksanakan persetujuan damai (*mereapi*). Jika telah disepakati maka pada upacara itu pemimpin dari kedua kelompok itu

hadir bersama pendamai. Pada tempat dimana akan diselenggarakan upacara damai itu telah dipancang sebuah tiang dan pada tiang itu diikat seekor kerbau dengan lingkaran rotan pada lehernya. Pemimpin dari masing-masing kelompok memegang erat setiap tanduk kerbau itu. Sementara perantara (pendamai) mengucapkan mantra (*metonaa*) sebagai berikut: *Tewala wali komiu mpe' iwali, tandu ambau andio toenaduo penaa miu kaimate, tumanduo pinotuwo miu ka iropu*, artinya: sekiranya kalian kembali berperang, maka tanduk kerbau ini akan menanduk nafas kalian sampai mati, menanduk kehidupan kalian sampai punah.<sup>15</sup> Setelah membaca mantera itu, kerbau itu disembelih untuk dijadikan lauk pada pesta perdamaian.

Acara selanjutnya adalah memecahkan telur. Pendamai mengambil sebutir telur ayam untuk kemudian mengedarkan kepada setiap orang yang hadir pada upacara perdamaian itu untuk memegang telur, sambil mengucapkan kata simuru. Sementara sirkulasi telur berlangsung, pendamai mengucapkan: *molori su'ului manu, molori koai aroa miu* (sehalus telur ayam semoga sehalus juga hati kalian). Apabila sirkulasi telur telah kembali ke tangan pendamai, ia menghempaskan telur itu ke tanah dan menyatakan: *kana tepeha su'ului manu tepehano penaa miu, ba me'iwali komiu mbo'u* (seperti pecahnya telur, demikian juga akan pecah hidupmu apabila kalian saling berperang lagi). Setelah itu acara ditutup dengan resepsi perdamaian. Tradisi ini mengisyaratkan kepada penduduk Mori untuk tidak mengingkari janji. Peningkaran janji akan berakibat nasib si peningkar bagaikan sebutir telur yang dihempaskan ke tanah.

Perang akibat permusuhan secara turun-temurun adalah perang yang dilakukan berkait-

<sup>14</sup> J. Kruyt, *op.cit.*, hal. 138-140.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 109.



an dengan tradisi mengayau. Pada dasarnya penduduk Toraja Bare'e memiliki konflik terpendam dengan sejumlah kelompok kaum yang bermukim di Kerajaan Mori, antara lain dengan orang Tinompo, orang Kinadu, dan orang Padu. Oleh karena itu sering para pengayau dari penduduk Toraja Bare'e melakukan ekspedisi pengayauan terhadap penduduk di Kerajaan Mori, sehingga terjadi perang antara suku itu dengan kelompok pengayau. Perang ini tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat kerajaan. Oleh karena itu penyelesaiannya lebih bersifat religius magis untuk menolak terjadinya serangan para pengayau. Dalam hubungan inilah tampil seorang *tadulako*, tokoh pemberani lokal sebagai dukun untuk memimpin upacara magis menolak para pengayau. *Tadulako* yang tampil sebagai dukun itu dikenal dengan sebutan *tadulako mota'u* atau *pongkiari*. Ia berjuang menentang pengayau tidak lagi dengan pedang di tangan, tetapi melalui upacara magis untuk menolak para pengayau, maupun untuk membalas melakukan pengayauan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sebelum melakukan perjalanan untuk melakukan pengayauan, *pongkiari* melakukan upacara magis yang disebut *memanu*. Ia menyembelih seekor ayam dan mengambil isi perutnya yang kemerah-merahan dan diolesi dengan darah ayam; dengan demikian perjalanan pengayauan akan berlangsung cepat dan sukses. Selain itu *pongkiari* mengambil dua helai bulu ayam dan dimasukkan dalam sebuah bambu kecil dan membawa serta dalam perjalanan. Apabila telah

mendekati desa yang dituju, diperintahkan kepada salah seorang pemberani untuk membawa bambu yang berisi bulu ayam itu dan menguburkan pada jalur jalan setapak yang paling sering digunakan. Apabila ada pengawal desa itu yang menginjakkan kakinya pada tempat itu, maka pengawal itu sudah dapat dikuasai sepenuhnya, oleh karena ia kehilangan semua kemampuan keberaniannya.

## **BAB IV**

### **PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN**

Perang Mori tahun 1670 yang berakhir dengan kekalahan Kerajaan Mori menghembuskan cakrawala pemikiran politik untuk membebaskan diri dari hukuman yang patut diterima sebagai kerajaan taklukan. Tindakan Kerajaan Luwu untuk menempatkan kerajaan itu sebagai kerajaan taklukan dengan menawan ratu dan putera mahkota kerajaan bersama pejabat Karua Moiki (Kelo) dan puteranya. Ditawannya ratu dan pejabat karua itu berakibat terjadinya kevakuman pemerintahan. Untuk mengatasinya pejabat *karua* bergiat untuk memperoleh pembebasan dengan membayar ganti rugi. Meskipun hal itu mendapat persetujuan pemerintah Luwu, akan tetapi Ratu Wedange tetap menolak untuk kembali sebagai ratu kerajaan *palili*.

Penolakan ratu untuk kembali itu mengisyaratkan kepada Karua Kelo bahwa sang ratu tidak menghendaki Kerajaan Mori menjadi kerajaan *palili*. Itulah sebabnya ketika ia kembali ke Wawontuko, ia bergiat mengangkat dan menobatkan Anamba, salah seorang putera

ratu yang tidak ditawan, menjadi Mokole Wawontuko dan menduduki tahta kerajaan menggantikan ibunya, tanpa persetujuan kerajaan penakluk. Kebijakan politik itu dipandang telah memulihkan harkat dan kedudukan kerajaan menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Tidak ada beban yang harus dipenuhi sebagai kewajiban kerajaan *palili*, seperti harus datang ke istana kerajaan Luwu untuk menyerahkan upeti sebagai tanda takluk dan ketaatan pada kerajaan protektor.

Perkembangan politik yang terjadi di Kerajaan Mori itu tidak diketahui oleh pemerintah Kerajaan Luwu. Mereka memandang ketidakhadiran sang ratu itu dapat berakibat kekhaosan di kerajaan itu karena kevakuman pemerintahan. Oleh karena itulah mereka menawarkan pembebasan kepada Wedange dan berharap untuk kembali memerintah kerajaan *palili* Mori. Tawaran itu tetap ditolak oleh ratu, sehingga diusahakan agar putera mahkotanya, Sungkawawo, bersedia menerima tawaran pembebasan tanpa beban tebusan. Tawaran itu

akhirnya diterima oleh Sungkawawo, dan bersedia kembali ke Mori menggantikan ibunya. Sehubungan dengan itu, Datu Luwu melaksanakan upacara penobatannya menjadi Raja Mori dengan kedudukan sebagai *mokole palili*. Dalam upacara penobatan itu ditetapkan juga kewajiban untuk menghantarkan upeti yaitu dua orang budak perempuan kepada Datu Luwu setiap tahun.

Kehadiran Sungkawawo, sebagai raja *palili* yang dinobatkan oleh Datu Luwu itu tidak disambut dan diterima dengan baik oleh Raja Mori, sejumlah bangsawan kerajaan, dan rakyat, karena beberapa alasan. Pertama, ia dinobatkan tanpa mengikuti tradisi politik lokal. Kedua, ia dinobatkan oleh Datu Luwu menjadi raja kerajaan *palili*, sehingga bila diterima menjadi raja berarti menempatkan Kerajaan Mori sebagai kerajaan *palili*. Ketiga, mekanisme politik yang telah dilaksanakan dengan penobatan Anamba telah membebaskan kerajaan itu dan menempatkan menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Keempat, penolakan Ratu Wedange untuk kembali ke Mori merupakan sikap politik untuk tidak mengakui penetapan Kerajaan Luwu bahwa kerajaannya adalah kerajaan *palili*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, *karua* dan sejumlah pejabat tinggi kerajaan tetap mendukung dan mempertahankan Anamba sebagai *mokole*.

Sungkawawo menyadari dan memahami sikap Mokole Anamba, *karua*, dan sejumlah pejabat kerajaan. Oleh karena itu ia tidak melakukan tindakan-tindakan politik untuk merebut tahta kerajaan. Itulah sebabnya ia tidak melaporkan reaksi penolakan para penguasa atas kehadirannya untuk memegang kendali politik kerajaan kepada pemerintah Kerajaan Luwu. Meskipun demikian sejumlah pejabat dan kelompok bangsawan yang mendukung Sungkawawo melakukan reaksi perlawanan

terhadap pendukung Mokole Anamba. Dikisahkan bahwa di mana saja, bila dua kelompok yang berlawanan itu berjumpa, mereka berusaha membinasakan lawan politiknya. Konflik internal yang terjadi itu sangat sulit diselesaikan. Kondisi ini mendorong Sungkawawo memutuskan meninggalkan negerinya dan pergi menetap pada keluarganya di Matano. Ia berharap kepergiannya itu dapat dipahami sebagai satu pernyataan mendukung Anamba sebagai *mokole* dan bersamaan dengan itu dapat meredakan dan mengakhiri konflik internal yang terjadi.

Keputusannya untuk pergi ke Matano dipandang oleh sejumlah tokoh-tokoh politik tidak menguntungkan kebijakan politik yang telah dilakukan. Hal itu berkaitan dengan kedudukan Matano sebagai daerah *palili* Kerajaan Luwu. Bila diketahui oleh pemerintah Luwu, maka mereka pasti akan mengambil tindakan politik untuk kembali menghukum Kerajaan Mori. Oleh karena itu diutus sejumlah tokoh-tokoh politik Kerajaan untuk segera menemuinya dan memohonnya kembali ke kerajaannya.

Utusan kerajaan itu akhirnya dapat menemui Sungkawawo dan menyampaikan keinginan penguasa Mori agar bersedia kembali. Sungkawawo menyatakan bahwa ia menyadari dan memahami manuver politik yang telah dilakukan untuk melepaskan kedudukan kerajaan sebagai kerajaan *palili*. Jika dia kembali ke Wawontuko maka jelas kembali menjadikan kerajaan itu kerajaan *palili*, dan mungkin pada gilirannya akan menambah keras intensitas konflik internal. Hal-hal itu menjadi pokok diskusi diantara mereka dan akhirnya menghasilkan satu keputusan politik yang baru yang menguntungkan dua faksi yang bertikai, pendukung Anamba dan pendukung Sungkawawo. Keputusan politik itu adalah membangun pusat pemerintahan baru (*kemo-*

*kolean* baru) pada negeri yang tidak ditaklukan oleh Kerajaan Luwu, yaitu di daerah Pa'antoule. *Kemokolean* baru itu kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mori dan *Kemokolean* Wawontuko menjadi satu wilayah *kemokolean* dalam Kerajaan Mori.

Atas dasar kesepakatan politik itu, Sungkawawo memenuhi permintaan utusan kerajaan itu dan bersedia kembali ke negerinya, akan tetapi tidak kembali ke Wawontuko, melainkan ke Pa'antoule untuk membangun satu *kemokolean* yang merdeka dan berdaulat, dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mori yang baru. Dengan demikian Anamba tetap menjadi *mokole* di *Kemokolean* Wawontuko, sebagai satu *kemokolean* yang berada dalam Kerajaan Mori, dan menyerahkan kedudukan kekuasaannya sebagai Raja Mori kepada Sungkawawo. Strategi politik yang dibangun itu mendorong Sungkawawo, setelah menduduki tahta kerajaan kembali bergiat memperkokoh kedudukan kekuasaannya dengan melakukan perluasan pengaruh kekuasaan dan pembenahan organisasi pemerintahan. Usaha yang dilakukan itu berhasil membangun landasan pemerintahan yang menurut penilaian ketika itu telah memadai untuk mempertahankan kerajaannya dari kemungkinan terjadi konflik eksternal. Kegiatan Raja Mori itulah yang menjadi pokok bahasan dalam Bab ini.

Selain itu juga, dalam pokok bahasan ini ditelusuri dan diungkapkan perkembangan kehidupan pemerintahan setelah periode pemerintahan Sungkawawo. Perlu dinyatakan bahwa data kesejarahan raja-raja sesudah Raja Mori V ini sangat sedikit yang diketahui. Keterangan yang memadai berawal ketika pemerintah Kolonial Belanda melancarkan serangan terhadap kerajaan ini pada tahun 1856, peristiwa yang dikenang sebagai perang heroik oleh para penutur sejarah Mori dengan sebutan Perang Ensaondau, namun dalam

penulisan ini dinyatakan sebagai Perang Mori I dalam menentang invasi kolonial Belanda. Selanjutnya ditelusuri dan diungkapkan pula berbagai usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik terpendam antara dua kerajaan bertetangga yaitu Mori dan Bungku. Peristiwa itu dan kesudahannya diungkapkan dan dijelaskan pada pokok bahasan berikutnya.

### **Pusat Pemerintahan Baru: dari Wawontuko ke Pa'antoule**

Kepergian Sungkawawo itu ternyata bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan pertentangan internal dalam kerajaan. Kepergiannya itu berdampak semakin bertambahnya keonaran dalam kehidupan sosial dan politik. Hal itu mendorong sejumlah tokoh masyarakat dan kerabat raja datang menemui putera mahkota itu atas nama rakyat Mori untuk memohon kiranya kembali dan memegang kendali politik kerajaan. Permohonan itu direspon dengan menyatakan bahwa ia meninggalkan negerinya karena rakyat sudah tidak taat kepadanya dan saling bermusuhan. Delegasi rakyat itu menyatakan bahwa memang benar demikian namun keadaan kerajaan semakin terpuruk. Hal itu dinyatakan dengan kiasan: "taji ayam jantan telah mengendor dan daun-daun siri telah berguguran namun tiada seorangpun yang mencemaskannya". Hal itu menunjukkan bahwa sejumlah rakyat sudah tidak mentaati lagi *mokolanya* sehingga ia tidak dapat berperan memelihara ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

Putera Wedange, Sungkawawo, akhirnya menyatakan kesediaannya untuk kembali menjadi Raja Mori, namun tidak akan menetap di Wawontuko melainkan ke Pa'antoule. Pilihan ini mungkin dimaksudkan untuk menghindari dualisme kepemimpinan dan perpecahan internal. Pada sisi lain, kembali ke istana Wawontuko berarti kembali menempatkan posisi

kerajaan menjadi daerah taklukan Kerajaan Luwu, karena pengangkatannya diputuskan oleh Kerajaan Luwu. Keputusan politik ini juga pada gilirannya menempatkan Wawontuko menjadi satu wilayah *kemokolean* yang berdiri sendiri namun berkedudukan sebagai bagian pemerintahan. Itulah yang menjadi dasar sehingga dalam ingatan kolektif orang Mori dinyatakan bahwa keturunan Mokole Moiki yang mewarisi kedudukan *mokole* di *Kemokolean* Wawontuko yang kemudian setelah memindahkan pusat pemerintahannya ke Ngusumbatu dikenal juga dengan nama *Kemokolean* Ngusumbatu dan *Kemokolean* Pa'antoule atau juga sering disebut *Kemokolean* Petasia.

Pemindahan pusat pemerintahan kerajaan ke Pa'antoule ini tampak merupakan strategi politik untuk melepaskan diri dari status *palili* yang ditetapkan oleh Kerajaan Luwu. Pa'antoule adalah bagian dari wilayah kerajaan yang tidak diketahui oleh Kerajaan Luwu, dan oleh pemuka masyarakat dan rakyat dipandang sebagai daerah yang berada di luar tuntutan politik kerajaan penakluk sebagai wilayah taklukan. Daerah itu merupakan daerah yang tetap merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya Sungkawawo (1680-1720), dalam kedudukannya sebagai Raja Mori tidak pernah memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Luwu. Tindakan itu dapat dilaksanakan karena ia adalah Raja Mori yang bukan berstatus Mokole Wawontuko, tetapi kini telah berubah menjadi Mokole Pa'antoule, suatu wilayah baru yang tidak pernah ditaklukan oleh Kerajaan Luwu.

*Kemokolean* Pa'antoule adalah *kemokolean* yang baru dibentuk pada 1680, akan tetapi karena kepala pemerintahannya adalah putera mahkota kerajaan yang secara tradisional merupakan pewaris tahta kerajaan, sehingga *kemokolean* yang baru ini dipandang yang

terpenting dan yang terutama dari semua *kemokolean* yang tergabung dalam Kerajaan Mori. Strategi politik ini merupakan metode pembebasan kerajaan ini sebagai kerajaan taklukan dan menjadi satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Selain itu juga secara langsung menggeser kedudukan Anamba sebagai Raja Mori ke IV, dan mengabsyahkan kedudukan Sungkawawo menjadi Raja Mori ke V.

The Kekalahan dalam perang tahun 1670 menyadarkan pemegang kendali politik kerajaan yang baru ini bahwa struktur pemerintahan yang berlaku selama ini kurang memberikan kepuasan dalam mengurus kegiatan pemerintahan dan pertahanan keamanan kerajaan. Gambaran proses kesejarahan awal ini memberikan petunjuk bahwa pembentukan pemerintahan kerajaan awal yang berpusat di Wawontuko masih sangat sederhana. Raja yang berkedudukan sebagai pemegang kendali politik kerajaan hanya dibantu oleh seorang pejabat yang berkedudukan sebagai *karua*, yaitu Karua Moiki. Pejabat ini yang berperan penting baik dalam urusan pergantian kepala pemerintahan maupun dalam urusan rumah tangga kerajaan, hubungan politik dengan daerah-daerah kekuasaan, hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, dan dalam keadaan perang tampil menjadi panglima perang. Struktur pemerintahan yang sederhana ini kurang memberikan peluang bagi perluasan pengaruh kekuasaan raja dan pada sisi lain tidak memperkuat kedudukan kekuasaannya.

Oleh karena itu setelah membangun pusat pemerintahan di Pa'antoule, ia bergiat memperkuat kedudukan kekuasaannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperluas pengaruh kekuasaannya ke wilayah timur, ke daerah Lembo melalui perkawinan politik. Hasil perkawinan dengan puteri kepala kelompok kaum di dataran Lembo ini, karena tidak dapat diterima sebagai pewaris *mokole*

karena ibunya bukan seorang perempuan berdarah bangsawan, mendapat anugerah kedudukan sebagai *karua* untuk wilayah Lembo sehingga sering dikenal dengan sebutan Karua Lembo.<sup>1</sup> Tampak bahwa perkawinan politik yang kemudian diikuti dengan pemberian kedudukan *karua* itu berakibat kelompok kaum yang ada di daerah ini mengikat diri pada Kerajaan Mori.

Pilihan untuk memperluas pengaruh kekuasaan ke daerah Lembo itu berkaitan pula dengan pertimbangan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan akan adanya serangan kembali dari Kerajaan Luwu, akibat tindakan sepihak yang dilakukan untuk memulihkan kedudukan kerajaannya. Wilayah Lembo terletak di sebelah timur dan berbatasan dengan Matano. Menurut perhitungan strategi, bila pemerintah Luwu ingin melaksanakan serangan penghukuman pasti melewati Matano dan memasuki daerah Lembo. Oleh karena itu Lembo harus dikuasai dan digunakan sebagai benteng pertahanan garda depan untuk membendung serangan Luwu terhadap pusat pemerintahan di Paantoule.

Selain perkawinan politik, salah satu strategi lain yang dilaksanakan untuk memperluas pengaruh kekuasaan dan mendorong ketaatan para pejabat pemerintah daerah, adalah mengundang mereka untuk hadir dalam setiap upacara atau pesta yang diselenggarakan oleh kerajaan, seperti ketika menyelenggarakan

pesta *woke*. Pesta ini diselenggarakan dengan mengundang para *mokole* dan para kepala kelompok kaum yang dipandang sebagai daerah *palili*. Salah satu acara spesifik dari pesta ini adalah acara minum minuman beralkohol yakni tuak dan arak. Pesta ini sesungguhnya bukan hanya merupakan upacara syukuran atas keberhasilan dan ungkapan terima kasih atas jalinan kerjasama dalam kehidupan kerajaan, tetapi juga memiliki manfaat yang penting bagi pemegang kendali politik untuk mencermati siapa diantara tokoh-tokoh penting yang dipandang dapat diandalkan bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan keamanan kerajaan.

Pada satu pesta *woke* yang diselenggarakan oleh Raja Sungkawawo yang dihadiri oleh para *mokole* dan para *mia mota'u*<sup>2</sup> (para kepala daerah *palili*) dan kepala kelompok kaum (kepala suku), ia mendapati salah seorang diantara mereka yang menurut pandangannya adalah seorang pemberani yang gagah perkasa serta berkemampuan menjadi seorang diplomat yang ulung. Tokoh itu adalah Kalambi, kepala kelompok kaum Maruruno, dari daerah Lembo. Kekagumannya pada Kalambi mendorongnya untuk mengupayakan agar tokoh ini bersedia diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan. Pada suatu kesempatan, ketika Kalambi yang sudah mabuk (*molangu*) akibat minuman beralkohol itu bangkit dari tempat duduknya dan keluar sebentar dari arena minum, raja memindahkan

---

<sup>1</sup> Legenda kerajaan mengisahkan bahwa Mokole Pa'antoule sering melakukan kunjungan keluarga ke Matano. Dalam perjalanan itu biasanya melintasi dataran Lembo, sehingga bermalam pada kepala kaum Maruruno dan berkenalan dengan seorang gadis, sehingga ia bermalam tiga hari lamanya. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Matano. Ketika kembali dari Matano, dijumpai bahwa gadis itu telah melahirkan seorang putera baginya. Mokole Pa'antoule menyatakan bahwa putera ini tidak dapat diakui sebagai *mokole* namun kepadanya dianugerah-

kan kedudukan kelak menjadi *karua* untuk dataran Lembo, sehingga lazim disebut Karua Lembo.

<sup>2</sup> Menurut Alb. C. Kruyt, kepala daerah *palili* mendapat penyebutan yang beraneka ragam, seperti: *mokole palili*, *ana mokole*, *mia mota'u* atau *karua*. Meskipun demikian tidak diperoleh keterangan yang menyangkut perbedaan penyebutan status itu, kecuali pernyataan bahwa gelar itu adalah gelar kepala *palili*. Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan gelar *mia mota'u* untuk semua kepala daerah *palili*. Baca: Alb C. Kruyt, "[Het Rijk Mori](#)", *op.cit.* hal. 456-457.

cawan minumannya ke tempat Kalambi sehingga tampak seolah-olah ia telah meminum dari cawan raja. Ketika ia kembali dan duduk pada tempatnya semula untuk meneruskan minumannya, sang raja bersikap memarahinya dan menuduhnya dengan menyatakan bahwa ia (Kalambi) telah menghina raja, karena telah meminum minuman dari cawan raja. Ia tersentak dan tidak dapat membela diri karena kenyataan menunjukkan bahwa cawan raja ada dihadapannya, sehingga dengan rendah hati mengakui kesalahannya dan bersedia menebus kesalahannya dengan memberi ganti rugi sejumlah emas dan kerbau. Namun raja menyatakan bahwa ia tidak bersedia menerima apapun selain menjadi pengabdian yang tertinggi dan pendamping raja. Tuntutan raja itu akhirnya harus diterima dan ia tinggal di Pa'antoule. Ia kemudian diberi jabatan sebagai *Bonto*, suatu jabatan baru dalam kerajaan.

Kalambi yang diangkat menjadi *bonto* berkedudukan sebagai panglima perang kerajaan dan dalam keadaan damai berperan sebagai pejabat penghubung raja dengan para kepala-kepala pemerintahan daerah, khususnya daerah-daerah *palili*. Dalam perkembangan kemudian, pengaruh pejabat ini semakin kuat sehingga dalam urusan politik kerajaan ia juga dilibatkan sebagai anggota dewan hadat kerajaan. Selain itu dalam urusan pergantian kepala pemerintahan, baik raja maupun *mokole* (kepala pemerintahan *kemokolean*) dan *mia mota'u*, pejabat ini juga ikut terlibat dan menentukan. Pengangkatan kepala suku Maruruno menjadi *bonto* ini juga untuk memperkuat strategik dalam menempatkan daerah Lembo sebagai kubu pertahanan kerajaan dari

segala kemungkinan serangan yang datang dari arah timur.

Pengangkatan pejabat baru setelah kekalahan yang dialami dalam perang melawan pasukan Luwu itu menunjukkan bahwa peristiwa itu menyadarkan penguasa Mori untuk membangun kekuatan perang yang kuat untuk melindungi negerinya. Kekalahan yang diderita dalam perang yang lalu dipandang karena belum terorganisasinya para pemberani yang dapat dikerahkan untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Itulah sebabnya pejabat *bonto* yang diangkat, diembankan tugas utama sebagai panglima perang kerajaan. Dia juga diberi tugas untuk mendata jumlah laki-laki yang potensial dari setiap kelompok kaum atau daerah yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Mori, agar kelak dapat dikerahkan menjadi tenaga pemberani jika terjadi konflik eksternal.

Strategi politik yang dilaksanakan oleh Sungkawawo untuk membebaskan kerajaannya dari status *palili* dan sikap tegas Ratu Wedange untuk tidak kembali ke kerajaannya akhirnya berhasil merubah kebijakan politik Kerajaan Luwu. Menurut keterangan, pada periode pemerintahan datu Luwu ke-22, ia mengambil kebijakan politik menghapuskan kewajiban penguasa Kerajaan Mori untuk menghantarkan upeti.<sup>3</sup> Datu Luwu yang ke-22, menurut silsilah adalah Batari Tungke Sultanat Fatimah (1706-1715). Hal itu berarti Kerajaan Luwu, secara tidak langsung, telah mengakui kebijakan politik yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan Kerajaan Mori untuk membebaskan kerajaannya dari status daerah taklukan yang berkewajiban membayar upeti menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Sekaligus

puteri dari datu Luwu ke-21, To Palaguna, Matinroe ri Langkana.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 456. Kruyt menyatakan bahwa Datu Luwu yang ke-22, itu adalah Matinroe ri Malangke, adalah keliru, karena Datu Luwu ke-22 adalah Batari Tungke Sultanat Fatimah, Matinroe ri Patturo (1706-1715),



membatalkan kedudukan Sungkawawo sebagai raja daerah taklukan dan mengakuinya sebagai Raja Mori yang merdeka dan berdaulat.

## **Pembenahan Organisasi Pemerintahan**

Kerajaan Mori, berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Alb. C. Kruyt dan J. Kruyt,<sup>4</sup> menunjukkan bahwa cikal-bakal pembentukan kerajaan itu bermula pada pengabsahan kedudukan Mokole Moiki. *Kemokolean* Moiki ini dalam perkembangan selanjutnya memindahkan pusat pemerintahannya di Wawontuko, sehingga lebih dikenal dengan nama baru *Kemokolean* Wawontuko, dan Mokole Moiki menjadi Mokole Wawontuko. Kisah kehadiran *mokole* yang luar biasa itu mendorong sejumlah kepala kaum dengan sukarela menggabungkan diri dan menyatakan menjadi bagian dari pemerintahannya. Beberapa dari wilayah kelompok kaum yang menyatukan diri itu kemudian ditempatkan salah seorang putera raja untuk menjadi pemimpin mereka dengan menyandang gelar *mokole*. Menurut ingatan kolektif masyarakat Mori, Mokole Wawontuko memiliki 6 orang putera dan seorang puteri. Putera yang tertua diangkat menjadi Mokole Wawontuko dan puterinya menjadi Mokole Banggai. Lima puteranya yang lainnya diangkat menjadi

*mokole* di daerah kekuasaannya. Namun demikian dalam penuturannya tentang sejarah kerajaan ini hanya terdapat dua daerah yang memiliki kedudukan *kemokolean* yaitu *Kemokolean* Pampawu dan *Kemokolean* Sarombu. Meskipun tidak ada informasi yang pasti bahwa dua diantara lima puteranya yang lain itu menjadi *mokole* di dua *kemokolean* itu, akan tetapi karena keturunan Mokole Moiki yang berstatus *mokole* sehingga dapat dipastikan bahwa kepala pemerintahan di dua daerah *kemokolean* itu adalah keturunan dari Mokole Moiki.

Daerah kekuasaan itu memiliki kedudukan sebagai *kemokolean* yang merdeka dan berdaulat. Namun bila terjadi sengketa dengan kelompok kaum lainnya (konflik eksternal) yang bermukim di kawasan yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Mori, para *mokole* itu selalu memohon bantuan kepada Mokole Wawontuko untuk membantunya menghadapi kelompok kaum itu. Bantuan yang diberikan itu dipandang sebagai kewajiban untuk melindungi bagian dari wilayah kekuasaannya, oleh karena itu tidak ada tuntutan imbalan atas bantuan yang diberikan. Hak yang diperoleh adalah daerah lawan yang ditaklukan itu selanjutnya ditempatkan menjadi daerah *palili* (daerah pengaruh kekuasaan) dari *kemokolean* Wawontuko.<sup>5</sup> Dalam hubungan inilah sehingga

---

<sup>4</sup> Baca: Alb. C. Kruyt, *Kerajaan Mori* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979). J. Kruyt, "[De Moriers van Tinompo...](#)", *op.cit.* dan Alb. C. Kruyt, "[Het Landschap Mori](#)", *op.cit.*

<sup>5</sup> Konsep *palili* sesungguhnya menunjukkan daerah taklukan namun dalam kisah masa lampau kehidupan kerajaan ini tampak bahwa semua daerah kekuasaan yang tidak dipimpin oleh keturunan *mokole* disebut *palili*. Hal itu yang mendasari penyebutan pejabat daerah *palili* itu dengan gelar *ana mokole*, *mokole palili*, *mia mota'u* dan *karua*. Daerah *palili* yang kepalanya disebut *ana mokole* adalah kepala kaum yang

memohon kepada raja untuk membantu menyelesaikan konfliknya dengan kelompok kaum lainnya. Atas jasa itu mengakui Raja Mori sebagai pelindung dan perantaranya. Sementara yang digelar *mokole palili* adalah kepala kelompok kaum yang tidak memohon bantuan sehingga ditaklukan. Gelar *karua* diberikan kepada kepala kelompok kaum Maruruno, yang dijalin melalui perkawinan politik. Oleh karena itu jabatan *karua* diberikan untuk menangani wilayah Lembo sehingga dikenal sebagai Karua Lembo. Sementara *mia mota'u* merupakan sebutan untuk kepala kelompok kaum yang tidak memiliki seorang

*Kemokolean* Wawontuko dipandang memiliki daerah *palili* yang berkewajiban memberikan upeti setiap tahunnya.

Dalam perkembangan kemudian, setelah *Kemokolean* Wawontuko ditaklukan oleh Kerajaan Luwu seperti yang telah diungkapkan terdahulu, putera mahkota Kerajaan Mori, Sungkawawo memindahkan pusat pemerintahan ke Petasia (Pa'antoule), sehingga terbentuk *kemokolean* baru yaitu *Kemokolean* Petasia. *Kemokolean* ini yang dipandang terutama dan terpenting dan menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Mori. Sehubungan dengan itu, Anamba (1670-1680), Raja Mori IV yang umumnya disebut menjadi Mokole Wawontuko, ketika putera mahkota berada di daerah pengasingannya (Palopo) kemudian bersedia melepaskan kedudukannya sebagai raja, dan mengakui Sungkawawo menjadi Raja Mori V.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Raja Mori ini bergiat membenahi organisasi pemerintahan dan perluasan pengaruh kekuasaan. Strategi perluasan kekuasaan itu melalui perkawinan politik, seperti yang telah diungkapkan terdahulu, dan tindakan penaklukan. Sehubungan dengan strategi perluasan kekuasaan yang disebutkan terakhir itu, dalam praktek pemerintahan tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi antara kelompok kaum. Raja pada dasarnya menunggu hingga pemimpin kelompok kaum datang dan memohon jasanya untuk menyelesaikan konflik itu. Jika kedua kelompok yang berkonflik itu datang memohon bantuannya untuk menyelesaikan konflik mereka maka ia berusaha mencari solusi penyelesaiannya. Namun bila salah satu dari kepala kaum yang datang memohon bantuan maka raja akan berpihak kepadanya dan melakukan tindakan penaklukan terhadap

lawannya. Dua kelompok kaum itu kemudian mengakui kekuasaan raja atas negeri mereka dan menjadi *palili*. Dalam hubungan inilah, sebagai bukti tunduk dan patuh diberikan kewajiban memberikan upeti setiap tahun kepada kerajaan. Kepala kelompok kaum yang memohon bantuan kerajaan dan kemudian tunduk dan patuh kepada Raja Mori disebut *ana mokole* sementara yang ditaklukan disebut *mokole palili*. Perbedaan penyebutan jabatan kepala pemerintahan daerah *palili* itu sesungguhnya berkaitan dengan pemberian status yang berbeda dari daerah *palili* itu. Perbedaan status itu juga pasti tergambar dalam jumlah kewajiban dalam penganugerahan upeti. Sebagai contoh, diungkapkan tentang kewajiban daerah membawa persembahan ketika seorang *mokole* meninggal. Orang Wulanderi dan Luria, sebagai satu kesatuan diwajibkan menyerahkan 100 bungkus beras, sementara masyarakat Lembo (wilayah Karua Lembo) tidak ditentukan jumlahnya, dan hanya bergantung kepada jumlah yang berhasil dikumpulkan dari rakyatnya.<sup>6</sup>

Pejabat daerah *palili* itu, secara tradisional lebih dikenal dengan sebutan *mia mota'u*. Oleh karena itu dalam penulisan ini hanya digunakan sapaan *mia mota'u* untuk semua kepala pemerintahan daerah *palili*. Selain itu pula perlu dinyatakan bahwa daerah *palili* itu menurut penuturan penduduk lebih dikenal dengan menyebut nama kelompok kaum. Sebagai contoh daerah Uluwoi, lebih dikenal dengan orang Uluwoi yang menghuni tiga perkampungan yaitu Dolupo, Balungkere dan Undoro. Usaha-usaha ini yang mendasari penuturan rakyat Mori bahwa *Kemokolean* Wawontuko dan *Kemokolean* Petasia yang memiliki daerah *palili*. Namun demikian semua pemimpin daerah *palili* (*mia mota'u*) setiap

---

*mokole* sebagai pemimpin mereka.

<sup>6</sup> J. Kruyt, *op.cit.*, hal. 189-190.

tahunnya hanya memberikan upeti kepada Mokole Petasia yang dalam kedudukannya menjadi Raja Mori. Selain itu juga wajib menyerahkan pemberian apabila seorang *mokole* meninggal dunia.

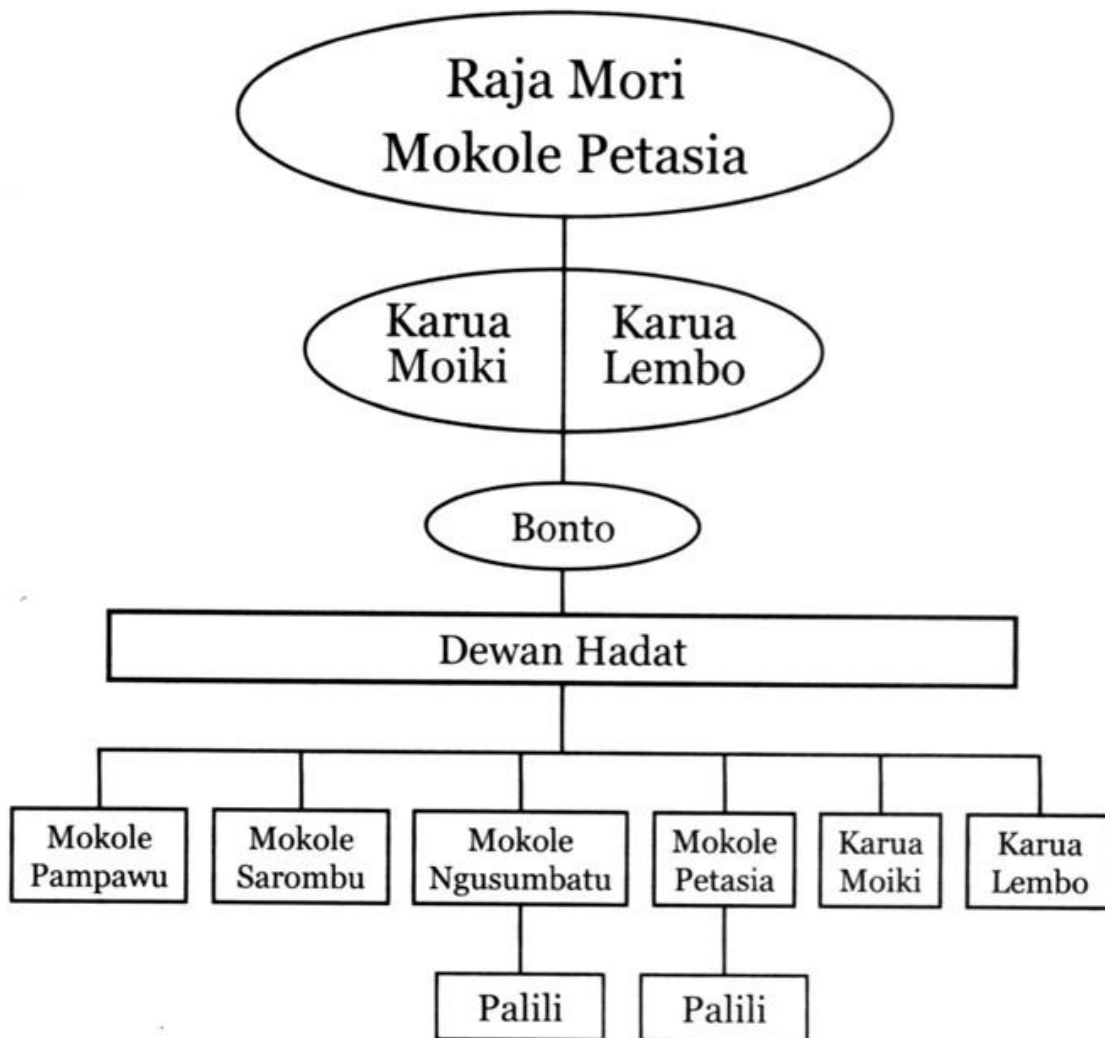
Raja Sungkawawo melengkapi organisasi pemerintahan Kerajaan Mori dengan menambah dua pejabat baru yaitu Karua Lembo dan *bonto*. Dengan demikian terdapat dua pejabat *karua* dalam struktur organisasi kerajaan, yaitu Karua Moiki dan Karua Lembo. Meskipun status *karua* itu sama, namun dalam hal peranan mereka, Karua Moiki yang dipandang kedudukannya lebih tinggi. Sementara pejabat *bonto*, secara struktural berada di bawah *karua*. Meskipun demikian pejabat ini yang senantiasa mendampingi raja dan berkedudukan di lingkungan istana kerajaan dan berperan penting dalam melayani kepentingan pemegang kendali kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan dengan daerah-daerah kekuasaan. Pada dasarnya *bonto* berkedudukan sebagai panglima perang kerajaan, sehingga berperan penting dalam menjamin keamanan dan ketentraman dan wilayah kekuasaan dan terlibat langsung dalam usaha perluasan pengaruh kekuasaan kerajaan. Selain itu juga senantiasa ditugaskan untuk menjalin hubungan dengan para penguasa daerah-daerah kekuasaan. Kedudukan dan perannya itu mendorong pula ia bergiat memperkuat kedudukan dan pengaruhnya, sehingga dalam perkembangan kemudian, pejabat ini juga diberi kewenangan oleh raja untuk ikut menentukan dan terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan pejabat pemerintahan daerah bersama pejabat *karua*.

Pemindahan pusat pemerintahan melalui pembentukan *kemokolean* baru yang menjadi pusat pemerintahan, perluasan kekuasaan, dan pembentukan serta pengangkatan pejabat kerajaan baru berakibat terjadinya perubahan

wilayah kekuasaan inti kerajaan. Pada periode sebelumnya, daerah inti kerajaan hanya terdiri dari: *Kemokolean* Wawantuko, *Kemokolean* Pampawu, *Kemokolean* Sarombu, dan *Kekaruaan* Moiki. Dalam perkembangan kemudian bertambah dua daerah baru, yaitu *Kemokolean* Petasia dan *Kekaruaan* Lembo. Selain wilayah inti kerajaan itu, terdapat pula beberapa daerah pengaruh kekuasaan yang dipandang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan, yaitu daerah *palili* dari *Kemokolean* Wawantuko dan *Kemokolean* Petasia. Daerah *palili kemokolean* yang disebutkan terakhir itu adalah daerah-daerah *palili* baru, berkat perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Raja Mori (Mokole Petasia). Hal ini menunjukkan bahwa periode sesudah penyerangan Kerajaan Luwu 1670, kerajaan ini berhasil memperluas pengaruh kekuasaannya di wilayah yang kemudian dipandang sebagai wilayah Kerajaan Mori.

Perkembangan politik itu juga berdampak pada perubahan pada struktur pemerintahan dan keanggotaan Dewan Hadat Kerajaan. Dalam struktur pemerintahan yang baru terdapat tiga pejabat tinggi, yaitu Karua Moiki, Karua Lembo, dan *Bonto*. Perubahan ini berdampak pada perubahan keanggotaan Dewan menjadi tujuh orang dan Mokole Petasia menjadi ketua lembaga itu. Yang menjadi anggota lembaga hadat itu adalah: Mokole Ngusumbatu, Mokole Pampawu, Mokole Sarombu, Karua Moiki, Karua Lembo, dan Bonto yang ketika itu dijabat oleh Kalambi. Anggota Dewan Hadat ini baru dapat berfungsi apabila raja mengundang mereka datang ke istana kerajaan untuk bertukar pendapat menyangkut persoalan-persoalan pelik yang dihadapi kerajaan, seperti adanya konflik eksternal ataupun keinginan untuk menjalin hubungan kekuasaan dengan kerajaan-kerajaan lain. Struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk itu dapat digambarkan seperti bagan berikut ini.

Gambar III  
Perubahan Struktur Pemerintahan Kerajaan



Gambar struktur pemerintahan yang dibangun oleh Sungkawawo itu menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki tiga orang pejabat tinggi kerajaan. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, Karua Moiki dan Karua Lembo berperan pula sebagai kepala pemerintahan daerah mereka. Karua Moiki adalah kepala suku Moiki dan Karua Lembo adalah kepala suku Watulembo. Itulah sebabnya

dalam tulisan Jan Kruyt dinyatakan bahwa para kepala kelompok kaum itu ada yang mengenakan gelar karua.<sup>7</sup> Sesungguhnya *karua* adalah kepala kelompok kaum yang mendapat penghargaan khusus dari kerajaan sebagai pejabat tinggi negara yang berperan dalam kegiatan pergantian kepala pemerintahan daerah, baik wilayah yang diperintah oleh *mokole* maupun *mia mota'u*. Kehormatan yang diperolehnya itu

<sup>7</sup> Alb. C.. Kruyt, "Hat Landschap Mori ..., *op.cit.*, hal. 523.

sehingga berkedudukan pula sebagai anggota Dewan Hadat.

Sementara para *mia mota'u* (kepala pemerintahan daerah *palili*) tidak menjadi anggota Dewan Hadat kerajaan. Mereka ini memiliki kewajiban setiap tahunnya mengantar upeti kepada raja. Upeti ini merupakan salah satu sumber kesejahteraan yang dikuasai oleh pemerintah kerajaan. Raja Mori tidak hanya menerima upeti dari daerah *palili* yang merupakan *palili kemokolean* Petasia saja, tetapi juga menerima upeti dari daerah *palili Kemokolean* Wawontuko. Selain itu mereka juga memiliki kewajiban untuk menghantar persembahan (*melo'a*) jika Raja Mori atau keturunannya meninggal dunia. Persembahan itu yang kemudian digunakan dalam pesta pemakaman raja atau keluarganya. J. Kruyt mencatat nama-nama dari kelompok suku yang memiliki kewajiban menghantarkan persembahan apabila seorang raja (*mokole*) meninggal, sebagai berikut:

- Orang Wulanderi dan Luria (Halumpuu) menyerahkan 100 *bongkusi* (bakul) beras;
- Orang Molio'a menyerahkan 100 *bongkusi* beras
- Orang Dolupo (Pandiri) menyerahkan 100 *bongkusi* beras;
- Orang Belala dan Wangi (Ensa dan Solua) menyerahkan 100 *bongkusi* beras
- Orang Masilu dan Tauta (Koronteo) menyerahkan 100 *bongkusi* Beras
- Orang Molongkuni dan Impo (Lembobelala, Tambalako, Wawopada, Lahumbala, Korowalelo, Korompeli, dan Koromantantu) menyerahkan 100 *bongkusi* beras.
- Orang Doule (Kolaka) menyerahkan 100 *bongkusi* beras;
- Orang Pa'angkai dan Watu menyerahkan dua ekor kerbau
- Orang Walati dan Pada menyerahkan 4 ekor kerbau
- Orang Pu'umbana (Korontowu dan Era) menyerahkan 10 potong kulit kayu yang dibersihkan dan 10 ekor ayam;
- Orang Pakambia (Tea, Tamunjengi, Mayumba, dan Rotombana) menyerahkan 50 blok lilin lebah (50 *dopi-dopi panti*);
- Karua Lembo dan penduduknya menyerahkan beras dan ayam, yang jumlahnya tidak ditentukan, melainkan berdasarkan pada pemberian penduduk yang dikumpulkan, dan ditambah dengan kain biru tua sepanjang 2 vadem (2 X 1,88 m = 3,76 meter);
- Karua Moiki menyerahkan 3 buah topi perkabungan berbentuk kerucut yang dipergunakan untuk melindungi dari terik matahari yang diberikan pita hitam dan dihiasi dengan manik-manik yang berbentuk bulat dan kain-kain yang berwarna-warni;
- Orang Uluwoi (Dolupo, Bulungkere, dan Undoro) menyerahkan jumlah yang tidak ditetapkan dari barang-barang yang wajib dipersembahkan, seperti: kurkuma (*curcuma*, *lo'ia*), kunyit (*kuni*), ayam, dan beras.
- Orang Nuha (Soroako) menyerahkan boneka hasil kerajinan pandai besi yang kelak ditempatkan di makam dan membuat apa yang disebut *misa*; benda-benda yang terbuat dari besi (parang/ *owu*, betel/ *pa'o*, pahat / *pagoro*, pisau / *piso*) yang mereka sebut *pandiri*.
- Orang Ponda (Solonsa dan Ungkaea, di daerah Bungku) menyerahkan 40 *bongkusi* beras, 40 ekor ayam, dan 40 butir telur maleo (*mbomua*);
- Orang-orang Bohonsuai menyerahkan gula aren dan *kinaa melene*.
- Orang Kalae dan Watambayoli menyerahkan 5 *bongkusi* beras dan 3 ekor ayam;

- Selain penyerahan di atas, keluarga *bonto* juga menyumbangkan seekor kerbau; hal yang sama pula dilakukan oleh raja atau *mokole* apabila seorang *bonto* atau keluarganya meninggal.<sup>8</sup>

Jika dalam keadaan darurat perang, para *mia mota'u* juga diharapkan dapat memberikan bantuan para pemberaninya (termasuk *tadulako-nya*) untuk kepentingan pasukan perang dan pertahanan. Dalam hubungan inilah raja senantiasa memiliki data tentang jumlah laki-laki potensial dari daerah-daerah kekuasaannya. Namun demikian tidak ada data yang tertulis berapa jumlah pemberani yang dicatat oleh setiap penguasa Mori. Dalam penelitian Kruyt, dia mencatat data jumlah pemberani kerajaan Mori yang diberikan oleh Raja Marunduh Datu ri Tana pada tahun 1898 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel No. 2  
Jumlah Pemberani Kerajaan Mori (1898)

Nama Daerah	Jumlah Pemberani
Mori Bawah	258 orang
Mori Atas	1.618 orang
Orang Kinadu	834 orang
Orang Moiki	150 orang
Orang Watu	370 orang
Berbahasa Bare'e	800 orang
Total	4.030 orang

Sumber: Alb.C. Kruyt, "Het Landschap Mori", op.cit., hal. 536.

Data yang disampaikan oleh Kruyt ini lebih bersifat umum, dan mungkin itu berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Jika ditelusuri lebih lanjut, seperti yang tercatat dalam laporan perjalanan dari F.R. Maengkom, salah seorang pejabat bumiputera yang bertugas sebagai agen pemerintahan (*posthouder*) di Pulau Togian, yang menanyakan tentang jumlah pemberani di Kerajaan Mori pada April 1906, tampak secara

detail Raja Marunduh Datu ri Tana merinci jumlah pemberani di kerajaannya dari 44 kelompok kaum yang menjadi rakyatnya, dan juga tempat pemukiman dari kelompok kaum itu.

## Kehidupan Pemerintahan Setelah Sungkawawo

Perkembangan pemerintahan setelah penbenahan organisasi pemerintahan ini tampak menempatkan pejabat *bonto* sebagai tokoh yang berperan penting dalam kehidupan pemerintahan. Hal itu nampak dalam pengungkapan sejarah daerah ini yang memberikan urutan-urutan atau silsilah pejabat ini dengan teratur dan berurutan. Selain itu juga berbagai peristiwa yang terjadi yang diselesaikan oleh pemerintah hanya menyebut nama pejabat panglima perang, tanpa menyebut nama Raja Mori. Bahkan dalam menyelesaikan beberapa kasus internal, dia mendapat keuntungan dari penyelesaian perkara itu. Sebagai contoh, kasus penyelesaian sengketa yang berkepanjangan di daerah Wawoopa. Ketika itu Raja Mori, Sungkawawo, yang didampingi oleh Kalambi (*bonto*) menyelesaikan persengketaan itu dengan membagi-bagi wilayah itu kepada masing-masing suku. Dalam pembagian itu, tersisa dua lahan pertanian, yaitu Biribonti dan Wawoopa. Lahan itu akhirnya dikuasai oleh pejabat panglima perang.<sup>9</sup> Pemilikan lahan itu mungkin merupakan anugerah dari raja sebagai sumber kesejahteraan pejabat tingginya itu. Namun hal ini tidak diungkapkan oleh hasil penelitian Jan Kruyt. Ia hanya mengungkapkan bahwa penduduk yang mengolah lahan pertanian itu berkewajiban menyerahkan seperdua-puluh dari produksinya kepada *bonto* (50 ikat padi setiap 1000 ikat padi). Selain itu mereka juga berkewajiban menghantar persembahan

<sup>8</sup> J. Kruyt, *op.cit.*, hal. 189-190.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 62.

jika ada *bonto* atau keluarganya yang meninggal berupa: seekor babi, 6 ekor ayam, satu basu yang berisi beras, selebar anyaman tikar (*ompeo*), siri (*kotuo*) dan pinang (*minama*).

Susunan Raja-raja Mori yang memerintah kerajaan ini setelah Raja Sungkawawo hingga periode Marunduh Datu ri Tana tampaknya agak kabur. Silsilah raja-raja yang dibuat J. Kruyt hanya menyebutkan dua orang raja,<sup>10</sup> sama seperti silsilah yang dibuat oleh Makita Marunduh,<sup>11</sup> yaitu Lawolio dan Tosaleko. Sementara silsilah yang dibuat oleh Paulus Hertelinus Lambautoh, menyebut empat orang raja, yaitu Landika, Alala Owolu Lamale, Tosaleko, dan Lambautoh. Penyusunan silsilah raja-raja ini jika diperhitungkan dengan periode yang lama antara akhir masa pemerintahan Sungkawawo (1720) hingga periode awal pemerintahan Marunduh (1870) yang mencapai 150 tahun, maka dapat dipastikan bahwa informasi yang dihimpun untuk menyusun silsilah raja-raja itu kurang lengkap. Ada seorang raja yang disebut oleh Makita Marunduh, J. Kruyt, dan Romus M. Kalaena sebagai pengganti Sungkawawo yang tidak tercatat dalam silsilah yang dibuat oleh Lambautoh, yaitu Raja Lawolio. Selain itu juga menempatkan Raja Tosaleko yang digantikan oleh Raja Marunduh. Dengan demikian, untuk melengkapi silsilah raja-raja, dapat ditambah-

kan Raja Lawolio menjadi pengganti Sungkawawo untuk melengkapi silsilah yang dibuat oleh Lambautoh,<sup>12</sup> dan menempatkan Raja Tosaleko pada urutan Raja Mori ke X yang kemudian digantikan oleh Raja Marunduh Datu ri Tana (Marunduh III) sebagai Raja Mori ke XI.

Periode pemerintahan raja-raja ini merupakan periode yang agak gelap dalam sejarah kerajaan ini. Informasi yang dapat diketahui dari periode ini juga sangat singkat, khususnya menyangkut proses pemindahan tempat pemukiman *bonto*, permusuhan kerajaan ini dengan Kerajaan Bungku yang dalam perkembangan kemudian melibatkan pemerintah Hindia Belanda yang secara bersama-sama melancarkan ekspedisi militer pada 1856, pada periode pemerintahan Tosaleko. Peristiwa ekspedisi itu akan diungkapkan secara jelas dalam pokok bahasan Perang Mori I.

Pada waktu Sungkawawo mengangkat Kalambi menjadi pejabat *bonto*, ia menetap di Pa'antoule untuk mendampingi raja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan ini juga ditetapkan sebagai jabatan warisan, hal yang umum berlaku dalam sistem administrasi pemerintahan yang bercorak primordial. Oleh karena itu, setelah Kalambi meninggal, ia digantikan oleh puteranya yang bernama Tabota. Pejabat ini memiliki dua orang putera; yang tertua bernama Kaeori dan yang lainnya

---

<sup>10</sup> [Ibid., op.cit. lampiran I.](#)

<sup>11</sup> Makita Marunduh, "Silsilah Raja-raja Mori", dalam: W.F. Taroreh, "Silsilah Makole-Makole Mori" (Manado: manuskrip, 1992). Silsilah yang sama juga dibuat oleh Romus M. Kalaena, "Perang Wulanderi (Agustus 1907)" (Palu: Skripsi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, 1995).

<sup>12</sup> Penambahan Raja Lawolio dalam silsilah yang dibuat oleh Lambautoh berarti ada lima orang raja yang memerintah pada periode 1720-1870. Itu berarti rata-rata periode pemerintahan seorang raja adalah 30 tahun, waktu yang tidak jauh berbeda dari rumusan

R.A. Kern untuk menetapkan periode pemerintahan seorang raja dapat diperkirakan berlangsung selama satu generasi (25 tahun) karena seorang raja diganti apabila ia telah uzur atau berhalangan tetap. Periode pemerintahan seorang Raja Mori selama 30 tahun itu dapat diterima dengan pertimbangan informasi tentang pemerintahan Raja Marunduh, yang ketika diwawancara oleh Alb. C. Kruyt pada akhir abad ke-19 telah berusia 60 tahun namun masih giat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara mandiri. Baca. Alb. C. Kruyt, *Kerajaan Mori* (Jakarta: Idayu, 1979), hal. 19.



bernama Poliwo. Ketika putera-puteranya mencapai usia dewasa, puteranya yang tertua yang secara tradisional dipandang kelak menggantikan kedudukan ayahnya, jatuh cinta dengan puteri raja, yang bernama Welena. Hubungan cinta mereka tidak mendapat restu dari raja, karena menurut ketentuan adat seorang perempuan yang berstatus sosial lebih tinggi dilarang menikah dengan laki-laki dari strata yang lebih rendah. Hal itu disebabkan karena peran seorang perempuan adalah menjaga dan memelihara status sosial keluarganya. Ia hanya boleh menikah dengan pria dari strata yang sama, atau yang lebih tinggi derajat kebangsawanannya.

Jika seorang puteri bangsawan tinggi menikah dengan seorang putera dari strata yang lebih rendah, maka dikenakan hukuman pengasingan. Ia dibuang ke luar dari kerajaan. Hukuman pembuangan atau pengasingan yang selalu dilakukan harus melintasi air atau laut. Oleh karena itu mereka yang melanggar norma adat yang berat harus diasingkan ke Matano, menyeberang Danau Matano, atau ke pulau-pulau yang berada di Teluk Tomori, melintasi laut. Melintasi air atau laut itu sebagai simbol bahwa ia dipandang telah mati dan tidak boleh kembali lagi ke negerinya. Hal itu dilakukan karena masyarakat Mori memegang teguh pantangan untuk menumpahkan darah bangsawan *mokole* di bumi Mori, termasuk pula darah budak warisan (*ata pu'u*).

Penolakan raja dan tatanan adat yang menghalangi hubungan percintaan mereka itu sangat mengecewakan Kaeori yang begitu merindukan agar dapat mempersunting Welena

sebagai wanita pujaan hatinya. Dalam keputusan itu, ia menempuh tindakan bunuh diri. Peristiwa ini sangat memilukan hati sang ayah, sehingga berniat untuk meletakkan jabatannya dan membawa keluarganya kembali berkumpul bersama kelompok kaumnya. Keinginan Tabota itu terdengar oleh Mokole Wawontuko, oleh karena itu ia bertekad untuk dapat membatalkan niat Tabota itu. Hal itu tentu berkaitan dengan peran pejabat ini dalam melindungi kerajaan dari kemungkinan timbulnya ancaman eksternal. Ia akhirnya berhasil menenangkannya dan menawarkan jasa menyediakan tempat menetap di Wawontuko. Tabota menerima tawaran itu dan pindah menetap di *Kemokolean* Wawontuko.<sup>13</sup> Sejak itu tempat kedudukan panglima perang kerajaan tidak lagi di pusat pemerintahan kerajaan tetapi di tempat pemukiman yang baru itu, namun tetap berperan sebagai panglima perang kerajaan.

Kenyataan itu dapat ditelusuri dari beberapa peristiwa yang terjadi dimana pejabat *bonto* tampil mewakili kerajaan dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh dapat disebut "peristiwa Panda". Pada suatu ketika orang-orang Panda yang menetap di wilayah pesisir Kerajaan Bungku, di daerah perbatasan dengan Kerajaan Mori, mendapat serangan dari suku Salampe. Serangan itu tidak dapat dibendung dan dipukul mundur oleh orang Panda sehingga mereka memohon bantuan kepada Raja Mori VIII, Alala Owolu Lamale (1780-1810) yang kemudian mengirim *bonto* yang ketika itu dijabat oleh Pu'ukelu (*bonto* ke-4) untuk membantu mereka. Pu'ukelu selanjutnya mengumpulkan sejumlah pemberani dan menghalau

jabatan *bonto* tetap berperan sebagai panglima perang kerajaan, bukan panglima perang *Kemokolean* Wawontuko. Niat Mokole Wawontuko itu sesungguhnya merupakan bagian dari pengabdian kepada kerajaan untuk mencegah terjadinya perpecahan internal dalam kehidupan pemerintahan kerajaan.

<sup>13</sup> J. Kruyt, *op.cit.*, hal. 60. Menurut Kruyt, Mokole Wawontuko bergiat untuk mendapat keuntungan dari hubungan yang disharmoni antara raja dan *bonto*, dan berhasil mengajak Tabota pindah dan bermukim di Wawontuko. Menurut pemikiran saya tidak demikian, karena Tabota dan keturunannya yang mewarisi

para penyerang yang telah menguasai sebagian wilayah suku Panda. Keberhasilannya dalam menghalau para penyerang itu sangat mengembirakan orang Panda sehingga mereka menghadiahkan sejumlah besar sarung dan barang-barang yang terbuat dari kuningan. Banyaknya pemberian itu dinyatakan dengan ungkapan bahwa jumlah pemberian itu dapat menjadi dinding sebuah bangunan rumah.<sup>14</sup> Namun pemberian itu ditolak secara halus oleh Pu'ukelu sambil meminta mengganti pemberian itu dengan memberikan kepadanya hak kepemilikan atas *Tambunga I Panda* (Hutan Sagu di Panda).

Keterlibatan penguasa Kerajaan Mori dalam menyelesaikan persoalan kelompok kaum yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Bungku ini menyebabkan penguasa Kerajaan Bungku memandang kerajaan tetangganya ini hendak bergiat memperluas pengaruh kekuasaannya ke wilayah kerajaannya. Selain itu juga campurtangan ini dipandang sebagai tindakan politik untuk memperlemah pengaruh kekuasaan penguasa Bungku terhadap daerah-daerah kekuasaannya, yang pada gilirannya dapat dijadikan daerah *palili*. Oleh karena itu penguasa kerajaan itu menentang campurtangan penguasa Mori terhadap persoalan rakyatnya sehingga menyebabkan dua kerajaan bertetangga itu saling bermusuhan.

Reaksi penolakan itu juga beralasan karena strategi yang dilakukan bonto itu secara tidak langsung memaksa pemimpin dan penduduk yang telah mendapatkan bantuannya patut tunduk kepadanya, karena ia telah memiliki dan menguasai sumber kesejahteraan penduduk, yaitu hutan sagu. Makanan pokok penduduk adalah sagu, karena itu dengan pemilikan hutan sagu berarti menguasai sumber kesejahteraan penduduk, dan secara tidak langsung mengikat

penduduk setempat untuk selalu mempersembahkan sejumlah hasil olahan sagunya kepada pemilik. Hal itu dapat dipandang sebagai kewajiban upeti, yang dipandang menjadi simbol ketaatan kepada penguasa pemilik sumber kesejahteraan itu.

Selain faktor ini, jika dicermati informasi yang diungkapkan oleh Alb. C. Kruyt, terdaftar faktor lain yang berkaitan dengan gerakan politik yang dilakukan oleh penguasa Kerajaan Bungku. Gerakan politik itu berkaitan dengan informasi bahwa kerajaan itu mendapat kehormatan dari Kerajaan Luwu untuk menerima upeti yang wajib diserahkan oleh Kerajaan Mori kepada kerajaan penakluknya (kerajaan protektor), dan kemudian diantar ke Palopo.<sup>15</sup> Hal ini sesungguhnya bukanlah suatu kelaziman dalam menghantar upeti kepada kerajaan protektor. Pada dasarnya upeti adalah sarana yang dipakai untuk tujuan agar para penguasa (raja) daerah taklukan datang setiap tahun dan menunjukkan ketaatan dan kesetiiaannya kepada protektor dengan menyerahkan upeti. Selain itu, Kerajaan Mori bukan kerajaan *palili*, karena Datu Luwu ke-22, Batari Tungke Sultanat Fatimah, telah membebaskan Kerajaan Mori dari kewajiban menyerahkan upeti. Oleh karena itu, hal ini dapat dipandang sebagai satu gerakan politik yang bernuansa tindakan penghinaan terhadap Kerajaan Mori. Persoalan ini juga merupakan faktor penyebab dua kerajaan bertetangga dan masih memiliki hubungan genealogis itu dikungkung oleh suasana permusuhan, khususnya pada tingkat konflik politik.

Meskipun suhu politik antara dua kerajaan itu memanas, namun keadaan itu tidak berpengaruh terhadap hubungan sosial-ekonomi dan kekeluargaan antara penduduk dua kerajaan ini. Hal itu didasarkan pada kenyataan

<sup>14</sup> [Ibid. hal. 64.](#)

<sup>15</sup> Baca: Alb. C. Kruyt, Kerajaan Mori, op.cit.

bahwa penduduk dari dua kerajaan itu memiliki hubungan genealogis, mereka memiliki budaya yang sama, demikian juga bahasa dengan sedikit perbedaan akibat serapan yang dilakukan dalam kontak budaya dengan masyarakat lain melalui lintas budaya niaga. Penduduk Mori tetap menjalin hubungan kekeluargaan mereka dengan penduduk Bungku. Penduduk Mori senantiasa mengunjungi hari-hari pasar di wilayah Bungku dengan membawa hasil produksi mereka berupa beras dan tembakau untuk ditukar dengan produk yang tidak dihasilkan di daerahnya sendiri, seperti garam, ikan kering, berjenis-jenis peralatan dari besi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kehidupan dua kerajaan yang merdeka dan berdaulat ini dalam perkembangan kemudian mengalami serangan dari bajak laut Tobelo dari Ternate. Orang Tobelo memilih terlibat dalam kegiatan bajak laut untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mencampuri kehidupan politik Kerajaan Ternate. Dalam hubungan dengan kegiatan itu, mereka menyerang pusat-pusat kegiatan politik dan ekonomi di pesisir timur Sulawesi untuk mendapatkan tempat berpijak dan menjadikan tempat tersebut untuk berkumpul dalam melakukan aktivitas mereka. Penyerangan mereka terhadap daerah pesisir Kerajaan Mori mendapat perlawanan yang sengit sehingga mendorong mereka meninggalkan negeri itu. Kenyataan itu memaksa mereka menyusuri ke arah selatan dan menyerang kota pelabuhan Tombuku, pusat pemerintahan Kerajaan Bungku. Kerajaan ini berhasil dengan mudah diduduki dan dijadikan pangkalan kegiatan mereka.

Kegiatan kelompok bajak laut ini selanjutnya adalah menyerang Kerajaan Buton, salah satu kerajaan yang merupakan kerajaan sekutu pemerintah Hindia Belanda, dan merupakan salah satu pelabuhan singgah armada dagang Belanda yang melakukan pelayaran perdagang-

an maritim ke kepulauan Maluku. Serangan yang dilancarkan pada tahun 1826 itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan ini. Walaupun demikian diberitakan bahwa para bajak laut itu berhasil membakar dan memusnahkan tanaman kapas dari kerajaan itu. Produk kapas dari Buton ini dipandang berkualitas terbaik sehingga oleh pemerintah kolonial diekspor ke Eropa.

Penyerangan terhadap Kerajaan Buton itu dipandang oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai suatu tindakan perlawanan terhadap kedudukan kekuasaannya. Hal itu bukan hanya berkaitan dengan kedudukan kerajaan itu sebagai kerajaan sekutu, - kerajaan sekutu dalam konsep politik pemerintah kolonial dipandang sebagai daerah protektorat - tetapi juga dipandang mengancam jalur pelayaran perdagangan maritim pemerintah kolonial Belanda. Sejak Makassar ditaklukan pada 1667, pemerintah kolonial telah membangun jalur pelayaran: Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, Buton, Amboina, Ternate, dan kembali mengikuti jalur yang sama setiap tahunnya. Dalam perkembangan kemudian, pada tahun 1832, ditambahkan satu jalur perdagangan pesisir dari Makassar, Bantaeng, Selayar, Buton, Selayar, Bantaeng, Makassar. Jalur perdagangan pesisir ini diperluas ketika *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) mengambilalih kegiatan perdagangan maritim pemerintahan kolonial dengan membuka jalur pelayaran ke-10 yang beroperasi setiap 4 minggu yang berlaku sejak 17 Januari 1891 dan bermula dari Makassar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Palima, Palopo, Buton, Kendari, Buton, Palopo, Palima, Sinjai, Bonerate, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Makassar, Ampenan, Bali-Buleleng, Surabaya, Singapura untuk kemudian kembali ke Makassar dan menelusuri jalur itu lagi. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah kolonial bergiat untuk

menghukum bajak laut Tobelo di Bungku.<sup>16</sup>

Ekspedisi militer yang dikirim berhasil menghalau bajak laut Tobelo serta menduduki dan menguasai Kerajaan Bungku. Daerah pendudukan yang baru ini kemudian dijadikan bagian dari wilayah kekuasaan Keresidenan Ternate (*Residentie van Ternate*). Residen Ternate selanjutnya menempatkan seorang pejabat pemerintah kolonial, Knefer, sebagai perwakilan pemerintahan (*posthouder*) di Tombuku pada tahun 1841. Pejabat ini bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan dan perdagangan di wilayah pesisir timur Sulawesi dan khususnya di kota pelabuhan ini.

Pada tahun 1853, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengumumkan status pelabuhan Ternate menjadi pelabuhan bebas.<sup>17</sup> Sehubungan dengan itu, Residen Ternate mengumumkan pula bahwa wilayah pesisir timur Sulawesi merupakan wilayah koloni Belanda yang merupakan bagian pemerintahan Keresidenan Ternate. Pernyataan ini konon didasarkan pada latar kesejarahan bahwa kerajaan-kerajaan di pesisir timur itu dahulu merupakan daerah taklukan yang wajib menyerahkan upeti kepada Kerajaan Ternate yang kini dikuasai oleh pemerintah kolonial. Sesungguhnya wilayah pesisir timur yang telah ditaklukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah Kerajaan Bungku dan Kerajaan Banggai sementara Kerajaan Mori belum ditaklukan sehingga berstatus kerajaan merdeka dan berdaulat. Pengumuman itu mendapat reaksi penolakan yang keras dan tegas dari pemerintah Kerajaan Mori, dengan menyatakan bahwa kerajaannya tidak pernah ditaklukan dan tunduk kepada pemerintah Kerajaan Ternate maupun pemerintah kolonial Belanda di Ternate. Pernyataan itu meru-

upakan reaksi penolakan terhadap pengumuman residen Ternate.

Sikap tegas dan keras dari Raja Mori X, Tosaleko (1840-1870) itu mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda menggagas rencana untuk mengirim ekspedisi militer untuk melakukan penaklukan terhadap Kerajaan Mori. Sehubungan dengan rencana itu, pada bulan April 1856, Gubernur Maluku, C.F. Goldman, berangkat dengan kapal uap Vesuvius menuju ke Teluk Tomori untuk melakukan pengintaian terhadap wilayah kerajaan ini. Dalam pengintaian wilayah musuh itu, Gubernur Maluku bersama sejumlah anggota marinir berusaha menelusuri Sungai Tompira dengan menyewa perahu penduduk. Namun dalam pelayaran itu, tiba-tiba penduduk yang mendayung perahu itu mengamuk dan berhasil membunuh dua anggota marinir. Gubernur Maluku dapat diselamatkan berkat kesigapan pengawalannya yang langsung menembak mati pengamuk itu. Rencana untuk mencermati medan dihentikan dan kembali ke kapal Vesuvius dan selanjutnya kembali ke Amboina.

Kejadian itu tidak dapat disangkal menjadi *casus belli* untuk mempercepat rencana ekspedisi militer untuk menaklukan Kerajaan Mori, walaupun disadari bahwa kejadian itu menunjukkan bahwa kerajaan ini sudah bersiaga untuk menghadapi segala usaha penyerangan terhadap negerinya. Itulah sebabnya, meskipun pasukan ekspedisi belum memiliki informasi yang memadai tentang wilayah Kerajaan Mori, akan tetapi rencana tindakan penaklukan dengan segera direalisasikan. Peristiwa ekspedisi militer untuk menaklukan kerajaan ini diungkapkan dan dijelaskan pada pokok bahasan berikut.

<sup>16</sup> Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 298.

<sup>17</sup> Pelabuhan-pelabuhan lainnya yang dinyatakan juga sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1853 adalah pelabuhan Kaili (sekarang Donggala) Ambon, Banda.

Sebelumnya pelabuhan Manado dan Kema pada tahun 1848. Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 79.

## BAB V

# PERANG MORI PERTAMA DAN KESUDAHANNYA

Pemerintah Hindia Belanda, setelah mengambil alih wilayah koloninya dari pemerintah Inggris pada 1816, selanjutnya bergiat memantapkan kedudukannya. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat perjanjian dengan pihak pemerintah Inggris untuk mengakui kedudukan kekuasaannya atas wilayah kepulauan di sebelah timur Semenanjung Malaka. Usaha itu berhasil dengan dicapainya Traktat London pada tahun 1824. Isi pokok perjanjian itu adalah pihak pemerintah Belanda mengakui kedudukan Inggris di Singapura dan Semenanjung Malaka dan Inggris mengakui kedudukan Belanda di kepulauan sebelah timur Semenanjung Malaka (Kepulauan Indonesia), keduanya berjanji membuka wilayah koloninya masing-masing bagi kegiatan perdagangan

maritim, dan memberantas bajak laut.<sup>1</sup>

Kesepahaman yang dicapai ini, pada mulanya dipandang sebagai langkah strategik untuk mengamankan kedudukannya di kepulauan ini secara keseluruhan, namun dalam perkembangan kemudian dipandang mengancam kedudukan kekuasaannya. Hal itu disebabkan karena secara de facto wilayah kepulauan ini belum seluruhnya dikuasai. Banyak kerajaan-kerajaan masih berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kebijakan pintu terbuka bagi kegiatan perdagangan maritim ternyata telah melapangkan *country traders*<sup>2</sup> memasarkan produksi Inggris ke wilayah kepulauan ini, tetapi bukan pada pusat-pusat perdagangan yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1830, para pedagang itu

---

<sup>1</sup> Menyangkut Traktat London 17 Maret 1824, baca: P.H. van der Kemp, "De Geschiedenis van het London Tractaat van 17 Maart 1824", dalam [BKI \(No. 56, 1904\)](#), hal. 1-244; Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: KPG, 2002), hal 63-64.

<sup>2</sup> *Country traders* adalah pedagang Inggris, bekas

pegawai *British East-India Company*, yang melaksanakan kegiatan perdagangan secara mandiri untuk memasarkan produksi industri Inggris. Kelompok pedagang ini mulai berkembang ketika pemerintah Inggris menawarkan subsidi bagi siapa saja yang bersedia memasarkan produksi industri Inggris dan mengimpor bahan baku bagi kebutuhan industri.

telah mengunjungi pelabuhan kerajaan Mamuju, dan pada tahun 1842 mengunjungi Kerajaan Bone, dan Wajo. Kehadiran para pedagang ini mencemaskan pemerintah Hindia Belanda, karena mereka tidak hanya memasarkan produksi tekstil, tetapi juga memasarkan peralatan perang (senjata dan amunisi) dan mengajarkan cara menggunakan dan memeliharanya. Selain itu juga dikuatirkan mereka akan menduduki kerajaan-kerajaan itu dan menyatakan sebagai wilayah koloni Inggris. Hal itu terbukti kemudian dengan kegiatan James Brooke yang mengunjungi Kerajaan Brunei pada tahun 1840 dan memberikan gantirugi untuk menguasai bandar niaganya.<sup>3</sup> Usaha James Brooke itu mendapat reaksi protes dari pemerintah Belanda namun pihak Inggris hanya menyatakan bahwa negaranya belum berniat untuk menjadikan Brunei sebagai koloninya.

Pada sisi lain kebijakan Inggris memberlakukan pelabuhan bebas bagi Singapura berhasil memikat para pedagang bumiputera memusatkan kegiatan perdagangan mereka ke Singapura.<sup>4</sup> Kenyataan ini bukan hanya berdampak memerosotkan kegiatan perdagangan di Hindia Belanda, bandar niaga Hindia Belanda sunyi dari kunjungan pedagang bumiputera dan masuknya barang-barang selundupan<sup>5</sup> - tetapi juga memberi peluang kepada kerajaan-kerajaan yang masih berdaulat memperkuat kedudukan kekuasaannya dengan membeli peralatan perang di Singapura atau dari pedagang-pedagang yang menjalin hubungan perdagangan dengan Singapura. Hal itu disebabkan karena produk persenjataan perang

dan amunisi, demikian juga candu diperdagangkan dengan bebas di kota pelabuhan Inggris itu.

Metode yang dipilih untuk memecahkan persoalan-persoalan itu adalah mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Inggris, dan bergiat mengontrol perdagangan senjata dan candu. Pada tanggal 9 September 1846, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan bahwa Makassar akan menjadi pelabuhan bebas mulai 1 Januari 1847. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat memikat pedagang bumiputera lebih memusatkan kegiatan perdagangan mereka di Makassar, dan tidak lagi ke Singapura. Menteri Koloni tidak berkeberatan dengan kebijakan ini, tetapi memikirkan cara mengantisipasi adanya pengembara country trader bertindak seperti James Brooke, sehingga mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi adalah daerah kekuasaan Belanda. Atas usul itu, Ratu Belanda mengumumkan perubahan jabatan "Gubernur Makassar" (*Gouverneur van Makassar*) menjadi "Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya" (*Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*) pada November 1846. Perubahan penyebutan jabatan itu menjadi dasar perubahan penyebutan wilayah pemerintahan dari "Provinsi Makassar dan daerah Taklukannya" (*Gouvernement van Makassar en Onderhoorigheden*) menjadi "Provinsi Sulawesi dan Daerah Taklukannya" (*Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden*).<sup>6</sup>

Hal yang sama juga diterapkan pemerintah

---

<sup>3</sup> Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, *A History of Malaysia* (London: The MacMillan Press Ltd, 1982), hal 124-130.

<sup>4</sup> Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 59-62. Untuk sejarah perdagangan Singapura, baca: Wong Lin Keng, *The Trade of Singapore, 1819-1869* (Singapore: Tie Wah Press, 1961, MBRAS Vol.

XXXIII, No. 1).

<sup>5</sup> Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 74-77.

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848* (Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5, 1973), hal. 268-269.

kolonial terhadap daerah lainnya. Pada tahun 1853, pemerintah menyatakan pelabuhan Ternate menjadi pelabuhan bebas,<sup>7</sup> residen Ternate mengumumkan bahwa wilayah pesisir timur Sulawesi merupakan wilayah koloni Belanda yang merupakan bagian pemerintahan Keresidenan Ternate. Pernyataan ini konon didasarkan pada latar kesejarahan bahwa kerajaan-kerajaan di pesisir timur itu dahulu merupakan daerah taklukan yang wajib menyerahkan upeti kepada Kerajaan Ternate yang kini dikuasai oleh pemerintah kolonial. Sesungguhnya wilayah pesisir timur yang telah ditaklukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah Kerajaan Bungku dan Kerajaan Banggai, sementara kerajaan lainnya belum ditaklukan sehingga berstatus kerajaan merdeka dan berdaulat. Pengumuman itu mendapat reaksi penolakan yang tegas dari pemerintah Kerajaan Mori, dengan menyatakan bahwa kerajaannya tidak pernah ditaklukan dan tunduk kepada pemerintah Kerajaan Ternate maupun pemerintah kolonial Belanda di Ternate. Pernyataan itu merupakan reaksi penolakan terhadap pengumuman Residen Ternate.

Sikap tegas dari pemerintah Kerajaan Mori itu yang mendorong pemerintah kolonial merencanakan pengiriman ekspedisi penaklukan. Selain itu, menurut laporan militer, rencana penaklukan itu didasarkan pula pada faktor adanya laporan bahwa penduduk Mori melakukan penjarahan di wilayah kerajaan Bungku

pada tahun 1849.<sup>8</sup> Faktor ini sesungguhnya merupakan strategik pemerintah kolonial bergiat mendapatkan dukungan dari pihak Kerajaan Bungku dengan mengungkapkan konflik terpendamnya dengan kerajaan tetangganya itu. Provokasi yang dilakukan itu berhasil memikat dan mendapat dukungan pasukan dari kerajaan taklukannya itu (Kerajaan Bungku). Pada dasarnya pemerintah kolonial tidak mengetahui kondisi Kerajaan Mori, karena itu sangat mengharapkan dukungan dari Kerajaan Bungku untuk melapangkan rencana penaklukan. Informasi yang diketahui tentang kerajaan itu adalah penduduk berperawakan tegar dan gemar berperang serta memiliki benteng pertahanan yang kuat yang dapat dicapai dalam tiga hari perjalanan dari pantai.<sup>9</sup> Akhirnya direncanakan tindakan penaklukan pada tahun 1856.

### **Persiapan Perang Mori Pertama, 1856.**

Raja Mori X, Tosaleko (1840-1870), menyadari bahwa sikap tegas yang dinyatakan terhadap pernyataan Residen Ternate pada 1853 itu pasti mendorong pihak pemerintah kolonial menyerang atau mengirim ekspedisi militer untuk menduduki kerajaannya. Dugaan itu diperkuat dengan hadirnya kapal uap dari pemerintah kolonial di perairan Teluk Tolo pada tahun yang sama, yang dipandang sebagai kapal pengintai kondisi kerajaan. Selain itu

persenjataan perang penduduk ini yang banyak digunakan adalah tombak dan keris daripada senjata api. Itu berarti akan dengan mudah ditaklukan karena persenjataan militer pemerintah kolonial jauh lebih modern dan ampuh dengan senjata api. Informasi ini juga menunjukkan bahwa pihak militer Belanda tidak memiliki yang baik tentang penduduk Mori. Mereka lebih dikenal dengan pedang Mori yang sekali tebas dapat memisahkan kepala dari tubuh, juga senjata panah dan sumpit.

<sup>7</sup> Pelabuhan-pelabuhan lainnya yang dinyatakan juga sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1853 adalah pelabuhan Kaili (sekarang Donggala) Ambon, Banda. Sebelumnya pelabuhan Menado dan Kema pada tahun 1848. Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 79.

<sup>8</sup> L.H.W.M. De Stuers, "De Expeditie tegen Tomorie, op de Oostkust van Celebes (April-Juli 1856)", dalam: *Militaire Spectator* (Bgn I, Vol. III, 1856), hal., 527.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 526. Menurut informasi yang diketahui

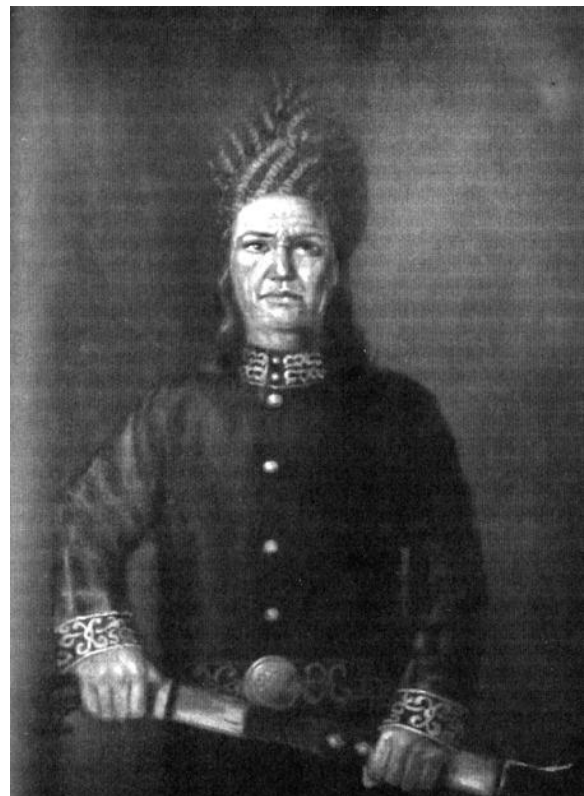
juga diperoleh informasi dari penduduk yang senantiasa menjalin hubungan perdagangan dengan Bungku, bahwa kerajaan tetangganya itu sedang mempersiapkan pemberaniannya untuk kelak membantu pemerintah kolonial dalam ekspedisi militer yang direncanakan untuk menaklukkan Kerajaan Mori. Informasi itu mendorong raja dan panglima perang pemerintah Kerajaan Mori mempersiapkan strategik untuk memukul mundur pasukan penyerang jika kelak pecah perang.

Strategik yang dibangun adalah mempersiapkan dua kubu pertahanan. Kubu pertahanan yang pertama adalah di Tompira, karena daerah ini merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman Mori. Panglima perang Kerajaan Mori telah memperkirakan bahwa pasukan musuh akan memasuki kerajaan ini melalui Sungai Tompira, karena jalur ini yang umum digunakan oleh penduduk Bungku untuk melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk Mori di Tompira. Oleh karena itu Tompira harus dipersiapkan sebagai kubu pertahanan pertama untuk membendung serangan musuh. Oleh karena itu di sekitar daerah kubu pertahanan ini dipasang ranjau untuk menjebak musuh, sebagai salah satu metode mengganggu konsentrasi lawan agar dapat menyerang balik musuh mereka.

Menurut perhitungan, apabila musuh berhasil menduduki Tompira, maka langkah selanjutnya adalah menyerang pusat pemerintahan untuk menawan raja. Oleh karena itu, untuk mengelabui musuh agar tidak menyerang pusat pemerintahan kerajaan, dibangun satu kubu pertahanan yang kuat di puncak gunung batu, yaitu benteng Ensaondau, yang termasuk pada wilayah *Kemokolean Wawontuko*.<sup>10</sup> Benteng ini dibangun bagaikan pusat peme-

rintahan kerajaan dengan menempatkan para pemberani bersama keluarga mereka dan dilengkapi dengan persenjataan perang yang dimiliki kerajaan, baik persenjataan tradisional, seperti: pedang, tombak, panah, sumpitan dan keris, juga dengan sejumlah senjata api yang dimiliki, seperti senapan dan meriam putar buatan Inggris. Persenjataan perang ini sebelumnya diperoleh lewat hubungan perdagangan yang dilakukan dengan pedagang Bugis, Arab, dan Cina yang menjalin hubungan niaga langsung dengan Singapura. Juga menyediakan atau mengumpulkan batu-batu gunung yang dapat digulingkan untuk mencegah gerakan musuh naik ke benteng pertahanan itu.

Untuk mencegah musuh kelak agar tidak



Tosaleko Raja Mori X (1840-1870): Raja yang memimpin Perang Mori Pertama, oleh rakyat Wita Mori perang itu dikenang sebagai perang Ensaondou. Hak cipta 2008: Murdan U. Marundu, Jakarta.

<sup>10</sup> Baca: A.K. Tumakaka, "Sekelumit Sejarah Kepahlawanan di Wita Mori, 1899-1907" (Palu: manuskrip, 1979).



menyerang pusat pemerintahan maka kepada para pemberani yang ditempatkan di Tompira diinstruksikan agar dalam kondisi yang terdesak dalam membendung gerak maju musuh, mereka harus berusaha meloloskan diri untuk kemudian menggabungkan diri dengan pemberani di benteng Ensaondau. Hal itu dimaksudkan untuk membangun opini lawan, bahwa benteng pertahanan terpenting dan pusat kedudukan kekuasaan kerajaan ada di benteng itu. Dengan demikian musuh pasti memusatkan serangannya ke benteng pertahanan itu, dan tidak bergiat mencari informasi tentang pusat pemerintahan kerajaan dan daerah kedudukan raja untuk menaklukkannya dan menawan rajanya. Para pemberani yang ditempatkan di benteng itu juga diinstruksikan secara tegas untuk mempertahankan benteng pertahanan itu hingga titik darah yang penghabisan, dengan kata lain tidak ada kata menyerah dalam pertempuran.

Perkiraan akan adanya serangan dari pihak pemerintah kolonial itu benar adanya. Pemerintah kolonial telah memerintahkan kepada Gubernur Maluku, C.F. Goldman, menjadi komandan ekspedisi. Oleh karena itu sejak awal April 1856, dengan menggunakan kapal uap Vesuvius yang dinakodai oleh Lettu Angkatan Laut, O.A. Uhlenbeck, yang dalam ekspedisi itu diangkat menjadi komandan Angkatan Laut, untuk melakukan peninjauan dan pengintaian lokasi. Ikut dalam ekspedisi pengintaian ini Gubernur Maluku, C.F. Goldman. Dalam peninjauan itu digunakan sebuah perahu sungai untuk menelusuri Sungai Tompira, yang bermuara di Teluk Tomori.<sup>11</sup> Dalam perjalanan itu anak buah perahu mengamuk sehingga dua orang pelaut terbunuh, sementara Gubernur Maluku berhasil

selamat dari amukan itu dan kembali ke kapal Vesuvius. Informasi yang berhasil dihimpun dari penyelidikan ini adalah Sungai Tompira bermuara di Teluk Tomori. Sungai itu dapat dilayari sampai ke pedalaman dalam 24 jam untuk mendapatkan tempat pendaratan yang baik, kemudian mengikuti jalan setapak untuk sampai pada satu aliran sungai besar yang lebarnya mencapai 20 langkah (sekitar 12 meter), dan dari sana berjalan selama 5 hari untuk sampai ke ibukota kerajaan di Petasia. Selain itu juga diketahui bahwa sungai ini tidak dapat dilayari dengan kapal Vesuvius dan kapal Celebes yang dipersiapkan untuk ekspedisi ini, karena itu perlu dipersiapkan perahu sungai untuk mengangkut pasukan.

Peristiwa amuk anak buah perahu itu menyebabkan usaha penyelidikan tidak dilanjutkan, dan memberikan kesan bahwa anak buah perahu sungai itu adalah suruhan Kerajaan Mori untuk mengawasi jalur masuk ke Tompira, yang sengaja menawarkan jasa dengan maksud untuk membinasakan. Itulah sebabnya setelah Gubernur Maluku dan regu pendampingnya naik perahu sungai itu dan dibawa menelusuri sungai itu, anak buah perahu mengamuk dan membunuh dua orang pelaut. Untung Goldman berhasil selamat, karena anak buah perahu yang mengamuk berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah kerajaan ini telah siap menghadapi ekspedisi militer pemerintah kolonial, karena itu telah menyebarkan para pemberaninya ke wilayah pesisir untuk mengawasi dan mengintai gerakan lawan dan jika memungkinkan membinasakannya.

Kapal Vesuvius berangkat kembali ke Ambon, dan didapatinya kapal Celebes yang

<sup>11</sup> L.H.W.M. De Stuers, *op.cit.*, hal. 526. Kisah dan fakta tentang ekspedisi ini dirujuk pada laporan dari

De Stuers yang dimuat dalam majalah *Militaire Spektator* ini.

mengangkut pasukan bantuan dari Batavia telah berlabuh di pelabuhan Amboina. Kapal Celebes berangkat dari Batavia sejak awal April melalui Semarang dan tiba di Makassar pada 10 April 1856. Pada tanggal 11 April meneruskan perjalanan ke Ambon dan tiba pada tanggal 18 April. Kapal ini mengangkut 34 orang tentara Belanda dari Batavia yang dipersenjatai dengan *walbussen* (sejenis senapan), dan 180 anggota pasukan infantri, yang dilengkapi dengan dua satuan mortir kaliber 13 dm serta perlengkapannya. Yang ditunjuk menjadi komandan pasukan Angkatan Darat ini adalah Mayor E.C.F. Happe. Pasukan ini diperkuat dengan tambahan 40 tentara dari garnisun Ambon dan Ternate, belum termasuk pasukan Angkatan Laut yang bertugas di kapal Vesuvius dan Celebes ditambah bantuan pasukan dari Residen Ternate, Kerajaan Bungku dan Kerajaan Banggai.

Kapal Celebes dan kapal Vesuvius berangkat meninggalkan Ambon menuju Ternate, secara berurutan pada tanggal 21 dan 22 April, dan tiba bersamaan pada tanggal 25 April 1856. Residen Ternate melengkapi pasukan ekspedisi dengan pasukan non reguler dari orang Alifuru sebanyak 700 orang. Orang Alifuru dikenal sebagai kelompok liar yang suka mengayau, merampok, dan membakar perkampungan yang diserang. Oleh karena itu sebelum melibatkan mereka ke dalam pasukan ekspedisi, Mayor Happe memohon mereka untuk bersumpah tidak akan memenggal kepala musuh, tidak akan merampok, dan membumi-hanguskan perkampungan bila tanpa perintah

komandan pasukan ekspedisi. Perintah itu diterima dan mereka bersumpah untuk taat pada perintah komandan yang memimpin mereka.

Pada tanggal 27 April 1856, pasukan ekspedisi berangkat meninggalkan Ternate dengan menggunakan kapal api Vesuvius dan Celebes, disertai 14 perahu *korakora* yang memuat pasukan bantuan orang Alifuru. Dalam pelayaran ini, kapal api Vesuvius menarik 8 perahu *korakora* dan kapal api Celebes menarik 6 perahu *korakora*. Dalam pelayarannya menuju Teluk Tomori, iringan armada ekspedisi ini diterjang oleh gelombang dan badai yang mengganas sehingga tidak dapat meneruskan pelayaran, dan harus kembali ke Ternate. Banyak kerugian yang diderita, baik kehilangan sejumlah besar pasukan bantuan yang diangkut dengan perahu *korakora*, maupun kerusakan sarana angkutan armada ekspedisi. Kapal Celebes mengalami kerusakan parah pada bagian buritan dan kemudinya patah sementara kapal Vesuvius bocor pada bagian alas kapal. Oleh karena itu perlu perbaikan serius sebelum meneruskan rencana penyerbuan.

Usaha perbaikan sarana angkutan laut itu rampung pada 10 Mei 1856, dengan berlabuh kembali kapal Vesuvius. Dalam rangka mempersiapkan pemberangkatan pasukan ekspedisi, tiba sebuah kapal dagang, Soen Dulgair di pelabuhan Ternate. Kesempatan itu digunakan untuk menyewa kapal dagang itu untuk kepentingan operasi militer. Setelah segala sesuatu dipersiapkan, berangkatlah pasukan ekspedisi itu pada tanggal 20 Mei 1856 menuju Teluk Tomori, dengan kekuatan:<sup>12</sup> 12 orang

---

<sup>12</sup> Para perwira yang ikut dalam ekspedisi itu, adalah: Lettu A.L., O.A. Uhlenbeck, komandan pasukan marinir yang menjabat juga nahkoda kapal Vesuvius, Lettu A.L., J.E. De Man, nahkoda kapal Celebes, Lettu A.L. H.P. van Boneval Faure, Mayor E.C. Happe, Komandan Angkatan Darat, Letda Jhr. L.H.W.M. De Stuers, ajudan Komandan Angkatan Darat, Lettu

F.C.J. van Dentsch, ajudan Komandan Angkatan Darat, Kapten P.G.A. Anemaet, Komandan kompi V dari Batalyon XII, Kapten H.W. van Oijen, Lettu J.G. van Tiel (kemudian menjadi pengganti Kapten Anemaet), Lettu O.H. Musch, Letda J.B. De Graaff, Letda P.F.C.G. Heddrich, Lettu Artileri J.P.W.A. Janssen, Lettu Jurubayar L. Meyers, dan Perwira

perwira, 225 bintara dan bawahan, 371 orang Alifuru, dan 20 orang pesuruh perwira termasuk seorang pangeran dari Ternate (total 630 orang). Dalam perjalanan ini mereka singgah di Banggai, karena raja Kerajaan Banggai telah menjanjikan pasukan bantuan. Setiba disana diinformasikan bahwa telah dikirim 300 orang pasukan bantuan ke Pulau Bunga Timbul, dan masih tertinggal disini sejumlah 300 orang yang diperbantukan sebagai tenaga kuli. Selain itu juga diinformasikan menyangkut kapal Blora yang mengangkut perbekalan pasukan ekspedisi yang karam di perairan Bungku pada 29 April 1856, dan hanya dua pertiga dari muatannya berhasil diselamatkan dan telah dibawa ke Teluk Tomori.

Armada ekspedisi Mori itu kemudian melanjutkan pelayaran ke Teluk Tomori dan tiba di Pulau Bunga Timbul pada 30 Mei 1856. Ditempat itu dijumpai satu kelompok pasukan bantuan dari Ternate berkekuatan sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang Pangeran yang telah berada di pulau itu sejak bulan April. Raja Bungku bersama pasukannya juga sejak bulan April telah berada di pulau itu, namun karena kehabisan perbekalan memaksanya untuk sementara kembali ke Bungku. Hal itu mendorong komandan pasukan ekspedisi mengirim perintah kepada Raja Bungku agar segera datang dengan pasukan bantuannya dengan menggunakan perahu yang kelak akan digunakan untuk melayari sungai hingga ke daerah hulu. Sementara itu kapal uap Celebes dikirim kembali ke Banggai untuk mengangkut 300 orang tenaga kuli yang telah dipersiapkan oleh Raja Banggai. Pada tanggal 11 Juni, Raja Banggai mengirimkan lagi pasukan bantuan sebanyak 200 orang Peling dan pada 14 Juni, Raja Bungku juga tiba dengan pasukannya yang berjumlah 1160 orang Bungku dan 100

orang Peling (total 1260 orang). Dengan demikian jumlah pasukan yang disiapkan untuk menyerang Kerajaan Mori berjumlah 2690 orang (belum termasuk personil Angkatan Laut yang berada di kapal Vesuvius dan Celebes) yang dibantu dengan tenaga kuli sebanyak 300 orang, suatu jumlah yang sangat besar untuk satu ekspedisi militer dan bertindak sebagai panglima ekspedisi militer itu ialah Gubernur Maluku C. F. Goldman.

Pulau Bunga Timbul yang kecil itu panjangnya hanya sekitar 120 langkah (72 meter) dengan lebar yang sama (sekitar 5.184 meter persegi) sehingga tidak dapat menampung seluruh personil ekspedisi militer. Oleh karena itu sebagian anggota tetap tinggal di atas kapal dan perahu, sambil menanti waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Pulau yang dipoles dengan bangunan untuk personil militer itu tampak menjadi desa terpadat di dunia, dan oleh mereka pulau kecil itu diberi nama baru sesuai dengan nama kapal Angkatan Laut yang menghantar ekspedisi itu, yaitu Vesuvius, sebagai bukti bahwa pulau itu pernah menjadi pusat konsentrasi pasukan ekspedisi militer ke Mori tahun 1856.

### **Jalannya Perang Mori Pertama**

Setelah armada ekspedisi Mori tiba di Pulau Bunga Timbul, Komandan ekspedisi, C. F. Goldman dan komandan Angkatan Darat, Happe, mengambil keputusan untuk segera melancarkan serbuan. Oleh karena itu, sambil menunggu datangnya pasukan bantuan dari kerajaan Bungku, diinstruksikan kepada Letda Jhr. L.H.W.M. De Stuers, wakil komandan Angkatan Darat dan dibantu oleh Lettu Soleiman (orang Ternate) untuk memimpin 250 orang Alifuru yang dipersenjatai melakukan pengintaian hingga ke Tompira pada

---

kesehatan Klas II, J.G. Tijthof.

tanggal 5 Juni 1856. Dalam operasi pengintaian menyusuri sungai itu, pasukan ini mendapat serangan tembakan senapan dari para pengintai Mori secara gerilya dan kemudian melarikan diri ke hutan-hutan. Meskipun demikian usaha pengintaian itu berhasil sampai ke lokasi pasar, Tompira, dimana terdapat sebuah barak yang ketika itu selalu digunakan pada hari pasar. Setibanya di lokasi itu, dengan segera pasukan orang Alifuru didaratkan. De Stuers kemudian menugaskan kepada Lettu Soleiman untuk memimpin pasukan untuk menduduki barak itu sambil mempersiapkan lahan bagi pembuatan kampemen militer.

Pasukan pengintai yang telah memasuki Tompira tidak mendapat serangan yang berarti dari pasukan pemberani Mori. Hal itu disebabkan karena *bonto* telah merubah strategik dengan memerintahkan penarikan pasukan dari Tompira untuk memperkuat benteng pertahanan Ensaondau, dan hanya beberapa pemberani yang diperintahkan tetap siaga di Morokopa, dengan instruksi, apabila musuh telah memasuki daerah itu mereka harus bergerak mundur ke arah benteng pertahanan agar dapat menarik perhatian pihak musuh untuk menyerang benteng itu, dengan demikian musuh tidak melakukan serangan ke pusat pemerintahan di Petasia. Oleh karena itu ketika musuh memasuki Tompira, mereka tidak melakukan pertempuran untuk mempertahankan daerah itu kecuali melepaskan tembakan secara gerilya seraya menghindar ke hutan-hutan. Tindakan itu mungkin hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada musuh bahwa pasukan pertahanan kerajaan ini juga telah memperkuat diri dengan persenjataan perang yang modern sesuai dengan kondisi pada saat itu dan siap untuk bertempur dengan musuh yang memasuki wilayah kekuasaannya. Selain

itu juga mungkin mereka menghindari pertempuran yang tidak seimbang mengingat informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa pasukan musuh sangat banyak dan lagi dilengkapi dengan persenjataan modern.

Benteng Ensaondau (terletak di sebelah timur laut desa Tinompo saat ini) merupakan satu tumpukan alamiah dari batu karang yang besar, menajam ke atas. Menurut perkiraan ketinggiannya mencapai 1100 kaki atau sekitar 330 meter dari permukaan datar. Menurut De Stuers, wakil komandan Angkatan Darat ekspedisi ini, benteng pertahanan itu bagaikan sebuah sarang burung rajawali yang tertancap di atas batu karang.<sup>13</sup> Pada puncak gunung karang itu terlihat rumah-rumah yang dibangun bertiangkan bambu. Di bagian depan tampak tebing yang terjal, sementara bagian belakang mencuat ke depan. Pada sisi kiri merupakan tempat untuk menaiki puncak benteng itu dimana terdapat tangga yang terbuat dari batang pohon pinang yang telah diberi tempat untuk berpijak, dan disandarkan pada ujung-ujung batu karang. Kondisi benteng pertahanan alamiah ini dipandang akan sulit dimasuki oleh lawan pada satu sisi dan menguntungkan pasukan pertahanan untuk melumpuhkan musuh dengan senjata-senjata yang telah dipersiapkan pada sisi yang lain.

Setelah pasukan Alifuru menduduki Tompira, Letnan De Stuers kembali ke markas ekspedisi untuk melaporkan hasil pengintaian-nya. Selain melaporkan kejadian-kejadian yang dialami selama melakukan pengintaian, ia juga menjelaskan bahwa Sungai Tompira termasuk sungai yang dalam namun sempit, dan disana-sini terdapat tikungan yang tajam sehingga berkesimpulan tidak dapat menggunakan kapal uap Celebes untuk melayarinya hingga ke Tompira. Sungai ini hanya dapat dilayari

---

<sup>13</sup> [L.H.W.M. De Stuers, op. cit., hal. 534.](#)

dengan menggunakan *korakora* atau perahu dengan lama perjalanan sekitar 24 jam.

Berdasarkan informasi itu, atas persetujuan komandan ekspedisi, Mayor Happe, kemudian memerintahkan Kapten H.W van Oijen yang didampingi oleh Lettu F. C. J van Dentsch dan Lettu Henner untuk memimpin pasukan kawal dari Batalion Garnisun Maluku sebanyak 50 orang tentara dan sejumlah besar pasukan bantuan orang Arifuru untuk berangkat ke tempat tujuan pada pagi hari tanggal 9 Juni. Pasukan ini mendapat tugas penting untuk mengamankan Tompira, membangun rumah-rumah untuk perwira, gudang-gudang mesiu dan logistik, rumah sakit, barak pasukan, jamban dan keperluan lainnya. Pasukan ini tiba di Tompira pada tanggal 10 Juni. Ketika tiba,

komandan pasukan memperhatikan kondisi medan, membuat sketsa bangunan, dan kemudian memerintahkan untuk memulai pekerjaan. Semua pekerjaan yang diembankan untuk membangun kubu pertahanan berhasil disiapkan dalam tempo 9 (sembilan) hari kerja lamanya, walaupun hujan terus-menerus mengguyur bumi Mori.

Beberapa hari setelah pengiriman pasukan untuk menyiapkan kubu militer di Tompira, pada tanggal 15 Juni, komandan ekspedisi memerintahkan kepada semua pasukan yang masih berada di markas membenahi barang-barang logistik, mesiu dan persenjataan perang agar dimuat pada perahu-perahu yang tersedia dan sisanya dimuatkan kembali ke kapal Soen Bulgair. Pada tanggal 18 Juni semua kebutuhan



Perahu Kora-kora: Jenis perahu inilah yang digunakan untuk mengangkut pasukan ekspedisi Belanda menyerang Kerajaan Mori (1856). Kora-kora adalah jenis perahu bersayap yang terbuat dari besi dengan panjang 50 yard dan didayung oleh 100 orang.

perang dan sisa pasukan yang berada di Pulau Bunga Timbul diperintahkan berangkat ke Tompira. Iring-iringan perahu yang melayari Sungai Tompira itu terlihat bagaikan iringan semut yang beriring-iringan menuju ke sarangnya. Pengerahan pasukan militer ini diharapkan: (1) dapat menimbulkan ketakutan psikologis dari para pemberani Mori yang ditempatkan untuk menghadang pasukan militer Belanda, sehingga lari meninggalkan lokasi penghadangan; (2) Iringan perahu pengangkut personil yang banyak itu juga diharapkan menimbulkan kesan bagi para pengintai bahwa komandan ekspedisi telah dikawal untuk memasuki Tompira, sehingga para pemberani meninggalkan lokasi pengintaian dan melaporkan kejadian itu pada pimpinan pasukan dan *mokolnya*. Dengan demikian tidak akan ada lagi pemberani yang siap melakukan penghadangan di pos-pos pengintaian.

Sehari setelah pemberangkatan pasukan, pada tanggal 19 Juni, komandan ekspedisi dan para komandan lapangan berangkat dengan menggunakan perahu *korakora* menuju kubu pertahanan yang telah dipersiapkan. Pelayaran rombongan para komando itu tidak mendapat gangguan sedikitpun atau berupa tembakan pasukan pengintai Mori. Hal itu disebabkan karena semua pemberani yang melakukan pengintaian telah meninggalkan pos-pos pengintaian mereka. Keputusan meninggalkan pos pengintaian itu mungkin berkaitan erat dengan kenyataan bahwa rombongan pasukan yang melintasi sungai itu telah mengantar komandan ekspedisi ke konsentrasi pasukan di Tompira, dan atau karena Tompira telah diduduki oleh pasukan ekspedisi sehingga tidak memungkinkan mereka melakukan pengintaian lagi. Iringan perahu yang mengangkut komandan ekspedisi dan staf komando itu tiba di tempat tujuan pada 20 Juni 1856. Kehadiran mereka disambut oleh pasukan pengawal dan langsung

diantar ke lapangan upacara yang telah dipersiapkan. Upacara penyambutan itu dimaksudkan, selain untuk melaporkan kepada komandan ekspedisi persiapan yang telah dilakukan oleh pasukan-pasukan yang terdahulu dikirim ke lokasi, juga upacara pengibaran bendera Belanda sebagai simbol untuk menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang telah dikuasai dan menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah pengibaran bendera selesai, diputuskan untuk melancarkan serangan ke kubu pertahanan Kerajaan Mori di Ensaondau pada keesokan harinya. Tugas itu diembankan kepada Kapten Van Oijen yang dibantu oleh Lettu van Dentsch. Detasemen yang ditugaskan itu terdiri dari pasukan Batalion Garnisun Amboina yang dikomandani oleh Lettu Hanne, 50 orang tentara dari Kompi 5, Batalyon XII dibawah komandan Lettu Van Thiel, dan 250 orang Arifuru yang dipersenjatai dengan senapan dengan masing-masing 20 butir peluru. Pada pukul 06.00 pagi, di tengah derasnya hujan, detasemen ini diberangkatkan menuju benteng pertahanan Mori dan baru tiba pada pukul 17.00 keesokan harinya. Keterlambatan pasukan ini tiba di dekat areal benteng pertahanan itu disebabkan oleh hambatan yang dibuat oleh laskar Mori untuk menjebak pasukan musuh. Di seluruh areal menuju ke benteng itu telah dipasang ranjau, sehingga pasukan baru dapat melangkah setelah orang-orang Arifuru mencabut ranjaunya. Perjalanan dan pekerjaan yang sangat melelahkan itu berlangsung dalam gemuruh guntur dan petir disertai derasnya hujan sehingga tidak sedikit pasukan orang Arifuru yang menjadi korban terkena ranjau dan harus ditarik kembali ke kubu pertahanan di garis belakang.

Setelah detasemen ini tiba, komandan pasukan memerintahkan seorang jurubicara untuk naik ke benteng pertahanan dan me-



nyampaikan pesan kepada pimpinan pasukan pemberani agar pasukan yang mempertahankan benteng bersedia menyerah dan menyatakan tunduk dan patuh kepada pemerintah Hindia Belanda. Sangaji yang menjadi pemimpin pasukan di benteng itu dengan tegas menyatakan bahwa "pasukanku siap berperang atas perintah dari *mokole* hingga pada pemberani yang terakhir, karena kalian telah lancang memasuki wilayah teritorial kami. Jika tidak ingin tinggalkan Tompira, marilah kita berperang". Sikap tegas pemimpin pasukan benteng pertahanan itu menunjukkan bahwa ia tidak bersedia memenuhi tawaran itu, meskipun diketahuinya bahwa pasukan ekspedisi Belanda itu diperlengkapi persenjataan yang modern dan jauh lebih banyak dari jumlah pasukan yang dipimpinya. Sikap keberanian yang luar biasa itu terus bergema dalam pikiran jurubicara penghubung itu, sehingga ketika kembali menghadap komandan ekspedisi ia menyatakan bahwa "pasukan kita ditantang untuk berperang dan bahwa orang-orang Mori telah mendapat perintah dari *mokole* untuk berjuang hingga pemberani yang paling akhir" (*onze troepen tot het gevecht werden uitgenoodigd, en dat de Tomoriers last van den Makele* (pen. *Mokole*) *hadden, zich tot den laatsten man te verdedigen*).<sup>14</sup>

Keputusan untuk bertempur telah dinyatakan oleh Sangaji, komandan pasukan perang Benteng Ensaondau, kepada utusan dari ekspedisi militer Belanda untuk menunjukkan bahwa Kerajaan Mori telah siap untuk berperang. Setelah jurubicara penghubung itu meninggalkan benteng, Sangaji langsung memerintahkan membunyikan genderang perang yang diikuti dengan bertalu-talu gema bunyi gong yang meriah. Pasukan pemberani yang berjumlah 60 orang segera bersiaga untuk

berperang dengan memukul genderang perang yang dimaksudkan untuk mengisyaratkan kepada pasukan perang yang dipersiapkan di Wawontuko agar bersiap melancarkan serangan terhadap pasukan musuh yang akan mengepung benteng pertahanan itu dari belakang.

Menurut perkiraan, setelah menyatakan perang dan membunyikan genderang perang, pasukan ekspedisi Belanda akan memulai gerakan penyerangan terhadap kedudukan pasukan perang di benteng pertahanan itu, dengan demikian serangan balik pasukan pemberani dari belakang akan dapat memporakporandakan pertahanan pasukan musuh, karena mendapat serangan dari pasukan yang berada di benteng dan pasukan yang menyerang dari arah belakang. Apa yang diperkirakan itu ternyata tidak terjadi. Hal itu disebabkan karena pasukan pembantu orang Arifuru begitu ketakutan dan ciut nyalinya sehingga mereka menolak melaksanakan perintah untuk menaiki tebing itu untuk menyerang pertahanan lawan, meskipun diancam dengan mengarahkan laras pistol ke dada mereka. Oleh karena itu rencana penyerangan dibatalkan dan diperintahkan agar semua pasukan tetap siaga di pos masing-masing. Komandan detasemen selanjutnya mengirim kurir ke Tompira untuk memohon agar segera dikirim kesatuan mortir guna melancarkan bombardemen ke pertahanan lawan.

Dalam kesiagaan itu, pasukan ekspedisi Belanda diserang dari belakang oleh pasukan pemberani Mori pada tanggal 22 Juni. Para penyerang itu menggunakan senjata panah dan sumpitan beracun dengan sesekali terdengar letupan senapan. Serangan itu dibalas dengan gencar oleh pasukan yang dipimpin oleh Lettu Henner yang bersiaga di pos sebelah kanan benteng sehingga memaksa pasukan penyerang mengundurkan diri ke hutan-hutan dengan

<sup>14</sup> [Ibid. hal. 537.](#)

meninggalkan dua orang anggotanya yang meninggal terkena tembakan. Serangan itu mendorong komandan detasemen memerintahkan agar semua pasukan lebih siaga dan mengintai ke segala arah. Hal itu dilakukan mengingat sifat orang Mori adalah penggemar perang, dengan kebiasaan melakukan penyerangan secara gerilya, setelah menyerang melarikan diri untuk kemudian menyerang lagi.

Dalam kondisi yang sangat mencekam itu, pasukan artileri dibawah komando Lettu J. P. W. A. Jansen tiba pada pukul 22.00 malam. Di bawah sinar bulan purnama malam itu, dicarikan lokasi untuk kubu pasukan artileri, tepat pada sebuah bukit di depan benteng, namun pasukan artileri ini tidak dapat segera melancarkan serangan pada malam itu karena cuaca tiba-tiba tidak bersahabat, berkabut disertai turunnya hujan deras yang terus mengguyur bumi Mori sepanjang malam. Pada pukul 06.30 pagi hujan berhenti dan udara menjadi cerah kembali sehingga kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melancarkan tembakan mortir ke arah kubu pertahanan lawan. Dari 26 kali tembakan mortir itu, hanya 3 tembakan yang tidak jatuh pada atap rumah-rumah yang berada di puncak benteng pertahanan itu, namun demikian tidak tampak adanya reaksi akibat bombardemen tersebut sehingga penembakan mortir dihentikan. Menurut perkiraan, penduduk telah mengosongkan rumah-rumah itu dan bersembunyi di gua-gua.

Perintah selanjutnya adalah melancarkan serangan frontal atas kubu pertahanan Ensao-ndau yang berada pada bagian bawah, dengan ketinggian sekitar 300 kaki (sekitar 90 meter). Penyerangan dimulai pada pukul 09.30 pagi dari dua sisi. Lettu Van Thiel memimpin pasukan infantri yang dibantu oleh 80 orang Arifuru melancarkan serangan dari sisi kiri dan Lettu Henner yang dibantu oleh Letda De

Graaff memimpin pasukan dari garnisun Amboina menyerang dari sisi kanan. Gerak maju dilaksanakan dengan menaiki tebing untuk sampai ke kubu pertahanan pasukan Mori.

Setelah mengatur penyerangan itu, komandan detasemen pergi ke perkemahan Gubernur Maluku untuk melaporkan situasi medan pertempuran. Pertempuran seru yang tengah berkobar itu mendorong pasukan reguler yang mendampingi panglima ekspedisi itu menyatakan diri siap masuk ke medan laga. Oleh karena itu Mayor Happe memutuskan Lettu Musch yang memimpin pasukan orang Eropa membantu penyerangan dari sisi kiri dan Lettu De Stuers yang memimpin satu peleton orang Jawa membantu penyerangan dari sisi kanan. Pengerahan pasukan yang besar itu menyebabkan pasukan Mori yang berada di kubu pertahanan sangat sulit untuk memukul mundur pasukan Belanda yang bergerak menaiki tebing, karena setiap tangan yang keluar untuk melepaskan panah atau menggulirkan batu ke arah gerak maju pasukan musuh atau kepala yang muncul untuk melepaskan sumpit ditembak secara beruntun oleh pasukan bantuan.

Pengepungan yang ketat itu menyebabkan pasukan pertahanan pada kubu di bagian bawah tidak dapat berbuat banyak untuk mematahkan serangan pasukan Belanda. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengosongkan kubu pertahanan bawah dan berusaha bergabung dengan pasukan pertahanan pada kubu bagian atas. Tindakan ini melapangkan pasukan penyerang yang berada dibawah pimpinan Lettu Musch dengan cepat merangsek masuk dan merebut kubu pertahanan bagian bawah. Untuk memperkuat kedudukan pada kubu pertahanan yang telah direbut itu, Mayor Happe memerintahkan kepada Lettu Van Thiel dengan pasukan sebanyak 100 orang agar membantu pasukan yang telah menduduki kubu itu dan selanjutnya membantu mengembangkan penyerangan lebih



lanjut.

Dalam pertempuran awal ini tercatat korban dari pihak pasukan pertahanan Mori sebanyak 4 orang meninggal dan 6 orang luka-luka terkena pecahan granat. Sementara di pihak pasukan Belanda tercatat 1 orang meninggal, 2 orang luka berat, dan banyak sekali yang mengalami luka ringan karena terkena batu, panah, sumpitan beracun atau ranjau yang dipasang pada sepanjang sisi tebing. Mereka yang terkena panah-panah beracun yang mematikan dari pasukan Mori dengan segera diobati oleh orang-orang Alifuru yang memiliki keahlian untuk menangkal racun dengan ramuan dari kulit kayu atau akar kayu yang ada di sekitar medan pertempuran itu. Keahlian orang Arifuru ini telah menyelamatkan banyak jiwa anggota pasukan Belanda yang terkena panah beracun.

Lettu Musch dan Lettu Van Thiel yang berada di kubu yang direbut itu kembali bergiat mempelajari medan untuk dapat melanjutkan penyerangan ke kubu pertahanan yang berada di puncak Ensaondau. Setelah mempelajari dan mencermati secara saksama, mereka berkesimpulan bahwa penyerangan ke kubu itu akan sia-sia saja, karena medannya sangat berbahaya. Jika pasukan pertahanan Mori melepaskan tiang-tiang penyangga batu-batu besar yang berada di atas, maka akan berakibat fatal bagi gerak maju pasukan dan pasukan pengawal yang bertahan di kubu yang telah direbut. Oleh karena itu rencana penyerangan ke kubu pertahanan lawan yang berada di puncak Ensaondau ditunda.

Berdasarkan informasi ini, Mayor Happe memerintahkan agar kubu pertahanan yang telah direbut itu dibumihanguskan dan semua pasukan boleh kembali ke posnya masing-

masing. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa semua pasukan tampak telah sangat lelah dan ketika itu waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Oleh karena itu tindakan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah memperketat garis pengepungan agar tidak seorompokun yang dapat turun atau naik ke benteng itu. Selain itu melakukan serangan mortir secara terus menerus untuk memporakporandakan kubu pertahanan bagian atas agar dapat memaksa pasukan pertahanan Mori untuk menyerah.

Ketika pasukan sedang bergegas kembali sementara kesatuan artileri mempersiapkan kembali serangan mortir, tiba-tiba terlihat dipuncak benteng Ensaondau berkibar bendera putih. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan, sekarang tampak ramai dan dipenuhi orang. Panglima ekspedisi, Goldman, dengan segera mengirim seorang jurubicara dengan perintah agar *bonto* atau *karua* yang memimpin pasukan pertahanan Mori segera menghadap ke bivaknya dengan membawa tanda-tanda takluk.<sup>15</sup> Jurubicara itu dikawal oleh Lettu Henner yang naik ke benteng melalui sisi kiri untuk melindungi kurir yang dikirim itu, Mayor Happe memerintahkan sebagian pasukan yang masih bersiaga untuk mengawal dan mengambil tindakan pengamanan, dibawah pimpinan Lettu Musch, yang sekaligus membawa bendera Belanda ke atas melalui sisi kiri. Menjelang malam, bendera Belanda tiga warna telah berkibar di puncak Benteng Ensaondau.

Hampir bersamaan dengan berkibarnya bendera Belanda di benteng itu, datang 6 orang pemberani Mori dengan membawa tanda-tanda takluk berupa: seekor ayam putih, sebutir telur, dan sehelai daun siri. Oleh karena kehadiran

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 541. Tanda takluk yang dibawa adalah tanda takluk yang sebelumnya dibawa oleh 6 orang

utusan yang pertama, yaitu: seekor ayam putih, sebutir telur, dan sehelai daun siri.

utusan itu tidak bersama dengan kepala perang mereka, maka panglima ekspedisi memerintahkan kepada mereka untuk kembali dengan pesan agar komandan Benteng Ensaondau sebagai hulubalang perang mereka segera datang menghadap kepada panglima ekspedisi. Sekitar pukul 19.00 malam, tiba Sangaji, komandan pasukan perang, bersama orang pemberani tanpa bersenjata, dengan membawa tanda takluk. Menurut De Stuers, kepala perang itu, Sangaji, adalah seorang yang telah lanjut usia, dengan raut wajah yang keras dengan lirikan mata yang tajam. Ia menyatakan menyerah dengan seluruh rakyatnya dan tidak bersedia tinggal lagi di Kerajaan Mori. Keputusan itu diambil karena para pemberani dan rakyat di benteng itu sangat takut dengan ledakan mortir. Selain itu serangan mereka dengan menggunakan panah, sumpitan, senapan, dan menggelindingkan batu itu ternyata tidak berhasil membuyarkan semangat menyerang dari pasukan Belanda. Tambahan pula mereka menyaksikan bagaimana pasukan pembantu yang dikirim oleh raja tidak berdaya menyerang pasukan Belanda yang mengepung benteng itu apa lagi menerobosnya untuk memberi bantuan. Juga jumlah pasukan pertahanan yang mempertahankan benteng hanya 60 orang, jumlah mana jauh lebih sedikit dari jumlah pasukan penyerang, sehingga mereka tidak cukup kuat untuk melanjutkan perlawanan. Setelah menyatakan alasan mengapa ia menyerah, Sangaji juga memohon agar dapat diizinkan keluar dari kerajaan ini karena takut akan tindakan pembalasan dari rajanya. Raja Mori telah memerintahkan sebelumnya kepadanya untuk berperang hingga pemberani yang terakhir, namun ia telah melanggarnya dengan menyatakan menyerah.

Panglima ekspedisi menerima dengan baik keinginan kepala perang itu sehingga tidak menyuruhnya pulang tetapi mengizinkan dia

menginap di salah satu bivak yang tersedia. Untuk mencegah kemungkinan pernyataan itu suatu tipu muslihat, maka penjagaan di bivak panglima ekspedisi diperketat. Tugas penjagaan itu dilaksanakan oleh Letda Hedderick. Selain itu juga, untuk mencegah terjadinya tindakan pembunuhan dan perampokan harta benda yang dilakukan oleh orang Arifuru, karena sudah merupakan suatu kebiasaan bagi orang Arifuru untuk melakukan hal-hal itu, maka ditugaskan kepada Lettu Henner agar memerintahkan semua pasukan orang Arifuru meninggalkan benteng Ensaondau dan kembali ke Tompira. Selain itu ditugaskan pula untuk mengatur pasukan untuk menjaga bendera Belanda yang telah dikibarkan di puncak benteng itu.

Tugas itu diembankan kepada sersan Ernst bersama 4 orang anggotanya. Dalam melaksanakan tugas ini, ia dibantu 50 orang pemberani Mori yang telah menyatakan diri menyerah kepada pasukan ekspedisi Belanda yang masih berada di benteng itu.

Semua penduduk yang berada di benteng itu berjumlah seluruhnya 171 orang, laki-laki, perempuan dan anak-anak sudah termasuk 60 orang pasukan pemberani Mori. Untuk memudahkan pengawasan keberadaan mereka, semua penduduk sipil dikumpulkan dalam dua rumah besar yang berdekatan yang berada di benteng itu, sementara para pemberaninya berkumpul bersama pasukan penjaga bendera.

Pada dini hari, tanggal 25 Juni, para penjaga bendera Belanda dikejutkan dengan suara jeritan dari dua rumah besar tempat penampungan warga di benteng itu. Segera sersan Ernst memerintahkan dua anggotanya untuk mengamati apa yang terjadi pada salah satu rumah itu, sementara ia dan dua anggota lain pada rumah yang lain. Terlihat seorang pemberani Mori mengamuk dengan kelewangnya menebas penghuni rumah itu, baik perempuan,

laki-laki, dan anak-anak, hal yang sama juga pada rumah yang lain. Dengan segera Sersan Ernst memerintahkan menembak pelaku amuk itu sehingga tewas terkena timah panas. Pelaku amuk itu telah menewaskan 21 orang yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan bayi dan 19 orang lainnya luka parah (terpotong bagian anggota tubuhnya).

Kejadian itu dengan segera dilaporkan kepada panglima ekspedisi, yang kemudian merespon laporan itu dengan mengirim perwira kesehatan, J.G. Tijthoff, bersama stafnya untuk memberikan bantuan perawatan medis. Selain itu juga diperintahkan kepada Lettu Musch dan pasukannya untuk menduduki perkampungan dan memberikan perlindungan ke-amanan dan menjaga harta milik penduduk dari tindakan perampasan dan perampokan dari pasukan bantuan orang-orang Arifuru.

Panglima ekspedisi menyampaikan kepada Sangaji kejadian yang terjadi pada dini hari itu. Ia tampaknya tidak terkejut mendengar berita itu, dan memohon izin untuk pergi ke benteng untuk melihat keadaan rakyatnya. Panglima ekspedisi mengizinkan dengan syarat 6 orang pengiringnya tetap tinggal di bivak. Disampaikan juga kepadanya agar dapat mengangkut seluruh rakyatnya turun dari benteng itu dan tinggal di bivak-bivak yang ada. Ia dengan senang hati menerima tawaran itu, dan bermohon sekali lagi agar ia dan rakyatnya dibawa keluar dari wilayah Kerajaan Mori. Atas penerimaan baik tawaran Panglima Ekspedisi itu, maka pada hari itu juga diperintahkan agar mengosongkan benteng itu. Oleh karena itu setelah ia tiba di benteng itu, Sangaji memerintahkan kepada penduduknya segera turun dan mengosongkan benteng itu.

Setelah itu dimintakan keterangan dari Sangaji tentang kejadian itu. Ia menyatakan bahwa Raja Mori mengirim 60 orang pemberani dari Ngusumbatu, diantara pemberani

itu ada dua orang utusan khusus raja. Utusan itu mendapat perintah khusus untuk mendorong para pemberani agar berperang hingga pemberani terakhir, atau dengan kata lain berperang mati-matian dengan tidak mengenal kata "menyerah". Raja berjanji akan mengerahkan pasukan bantuan. Apabila pasukan yang berada di benteng itu tidak melaksanakan perintah dengan tegas, maka dua utusan khusus itu harus menuntut dendam raja terhadap penduduk benteng itu, dengan kata lain jika pasukan pertahanan benteng itu menyerah maka utusan khusus akan bertindak membunuh penduduk dalam benteng itu. Tindakan amuk yang dilakukan dua orang utusan khusus itu merupakan realisasi dari perintah yang diembankan kepada mereka.

Setelah menjelaskan latar kejadian itu, ia juga memberikan informasi bahwa di kerajaan ini terdapat 71 pusat hunian penduduk (kampung). Satu-satunya benteng pertahanan terkuat di kerajaan ini adalah Benteng Ensaondau. Oleh karena itu dengan direbutnya benteng ini, maka raja pasti mengundurkan diri ke kampung-kampung agar mengundang perhatian lawan untuk mengejarnya hingga ke perkampungan di daerah pedalaman. Daerah ini hanya memiliki jalan setapak dan juga terdapat sejumlah sungai yang lebar sehingga sulit diseberangi. Para penguasa kerajaan ini sangat tegas dan tidak mau mengenal kata menyerah dalam perang dan sangat sulit diajak untuk berdamai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh itu, panglima ekspedisi dan komandan pasukan Angkatan Darat berunding untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut. Dalam perundingan itu dipikirkan pula kondisi kesiagaan pasukan dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Hujan yang turun setiap hari mengakibatkan dua pertiga kuli pengangkut bahan logistik dan peralatan perang jatuh sakit.

Oleh karena itu diputuskan agar tindakan selanjutnya adalah berusaha agar para penguasa kerajaan itu bersedia datang ke bivak untuk menghadap kepada panglima ekspedisi, tanpa menimbulkan reaksi permusuhan. Sehubungan dengan keputusan itu, maka tidak dikerahkan pasukan militer Belanda untuk melancarkan serangan ke pusat-pusat pertahanan dan pemerintahan, tetapi mengirim satu pasukan bumiputera dari orang Arifuru dibawah pimpinan Letnan Soleiman, dan didampingi oleh seorang jurubicara dari Kerajaan Bungku, dengan perintah mengundang kepala suku daerah yang didatangi untuk menghadap kepada panglima ekspedisi di Ensaondau.

Pasukan Soleiman berangkat ke Ngusumbatu pada tanggal 27 Juni. Ketika mendekati perkampungan itu, pasukan pertahanan dan penduduk melarikan diri ke Wawontuko setelah memutuskan terlebih dahulu jembatan gantung di Patangoa. Oleh karena mereka tidak menjangkau seorangpun maka perkampungan Patangoa itu dibakar. Setelah itu kembali ke bivak dan melaporkan kepada panglima ekspedisi. Keesokan harinya diperintahkan lagi kepada pasukan yang sama untuk berangkat ke Wawontuko dengan tugas yang sama. Di tempat ini juga dijumpai kenyataan yang sama seperti pada perkampungan yang didatangi pertama, walaupun sesungguhnya tempat ini dijadikan juga sebagai kubu pertahanan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya dua pucuk meriam buatan Inggris. Meriam itu disita dan dibawa ke bivak setelah membakar perkampungan itu.

Penyerangan terhadap Wawontuko itu yang mendasari Kruyt untuk menyatakan bahwa dalam ekspedisi ini Mokole Wawontuko

menyatakan takluk kepada panglima Ekspedisi Militer Mori 1856.<sup>16</sup> Pernyataan ini sesungguhnya keliru, karena dalam laporan resmi dari Komandan Ekspedisi Militer Mori 1856 dinyatakan bahwa pasukan penyerang tidak menjangkau Mokole Wawontuko karena telah berpindah ke daerah pedalaman. Setelah pasukan ekspedisi militer itu meninggalkan Mori, Mokole Wawontuko dan para pembesar *kemokolean*, dan rakyat kembali dan didapati-perkampungan mereka telah dibumi-hanguskan. Sudah merupakan tradisi apabila pemukiman penguasa pernah diduduki lawan, maka pantang daerah tersebut ditempati lagi sehingga daerah pemukiman itu harus ditinggalkan dan mencari daerah pemukiman baru. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pusat kekuasaannya itu tidak pernah diduduki oleh lawan. Oleh karena itulah Mokole Wawontuko memindahkan pusat pemerintahannya ke Ngusumbatu. Pemindahan itu merupakan respon politik untuk menyatakan bahwa daerah kekuasaannya tidak pernah ditaklukan oleh lawan. Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan setelah ekspedisi penaklukan 1856, sehingga merubah penyebutan *Kemokolean* Wawontuko menjadi *Kemokolean* Ngusumbatu.

Kegagalan dalam usaha untuk mendorong para penguasa kerajaan dan penguasa *kemokolean* untuk datang menyatakan tanda takluk, dan informasi tentang karakter penguasa Mori yang tidak ingin berdamai apabila telah terlibat dalam perang, serta kondisi cuaca yang tidak bersahabat mendorong panglima ekspedisi mengambil keputusan untuk menyudahi tindakan ekspedisi militer. Keesokan harinya dilaksanakan defile untuk

seorang pun di sana. *Mokole* dan penduduk Wawontuko telah meninggalkan pusat pemerintahannya dan berpindah ke kampung lain.

---

<sup>16</sup> Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal 457. Pernyataan itu sesungguhnya keliru, karena dalam laporan resmi pasukan ekspedisi dinyatakan bahwa waktu penyerangan ke Wawontuko mereka tidak menemukan

menghormati anggota pasukan ekspedisi yang gugur dalam pertempuran di Ensaondau. Pada upacara itu dilakukan defile penghormatan kepada arwah dari mereka yang gugur dalam pertempuran ini, sesudahnya pasukan diberangkatkan kembali dan berkumpul di Tompira.

Setelah semua pasukan berkumpul di Tompira, panglima ekspedisi militer melakukan pertemuan dengan para komandan pasukan, termasuk Raja Bungku dan Raja Banggai yang ikut dalam ekspedisi itu. Dalam pertemuan itu disepakati untuk menyerahkan daerah Tompira yang telah diduduki dan ditancapkannya bendera Belanda kepada penguasa Kerajaan Bungku. Selain itu dianugerahkan pula sejumlah senjata api bersama amunisinya sebagai imbalan atas bantuan penguasa Kerajaan Bungku yang telah mengikutsertakan pasukan pemberaninya dalam jumlah yang banyak dalam ekspedisi itu. Penganugerahan Tompira itu juga didasarkan atas pertimbangan pada riwayat tempat ini sebagai pasar utama antara penduduk Bungku dan Mori. Dengan penganugerahan tempat ini, diharapkan penguasa Bungku yang kelak memiliki kewenangan untuk mengontrol daerah ini dan memungut pajak pasar.

Pada dasarnya keputusan itu bukan dimaksudkan untuk menempatkan Tompira sebagai koloni dari Kerajaan Bungku. Daerah ini dipandang merupakan koloni pemerintah Hindia Belanda akan tetapi pengawasannya dipinjamkan atau diembankan kepada penguasa Kerajaan Mori. Keputusan ini sesungguhnya merisaukan penguasa Kerajaan Bungku namun tidak berani menolak keputusan itu. Kerisauan itu berkaitan erat dengan permu-

suhan politik yang selama itu terjadi antara Kerajaan Mori dengan Kerajaan Bungku, meskipun dua kerajaan bertetangga ini memiliki hubungan genealogi dan kultural. Itulah sebabnya peran pengawasan dan pemungutan pajak pasar tidak pernah dilakukan oleh penguasa kerajaan tetangga itu, bahkan membiarkan daerah itu kembali dalam genggamannya Kerajaan Mori, meskipun di tempat itu telah berkibar bendera Belanda. Kenyataan itu menunjukkan bahwa ekspedisi militer Belanda itu telah gagal total memberikan apalagi menanamkan pengaruh kekuasaannya di Kerajaan Mori.

Kesokan harinya, pada tanggal 29 Juni semua pasukan diberangkatkan ke Pulau Bunga Timbul, yang ketika itu telah berganti nama menjadi Vesuvius dimana armada ekspedisi Mori telah menggunakan pulau itu sebagai titik kumpul. Setelah semua pasukan telah berkumpul, pada tanggal 30 Juni dilakukan defile terakhir sebagai simbol kemenangan dan sekaligus pemulangan pasukan ekspedisi. Pasukan bantuan dari Bungku, Peling, dan Banggai kembali ke negerinya dengan menggunakan perahu mereka masing-masing sementara kapal uap Celebes kembali ke Batavia dengan menyinggahi Makassar untuk mengangkut pasukan bantuan dari Jawa bersama 5 orang prajurit Belanda yang sakit. Sementara kapal Vesuvius, menarik kapal Soen Bulgair mengangkut pasukan bantuan dari Kerajaan Ternate (orang Alifuru), Batalion dari Garnisun Amboina, dan penduduk Ensaondau yang menyerah dengan tujuan<sup>17</sup> menuju ke Ternate. Armada ini baru tiba di Ternate pada tanggal 13 Juli 1856.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Menurut A.K. Tumakaka, orang Mori yang ditawan dibawa ke Bungku dan kemudian diasingkan ke Pulau Bacan. Keterangan ini tampaknya bertentangan dengan laporan resmi militer Belanda. Baca: A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 3; Bandingkan dengan

[L.H.W.M. De Stuers, \*op.cit.\*, hal. 544.](#)

<sup>18</sup> Keterlambatan kapal Vesuvius dan Soen Dulgair tiba di Ternate itu disebabkan mendapat musibah dalam pelayarannya. Pada tanggal 7 Juli kapal Vesuvius menabrak karang. Kejadian itu menye-

Setelah berada di Ternate selama 7 hari, kapal Vesuvius dan Soen Dulgair meneruskan pelayaran ke Ambon. Pelayaran ini menyita waktu selama 5 hari (120 Jam) karena menghadapi arus laut yang berlawanan dan angin sakal. Secara normal, pelayaran dari Ternate ke Ambon hanya berlangsung satu setengah hari (36 jam). Armada ini tiba di Ambon pada tanggal 25 Juni 1856, dan disambut dengan upacara kemenangan. Dalam upacara ini, Gubernur Maluku, C. F. Goldman, yang telah bertugas sebagai panglima Ekspedisi Mori membubarkan secara resmi pasukan ekspedisi yang dipimpinnya.

### **Kesudahan Perang Mori Pertama**

Kisah Ekspedisi Mori 1856 yang telah diungkapkan itu menunjukkan kepada kita betapa banyak personil militer yang dilibatkan dan menjadi korban dalam perang ini dan betapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membiayai perang tersebut. Walaupun ekspedisi ini dipandang berhasil oleh pasukan ekspedisi itu sendiri, namun berbagai pers Belanda dan bahkan laporan politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kolonial (*Ministerie van Kolonien*) tanggal 7 Oktober 1856 dan tanggal 2 November 1856, memberikan kesan bahwa ekspedisi itu telah menggunakan anggaran yang besar tanpa membuahkan hasil. Ekspedisi ini dipandang gagal total karena tidak berhasil memaksa penguasa Kerajaan Mori untuk menyatakan takluk, tunduk dan patuh kepada pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, meskipun ekspedisi ini berhasil menduduki Tompira dan merebut Benteng Ensaondau,

---

babkan muatan kapal itu harus dibuang ke laut, antara lain: 14.000 pond batubara, 99 drum peluru tajam, dan 23 peti granat, dan 2 peti peluru api. Usaha untuk mengapungkan kapal ini akhirnya berhasil dan kemudian melanjutkan pelayaran ke Ternate. Baca:

serta membakar pemukiman di Patongoa dan Wawontuko, nyatanya Kerajaan Mori tetap berjaya menjadi satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh.

Berita-berita timpang menyangkut ekspedisi ini yang pada gilirannya mendorong wakil komandan pasukan Angkatan Darat ekspedisi itu, L.H.W.M. Stuers merespon dengan menyusun laporan tentang ekspedisi itu yang kemudian dimuat dalam Majalah untuk Militer Belanda (*Tijdschrift voor het Nederlandsche Leger*) yang berjudul *Militaire Spectator*.<sup>19</sup> Jika dicermati dengan saksama, maka laporan ini juga pada dasarnya lebih menunjukkan adanya rasa takut untuk melanjutkan penyerangan agar memaksa penguasa kerajaan ini untuk takluk, tunduk dan patuh kepada pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu dinyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan penyerangan lebih lanjut merupakan suatu pertimbangan kemanusiaan. Alasan untuk membenarkannya adalah: dua pertiga tenaga kuli telah sakit, kondisi medan tidak diketahui dengan baik, dan hujan turun setiap hari sehingga sangat sulit untuk melanjutkan penyerangan lebih lanjut. Namun dibalik itu, orang dapat beranggapan bahwa pasukan ekspedisi ini sesungguhnya takut menghadapi pemberani Mori karena beberapa alasan yang diperoleh dari pemimpin pasukan Benteng Ensaondau, Sangaji, yang juga diungkapkan oleh penulis artikel itu, antara lain: penguasa Mori sangat sulit diajak berdamai apabila telah terlibat dalam perang, bila ingin mengejar mereka maka pasti akan berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya untuk memancing penyerang agar mengikuti mereka ke daerah pegunungan untuk

[L.H.W.M. de Stuers, op.cit., hal. 548.](#)

<sup>19</sup> Jika dicermati laporan ini tampak bahwa De Stuers berusaha untuk membela kegiatan ekspedisi itu. Oleh karena itu laporan ini tampak sangat subjektif, karena itu dibutuhkan kecermatan untuk menelaahnya.

kemudian disana mereka dihancurkan. Selain itu kenyataan yang dihadapi dalam penyerangan Benteng Ensaondau menunjukkan bahwa orang Mori sangat piawai memasang ranjau-ranjau yang berbahaya, serta lihai menggunakan panah dan sumpit beracun.

Penganugerahan kampemen militer di Tompira kepada penguasa Bungku untuk dijadikan bukti pendudukan ekspedisi pemerintah Hindia Belanda ternyata juga sia-sia. Tompira terletak dalam wilayah Kerajaan Mori, sehingga sulit bagi penguasa Bungku untuk menempatkan pejabat pemerintah, karena itu tempat tersebut ditinggalkan begitu saja sehingga tetap berada dalam pengawasan penguasa Kerajaan Mori. Apalagi daerah itu sejak dahulu hanya berfungsi sebagai pasar, tempat transaksi niaga antara penduduk Mori dan pedagang Bungku dan bukan daerah hunian penduduk. Selain itu penguasa Bungku menyadari bahwa penguasaan atas Tompira akan lebih mempersulit hubungannya dengan Kerajaan Mori, baik dari segi politik maupun kultural dan sosial ekonomi.

Secara politik, dua kerajaan bertetangga ini menyimpan konflik terpendam, namun tidak berakibat terjadinya konflik dengan tingkat kekerasan yang tinggi yaitu eskalasi perang. Konflik terpendam itu hanya berdampak pada kekakuan hubungan antara penguasa dua kerajaan itu, dan tidak berpengaruh pada hubungan sosial-ekonomi dan kultural. Hal itu didasarkan pada adanya hubungan genealogis antara dua kerajaan itu, baik antara keluarga penguasa maupun rakyatnya.<sup>20</sup> Ketegangan politik yang terjadi sesungguhnya berhubungan dengan campur tangan pihak penguasa Mori untuk membantu penduduk di daerah kekuasaan Bungku dari ancaman dan serangan suku

pengayau dari Toraja Bare'e. Campur tangan ini sesungguhnya didorong oleh rasa emosional untuk menyelamatkan keluarganya yang diserang oleh kelompok pengayau, dan tidak ada keinginan politik untuk menguasai wilayah Bungku. Walaupun demikian secara politik tindakan itu dipandang memperlemah kedudukan kekuasaan penguasa Bungku. Ketegangan politik itu tampaknya dipandang oleh rakyat dua kerajaan itu merupakan persoalan keluarga istana masing-masing, sehingga dalam keseharian mereka tidak terpengaruh dan tetap terus saling menjalin hubungan sosial dan ekonomi. Rakyat Bungku senantiasa mengunjungi pasar-pasar di Mori, demikian pula sebaliknya sehingga secara sosial kultural dapat dikatakan bahwa rakyat dua kerajaan itu senantiasa menjalin hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Mereka umumnya menggunakan jalan dari Tompira melintasi daerah orang Watumalupu ke Masamuano di daerah Bungku. Jalan ini digunakan oleh orang Mori untuk menukar beras dan juga tembakau dengan sarung pada orang Watu (penduduk Bungku).

Keterlibatan pihak Kerajaan Bungku dalam ekspedisi militer pemerintah Hindia Belanda berakibat semakin buruknya hubungan antara dua kerajaan bertetangga dan memiliki hubungan genealogi itu. Pada dasarnya keterlibatan pemerintah Kerajaan Bungku dalam ekspedisi itu tidak dapat dihindari karena kerajaan itu telah berada dalam dominasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sejak pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi untuk memberantas bajak laut Tobelo yang menjadikan kerajaan itu sebagai basis kegiatannya di kawasan timur. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah kolonial Belanda

<sup>20</sup> Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal. 457; A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 2.



memanfaatkan setiap peluang untuk tampil sebagai pelindung dan perantara untuk menyelesaikan persoalan konflik politik antara dua kerajaan bertetangga dan bersaudara itu.

Keinginan pihak pemerintah kolonial Belanda untuk memanfaatkan kondisi ini erat berkaitan dengan keinginannya untuk mengontrol perkembangan perdagangan di Kerajaan Mori. Sejak pemerintah kolonial melaksanakan kebijakan perdagangan bebas dan membuka sejumlah pelabuhan di kawasan timur Hindia Belanda sebagai pelabuhan bebas, banyak pedagang dari Singapura yang melakukan hubungan perdagangan langsung dengan daerah-daerah produksi komoditi dagang. Kerajaan Mori ketika itu tampil sebagai salah satu daerah penghasil komoditi damar, rotan, kayu kuning, kayu besi, kayu binti (*Kitex cofasus*), dan kayu cempaka (*Nichelia sp*) yang laris dalam dunia perdagangan internasional ketika itu. Perkembangan perdagangan itu berdampak dengan berkembangnya sejumlah perkampungan menjadi sentra-sentra perdagangan komoditi dari kerajaan ini, antara lain: Tambayoli, Towi, Bungintimbe, dan Linkubu. Perkembangan sentra-sentra perdagangan produksi hutan itu memikat para pedagang dari Sulawesi Selatan (pedagang Bugis) dan pedagang Bungku datang dan menetap di sentra-sentra perdagangan untuk mengais keuntungan dari perdagangan yang ramai tersebut.

Kehadiran pada pedagang itu, dan juga para peramu produksi hutan dari berbagai wilayah kerajaan di sekitarnya, diterima dengan baik dan dengan senang hati. Hal itu berkaitan dengan kebijakan politik yang dianut oleh pemerintah Kerajaan Mori ketika itu, yang dipimpin oleh Raja Mori XI, Marunduh III (1870-1907), yaitu politik pintu terbuka. Kebijakan politik pintu terbuka ini telah melapangkan perkembangan perdagangan di kerajaan ini, yang pada gilirannya memberikan

keuntungan ekonomi dan politik. Raja Marunduh III, menurut perkiraan dari Alb. C. Kruyt, memperoleh pendapatan dari hasil pajak produksi hutan (*buangtana*) sebanyak lebih dari Fl 1.000,- (seribu *gulden*) setiap tahunnya. Sementara para *mokole* bawahannya, yang juga dikunjungi oleh para peramu hasil hutan, seperti Mokole Ngusumbatu, diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar fl. 300,- (tiga ratus *gulden*) setiap tahun.

Keuntungan politik lain yang didapat adalah memperoleh peluang untuk memperkuat kedudukan kekuasaannya dengan membeli perlengkapan perang, seperti senjata api dan mesiuinya dari para pedagang yang menjalin hubungan niaga langsung dengan Singapura. Menurut perkiraan Kruyt, kerajaan Mori telah memiliki sejumlah 100 pucuk senjata api buatan Inggris, diantaranya Raja Marunduh III sendiri memiliki 30 pucuk, sementara sisanya dimiliki oleh penguasa lokal lainnya. Usaha Kerajaan Mori dan juga kerajaan-kerajaan lainnya yang masih berstatus kerajaan yang merdeka dan berdaulat memperkuat pertahanannya dengan membeli senjata api itu dipandang oleh pemerintah kolonial sebagai ancaman terhadap kedudukan kekuasaannya. Oleh karena itu pemerintah kolonial kembali berencana untuk membatalkan kebijakan perdagangan bebas tersebut, karena dipandang telah melapangkan kerajaan-kerajaan berdaulat untuk memperkuat kekuatan militernya.

Pada tahun 1872, pemerintah mencanangkan rencana pembatalan kebijakan perdagangan bebas, dan ingin kembali menjadikan wilayah kawasan timur menjadi wilayah wajib pajak (*tol gebied*). Alasan yang ditampilkan adalah bahwa kegiatan perdagangan di kawasan itu lebih menguntungkan pedagang-pedagang asing dan kurang menguntungkan kegiatan perdagangan pemerintah kolonial. Rencana pemerintah kolonial itu mendapat



reaksi penolakan dari berbagai pihak, termasuk pengurus Kamar Dagang dan Industri (*Kamer van Koophandel en Nijverheid*) di Makassar, Surabaya, dan Rotterdam. Mereka menyatakan bahwa kebijakan perdagangan bebas menguntungkan semua pihak, jika pemerintah ingin membatalkannya maka akan berakibat kemerosotan perdagangan, dan para pelaut dan pedagang bumiputera akan lebih memusatkan kegiatan perdagangan mereka ke pusat-pusat perdagangan yang berada dalam kewenangan Inggeris, seperti: Pulau Pinang, Brunei, dan terutama sekali Singapura. Bila hal itu terjadi akan lebih memperlemah kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial.<sup>21</sup> Reaksi penolakan dan alasan yang diberikan itu menyebabkan pemerintah menunda rencana itu, dan memilih mengambil langkah-langkah strategik untuk dapat mengontrol kegiatan perdagangan di kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menyangkut keinginannya untuk mengawasi kegiatan perdagangan di Kerajaan Mori adalah menyatakan kepada pemerintah kerajaan itu bahwa penduduk yang migrasi ke negerinya itu adalah penduduk *gouvernement* (penduduk pemerintah kolonial Belanda). Untuk mengawasi dan melindungi kegiatan mereka maka diangkat seorang pemimpin diantara mereka yang diberi kedudukan sebagai kapitan. Untuk tujuan itu diangkat Haji La Mohammad Jafar atau yang umum dikenal dengan nama Haji Lagangka, seorang pedagang dari Sulawesi Selatan yang sejak lama menetap di Tambayoli.<sup>22</sup> Penunjukan ini tidak mendapat reaksi protes dari raja,

karena dia telah lama mengenal tokoh ini dan bahkan mendapat kepercayaan dari raja untuk memungut *buangtana* untuk kepentingan kerajaan. Kepercayaan itu juga didasarkan pada ikatan kekeluargaan, karena ia telah mempersunting salah seorang budak (*ata pu'u*) dari Raja Marunduh III. Selain itu diangkat pula seorang pedagang Bugis yang menetap di Bungintimbe, sebuah pulau kecil yang terletak di muara Sungai Laa, menjadi Kapitan Bugis bernama Mahede.

Peran para kapitan ini sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah kolonial dengan penguasa lokal, dengan tugas utama adalah mengawasi dan melindungi para imigran yang datang di daerah itu baik sebagai pedagang maupun sebagai peramu. Dalam perkembangan kemudian, mereka juga melaksanakan tugas memungut pajak perdagangan untuk kepentingan pemerintah kolonial di Bungku. Pada awalnya Kapitan Haji Lagangka hanya dapat memungut *buangtana* dari orang-orang Lolaki (Tololaki) untuk kepentingan pemerintah kolonial di Bungku. Sementara pendatang yang lainnya termasuk orang Lolaki, membayar *buangtana* kepada Raja Marunduh III, meskipun pemerintah kolonial telah menyatakan bahwa imigran yang masuk di kerajaan ini adalah penduduk *gouvernement*.

Kenyataan itu mendorong pemerintah kolonial di Bungku menyampaikan kepada penguasa Kerajaan Mori bahwa kerajaannya merupakan daerah taklukan pemerintah kolonial Belanda dan menjadi bagian pemerintahan yang berada dalam dominasi pemerintahan Residen Ternate, sehingga merupakan bagian pemerintah di Bungku. Pernyataan itu diten-

<sup>21</sup> Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 82-88.

<sup>22</sup> Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal. 457; F.R. Maengkom, "[Dagboek van het Tocht uit Todjo naar Mori \(Midden-Celebes\), en terug naar het Poso-meer \(11-27 April 1906\)](#)", dalam: TNAG (Seri II, Vol. XXIV, 1907), hal.

857. Haji La Mohhammad Jafar ini menikah dengan salah seorang budak dari Raja Marunduh III, oleh karena itu ia dipercayakan juga memungut *buangtana* untuk raja. Menurut Maengkom ia menikah dengan seorang keponakan Raja Marunduh III.

tang oleh Raja Marunduh III dengan menyatakan bahwa negerinya tidak pernah ditaklukan baik oleh Residen Ternate maupun pemerintahan di Bungku.<sup>23</sup> Pernyataan tegas dari Raja Marunduh III itu tidak membuyarkan keinginan pemerintah kolonial di Bungku untuk dapat mengawasi kegiatan perdagangan pada sentra-sentra perdagangan produksi hutan di wilayah pesisir. Oleh karena itu diambil kebijakan hanya mewajibkan kepada pedagang-pedagang Bugis yang berada di sentra-sentra perdagangan produksi hutan untuk membayar pajak perdagangan kepada pemerintah kolonial sejak tahun 1898.

Kebijakan pemerintah kolonial itu tidak mendapat protes karena dipandang tidak merugikan kepentingan politik pemerintah Kerajaan Mori, dan tidak pula mengurangi pendapatan yang diperoleh dari peningkatan perdagangan itu. Pemerintah Kerajaan Mori memperhitungkan apabila menentang kebijakan itu justru akan berdampak pada kemerosotan perdagangan, karena para pedagang Bugis dilarang untuk berdagang di sentra-sentra perdagangan produksi hutan. Jika hal itu sampai terjadi maka selain mengurangi sumber-sumber kesejahteraan kerajaan, juga tidak dapat memperbanyak pembelian perlengkapan pertahanan berupa senjata api dan amunisi dari para pedagang Bugis, Cina, dan Arab.

## **Perjanjian Tompira**

Isu politik yang dilontarkan oleh pemerintah kolonial itu berdampak timbulnya ketegangan politik antara pihak penguasa dari dua kerajaan bertetangga itu. Hal itu dipandang juga dapat berpengaruh atas kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi kegiatan

perdagangan. Kenyataan menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat terus bergiat memperkuat pertahanan mereka dengan membeli persenjataan modern buatan Inggris. Oleh karena itu penguasa kolonial terus mengusahakan untuk dapat mengawasi kegiatan perdagangan, agar sentra-sentra perdagangan produksi hutan ini tidak berkembang menjadi pusat transaksi pembelian persenjataan modern. Untuk itu pemerintah kolonial memanfaatkan secara maksimal ketegangan politik yang semakin keras antara dua kerajaan bertetangga tersebut sebagai wahana untuk dapat masuk ke wilayah Kerajaan Mori, dengan jalan membangun toleransi dan simpati dengan kerajaan Bungku untuk kelak berpeluang melakukan politik adudomba.

Sehubungan dengan itu, dipilihlah tokoh-tokoh yang selama ini dipandang tidak terlibat dalam kegiatan politik, namun memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendekati penguasa Kerajaan Mori. Akhirnya dipilih dua orang misionaris yang telah lama bekerja di Sulawesi Tengah yang sangat memahami adat kebiasaan masyarakat Mori, yaitu Albert Christian Kruyt dan Nicolas Adriani. Tokoh yang disebut pertama adalah seorang ahli Theologia, sementara yang berikutnya adalah ahli Etnolinguistik. Dua tokoh ini adalah Penginjil yang dikirim oleh Lembaga Penginjilan Belanda (*Nederlandsch Zendeling Genootschap*) untuk melaksanakan pekabaran Injil di Sulawesi Tengah.<sup>24</sup> Mereka berdua pernah bergiat menemui Datu Luwu pada tahun 1896 untuk memohon agar dapat membantu menyelesaikan perang yang terjadi antara orang Napu yang dibantu oleh orang Pebato melawan orang Onda'e yang dibantu oleh orang Lage yang telah berlangsung sejak 1893.

---

<sup>23</sup> Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal. 457.

<sup>24</sup> Menyangkut kegiatan dua tokoh misionaris ini,

baca: Hasan, dkk, *Sejarah Poso* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 123-139.

Pengalaman mereka itu yang menjadi dasar pertimbangan sehingga mereka dipilih untuk dapat berbicara dengan penguasa Kerajaan Mori dalam menyelesaikan sengketa politik dengan kerajaan tetangganya.

Dua tokoh penginjil itu dikirim untuk menemui penguasa Kerajaan Mori pada tahun 1898. Kehadiran mereka disambut dengan ramah oleh Raja Marunduh III di istananya di Matandau, karena sebelumnya telah diketahui kegiatan mereka selama ini di Poso, salah satu kerajaan tetangganya. Setelah penyambutan itu, dilangsungkan pembicaraan diantara mereka. Dua tokoh penginjil itu menyampaikan kepada Raja Marunduh III tentang misi yang diembannya, yaitu ingin memohon kepada penguasa setempat agar bersedia menjalin hubungan perdamaian dengan pihak pemerintah Hindia Belanda dan membangun hubungan persahabatan yang erat kembali dengan penguasa Bungku. Oleh karena itu diharapkan agar pihak pemerintah kerajaan tidak mengambil tindakan perlawanan apabila kelak pemerintah Hindia Belanda mengirim utusannya untuk berunding. Keinginan pemerintah Belanda adalah ingin menciptakan perdamaian dan kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup> Tawaran untuk melakukan perundingan perdamaian itu diterima dengan baik, namun diharapkan agar pemerintah Hindia Belanda tidak berniat untuk mengulangi tindakan ekspedisi militernya seperti yang pernah dilakukan pada 1856.

<sup>25</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 2. Dalam tulisannya ini dinyatakan: "Karena kedatangan kompeni itu bermaksud hendak memperbaiki kehidupan rakyat dan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua suku bangsa supaya jangan mereka hidup dalam ketakutan, kemelaratan atau dalam peperangan dan mengayau antara suku yang satu dengan suku yang lain".

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 4; baca juga Alb. C. Kruyt, *op.cit.*, hal. 457. Kruyt menyatakan bahwa perjanjian perdamaian itu berlangsung pada tahun 1902. Namun dengan mempertimbangkan informasi menyangkut campur tangan

Sebagai tanda kesepahaman dilakukan jamuan makan yang meriah bersama dengan para pejabat kerajaan, *karua*, dan *bonto*, serta sejumlah *tadulako*. Setelah jamuan makan itu, Kruyt dan Andriani berpamitan pulang untuk menyampaikan laporan kepada Residen Ternate.

Hasil pertemuan itu selanjutnya disampaikan oleh dua misionaris yang dikirim itu kepada Residen Ternate. Berita itu disambut gembira sehingga dengan segera dilakukan negosiasi menyangkut tempat perundingan dan waktu perundingan. Akhirnya disepakati bahwa perundingan akan dilakukan di Tompira, yang akan dihadiri oleh wakil pemerintah Hindia Belanda, penguasa Mori, dan Bungku. Akhirnya pada tahun 1900, diselenggarakan perundingan perdamaian di Tompira.<sup>26</sup> Dalam perundingan perdamaian itu, tampil sebagai utusan pihak pemerintah Hindia Belanda, adalah Residen Ternate, Dr. Horst, yang didampingi oleh wakil pemerintah (*posthouder*) Belanda di Bungku yaitu Kneffer, Raja Bungku dan Peapua Kansili (Kaicil Papa) disamping sejumlah pejabat pemerintahan Keresidenan Ternate. Dari pihak Kerajaan Mori hadir Raja Marunduh III yang didampingi oleh Mokole Ede Kamesi (Mokole Ngusumbatu) serta beberapa pejabat *bonto* dan *karua* antara lain: Bonto Pondelu Tumakaka, Karua Kalapa, Pangeran Lawolio, Tadulako Todondo, Tadulako Mangoli, dan beberapa *mokole-*

pemerintah kolonial di kerajaan ini sesudahnya dan peristiwa konflik internal yang terjadi, tampak bahwa penanggalan yang dicatat oleh A. K. Tumakaka itu yang sesuai, yaitu pada tahun 1900. Selain itu juga menurut laporan Kruyt, pada tahun 1901, semua pedagang wajib membayar pajak perdagangan sebesar fl. 1,- (satu gulden) setiap tahun kepada pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan ini merupakan hasil perundingan perdamaian Tompira. Itu berarti perjanjian itu dicapai lebih awal dari tahun 1901.

*mokole mpalili.*

Dalam perundingan perdamaian ini, mengingat masing-masing pihak tidak mengerti dan memahami bahasa masing-masing, kecuali orang Mori dapat menggunakan dan mengerti bahasa Bungku, demikian pula sebaliknya - dipergunakan penerjemah (juru bahasa). Pihak pemerintah Hindia Belanda mengangkat Liem Tian Ang, seorang pedagang Cina yang telah lama berdagang di Mori sebagai penerjemah dari Bahasa Belanda ke Bahasa Mori, dan pihak penguasa Mori mengangkat Anakoda Laida, seorang pedagang Bugis yang telah lama berdagang di Tompira sebagai penerjemah dari Bahasa Mori ke Bahasa Belanda.

Butir-butir kesepakatan yang dicapai dalam perundingan perdamaian itu, yang merupakan isi dari Perjanjian Tompira, antara lain:

1. Masing-masing pihak (pemerintah Hindia Belanda, penguasa Mori dan penguasa Bungku) berjanji menghentikan permusuhan di antara mereka dan menjalin hubungan perdamaian yang kokoh.
2. Apabila salah satu dari dua kerajaan bertetangga itu mengawali melakukan penyerangan terhadap kerajaan lainnya, maka kerajaan itu dipandang sebagai musuh pemerintah Hindia Belanda.
3. Batas wilayah kekuasaan antara Kerajaan Mori dengan Kerajaan Bungku tetap pada batas wilayah yang selama ini telah diakui oleh dua kerajaan itu, yaitu pada daerah Bahombelu dan Tanjung Poso (Tondo Poso).
4. Pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Mori wajib membayar pajak perdagangan kepada pemerintah Hindia Belanda.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> A.K. Tumakaka, op. cit., hal. 4. Redaksi isi Perjanjian Tompira ini dirumuskan berdasarkan butir-butir kesepakatan yang ditulis oleh Tumakaka, tanpa merubah isi dan arti dari butir kesepakatan yang dicapai.

Naskah Perjanjian Tompira itu dibuat tiga rangkap dan masing-masing mendapatkan satu salinan. Selanjutnya sebagai simbol perdamaian yang telah dicapai itu, Raja Bungku menyerahkan sebilah pedang kepada Raja Mori, sementara Raja Mori menyerahkan sebuah tempat rokok dan batu pemantik api (*potingku*) kepada Raja Bungku. Selanjutnya pihak pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Residen Ternate menyerahkan kepada masing-masing penguasa itu satu bendera putih, pada waktu upacara penutupan perundingan perdamaian.<sup>28</sup>

Butir-butir pokok Perjanjian Tompira ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah Hindia Belanda telah berhasil melakoonkan peran sebagai "pelindung" dan "perantara" atas dua kerajaan bertetangga ini. Metode ini merupakan tradisi politik yang selalu dibangun untuk dapat mencampuri urusan politik kerajaan-kerajaan yang menjalin perjanjian perdamaian dengan pemerintah kolonial Belanda, baik pada periode Perkumpulan Dagang Hindia Timur (*Verenigde Oost-Indie Compagnie*) maupun sejak pemerintahan Hindia Belanda (*Gouvernement van Nederlandch-Indie*). Melalui peran sebagai pelindung dan perantara, pemerintah Hindia Belanda menempatkan diri sebagai protektor terhadap kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian memiliki kewenangan untuk mencegah kerajaan-kerajaan itu menjalin hubungan politik dengan kekuasaan asing lainnya, dan dapat turut campur tangan apabila terjadi permusuhan dengan kerajaan-kerajaan lain, sebagai wahana memperkuat kedudukan kekuasaan atas kerajaan itu.

<sup>28</sup> Patut dinyatakan bahwa usaha untuk mendapatkan naskah perjanjian ini tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu tidak dapat ditampilkan rincian butir-butir kesepakatan yang dicapai dari Perjanjian Tompira.

## BAB VI

# PERANG MORI KEDUA DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Perjanjian Tompira dan penempatan dua pejabat kapitan, yang konon mendapat perintah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan perlindungan terhadap para peramu produksi hutan dan sebagai agen pemungut pajak perdagangan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda, dibalik semua itu, sesungguhnya merupakan strategik politik pemerintah Hindia Belanda untuk dapat memperoleh informasi tentang potensi Kerajaan Mori dan bergiat mengadu-domba untuk dapat menguasainya kelak. Sesuai Perjanjian Tompira, pemerintah kolonial mulai melakukan pemungutan pajak perdagangan pada tahun 1901, khususnya kepada para pedagang Bugis yang menetap dan berniaga pada sentra-sentra perdagangan produksi hutan di kerajaan ini. Pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan itu sesungguhnya merupakan strategik untuk mengklaim wilayah pesisir, mulai dari Tanjung Poso hingga Bahombelu, di tempat berkembangnya sentra-sentra perdagangan sebagai

wilayah kekuasaan yang berada dalam pengawasan penguasa kolonial Belanda di Bungku.

Pernyataan itu ditentang oleh Raja Marunduh Datu ri Tana yang menyatakan bahwa wilayah pesisiran antara Tanjung Poso hingga Bahombelu adalah wilayah kekuasaannya. Daerah itu tidak pernah ditaklukan oleh siapapun. Perjanjian Tompira hanya menyatakan bahwa batas wilayah Bungku dan Mori adalah di Bahombelu dan Tanjung Poso. Itu berarti pada bagian selatan berbatasan dengan daerah Bahombelu dan pada pesisir utara dengan Tanjung Poso. Dengan kata lain daerah Bahombelu dan Tanjung Poso adalah daerah kekuasaan Raja Mori. Oleh karena itu tidak benar mengklaim wilayah pesisir antara dua daerah itu merupakan daerah kekuasaan penguasa Bungku.

Konflik politik ini mengisyaratkan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa penguasa Mori sangat keras dan tegas berjuang memper-

tahankan setiap jengkal wilayah kekuasaan, kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan. Strategik politik lewat perjanjian persahabatan untuk menempatkan wilayah kerajaan ini sebagai wilayah protektorat, dan menempatkan diri sebagai pelindung dan perantara (protektor) tidak akan mungkin dapat dipertahankan. Untuk dapat menguasai dan melaksanakan kekuasaan atas Kerajaan Mori harus ditempuh dengan tindakan penaklukan. Namun terdapat sejumlah faktor yang patut dipertimbangkan. Penguasa dan rakyat kerajaan ini dikenal sebagai penggemar perang; mereka memiliki kepandaian memasang ranjau yang berbahaya; mereka memiliki panah dan mata sumpitan yang beracun sehingga sangat berbahaya; mereka juga ahli menggunakan pedang mereka, dengan sekali menebas saja kepala dapat terpenggal; dalam pertempuran mereka memilih mati daripada hidup ditawan pemenang perang serta diasingkan ke luar kerajaannya. Faktor yang disebut terakhir itu semakin kuat dihayati penduduk Mori mengingat dalam ingatan kolektif mereka, berita yang berkembang sesuai perang bahwa para pemberani dan penduduk Ensaondau yang jadi tawanan dalam Perang Mori I pada 1856 dibuang ke Pulau Bacan.<sup>1</sup> Selain itu juga pihak pemerintah kolonial belum mengetahui kondisi medan dan potensi pasukan yang dimiliki kerajaan ini.

Kenyataan itu mendorong pemerintah kolonial menggunakan konflik politik sebagai salah satu taktik untuk menduduki kerajaan ini.

---

<sup>1</sup> A.K. Tumakaka, "*Sekelumit Sejarah Kepahlawanan di Wita Mori (1899-1907)*", (Palu: Makalah, 1979), hal. 3. Bandingkan dengan laporan: L.H.W.M. De Steurs, "De Expeditie tegen Tomorie, op de Oostkust van Celebes (April-Juli 1856)", dalam: [Militaire Spectator \(Bgn I, Vol. III, 1856\)](#). Diungkapkan bahwa Sangaji, kepala pasukan Ensaondau, setelah menyatakan menyerah, memohon kepada Panglima Ekspedisi agar membawa mereka keluar dari Kerajaan

Langkah awal yang ditempuh adalah bergiat menimbulkan perpecahan dengan memanfaatkan perpecahan yang terjadi dalam kerajaan itu untuk mendapatkan dukungan bagi rencana penaklukannya kelak. Strategik inilah yang membuahkan hasil terjadinya konflik internal dalam kerajaan.

### **Pemberontakan Lagonda**

Konflik politik (konflik eksternal) yang terjadi antara pihak penguasa kerajaan ini dengan penguasa Bungku belum teratasi, telah terjadi konflik internal pada tahun 1901. Menurut A.K. Tumakaka, konflik ini terjadi akibat keserakahan utusan yang dikirim oleh raja, yaitu Tapo, dan pengikutnya untuk menerima upeti dari orang Molio'a, daerah Mori Atas. Kepercayaan yang diembankan kepada mereka itu ternyata disalah gunakan, dengan cara mengambil secara paksa barang dan harta rakyat, tanpa menghormati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Setelah itu utusan tersebut meneruskan perjalanan ke Sungkelemba (Korokonta). Di tempat itu, mereka menjumpai rakyat sementara melaksanakan upacara perkabungan. Tanpa memohon izin ataupun menyapa keluarga yang berkabung, mereka langsung saja masuk sambil mengambil dan menyantap hidangan yang dipersembahkan kepada roh leluhur. Tindakan mereka itu membuat para peserta upacara perkabungan itu marah dan membunuh Tapo dan kawan-kawannya.<sup>2</sup>

Mori, karena takut akan pembalasan dari rajanya. Oleh karena itu demi keselamatan mereka diangkut keluar dari Kerajaan Mori dan dibawa ke Ambon.

<sup>2</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 6. Menurut Tumakaka, *bonto* telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena penduduk Mori Atas membentuk satu kelompok untuk menentang Raja Marunduh III, Oleh karena itu kelompok Mori bawah juga membangun

Informasi ini sulit dapat dipercaya karena menurut tradisi politik kerajaan-kerajaan, upeti bukan merupakan sumber kesejahteraan kerajaan. Hakekat upeti yang paling utama adalah kehadiran kepala pemerintahan bawahan atau daerah taklukan untuk datang menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan rasa hormatnya kepada pemegang kendali kekuasaan. Oleh karena itu upeti tidak pernah dikirim tetapi dihantar sendiri oleh penguasa daerah taklukan. Hal lain yang unik adalah perilaku utusan raja; menurut budaya politik, seorang utusan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah yang diterima dari raja. Bila melakukan hal yang bertentangan, itu berarti menghina raja dan sanksinya adalah hukuman mati. Itulah sebabnya dalam kehidupan politik, utusan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak pernah melakukan penyelewengan atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu penyebab peristiwa ini patut ditelusuri secara saksama berdasarkan informasi yang ditulis oleh F. R. Maengkom, seorang pegawai bumiputera yang ditugaskan sebagai wakil pemerintahan (*posthouder*) di Pulau Togian.<sup>3</sup> Ia datang ke Kerajaan Mori, sebagai utusan pemerintah kolonial untuk mencari informasi tentang potensi kekuatan militer kerajaan ini. Ketika itu, tindak kekerasan konflik telah reda namun pengelolaan dan penyelesaian konflik yang belum terlaksana dengan baik sehingga dipandang konflik itu masih berlanjut. Informasi yang diungkapkan dalam tulisannya itu diperoleh dari penuturan

Kapitan Lagangka (seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Raja Marunduh Datu ri Tana, dan berkedudukan sebagai kapitan *gouvernement*), Papa I Nggowo (kepala suku orang Pada), dan Tanu (Kepala suku orang Pu'umbana). Dua orang tokoh informan yang disebutkan terakhir itu terlibat dalam peristiwa itu.

Menurut Lagangka, Lagonda, kepada kampung Wawondumuku, salah seorang tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Raja Marunduh Datu ri Tana, datang ke Tambayoli bersama 100 pemberaninya. Ia melaporkan bahwa daerah-dearah vasal yang menentang Raja Marunduh Datu ri Tana adalah orang: Doule, Pu'umbana, Pada, Tandumalolo, Karapu, Watu, Pangkau, Kalae, Molioa, Tinambe, Padangcengi, Dolupo, Wang, Wawoncie, dan Belala. Ia menyatakan bahwa kelompok penentang itu telah memutuskan untuk menggantikan kedudukan Raja Mori dengan pemerintah Hindia Belanda. Lagonda dan para pemberaninya tinggal di tempat ini selama 30 hari.<sup>4</sup> Informasi ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka itu dengan tujuan untuk memohon bantuan pemerintah kolonial melalui Kapiten Lagangka. Namun setelah 30 hari bantuan yang diharapkan tidak juga datang sehingga mereka kembali ke kampungnya.

Sikap perlawanan mereka terhadap Raja Mori itu sesungguhnya akibat hasutan dari Ambe Ma'a, seorang yang berasal dari Kedatuan Luwu, utusan pemerintah kolonial Belanda untuk mengadu-domba rakyat Mori. Hal itu terungkap dari informasi yang diberikan oleh

---

kelompok untuk mendukung Raja Marunduh III berperang melawan rakyat Mori Atas.

<sup>3</sup> F.R. Maengkom, "Dagboek van een Tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes) en terug naar het Poso-Meer (11-27 April 1906)", dalam *TNAG* (Seri II, Vol. XXIV, 1907), hal. 855-871. [Dicetak ulang dalam bahasa Indonesia.](#)

<sup>4</sup> Baca: [Ibid. hal. 858-859](#). Kehadiran mereka itu dinyatakan untuk mencari damar di Tambayoli. Namun dengan memperhatikan laporan mereka itu pasti dengan maksud untuk dapat menjumpai perwakilan pemerintah kolonial dan memohon bantuan untuk menentang Raja Mori.



Papa I Nggowo yang menyatakan bahwa ia sesungguhnya tidak bermusuhan dengan Raja Mori, tetapi dilarang oleh Ambe Ma'a untuk mengakui kedudukan kekuasaan Raja Marunduh Datu ri Tana. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala suku Pu'umbana.<sup>5</sup> Pengakuan mereka itu menunjukkan dengan jelas bahwa setelah Perjanjian Tompira, pemerintah kolonial, selain mengklaim wilayah pesisir antara Tanjung Poso hingga Bahombelu berada dalam kekuasaan dan pengawasannya, juga bergiat menyusupkan orang-orangnya untuk mengadu-domba. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab terjadinya konflik internal.

*Casus belli* peristiwa ini berhubungan dengan pembunuhan dua orang budak warisan (*ata pu'u*) dari tiga orang budak yang diperbantukan kepada kepala kampung Wulanderi dan Kuraliu. Pada tahun 1901, datang kepala kampung Wulanderi dan Kuraliu melaporkan kepada Raja Marunduh Datu ri Tana bahwa orang Puumboto - yang menetap di bagian selatan Danau Poso - melakukan pengayauan di kampung mereka. Oleh karena itu mereka datang untuk memohon persetujuan raja untuk membalas dendam terhadap suku pengayau itu. Menurut budaya politik, kehadiran mereka itu secara tidak langsung memohon bantuan raja untuk menghukum kelompok yang melakukan penyerangan itu. Oleh karena konflik politik menyangkut perbatasan dengan pihak pemerintah kolonial ketika itu semakin menghangat, sehingga raja tidak mengutus *bontonya*, Pondelu Tumakaka, untuk membantu, melainkan mengutus tiga orang *ata pu'u* sebagai pengganti untuk membantu kepala kampung-kepala kampung itu untuk membalas dendam terhadap kelompok pengayau itu.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 870. Kedua tokoh ini dijumpai oleh Maengkom ketika berada di Kampung Tombancebe. Di kampung ini tinggal Papa I Nggowo, sementara

Sebelum rakyat Wulanderi dan Karalui melakukan aksi pembalasan dendam terhadap orang Pu'umboto, datang berita kepada Raja Marunduh Datu ri Tana bahwa dua dari tiga orang budak warisannya, yaitu Tandi dan Tapo, dibunuh di Karalieu. Alasan pembunuhan itu adalah karena para budak yang dikirim untuk membantu menyerang orang Pu'umboto itu melakukan perampasan harta benda penduduk, baik di Wulanderi maupun di Karalieu. Informasi itu menyebabkan Raja Marunduh Datu ri Tana murka. Ia menyadari bahwa pembunuhan terhadap *ata pu'u* itu sesungguhnya adalah kelompok yang berusaha menentang kedudukan kekuasaannya sebagai pemegang kendali politik kerajaan.

Sudah berabad-abad semenjak keberadaan kerajaan ini, tidak pernah terjadi bahwa para *ata pu'u* melakukan tindakan yang berlawanan dengan perintah yang diberikan, karena sanksinya adalah hukuman mati. Selain itu juga secara kultural, seorang *ata pu'u* tidak boleh dibunuh dengan menggunakan senjata. Jika kesalahan yang diperbuat oleh *ata pu'u* itu harus menjalani hukuman mati, baik kepada raja ataupun kepada pihak lain, ia hanya dapat dibunuh dengan mencekik lehernya hingga meninggal. Oleh karena itu peristiwa itu dipandang sebagai tindakan penghinaan dan perlawanan kepada pemerintahan yang syah, sehingga Raja Marunduh Datu ri Tana melakukan tindakan penyerangan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pembunuhan terhadap budaknya.

Peristiwa tersebut telah dipandang merusak tatanan kultural dan budaya politik kerajaan. Oleh karena itu penguasa-penguasa lokal di wilayah Mori Bawah memihak kepada Raja Mori untuk membalas dendam atas pembunuhan

kepala suku Pu'umbana, kebetulan lagi berkunjung kepadanya.



an *ata pu'u* Raja Marunduh Datu ri Tana itu. Oleh karenanya peristiwa itu dipandang sebagai konflik internal antara kelompok penduduk Mori Bawah dengan penduduk Mori Atas.<sup>6</sup> Namun sesungguhnya adalah tindakan penghukuman terhadap kelompok yang melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Lagonda. Patut diakui bahwa berkat dukungan Ambe Ma'a, mereka berhasil mempengaruhi penduduk Mori Atas untuk tidak menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Raja Mori, namun ia tidak berhasil mendorong mereka untuk sepenuhnya mendukung aksi pemberontakannya.

Tampaknya raja mengetahui bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh pihak yang menentang kedudukan kekuasaannya, yang bergiat mempengaruhi rakyatnya di wilayah Mori Atas, yaitu Lagonda. Tindakan yang mereka lakukan itu tampak jelas dinyatakan oleh Marunduh Datu ri Tana kepada Maengkom bahwa kelompok pemberontak itu adalah mereka yang terprovokasi oleh Ambe Ma'a.<sup>7</sup> Oleh karena itu penyerangan pertama dilakukan terhadap kampung Wulanderi dan Karaliu, karena diperkirakan para pemberontak itu masih berada di dua kampung itu. Namun ternyata mereka telah berpindah ke kampung lain. Itulah sebabnya pasukan kerajaan yang merupakan gabungan dari pemberani Mori Bawah<sup>8</sup> yang dipimpin oleh Bonto Pondelu Tumakaka meneruskan pengejarannya ke

kampung-kampung di Mori Atas. Dalam satu pertempuran dengan kelompok pemberontak di Korokonta, menurut A. K. Tumakaka, kelompok pemberontak berhasil dibinasakan, termasuk pemimpin pemberontak, Lagonda, terbunuh. Setelah pemimpin pemberontak tewas, maka tindakan kekerasan konflik tidak terjadi lagi. Jumlah keseluruhan korban yang meninggal dunia dari kedua belah pihak dalam peristiwa ini lebih dari 100 orang.

Gerakan para pemberontak dapat dipadamkan, akan tetapi persoalan yang muncul adalah pihak kerajaan memandang para *mia mota'u* bersikap bermusuhan terhadapnya. Pandangan itu didasarkan pada kenyataan bahwa setelah pemberontakan itu dipadamkan, belum seorangpun dari para *mia mota'u* yang datang kepada raja untuk menawarkan perdamaian. Oleh karena itu Bonto Pondelu bergiat menyadarkan mereka untuk bersedia mengadakan upacara perdamaian (*mesopi tandu*) di Matandau bertempat di istana raja. Meskipun demikian rencana itu tidak segera terealisasi karena Ambe Ma'a terus mempengaruhi para *mia mota'u* agar tidak mengakui kedudukan kekuasaan Raja Marunduh Datu ri Tana, seperti pengakuan Papa I Nggowo dan Tanu yang telah diungkapkan terdahulu.

Dalam kondisi permusuhan itu, pihak pemerintah kolonial bergiat lebih lanjut untuk menciptakan perpecahan internal. Hal itu dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan

<sup>6</sup> Baca: A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 5-7.

<sup>7</sup> F.R. Maengkom, *op.cit.*, hal. 863. Selain itu juga dinyatakan bahwa dalam pemberontakan itu lebih dari 100 orang tewas. Ia berusaha untuk dapat mengelola dan menyelesaikan perselisihan internal setelah pemberontakan itu tetapi belum juga berhasil. Oleh karena itu dimintai bantuan pula kepada Maengkom untuk membantu menyampaikan kepada kepala-kepala suku Mori Atas bahwa raja sesungguhnya tidak memusuhi mereka, karena itu sampaikan mereka juga

bahwa mereka setuju untuk tidak melakukan pengayauan lagi. Maengkom berjanji akan memberitahukan kepada kontrolir Poso untuk membantu penyelesaian persoalan ini.

<sup>8</sup> Menurut A. K. Tumakaka, dalam gerakan perlawanan terhadap pemberontak itu, Kerajaan Mori mendapat bantuan pasukan dari Bungku dan orang Lolaki. A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 6. Tampaknya informasi ini sulit dipercaya mengingat ketika itu terjadi konflik politik dengan penguasa Bungku.

oleh Mokole Ngusumbatu, yaitu Mokole Kamesi yang lazim juga dikenal dengan sebutan Mokole Ede. Ia menyampaikan kepada Maengkom, bahwa dalam peristiwa pemberontakan itu ia mendukung dan membantu Raja Mori karena kedudukannya berada dibawah kekuasaan Raja Mori meskipun terdapat kerenggangan hubungan karena persoalan keluarga. Ia tidak disenangi oleh raja karena mendukung salah seorang putera Raja Marunduh Datu ri Tana, yaitu Luluasa, menetap dan menikah di Ngusumbatu.<sup>9</sup> Sementara informasi dari pihak lain menyatakan bahwa ia dibenci karena menceraikan isterinya yang bernama Dawa, keponakan langsung dari Raja Marunduh Datu ri Tana.<sup>10</sup> Menurut Kruyt, seperti apa yang dikatakan oleh Raja Marunduh Datu ri Tana, ia ingin menyelesaikan persoalan itu dan mengakhirinya, namun Mokole Kamesi berulang kali mengabaikannya. Hal itu tentu berkaitan dengan sikap Mokole Kamesi, yang menurut pengakuannya kepada Maengkom telah berjumpa beberapa kali dengan Residen Ternate, Dr. Horst. Dari perjumpaan itu, Residen Ternate memberikan kepadanya sebuah bendera Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Mokole Kamesi diam-diam telah berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda sehingga bergiat menciptakan jarak dalam hubungannya dengan Raja Mori.

Sikap keberpihakan Mokole Kamesi kepada pemerintah kolonial itu tampak merupakan strategik yang dilakukannya agar pada satu saat nanti ia dapat mewarisi takhta Kerajaan Mori. Jika diperhatikan pemberitaan Kruyt, tampak

bahwa nama *mokole* ini tidak tercatat sebagai calon-calon pengganti Raja Marunduh Datu ri Tana yang ketika itu telah berusia sekitar 60 tahun. Ada 4 nama yang disebut oleh Kruyt, yang menurut informasi tokoh-tokoh yang terpenting dari kerajaan itu berhak menggantikan raja, yaitu: Landika, Mokole Pembeu, Mokole Sampalea, dan Mokole La Getie.<sup>11</sup> Mokole Kamesi tidak tercatat sebagai calon pengganti walaupun memiliki darah kebangsawanan yang murni, ayahnya adalah seorang *mokole*, yaitu Mokole Oa dan ibunya adalah seorang keturunan *bonto* bernama Weringku. Hal ini kemudian terbukti ketika Raja Marunduh Datu ri Tana, raja yang bersikap tegas menentang usaha pemerintah kolonial Belanda untuk menjajah kerajaannya, gugur dalam pertempuran di Wulanderi tahun 1907, sebagai ucapan terima kasih, pemerintah kolonial Belanda langsung mengangkat Mokole Ede Kamesi menjadi Raja Mori atas wilayah kerajaan yang ketika itu diberi status sebagai swapraja (*zelfsbestuur landschap*).

## **Perlawanan Raja Marunduh Datu ri Tana (Perang Mori II)**

Perluasan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dilaksanakan di wilayah luar Jawa dan Sumatera pada paruh kedua abad ke-19, seperti yang dilakukan terhadap Kerajaan Mori mendapat kritikan yang pedas dari Menteri Kolonial, O. van Rees. Ia menyatakan bahwa perluasan kekuasaan dan penyerobotan wilayah yang dilakukan tidak dapat dielakkan karena pegawai-pegawai pemerintah

menikah dengan putera bangsawan Matandau; Mokole Sampalea menetap di Sorombu dan Mokole La Getie, dikenal juga dengan nama Poketi, menetap di Pampawu; salah seorang keponakannya, bernama Taba, menikah dengan saudara tiri dari Raja Marunduh Datu ri Tana.

<sup>9</sup> F.R. Maengkom, *op.cit.*, hal. 861.

<sup>10</sup> *Loc.cit.*; baca juga: Alb. C. Kruyt, "Het Rijk Mori", *op.cit.*, hal. 526.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 527. Landika menetap di Matandau, menikah dengan Wegili, saudara tiri dari Mokole Kamesi; Mokole Pembeu, pemimpin orang Kangua, menetap di Sorombu. Salah seorang puterinya

Hindia Belanda yang berada di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera umumnya berhasrat dan bernafsu perang. Dengan pemerintahan di Jawa dan Sumatera saja, kita telah mengambil lebih banyak jerami pada garpu daripada yang dapat kita bawa.<sup>12</sup> Bahkan usaha-usaha perluasan kekuasaan itu dipandang oleh Jhr James Loudon sebagai langkah ke arah kejatuhan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.<sup>13</sup>

Pendapat-pendapat itu pada dasarnya cukup beralasan karena jumlah aparat pemerintah Hindia Belanda masih kurang memadai untuk melaksanakan kekuasaan pada wilayah yang lebih luas. Kekurangan akan tenaga aparatur pemerintahan itu juga yang menyebabkan penataan pemerintahan pada daerah-daerah yang telah dikuasai dan diperintah secara langsung belum tertata dan terlaksana dengan baik. Kecaman dari pihak Kementerian Kolonial dan kesadaran akan kekurangan potensi aparatur pemerintahan ini menyebabkan usaha perluasan kekuasaan tidak diteruskan. Hal itu juga tampak dalam usaha pemerintah kolonial memperluas pengaruh kekuasaannya di pesisir timur Sulawesi, termasuk terhadap Kerajaan Mori. Ekspedisi militer yang dikirim tahun 1856 gagal menguasai kerajaan itu, namun tidak ada usaha lebih lanjut untuk kembali menguasainya.

Kebijakan politik untuk memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan tampak mulai ingin diwujudkan setelah pergantian jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Willem Rooseboom (1899-1904) kepada Joannes

Benedictus van Heutsz (1904-1909) pada tanggal 1 Oktober 1904. Dalam surat resmi dari Gubernur Jenderal yang baru ini kepada Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*) Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906) tertanggal 14 Juli 1905 jelas menunjukkan keinginan untuk mewujudkan penguasaan langsung seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Wilayah Sulawesi Selatan ketika itu dalam konsep pemerintah kolonial termasuk wilayah Sulawesi Tengah, karena dipandang wilayah itu berada dalam pengaruh kekuasaan Kedatuan Luwu. Dalam surat itu diperintahkan kepada Kroesen agar memaksa semua penguasa bumiputera untuk mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani "pernyataan pendek" (*korte verklaring*) dalam waktu yang singkat.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi militer yang disebut *Zuid-Celebes Expeditie* pada bulan Juli 1905. Penggunaan kekuatan militer itu dimaksudkan untuk memaksa pemerintah bumiputera menerima dan bersedia menandatangani pernyataan pendek yang isi pokoknya adalah penyerahan kekuasaan dan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan sebelumnya, tindakan militer yang dicanangkan Van Heutsz ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ini tampak dalam pernyataan J.H. van Kol, C.Th. van Deventer, dan Cremer yang berpendapat bahwa pengiriman pasukan pendudukan

<sup>12</sup> Baca; Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan. Makassar 1906-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hal. 43, dan 45-46.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 43. Pernyataan Loudon itu dinyatakan pada tahun 1861, ketika pemerintah Hindia Belanda banyak melakukan usaha penaklukan namun kurang berhasil menguasai dan melakukan pengawasan, seperti halnya

dengan Kerajaan Mori yang telah diungkapkan pada bab IV.

<sup>14</sup> Sumber Arsip: ARA, kotak AA No. 205: *Memorie van Overgave van Gouverneur C.A. Kroesen* (April 1903-September 1906). Baca juga; Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 46. Menyangkut model pernyataan pendek lihat lampiran hal, 228-230; J.M. Somer, *De Korte Verklaring* (Breda: Corona, 1934).

merupakan suatu "kewajiban" karena pemerintah Hindia Belanda bertanggungjawab bagi ketertiban dan keamanan di seluruh Kepulauan Nusantara.<sup>15</sup> Ekspedisi militer yang dikirim itu pertama-tama melakukan tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Bone. Setelah itu melancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan lainnya yang masih berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Pada bulan September 1905, dikirim 3.000 orang tentara sebagai ekspedisi militer untuk melakukan penaklukan terhadap Kedatuan Luwu. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kolonel Van Loenen. Dalam waktu singkat saja, Datu Luwu, We Kambo Daeng Risompa (1901-1935) berhasil dipaksa menandatangani pernyataan pendek pada 19 September 1905.<sup>16</sup> Setelah penandatanganan pernyataan pendek itu, pihak pemerintah kolonial beranggapan bahwa wilayah pengaruh kekuasaannya di Sulawesi Tengah telah beralih dalam kekuasaannya. Oleh karena itu untuk merealisasikan pengambilalihan kekuasaan dikirim satu pasukan dari Luwu ke Poso pada tanggal 3 Oktober 1905 dibawah pimpinan Kapten Hoedt.

Pengiriman pasukan ini dimaksudkan untuk membantu pasukan yang sebelumnya telah dikirim oleh Residen Manado pada bulan September 1905, pada awalnya dikirim 50 orang tentara namun kemudian ditambah lagi 150 orang tentara untuk mengambil alih

kekuasaan di wilayah Poso. Sesungguhnya wilayah Poso sejak tahun 1894 telah dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Keresiden Manado dengan status sebagai *Onderafdeling* Poso, dan ditempatkan seorang kontrolir (*kontroleur*), yaitu Van Duyvenbode Varkenvisser (1894-1895). Namun demikian pejabat-pejabat yang ditempatkan belum berhasil melaksanakan kekuasaan karena penguasa lokal dan rakyatnya masih tunduk pada kedudukan kekuasaan Kedatuan Luwu. Oleh karena itu dalam rangka pergantian kekuasaan dikirim pasukan ekspedisi. Pasukan itu kemudian dikomandani oleh Kontrolir Poso, Letnan H.J. Voskuil (1903-1907) untuk memaksakan penguasa di wilayah itu untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah Hindia Belanda. Pasukan militer ini berhasil memaksa penguasa-penguasa lokal untuk berkumpul di Poso. Pada kesempatan itu kontrolir Poso, Voskuil menyatakan kepada mereka:

*"Het gouvernement hebt u te erkennen als uw heer, en naast die heer kunt gij geen heeren erkennen (...) Uw nieuwe heer is een strenge vader (...) hij slaat als gij ongehoorzaam zijt".*<sup>17</sup> (Engkau harus mengakui pemerintah sebagai penguasamu, dan selain penguasa ini kamu tidak dapat mengakui penguasa-penguasa lainnya. Penguasa kamu yang baru ini adalah seorang ayah yang tegas. Ia akan menghukum bila kamu tidak

<sup>15</sup> H. van Kol, *Nederlandsch-Indie in de Staten Generaal 1897-1909* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1911), hal. 300-301; Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>16</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan. Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991), hal. 188. Bandingkan dengan: Michiel Hegener, *Guerrilla in Mori: Het verzet tegen de*

*Japanners op Midden-Celebes in de Tweede Wereld-oorlog* (Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1990), hal. 11. Ia menyatakan bahwa pernyataan pendek ditandatangani pada 18 September 1905.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 12; Hegener menyatakan bahwa yang berbicara itu adalah kontrolir Engelenberg. Pada waktu itu yang menjabat kontrolir Poso adalah H.J. Voskuil (1903-1907). A.J.N. Engelenberg pernah menjadi kontrolir Poso untuk periode 1901-1903). Baca: Hasan, dkk, *Sejarah Poso* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hal. 188.

mentaatinya).

Meskipun sejumlah penguasa lokal telah mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda namun diantaranya masih terdapat penguasa lokal yang penting menolak untuk hadir dan mengakui kehadiran penguasa baru itu. Oleh karena itu, Letnan Voskuil berangkat dengan pasukannya untuk memerangi mereka. Diperkirakan bahwa penolakan dan perlawanan mereka itu dipengaruhi oleh utusan dari Kedatuan Luwu yang datang untuk mengobarkan perlawanan. Namun perlawanan para penguasa lokal dan rakyatnya itu berhasil dapat dipadamkan berkat bantuan pasukan dari Kapten Hoedt. Akhirnya pada bulan Januari 1906, seluruh wilayah Poso dan sekitarnya dinyatakan telah dikuasai sepenuhnya.

Daerah kekuasaan di Sulawesi Tengah itu selanjutnya dijadikan satu bagian pemerintahan yang disebut *Afdeling Midden-Celebes* dengan pusat pemerintahan di Donggala. Yang diangkat menjadi Asisten Residen adalah bekas pejabat kontrolir *Onderafdeling Poso*, yaitu A.J.N. Engelenberg. Ia kemudian merancang pertemuan dengan semua pejabat pemerintah kerajaan di Sulawesi Tengah agar berkumpul di Donggala pada bulan Oktober. Dalam pertemuan itu berhasil dicapai keputusan, antara lain:

1. Mempertahankan ketertiban dan ketenteraman;
2. membentuk daerah-daerah swapraja dan mengelola perbendaharaan sendiri;
3. melaksanakan pungutan pajak dan kewajiban untuk pembuatan jalan-jalan;
4. pembukaan sawah-sawah;
5. penempatan dan penggabungan desa-desa atas pertimbangan strategik dan higienis;

6. melarang pelaksanaan ritual keagamaan tertentu;
7. penghapusan perbudakan, dan
8. larangan membawa senjata api.<sup>18</sup>

Dalam menata pemerintahan di daerah ini, tampak belum dapat berlangsung dengan baik mengingat penguasa dan penduduk di daerah Sulawesi Tengah ini masih terpaut dengan Kedatuan Luwu. Kenyataan ini yang mendorong pemerintah kolonial kembali memaksa Datu Luwu, We Kambo Daeng Risompa untuk menandatangani pernyataan pelepasan atas wilayah Poso pada 25 Pebruari 1907, dan kemudian juga pernyataan pelepasan wilayah Bada pada tanggal 18 Oktober 1909.

Ekspedisi penaklukan Sulawesi Tengah ini ternyata masih menyisakan satu kerajaan di pesisir timur Sulawesi Tengah yaitu Kerajaan Mori. Tampaknya pihak pemerintah kolonial sangat berhati-hati melakukan aksi militer guna memaksa Kerajaan Mori untuk takluk, mengingat pengalaman pahit mereka masa lampau (1856) yang pernah dialami dalam menghadapi penguasa kerajaan itu. Oleh karena itu langkah awal yang ditempuh adalah bergiat mengetahui potensi kekuatan pasukan kerajaan itu. Untuk itu ditugaskan kepada Asisten Residen Engelenberg dan Maengkom untuk menelusuri informasi tentang kerajaan ini. Sehubungan dengan itu, Engelenberg berangkat dengan menggunakan kapal Raaf ke Tambayoli dan tiba pada 12 April 1906. Pada waktu yang bersamaan tiba pula Maengkom di tempat itu. Berdasarkan surat yang telah disampaikan terlebih dahulu kepada Raja Mori, rencana pertemuan itu akan berlangsung pada tanggal 15 April 1906. Berdasarkan surat itu, raja telah mendelegasikan kepada Papa I Nggowo, *mia mota'u* dari Topada, dan Tunu,

<sup>18</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 13-14.

*mia mota'u* dari Pu'umbana untuk menemui Engelenberg di Tambayoli.

Delegasi Kerajaan Mori telah hadir dua hari sebelum rencana pertemuan itu, akan tetapi utusan pihak pemerintah kolonial Belanda menghendaki agar dapat berbicara langsung dengan Raja Mori. Oleh karena itu, pada tanggal 15 April 1906, diutus Haji Bestu untuk menemui raja seraya memohon kehadiran raja dan akan mengantarnya datang ke tempat pertemuan yang telah direncanakan itu. Utusan itu kembali dengan menyatakan bahwa raja dengan tegas menolak untuk hadir karena itu ia tidak ikut datang dengannya. Akhirnya Engelenberg hanya berpesan kepada Maengkom agar berusaha menemui Raja Marunduh Datu ri Tana untuk menanyakan jumlah laki-laki potensial (pemberani) yang dimilikinya.

Maengkom sesungguhnya mendapat tugas pertama untuk mempelajari keadaan wilayah kerajaan. Oleh karena itu ia tidak langsung melaksanakan tugas tambahan yang diembankan kepadanya sewaktu berada di Tambayoli. Itulah sebabnya, dalam laporan perjalanannya diberikan gambaran yang rinci menyangkut keadaan perkampungan yang berada di kerajaan ini, antara lain: Tanaoge, Bungintimbe, Tompira, Sampalowo, Matandau, Sarombu, dan Dolupo. Juga memberikan informasi tentang siapa-siapa yang berpihak kepada pemerintah Hindia Belanda, selain para kapitan yang ditugaskan di Mori, dapat dicatat antara lain Mokole Ede Kamesi, *mia mota'u* dari Sarombu dan Puumbana.<sup>19</sup>

Dalam perjalanan ini ia singgah di Matandau, pusat pemerintahan Kerajaan Mori, pada tanggal 19 April, dan kemudian melakukan pembicaraan serius dengan Raja Mori pada tanggal 20 April 1906, di *lobo* balai pertemuan

kerajaan. Pada pertemuan itu Raja Mori menyampaikan perihal konflik internal yang terjadi di kerajaannya dan usaha-usahanya untuk memulihkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang menentanginya namun belum berhasil. Hal itu disebabkan karena Ambe Ma'a, yang berada di balik peristiwa itu melarang para *mia mota'u* untuk berdamai dengannya. Dalam pembicaraan menyangkut hal ini, Maengkom menawarkan diri untuk menghantarnya menemui pemerintahan sipil (*civielen Gezaghebber*)<sup>20</sup> Poso, namun Raja Marunduh Datu ri Tana menyatakan ia ingin mendahulukan penyelesaian konflik internal di kerajaannya.<sup>21</sup> Oleh karena itu Maengkom menyatakan akan menghubungi pihak pemerintahan sipil di Poso untuk dapat membantu menyelesaikan konflik itu.

Dalam pertemuan itu, Maengkom juga memohon kepada raja agar bersedia melarang kebiasaan mengayau (*manga'e*). Permohonan itu disetujui dan raja menyatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk menghapuskan kebiasaan mengayau, meskipun kelompok penentanginya belum dapat dianjurkan untuk tidak melakukan kebiasaan itu. Dalam hal ini Maengkom menawarkan diri akan mengunjungi para *mia mota'u* dari kelompok yang menentanginya di daerah pedalaman dan memohon mereka untuk melarang kebiasaan *manga'e*. Pernyataan Raja Marunduh Datu ri Tana untuk berusaha melarang melakukan pengayauan itu menjadi pedoman dari tamu Raja Mori itu, sehingga dalam perjumpaannya dengan beberapa *mia mota'u* di daerah Mori Atas, seperti dengan Papa I Nggowo dan Tunu, ia menyatakan bahwa Raja Marunduh Datu ri Tana melarang pengayauan.

Permintaan dari Asisten Residen Engelen-

pemerintahan sipil. Jabatan ini sering pula ditulis dengan istilah *civielen en militairen gezaghebber*.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 868-869.

<sup>19</sup> Baca: [F.R. Maengkom, op.cit.](#)

<sup>20</sup> Penyebutan *civielen gezaghebber* itu menunjukkan pada pejabat militer yang bertugas sebagai pelaksana

berg juga ditanyakan, dan tanpa keraguan sedikitpun Raja Mori memberikan rincian yang lengkap menyangkut laki-laki potensial (pemberani), berdasarkan kelompok kaum (anak suku) yang ada di kerajaannya, yang berjumlah 44 kelompok kaum. Informasi itu tergambar dalam tabel berikut ini. Bahkan diberikan juga rincian laki-laki pemberani berdasarkan kelompok kaum pada setiap kampungnya. Data itu dalam dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel No. 3**  
**Jumlah laki-laki potensial di Kerajaan Mori**

No.	Kelompok Kaum	Jumlah pemberani
1	Wulanderi	235
2	Molongkuni	320
3	Ulu'uwoi	670
4	Wotu	330
5	Moiki	300
6	Puuntana	80
7	Puumbana	75
8	Impo	80
9	Pakambiya	400
10	Molioa	880
11	Ngusumbu	160
12	Petasia	70
13	Pada	70
14	Wawonceru	50
15	Kalae	130
16	Lasi	40
17	Padangcengi	40
18	Wanga	40
19	Palunggu	50
20	Lolonggoio	40
21	Wiongo	40
22	Taipa	40
23	Lembompolo	50
24	Pampawu	40
25	Malupeo	50
26	Sorombu	50
27	Mosilu	30
28	Tandomalolo	35
29	Watu	65

30	Kadundu	30
31	Dolupo	30
32	Belala	30
33	Tulewe	30
34	Kaowi	30
35	Wawoapi	30
36	Karapu	20
37	Doule	10
38	Wawancie	10
39	Pumaya	10
40	Wingkela	10
41	Kadupore	50
42	To'olata	5
43	Kolokolo	3
44	Pangkau	3
	Total	4763

Sumber: [F.R. Maengkom, op.cit., hal. 865](#)

Tabel ini menunjukkan bahwa pihak penguasa kerajaan ini memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap rakyatnya dan terus mendata jumlah tenaga laki-laki yang potensial. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kerajaan pada bidang pertahanan dan keamanan cukup tinggi yang pada gilirannya mengindikasikan keberanian serta kesungguhan untuk berperang membela kerajaan.

Pemegang kendali kekuasaan Kerajaan Mori juga menyadari bahwa informasi yang diinginkan oleh utusan pemerintah kolonial ini sesungguhnya dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan penaklukan. Ia menyadari kerajaannya yang hingga kini belum diserang dan ditaklukan, sementara kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Tengah, yang merupakan kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Poso, Bungku, Banggai, Pamona, Lore, dan Tojo telah dikuasai dan menjadi daerah taklukan pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, sebagai seorang raja dan penguasa yang tegar, berani, terbuka, dan percaya diri, Raja Mori, Marunduh Datu ri Tana bersedia dan dengan jujur menginformasikan kepada lawan segala persoalan

dalam kerajaannya dan potensi pertahanan keamanan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan kesiagaannya untuk menghadapi ekspedisi militer yang kelak dilancarkan terhadap kerajaannya.

Meskipun pemerintah kolonial telah mengetahui secara persis dengan rinci keadaan wilayah dan potensi kekuatan perang kerajaan ini, namun mereka tidak memilih kebijakan penaklukan dengan pengiriman ekspedisi militer, seperti yang dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Kebijakan yang ditempuh adalah mengikuti tradisi politik "memecah-belah" dan tampil menjadi "pelindung dan perantara" dalam penyelesaian konflik internal. Pilihan ini tentu berkaitan dengan laporan yang diberikan oleh Maengkom tentang keinginan Raja Marunduh Datu ri Tana untuk mendahulukan penyelesaian konflik internal. Menurut pertimbangan raja ini, penyelesaian konflik internal dapat kembali memperkuat kedudukan kekuasaan dan pertahanannya bila kelak terjadi intervensi militer ke kerajaannya. Sementara pihak pemerintah kolonial berpikir bahwa apabila jasa sebagai "perantara" dapat berhasil, menurut perhitungan pasti berhasil - maka mereka dapat mendesak pemerintah Kerajaan Mori untuk menerima dan mengakui kedudukan pemerintah Hindia Belanda sebagai "pelindung dan perantara".

Berdasarkan pilihan kebijakan itu, dikirimlah kontrolir Poso, Voskuil yang didampingi oleh seorang jurubicara, yaitu: Nayoan,<sup>22</sup> bersama satu peleton pasukan militer ke

Wawonbau, salah satu kampung kelompok kaum Pada di wilayah Mori Atas. Tempat kelompok kaum ini yang dipilih, karena diketahui bahwa dalam konflik internal, atas hasutan dan provokasi Ambe Ma'a telah menyatakan diri berpihak kepada dan mendambakan kehadiran pemerintah Hindia Belanda. Setelah tiba di kampung itu, diutuslah Panta (Papa I Lantiuna) pemimpin kelompok kaum Pada untuk menghubungi Raja Mori dan mengundangnya datang ke Wawombau untuk menemui utusan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan kedatangannya adalah untuk menciptakan perdamaian dan persahabatan, agar jangan ada lagi perselisihan dan peperangan. Jalan yang berliku-liku kita luruskan, yang berbukit-bukit kita ratakan, supaya benar-benar semua jadi lurus dan rata.<sup>23</sup> Ketika Panta menyampaikan keinginan pihak utusan pemerintah Hindia Belanda itu, Raja Marunduh Datu ri Tana menerima baik dan menyatakan kesediaannya untuk datang ke Wawombau bersama para pejabat pemerintah kerajaan.

Pertemuan Wawombau yang berlangsung pada bulan November 1906 itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting,<sup>24</sup> antara lain:

1. Kesepakatan perdamaian yang abadi antara pemerintah Kerajaan Mori dengan daerah *pallinya* di wilayah Mori Atas;
2. Para *mia mota'u* di Mori Atas menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada penguasa Kerajaan Mori dan bersedia menghantar upeti seperti yang lazim dilaksanakan;

Moiki), Bonto Pondelu, dan Malatundu (Pa'alangkai); dari pihak *mia mota'u* Mori Atas, hadir: Panta (*mia mota'u* To Pada), Bagonda (*mia mota'u* To Wang), Manggede (*mia mota'u* To Kalae), dan Manyonyo (*mia mota'u* To Pakambia). Baca: *Ibid*, hal. 8. Pertemuan Wawombau ini oleh A. K. Tumakaka disebut Perdamaian Kanta.

---

<sup>22</sup> Nayoan adalah pegawai bumiputera yang berkedudukan sebagai asisten pemerintahan (*bestuur assisten*) merangkap penilik sekolah (*schoolorpziener*).

<sup>23</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>24</sup> Dalam pertemuan itu hadir: dari pihak pemerintah Hindia Belanda, kontrolir H.J Voskuil dan Nayoan, dari pihak Kerajaan Mori, hadir: Raja Marunduh Datu ri Tana, Mokole Kamesi, Karua Kalapa (Karua



3. Pemerintah Hindia Belanda diizinkan untuk mendirikan kantor perwakilannya di Kolonodale;
4. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, tempat pemukiman penduduk di setiap kampung akan ditata dan diatur dengan baik;
5. Pemerintah kerajaan bersedia membantu usaha pembuatan debitan jalan raya untuk menghubungkan kampung-kampung sehingga memudahkan transportasi dan hubungan antar kampung.<sup>25</sup>

Berdasarkan Kesepakatan Wawombau itu, pemerintah kolonial Belanda, dengan bantuan pemerintah Kerajaan Mori, mengerahkan tenaga laki-laki yang potensial, membangun fasilitas perkantoran dan perumahan di Kolonodale. Selain itu rakyat dikerahkan juga untuk pekerjaan pembuatan jalan raya sepanjang 100 km, yang menghubungkan pusat pemerintahan kerajaan di Matandau dengan Danau Lowo, Tetekangka, Kalengko, Tompira, dan Dongi.

Setelah fasilitas perkantoran dan perumahan di Kolonodale selesai dikerjakan, Raja Mori mengirim utusan untuk menyampaikan kepada kontrolir Poso untuk menyampaikan bahwa sarana perkantoran dan perumahan sudah disiapkan. Sehubungan dengan itu dikirim satu peleton pasukan militer, dengan jumlah personil seluruhnya sebanyak 50 orang termasuk strapan,<sup>26</sup> dibawah pimpinan Lettu Infantri

H.M Matthes berangkat ke dan bertugas di Kolonodale pada awal Mei 1907. Ia mendapat tugas untuk mengawasi kegiatan pemerintahan dan mendesak para penguasa lokal, untuk menyatakan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangan kemudian, ia juga diharapkan membantu mengawasi pekerjaan pembuatan prasarana jalan raya, karena menurut informasi yang diperoleh kontrolir Poso, rakyat Mori telah menolak melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan itu.

Penolakan rakyat mengerjakan prasarana jalan itu disebabkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi dan tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh pasukan yang dikirim oleh kontrolir Poso dibawah pimpinan Letda Infantri B.E Kies, yang berjumlah 15 orang tentara pada bulan Juni 1907. Hal itu terjadi karena hasil yang diharapkan dari pekerjaan itu belum memuaskan. Sesungguhnya keterlambatan itu berkaitan dengan sarana yang digunakan rakyat dalam melaksanakan pekerjaan itu sangat bersahaja, namun mereka dicerca dengan tuduhan malas dan tidak mentaati perintah. Ketidakpuasan itu mendorong Letda Kies bersama pasukannya ke Matandau untuk mendesak Raja Mori agar memaksakan rakyatnya bekerja keras menyelesaikan pekerjaan pembuatan jalan. Ketika pasukan itu tiba, Raja Mori tidak ada di tempatnya, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Mori

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 8-9. Redaksi butir-butir kesepakatan ini diperbaiki tanpa merubah arti dan makna sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tumakaka. Menurut Hegener, pendirian kantor pemerintahan Hindia Belanda di Kolonodale itu dilakukan setelah membayar gantirugi kepada Sultan Ternate, sebesar fl. 6.000, - pertahun, untuk pembebasan wilayah kepulauan Banggai, Mori, dan Bungku. Baca; Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 14. Pernyataan itu tidak dapat diterima, karena pihak pemerintah kolonial telah mengetahui dengan pasti bahwa Kerajaan Mori bukan

wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, sejak dilancarkan ekspedisi militer 1856. Juga Kesultanan Ternate ketika itu telah berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dan tidak lagi menjadi kesultanan yang merdeka dan berdaulat.

<sup>26</sup> Strapan adalah penyebutan kepada orang tahanan yang mendapat hukuman berat dan dipekerjakan sebagai pekerja wajib yang diperbantukan pada pasukan militer. Mereka juga sering dimanfaatkan sebagai tenaga pembantu pada pejabat pengadilan negeri.

Atas untuk urusan kerajaan. Karena kecewa, pasukan itu memporakporandakan isi istana kerajaan, setelah itu mereka meninggalkan Matandau.<sup>27</sup>

Penghuni istana dan penduduk di pusat pemerintahan ini tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan anarkhis dari pasukan Kies itu. Jika disimak laporan dari Maengkom, tampak bahwa di lingkungan istana ini terdapat juga sejumlah tenaga laki-laki potensial yang menjadi pemberani. Istana kerajaan ini dibangun dengan tiang yang tingginya 3,5 meter. Di sekitar istana itu terdapat 24 rumah dengan tiang yang lebih rendah dari istana. Penghuni istana berjumlah 173 orang (laki-laki, perempuan, dan anak-anak). Jumlah penduduk di Matandau seluruhnya sebanyak 250 orang dan memiliki tenaga laki-laki potensial sebanyak 70 orang.<sup>28</sup> Mereka hanya melarikan diri ke hutan untuk berlindung, karena secara kultural, tidak boleh melakukan tindakan perlawanan apabila belum mendapat perintah dari raja. Hal yang dapat dilakukan hanyalah berusaha dengan segera menyampaikan kejadian itu kepada raja.

Ketika raja kembali dari perjalanan kunjungannya dan menyaksikan keadaan istananya yang porak poranda, raja pun sangat murka dan ingin melampiaskan amarahnya namun pasukan *Koninklijk Nederlandsch-Indië Leger* (KNIL) tidak berada lagi di Matandau. Tindakan pasukan KNIL itu bukan hanya dipandang telah menodai kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan tetapi juga telah menghina harkat dan martabat Raja Mori XI, Marunduh Datu ri Tana. Secara kultural, seperti yang telah diungkapkan terdahulu, orang yang menghina raja harus mendapat hukuman mati. Untuk itu raja mengundang semua pejabat

pemerintah dan penguasa-penguasa lokal untuk melakukan perundingan dan merumuskan strategik melakukan tindakan hukuman mati terhadap pelaku tindakan anarkhis itu.

Pertemuan yang berlangsung pada akhir Juni 1907 itu dihadiri oleh Dewan Hadat Mori, termasuk pejabat kerajaan (*bonto* dan *karua*) dan para penguasa lokal lainnya (*mokole* dan *mia mota'u*) serta sejumlah *tadulako*. Setelah membicarakan tindakan pasukan KNIL di istana kerajaan dan perlakuan mereka yang tidak manusiawi terhadap rakyat yang dikerahkan untuk pembukaan jalan raya, maka disepakati untuk melakukan perlawanan dan pembunuhan terhadap pasukan Belanda itu. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam pertemuan itu juga sekaligus dibicarakan mengenai taktik dan strategik penyerangan. Langkah pertama adalah menghentikan semua pekerjaan pembuatan jalan. Hal itu dimaksudkan agar menarik perhatian pasukan KNIL datang ke Matandau untuk menanyakan sebab musabab dihentikannya pekerjaan itu. Ketika mereka datang semua rakyat diperintahkan untuk menyambut dengan santun agar tidak mencurigakan. Pada waktu pasukan telah tiba maka akan dipanggil semua laki-laki potensial untuk berkumpul. Semua yang datang harus melengkapi diri dengan pedang atau parang yang ditutupi dengan sarung yang dipakai. Setiap pemberani berusaha selalu menemani satu orang tentara atau strapon. Pada saat semua telah berkumpul untuk didata bagi pekerjaan rodi sementara kaum perempuan bergiat mempersiapkan pesta penyambutan agar meyakinkan mereka bahwa mereka disambut dengan senang hati dan dihormati agar lengah dan tidak merasakan dalam keadaan bahaya. Disaat yang tepat akan ada aba-aba memulai tindakan

---

<sup>27</sup> Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 216; baca juga: A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>28</sup> [F.R. Maengkom, op.cit., hal. 863](#). Data ini diperoleh pada 20 April 1906.

dengan pekikan *hio* (ayo serang!). Semua yang mendengar kemudian menyambut pekikan perang itu dan langsung membunuh pasukan militer Belanda dan semua yang menyertainya. Jangan dibiarkan ada yang dapat meloloskan diri dalam rencana tindakan pembunuhan ini.

Tidak berapa lama kemudian datang Lie Tiang Ang,<sup>29</sup> utusan dari pejabat pemerintah Hindia Belanda di Kolonodale, menyampaikan kepada raja bahwa seorang pejabat Belanda akan datang bersama pasukannya ke Matandau. Dengan senang hati raja menyatakan kesediaannya untuk menerima tamu terhormat itu, sehingga berita gembira itu disampaikan kepada pejabat Belanda di Kolonodale. Akhirnya pada tanggal, 8 Juli 1907, berangkatlah satu peleton KNIL yang berkekuatan 17 orang tentara dibawah pimpinan Lettu Matthes ke Matandau. Kehadiran mereka disambut dengan santun dan ramah, sehingga tidak ada kecurigaan bahwa keputusan menghentikan kegiatan kerja rodi pembuatan jalan itu merupakan suatu tindakan protes atau perlawanan. Apalagi permintaan untuk mendata laki-laki potensial untuk melanjutkan pekerjaan itu disetujui oleh raja dan berjanji akan mengumpulkan mereka untuk didata. Setelah pertemuan itu Lettu Matthes memerintahkan 12 orang anggota tentaranya tinggal di tempat itu, dan menunjuk seorang koprал menjadi pimpinannya.

Lettu Matthes meneruskan perjalanannya ke daerah Pakambia bersama 4 orang tentara lainnya dengan diantar oleh Tadulako Lampeuro. Setelah menemui *mia mota'u* Pakambia dan menyampaikan perintah kepadanya dan semua *mia mota'u* di Mori Atas untuk datang ke Kolonodale menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu ia berangkat kembali ke Kolonodale, dengan

ditemani oleh kepala kelompok kaum itu, pada 15 Juli 1907. Dalam perjalanan pulang itu, ia dituntun ke kampung Ranoitole dan berjumpa dengan Letda Kies dan pasukannya pada tanggal 18 Juli 1907. Ia disambut gembira oleh Letda Kies serta kepala kampung bersama penduduk di kampung itu seraya melayani mereka dengan santun dan menjamu mereka dengan ramah, sehingga bersedia menerima tawaran untuk menginap di kampung itu.

Sikap santun dan ramah dari penduduk itu menyebabkan pihak pasukan militer Belanda ini sama sekali tidak mencurigai dan menduga akan adanya rencana penumpasan terhadap kehadiran mereka. Pada tanggal 19 Juli, Istana Matandau tampak ramai, karena para lelaki potensial telah berkumpul. Para prajurit KNIL mulai sibuk mencatat nama-nama mereka untuk tugas kerja rodi. Sementara para perempuan tampak sibuk menyediakan hidangan jamuan makan siang. Dalam kesibukan itu, tiba-tiba Raja Marunduh Datu ri Tana meneriakkan pekikan "*hio*" dan pekikan itu disambut dengan tabuhan genderang perang secara serentak oleh rakyat yang berada di Matandau, seraya menghunus pedang atau parang masing-masing sambil menebas prajurit Belanda, hingga semuanya tewas dan senjata mereka diambil. Lie Tiang Ang, juru bicara pemerintah Belanda yang luput dari pembantaian pemberani Mori adalah berkat bantuan dari salah seorang putera raja. Ia mencegah rakyat yang mau membunuhnya dengan menyatakan bahwa juru bicara itu tidak terlibat dalam kasus penghinaan terhadap raja. Namun demikian ia tidak dilepaskan untuk pergi melainkan ditahan sementara di istana kerajaan. Penahanan itu sesungguhnya bukan hanya pertimbangan keselamatannya, tetapi

untuk menyampaikan perintah pemerintah kolonial kepada penguasa Mori.

<sup>29</sup> Lie Tiang Ang adalah seorang pedagang keturunan Cina yang bergiat di Mori. Ia fasih berbahasa Belanda sehingga selalu digunakan sebagai juru bicara dan duta

juga untuk menghindari tersebarnya berita pembunuhan personil militer pemerintah Hindia Belanda itu.

Sebagai kenangan atas peristiwa yang heroik itu, kini peristiwa tersebut diabadikan pada monumen Towinangku yang terletak di desa Tinompo kecamatan Lembo.

Setelah insiden ini, para pemberani melanjutkan perjalanan ke Renaitole dan pada tanggal 21 Juli mereka berduyun-duyun memasuki kampung itu. Pada saat itulah, kepala kampung datang menghadap kepada komandan pasukan dengan santun dan ramah menyatakan bahwa para lelaki potensial yang datang itu ingin mendaftar menjadi tenaga kerja rodi secara sukarela. Oleh karena itu dimohon dapat pindah ke rumah yang baru, yang lebih

memadai untuk digunakan sebagai markas sementara, sambil mendata lelaki potensial untuk kerja rodi. Tawaran itu diterima dan komandan militer langsung memerintahkan kepada prajurit dan strapon untuk berpindah ke rumah yang baru, yang terletak di ujung kampung. Dalam proses berpindah itu, tiba-tiba terdengar pekikan *hio*, dan pekikan itu disambut serentak oleh seluruh penduduk dengan tabuhan genderang perang sambil menghunus pedagang atau parang yang dibawa masing-masing dan membantai semua prajurit dan strapon, hingga semuanya tewas, kecuali salah seorang strapon yang meskipun telah terluka parah berhasil meloloskan diri. Semua persenjataan mereka diambil oleh para *mia mota'u*.

Peristiwa Renaitole ini kemudian diabadikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membangun satu monumen peringatan yang dikenal sebagai "**Monumen Kolonodale**" didirikan di kota Kolonodale. Pada prasasti monumen itu tertulis: "Untuk mengenang: H.W. Matthes, Letnan Satu Infantri, B.E. Kies, Letnan Dua Infantri, dan pasukan patroli mereka, yang diserang dan gugur di daerah ini pada 21 Juli 1907". Monumen peringatan gugurnya para KNIL tersebut sebagai bukti perlawanan rakyat Wita Mori yang dipimpin Raja Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe i Wulanderi, telah diratakan dengan tanah sehingga tidak berbekas lagi, padahal Monumen Kolonodale memiliki arti sejarah yang sangat tinggi. Lokasi tempat monumen itu dulu berdiri kini menjadi daerah pasar utama tradisional di kota Kolonodale.

Tindakan pembalasan atas penghinaan yang dilakukan oleh pasukan patroli itu berakibat pemerintah Hindia Belanda menderita korban jiwa yang banyak. Korban jiwa dari dua insiden



Monumen Towinangku di desa Tinompo, Kecamatan Lembo. Koleksi pribadi: Murdan U. Marunduh, Jakarta (hak cipta 2008).



Monumen Kolonodale: Pada plakat yang terbuat dari tembaga tertulis:

TER NAGEDACHTENIS AAN  
solden H. W. MATTHES  
1e LUITENANT DER INFANTERIE  
B. E. KIES  
2e LUITENANT DER INFANTERIE  
EN HUNNE PATROUILLES  
OP DEN 21en JULI 1907 ALHIER OVERVALLEN  
EN GESNEUVELD

Terjemahan: Untuk mengenang H. W. Matthes, Letnan Satu Infantri, B. E. nagniolib asb / Kies, Letnan Dua Infantri dan para anggota patroli mereka yang telah diserang dan gugur di daerah ini pada 21 Juli 1907.

itu, secara rinci, sebagai berikut: 2 orang perwira (Lettu Matthes dan Letda Kies), 2 orang sersan, 1 orang kopral, 8 orang prajurit berkebangsaan Eropa, 21 orang prajurit bumiputera, dan 10 orang strapan. Jumlah kese-

luruhan dari korban adalah 44 orang: 34 orang KNIL dan 10 orang strapan. Selain itu korban jiwa, tentara Belanda juga kehilangan 28 pucuk senjata dan sejumlah amunisi.<sup>30</sup>

Peristiwa penyerangan dan pembantaian

<sup>30</sup> Baca: Kolonodale, "Monumentenserie Kolonodale" (foto coppie), hal. 1074; bandingkan dengan: Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 14-15. Menurut Hegener korban peristiwa itu adalah: 2 orang perwira, 9 orang prajurit

Eropa, 22 orang prajurit bumiputera, dan 10 orang strapan (total 43 orang). Senjata yang dirampas rakyat Mori itu sebanyak 28 pucuk senjata karabin M95.

pasukan patroli Belanda itu akhirnya dapat diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Strapan yang luput dan peristiwa pembantaian itu berhasil melarikan diri ke Kolonodale dan melaporkan peristiwa pembantaian itu. Peristiwa itu oleh aparat pemerintah kolonial dipandang sebagai pernyataan perang Kerajaan Mori terhadap pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, disamping bersiaga dari kemungkinan penyerangan ke Kolonodale, peristiwa itu juga segera dilaporkan kepada kontrolir di Poso dan Asisten Residen di Donggala. Para pejabat pemerintah kolonial itu selanjutnya meneruskan berita yang sangat mengemparkan itu kepada atasan mereka di Manado dan Batavia.

Sementara di pihak Kerajaan Mori, lolosnya seorang strapan dipandang akan mempercepat tersiarnya berita pembantaian itu kepada pemerintah Hindia Belanda, itu berarti pemerintah kolonial Belanda akan segera mengirim pasukan ekspedisi militer untuk menghukum pemerintah Kerajaan Mori. Oleh karena itu pihak pemerintah kerajaan langsung mengundang *bonto*, *karua*, para *mokole*, para *mia mota'u*, dan para *tadulako* untuk berkumpul di istana Matandau. Pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan persiapan dalam menghadapi serangan ekspedisi militer Hindia Belanda, yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Dalam pengaturan taktik dan strategik menghadapi perang yang diperkirakan pasti akan terjadi itu, disepakati untuk mengosongkan benteng pertahanan di Matandau, karena

keadaan wilayah ini telah diketahui oleh pihak militer Belanda, dan kurang strategik sebagai kubu pertahanan. Oleh karena itu, atas tawaran dan izin dari *mia mota'u* Wulanderi dan dukungan dari para pejabat kerajaan, Raja Mori dan kerabatnya serta para *tadulako* dan pemberaninya bersedia pindah ke Wulanderi, dan menjadikannya benteng pertahanan terakhir. Untuk melindungi benteng pertahanan itu, raja menetapkan serta mempersiapkan satu benteng pertahanan terdepan, yaitu Benteng Tokialangkai di daerah Paantobu.<sup>31</sup> Pada jalan masuk ke setiap benteng itu dipasang ranjau (*tilombu*)<sup>32</sup> untuk menghalangi gerak maju pasukan musuh.

Jika tindakan Letda Kies dipandang telah membuat aib kekuasaan Raja Marunduh Datu ri Tana, maka pada gilirannya keputusan Raja Marunduh Datu ri Tana untuk menyerang dan membunuh pasukan patroli Belanda juga dipandang aib bagi kekuasaan pemerintah Belanda di Batavia. Itulah sebabnya ketika berita peristiwa itu diketahui dengan segera pemerintah kolonial mengirim tiga brigade pasukan elitnya yang lebih dikenal dengan sebutan marsose (*marschaussee*) dibawah pimpinan Kapten Krapers. Masing-masing brigade terdiri dari 18 orang marsose, sehingga total seluruhnya adalah 54 orang marsose. Brigade marsose itu tiba di Bungintimbe pada tanggal 3 Agustus 1907 dengan tugas utama adalah membalas dendam atas penyerangan dan pembunuhan pasukan patroli Belanda dan menaklukan serta menguasai Kerajaan Mori.

Ketika tiba di Bungintimbe, sisa pasukan

---

<sup>31</sup> Y.S. Tempali, "Perang Wulanderi", (Kolonodale: makalah, 1977), hal. 4. Baca juga: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 217-218; Romus M Kalaena, "Perang Wulanderi (Agustus 1907)", (Palu: Skripsi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, 1995), hal. 36-37. Dalam dua sumber yang disebut terakhir menyebut Benteng Paantobu menggantikan penyebutan

Benteng Tokialangkai.

<sup>32</sup> Ranjau atau *tilombu* orang Mori itu berbentuk lubang-lubang rahasia yang lebar; pada dasar lubang itu dipasang mata tombak beracun, dan pada permukaan lubang itu ditutup dengan daun-daunan atau rumput untuk mengelabui musuh agar terjebak pada lubang ranjau itu.



Korps Marsose (*marschaussee*) Palu, 1918. Marsose beroperasi dalam kesatuan brigade yang terdiri dari 20 orang sedadu dan dipimpin oleh seorang sersan Belanda. Dalam operasinya, pasukan ini hanya berjalan kaki dan korps ini bersifat mandiri. Kebanyakan anggota marsose yang direkrut berasal dari Ambon dan Jawa.

yang berada di Kolonodale menginformasikan bahwa Raja Mori telah memindahkan benteng pertahanannya ke Wulanderi. Sementara pertahanan terdepan berpusat pada benteng Tokialangkai di Paantobu. Untuk dapat mengetahui informasi menyangkut pertahanan terakhir, pasukan marsose itu diantar oleh Kapitan Mahide dan Maradi menuju ke Ngusumbatu, karena diketahui bahwa Mokole Kamesi, jauh sebelum peristiwa ini, telah menyatakan memihak kepada pemerintah Hindia Belanda. Ketika pasukan itu tiba, diberitahukan bahwa Mokole Kamesi telah mengungsi ke Togo ketika mendengar berita tentang kedatangan ekspedisi militer itu. Kapten Krapers langsung memerintahkan kepada pejabat *kemokolean* agar segera memanggil pulang Mokole Kamesi. Ketika ia datang, komandan marsose

itu langsung memerintahkan untuk mengibarkan bendera putih tanda takluk. Setelah itu mendesaknya agar bersedia menjadi penunjuk jalan ke Benteng Wulanderi, tanpa melalui daerah dimana terletak Benteng Tokialangkai (Paantobu).

Mokole Kamesi bersama Abu (pengawal pribadinya) akhirnya tampil menjadi penunjuk jalan menemani Kapiten Mahide dan Maradi. Mokole Kamesi sesungguhnya merasa enggan untuk ikut sebagai penunjuk jalan karena kelak dapat dipandang sebagai penghianat terhadap kerajaan. Tekanan psikologis itu menyebabkan ia menderita diare dalam perjalanan sehingga diizinkan oleh komandan marsose untuk kembali ke Ngusumbatu, dan sebagai pemandu jalan ditunjuklah Abu sebagai pengganti. Dalam perjalanan itu, pasukan marsose men-

dapat serangan yang sengit dari pasukan di Benteng Duake pada tanggal 16 Agustus 1907. Kubu pertahanan Duake ini sesungguhnya kubu pertahanan yang dibangun untuk melindungi benteng Wulanderi. Namun pasukan yang berada di benteng ini tidak berhasil memukul mundur penyerang, bahkan benteng itu dapat direbut pasukan ekspedisi militer Belanda. Seluruh bangunan dalam benteng itu dibumi-hanguskan, dengan maksud dapat mempengaruhi moril pasukan pertahanan di benteng utama agar mau menyerah.

Pengintaian yang dilakukan mengisyaratkan bahwa benteng utama (benteng Wulanderi) mungkin telah dikosongkan. Juga tidak terlihat bendera putih sebagai tanda pernyataan menyerah. Usaha untuk pengintaian lebih lanjut, untuk sementara dihentikan karena hari telah berganti senja. Oleh karena itu pasukan diistirahatkan dan bermalam di Kansiwela. Menurut rencana, pengintaian lebih lanjut akan dilaksanakan besok untuk merebut benteng itu dan memaksa penguasa Mori menyatakan takluk dan menyerahkan kedudukan kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda.

Ketika pasukan ekspedisi telah merebut Benteng Duake, maka dipastikan sasaran penyerangan berikutnya adalah Benteng Wulanderi. Oleh karena itu raja memerintahkan agar semua penduduk yang tidak termasuk pasukan perang (orang tua-tua, perempuan dan anak-anak) mengungsi lewat pintu belakang. Raja dan pasukan perang saja yang bertahan dan berjuang melawan musuh. Pada barisan depan telah siap pasukan Wulanderi yang dipimpin oleh Tadulako Ladadena dan Limbambati. Sementara pada barisan pendukung telah siap pasukan Petasia yang dipimpin oleh Tadulako Mangoli, Tandondo, dan Mponoi.<sup>33</sup>

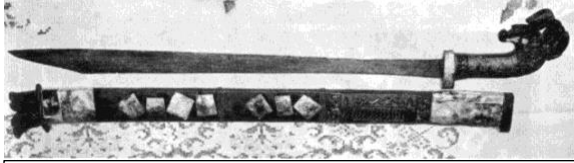
Sementara raja dan para *tadulako* lainnya yang datang dari berbagai kelompok kaum, antara lain: dari Pada (Tadulako Tolija Bangkuwali), dari Watu (Tadulako Antila), dari Kalae (Tadulako Tandoapu dan Manggede) dan dari Puuntana (Tadulako Kampua) menjadi barisan pertahanan terakhir.

Pertempuran seru di benteng Wulanderi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1907. Ketika Ladadena melihat pasukan musuh bergerak ke arah benteng untuk melakukan pengintaian, langsung ia melepaskan tembakan meriam. Tembakan itu mengagetkan pasukan marsose, karena diduga benteng telah dikosongkan. Namun karena pasukan marsose sangat terlatih, maka dengan segera mereka mengatur posisi dan membalas serangan itu, sambil bergerak maju. Sesungguhnya persenjataan pasukan pertahanan Kerajaan Mori cukup memadai, memiliki meriam putar buatan Inggris, karabin M95 dan sejumlah jenis senapan lainnya, namun disayangkan mereka tidak memiliki ketrampilan yang memadai dalam menggunakan persenjataan tersebut. Oleh karena itu dengan mudah pasukan marsose melumpuhkan pertahanan mereka. Satu demi satu pasukan pertahanan barisan depan dan barisan pendukung gugur dalam medan perang. Berita itu mendorong Raja Marunduh Datu ri Tana mengambil senjatanya, diikuti oleh putera-puteranya dan para *tadulako* lainnya, untuk maju menyerang lawan. Ketika semakin terdesak sementara beberapa puteranya telah tertembak, ia perintahkan kepada puteranya yang masih hidup, Owolu Marunduh, untuk mengungsi ke Benteng Tokialangkahi (Paantobu), karena ia ingin berperang hingga

---

<sup>33</sup> Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 218; baca juga: Romus M. Kalaena, *op.cit.*, hal. 37; Y.S. Tempali, *op.cit.*, hal. 4.





Pedang Mokeranga (Haus Darah): Salah satu pedang andalan yang digunakan oleh Mokole Marunduh Datu ri Tana Raja Mori XI (1870-1907) ketika berperang melawan Kompeni Belanda. Koleksi pribadi: Ny. Hosana Sarungallo-Marunduh, Kolonodale.

titik darah penghabisan untuk membinasakan pasukan Belanda.

Pada waktu tengah hari, sudah tidak terdengar lagi tembakan dari dalam benteng. Namun demikian, dengan sangat waspada pasukan marsose itu bergerak maju, karena khawatir penghentian tembakan itu hanya merupakan suatu tipu muslihat. Namun ternyata, ketika memasuki benteng itu, tampak bahwa pasukan pertahanan di semua lini telah gugur. Diantara yang gugur itu terlihat satu jenazah yang gagah dan tinggi serta kekar berseragam hitam dan memakai destar. Juru bicara Kapitan Mahide dipanggil untuk mengidentifikasi jenazah itu, Kapitan Mahide menyatakan bahwa dia adalah jenazah Raja Marunduh Datu ri Tana, dan jenazah yang terbaring di sampingnya adalah putera-puteranya, yaitu: Lawolio, Wuaweu, dan Mponoi. Raja Marunduh Datu ri Tana gugur dalam baktinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsanya.

Berita kematian Raja Mori itu menimbulkan duka yang teramat dalam bagi rakyat Mori.

Kematian raja menjadi titik terlemah semangat perjuangan rakyat Mori untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Mereka dirundung duka dan berkabung, sehingga Owolu Marunduh sulit membangkitkan semangat para pejuang Paantobu untuk meneruskan perlawanan. Atas usul dan saran Mokole Mpalili dan para *tadulako*, maka dikibarkan bendera putih sebagai tanda pernyataan menyerah. Hal yang sama juga dengan daerah-daerah pertahanan lainnya. Itulah sebabnya pasukan ekspedisi itu menyatakan bahwa seluruh wilayah kerajaan telah berhasil ditaklukan dan dikuasai pada 20 Agustus 1907. Oleh karena raja gugur dalam perang, maka tuntutan ganti rugi biaya perang diembankan kepada setiap laki-laki pejuang Mori untuk membayar satu ringgit (dua setengah gulden) atau satu sarung palekat (*lipa*), bagi yang tidak mampu diwajibkan melapor untuk menjadi pekerja rodi.<sup>34</sup>

Perang Mori Kedua (1907)<sup>35</sup> yang bermula pada penyerangan terhadap pasukan patroli Belanda di Matandau pada 19 Juli 1907 dan di Ranoitole pada 21 Juli 1907 berhasil menewaskan 34 orang personil militer dan 10 orang strapan. Dalam serangan balasan pasukan militer Belanda pada Agustus 1907 berhasil menewaskan lebih dari 100 orang pejuang Mori, termasuk Raja Marunduh Datu ri Tana dan tiga orang puteranya. Sementara dari pihak pasukan marsose dilaporkan 8 orang mengalami luka-luka.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Y.S. Tempali, *op.cit.*, hal. 6; baca juga: Romus M. Kalaena, *op.cit.*, hal. 44; Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 219; Hasan, dkk menyebut pembayaran ganti rugi hanya dengan satu kain palekat.

<sup>35</sup> Sumber-sumber lokal menyebut peristiwa ini Perang Wulanderi. Sesungguhnya pertempuran Wulanderi adalah puncak perlawanan rakyat Mori terhadap pasukan militer pemerintah kolonial. Perang ini melibatkan seluruh rakyat Mori bangkit melawan

pemerintah kolonial yang ingin menguasai dan menjajah, dan berawal pada penyerangan dan pembunuhan pasukan patroli Belanda di Matandau, 19 Juli 1907 dan berakhir dengan pertempuran di Wulanderi pada 17 Agustus 1907. Hasil akhir dari perang ini adalah Kerajaan Mori menjadi daerah taklukan pemerintah Hindia Belanda, oleh karena itu perang ini saya sebut sebagai Perang Mori kedua.

<sup>36</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 15.

Gugurnya Raja Marunduh Datu ri Tana sebagai pahlawan kesuma bangsa pada 17 Agustus 1907, merupakan titik puncak perjuangan mempertahankan dan membela kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Mori. Ia adalah pemegang kendali kekuasaan Kerajaan Mori yang merdeka dan berdaulat yang terakhir. Tokoh yang selama hidupnya senantiasa menentang dan berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan dan rakyatnya. Meskipun pemerintah kolonial berhasil memecahbelah potensi kekuatan pertahanan dalam kerajaannya, ia tetap pada pendiriannya untuk menentang kehadiran kekuasaan kolonial dan berpegang teguh pada



<sup>37</sup> Y.S. Tempali, *op.cit.*, hal. 6; baca juga: Romus M. Kalaena, *op.cit.*, hal. 42. Kalaena mencatat pernyataan

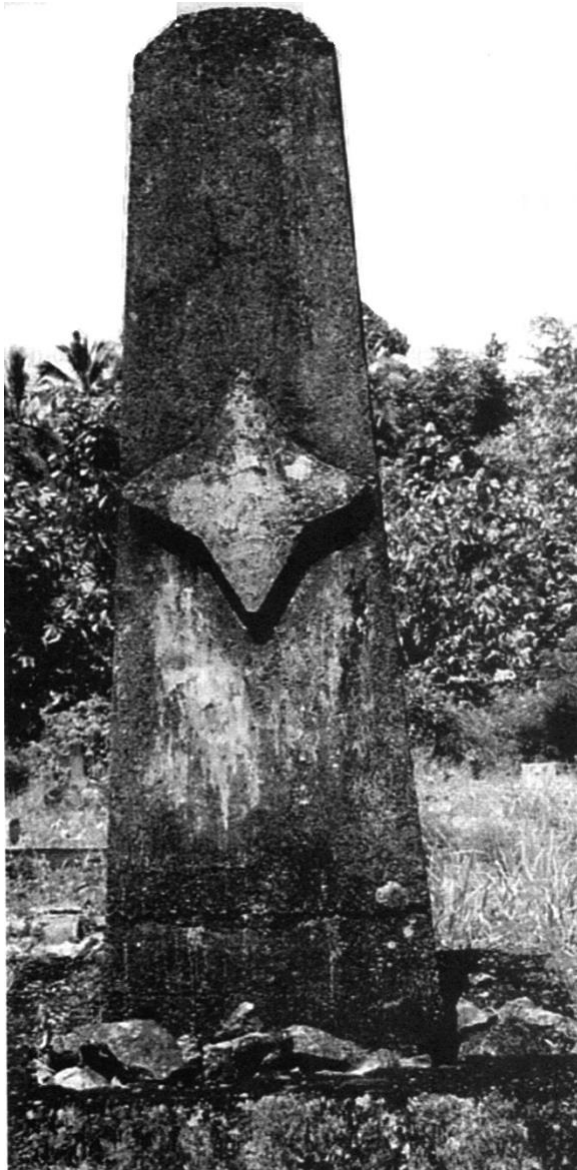
pernyataannya: *mentumba halo'ka aku mon-suka* (bertunaslah arang jika saya beranjak dari sini),<sup>37</sup> artinya, orang akan berbuat sekehendak hati apabila saya menyerah, karena itu saya bertekad berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsaku. Sikapnya yang mulia itu baru disadari oleh kelompok yang menentangnya akibat adu-domba pemerintah kolonial ketika mereka menyaksikan perlakuan pasukan patroli Belanda terhadap rakyat yang bekerja rodi dalam pembuatan jalan dan memporakporandakan istana kerajaan. Oleh karena itu mereka berbalik mendukung sepenuhnya perjuangan raja mereka namun sudah terlambat dan tidak mampu mematahkan gairah menjajah pemerintah kolonial Hindia Belanda di tanah Mori. Itulah sebabnya, gugurnya raja mereka telah

Makam Mokole Marunduh Datu ri Tana Raja Mori XI. Makam ini terletak di desa Sampalowo. Di batu nisannya yang terbuat dari marmer hitam terdapat tulisan (inskripsi): Mokole Mori Maroendoeh Datoe ri Tana, Tawe ampeteaa i inia Woelanderi a woela Agustus 1907 tempono peteaa ka komponia walanda. Terjemahan: Raja Mori Marunduh ti Tana gugur dalam pertempuran di desa Wulanderi pada bulan Agustus 1907 ketika berperang melawan Kompeni Belanda. Batu nisan ini dibuat oleh seorang Belanda keturunan Jerman bernama Jansleir sebagai tanda hormat atas kepahlawanan Raja Mori XI. Koleksi pribadi: Murdan U. Marunduh.



itu sebagai berikut: *mentumba halo ka aku* (bertunas arang baru saya menyerah).

menimbulkan duka dan luka yang teramat dalam, dan sebagai tanda kehormatan, rakyat menganugerahkan gelar: Mokole Wawa Inia, Tawe I Wulanderi. Dengan demikian Raja Mori XI dikenal sebagai Marunduh Datu Tana, Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi.



Makam Bonto Tamungkulowi di desa Tinompo, gugur dalam Perang Mori kedua, 1907. Koleksi probadi: Murdan U. Marunduh.

## Penataan dan Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial

Perang Mori II adalah perang melawan kebijaksanaan politik penjajahan pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukan dan menjajah seluruh wilayah Indonesia, yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Van Heutzs. Oleh karena itu, setelah penaklukan itu, wilayah kerajaan ini dijadikan bagian dari wilayah pemerintahan langsung (*gouvernement gebied*) dan digabungkan pada wilayah Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden*), yang berpusat pemerintahan di Makassar. Dalam penataan pemerintahan ini, wilayah bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku, dijadikan satu kesatuan pemerintahan yang disebut *Onderafdeling* Pantai Timur Sulawesi (*Onderafdeling Oost-Kust van Celebes*) dari *Afdeling* Luwu. Pemegang kendali pemerintahan *onderafdeling* ini adalah komandan militer yang berfungsi sebagai kontrolir dan berkedudukan di Kolonodale.

Pelaksana pemerintahan sipil oleh pejabat militer itu menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda masih kekurangan pejabat sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Tidak dapat disangkal bahwa penempatan anggota militer itu berkaitan dengan peran yang diemban untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada daerah-daerah yang baru ditaklukan dan memudahkan keinginan untuk melaksanakan aksi perlawanan. Untuk tujuan itu pula, dan dengan pertimbangan kekurangan personil pemerintahan, sehingga kerajaan-kerajaan yang dikuasai itu, sama seperti bekas kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Tengah, diberi status Swapraja (*zelfsbestuur landschap*). Dengan demikian bekas Kerajaan Mori dan Bungku, masing-masing berkedudukan sebagai daerah Swapraja.

Daerah Swapraja Mori dibagi dalam 4

distrik, yaitu distrik: Ngusumbatu, Sampalowo, Kangua, dan Soyo. Kepala pemerintahan distrik disebut "Kepala Distrik" atau Regent (*Regent*). Sementara pemegang kendali pemerintahan swapraja disebut Kepala Pemerintahan Swapraja (KPS). Pembentukan Swapraja pada dasarnya berpatokan pada latar kesejarahan daerah itu sebelumnya dalam bentuk kerajaan, sehingga rakyat umumnya tetap menyebut kepala pemerintahan swapraja itu dengan sebutan raja atau *mokole*. Pada dasarnya raja atau *mokole* adalah pemegang kendali politik dan pemerintahan suatu kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Sementara KPS hanyalah pemegang kendali pemerintahan dari satu bagian wilayah pemerintahan kolonial yang diberi hak otonomi. Hak otonomi itu hanyalah berhubungan dengan pengelolaan secara mandiri sumber pendapatan pemerintah (kas pemerintah sendiri) dari hasil pungutan pajak.

Dalam perkembangan kemudian ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan restrukturisasi pemerintahan pada tahun 1924, *Onderafdeling* Pantai Timur Sulawesi ini dipisahkan dari *Afdeling* Luwu dan dijadikan bagian dari wilayah pemerintahan Keresidenan Manado. Pengalihan wilayah kekuasaan itu berkenan pula dengan pemekaran wilayah *Afdeling* Sulawesi Tengah (*Afdeling* Midden-Celebes) menjadi dua *afdeling* yaitu *Afdeling* Poso dan *Afdeling* Donggala. Wilayah pemerintahan *Onderafdeling* Pantai Timur Sulawesi dijadikan bagian dari wilayah pemerintahan *Afdeling* Poso tanpa merubah komposisi wilayah, kecuali dengan penyebutan baru yaitu *Onderafdeling* Kolonodale.<sup>38</sup>

Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintahan (Lembaran Negara /*Staatblad*

tahun 1938 No. 352). Wilayah pemerintahan luar Jawa dan Madura dibagi dalam tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera (*Gouvernement van Soematra*), Provinsi Kalimantan (*Gouvernement van Borneo*), dan Provinsi Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*). Untuk menata kembali wilayah pemerintahan di wilayah Provinsi Timur Besar, dikeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 24 Pebruari 1940 No. 1437 (Lembaran Negara, 1940 No. 21). Berdasarkan keputusan itu, wilayah Swapraja Mori ditata kembali pada tahun 1942 dan dijadikan tiga distrik, yaitu Distrik Tomata dengan pusat administrasi pemerintahan di Tomata, Distrik Ngusumbatu berpusat di Tinompo, dan Distrik Petasia berpusat di Kolonodale. Yang diangkat menjadi kepala Distrik Tomata adalah Pirau Marunduh, Kepala Distrik Ngusumbatu adalah Makita Marunduh, dan Kepala Distrik Petasia adalah Mainda Rumampuo.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaan pemerintahan, setelah penaklukan, sama seperti daerah-daerah lainnya, diangkat komandan pasukan penaklukan menjadi pelaksana tugas pemerintahan. Oleh karena itu disebut pemerintahan militer-sipil. Dalam kedudukannya, ia adalah komandan pasukan KNIL yang ditempatkan di *Onderafdeling* Pantai Timur Sulawesi (kemudian disebut *Onderafdeling* Kolonodale), dan sekaligus menjabat sebagai kontrolir, kepala pemerintahan *onderafdeling*. Umumnya, setelah satu periode hingga dua periode pemerintahan militer-sipil, digantikan dengan pejabat sipil untuk urusan pemerintahan. Namun demikian pelaksanaan pemerintahan di *onderafdeling* Kelonodale ini ada pengecualian sebab hingga periode akhir pemerintahan kolonial tetap dipimpin oleh komandan KNIL yang ditempat-

<sup>38</sup> *Afdeling* Poso terbagi atas tiga *onderafdeling* yaitu *Onderafdeling* Tojo, *Onderafdeling* Pamona, *Onderafdeling* Lore dan Una-una, sementara *Onderafdeling*

Kolonodale meliputi wilayah bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku. Baca: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 188.  
<sup>39</sup> Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 193.



MOKOLE Ede (KAMESI) of MORI (1907-1928)  
 based on photograph of Mokole Ede Kamesi, a local leader, standing on the deck of a Dutch ship.

Mokole Ede Kamesi Raja Mori XII (1907-1928) di atas sebuah kapal laut Belanda. Koleksi Pribadi: Donald P. Tick, Pusat Dokumentasi Kerajaan-kerajaan di Indonesia, Vlaardingen, Belanda.

kan di daerah ini. Hal ini sesungguhnya berkaitan dengan kekuatiran kemungkinan munculnya kembali pergolakan perlawanan rakyat di wilayah ini, selain itu erat berkaitan dengan kekurangan personil pejabat sipil untuk menduduki jabatan kontrolir.

Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan pola hubungan yang tidak setara (*asymmetric relationship*). Oleh karena dalam hubungan kekuasaan terkandung unsur pimpinan (*direction*) atau apa yang oleh Max Weber disebut "pengawasan yang mengandung perintah (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara pemerintah (*gouvernements*) dan yang diperintah (*gouvernes*). Sehubungan dengan itu diperlukan pengungkapan bagaimana pemerintah menghadapi yang diperintah dalam penyelenggaraan pemerintah dan bagaima-

mana yang diperintah menjalankan perintah di hadapan pemerintah.

Jika diperhatikan pelaksanaan hubungan kekuasaan, tampak bahwa sejak awal pihak militer telah mengambil tindakan untuk mencegah munculnya kembali perlawanan rakyat setelah penaklukan dengan memaksa semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang pindah dan menetap di Kolonodale, seperti putera Raja Marunduh Datu ri Tana, Owolu Marunduh dan para Mokole Mpalili. Rakyat memandang penempatan mereka di Kolonodale itu merupakan tindakan pengasingan. Bagi pihak pemerintah militer, penempatan mereka di tempat yang baru itu memudahkan pengawasan terhadap aktivitas mereka untuk mencegah mereka bergiat membangkitkan semangat perlawanan.

Pada pihak lain pemerintah militer-sipil itu bergiat mengangkat tokoh-tokoh lokal yang pernah mendukung kebijaksanaan penaklukan dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, tampak bahwa calon-calon pengganti Raja Marunduh Datu ri Tana yang diprediksi oleh Kruyt, seperti yang telah diungkapkan terdahulu, tidak seorangpun yang dipilih untuk menjabat KPS (Raja Swapraja). Yang diangkat menjadi Raja Swapraja setelah penaklukan adalah Mokole Ede Kamesi (1907-1928) bekas Mokole Ngusumbu. Hal itu tentu berkaitan dengan jalinan hubungan yang pernah dilakukan dengan Asisten Residen Ternate dan sikap netralnya dalam Perang Mori II (1907). Pusat pemerintahan Swapraja ini berada di Sampalowo.

Kebijakan politik itu ternyata berhasil menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah swapraja Mori, sehingga tidak menimbulkan reaksi perlawanan rakyat terhadap kedudukan pemerintah kolonial. Selain itu juga pemerintah kolonial memberikan peluang dan dukungan yang besar kepada para pejabat pemerintah bumiputera, baik raja maupun regen (Kepala



Distrik) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penduduknya berdasarkan adat kebiasaan setempat, tanpa campurtangan pemerintah kolonial. Persoalan yang secara khusus ditangani oleh pemerintah di Kolonodale adalah kerjawajib (*herendiensten*). Semua orang dewasa harus melaksanakan kerjawajib yang ditetapkan 26 hari setiap tahun. Bagi yang tidak ingin melaksanakan tugas itu diwajibkan membayar setiap hari kerjawajib sebanyak fl. 0,25 (dua puluh lima sen gulden) atau fl. 6,50 (enam gulden lima puluh sen) per tahun wajibkerja.

Kegiatan kerjawajib itu umumnya menyangkut pembuatan prasarana jalan dan jembatan. K. Riedel, seorang penginjil (*zendeling*) berkebangsaan Jerman, utusan dari lembaga Besler Mission Society (BMS), mengungkapkan kegiatan kerjawajib di Mori pada periode kontrolir militer-sipil Letnan G.J. Reinderhoff (1934-1938). Ia menyatakan:

*Deze controleur (Reinderhoff, pen.) is nogal dictatorisch in zijn optreden geweest. Wel schijnt het hier, zoals overal in de wereld, te zijn, dat wie de macht heeft ook het recht heeft om te doen en te laten zoals het hem behaagt. Het blijkt hier telken weer dat de*



<sup>40</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 22. Pengungkapan keadaan pelaksanaan kerjawajib itu merupakan suatu reaksi protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan penduduk.

*Inheemschen eigenlijk geen recht hebben. De mensen worden in de planttijd tot koeliediensten gedwongen.*

Kontrolir ini (Reinderhoff, pen.) sering bertindak agak diktator. Disini tampak, seperti yang terjadi dimana-mana di dunia, bahwa orang yang memiliki kekuasaan juga memiliki kewenangan untuk bertindak atau tidak ber-tindak seperti yang dikehendaki. Keadaan di sini berulang kali menunjukkan bahwa penduduk bumiputera sesungguhnya tidak memiliki kewenangan. Orang-orang dipaksa melakukan kerja paksa pada waktu musim tanam. (pent: ELP)<sup>40</sup>

Meskipun tampak bahwa kegiatan kerjawajib itu memberatkan beban penduduk namun tidak terjadi gerakan protes ataupun perlawanan terhadap kewajiban kerjawajib itu. Menurut informasi, hal itu disebabkan karena rakyat menyadari pentingnya perasarana jalan dan jembatan, dan menikmati manfaat dari pekerjaan itu. Meskipun kontrolir ini dipandang agak diktator, namun dialah yang telah merealisasikan prasarana jalan poros Kolonodale-Poso yang dapat dilalui kendaraan mobil sepanjang 243 km.

Pada dasarnya, berdasarkan laporan pemerintah, semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan berlangsung dengan baik tanpa tindakan protes ataupun perlawanan, kecuali tindakan-tindakan dari aparat pemerintah

Istana Raja Mori di Kolonodale. Mulai ditempati untuk pertama kali pada 1923 oleh Mokole Ede Kamesi.

Ia mengharapkan pemerintah tidak mengorganisasikan kegiatan kerjawajib apabila musim tanam tiba, karena penduduk sibuk menyiapkan lahan pertanian mereka.



Mokole Owolu Marunduh Raja Mori XIII (1928-1950). Koleksi pribadi: Murdan U. Marunduh, Jakarta. (hak ciptah 2008).

kolonial yang tertentangan dengan tata susila rakyat Mori.<sup>41</sup> Dalam sejarah pemerintah-an kolonial di Mori tercatat hanya satu kali terjadi peristiwa berdarah, yaitu pada tahun 1921. Satu kesatuan pasukan patroli KNIL diserang dan dibunuh seluruhnya oleh pen-duduk dekat Tomata. Tindakan rakyat itu tidak mengundang reaksi penghukuman terhadap para pelaku penyerangan dan pembunuhan itu, karena bukti-bukti menunjukkan bahwa anggota pasukan patroli itu bersalah karena melakukan perbuatan amoral terhadap perempuan-perempuan Mori. Oleh karena itu tidak ada pasukan ekspedisi yang dikirim ke Tomata

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 17. Dinyatakan bahwa tidak pernah terjadi benturan dengan pihak pemerintah. Bahkan putera Raja Marunduh Datu ri Tana, Owolu Marunduh,

untuk menghukum rakyat yang telah menyerang membunuh pasukan patroli itu.

Hal itu berkaitan dengan kebijakan politik untuk tidak mencampuri pelaksanaan kekuasaan yang diembankan kepada pelaksana pemerintahan bumiputera oleh pejabat bumiputera, yang diharapkan dari mereka adalah ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perin-tah, khususnya yang berkaitan dengan penye-raphan tenaga kerjawajib untuk pembuka-an jalan dan pembuatan jembatan. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini juga dijelaskan kepada rakyat sehingga mereka menyadari pentingnya pekerjaan itu, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga demi kepentingan mereka juga. Kesadaran itu juga pada gilirannya mendorong mereka mengerjakan dengan senang hati, tanpa protes dan perlawanan. Kenyataan itu pula yang mendasari tidak munculnya tokoh-tokoh politik atau masyarakat yang bergiat membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Ketertiban dan ketenteraman di daerah ini mendorong pemerintah mengupayakan pemin-dahan pusat pemerintahan swapraja dari Sampalowo ke Kolonodale. Hal itu dimaksud-kan untuk mempermudah hubungan antara pemerintah kolonial (Kontrolir) dengan Raja Swapraja. Rencana itu diterima dan disetujui, sehingga pada tahun 1923, Mokole Ede Kamesi pindah dari Sampalowo ke Kolonodale. Untuk keperluan pindah tersebut diberikanlah sebuah rumah yang dibangun beberapa ratus meter dari rumah dinas Kontrolir. Rumah yang diberikan itulah yang kemudian menjadi **Istana Kerajaan Mori** sebagai tempat kediaman raja sampai sekarang ini.

Satu hal yang tampak tidak dapat diikuti oleh pemerintah kolonial adalah periode

dinyatakan berperilaku baik terhadap pemerintah Hindia Belanda di Kolonodale.

pemerintahan seorang penguasa. Jika pada periode kerajaan, pergantian kepala pemerintahan baru dilaksanakan apabila raja telah meninggal, maka pada periode swapraja, pemegang kendali pemerintahan dapat diganti apabila dipandang sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas karena usia. Itulah sebabnya, ketika Mokole Ede Kamesi telah lanjut usia, pemerintah memberhentikan dengan hormat pada tahun 1928. Pemerintah kolonial kemudian menunjuk dan melantik Owolu Marunduh (1928-1950) menjadi Raja Swapraja Mori dan menempati Istana Kerajaan Mori di Kolonodale.

Pengangkatan dan penobatan Owolu Marunduh sesungguhnya merupakan strategik politik pemerintah kolonial memulihkan hubungan kekuasaan antara pemerintah kolonial dan tokoh-tokoh lokal yang terlibat dalam Perang Mori II. Pilihan kebijakan itu juga berkaitan dengan sikap para veteran perang yang menunjukkan sikap kerjasama yang baik dengan pemerintah kolonial. Hal itu juga ditunjukkan oleh Owolu Marunduh dengan sikap menerima jabatan itu, meskipun dalam kedudukannya berada dibawah pemerintahan kontrolir. Penerimaan jabatan itu berhubungan dengan kebijakan politik pemerintah kolonial yang tetap mempertahankan pola budaya politik lokal. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut pengalihan model pendapatan kerajaan. Bila sebelumnya sumber pendapatan itu bersifat upeti dan pajak perdagangan, maka sekarang bentuk upeti itu diganti dengan kewajiban membayar pajak sebagai sumber pendapatan swapraja, sementara pajak perdagangan dikelola oleh pemerintah kolonial.

Jika disimak laporan dari kontrolir Letnan P.A. Cox (Maret 1938- Maret 1941) menyangkut periode pemerintahan Owolu Marunduh,

tampak bahwa ketertiban dan keamanan terpelihara dengan baik. Cox menyatakan:

*Het inheemse gezag deed het eigenlijk. Buiten Kolonodale was al het bestuur in handen van de plaatselijke bevolking, en ze regelden in principe alles zelf, met uitzondering van de herendiensten. Alle volwassen mannen moesten dat doen. Men accepteerde dat: je had nu eenmal herendiensten. Daar werd je voor opgeropen, en dat deed je dan. Het was voornamelijk voor de bouw van wegen en bruggen, daar hadden ze zelf ook profijt van.*

Sesungguhnya penguasa bumiputera telah melakukan segala persoalan pemerintahan. Semua kegiatan pemerintahan di luar Kolonodale berada dalam kewenangan penduduk setempat, dan pada prinsipnya mereka mengerjakan semuanya, kecuali kerjajawajib. Semua laki-laki dewasa harus melaksanakannya. Mereka menerima (ketentuan) bahwa sekarang setiap orang memiliki kewajiban kerjajawajib satu kali. Oleh karena itu engkau dipanggil, dan wajib melaksanakannya. Kerjajawajib itu terutama diperuntukan bagi pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, dan dalam hal ini mereka sendiri juga menikmati manfaatnya. (pent. ELP).<sup>42</sup>

Selain itu juga dinyatakan bahwa penduduk Mori sangat loyal sehingga dia tidak pernah merasa kuatir apabila melakukan perjalanan keliling di wilayah itu. Ia juga mengungkapkan bahwa selama periode pemerintahannya tidak pernah melakukan urusan pengadilan, kecuali satu kali; itupun atas permintaan kepala kampung. Pelanggaran yang umumnya terjadi me-

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 22.



rupakan persoalan adat sehingga semuanya diselesaikan oleh kepala distrik dan kepala kampung, sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Kegiatan pemerintahan *onderafdeling* dilaksanakan sepenuhnya oleh komandan pasukan KNIL yang ditempatkan di Kolonodale. Umumnya ditempatkan satu detasemen yang terdiri dari tiga brigade yang masing-masing beranggotakan 18 orang dan seorang dokter militer. Dalam menangani detasemen militer ini, ia dibantu oleh seorang sersan mayor, seorang sersan, dan seorang furier berkebangsaan Belanda, sementara anggota militernya adalah tentara bumiputera yang berasal dari Jawa, Timor, dan Ambon. Selain detasemen militer bersama keluarga masing-masing, diperbantukan pula sejumlah strapan dan penduduk lokal yang direkrut untuk membantu urusan pemerintahan dan rumah tangga. Jumlah mereka seluruhnya diperkirakan mencapai 200 orang.

Dalam menangani urusan pemerintahan, komandan militer yang merangkap tugas kontrolir militer-sipil, dibantu oleh seorang asisten pemerintahan. Pada periode Cox, yang menjadi pejabat itu adalah Rob Warouw. Dalam melaksanakan tugas pengadilan (menjadi kepala pengadilan) dibantu juga oleh Raja Swapraja Mori, yang ketika itu adalah Owolu Marunduh. Selain tugas-tugas itu, kontrolir juga melaksanakan tugas-tugas, antara lain: pegawai catatan sipil, syahbandar, agen penyalur garam dan candu, pengelola jalan, kepala penjara, dan pemungut pajak. Menurut Cox,

sebagai kontrolir, ia melaksanakan segala tugas pemerintahan, yang keseluruhannya mencapai sekitar 22 tugas pemerintahan. Semua tugas yang diembankan kepadanya dapat berlangsung dengan baik, karena rakyat Mori cukup loyal, dan semua urusan pemerintahan lokal dapat dikerjakan dengan baik oleh kepala distrik. Para kepala distrik melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan tatanan pemerintahan tradisional yang berdasar pada hukum adat lokal atau tradisi politik lokal.<sup>43</sup>

Kontrolir militer-sipil Cox kemudian digantikan oleh Letnan J.A. De Jong (Maret 1941-Maret 1942).<sup>44</sup> Kontrolir yang baru ini tidak dapat berbuat banyak menyangkut pemerintahan karena dampak dari Perang Dunia II (1938-1945) mendorong Kekaisaran Jepang yang tergolong dalam kelompok Facisme yang berkedudukan di Asia menyatakan Perang terhadap kelompok Sekutu. Perang yang dikobarkan oleh pihak Jepang itu dikenal juga dengan sebutan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Ancaman invasi Jepang itu mendorong pemerintah Hindia Belanda mengorganisasikan kesatuan milisi. Keinginan pemerintah itu mendapat reaksi penolakan dari anggota *Volksraad* yang berhaluan nasionalis, namun demikian rencana itu akhirnya disyahkan oleh dewan itu pada Juli 1941. Hal itu menyebabkan kegiatan yang pertama dan utama dilakukan oleh kontrolir baru ini adalah mengorganisasikan kesatuan milisi untuk persiapan menghadapi invasi dari militer Jepang.

Dalam kondisi gawat perang itu, pemerintah

<sup>43</sup> Baca: *Ibid.*, hal. 21-25.

<sup>44</sup> Kontrolir J.A. De Jong, sesudah penandatanganan piagam penyerahan tanpa syarat oleh Jenderal H. Ter Poorter, Panglima Perang Hindia Belanda, kepada Dai Nippon Teikoku pada 6 Maret 1942 di Kalijati dan penangkapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, W.L. Tjarda van Starkenborg Stachower, pada 8 Maret

1942, masih terus melakukan perang gerilya menentang usaha pendudukan bala tentera Jepang di Mori. Namun dengan penyerahan tanpa syarat (kapitulasi) menunjukkan berakhirnya periode pemerintahan Hindia Belanda, dan awal pemerintahan tentara pendudukan Jepang.

Hindia Belanda merencanakan pergantian pemerintah sipil di Kolonedale. Untuk itu dikirim Letnan Marinir F. Masselink dengan menggunakan pesawat terbang air (*water-vliegtuig*) dan tiba di Poso pada 10 Desember 1941. Namun belum sempat melakukan serah-terima jabatan, pada tanggal 17 Desember, ia mendapat surat tugas baru yang membebaskannya dari tugas menjadi kontrolir di Kolonodale dan menetapkannya menjadi komandan kesatuan wajib militer orang-orang Eropa dan bumiputera Hindia Belanda di Manado.<sup>45</sup> Hal itu berhubungan dengan telah terjadinya agresi militer Jepang pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 1941, dengan mengerahkan 360 pesawat pembom dan kapal torpedo membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawaii). Akhirnya ia tidak ke Kolonodale tetapi meneruskan perjalanan ke Manado.

Kontrolir De Jong, dalam kondisi gawat-perang itu, tidak hanya bergiat mempersiapkan pasukan wajib militer, tetapi juga mengambil kebijakan untuk melindungi rakyatnya. Untuk itu ia perintahkan kepada penduduk membuat lubang-lubang perlindungan agar dapat menyelamatkan diri apabila ada serangan udara dari pihak militer Jepang. Ia juga bergiat membangun sebuah rumah pengungsian di daerah pedalaman dekat dengan kampung Sabanga yang menurut rencana menjadi tempat pengungsian para isteri dan anak-anak anggota militernya, apabila Kolonodale diserang. Selain

itu juga ia memerintahkan untuk menghentikan proses belajar murid-murid di sekolah-sekolah pemerintah yang ada di Kolonodale untuk waktu yang tidak ditentukan, karena situasi gawat perang. Dengan demikian setiap murid dapat kembali berkumpul bersama orang tua atau wali mereka. Hal-hal ini yang dapat dilakukan oleh kontrolir De Jong dalam persiapan menghadapi kedatangan bala tentara Jepang.

## **Perubahan Politik dan Sosial**

Usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Mori akhirnya terealisasi setelah Perang Mori II. Keberhasilan pasukan marsose dalam perang penaklukan ini mengakhiri kedudukan Kerajaan Mori yang merdeka dan berdaulat. Wilayah kerajaan ini menjadi bagian dari wilayah pemerintahan kolonial Belanda, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan tunduk kepada pejabat pemerintah kolonial yang ditempatkan di Kolonodale dengan jabatan kontrolir militer-sipil.

Jabatan kontrolir dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda adalah jabatan terendah yang dijabat oleh seorang pegawai berkebangsaan Belanda.<sup>46</sup> Pejabat pemerintahan ini yang langsung berhubungan dengan kepala pemerintahan wilayah terkecil yang dijabat oleh pegawai bumiputera yang disebut keregenan (*regentschap*) atau distrik (*district*). Kepala distrik atau regen yang menjadi aparat pemerintah bumiputera yang berhubungan dengan kontrolir. Sementara kepala kampung-kepala

mengalami perubahan untuk wilayah luar Jawa dan Madura, karena dijadikan tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, dan Provinsi Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*). Perubahan itu berakibat wilayah pemerintahan yang sebelumnya dipandang sebagai provinsi dan dijabat oleh seorang gubernur berubah status menjadi keresiden (*residentie*) dan kepala pemerintahannya disebut residen.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>46</sup> Struktur kepala pemerintahan wilayah kolonial Belanda di Hindia Belanda secara berurutan adalah: gubernur jenderal (*gouverneur generaal*) untuk wilayah Hindia Belanda, gubernur (*gouverneur*) untuk wilayah provinsi (*gouvernement*), asisten residen (*assistent resident*) untuk wilayah *afdeling*, dan kontrolir untuk wilayah *onderafdeling*. Pada tahun 1938, setelah terjadi reorganisasi pemerintahan,

kampung yang menjadi organ pelaksana pemerintahan terkecil dan berada di bawah regent hanya memiliki hubungan kekuasaan dengan kepala distrik. Umumnya kampung merupakan pemukiman yang terpaut pada kesatuan genealogis sehingga pemerintah kolonial umumnya tidak mencampuri penetapan dan pengangkatan kepala kampung.

Kedudukan raja dan bangsawan kerajaan, setelah penaklukan, umumnya dibebaskan dari tugas pemerintahan setelah dipaksa menandatangani pernyataan pendek yang memuat pernyataan penyerahan kekuasaan dan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Hal itu berlaku juga di wilayah Provinsi Sulawesi dan Daerah Bawahannya, kecuali wilayah yang ditambahkan setelah Ekspedisi militer 1905, yaitu Onderafdeling Pesisir Timur Sulawesi yang meliputi wilayah bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku, karena kesatuan wilayah kerajaan tetap dipertahankan dan diberi status swapraja. Kekecualian itu dipandang telah memicu gerakan perlawanan dari para bekas raja dan bangsawan kerajaan terhadap kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal inilah, pemerintah kemudian memisahkan kembali Onderafdeling Pesisir Timur Sulawesi dari Provinsi Sulawesi dan Daerah Bawahannya, dan menjadikan bagian dari wilayah Keresidenan Manado pada tahun 1924. Pengalihan itu berbarengan dengan perubahan nama menjadi Onderafdeling Kolonodale dan menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Afdeling Poso.

Penataan pemerintahan ini berhasil menciptakan perubahan politik dari dua kerajaan bertetangga yaitu Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku yang sebelumnya diliputi kondisi ketegangan politik akhirnya menjadi satu kesatuan pemerintahan yang tertib dan tenteram. Hubungan genealogis dan kesamaan budaya melalui penyatuan wilayah itu telah

menciptakan kebersamaan dan keutuhan hubungan persaudaraan mereka kembali.

Salah satu kebijakan pemerintah kolonial yang cukup penting dan berhasil membuka cakrawala penduduk dari kehidupan mereka yang sebelumnya dapat dipandang terisolasi dari satu perkampungan dengan perkampungan lainnya adalah kerjawajib. Kebijakan kerjawajib yang diterapkan umumnya berhubungan dengan pembuatan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan pusat pemerintahan Kolonodale sebagai pusat administrasi swapraja (Mori dan Bungku), distrik dan kampung-kampung dalam wilayah Swapraja Mori dengan pusat pemerintahan *afdeling* di Poso. Pembuatan prasarana jalan raya dan jembatan itu bukan hanya memudahkan dan meningkatkan intensitas jaringan hubungan antara pusat-pusat administrasi pemerintahan tetapi juga telah membuka keterisolasi dan ketertutupan konsentrasi pemukiman penduduk dalam wilayah Mori.

Jika diperhatikan laporan Kruyt tentang prasarana antara daerah-daerah konsentrasi pemukiman penduduk di daerah ini tampak sangat bersahaja dan dapat dikatakan tanpa perencanaan untuk jalur jaringan hubungan antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya atau antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah kekuasaan. Prasarana yang umum digunakan sebelumnya adalah aliran sungai dan jalan setapak. Jalan-jalan setapak yang ada sebelumnya juga sangat sulit dilalui karena berlumpur dan disana-sini terhalang oleh akar-akar pohon sehingga sangat sukar untuk menggunakan sarana angkutan kuda, kecuali berjalan bagaikan iringan orang berbaris, dan pada titik-titik tertentu harus menyeberangi sungai. Sarana perhubungan dengan jalan setapak ini juga menyimpan misteri bahaya, baik oleh serangan binatang buas maupun sergapan dari lawan ataupun

kelompok yang mengayau. Itulah sebabnya bila seorang penduduk Mori ingin melakukan perjalanan ke kampung yang lain selalu melengkap diri dengan senjata pedang dan tombak.

Kebijakan pembuatan jalan raya itulah salah satu penyebab awal sehingga menimbulkan persoalan yang mengantar Raja Marunduh Datu ri Tana dan rakyatnya melakukan serangan dan pembunuhan terhadap pasukan patroli Belanda yang mengawali terjadinya Perang Mori II. Namun dalam perkembangan kemudian tampaknya rakyat menyadari arti dan manfaat dari pekerjaan itu bagi kepentingan mereka. Mereka dapat dengan mudah dan aman melakukan perjalanan ke kampung-kampung lain dalam jalinan hubungan sosial, kekerabatan, dan kultural, juga memudahkan mereka untuk mengangkut produksi mereka yang ingin diperdagangkan ke sentra-sentra perdagangan. Selain itu dengan tersedianya prasarana jalan raya itu memudahkan gerak patroli militer untuk menjamin ketenteraman dan keamanan sehingga dapat menekan dan memberantas tindak kejahatan kriminal terutama tradisi mengayau.

Tradisi mengayau sesungguhnya jauh sebelum kerajaan ini ditaklukan telah dianjurkan untuk dihentikan. Ajakan itu diterima dengan baik dan disetujui oleh Raja Mori sehingga ia juga bergiat untuk menyadarkan masyarakatnya untuk tidak melakukan lagi pengayauan. Larangan itu semakin dipertegas pada periode pemerintahan Hindia Belanda dengan menginformasikan kepada para kepala distrik dan rakyat tentang hukuman bagi tindakan pembunuhan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Dalam hal ini pula pihak pemerintah senantiasa mengatur kegiatan patroli pasukan militer ke daerah-daerah kekuasaan agar tidak membuka peluang untuk melakukan tindakan kriminal

ataupun reaksi perlawanan terhadap pemerintah.

Sesungguhnya tradisi mengayau itu lebih kuat dianut oleh kelompok masyarakat berbahasa Toraja Bare'e. Namun sejumlah kelompok kaum yang bermukim di Mori, secara adat, memiliki konflik dengan kelompok Toraja Bare'e, sehingga sering diserang oleh kelompok pengayau itu. Untuk menghadapinya mereka juga mengayau kelompok penyerang. Hal ini berdampak pula dalam kehidupan mereka, jika terjadi perang tanding antara kelompok karena kasus pembunuhan yang tidak berhasil diselesaikan secara adat, maka mereka saling mengayau. Dalam hubungan dengan kondisi itu, pemerintah menetapkan kebijakan memberikan dukungan penuh bagi penyelesaian persoalan rakyatnya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, dengan harapan mereka dapat menerima dan bersedia meninggalkan tradisi mengayau. Untuk itu peran kepala distrik sangat menentukan keberhasilan menciptakan ketertiban dan keamanan penduduknya.

Faktor lain yang patut diperhitungkan dalam mendorong masyarakat meninggalkan tradisi mengayau adalah peranserta para zendeling dalam merubah pola religi lokal dengan membangun kehidupan keagamaan yang diperkenalkan oleh mereka. Dalam hubungan ini, bukan hanya pada masyarakat Mori tetapi juga pada masyarakat di wilayah Toraja Bare'e, dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Kegiatan zendeling itu dirintis pertama kali oleh Albert Christian Kruyt yang kemudian didukung oleh Nicolas Adriani. Kruyt mengawali perjalanannya ke Poso pada Pebruari 1892 untuk kemudian pindah dan menetap di Poso pada bulan April 1893, sementara Adriani baru datang ke Poso pada 18 Maret 1895.<sup>47</sup> Dalam perkembangan kemudian, ketika Kruyt men-

---

<sup>47</sup> Kegiatan para zendeling ini, baca: Hasan, dkk,

*op.cit.*, hal. 123-176.

dapat kesempatan cuti ke Belanda, lembaga *Het Nederlandsch Zendeling Genootschap* (NZG) mengirim Philip Hendrick Christoph Hofman, untuk menangani tugas Kruyt dan tiba di Poso pada Desember 1903.

Usaha tiga tokoh zendeling ini pada dasarnya tidak ditentang oleh masyarakat di Poso dan sekitarnya namun belum bersedia menerima syiar agama Kristen dan meninggalkan religi mereka. Hal itu disebabkan karena faktor politik. Ini tampak dalam pernyataan Papa I Wunte, kepala kelompok kaum Pebato, yaitu: "kalau saja raja Luwu tidak lagi menguasai wilayah kami, maka kami akan menjadi Kristen".<sup>48</sup> Pernyataan itu juga merupakan salah satu faktor, disamping faktor perang suku yang berkelanjutan di wilayah Poso, yang mendorong Kruyt dan Andriani menghadap Datu Luwu untuk memintanya agar bersedia melepaskan Poso namun tidak berhasil. Namun setelah Ekspedisi Militer 1905, pemerintah Hindia Belanda berhasil memaksakan Datu Luwu untuk melepaskan wilayah Poso. Pernyataan pelepasan wilayah Poso ditandatangani pada 27 Februari 1907, kemudian juga wilayah Bada pada 18 Oktober 1909.

Pernyataan pelepasan wilayah Poso itu memberikan angin segar bagi keberhasilan para zendeling. Dalam satu ibadah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 1909 dihadapan orang-orang Pebato (Panta, Mopayawa,

Banano, Longkita) di Kasiguncu yang dipimpin oleh Zendeling Hofman, hadir pula Papa I Wunte. Setelah ibadah itu, Papa I Wunte menyampaikan pesan dan ajakan kepada peserta ibadah itu dengan menyatakan:

"... Anda sekalian telah mendengarkan perkataan Bapak Zending tadi, bahwa Tuhan Yesus ingin naik ke tempat tinggal kita, tetapi hingga saat sekarang ini kita tidak menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, marilah sekarang mengikuti kata-kata baik itu ...".<sup>49</sup>

Seruan dan ajakan itu pada satu sisi menunjukkan bahwa Papa I Wunte telah memilih meninggalkan tradisi pemujaan leluhur (kepercayaan awal) dan menjadi penganut ajaran agama yang disyiarkan oleh para zendeling. Pada sisi lainnya mengajak seluruh rakyatnya untuk mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya pada perayaan Natal 1909, Papa I Wunte dan 100 orang Pebato lainnya dibaptis di Kasiguncu, dan pada hari berikutnya, 26 Desember 1909, dalam ibadah Natal kedua dibaptis 66 orang dari Desa Longkita.

Peristiwa pembaptisan massal ini sesungguhnya bukanlah awal penduduk Poso menerima ajaran agama para misionaris. Jauh sebelumnya, sejak periode awal kehadiran Kruyt dan Andriani, sejumlah penduduk telah menerima ajaran agama yang disyiarkan

<sup>48</sup> Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 136. Pernyataan tokoh ini yang mendorong Kruyt dan Andriani pernah bergiat menghubungi Datu Luwu agar bersedia melepaskan wilayah Poso dan juga Bada' namun tidak berhasil. Hal itu baru dilakukan setelah Ekspedisi Militer 1905. Penandatanganan pernyataan pelepasan wilayah Poso pada 27 Februari 1907 dan wilayah Bada pada 18 Oktober 1909. Baca: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 137. Pada halaman ini dinyatakan bahwa setelah selesai ibadah, Papa I Wunte menyampaikan

ajakan kepada hadirin yang hadir pada saat itu dengan seruan seperti yang dikutip. Namun pada halaman 138 diungkapkan bahwa seruan itu dinyatakan pada tanggal, 9 Juli 1909. Suatu seruan umumnya disampaikan ketika orang berkumpul, karena waktu itu dilakukan ibadah itulah yang dipandang tepat untuk menyampaikan seruan sehingga tanggal penyelenggaraan ibadah itu yang dibenarkan. Menyangkut pengkristenan Papa I Wunte, baca juga: J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), hal. 158-162.

mereka dan dibaptis. Namun Kruyt memandang peristiwa pembaptisan massal ini melapangkan kegiatan syiar agama Kristen. Oleh karena itu ia bergiat mengorganisasikan para zendeling yang diutus oleh NZG untuk melaksanakan tugas-tugas di wilayah lainnya, seperti di Danau Poso, Ondae, Bada, Napu, Pu'umboto, dan Mori. Pengutusan misionaris ke wilayah bekas Kerajaan Mori mulai dilaksanakan pada tahun 1914.

Wilayah Kerajaan Mori sesungguhnya telah dipelajari dengan saksama oleh Kruyt dan Adriani sejak mereka melakukan perjalanan penjajakan pada 22 Agustus hingga 29 September 1899. Hal itu terungkap dalam sejumlah artikel yang ditulis oleh Kruyt tentang kerajaan ini. Dalam perjalanannya ini Kruyt dan Adriani juga melakukan tugas zendelingnya di Watambayoli dan di beberapa perkampungan penduduk yang dikunjunginya, namun tidak ada usaha lebih lanjut. Perjalanan orientasi selanjutnya baru dilaksanakan pada tahun 1913 dan 1914. Berdasarkan hasil perjalanan orientasi itulah, Kruyt menetapkan wilayah Mori menjadi salah satu wilayah kegiatan zendeling pada tahun 1914.<sup>50</sup> Sesuai dengan penetapan itu, maka diutuslah V. Eslen ke Mori dan menetap di Sampalowo. Ia berhasil menyadarkan masyarakat untuk meninggalkan tradisi mengayau dan menerima ajaran agama Kristen yang disyiarkan, sehingga pada tahun 1921 berlangsung pembaptisan massal.

Perluasan wilayah pelayanan para zendeling di Poso dan adanya kecenderungan masyarakat untuk menerima ajakan syiar agama para zendeling itu mendorong pula lembaga *Die*

*Besler Mission* (BM) di Jerman mengirim utusan mereka untuk membantu pelayanan zendeling NZG. Pada bulan September 1924, K. Riedel bersama keluarganya tiba di Poso. Ia kemudian ditugaskan untuk menyiarkan dan melaksanakan pelayanan di wilayah Mori. Kerja dan karyanya cukup menggembirakan. Menurut Hasan, dkk, Riedel dan isterinya sangat dekat dengan penduduk Mori sehingga mereka menyukainya. Sementara Jan Kruyt dan Hegener menempatkan kedudukan zendeling itu sebagai juru bicara kepentingan publik. Segala pengeluaran penduduk menyangkut tugas-tugas dan beban dari pemerintah yang dipandang merugikan kepentingan publik (seperti kewajiban kerja wajib atau penyelesaian persoalan mereka), Riedel menyampaikan kepada pihak pemerintah agar mempertimbangkan kembali dan mengambil langkah-langkah yang positif bagi kepentingan penduduk.<sup>51</sup> Usaha untuk membangun simpati dan partisipasi penduduk itulah yang menyebabkan tugas dan pekerjaannya berlangsung dengan baik dan berhasil. Raja Swapraja Mori, Owolu Marunduh, juga akhirnya dibaptis oleh Pendeta K. Riedel pada tahun 1926. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan penduduk pada ajaran agama Kristen yang disyiarkan oleh para zendeling. Hegener menyatakan bahwa penduduk Mori telah menerima dan menganut Agama Kristen yang disyiarkan itu pada tahun 1935.<sup>52</sup> Bahkan ia juga mengutip pernyataan Riedel yang diungkapkan dalam laporannya pada tahun 1941 yang menyatakan: "saya yakin kita tidak banyak menyatakan, kecuali kita menyatakan bahwa telah terjadi

---

<sup>50</sup> Th. van den End dan J. Weijtjens, *Ragi Carita 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hal. 156; J. Kruit, *op.cit.*, hal. 186; Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 145. Bandingkan dengan: Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 16. Hegener menyebut bahwa wilayah Mori dijadikan daerah pelayanan misionaris pada tahun 1915.

<sup>51</sup> J. Kruyt, *op.cit.*, hal. 205-211; khusus sub bahasan "Zending Dalam Pergaulan Hidup". Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 17-19.

<sup>52</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 16; baca juga: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 150.

mujizat di negeri Mori selama 25 tahun terakhir ini".<sup>53</sup>

Pernyataan Riedel itu menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang besar dalam masyarakat Mori. Perubahan itu bukan hanya menyangkut penerimaan dan menganut ajaran agama yang disyiarkan oleh zendeling tetapi juga dalam tindak dan perilaku kehidupan kerohanian, sosial, dan budaya mereka. Tradisi pemujaan leluhur dan para dewa, kebiasaan melakukan pengayauan, dan perbudakan ditinggalkan. Mereka menerima dan mengikuti pola kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang disyiarkan oleh para zendeling, dengan kata lain hidup mereka telah dibaharui.

Selain itu salah satu faktor lainnya yang juga mengantar perubahan sosial-budaya penduduk Mori adalah pembukaan dan pendirian lembaga pendidikan. Pemerintah kolonial dan juga zendeling memiliki andil yang besar dalam hal ini. Di Kolonodale pemerintah mulai membuka Sekolah Rakyat Tiga Tahun (*Volkschool Derde Jaar*) dan Lanjutan Sekolah Rakyat (*Vervolkschool*). Sementara dari pihak zendeling membuka satu Sekolah Rakyat Tiga Tahun di Korowalelo pada tahun 1930. Lewat lembaga pendidikan itulah penduduk Mori yang dahulunya masih belum mengenal tulisan sekarang mereka dapat membaca dan menulis serta dapat mengenyam pendidikan. Tidak dapat disangkal bahwa pendirian dan pembukaan lembaga pendidikan ini telah membuka peluang yang besar bagi mobilisasi sosial. Penduduk yang sebelumnya tidak dapat masuk dalam kegiatan lembaga pemerintahan karena status sosialnya, kini berpeluang untuk masuk dan terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan walaupun baru pada tingkat pegawai rendahan. Selain itu juga, melalui pendidikan, penduduk menjadi sadar akan kemerdekaan dan kebebas-

annya yang pada gilirannya tampil melaksanakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial kelak.

---

<sup>53</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 16.



## **BAB VII**

### **TENTARA PENDUDUKAN JEPANG: 1942-1945**

Pemerintah Jepang menaruh perhatian yang besar terhadap wilayah Hindia Belanda (Indonesia), karena daerah ini memiliki sumber alam yang sangat penting bagi perkembangan industrinya, seperti: minyak, timah, bauksit, dan karet. Itulah sebabnya ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1930 pemerintah Jepang bergiat meningkatkan volume perdagangannya ke Indonesia sekaligus memperluas kegiatan intelijennya.<sup>1</sup> Komoditi impor Jepang mendapat sambutan yang baik dari pengusaha dan rakyat karena harganya murah, dan pengusaha-pengusaha Jepang yang memasarkan produknya bersikap santun. Pada tahun 1934, impor Jepang mencapai 31% dari total impor Indonesia, sementara impor Belanda hanya mencapai 9,5%. Kenyataan itu mendorong pemerintah Hindia Belanda mulai melaksanakan kebijakan untuk melindungi industri di Eropa (termasuk Belanda) dari saingan hasil

industri Jepang, khususnya dalam komoditi tekstil.

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga telah menjalin kesepakatan atau perjanjian perdagangan menyangkut impor hasil industri Jepang dan mengeksport bahan-bahan strategis kebutuhan industri Jepang. Namun dalam perkembangan kemudian, mengingat Jepang menjalin kerjasama politik dengan Jerman dan Italia, dua negara di Eropa yang berpaham fasisme, sehingga pihak pemerintah Amerika Serikat melakukan embargo terhadap pengiriman bahan-bahan strategis bagi industri Jepang dan membekukan aktiva Jepang pada bulan Juli 1939. Kebijakan Amerika Serikat itu mendorong Jepang merealisasikan Pakta Tiga Pihak (*Tripartie Pact*) pada bulan September 1940, suatu aliansi Jepang-Jerman-Italia.

Keikutsertaan Jepang dalam kelompok fasisme itu merupakan salah satu faktor yang

---

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1300* (London: the Macmillan Press Ltd, 1883), hal.

194.

mendorong pihak pemerintah Hindia Belanda mengikuti kebijakan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang, yaitu menghentikan ekspor ke Jepang dan membebaskan aktiva perdagangan Jepang pada bulan Juli 1941. Faktor lainnya adalah tindakan Kanselir Jerman, Adolf Hitler, menginvasi negeri Belanda pada 10 Mei 1940, yang berakibat Ratu Belanda, Wilhelmina, mengasingkan diri ke London dan pernyataan dari para pemimpin Jepang secara terbuka tentang keinginannya untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda, setelah mereka membangun pangkalan militer di Indocina.<sup>2</sup> Pernyataan pihak Jepang itu merupakan reaksi kekecewaannya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda itu dan menolak keinginannya untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. Faktor yang disebutkan terakhir ini mendorong pihak pemerintah kolonial melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh pergerakan yang menjalin hubungan dengan pihak Jepang seperti Muhammad H. Thamrin dan Edward Douwes Dekker dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan penyerangan bala tentara Jepang.

Kebijakan perdagangan yang ditempuh pemerintah Amerika Serikat dan Hindia Belanda itu dipandang oleh pemerintah Jepang sebagai suatu strategik politik untuk menghancurkan perkembangan industrinya. Hal itu disadari sebagai suatu reaksi atas pilihan kebijakan politik Jepang yang berpihak pada kelompok Fasisme. Perimbangan politik dan ekonomi itu mendorong pemerintah Jepang mempercepat penyerangannya terhadap Amerika Serikat dan Hindia Belanda, sehingga meletuslah Perang Pasifik atau yang juga

umum disebut Perang Asia Timur Raya (*Dai Toa Senso*) 1941-1945, yaitu untuk membebaskan Asia dari cengkraman kulit putih dan menjadi bagian peristiwa dunia yang disebut Perang Dunia II (1938- 1945). Jika pencaplokkan Austria oleh Jerman pada Maret 1938 sebagai awal pecahnya Perang Dunia II di Eropa, maka gemanya bagi Perang Pasifik berawal dengan penyerbuan oleh pasukan kekaisaran Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat (Pearl Harbour) di Hawaii pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941 (8 Desember di Indonesia).

Kekaisaran Jepang mengerahkan 360 pesawat pembom dan kapal torpedo untuk membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawaii) pada pukul 07.55 waktu setempat. Serangan itu memporak-porandakan kekuatan militer Amerika. Diperkirakan jumlah korban di pihak militer Amerika Serikat mencapai 2.300 orang. Sarana angkatan perang yang rusak adalah: 8 kapal perang tempur, 3 kapal penjelajah, dan 7 kapal perang lainnya. Pesawat tempur di Pearl Harbour yang berjumlah 248 pesawat, dinyatakan rusak sebanyak 188 pesawat hancur dan 30 pesawat lainnya dinyatakan rusak berat.<sup>3</sup> Pada waktu yang bersamaan bala tentara Jepang menyerbu dan menduduki Thailand, Filipina, Hongkong, dan Malaka dan mengumumkan pernyataan perang secara resmi terhadap Amerika Serikat dan Inggris.

Peristiwa ini mendesak Perdana Menteri Inggris, Gerbrandy melaksanakan pertemuan kabinetnya pada pukul 01.15 GMT (waktu London) dan memutuskan menyatakan perang terhadap Jepang. Seperempat jam kemudian, ia menelpon Ratu Wilhelmina (Ratu Belanda) dan

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 194. Jerman berhasil mengalahkan Prancis pada bulan Juni 1940. Atas desakan Jerman pemerintah Prancis di Vicky mengizinkan Jepang membangun pangkalan militer di Indocina, satu

wilayah jajahan Prancis di Asia Tenggara, pada bulan September 1940.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 45.

menyampaikan sikap itu. Ratu Wilhelmina menyatakan sikapnya dengan menyatakan: *a bomb on Hawaii is a bomb on Java* (sebuah bom di Hawaii adalah sebuah bom di Jawa). Jawaban itu merupakan sikap pernyataan perang pemerintah Belanda terhadap Jepang dan berpihak kepada Sekutu menghadapi militer Jepang.

## **Persiapan Menghadapi Serangan Militer Jepang**

Ketika pemerintah Hindia Belanda menolak permintaan pemerintah Jepang untuk membangun pangkalan militernya di wilayahnya dan memutuskan hubungan perdagangan dengan kekaisaran itu, telah diperkirakan bahwa pihak militer Jepang akan menginvasi wilayahnya. Perkiraan itu kemudian menjadi kepastian ketika pihak militer Jepang mengumumkan bahwa pihaknya akan bergiat membebaskan bangsa Indonesia dari dominasi kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya pihak pemerintah Hindia Belanda bergiat mempersiapkan diri untuk menghadapi invasi pasukan militer yang kelak menyerang negerinya. Dalam hubungan itulah, dengan mempergunakan berbagai cara yang menjurus pada tujuan menghalalkan segala cara, diperoleh persetujuan dari *Volksraad* untuk mengorganisasikan pasukan milisi. Menurut Hegener, jumlah pasukan KNIL pada Desember 1941 sebanyak 122.600 tentara.<sup>4</sup> Jumlah kekuatan pasukan militer itu sudah termasuk pasukan milisi, baik warga bumiputera maupun warga Eropa. Jumlah itu tentunya kurang memadai untuk mempertahankan wilayahnya yang begitu luas.

Selain itu pemerintah juga bergiat membuka lapangan terbang militer baru pada wilayah bagian utara, Kalimantan dan Sulawesi, untuk

digunakan dalam menghadapi serangan militer Jepang. Jumlah pesawat tempur Angkatan Udara KNIL ketika itu adalah 225 pesawat dan menurut perkiraan akan diperkuat Angkatan Udara Sekutu sekitar 300 pesawat lagi, selain itu menurut rencana, akan dibangun lagi sejumlah pangkalan udara di Sulawesi. Hal itu mendorong Kontrolir Kolonodale, Letnan Cox bergiat mendapatkan areal dataran yang memadai untuk membangun pangkalan militer angkatan udara di bagian utara kota Kolonodale, namun gagal direalisasikan karena kondisi alamnya kurang menguntungkan. Oleh karena itu, mengingat wilayah perairan Teluk Tomori cukup tenang, diputuskan dibangun jembatan tempat bersandarnya pesawat terbang amfibi (*watervliegtuigen*) dari Dinas Penerbangan Angkatan Laut, yang ketika itu memiliki 75 pesawat terbang amfibi.

Usaha pembangunan dermaga itu kemudian dilanjutkan oleh Kontrolir De Jong yang menggantikan Kontrolir Cox pada bulan Maret 1941. Sementara pemerintah Hindia Belanda membenahi diri untuk menghadapi kemungkinan serangan pihak militer Jepang, mereka dikejutkan dengan aksi serangan militer Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Dalam kondisi gawat perang itu telah membatalkan rencana penempatan Letnan Marinir F. Masselink sebagai Kontrolir Kolonodale dan menugaskannya menjadi komandan kesatuan wajib militer orang-orang Eropa dan bumiputera Hindia Belanda di Manado.<sup>5</sup> Akhirnya ia tidak ke Kolonodale tetapi meneruskan perjalanan ke Manado.

Perubahan kebijakan itu berdampak pada pembatalan rencana pergantian pimpinan pemerintahan Onderafdeling Kolonodale, tetapi juga pembatalan pemanfaatan pelabuhan Kolonodale sebagai basis pesawat tempur

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 46.

amfibi. Itu berarti kontrolir De Jong tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan *onderafdeling*. Sehubungan dengan kondisi gawat-perang karena dipastikan pihak militer Jepang akan melancarkan serangan, ia melaksanakan dua kegiatan penting. Kegiatan yang pertama adalah bergiat melindungi rakyatnya. Sehubungan dengan itu, ia perintahkan kepada penduduk untuk membuat lubang-lubang perlindungan agar dapat digunakan untuk menyelamatkan diri apabila ada serangan udara dari pihak militer Jepang. Ia juga bergiat membangun sebuah rumah pengungsian di daerah pedalaman dekat dengan kampung Sabanga yang menurut rencana menjadi tempat pengungsian para isteri dan anak-anak anggota militernya, apabila Kolonodale diserang. Selain itu juga ia memerintahkan untuk menghentikan proses belajar murid-murid di sekolah-sekolah pemerintah yang ada di Kolonodale untuk waktu yang tidak ditentukan, karena situasi gawat perang. Dengan demikian setiap murid dapat kembali berkumpul bersama orang tua atau wali mereka.

Kegiatan kedua adalah mendorong rakyat agar bersedia membantu pasukan militer Hindia Belanda melalui pembentukan milisi dalam menghadapi serangan pihak Jepang. Pembentukan milisi ini, dipandang dari segi waktu persiapan jelas sangat terlambat. Hal itu disebabkan karena usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan persetujuan membentuk pasukan wajib militer (milisi) pada awalnya mengalami kegagalan, karena sejumlah anggota *Volksraad* yang beraliran nasionalis menolak dilakukannya milisi. Namun dalam perkembangan kemudian, setelah menangkap sejumlah tokoh nasionalis yang duduk dalam parlemen dan menggantikan dengan tokoh-

tokoh lainnya, akhirnya pada Juli 1941 *Volksraad* menyetujui usulan pembentukan milisi.<sup>6</sup> Atas dasar itu kontrolir De Jong bergiat pada bulan Desember 1941 - Januari 1942 untuk membentuk milisi dengan memohon kepada kepala-kepala distrik dan kampung di wilayah pemerintahannya untuk mendata tenaga laki-laki potensial yang secara sukarela diberikan latihan militer. Program pembentukan milisi itu ternyata hanya mendapat tanggapan positif dari kepala kampung dan penduduk di Tomata. Tercatat hanya 60 orang yang mendaftarkan diri, termasuk 5 orang dari kampung Gontara.

Pasukan milisi ini dipimpin oleh Lonsi Rabeta, kepala kampung Tomata. Meskipun pemerintah Kolonodale berhasil mengorganisasikan pasukan milisi yang jumlahnya sebanyak pasukan KNIL yang ditempatkan di daerah *onderafdeling* ini, akan tetapi pemerintah Kolonodale tidak mempersenjatai mereka. Hal itu, pada satu sisi menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk menghadapi ancaman militer Jepang. Namun pada sisi lain dapat diperkirakan bahwa pemerintah kurang yakin pasukan milisi kelak membantu mereka sepenuhnya. Alasan ini berkaitan dengan pengumuman para petinggi militer Jepang untuk kelak membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Itulah sebabnya pemerintah hanya memohon kepada pasukan milisi untuk mempersenjatai diri mereka dengan persenjataan mereka sendiri, seperti kelewang dan tombak.

Pasukan milisi ini diberikan latihan militer sekedarnya dan petunjuk menggunakan senjata api di Sawah Tongko, yang terletak sekitar satu kilometer dari Kampung Tomata. Senjata api

<sup>6</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 294. Bandingkan dengan Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 48-49, yang menyatakan bahwa pembentukan milisi di Kolonodale itu tidak

memiliki dasar hukum, tetapi merupakan suatu strategik untuk mengetahui dukungan rakyat terhadap pemerintah.

yang digunakan dalam latihan itu dipinjam dari anggota militer dari detasemen Kolonodale. Mereka hanya berlatih menggunakan senjata api tetapi tidak diperlengkapi dengan senjata, kecuali komandan pasukan milisi yang diberikan dua pucuk senjata api masing-masing dengan lima butir peluru.

Pembentukan pasukan milisi itu tentu dimaksudkan untuk mengemban tugas utama melakukan pertempuran bersama pasukan reguler KNIL apabila Jepang melancarkan serangan namun karena tidak dipersenjatai maka tugas itu tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Hal yang mungkin dapat dilaksanakan adalah membantu pasukan KNIL melakukan pengintaian terhadap gerakan musuh dan melaporkannya dan sebagai penunjuk jalan untuk meloloskan diri dari serangan musuh. Selain dua tugas itu kepada pasukan milisi juga diharapkan dapat bergiat mengumpulkan perbekalan dan menyalurkan ke pos-pos pertahanan pasukan KNIL.<sup>7</sup>

## **Perlawanan terhadap Invasi Militer Jepang**

Jepang memulai melancarkan serangannya dengan berusaha merebut wilayah bagian utara Hindia Belanda. Tugas penyerangan ini diembankan kepada Angkatan Laut. Sementara Angkatan Darat bergerak dari Indocina ke selatan untuk merebut Malaka dan Singapura kemudian bergerak menduduki wilayah bagian barat Hindia Belanda, Sumatera. Strategik yang dicanangkan adalah pertama-tama menduduki kota-kota penting yang merupakan basis kedudukan militer Belanda kemudian terus bergerak ke pusat pemerintahan di Jawa. Oleh karena itu strategik penyerangan militer Jepang itu kadang digambarkan laksana jari-jari gurita

(*octopus*) yang bergerak menduduki kota-kota di Hindia Belanda dari tiga arah yaitu barat, tengah dan timur hingga ke pusat kedudukan pemerintahan di Jawa.

Gerakan pendudukan mulai dilancarkan pada pagi hari 10 Januari 1942, dengan sasaran pertama adalah penyerbuan ke kota Tarakan. Diawali dengan serangan udara besar-besaran yang dibantu oleh sekitar 2500 tentara kekaisaran yang dimotori pasukan elit Angkatan Laut Jepang (pasukan Kure) melakukan pendaratan di pantai timur Tarakan dalam dua kelompok. Kota ini coba dipertahankan oleh Belanda dengan mengerahkan 1300 serdadu dari Batalion VII KNIL diperkuat dengan beberapa unit kapal perang ringan ditambah pula dengan beberapa pesawat tempur dan bomber serta melibatkan juga satuan milisi yang diambil dari para pegawai perusahaan minyak BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*), namun berakhir dengan kesia-siaan, Tarakan dengan cepat direbut oleh Jepang hanya dalam tempo tiga hari saja.

Sementara itu pasukan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana Kurita melancarkan serangan ke Sulawesi sehari setelah penyerangan pertama, 11 Januari 1942 dengan asaran pertama adalah menduduki pusat pertahanan di Manado. Pasukan militer yang dipusatkan untuk menduduki pusat pertahanan paling utara Pulau Sulawesi itu didaratkan pada tiga lokasi yaitu di Manado, Kema, dan wilayah selatan Danau Tondano. Jumlah seluruh pasukan itu adalah 3019, dengan rincian 2500 marinir dan 519 marinir dari Dinas Penerbangan Angkatan Laut.

Pengerahan pasukan yang besar itu menyebabkan pasukan militer Hindia Belanda di pusat pertahanan Manado tidak dapat

---

<sup>7</sup> Hasan, dkk, *Sejarah Poso* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hal. 233; Michiel Hegener,

*op.cit.*, hal. 46.

berbuat banyak kecuali melarikan diri. Hirschmann, Residen Manado bersama rombongan pengikutnya mundur ke daerah Bada' yang letaknya jauh terpencil di Sulawesi Tengah. Setelah Manado diduduki, serangan selanjutnya ditujukan pada pos-pos militer lainnya. Wilayah Mori mendapat serangan udara pada 12 Januari 1942. Sembilan buah pesawat militer Jepang melancarkan serangan pertama dengan menjatuhkan dua bom masing-masing seberat 200 Kg dari ketinggian sekitar 4000 meter dari permukaan bumi di Kolonodale dan terus terbang ke arah pedalaman dan kemudian kembali lagi melancarkan serangan sambil melepaskan sejumlah bom-bom kecil sekitar 50 buah setelah itu terbang kembali ke pangkalan di Manado. Serangan udara ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak merusak sarana-sarana penting seperti stasiun radio, gudang bahan bakar, dan tangsi militer, kecuali memporak-porandakan rumah-rumah penduduk di sekitar pantai.

Setelah memporak-porandakan pertahanan Belanda di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, bala tentara Jepang terus bergerak ke selatan dengan sasaran pada pusat pertahanan terpenting di bagian selatan yaitu Kendari dan Makassar. Pemerintah Hindia Belanda, dalam persiapan menghadapi invasi militer Jepang, membangun satu lapangan udara dan hanggar di bagian pedalaman Kendari pada tahun 1940. Di Pangkalan militer ini ditempatkan 400 anggota KNIL. Oleh karena itu dua minggu setelah pendaratan di Manado, dilancarkan serangan terhadap Kendari, 26 Januari 1942. Setelah itu meneruskan penyerangan dan menduduki Makassar pada 10 Februari 1942.

Pada dasarnya penyerangan Angkatan Laut Jepang ke Sulawesi dan Kalimantan itu memilih strategik menduduki pusat-pusat pertahanan penting di daerah itu dan memporak-porandakan tempat-tempat pertahanan yang

lain, dan kemudian meneruskan penyerangan ke arah selatan untuk menduduki pusat pemerintahan Hindia Belanda di Jawa. Sementara Angkatan Darat yang melancarkan serangan dari bagian barat memasuki Semenanjung Malaka dan terus bergerak ke arah timur untuk menduduki pusat pemerintahan Hindia Belanda. Penyerangan Angkatan Darat Jepang itu tidak dapat dibendung baik oleh Inggris apalagi Belanda. Pangkalan militer Inggris di Singapura, yang menurut perkiraan akan dapat memukul mundur serangan bala tentara Jepang ternyata harus menyerah pada 15 Februari 1942. Dengan demikian terbuka peluang penyerangan ke Batavia.

Serangan udara yang dilancarkan oleh militer Jepang terhadap kedudukan pos-pos pertahanan di Sulawesi Tengah mendorong detasemen-detasemen militer yang berada di pos-pos pertahanan itu bersiaga menghadapi serangan lanjutan bala tentara Jepang yang bertujuan merebut wilayah pertahanannya. Komandan detasemen Kolonodale, Letnan De Jong, segera memerintahkan agar semua keluarga anggota detasemennya diungsikan ke barak-barak yang telah dibangun di daerah pedalaman, seperti di Sabanga, Bunta, Korolama, Korolaki, dan Koromatantu. Tindakan itu dilaksanakan dengan maksud agar detasemen KNIL dan pasukan milisi yang dipimpinya kelak secara leluasa menghadapi serangan militer Jepang.

Perkiraan akan adanya serangan militer lanjutan yang diwaspadai setelah pemboman itu, belum juga terjadi. Sementara dalam kesiagaan itu diperoleh berita bahwa Kendari, salah satu pos pertahanan yang diperkuat dengan 400 tentara KNIL, berhasil direbut dan diduduki tentara Jepang. Selain itu diperoleh berita pula bahwa militer Jepang telah berhasil merebut Makassar, ibukota Provinsi Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*) pada 10

Pebruari, dan selanjutnya melumpuhkan pusat pertahanan di Camba (dekat Maros). Berita itu mendorong pasukan detasemen Kolonodale semakin siaga untuk kelak menghadapi serangan musuh.

Dalam kondisi yang semakin tegang itu, datang Mayor Schilmoller, Komandan Teritorial dari Residen Manado di Poso pada 24 Pebruari. Kehadirannya di Poso itu berkaitan dengan perintah yang diperoleh untuk berangkat ke Batavia. Namun ketika berada di Poso diperoleh berita bahwa Makassar telah diduduki oleh tentara Jepang, dan pertahanan di Camba juga berhasil dilumpuhkan oleh musuh sehingga sisa-sisa pasukan KNIL mengundurkan diri ke daerah pedalaman. Hal itu mendorongnya untuk tidak meneruskan perjalanannya ke Batavia, tetapi merencanakan untuk bergiat mengorganisasikan kesatuan militer di Sulawesi Tengah yang kelak mendapat giliran penyerangan militer Jepang. Selain itu juga bergiat untuk dapat menghimpun pasukan militer (KNIL) dan pejabat pemerintah yang mengungsi ke wilayah Sulawesi Tengah, baik yang datang dari Kendari maupun dari Luwu (Sulawesi Selatan). Untuk tujuan itu ia mengundang komandan detasemen KNIL yang ada di Sulawesi Tengah melalui kontak radio untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan pada akhir Pebruari di Tentena.

Letnan De Jong tidak dapat memenuhi undangan itu. Hal itu didasarkan pada pertimbangan akan adanya serangan militer Jepang, sehingga sebagai komandan detasemen, ia harus berada dan memimpin pasukannya. Untuk itulah ia menulis nota dinas untuk Lubbers dan memerintahkan kepada Hasan, sopir pribadinya, untuk menggunakan mobilnya menjemput Lubbers dan mengantarnya untuk mengikuti pertemuan dengan Oom Ben (panggilan akrab untuk Mayor Schilmoller) di Tentena. Pertemuan yang berlangsung pada

akhir Pebruari itu hanya diikuti oleh Schilmoller, Lubbers, Masselink, dan Rijdsdijk. Laporan ini menunjukkan bahwa semua komandan detasemen hanya mengirim wakilnya untuk mengikuti pertemuan itu, suatu kondisi yang menunjukkan bahwa mereka memandang keadaan sangat gawat, dan sewaktu-waktu akan terjadi serangan militer Jepang. Pertemuan itu dibuka pada pukul 22.00 malam dan berlangsung hingga subuh pukul 04.00, dan kemudian dilanjutkan lagi pada pagi hari tanggal 1 Maret. Dalam pertemuan itu dibicarakan segala persoalan yang patut ditangani pasukan KNIL baik dalam menghadapi serangan militer Jepang maupun perlindungan kepada para pejabat pemerintah dan keluarga mereka yang mendukung perjuangan menentang invasi militer Jepang. Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan wilayah Bada' (wilayah Bomba) sebagai wilayah *self-supporting*. Di tempat ini akan ditampung, keluarga dari mereka yang secara langsung mendukung aksi perlawanan terhadap Jepang, termasuk keluarga dari para penguasa lokal (raja) dan pejabat pemerintah bumiputera, perlengkapan militer, peralatan teknis seperti radio, peralatan pertanian, dan pertukangan, tenaga-tenaga teknis untuk membangun barak dan rumah-rumah, dan tenaga-tenaga pengelola kegiatan pertanian.

Selain itu juga dibicarakan persoalan pasukan milisi. Berdasarkan berbagai informasi diketahui bahwa sejumlah anggota pasukan milisi tidak mendukung aksi perlawanan melainkan berpihak kepada militer Jepang. Oleh karena itu direncanakan untuk membubarkan pasukan milisi. Komandan detasemen Poso, Letnan H.A. van Daalen, setelah kembali ke markasnya, mengumpulkan pasukan milisi pada tanggal 6 Maret 1942 dan mengumumkan kepada mereka dengan menyatakan bahwa "kalian boleh kembali pulang apabila kalian

tidak lagi ingin mentaati kekuasaan Belanda. Kami tidak membutuhkan kalian lagi".<sup>8</sup> Pada kesempatan itu beberapa anggota milisi langsung diberikan surat keputusan pemberhentian. Pernyataan pembubaran pasukan milisi itu mungkin dimaksudkan untuk mengetahui mereka yang pro dan yang anti-Belanda. Itulah sebabnya, setelah pengumuman itu diungkapkan bahwa pada kenyataannya sejumlah anggota pasukan milisi, khususnya dari Poso dan Mori tidak banyak terpengaruh dengan keputusan itu, karena tetap bersedia membantu pasukan militer Belanda.

Kesiagaan terus ditingkatkan, namun serangan musuh belum juga terjadi. Hal itu disebabkan karena sasaran utama serangan militer Jepang ditujukan untuk merebut dan menduduki pusat pemerintahan Hindia Belanda. Usaha itu mendapat perlawanan yang sengit, sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat di Laut Jawa. Pada pertempuran itu, Armada Angkatan Laut Hindia Belanda mendapat dukungan dan bantuan dari Armada Angkatan Laut Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Meskipun pasukan gabungan ini melancarkan serangan yang gencar dan bergiat dengan gigih untuk memukul mundur dan membinasakan armada Jepang namun balatentara Jepang berhasil menghancurkan armada gabungan itu pada akhir Pebruari 1942. Kekalahan armada gabungan itu melampirkan usaha balatentara Jepang merebut dan menduduki pusat pemerintah. Pada tanggal 8 Maret, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, W.L. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer ditawan dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jendral H. ter Poorter menyerah dan menandatangani kapitulasi (penyerahan tanpa syarat) kepada panglima balatentara Jepang. Hal ini menandakan

berakhirnya perang pendudukan dan periode pemerintahan kolonial Belanda dan dimulainya penjajahan Jepang atas wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Berita kekalahan dan penyerahan tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda itu diketahui oleh detasemen De Jong di Kolonodale pada 9 Maret 1942. Berita itu mendorong Mayor Schilmoller, sebagai Komandan Teritorial Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa penyerahan tanpa syarat itu menunjukkan bahwa kedudukan KNIL telah berakhir. Oleh karena itu setiap anggota KNIL yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang dipandang sebagai pemberontak.<sup>9</sup> Hal itu diungkapkan berdasarkan pada kondisi kemungkinan akan ada perlawanan dari detasemen-detasemen KNIL, sebagai akibat serangan militer Jepang sehingga mereka mengungsi dan bersembunyi di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut pendataan Hegener, ada sekitar lima detasemen KNIL yang bertahan di Sulawesi Tengah ketika kapitulasi, yaitu:

1. Detasemen Kapten J.D.T.W. Abbink yang bersembunyi di Ampana bersama 10 orang anggotanya.
2. Detasemen Letnan H.J. Harberts dengan kekuatan 80 anggota KNIL yang berada di Palu.
3. Detasemen Letnan H.A. van Daalen bersama anggota milisinya yang berkekuatan 60 orang yang berada di Poso.
4. Kelompok Residen Manado, F.C.H. Hirschmann, bersama pengawal dan pengikutnya yang bersembunyi di Lembah Bada'.
5. Detasemen Letnan J.A. De Jong yang berkekuatan 60 anggota KNIL dan kekuatan milisi sebanyak 60 orang yang berada di Kolonodale (wilayah kekuasaan bekas Kerajaan

<sup>8</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 74.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 48.



Mori).<sup>10</sup>

Pernyataan Mayor Schilmoller menunjukkan bahwa ia menerima pernyataan kapitulasi dan menghendaki seluruh pasukan yang berada dalam komandonya mentaatinya. Itu berarti diharapkan seluruh detasemen yang berada di Sulawesi Tengah wajib mempertahankan kondisi yang ada dan menanti perintah lebih lanjut dari pihak militer Jepang. Berdasarkan perintah itu, Letnan De Jong mengibarkan bendera putih tanda takluk pada 10 Maret 1942 dan mengumpulkan semua anggota detasemennya. Pada kesempatan itu disampaikan berita tentang kekalahan dan penyerahan tanpa syarat dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu ia memerintahkan seluruh anggota pasukannya agar menyerahkan senjata mereka masing-masing dan memanggil pulang semua keluarga yang mengungsi di daerah pedalaman untuk berkumpul kembali di Kolonodale. Sikap itu menunjukkan bahwa Letnan De Jong telah bersedia menerima kapitulasi dan menanti instruksi lebih lanjut dari pihak pemerintah

militer Jepang.

Pihak pemerintah militer Jepang tidak dapat dengan segera mengambilalih kedudukan pemerintahan setelah kapitulasi karena kapal yang mengangkut pejabat-pejabat pemerintah sipil ditenggelamkan oleh armada Sekutu. Oleh karena itu langkah pertama yang dilaksanakan setelah kapitulasi adalah mendekati tokoh-tokoh pergerakan nasional dan mengajak mereka bekerjasama. Itulah sebabnya hingga akhir bulan Maret belum juga diperoleh instruksi atau tindakan pengambilalihan kedudukan kekuasaan. Sehubungan dengan itu, komandan teritorial mengundang semua pelaksanaan tugas pemerintahan sipil dan militer di Sulawesi Tengah untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret 1942 di Tentena.

Pada pertemuan itu dicapai kesepakatan, termasuk Letnan De Jong dan Van Daalen, untuk menyatakan kapitulasi. Harberts mencatat pernyataan kesepakatan itu dengan menyatakan "kami menyatakan: semua telah menyatakan menyerah tanpa syarat, karena itu



Detasemen Kolonodale, Maret 1941

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 70-71.

kami juga menyatakan menyerah tanpa syarat" (*We zeiden: alles heeft gecapituleerd, dus wij capituleren ook*).<sup>11</sup> Selain keputusan itu, dalam pertemuan itu dicapai pula beberapa kesepakatan penting menyangkut proses peralihan setelah kapitulasi. Pertama, adalah setiap komandan detasemen kembali ke pos masing-masing untuk memimpin detasemen KNIL yang wilayahnya belum diambilalih oleh pihak militer Jepang. Kedua, Mayor Schilmoller, komandan teritorial, akan berangkat ke Manado untuk menyatakan kapitulasi. Terakhir, semua perwira militer yang berada di Sulawesi Tengah hanya boleh melaksanakan perintah yang diperoleh dari komandan teritorial atau dari pimpinan militer Jepang.

Setelah pertemuan itu, semua perwira militer ke Poso untuk melepaskan keberangkatan komandan teritorial ke Manado. Pada tanggal 23 Maret, komandan teritorial berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Togian. Ikut dalam rombongan itu, Residen Manado, Hirschmann dan sekretarisnya, Asisten Residen Poso, Risdijk Symons bersama sejumlah pejabat militer dan pemerintahan, termasuk seorang Letnan penerbang Australia, Howard. Setelah melepaskan keberangkatan mereka, De Jong kembali ke posnya. Ia kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk mengemas semua persenjataan dan amunisi. Selanjutnya ia memerintahkan kepada sersan De Bruin, dengan didampingi sejumlah personel militer, membawa persenjataan yang telah dikemas itu ke Poso pada tanggal 25 Maret 1942. Persenjataan itu, menurut rencana akan dikirim ke Manado dan diserahkan kepada pimpinan militer Jepang sebagai wujud pernyataan kapitulasi.

## Reaksi Perlawanan De Jong (Gerilya di Mori)

Setelah mengurus pengiriman senjata, amunisi, dan anggota pasukannya ke Poso, De Jong didampingi oleh ajudannya, Toepon, yang disertai oleh A. Mustafa berangkat meninggalkan Kolonodale pada tanggal 27 Maret. Dalam perjalanan itu mereka singgah dan bermalam di pos militer di Londi. Pada malam itu mereka mendengar berita Radio Melbourne (Australia) yang disampaikan oleh seorang perwira Angkatan Udara KNIL, Major Jenderal L.H. van Oyen, berita radio itu menyampaikan



Letnan Satu J.A. de Jong  
Komandan Detasemen Kolonodale

<sup>11</sup> Ibid, hal. 77.

bahwa Ratu Belanda telah mengungsi ke London (Inggris) dan ia berpesan agar setiap aparat militer dan pemerintahan yang belum diserahterimakan kepada penguasa militer Jepang terus mempertahankan kekuasaan. Dalam waktu singkat bantuan akan diberikan. Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah dikirim ke Australia pada awal Maret. Kami yang berada di Australia sementara sibuk mempersiapkan serangan udara. Oleh karena itu diharapkan agar semua detasemen yang berada di berbagai pulau di Hindia Belanda yang belum diambilalih oleh pemerintah militer Jepang agar terus berjuang secara gerilya.<sup>12</sup>

Berita radio Melbourne ini menggoyahkan sikap dan pendirian De Jong mengingat instruksi itu datang dari seorang perwira tinggi. Apalagi perwira itu dalam keadaan yang luar biasa juga bertugas sebagai ajudan Ratu Belanda, Wilhelmina, selain itu, mengungsinya Ratu Belanda ke London, juga mengisyaratkan bahwa Belanda telah masuk menjadi bagian pasukan Sekutu dalam berperang melawan Jepang. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa ia telah memutuskan bersama Komandan Teritorial untuk menerima kapitulasi, dan keputusan itu telah disampaikan kepada komandan militer Jepang di Manado. Oleh karena itu ia tetap berpendirian untuk berangkat ke Poso dan menyerahkan persenjataan, amunisi, dan personil detasemennya kepada Letnan Van Daalen pada tanggal 30 Maret dan menanti instruksi lebih lanjut. Setelah penyerahan itu ia kembali ke Tentena, tempat berkumpul keluarganya dan keluarga-keluarga lain dari staf

detasemennya.

Pada pagi hari, tanggal 1 April 1942, tiba kapal *Urania* berbendera Jepang di dermaga Poso. Letnan Van Daalen, komandan detasemen Poso, memandang kedatangan kapal itu atas perintah komandan militer Jepang sehingga dengan segera mengirim kurirnya. Sersan yang ditunjuk sebagai kurir itu berkemeja putih dan memegang bendera putih menaiki kapal itu. Dalam kapal itu tidak terlihat adanya pasukan militer Jepang, kecuali tiga orang bumiputera yang dinyatakan sebagai delegasi, yaitu Ratumbanua,<sup>13</sup> seorang putera Raja Poso, dan Tumbel.<sup>14</sup> Delegasi itu dipimpin oleh tokoh yang disebut pertama. Ketika tiba ia langsung bergiat menjalin hubungan dengan Wim Warouw, seorang nasionalis Indonesia, yang ketika Asisten Residen Poso, Rijdsijk, berangkat bersama rombongan Schilmoller ke Manado diangkat menjadi pejabat Asisten Residen Poso.

Kepada kurir yang datang itu disampaikan bahwa mereka adalah delegasi yang dikirim oleh pihak otoritas Jepang untuk mengurus keberangkatan kesatuan KNIL di Sulawesi Tengah untuk diadili di Manado dan apabila tidak dengan segera menyerahkan persenjataan militernya akan dibunuh. Melihat kondisi dalam kapal itu dan keterangan yang diperoleh dari ketua delegasi tentang tugas yang diemban itu ternyata belum memuaskan hati Van Daalen. Hal itu tentu berkaitan dengan kedudukan ketua delegasi itu, yang pada waktu sebelumnya adalah seorang bekas bawahannya. Oleh karena itu diperintahkan kembali kepada kurir untuk menanyakan surat perintah dari

sebagai sersan pada pasukan milisi Manado di Poso. Ia kemudian diberhentikan dari tugas, ketika Schilmoller menghendaki pembebasan pasukan milisi.

<sup>14</sup> Tumbel adalah seorang guru yang bertugas di Luwuk Banggai pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

---

<sup>12</sup> Baca: *Ibid*, hal. 80, 81. Dalam siaran radio itu dinyatakan pula bahwa pasukan Angkatan Udara akan segera memberikan bantuan dan berjuang untuk membebaskan Hindia Belanda.

<sup>13</sup> Ratumbanua adalah seorang bekas sersan pada detasemen KNIL di Poso dan juga pernah menjabat

otoritas Jepang. Jawaban atas permintaan itu sangat mengejutkan, karena Ratumbanua menyatakan "ia boleh saja melihat surat perintah itu, namun setelah itu dieksekusi" (*hij die mocht zien. Maar dat hij dan vervolgen geexecuteerd zou worden*).

Pernyataan ketua delegasi itu merisaukan anggota KNIL yang telah berkumpul di Poso. Dalam keadaan yang tegang itu, Sersan De Bruin, salah seorang anggota detasemen Kolonodale, yang atas perintah De Jong, mengangkut persenjataan detasemennya ke Poso, mengajak Malengsang (anggota KNIL bawahannya) untuk bertindak mengambil mitraliur pesawat tempur<sup>15</sup> dan menembak kapal Urania. Akibatnya kapal itu mengalami kerusakan.

Kejadian itu mendorong pejabat pemerintah setempat memerintahkan kesatuan kepolisian untuk menangkap pelaku penembakan kapal itu. Akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dua pelaku itu dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Setelah penahanan itu, ketua delegasi Jepang mendesak agar seluruh pasukan KNIL menyatakan menyerah. Letnan Van Daalen, komandan detasemen Poso, menyatakan bahwa kami telah menyatakan menyerah sejak kapitulasi; sehubungan dengan sikap itulah Mayor Schilmoller, Komandan teritorial Sulawesi Tengah, telah berangkat ke Manado untuk menyampaikan langsung kepada pihak pemerintah militer Jepang. Oleh karena itu penyerahan akan terjadi. Ia selanjutnya menyerahkan semua persenjataan militer KNIL yang telah dikumpulkan di Poso itu kepada ketua delegasi Jepang itu.

Persenjataan KNIL yang diserahterimakan itu, selanjutnya atas persetujuan pejabat kepala pemerintahan Wim Warouw, disimpan di

kantor pemerintahan Afdeling Poso. Semua anggota KNIL yang telah berada di tempat itu diperintahkan untuk masuk ke tangsi militer dan dilarang ke luar sebagai wujud keinginan untuk menyerah. Apa yang diperintahkan oleh delegasi Jepang itu ternyata dilaksanakan dengan baik. Bagi Ratumbanua kenyataan ini memberikan indikasi yang kuat bahwa penyerahan telah berlangsung dan tinggal menanti kedatangan Letnan De Jong, komandan detasemen Kolonodale. Oleh karena itu diberikan tugas kepada Letnan Van Daalen untuk memanggil komandan detasemen Kolonodale datang ke Poso dan menyerahkan diri kepada delegasi Jepang itu.

Letnan Van Daalen, pada hari itu juga, mengutus seorang kurir ke Tentena untuk menemui Letnan De Jong dan menyampaikan bahwa delegasi Jepang telah datang di Poso dan menyatakan kepada kita untuk menyerah. Kurir itu tiba di Tentena pada hari Kamis, 2 April 1942, sekitar pukul 14.00. Ketika kurir itu menemui Letnan De Jong dan menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi di Poso dan pesan yang diembankan untuk disampaikan kepadanya, ia beranggapan bahwa Van Daalen telah menyerah dan apa yang dilakukan oleh Ratumbanua itu adalah muslihat untuk membalas dendam atas pemberhentiannya sebagai komandan pasukan milisi di Poso. Oleh karena itu ia memutuskan untuk tidak menyerahkan diri ke Poso sambil memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghukum Ratumbanua, tokoh yang bersandiwara sebagai ketua delegasi militer Jepang.

Langkah pertama yang diambil adalah mengusahakan evakuasi para isteri dan anak-anak anggota KNIL dan lainnya yang berkumpul di Tentena ke tempat yang aman yaitu ke

<sup>15</sup> Mitraliur pesawat tempur itu diambil dari pangkalan gudang senjata di Salabangka pada bulan Januari

1942, dan merupakan salah satu persenjataan militer yang telah kemas untuk diangkut ke Manado.

daerah Bada', yang terletak sekitar 6 Km dari Tentena. Proses evakuasi itu diemban dan dilaksanakan dengan senang hati oleh domini Jan Kruyt dan domini H. Trommel. Sementara mengusahakan proses evakuasi itu, pada hari yang sama, Kamis 2 April 1942, tiba Letnan Van Daalen dan Sersan Onwensen. Setelah mengkisahkan peristiwa di Poso sehubungan dengan kedatangan Ratumbanua, tampaknya Letnan De Jong menjadi yakin akan kebenaran dugaannya itu dan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan menyerah kepada delegasi Jepang itu. Sikap itu tentu berkaitan dengan kebijakan otoritas Jepang yang keliru.

Ratumbanua adalah seorang bekas bawahan dalam dinas kemiliteran Belanda dan menjadi sersan pada pasukan milisi di Poso. Ia diberhentikan dari tugas itu sebelum pemerintahan Hindia Belanda menyerah atas perintah dari komandan teritorial Mayor Schilmoller yang mencurigai pasukan milisi berpihak kepada pihak Jepang. Oleh karena itu kehadirannya itu dicurigai bukan sebagai utusan Jepang tetapi sebagai suatu reaksi terhadap pemberhentiannya, mengingat ia datang tanpa dikawal oleh tentara Jepang. Faktor ini yang tampak sangat dominan menciptakan perubahan sikap kesatuan KNIL di Sulawesi Tengah. Dalam kondisi yang demikian, berita radio Mayor Jenderal L.H. van Oyen dari Melbourne yang didengar beberapa hari yang lalu, merangsang dan mendorong untuk menentukan sikap tegas melakukan perlawanan gerilya terhadap pihak militer Jepang. Namun demikian, ia tidak dapat melakukan perlawanan langsung terhadap Ratumbanua yang menurut rencana akan tiba di Tentena pukul 19.00 dengan pasukan bersenjata untuk menangkap dan membawanya ke Poso, karena semua

persenjataan telah diserahkan dan disimpan di Poso dan kini telah berada dalam kewenangan orang yang menyatakan diri sebagai delegasi militer Jepang itu.

Informasi menyangkut rencana delegasi militer Jepang untuk datang ke Tentena bersama pasukan militer untuk menangkapnya itu mendorongnya untuk melakukan penghadangan. Itulah sebabnya Letnan De Jong memutuskan untuk meninggalkan Tentena bersama pengawalnya, Sersan Tupon, ke kampung Sangira yang terletak pada jalur jalan utama Poso-Tentena, dengan harapan dapat mencermati gerakan militer dari Poso ke Tentena. Ketika diketahui tidak ada iringan pasukan dari Poso ke Tentena, maka ia segera kembali ke Tentena.

Ia selanjutnya mengatur strategik bagaimana melucuti dan menawan delegasi militer Jepang itu. Untuk tujuan itu, ia langsung bergiat mengumpulkan sejumlah anggota pasukan yang masih berada di tempat itu, selain Letnan Van Daalen, Sersan Onwensen, dan Tupon, diantaranya adalah Kors, dokter tentara Lubbers, dan tiga orang anggota KNIL lainnya. Dengan bersenjatakan satu karaben, satu pistol, dan beberapa kelewang, mereka langsung berangkat ke Poso dengan menggunakan sebuah mobil.<sup>16</sup> Selama dalam perjalanan itu, Letnan De Jong mengatur siasat dengan membagi kelompok itu atas tiga bagian, masing-masing terdiri dari tiga orang. Kelompok pertama dipimpin oleh Letnan De Jong, dengan tugas membebaskan anggota KNIL yang ditawan di tangsi militer Poso; kelompok kedua dipimpin oleh Letnan Van Daalen, dengan tugas untuk menangkap Ratumbanua yang menginap di rumah Asisten Residen, Wim Warouw, dan kelompok lainnya

minum semua anggota dengan harapan dapat menghilangkan kejutan mereka untuk kelak bertindak setelah tiba di Poso.

---

<sup>16</sup> Dalam perjalanan ke Poso, rombongan itu menjumpai seorang yang membawa 2 bambu saguer. Letnan De Jong membeli saguer itu dan memberi

dipimpin oleh dokter Lubbers, dengan tugas merebut kembali persenjataan militer yang telah dikemas dan disimpan di Kantor Asisten Residen Poso. Jarak antara tempat sasaran aksi itu tidak terlalu berjauhan, diperkirakan jarak antara yang satu dengan lainnya sekitar 100 meter. Aksi akan dilaksanakan secara bersamaan, setelah ada komando untuk beraksi.

Mereka tiba di Poso pada tengah malam, dan mendapati kota ini dalam suasana yang sunyi senyap, sehingga dengan leluasa masing-masing kelompok menuju ke objek sasaran aksinya, sambil secara cermat memperhatikan lingkungannya seraya menanti isyarat memulai aksi. Setelah semua telah berada pada objek sasaran aksi, maka isyarat untuk bertindakpun diberikan sehingga serentak beraksi. Tempat penyimpanan senjata dan amunisi ternyata tidak dijaga dengan baik, sehingga dikatakan sebagai pos yang tertidur. Karena itu dengan mudah semua persenjataan dan amunisi dapat direbut dan dikuasai kelompok dokter Lubbers. Letnan De Jong juga dengan mudah menduduki dan menguasai tangsi dan membangunkan semua prajurit. Pada waktu itu ada seorang prajurit jaga (polisi) yang mencoba melarikan diri namun tertembak mati. Pada kesempatan itu, De Jong langsung menghadapkan mereka pada tiga pilihan: pertama, yang bersedia ikut pada Belanda untuk berperang melawan Jepang boleh ikut padanya; kedua, yang ingin pulang ke rumah dan kembali menjadi anggota masyarakat, silahkan tinggalkan pasukan, dan yang terakhir adalah pihak yang berkeinginan ikut bersama Ratumbanua untuk menyerah kepada Jepang di Manado. Hampir semua prajurit termasuk pasukan milisi menyatakan bersedia mengikuti Belanda, kecuali tiga orang, yaitu: Sersan Pinontoan, Henson, dan Kaunang yang memilih kembali ke rumah. Tidak ada yang memilih atau menyatakan sikap untuk kelak berangkat ke Manado untuk menyerah

kepada pemerintah militer Jepang. Pada malam itu juga langsung bergiat membebaskan Sersan De Bruin dan Malengsang dari sel tahanan.

Aksi Letnan Van Daalen juga berlangsung mulus. Ratumbanua berhasil dibangunkan dan ditangkap dan langsung diinterogasi menyangkut keterlibatan dan kehadirannya mengemban tugas Jepang dan perlakuan Jepang terhadap tawanannya. Dalam interogasi itu, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia ditetapkan menjadi ketua dari tiga orang yang diutus sebagai delegasi militer Jepang. Ia dipilih karena memiliki pengalaman militer dan mengetahui serta mengenal beberapa komandan KNIL dan anggota militer Belanda di Poso. Selanjutnya ia menceritakan bagaimana sikap pihak militer Jepang terhadap tawanan perangnya, khususnya pasukan KNIL yang ditawan dan menyerah. Semua tawanan diinterogasi sebelum dimasukkan ke kamp tahanan perang. Bagi yang bersikap menentang disiksa dan bahkan ada yang dieksekusi di tempat. Informasi ini tidak dapat disangkal menambah faktor pendorong bagi Letnan De Jong untuk tidak ingin menyerah dengan melakukan perlawanan bergerilya.

Keesokan harinya Letnan De Jong mengurus keberangkatan Ratumbanua dengan sebuah perahu bermotor kembali ke Manado, karena kapal Urania mengalami kerusakan berat akibat tembakan mitraliur dari Sersan De Bruin, belum selesai diperbaiki. Selain itu ia menuliskan sepucuk surat yang ditujukan kepada pihak penguasa militer Jepang dan memberikan kepada delegasi militer Jepang itu dengan perintah agar surat itu diberikan kepada panglima tentara pendudukan Jepang di Manado. Isi pokok surat itu memuat pernyataannya yang tegas untuk tidak menyerah. Pasukannya dinyatakan melakukan tindakan disersi dari kesatuan KNIL yang telah menyerah, jika tawanan perang diperlakukan dengan cara yang tidak ter-

hormat. Delegasi militer Jepang itu berangkat pada siang hari, tanggal 4 April 1942.

Letnan Van Daalen, meskipun dia yang ditunjuk oleh Mayor Schilmoller menjadi komandan pasukan KNIL di Sulawesi Tengah sebelum berangkat ke Manado karena berkedudukan sebagai komandan detasemen KNIL di Poso dan usianya yang lebih tua dari komandan detasemen lainnya, namun dalam keadaan itu, Letnan De Jong yang tampil menjadi komandan pasukan disersi yang menentang pasukan militer Jepang. Perintah dan tindakan Letnan De Jong senantiasa disetujui dan didukungnya. Dalam pembicaraan dua komandan detasemen itu, usul De Jong untuk mengkonsentrasikan pasukan di Tentena disepakati dan disetujui. Oleh karena itu diorganisasikan keberangkatan pasukan ke Tentena dengan truk militer pada hari itu juga. Setelah itu, De Jong dan kelompoknya juga kembali ke Tentena dan tiba pada hari itu juga. Sementara rombongan pasukan yang berangkat pertama dengan truk militer baru tiba pada keesokan harinya.

Setelah beberapa hari berada di Tentena, pada tanggal 8 April, De Jong mengirim satu kelompok kecil pasukan dibawah pimpinan Sersan Mayor De Jager ke Ampana untuk menjemput pasukan dari Sersan Klinkhamer kembali ke Tentena. Pada hari yang sama, De Jong berangkat dengan sejumlah anggota militer ke Kolonodale, dengan maksud untuk menginspeksi detasemen Kolonodale yang dipimpin oleh Sersan Mayor Gerissen yang ditinggalkan di sana, sekaligus bermaksud untuk menanyakan kepada mereka sikap mereka untuk bergabung berperang melawan Jepang atau menyerah dan berangkat ke Manado. Setelah menceritakan kepada mereka kejadian-kejadian yang dialami dan tindakan yang telah dilakukan, ia menawarkan opsi itu kepada anggota detasemennya. Mereka terke-

san dengan sikap tegas dari komandannya dan menyatakan siap mendukung perlawanan gerilya terhadap bala tentara Jepang.

Sehari setelah keberangkatan komandan detasemen Kolonodale itu pada 9 April 1942, datang utusan dari Wim Warrouw membawa berita tentang kedatangan dua kapal Jepang dan kapal Togian di Poso, dengan pesan agar semua dapat mentaati perintah dari otoritas Jepang untuk mengangkut seluruh pasukan dan keluarga ke Manado. Menjawab perintah itu, Letnan Van Daalen menulis sepucuk surat kepada delegasi Jepang dengan menceritakan apa yang diperbuat dan terjadi ketika Ratumbanua diutus untuk menyelesaikan persoalan militer di Sulawesi Tengah. Karena itu ia tidak dapat mempercayai berita dan perintah yang disampaikan oleh utusan itu dan berharap pembicaraan baru akan dilakukan setelah Letnan De Jong kembali dari Kolonodale. Surat itu diberikan kepada utusan itu untuk diberikan kepada pejabat Asisten Residen dan selanjutnya disampaikan kepada komandan pasukan militer Jepang di Poso.

Keesokan harinya datang utusan membawa sepucuk surat dari otoritas Jepang di Poso yang isi pokoknya memerintahkan Letnan Van Daalen harus datang sendiri ke Poso. Panggilan itu dipandang sebagai strategik untuk menawannya dan memaksa pasukan yang berada di Tentena menyerah. Karena itu diperintahkan kepada utusan itu kembali tanpa membawa pesan. Setelah itu ia memanggil para *zendeling* dan keluarganya berkumpul. Pada kesempatan itu, ia menyatakan kepada mereka bahwa ia dan pasukannya tidak akan menyerah kepada tentara Jepang. Setelah itu ia mengajak semua mereka (para *zendeling* dan keluarganya serta keluarga anggota KNIL yang berkumpul di tempat itu) untuk mengikuti keputusannya, namun mereka menolak untuk mengikutinya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk memindah-

kan pasukan militer. Pada pagi hari, tanggal, 11 April 1942, dengan menggunakan perahu motor dari seorang pedagang Cina di Tentena, Van Daalen bersama anggota militernya yang berjumlah sekitar 100 orang tentara berangkat ke Tindoli, salah satu perkampungan yang terletak pada kawasan Danau Poso, di salah satu sudut jauh dari kota Tentena.

Domini Jan Kruyt dan Trommel, atas nama para *zendeling* berangkat ke Poso pada hari itu juga untuk menyampaikan kesediaan dan kesiapan mereka diberangkatkan ke Manado. Beberapa jam kemudian dua *zendeling* itu kembali dengan membawa sepucuk surat untuk Van Daalen. Mereka sesungguhnya mengetahui bahwa Letnan Van Daalen bersama pasukannya telah berangkat meninggalkan Tentena, namun mereka tidak menginformasikannya kepada komandan tentara Jepang. Surat itu diberikan kepada seorang utusan untuk menyampaikannya kepada Van Daalen yang telah bermarkas di Tindoli. Isi pokok surat itu menetapkan memberikan kesempatan terakhir kepadanya untuk menyerahkan diri, namun tetap diabaikannya.

Kepada dua *zendeling* itu juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh warga sipil Belanda agar segera datang ke Poso dan berangkat ke Manado. Itulah sebabnya setelah mereka kembali, disampaikan agar semuanya berkemas. Para *zendeling* dan keluarga mereka bersama isteri anggota KNIL dan anak-anaknya, seluruhnya berjumlah sekitar 30 orang, berangkat ke Poso dengan menggunakan sebuah bus pada hari itu juga. Mereka tiba pada malam harinya dan langsung diperintahkan naik ke kapal Togian. Sebelum kapal itu berangkat, datang seorang komandan militer Jepang dan menanyakan tentang De Jong. Pada kesempatan itu, isteri De Jong menawarkan untuk menulis sepucuk surat kepada suaminya untuk memohon kepadanya agar menyerah,

namun permintaan itu tidak dikabulkan. Setelah komandan militer Jepang bersama pengawalnya turun, kapal pengangkut warga sipil itu berangkat meninggalkan pelabuhan Poso menuju ke Manado, tepat pada pukul 23.00.

Tindakan pembangkangan terhadap perintah otoritas Jepang itu menimbulkan kesan bahwa pihak lawan akan melakukan tindakan militer. Sehubungan dengan itu, Tentena yang selama ini dijadikan markas dipandang tidak menjamin keamanan, karena kemungkinan akan menjadi sasaran serangan pertama. Oleh karena itu Van Daalen menetapkan untuk tetap menjadikan Tindoli sebagai markas pasukannya, sementara De Jong tetap pada daerah teritorialnya di wilayah Mori. Dalam perkembangan kemudian, Van Daalen mencoba menelusuri lagi wilayah Bada' yang dahulu direncanakan menjadi tempat pengungsian. Setelah kembali dari Bada' ke Tentena pada 10 Mei 1942, datang seorang jaksa bumiputera yang bertugas di Poso, yaitu Pontoh membawa sepucuk surat yang dikirim oleh Mayor Schilmoller yang ditujukan kepada De Jong. Oleh karena De Jong tidak berada di Tentena, maka Van Daalen menyuruh kurir untuk mengantar surat itu kepada Letnan De Jong yang berada di Kolonodale. Isi pokok surat itu mengharapkan agar Letnan De Jong bersikap wajar terhadap kapitulasi dan menyerah bersama anggota detasemen kepada pihak militer Jepang. Tidak berapa lama kemudian kurir itu kembali dengan membawa surat balasan dan kemudian disampaikan kepada delegasi Jepang yang berada di Poso untuk diteruskan kepada Mayor Schilmoller di Manado.

Komandan tentara Jepang di Manado, Hashimoto, setelah membaca dan membicarakan perihal surat balasan yang diterima itu dengan Schilmoller, diputuskan untuk mengirim tentara Jepang ke Poso, dengan tugas



mengambilalih kedudukan detasemen Poso. Menurut catatan Tumimomor, jumlah tentara Jepang yang datang ke Poso itu sebanyak 40 orang tentara. Ikut dalam pasukan ini Amoh, yang bertugas sebagai juru bicara. Pasukan militer ini tidak pernah melakukan aksi militer setelah berada di Poso.<sup>17</sup> Hal itu memberikan indikasi bahwa mereka datang dengan tugas memelihara ketenteraman dan bergiat menyelesaikan persoalan dengan De Jong secara damai. Selain itu juga pemerintah militer Jepang menyadari bahwa persoalan ini terjadi akibat kesalahannya dalam proses penyerahan pasukan KNIL setelah kapitulasi.

De Jong, setelah mengetahui kedatangan pasukan militer Jepang, berangkat ke Tindoli dan kemudian memerintahkan kepada Meindert Kembuan dan Reserverkops berangkat ke Kolonodale untuk mengamati apakah pihak musuh juga telah mengirim pasukan militer ke Kolonodale. Tidak berapa lama kemudian diperoleh informasi bahwa tidak ada pasukan militer Jepang yang datang ke Kolonodale. Hal ini memberikan kesan bahwa memang pihak Jepang belum berkeinginan untuk melakukan tindakan militer terhadap sikap pembangkangan dari Letnan De Jong dan pasukannya. Namun demikian diperintahkan tetap siaga untuk menghadapi kemungkinan serangan militer Jepang, dan terus mengawasi gerak pasukan militer Jepang di Poso.

Pada tanggal 16 Mei 1942, sebuah mobil keluar dari Poso. Dengan sigap mobil itu ditahan oleh regu pengintai yang ditempatkan pada jalan yang dilalui mobil itu. Ketika diketahui bahwa De Jong berada bersama pasukan yang menghadang mobil itu, maka

dengan segera dokter Kandow dan jaksa Pontoh yang merupakan utusan Jepang yang berada dalam mobil itu turun dan menemuinya. Mereka langsung menyerahkan surat yang ditujukan kepadanya dan menyampaikan pesan dari perwira tentara Jepang yang ditugaskan di Poso untuk dapat berbicara secara pribadi dengannya. Pesan itu diterima baik dan ditentukan tempat dan waktu pertemuan besok siang, dengan syarat delegasi Jepang itu harus datang dengan menggunakan mobil pribadi, mengibarkan bendera putih, dan tanpa bersenjata. Jika tidak mematuhi persyaratan yang diajukan maka akan diserang.

Setelah pertemuan itu, delegasi itu langsung kembali ke Poso dan menyampaikan kesediaan De Jong untuk melakukan pembicaraan dengan perwira militer Jepang besok siang. Keesokan harinya dengan menggunakan mobil Ford pribadi, delegasi tentara Jepang berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan dan tiba sekitar pukul 14.00. Mereka diperiksa oleh pasukan penjaga, dan setelah itu diantar untuk menemui De Jong dan Van Daalen yang telah menunggu di bawah pepohonan. Pada pertemuan ini, pihak Jepang kembali memohon kepada De Jong agar bersedia menyerah berdasarkan kapitulasi. De Jong merespon permintaan itu dengan menyatakan akan diputuskan setelah berunding dengan seluruh anggota militernya.

Selain jalur perundingan ini, panglima militer di Manado juga bergiat mendapatkan juru runding yang dipandang lebih bercorak kekeluargaan yang mungkin lebih efektif. Untuk itu dipilih Willem J. Lantang, seorang bekas pegawai pada kantor Onderafdeling Kolonodale yang pada tahun 1939 dipindahkan

---

<sup>17</sup> Menurut informasi yang diungkapkan oleh Hegener, panglima tentara Jepang Hashimoto, memandang sikap Letnan De Jong itu wajar. *Ibid*, hal. 111. Hal itu mengisyaratkan bahwa surat De Jong itu tentu berkaitan dengan peristiwa kehadiran Ratumbanua,

seorang bekas bawahan militer Belanda untuk memproses penyerahan setelah kapitulasi, sehingga menimbulkan ketersinggungan dan menolak untuk menyerah.

ke Onderafdeling Luwuk. Ia menikah dengan Runi Marunduh seorang puteri Raja Mori XIII, Owolu Marunduh, sehingga tidak akan menyulitkannya untuk menelusuri informasi tentang pertahanan detasemen Kolonodale. Setelah mendapat petunjuk dari panglima militer Hashimoto dan diberikan surat untuk disampaikan kepada Letnan De Jong serta setelah mendapat instruksi dari komandan pasukan Jepang Goro Myamoto, ia berangkat dengan kapal Urania menuju ke Kolonodale dan tiba pada 20 Mei 1942. Ketika ia mendarat dengan sekoci kapal ke dermaga, muncul dua orang saudara dari isterinya, yaitu Sungka Marunduh dan Ari Marunduh (Bunuari) menyambut kedatangannya. Karena kondisi darurat perang, mereka tidak mengantarkan langsung ke rumah tetapi mengantarkannya untuk melapor ke tangsi militer. Setelah



Ari Marunduh (Bunuari). Koleksi Pribadi: Ny. Rosni Alatas Marunduh, Palu.

menjelaskan tugas yang diembankan kepada petugas jaga, ia diizinkan bermalam di tangsi militer.

Keesokan harinya ia berangkat dengan dikawal oleh dua orang tentara melalui Tinompo dan Korowalelo untuk menemui komandan detasemen. Namun usaha itu tidak berhasil sehingga ia meneruskan perjalanannya ke Sampalowo untuk menemui ayah mertuanya. Keesokan harinya baru kembali ke Kolonodale, namun karena ia diundang oleh Rob Warouw, kepala pemerintahan onderafdeling Kolonodale, maka malam itu ia tinggal di rumahnya yang terletak di Korolaki. Atas bantuan kepala pemerintahan itu, Lantang akhirnya dapat menghadap Letnan De Jong di markasnya yang terletak sekitar 3 km dari Korolaki. Setelah menyampaikan pesan dan menyerahkan surat dari Panglima militer Jepang di Manado, Lantang diminta untuk keluar sebentar karena



Willem Joachim Lantang Koleksi Pribadi: Letkol Polisi (Purn) Drs L.L. Lantang, Jakarta.

komandan detasemen ingin merundingkan dengan perwira bawahannya. Setelah pukul 11.00 ia dipanggil kembali dan diberikan surat balasan untuk panglima militer Jepang, sambil menyatakan secara tegas bahwa pasukannya tidak bersedia menyerahkan diri. Setelah itu De Jong mengusahakan transportasi laut untuk mengantar delegasi Jepang itu kembali ke Manado, karena kapal *Urania* yang membawanya ke Kolonodale telah kembali ke Luwuk. Kapten kapal *Urania* tidak berani menunggu lama karena takut kapalnya akan ditembak oleh pasukan KNIL karena menggunakan bendera Jepang, seperti yang dialaminya ketika mengantar delegasi ke Poso.

Keputusan komandan detasemen militer Hindia Belanda itu menunjukkan bahwa keputusan terakhir adalah siap berperang melawan tentara Jepang yang datang ke wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu diusahakan untuk terus dapat menjalin hubungan radio dengan pasukan Sekutu di Australia. Pada tanggal 9 Juni, pada pukul 10.09 waktu Darwin (Australia) atau pukul 08.39 waktu Sulawesi, stasiun Radio Darwin (*Airradio Darwin*) menerima signal yang lemah dari satu stasiun radio yang menggunakan kode panggilan PNN (kode panggilan Stasiun Radio Kolonodale) yang berusaha mencari hubungan dengan stasiun radio yang menggunakan kode panggilan VKD, yaitu kode panggilan internasional dari Airradio Darwin. Oleh karena itu Airradio Darwin mengirim telegram (morse) yang berbunyi; "saya dapat mendengar anda, OK" (*I can hear you, OK*). Berita yang ditangkap itu mendorong Soeroso Maderoem, pegawai Pos, Telepon dan Telegraf (PTT) yang bertugas di Stasiun Radio Kolonodale bergiat menghubungi Airradio Darwin. Sekitar pukul

16.30 ia kembali dapat menghubungi VKD dan mengirim berita tanpa pemberitahuan kepada komandan detasemen, mungkin karena gem-bira berhasil menghubungi VKD. Berita telegram yang dikirim itu berbunyi:

"Nama saya Soeroso Maderoem, seorang pegawai PTT... orang Jepang tidak berada di sini. Posisi pengirim di Sulawesi Tengah. Di sini ada sejumlah tentara dari Tentara Hindia Belanda yang tidak tunduk pada bendera Jepang, mereka ingin berperang melawan tentara Jepang. Mereka bebas bergerak"<sup>18</sup>

Berita telegram ini mencemaskan Letnan Bakker, anggota militer Hindia Belanda yang mengungsi ke Darwin. Oleh karena itu dengan segera ia mengirim berita ke perwira Dinas Penerangan Angkatan Laut Belanda di Melbourne agar segera menghubungi staf Angkatan Laut Belanda untuk menyampaikan berita itu. Selain itu ia juga memerintahkan kepada personil Airradio Darwin agar sedapat mungkin mengurangi kontak dengan PNN, kecuali berita yang sangat mendesak dan juga diharapkan agar berhati-hati dengan berita-berita yang diperoleh. Tindakan itu dilakukan karena nama Soeroso Maderoem tidak dikenal dalam daftar Dinas Militer Hindia Belanda.

Keberhasilan Soeroso Maderoem menjalin kontak dengan Airradio Darwin itu menggem-birakan hati Letnan De Jong. Oleh karena itu ia menulis berita telegram untuk dikirimkan kepada Panglima *South West Pacific Area Command* (SWPA) atau Komando Mandala Pasifik Barat Daya, Jenderal MacArthur. Berita telegram yang dikirim pada 10 Juni 1942 pukul 06.38 (pukul 08.08 di Darwin) itu berbunyi:

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 131. Naskah telegram itu: *My name is Soeroso Maderoem and am a PTT man. Am only ait station intact. Japs not here. Position given as Middle*

*Celebes. Here are some soldiers of N.E.I. not under Nippon flag who will fight against Jap Troops. They are free in the woods.*

"Terdapat 150 orang anggota militer dari Tentara Hindia Belanda di Sulawesi Tengah yang tidak ingin menyerah kepada Jepang yang berada dalam komando. Kami membutuhkan bantuan. Tolong kirimkan uang dan 20 pucuk senapan mesin dan amunisi dengan menggunakan pesawat. Sedapat mungkin karaben mitraliur dari tipe kami (tipe Belanda). Kapal terbang dapat dengan mudah mendarat di Teluk Kolonodale oleh karena kami di sini hingga sekarang belum diketahui Jepang. Dan kemungkinan lain adalah menerjunkan apa yang kami butuhkan dengan menggunakan parasut dekat Tinompo, yang berada sekitar 20 mil arah barat daya Kolonodale. Saya akan melambatkan bendera Belanda, apabila saya melihat kapal terbang-kapal terbang tuan. Tolong kirimkan jawaban tuan melalui siaran radio dari San Francisco, jika tuan tidak memperoleh hubungan telegram (dengan PNN). Saya sarankan dengan segera membombardir Makassar, Manado, dan Kendari. Jangan membombardir barak-barak. Tolong sampaikan permohonan saya kepada otoritas Hindia Belanda. Terima kasih dan hormat dari J.A. De Jong, Letnan Satu".<sup>19</sup>

Telegram Letnan De Jong yang diterima Airtel Darwin itu dikirim ke Melbourne dan kemudian diketik 12 rangkap dan dikirim kepada semua pimpinan lembaga yang merupakan pusat penentu kebijakan dari SWPA. Pada pihak lain, sikap tegas Letnan De Jong itu mendorong pihak otoritas Jepang memutuskan untuk segera melakukan operasi militer terhadap kedudukan detasemen yang berpusat di

Mori. Tindakan itu dimaksudkan untuk menghukum atas tindakan pembangkangannya, juga untuk mencegah bala bantuan Sekutu yang dapat memperkuat pertahanan mereka. Oleh karena itu diberangkatkan satu kapal perang yang mengangkut pasukan perang yang berjumlah 400 tentara di bawah pimpinan komandan Inobe yang dibantu oleh Kapten Maeda dan didampingi juru bicara Janai.<sup>20</sup> Semua pasukan diperlengkapi dengan senjata otomatis dan mortir. Kapal ini juga mengangkut 16 mobil truk tentara yang memuat logistik. Kapal perang itu tiba di Poso pada 21 Juni 1942.

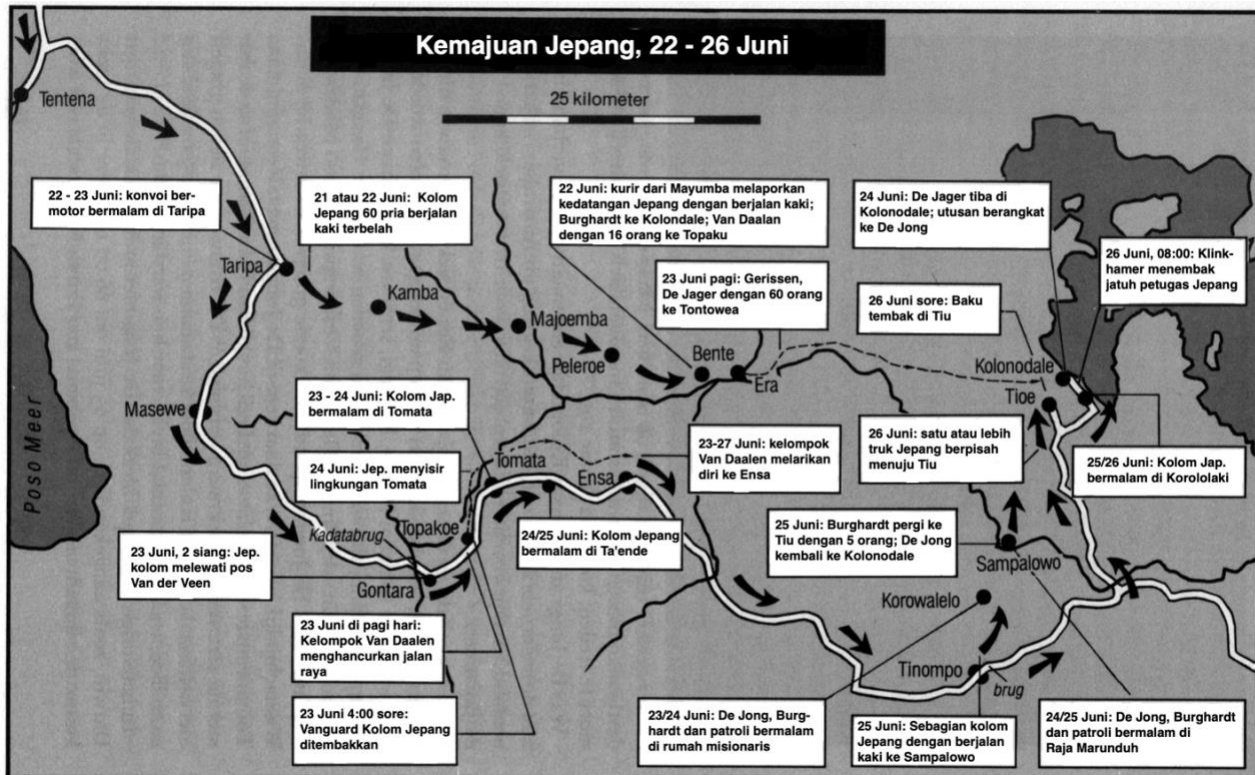
Kedatangan pasukan militer itu disambut oleh Wim Warouw, kepala pemerintahan di Poso dan komandan pasukan Jepang yang telah lebih dahulu ditempatkan di Poso. Pasukan awal yang dikirim untuk mengambil alih detasemen Poso berjumlah 40 tentara, sehingga jumlah seluruh pasukan menjadi 440 tentara. Wim Warouw selanjutnya memberikan nama-nama dari anggota militer Belanda dan bumi-putera yang ikut melakukan perlawanan. Ia juga memerintahkan kepada Jan Tuminomor, pejabat pajak, untuk tampil sebagai penunjuk jalan bagi pasukan militer Jepang ke markas-markas militer Belanda yang membangkang.

Keesokan harinya, tentara telah disiagakan untuk langsung melakukan operasi militer. Aksi militer pasukan ini pertama-tama ditunjukkan ke Tentena, namun ternyata daerah itu telah dikosongkan, sehingga meneruskan perjalanan ke Taripa. Sebagian pasukan bermalam di kampung ini dengan menggunakan gereja sebagai bivak, sementara 40 orang tentara lainnya meneruskan perjalanan ke Mayumba. Kehadiran pasukan militer yang tidak terduga sebelumnya itu menyebabkan pasukan Belanda berusaha meloloskan diri. Namun terus dikejar

lembaga pendidikan HBS, dan kemudian menjadi seorang pengusaha di Manado.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 132.

<sup>20</sup> Janai adalah seorang Jepang yang mengikuti pendidikan Belanda di Makassar. Ia tamat pada



Peta diadaptasi dari Hegener 1990: 148.

sehingga akhirnya terjadi kontak senjata yang pertama di Gontara. Namun serangan dari pihak KNIL itu lebih bersifat menghadang dan memperlambat gerakan maju lawan agar mereka dapat melarikan diri. Keesokan harinya tentara Jepang terus bergerak mengejar pasukan Belanda yang melakukan perlawanan gerilya itu. Akhirnya pada 23 Juni terjadi lagi kontak senjata di Topaku. Pada pertempuran itu Kapten Maeda tertembak mati. Sementara dari pihak Belanda dua orang tertembak mati, yaitu Sersan M. Eerkend dan Sersan Klas Satu Bastiaans.

Ketika pasukan militer Jepang menduduki Mayumba, Sersan Burghardt, dengan menunggang kuda berangkat ke Kolonodale untuk melaporkan kepada Letnan De Jong. Berita itu mendorong ia membawa pasukan dengan truk militer menuju ke Tomata, namun karena ban mobil pecah di Tinompo, sehingga diputuskan untuk beristirahat di kampung itu. Pada

kesempatan itu, De Jong berunding dengan Makita Marunduh, kepala distrik, untuk menghancurkan jembatan Tinompo. Usul itu tidak mendapat persetujuan dengan pertimbangan demi kepentingan rakyat. Akhirnya pasukan De Jong melanjutkan perjalanan ke Sampalowo. Ketika berada di kampung ini, datang kurir menyampaikan informasi bahwa 60 orang tentara Jepang telah berada di Pelero. Oleh karena itu ia meninggalkan pasukannya dan menunjuk Burghardt sebagai komandan, sementara ia kembali ke Kolonodale bersama Wonink pada 24 Juni 1942. Tujuannya adalah kembali mengirim telegram dengan menggunakan pemancar radio pemerintah di Kolonodale melalui Airradio Darwin kepada otoritas pasukan Sekutu di Australia untuk memohon agar dapat mempercepat pengiriman bantuan persenjataan, amunisi, dan logistik. Bantuan itu sangat diharapkan agar dapat bertahan menghadapi serangan lawan.

Di pihak lain, pasukan militer Jepang terus bergerak maju untuk mengepung Kolonodale dan membinasakan pertahanan gerilya Belanda. Dari Peleru pasukan terus bergerak ke Tomata, salah satu basis gerilya namun para gerilya telah berpindah dan berkonsentrasi mempertahankan Kolonodale, karena itu pasukan bergerak terus hingga ke Taende dan bermalam di kampung itu. Keesokan harinya, 25 Juni, kembali bergerak memasuki Tinompo. Di pusat pemerintahan distrik ini mereka menyita dan memporakporandakan simbol-simbol Belanda serta menangkap dan menawan Makita Marunduh. Ia selanjutnya dibawa serta ke Kolonodale dan kemudian diasingkan ke Manado. Ia baru dibebaskan setelah Perang Asia Timur Raya usai.

Setelah menyisir gerilya yang ada di Tinompo, Jepang bergerak menuju pusat pemerintahan dan pertahanan gerilya. Namun ketika tiba di Korolaki, mereka terhalang oleh longsor tanah, sehingga truk-truk pengangkut pasukan tidak dapat terus memasuki Kolonodale. Oleh karena itu pasukan diperintahkan membangun bivak untuk istirahat pada wilayah perbatasan, sekitar 2 km dari pusat pemerintahan itu. Di tempat ini diatur strategik penyerangan Kolonodale, dengan memerintahkan sebagian pasukan militer menyerang dari arah laut dengan menggunakan perahu-perahu penduduk, sementara yang lainnya melakukan serangan darat dari arah Korolaki.

Dalam kondisi yang telah terkepung itu, komandan pasukan gerilya memerintahkan untuk menghancurkan gudang bahan bakar dan stasion radio agar kelak tidak dimanfaatkan oleh musuh. Pada tanggal 27 Juni, tentara Jepang melancarkan serangan yang gencar dari arah darat dan laut secara bersamaan sehingga pasukan KNIL di Kolonodale tidak mampu lagi bertahan, apalagi melumpuhkan serangan lawan. Dalam kondisi terdesak itu Letnan De

Jong memerintahkan pasukannya mengundurkan diri ke daerah pegunungan. Pengunduran diri itu merupakan pilihan yang tepat mengingat pasukan gerilya sudah tidak memiliki amunisi yang memadai untuk melakukan pertempuran. Harapan akan mendapat bantuan senjata, amunisi, dan logistik dari Australia belum juga datang. Akhirnya Kolonodale berhasil diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh tentara pendudukan Jepang.

Untuk terus mengejar dan membinasakan pasukan gerilya, otoritas militer Jepang tidak hanya menjadikan Kolonodale sebagai markas militer, tetapi juga membangun satu markas militer di Lembomanente pada awal Juli 1942. Pasukan yang ditempatkan pada markas ini yang ditugaskan untuk terus mengejar sisa-sisa pasukan gerilya. Pada tanggal 8 Juli terjadi pertempuran paling sengit di bivak gerilya yang berada di wilayah Matangkoro. Bivak militer itu dibangun di perkebunan Salenda. Pertempuran itu berlangsung selama dua hari dan menelan banyak korban. Di pihak Jepang diperkirakan gugur sekitar 70 orang tentara, sementara di pihak gerilya tidak dinyatakan, namun sejumlah pasukan gerilya berhasil ditawan oleh Jepang, antara lain: Gerissen, De Jager, Wonnink, Onwezen, dan Reynhout serta beberapa tentara dan anggota milisi lainnya. Yang lolos dari kepungan berusaha memasuki hutan-hutan dan terus berusaha mencari kontak dengan komandan De Jong. Namun dalam pengembaraan itu, sebagian memutuskan menyerahkan diri karena ketiadaan perbekalan untuk bertahan hidup, sehingga hanya 7 tentara yang dapat sampai dan melaporkan diri hingga ke Era, bivak De Jong, pada tanggal 27 Juli 1942.

Serangan-serangan gencar yang dilakukan oleh bala tentara Jepang itu memaksa pasukan gerilya keluar dari wilayah pertahanannya. Harapan untuk mendapatkan bantuan persenja-



Sersan Klinkhamer.

taan, amunisi, dan logistik tidak kunjung datang. Pada tanggal 29 Juli datang kepala kampung Towi membawa sepucuk surat dari otoritas Jepang untuk Letnan De Jong. Dalam surat itu diinformasikan bahwa bantuan persenjataan, amunisi, dan logistik dari pihak Sekutu telah diambil dan dikuasai oleh tentara Jepang. Selain itu juga diinformasikan tentang kedatangan Mayor Schilmoller bersama bantuan pasukan militer Jepang yang berjumlah 100 orang tentara di Kolonodale. Penyampaian informasi itu diharapkan dapat menggerakkan hati komandan gerilya itu untuk menyerahkan diri.

Bantuan persenjataan, amunisi, dan logistik dari pasukan Sekutu di Australia itu diterjunkan dengan menggunakan parasut pada tanggal 15 Juli 1942 di Koromatantu, desa antara Kolonodale dan Tinompo. Bantuan itu dijatuhkan di daerah itu, karena pasukan pengawal bantuan itu melihat sekitar lima orang berkulit putih (Belanda) berjalan mondar mandir di daerah

itu. Oleh karena itu diyakini sebagai daerah basis gerilya Letnan De Jong, meskipun tidak melihat adanya orang yang melambatkan bendera Belanda seperti yang disampaikan oleh De Jong dalam telegramnya itu, sehingga bantuan itu dijatuhkan. Sebenarnya, ketika tentara Jepang melihat pesawat Sekutu terbang di atas wilayah Kolonodale, mereka memerintahkan kepada anggota gerilya yang ditawan itu keluar dan berjalan modar-mandir untuk mencermati apa yang ingin dilakukan oleh pesawat tempur Sekutu itu. Ternyata dari pesawat itu dilepaskan satu parasut yang isinya adalah bantuan peralatan perang sehingga dengan mudah diambil dan dikuasai lawan.

Keterlambatan pengiriman bantuan persenjataan itu menyebabkan pasukan gerilya tidak berdaya menghadapi serangan lawan. Menurut Sersan Klinkhamer, menjelang penyerangan bala tentara Jepang terhadap Kolonodale, persediaan amunisi pasukan gerilya hanya sekitar 100 butir peluru. Itulah sebabnya De Jong berusaha lagi memohon bantuan persenjataan perang, namun bantuan itu datang terlambat ketika basis pertahanannya telah dikuasai oleh Jepang.

Reaksi lamban dari pihak penentu kebijakan di SWPA sangatlah mengherankan karena permintaan bantuan untuk para gerilya bukan saja diketahui oleh Jenderal McArthur sebagai Panglima SWPA akan tetapi Presiden Roosevelt dari Amerika juga mengetahui mengenai adanya perlawanan gerilya di Sulawesi Tengah (Mori).

Surat dari otoritas Jepang itu mengisyaratkan untuk menyerah, akan tetapi informasi tentang perlakuan yang kejam dan di luar batas kemanusiaan dari tentara Jepang terhadap tawanan perang memperteguh hatinya untuk tidak menyerah. Oleh karena itu diputuskan untuk memerintahkan kepada Burghardt dan Van der Veen bersama 6 orang anggota militer



lainnya untuk berangkat ke kampung Towi, dengan tugas mengamankan dan membangun pos penjagaan. Menurut rencana pasukan yang tersisa akan diusahakan meloloskan diri dari Mori untuk berangkat ke Australia melalui Towi, sebagai satu alternatif menghindari pengejaran lawan.

Letnan De Jong tampaknya tidak mencurigai pengutusan kepala kampung Towi untuk menemuinya, utusan mana telah diikuti pula oleh pasukan pengintai lawan untuk mencermati gerak gerik sisa-sisa pasukan gerilya. Oleh karena itu keputusannya untuk membangun pos penjagaan di Towi itu diperkirakan sebagai upaya untuk meloloskan diri dari wilayah Mori yang dipandang telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak Jepang. Selain itu penduduk Mori juga telah dipaksa sebagai pengintai untuk dapat memberikan informasi menyangkut gerak langkah pasukan gerilya. Itulah sebabnya, pada malam itu juga, bala tentara Jepang, dengan menggunakan perahu motor bergerak mengawasi wilayah perairan dan mendaratkan pasukan di Towi. Pada dini hari, sekitar pukul 05.00, tanggal 30 Juli, pasukan yang telah didaratkan melakukan serangan terhadap pos penjagaan gerilya. Pertempuran yang terjadi itu mendorong komandan gerilya memerintahkan dua orang anggotanya untuk melakukan pengintaian. Namun karena belum juga kembali maka diperintahkan lagi dua orang untuk mengintai kejadian itu. Tidak berapa lama mereka kembali dengan melaporkan bahwa patroli yang dikirim terdahulu telah ditawan oleh lawan. Tidak berapa lama setelah mendapat laporan itu, datang seorang penduduk dari Towi membawa dua pucuk surat, satu dari Mayor Schilmoller dan lainnya dari anggotanya yang ditawan Jepang pada pertempuran di Salenda, untuk komandan gerilya. Dalam surat Schilmoller itu ditegaskan lagi agar De Jong harus menyerah. Jika tidak

menyerah maka akan datang lebih banyak bala tentara Jepang untuk mengepung dan menyerang tempat persembunyiannya. Sementara surat dari salah satu anggotanya yang ditawan mengkisahkan pertempuran di Salenda yang berakhir dengan penawanan mereka.

Pendudukan Jepang atas Towi mengisyaratkan kepada komandan gerilya itu bahwa telah tertutup peluang untuk meloloskan diri ke luar Mori. Kondisi itu sangat mencemaskan hatinya. Sementara tuntutan untuk menyerah terus didesak baik oleh pihak Belanda (Mayor Schilmoller) maupun dari pihak otoritas Jepang. Wilayah Mori telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak Jepang, sementara kesatuan gerilyanya banyak yang telah ditawan dan keadaan mereka yang masih bertahan juga cukup merisaukan. Anggota pasukan yang luka-luka tidak dapat memperoleh pengobatan karena mereka sudah tidak memiliki lagi obat-obatan. Disamping itu persediaan amunisi dan logistik tidak mendukung untuk terus melakukan perlawanan. Hal-hal itu mendorongnya untuk mengumpulkan seluruh sisa-sisa pasukannya di bivak yang berjumlah sekitar 40



Rob Warouw. Kepala Pemerintahan Onderafdeling Kolonodale.



orang dan menawarkan kepada mereka untuk menentukan sikap. Siapa yang ingin tetap melakukan perlawanan boleh mengikutinya, dan kepada yang ingin pulang diperbolehkan dengan syarat bergiat sendiri memenuhi kebutuhan hidup, dan bila tertangkap jangan menyerahkan senjata yang dimiliki. Tawaran itu diterima dengan baik dan 10 orang dari mereka menyatakan diri untuk pergi meninggalkan pasukan, karena mereka menderita luka-luka dan sakit. Sementara yang lainnya bertekad terus mengikuti perintah komandan gerilya.

Pada tanggal 31 Juli 1942, De Jong memerintahkan Sersan Klinkhamer bersama pasukannya mengawasi jalur jalan ke Towi, dan Sersan Burghardt bersama regunya mengawasi jalur jalan ke Tiu. Sementara De Jong bersama pasukannya berjalan ke arah Towi untuk kembali mencermati peluang untuk meloloskan diri dari pengepungan lawan. Dalam kegiatan itu, tentara Jepang menyerang pasukan Burghardt dan berhasil menawannya. Ia kemudian dipaksa untuk menjadi penunjuk jalan sambil mengajak anggota pasukan lainnya agar menyerah. Akhirnya dengan terpaksa, ia mengantar pasukan militer Jepang ke arah lokasi pasukan Klinkhamer, namun yang disebut terakhir itu berhasil meloloskan diri dari pengepungan lawan. Penyerangan yang dilakukan itu semakin memperlemah kedudukan gerilya karena sekitar 15 orang anggota militernya berhasil ditawan, dan kemudian pada tanggal 2 Agustus diangkut ke

Kolonodale.

Panglima Ekspedisi Mori, Kapten Marinir Yonomura, memerintahkan kepada Rob Warouw, kepala pemerintahan Kolonodale, untuk menemani Letnan Marinir Furukawa sebagai penunjuk jalan dalam ekspedisi pengejaran De Jong. Usaha pengejaran itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 9 Agustus 1942, Letnan Van Daalen dan sejumlah bawahannya berhasil di tawan di sekitar kampung Era, dan pada hari yang sama Letnan De Jong juga berhasil ditangkap dan ditawan di sekitar daerah Bente. Tertangkapnya dua perwira yang menjadi komandan utama gerilya itu mengakhiri seluruh perlawanan bersenjata dari pihak pasukan KNIL yang dibantu oleh sejumlah pasukan milisi di Mori, meskipun Sersan Klinkhamer masih belum tertangkap.<sup>21</sup>

### **Pemerintahan Militer Jepang**

Keberhasilan bala tentara Jepang melumpuhkan perlawanan militer Hindia Belanda yang mendapat bantuan dari Sekutu memaksa pemerintah Hindia Belanda harus menyatakan kapitulasi. Berita ini diterima dan diakui oleh staf dan bawahan dari komandan teritorial Sulawesi Tengah sehingga mereka melepaskan kedudukan pemerintahan dan menyerahkannya kepada wakil pemerintahan bumiputera. Untuk wilayah Afdeling Poso diembankan kepada Wim Warouw, yang ketika itu menjabat sebagai wakil pemerintahan (*assistent bestuur*). Sementara untuk wilayah Onderafdeling Kolonodale diembankan kepada Rob Warouw,

diberangkatkan ke Manado, sementara Letnan De Jong dan Letnan van Daalen diangkut dengan kapal Tokelo ke Poso dan baru kemudian diberangkatkan ke Manado dan tiba pada 22 Agustus 1942. Dua perwira gerilya itu selanjutnya dieksekusi pada 25 Agustus 1942 di belakang bekas markas KNIL yang terletak di Sario (Manado).

---

<sup>21</sup> Letnan De Jong dan Letnan Van Daalen selanjutnya dibawa ke markas militer di Lembomanente dengan maksud untuk dapat mengumpukan agar Klinkhamer menyerah. Namun Sersan Klinkhamer tak kunjung menyerah sehingga ia diangkut ke Kolonodale pada 12 Agustus 1942, bertepatan dengan pembantaian sejumlah tawanan di bekas Stasiun radio. Pada tanggal 16 Agustus semua tawanan milisi dari Manado

wakil pemerintahan (*assitent bestuur*) setempat. Sementara kedudukan kepala pemerintahan distrik tidak mengalami perubahan.

Pengakuan atas kapitulasi dan proses penyerahan diri dan pengalihan kekuasaan atas wilayah Sulawesi Tengah kepada pihak Jepang menimbulkan persoalan baru. Hal itu berkaitan dengan cara pengutusan delegasi Jepang untuk mengurus tahanan perang dan mengambil-alih pemerintahan telah menimbulkan ketersinggungan dan ketidakpercayaan mengingat delegasi yang mendapat otoritas untuk menyelesaikan persoalan itu adalah seorang bekas bawahan yang diberhentikan dari tugas militer ketika berlangsung penyerbuan Jepang, yaitu Ratumbanua. Akibatnya pihak Jepang harus membayar mahal dalam usaha mengambalikah kedudukan kekuasaan Belanda di Sulawesi Tengah, khususnya wilayah bekas Kerajaan Mori, seperti yang telah diungkapkan di depan. Pihak otoritas Jepang di Manado akhirnya harus mengorganisasikan ekspedisi militer ke Mori. Ekspedisi militer yang dikirim dibawah pimpinan Inobe membangun markas di Poso, dan dari tempat ini melancarkan serangan terhadap kedudukan gerilya di Mori yang berada dalam komando Letnan De Jong. Dalam perkembangan kemudian, setelah berhasil menduduki Kolonodale, pemerintah militer Jepang membangun markas militer di kota pemerintahan *onderafdeling* itu, dan mengangkat Kapten Marinir Yonomura sebagai komandan. Sejak itu kedudukan Rob Warouw ditetapkan sebagai wakil pemerintahan dan diberi tugas oleh Yonomura sebagai penunjuk jalan bagi operasi militer untuk membinasakan gerilya yang dipercayakan kepada Letnan Marinir Furukawa. Untuk mengaktifkan gerak militer maka dibangun satu markas militer Jepang di Lembomanente.

Ekspedisi militer yang dilancarkan itu akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 9 Agustus 1942. Perwira KNIL yang memimpin gerakan gerilya, Letnan De Jong dan Letnan Van Daalen, berhasil ditangkap dan ditawan, sehingga yang tersisa hanya seorang bawahannya yaitu Sersan J. Klinkhamer. Komandan militer berharap ia dapat menyerahkan diri namun hingga sepuluh hari belum juga tampak adanya tanda-tanda akan menyerahkan diri. Oleh karena itu pada tanggal 19 Agustus 1942, Furukawa menyebarkan selebaran di kampung-kampung dalam wilayah Mori yang isinya adalah:

1. Pada dasarnya sudah dapat dinyatakan tidak ada lagi orang Belanda di seluruh Sulawesi. Tetapi di wilayah Kolonodale masih ada seorang Belanda yang melarikan diri, yang bernama Klinkhamer.
2. Orang tidak perlu takut lagi dan harus bekerja giat seperti biasanya. Setiap orang diharapkan berusaha sebaik mungkin untuk menangkap Klinkhamer.
3. Siapa yang memberitahukan tempat persembunyian Klinkhamer akan menerima hadiah 10 gulden.
4. Apabila Klinkhamer memohon untuk meng-antarkan dengan maksud untuk menyerahkan diri maka orang yang menghantar Klinkhamer ke Kolonodale akan diberikan hadiah 50 gulden.
5. Barang siapa yang menangkap Klinkhamer dan membawanya ke Kolonodale akan mendapat hadiah 100 gulden.
6. Akan tetapi barang siapa yang melindungi Klinkhamer, misalnya memberi dia makanan atau menyembunyikan dia (dan sejenisnya) akan mendapat hukuman berat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 225; baca juga: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal.



Makita Marunduh.  
Koleksi pribadi: Alex Marunduh, Nganjuk, Jatim.

Setelah gerakan gerilya di Mori berhasil dipadamkan, pemerintah militer Jepang mulai mengorganisasikan kedudukan kekuasaannya, sambil terus bergiat untuk menangkap Klinkhamer. Oleh karena kapal yang mengangkut pejabat sipil yang diembankan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah berhasil ditenggelamkan oleh Sekutu di Laut Sulawesi sehingga pihak militer Jepang tidak memiliki aparat pemerintahan sipil untuk melaksanakan tugas di daerah pendudukan. Selain itu juga karena Klinkhamer belum tertangkap sehingga dipandang daerah Mori masih belum aman benar. Oleh karena itu pelaksanaan pemerintahan diembankan kepada komandan militer yang ditugaskan mengamankan wilayah kekuasaan, sehingga yang melaksanakan kekuasaan sipil sekaligus kekuasaan militer adalah Kapten Marinir Yonomura dan dibantu oleh Letnan

<sup>23</sup> Baca: Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 220. Bandingkan dengan: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 241, yang menyatakan bahwa pemimpin tentara pendudukan Jepang di Kolonodale adalah Inobe dan dibantu oleh Kapten Maeda dan Janai. Inobe sesungguhnya adalah komandan pasukan ekspedisi yang dikirim melalui Poso. Dari Poso diorganisasikan penyerangan terhadap daerah pertahanan gerilya De Jong di Kolonodale. Dalam kontak senjata dengan pasukan gerilya, sebelum menduduki Kolonodale, Kapten Maeda tertembak mati oleh pasukan Letnan Van Daalen. Selain itu juru bicara Janai, diangkat

Marinir Furukawa.<sup>23</sup>

Rob Warouw, yang ketika terjadi pikapitalisasi, mengemban tugas sebagai pejabat pemerintahan *onderafdeling*, pada mulanya digunakan sebagai penunjuk jalan bagi pasukan militer Jepang untuk mencari daerah persembunyian komandan gerilya. Setelah tugas operasi selesai, dengan tertangkapnya Letnan De Jong dan Letnan Van Daalen, ia dimanfaatkan sebagai asisten pemerintah untuk menghubungkan pihak otoritas Jepang dengan pejabat pemerintahan lokal. Untuk pembenahan pemerintahan lokal, pada bulan Desember 1942, pihak pemerintah militer mengangkat dua orang untuk menempati kedudukan sebagai kepala distrik. Oleh karena Makita Marunduh, yang menjabat kepala Distrik Tinompo dalam operasi militer berhasil ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan sebagai tahanan politik di Manado sehingga Besau Marunduh (1942-1945) diangkat menggantikan kedudukannya.<sup>24</sup> Sementara untuk Distrik Tomata diangkat M. Rumampuo menjadi Kepala Distrik.

Pada dasarnya struktur pemerintahan kolonial Belanda tidak diubah, kecuali penamaannya yang diganti dengan menggunakan istilah Jepang. Provinsi atau keresidenan (*residentie*) digantikan menjadi *minseibu*, *afdeling* diganti penyebutannya menjadi *kenkarikan* dan *onderafdeling* menjadi *bunken kanrikan*, sementara wilayah distrik yang

sebagai Walikota Manado. Setelah menduduki Kolonodale, Jepang mengirim Kapten Marinir Yonomura yang dibantu oleh Letnan Marinir Furukawa untuk melaksanakan ekspedisi pengejaran kelompok gerilya pimpinan De Jong.

<sup>24</sup> Hasan, dkk., *op.cit.*, hal. 237: mengungkapkan bahwa Owolu Marunduh, pada masa Jepang dijadikan sebagai Suco, dan mencatatnya sebagai Raja Mori ke-10, 1928-1950. Sementara yang menjadi kepala distrik Tinompo, Makita Marunduh ditawan dan dipenjarakan di Manado. Baca: Michiel Hegener, *op.cit.*, hal 247.

berada dalam kewenangan penguasa lokal disebut *suco*. Penyelenggaraan pemerintahan militer untuk seluruh wilayah pendudukan berpedoman pada peraturan pemerintahan yang dikeluarkan dua hari setelah kapitulasi yang disebut Undang-Undang No.1. Undang-undang ini terdiri dari 6 pasal dan mengatur sistem pemerintahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Karena Balatentara Nippon berke-hendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seturunan bangsa Nippon dan hendak mendirikan ketenteraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama, maka dari itu balatentara Nippon melang-sungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya, agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.

Pasal 2

Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal.

Pasal 3

Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum, dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi pemerintah militer.

Pasal 4

1. Sekalian pegawai dan penduduk biasa

diwajibkan menurut perintah balatentara Nippon dan pembesar pemerintah Nippon.

2. Balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Nippon, begitu juga harta benda yang sah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa.

3. Sekalian pegawai dan rakyat umumnya hendaklah mempercayai balatentara Nippon dan dengan segera lakukan kewajiban masing-masing seperti sediakala.

4. Akan tetapi barangsiapa yang melanggar perintah balatentara dan pembesar-pembesar Nippon atau mengancam keamanan umum, menghalang-halangi pekerjaan militer, mengganggu atau menganiaya penduduk bangsa Nippon, dengan sembunyi-sembunyi berhubungan dengan musuh, mengacaukan keuangan dan perekonomian, menyembunyikan harta benda dan bahan makanan, ataupun merusak sumber kekayaan tanah, pabrik-pabrik dan sebagainya akan dihukum menurut Undang-Undang Hukum Militer.

Pasal 5

Uang Nippon dan uang militer yang tercetak sebagai rupiah dipergunakan sebagai uang yang sah di seluruh daerah yang telah ditempati oleh balatentara Nippon.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku sejak diumumkan.<sup>25</sup>

Undang-undang penataan pemerintahan ini jelas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan militer. Selain itu undang-undang ini dilengkapi deng-

---

<sup>25</sup> Harun Kadir, dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan, 1945-1950*

(Ujung Pandang: Laporan penelitian, 1984), hal. 109-110.

an Undang-Undang No.2, No.3, dan No.4, yang seluruhnya dikeluarkan telah berlaku sejak 20 Maret 1942. Inti pokok Undang-Undang No.2 adalah: di daerah yang berlaku hukum militer untuk sementara waktu dilarang berserikat, berkumpul, berpropaganda bagi musuh, dan menempel plakat, menyiarkan kabar bohong, menyeberang ke pulau lain tanpa surat izin, mendengar siaran radio musuh, dan merusak atau membawa lari barang-barang yang telah disegel oleh balatentara Nippon. Sementara Undang-Undang No. 3, melarang untuk sementara memperbincangkan, melakukan pergerakan, menganjur dan mempropagandakan peraturan sistem pemerintahan, dan Undang-Undang No 4, memuat ketentuan bahwa hanya bendera Jepang yang harus dikibarkan dikantor dan di rumah-rumah apabila ada upacara hari kebesaran.

Pada dasarnya undang-undang yang dikeluarkan itu berhubungan dengan keinginan Kekaisaran Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk itu penduduk daerah pendudukan harus patuh dan ikut membantu dan bukan untuk menentang dan melawan pemerintahan militer. Untuk itu tidak jarang dilaksanakan aksi-aksi yang menimbulkan ketakutan psikologis penduduk. Di Mori misalnya, ketika pasukan militer berhasil menawan sejumlah kelompok gerilya, mereka disiksa dan kemudian dibawah ke lapangan depan stasion radio dan dengan disaksikan oleh para pejabat pemerintah setempat dan penduduk, kepala mereka dipenggal.<sup>26</sup> Bahkan Michiel Hegener juga menampilkan kisah tentang seorang pedagang Cina di Kolonodale yang dikenakan hukuman pancung karena dipandang tidak bekerjasama dengan membantu kelompok gerilya.

---

<sup>26</sup> Para tawanan gerilya yang dipenggal oleh Jepang pada 12 Agustus 1942 adalah: De Jager, Gerissen, Wonnink, Onwezen, De Bruin, Van der Veen, Kors,

Dalam situasi yang dicekam ketakutan psikologis itu, pemerintah militer Jepang juga senantiasa mempropagandakan posisinya sebagai saudara tua sementara penduduk atau rakyat yang dipandang sebagai saudara muda. Gerakan 3 A yang tampil dengan slogan: Nippon pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia merupakan inti dari propaganda untuk mendapat dukungan dari penduduk dalam Perang Asia Timur Raya. Propaganda itu dimaksudkan agar dapat meningkatkan hubungan dan dukungan penduduk kepada mereka, dan pada gilirannya memudahkan pengaruh Belanda. Untuk hal yang disebutkan terakhir itu, mereka juga merusak dan menghancurkan simbol-simbol peninggalan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah peninggalan kolonial terdahulu digantikan dengan sistem pendidikan Jepang, yang berbasis pada pengajaran Bahasa Jepang, lagu-lagu Jepang, terutama lagu kebangsaan *Kimi-gayo*, merupakan kurikulum wajib disamping pelajaran lainnya. Selain itu para murid wajib melakukan senam gaya Jepang yang dikenal dengan *Taiso*. Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan semua pelajaran yang bercorak Belanda atau Eropa dilarang diajarkan pada murid. Tingkat pendidikan Sekolah Rakyat tiga tahun (*derde jaar Volksschool*) diganti penyebutannya dengan *Kogakho*, sementara Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) disebut *Futsu Yoga Kogakho* (lama belajar 6 tahun).

Meskipun Jepang telah menguasai wilayah Mori dan telah melakukan penataan kedudukan kekuasaan dan pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial namun tetap memandang keadaan Mori belum sepenuhnya aman. Hal itu berkaitan dengan kenyataan bahwa Sersan Klinkhamer belum menyerahkan diri dan

Reijnhout, Raberta, Malawan, Miun, Agus, dan Saala. Michiel Hegenar, *op.cit.*, hal. 223.

berbagai usaha untuk menangkapnya belum berhasil. Ketakutan itu juga beralasan karena pihak Sekutu telah mencatat bahwa di wilayah ini ada gerakan gerilya pasukan KNIL menentang kedudukan balatentara Nippon, sehingga ada peluang pihak Sekutu untuk memberikan bantuan. Sehubungan dengan itu didatangkan Willy J. Mamuaya, seorang agen polisi dari Luwuk pada bulan September 1943 untuk mencari sersan KNIL tersebut.<sup>27</sup> Kehadirannya diharapkan dapat mendekati penduduk untuk mendapatkan informasi tempat persembunyiannya dan juga mencermati perilaku penduduk yang berkolaborasi dengan tokoh yang dicari itu. Usahnya tidak berhasil meskipun diyakini Klinkhamer masih bersembunyi di Mori.

Tidak dapat disangkal kebenaran dari pernyataan itu. Klinkhamer memang dilindungi dan disembunyikan oleh salah seorang dari penduduk Bente, bernama Majomba. Pada awalnya disembunyikan dalam sebuah gua

dekat Bente, namun kemudian dipindahkan ke Gunung Majalence. Majomba kemudian mendapat dukungan dari saudara iparnya, Nahu dan Tadulako. Mereka secara bergilir, dengan alasan ingin berburu, menghantarkan makanan dua kali setiap minggu kepada Klinkhamer. Mereka juga tidak terpengaruh dengan tawaran pihak pemerintah militer Jepang, karena pertimbangan resiko. Jika ia diserahkan kepada pihak militer Jepang pasti dipancung, dan mereka yang menghantarnya pasti dituduh menyembunyikan dan akan mendapat hukuman yang sama. Itulah sebabnya mereka tetap menyembunyikan dan melindunginya.

Dalam perkembangan kemudian, pihak militer menuduh bahwa para guru sekolah *zendeling* dan guru Injil yang telah menyembunyikan dan melindungi Klinkhamer. Oleh karena itu pada bulan April 1944, semua guru sekolah dan guru Injil di Mori ditangkap dan diangkut ke Poso, termasuk juga guru-guru di



Monumen Taman Makam Kehormatan Belanda, Kompleks Taman Impian Jaya Ancol. Diresmikan pada 14 September 1946. Semua mereka yang dikubur di sini adalah korban yang dieksekusi dengan cara yang kejam oleh Jepang yang berjumlah lebih dari 2000 orang antara lain terdiri dari warga sipil dan anggota militer termasuk anggota militer dari Persemakmuran Inggris.

<sup>27</sup> Baca: Michiel Hegener, *op.cit*, hal 239-240.



Poso, dengan tuduhan bertindak sebagai mata-mata Belanda, menyembunyikan dan melindungi Klinkhamer. Mereka disiksa dengan harapan mereka mengaku dan memberikan informasi tempat persembunyian Klinkhamer namun tidak ada seorangpun diantara mereka yang dapat memberikan informasi tentang keberadaannya karena benar-benar mereka tidak mengetahuinya. Akhirnya para guru tersebut dipenjarakan di Poso, diantara mereka itu adalah guru sekolah: A.K. Tumakaka, T. Kandola, Pindobe, M. Poto, L. Waga, B.S. Wowiling, dan L. Lengkonu, sementara guru Injil adalah M. Tamauka dan D. Kamesi. Pada suatu ketika seorang perwira tinggi Marinir, S. Narumi berkunjung ke Poso pada bulan Juni 1944.<sup>28</sup> Ketika diketahui bahwa guru-guru *zending* dan guru Injil dari Mori dan Poso ditahan, maka ia menghadap kepada pimpinan pemerintahan di Poso dan memerintahkan untuk membebaskan mereka. Akhirnya guru-guru itu dibebaskan pada 20 Juni 1944.

Narumi mengenal dan mengetahui banyak tentang masyarakat Poso, termasuk masyarakat Mori. Karena itu ia mengharapkan agar pemerintah militer tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap rakyat tetapi bersikap persuasif mengajak mereka bekerjasama. Saran-saran itu merubah perilaku pihak pemerintah militer di Sulawesi Tengah. Itulah sebabnya ketika Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso (1944-1945) mengumumkan pada 7 September 1944 bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang merencanakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, mereka menyadari bahwa pihak pemerintah kekaisaran juga menghendaki terbangun jalinan kerjasama

yang baik dengan rakyat Indonesia. Meskipun demikian patut diakui bahwa tujuan politik dari pengumuman itu untuk memikat rakyat Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada kekuatan militer Jepang. Untuk tujuan itu pula, dan dengan mempertimbangkan saran Narumi, maka pihak pemerintah militer di Kolonodale melepaskan semua penduduk yang ditawan dengan tuduhan terlibat dalam aksi gerilya pimpinan De Jong. Tindakan itu menimbulkan kegembiraan, bukan hanya keluarga dari para tahanan itu, tetapi juga rakyat Mori

Makam Betahia Tumakaka. Seorang ahli bahasa yang menjadi asisten dari Tuan Esser. Dieksekusi oleh Jepang di Makassar pada 26 Desember 1942, saat ini dimakamkan di Taman Makam Kehormatan Belanda, Kompleks Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.



ditawan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun setelah Jepang menduduki wilayah Indonesia dibebaskan dan melapor ke Makassar. Ia kemudian ditempatkan sebagai staf perwira marinir di Makassar.

<sup>28</sup> S. Narumi adalah seorang agen rahasia Jepang yang dikirim ke Poso sebelum perang. Di kota ini ia membangun satu perusahaan penggergajian kayu yang diberi nama Toyoma. Dalam kegiatannya di Poso, ia menikahi seorang puteri Poso. Ketika terjadi perang ia



A.K. Tumakaka, seorang sejarawan Mori dan pencipta Mars Wita Mori. Koleksi pribadi: Theo Tumakaka, Palu.

pada umumnya.

Sesungguhnya tawaran jasa baik itu merupakan satu strategik untuk mengelola peluang konflik agar tidak terjadi antara rakyat daerah pendudukan dengan pemerintah militer Jepang. Gambaran kekalahan Jepang telah diambang pintu. Di berbagai front pertahanan Jepang, berhasil diporakporandakan pasukan Sekutu. Pertahanan di Pulau Marshall berhasil direbut pada Februari 1944, dan bahkan pada awal September 1944, pasukan Sekutu telah menduduki Morotai, dan mulai melancarkan pemboman atas Manila (Filipina). Kekalahan yang terus diderita itu mendorong pemerintah memilih strategik itu, dengan harapan rakyat tidak memberikan dukungan kepada Sekutu atau berbalik menyerang kedudukan militer Jepang di daerah pendudukannya.

Serangan maju pasukan Sekutu tampaknya sudah tidak dapat dibendung lagi dan meng-

ancam kedudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Februari 1945, terjadi serangan udara yang pertama dari Sekutu atas wilayah Mori. Pesawat tempur Sekutu menembaki semua perahu yang berada di pelabuhan Kolonodale dengan mitraliur. Keunikan dari serangan ini adalah pesawat tempur itu tidak melancarkan serangan ke wilayah pemukiman penduduk. Kejadian itu menewaskan 2 orang yang ketika itu berada di dermaga Kolonodale. Setelah serangan pertama itu, hampir setiap hari pada bulan itu, muncul formasi pesawat tempur Sekutu namun tidak melakukan pemboman atau penembakan. Setelah itu tidak pernah tampak lagi pesawat tempur Sekutu. Hal itu mungkin disebabkan karena pihak Sekutu berkonsentrasi untuk menyerang dan membina-sakan pusat-pusat pertahanan di Jepang. Oleh karena itu, ketika tidak ada reaksi penembakan terhadap pesawat tempur Sekutu, mengisyaratkan bahwa di daerah itu tidak ada konsentrasi pertahanan militer Jepang.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, penduduk kembali menyaksikan formasi pesawat tempur Sekutu terbang di atas langit birunya Mori, sehingga penduduk sibuk berlarian mencari tempat perlindungan. Namun dalam persembunyian itu, mereka menyaksikan lembaran-lembaran kertas yang jatuh, sehingga keluar dan mengambilnya. Lembaran-lembaran itu merupakan pamflet yang disebarkan oleh Sekutu yang memuat berita tentang kekalahan Jepang. Selebaran ini membuat pihak pemerintah militer tidak dapat menyembunyikan berita kekealahannya. Oleh karena itu dengan segera pemerintah mengundang seluruh pejabat pemerintah lokal untuk datang ke pesta yang diselenggarakan di Kolonodale pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada kesempatan itu pihak pemerintah militer menyampaikan secara resmi bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Asia



Timur Raya.<sup>29</sup> Kini pemerintah militer hanya bertugas untuk mempertahankan keadaan seperti sediakala sambil menunggu kedatangan pasukan Sekutu untuk mengambil-alih kedudukan kekuasaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 242. Pihak pemerintah militer di Kolonodale sesungguhnya telah mengetahui tentang kekalahannya. Berita kekalahan itu telah berakibat terjadinya insiden kecil diantara para prajurit yang

berakibat Nakamura, kepala kepolisian Kolonedale terbunuh oleh salah seorang anggotanya. Selain itu, sebagian anggota militer melakukan tindakan bunuh diri (*harakiri*).

## BAB VIII

# PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang akhirnya berakhir dengan tragedi kemanusiaan yang memaksa Kekaisaran Jepang harus menyatakan kapitulasi kepada pihak Sekutu. Tragedi itu disebabkan pihak Amerika Serikat menggunakan bom atom. Bom atom yang pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yang membunuh sekitar 78.000 orang penduduk kota itu. Sehari setelah pemboman itu, otoritas Jepang di Jakarta mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritu Zyunbi Iinkai*, disingkat PPKI).<sup>1</sup> Pada tanggal 8 Agustus 1945, bertepatan dengan jatuhnya bom

atom kedua di kota Nagasaki, Soekarno, Moh. Hatta, dan K.R.T. Radjiman Widiyodiningrat berangkat ke Dalat untuk menemui Jenderal Terauchi Hisaichi. Delegasi itu akhirnya dapat menemuinya pada tanggal 11 Agustus 1945, dan melakukan pertemuannya.

Pada pertemuan itu Jenderal Hisaichi menyatakan bahwa proses kemerdekaan untuk bekas wilayah kolonial Belanda sekarang bergantung pada kerja keras kalian. Untuk melaksanakan tugas itu, ia menetapkan Soekarno sebagai ketua dan Moh Hatta sebagai wakil ketua, sementara Widiyodiningrat, bekas ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan

---

<sup>1</sup> Sejak perdana menteri Jepang, Kaiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia, pihak otoritas Jepang di Jakarta mengorganisir lembaga untuk menampung tokoh-tokoh muda yang nasionalis yang disebut Asrama Indonesia Merdeka pada Oktober 1944. Wadah ini dimaksudkan untuk dapat menampung juga kelompok nasionalis yang bergerak dibawah tanah untuk bersama-sama memikirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah diketahui bahwa

kelompok ini berpotensi, maka diumumkan pembentukan wadah yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Maret 1945. Badan ini diketuai oleh K.R.T Radjiman Widiyodiningrat. Badan ini yang kemudian digantikan namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Baca: M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1300* (London: The Macmillan Press Ltd, 1993), hal. 207-209.

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menjadi anggota PPKI. Setelah penetapan itu, delegasi PPKI itu kembali ke Jakarta dan tiba pada 14 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat (kapitulasi) kepada Sekutu. Informasi itu mendorong tokoh-tokoh pergerakan pemuda berusaha mendatangi Soekarno dan Hatta pada malam hari dan menyampaikan tentang berita kapitulasi itu dan kemungkinan para anggota bekas organisasi Pembela Tanah Air (Peta) dan Heiho akan melakukan pemberontakan. Sehubungan dengan itu mereka mohon agar dua tokoh itu bersedia mengikuti mereka keluar dari Jakarta. Akhirnya pemuda-pemuda itu membawa mereka ke garnisun Peta di Rengasdengklok, kota kecil yang terletak pada jalur jalan ke Cirebon. Setelah tiba di kota kecil itu baru mereka menyadari bahwa para pemuda itu menghendaki agar mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar rancangan Jepang. Desakan itu ditolak oleh dua tokoh politik itu.

Vice-Admiral Maeda Tadashi, yang bertugas sebagai perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta adalah seorang yang sangat bersimpatik dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh pada gerakan nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu, ia senantiasa memperhatikan keamanan dari tokoh-tokoh politik Indonesia. Ketika pada tanggal 16 Agustus ia mengetahui bahwa Soekarno dan Moh Hatta tidak berada lagi di Jakarta dengan segera dilakukan penyelidikan dan diperkirakan bahwa para pemuda perjuangan kemerdekaan yang bergerak secara rahasia telah menculik dua tokoh itu. Oleh karena itu dengan tegas disampaikan kepada mereka bahwa jika Soekarno dan Hatta dikembalikan dengan selamat ke Jakarta, maka ia bersedia mengusahakan dengan cara tertentu agar kemerdekaan

an dapat diproklamasikan. Himbauan dari Tadashi itu mendapat perhatian para pemuda sehingga mereka mengantar dua tokoh itu ke rumah Maeda pada malam harinya. Pada malam itu juga mereka merancang naskah proklamasi kemerdekaan.

Setelah naskah proklamasi disiapkan, para pemuda bergiat menghubungi tokoh-tokoh politik yang telah berkumpul di Jakarta, baik yang menjadi anggota PPKI maupun yang tidak dan para bekas anggota Peta dan Heiho untuk berkumpul di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Tepat pada pukul 10.00, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta tampil di hadapan hadirin. Soekarno membuka acara itu dengan sambutan singkat kemudian membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, akan diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, (tertanda) Soekarno-Hatta". Proklamasi yang dikumandangkan itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi, dan membentuk suatu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat penuh, negara Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia, termasuk terhadap kedudukan kekuasaan Kerajaan Mori. Wilayah dari negara baru yang terbentuk sesuai Perang Dunia II ini menetapkan wilayahnya mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Itu berarti wilayah Kerajaan Mori juga harus terlebur dalam proses penataan pemerintahan negara baru itu. Sehubungan dengan itu, maka dalam pokok bahasan ini akan ditelusuri proses kesejarahan perjuangan rakyat Kerajaan Mori memperjuangkan Proklamasi Kemerdekaan RI.

## Mori pada Periode Perang Kemerdekaan

Periode pemerintahan militer Jepang menciptakan ketakutan psikologis bagi masyarakat. Itulah sebabnya larangan untuk mendengarkan radio dan meninggalkan tempat tinggal untuk bepergian ke tempat lain berakibat penduduk terisolasi dari dunia luar. Kenyataan itu yang mendasari penduduk Mori tidak dengan segera mengetahui bahwa telah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara Republik Indonesia. Berita yang pertama diketahui adalah tentang akhir dari Perang Asia Timur Raya, karena penyebaran pamflet yang dijatuhkan pesawat terbang Sekutu di wilayah Mori pada 23 Agustus 1945. Pamflet itu berisi informasi tentang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, yang disebut Perang Pasifik, setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Adanya selebaran itu mendorong pemerintah militer Jepang mengundang para pejabat pemerintahan lokal untuk datang di Kolonodale pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada acara jamuan makan itu, secara resmi diinformasikan bahwa Kaisar Jepang telah memerintahkan untuk menghentikan perang, dan tidak boleh terjadi lagi tembak-menembak.<sup>2</sup> Berdasarkan hukum perang dengan pernyataan kapitulasi itu, kedudukan pemerintah militer Jepang sekarang hanya mempertahankan keadaan seperti sediakala hingga tentara Sekutu datang untuk mengambilalih kedudukan kekuasaannya.

Berita tentang akhir perang itu disampaikan kepada Sersan Klinkhamer di tempat persembunyiannya. Meskipun demikian, Majomba

dan Tadulako belum berkeinginan untuk membawanya turun dari gunung Majalence, karena Mori masih berada dalam kekuasaan militer Jepang. Ketika dipandang kondisi telah aman, maka pada awal Oktober 1945, mereka membawa Klinkhamer turun, namun untuk sementara ditempatkan pada bekas bivak yang dibangun dekat Sungai Laa. Pada pertengahan Oktober baru diantar masuk ke kampung Bente. Pada kesempatan itu dilakukan pesta bagi Klinkhamer, karena bertepatan penduduk sudah selesai panen. Acara ini diketahui juga oleh Burghardt, (yang karena jasanya kepada pihak militer Jepang tidak ditawan tetapi ditempatkan di kampung Tomata) sehingga datang untuk menghadiri pesta itu tetapi diusir oleh Klinkhamer. Penolakan kehadiran koleganya itu beralasan karena ketika terjadi pertempuran di Towi, Burghardt yang menghantar tentara Jepang untuk menangkap Klinkhamer dan pasukan gerilya lainnya.

Klinkhamer, setelah pesta itu, berkeinginan untuk pergi ke Kolonodale. Oleh karena itu ia berangkat dengan didampingi oleh Majomba, Nahu, Tadulako, dan dua orang Bente lainnya. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan kurir kepala distrik yang menghantar surat untuknya. Dalam surat itu disarankan agar kembali dan tidak meneruskan perjalanan ke pusat pemerintahan itu. Klinkhamer dan Majomba menyatakan tetap berpendirian untuk meneruskan perjalanan mereka, namun Tadulako berkata: "engkau boleh meneruskan perjalanan, tetapi saya akan kembali pulang. Jika perang ini masih terus berlangsung selama 10 tahun, atas jaminan saya, mereka tidak akan dapat menangkap engkau".<sup>3</sup> Sikap Tadulako itu

<sup>2</sup> Michiel Hegener, *Guerrilla in Mori. Het Verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam: Contact, 1990), hal. 242.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 243. Tidak dapat disangkal bahwa tidak

ditemukan dan ditangkap Klinkhamer di tempat persembunyiannya di gunung Majalence itu diyakini berkat kekuatan magis dari Tadulako yang menutup jalur masuk ke tempat persembunyiannya. Seorang

menyebabkan semua mereka sepakat membatalkan tujuan perjalanan mereka dan kembali pulang.

Selama di Bente, Klinkhamer mendapat kunjungan dari sejumlah bekas anggota gerilya, yang atas izin Letnan De Jong mereka meninggalkan pasukan. Kehadiran mereka memiliki arti yang penting untuk membangun kembali kekuatan detasemen Kolonodale agar kelak dapat memulihkan kedudukan kekuasaan kolonial. Selain itu terus mencermati keadaan kedudukan pemerintah militer Jepang. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa para militer Jepang (tentara dan polisi) mengalami depresi mental dengan berita kekalahan itu. Hal itu menyebabkan mereka menjadi alkoholisme sehingga menimbulkan keonaran diantara mereka yang juga berdampak pada penduduk di sekitarnya. Mereka memperoleh informasi mengenai seorang tentara yang menghujat seorang perempuan Kolonodale, menyebabkan dua orang tentara lainnya membunuhnya. Kejadian itu mendorong komandan tentara menghukum mereka dengan perintah *harakiri* (bunuh diri). Selain itu juga diberitakan bahwa kepala kepolisian Kolonodale, Nakamura, terbunuh dalam insiden kecil diantara mereka yang bermabuk-mabukan. Selain itu juga diberitakan bahwa hampir sebagian dari anggota tentara melakukan *harakiri*. Menurut Hegener, tentara Jepang, ketika mengetahui bahwa Klinkhamer berada di Bente, mengirim

kurir untuk mengundangnya datang ke Kolonodale untuk bersama mengakhiri perang. Undangan itu tidak dilayani karena dipandang sebagai ancaman. Itulah sebabnya sejak saat itu ia berpindah ke rumah Tadulako.<sup>4</sup>

Harapan akan kedatangan tentara Sekutu untuk mengambilalih kedudukan kekuasaan akhirnya terwujud. Pada tanggal 21 September 1945, tentara Australia yang mewakili pasukan Sekutu dibawah pimpinan Brigjen Iwan Dougherty tiba di Makassar.<sup>5</sup> Dalam divisi militer Australia ini, ikut serta pula personil *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), yang berdasarkan *Civil Affaire Agreement* (CAA) yang disepakati di Chequers (London) antara pemerintah Inggris dengan Belanda pada 24 Agustus 1945, sebagai lembaga intendans untuk melaksanakan tugas-tugas sipil.<sup>6</sup> Personil NICA itu berada dalam komando Mayor J.G. Wegner. Diantara personil NICA itu, turut serta pula dua orang bekas pejabat di Sulawesi Tengah, yaitu bekas Asisten Residen Poso, L.C. J. Rijdsdijk dan bekas kontrolir Parigi, Kapten Barrouw. Mereka yang selanjutnya memimpin pasukan tentara Australia untuk mengambilalih kedudukan kekuasaan di Sulawesi Tengah.

Pasukan Sekutu yang berangkat ke Sulawesi Tengah itu tiba di Parigi menjelang akhir September 1945, dibawah komando Kapten Barrouw, mantan kontrolir Parigi. Setelah mendapatkan informasi tentang keadaan politik

---

Tadulako juga diyakini masyarakat Mori memiliki kemampuan magis untuk mengetahui peluang yang menguntungkan atau sebaliknya. Itulah sebabnya ketika Tadulako menyatakan ingin pulang, tidak ada seorangpun yang membantah, dan semuanya menerima saran itu dan kembali pulang ke Bente.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 243.

<sup>5</sup> Sebenarnya pasukan Inggris yang mendapat tugas untuk mengambilalih kedudukan kekuasaan Jepang di Asia Tenggara, namun karena kekurangan personil militer sehingga dimintai bantuan dari tentara

Australia untuk menyelesaikan persoalan akhir perang pada wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang, yaitu: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Baca: Harun Kadir, dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan, 1945-1950* (Ujung Pandang: Laporan Penelitian, 1984), hal. 153-155.

<sup>6</sup> Willem Ijzereef, *De Zuid-Celebes Affaite. Kapitein Westerling en de Standrechtelijke Executies* (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984), hal. 17; Harun Kadir, dkk, *op.cit.*, hl. 153-154.

dan keamanan di Sulawesi Tengah, maka aparat NICA yang memandu pasukan Sekutu mulai mengirim pasukan untuk mengurus tawanan perang. Dikirimlah pasukan Sekutu ke Kolonodale dengan menggunakan mobil. Setelah tiba, diperoleh keterangan bahwa sebagian anggota militer Jepang telah berangkat sendiri ke Makassar, setelah mengetahui bahwa pasukan Sekutu telah berada di sana, untuk menyerahkan diri. Oleh karena pasukan yang dikirim tidak disertakan pejabat sipil NICA maka diputuskan untuk menunjuk 4 orang Jepang tanpa senjata untuk menangani urusan pemerintahan, yaitu: Asahi, Imada, Minsen, dan Nantako, hingga kedudukan pemerintahan untuk sementara diambilalih oleh para bekas lawan mereka, sementara yang lainnya diberangkatkan pada akhir Oktober 1945 dengan kapal ke Makassar.

Setelah pemberangkatan pasukan militer Jepang, Raja Owolu Marunduh mengirim kurir kepada Klinkhamer untuk menyampaikan bahwa keadaan di Kolonodale telah aman. Berdasarkan berita itu ia berangkat dengan didampingi oleh Tadulako, Majomba, dan beberapa orang dari Bente dan menemui raja di Kolonodale. Raja Owolu Marunduh memerintahkan agar ia dapat pergi ke kantor pemerintah untuk menemui empat orang wakil Jepang yang mendapat tugas melaksanakan pemerintahan sementara. Ketika tiba di sana ia disambut dengan senang dan mengajaknya untuk berbicara di bekas rumah dinas Letnan De Jong. Di tempat itu ia diterima dengan santun dan diperlakukan sebagai tamu terhormat dengan hidangan teh sambil bertukar pikiran tentang periode perang yang telah berlalu dan pengalihan tugas pemerintahan.

<sup>7</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 244. Lagu itu konon diberi nada oleh guru sekolah dan dinyanyikan dengan hikmat. Klinkhamer tampak memberikan penghormatan militer ketika lagu itu dinyanyikan oleh murid

Pada tanggal 3 November 1945, para kepala sekolah mengorganisasikan murid-murid mereka dan datang ke istana raja. Raja Mori Owolu Marunduh, Klinkhamer, dan Tadulako keluar berdiri di beranda istana menyambut kedatangan mereka. Pada kesempatan itu mereka menyanyikan lagu Wilhelmus dalam versi Bahasa Indonesia: "Wilhelmus dari Nassau, German asalku".<sup>7</sup> Pada malam hari Raja Mori menyelenggarakan jamuan makan malam sebagai tanda syukur atas keselamatan Klinkhamer dengan sejumlah tokoh-tokoh penting yang berada di Kolonodale. Pada kesempatan itu hadir juga wakil dari Bente, Majomba dan Tadulako.

Acara yang diselenggarakan secara spontanitas itu dipandang oleh pejabat sementara Jepang sebagai suatu penghormatan dan pengakuan kembali atas kedudukan kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 7 November, mereka datang ke istana raja untuk berpamitan dengan Klinkhamer dan kemudian berangkat ke Makassar untuk menyerahkan diri kepada Sekutu.<sup>8</sup> Pada hari itu juga Klinkhamer memohon izin untuk pindah ke bekas rumah dari Sersan Mayor Gerissen. Ia kemudian mengorganisasikan kembali bekas anggota detasemen Kolonodale yang berjumlah 15 orang tentara untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa ia secara sepihak menyatakan berhak atas kedudukan sebagai kontrolir Kolonodale, selama belum ada pejabat resmi yang didatangkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Untuk menunjukkan kedudukan kekuasaan, setelah menata kembali bekas anggota detase-

sekolah.

<sup>8</sup> Hegener mengungkapkan bahwa dalam perjalanan ke Makassar, salah seorang dari mereka melakukan harakiri. *Ibid*, hal 245.

men untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan, Klinkhamer kemudian melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Tampaknya kekejaman yang diderita pada periode tentara pendudukan Jepang itu telah memotivasi penduduk bergembira dan menyambut kehadiran Klinkhamer yang dipandang sebagai pejabat pemerintah kolonial dengan acara penyambutan yang meriah, dan sikap rakyat ini sesungguhnya berhubungan dengan telah berakhirnya perang. Umumnya mereka belum mengetahui bahwa se usai perang, tokoh-tokoh nasionalis Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Namun ketika kembali ke Kolonodale, diperoleh informasi bahwa sejumlah warga telah mengetahui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Bahkan yang mengherankan ada diantara mereka yang telah berkumpul kembali dan menjadi satu kesatuan untuk memelihara ketenteraman dan keamanan terlibat dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Berdasarkan informasi itu maka dilakukan penyelidikan pada setiap kediaman stafnya. Dari hasil penyelidikan itu diketahui bahwa di rumah Mardjono dan Soeroso Maderoem<sup>9</sup> dijumpai gulungan kain merah putih yang dipandang sebagai bahan untuk membuat bendera kebangsaan Indonesia. Selain itu diketahui pula bahwa mereka telah menyebarkan berita proklamasi itu dan bergiat menjalin hubungan dengan dengan tokoh-tokoh nasionalisme di daerah Poso.

Berdasarkan kenyataan itu, ia langsung

mengambil beberapa kebijakan untuk dapat memutuskan hubungan antara para nasionalis di Mori dengan daerah luar. Kebijakan yang terutama adalah melarang penduduk untuk keluar dari wilayah Onderafdeling Kolonodale ataupun kembali tanpa membawa surat izin perjalanan yang ditandatangani. Penduduk juga dilarang melakukan hubungan atau terlibat dalam kegiatan kaum nasionalis di tempat lain. Selain itu diumumkan juga bahwa mata uang Jepang tidak berlaku lagi, dan mata uang yang sah adalah mata uang Belanda yang telah beredar dan digunakan sebelum perang.<sup>10</sup> Kebijakan yang disebut terakhir itu berdampak pada mekanisme pasar mengarah pada sistem barter.

Pada pertengahan Desember 1945, Raja Owolu Marunduh menerima sepucuk surat dari H. Abdul Rahim<sup>11</sup> yang dikirim melalui Raja Bungku, Abdul Rabie. Dalam surat itu dikisahkan tentang perjuangan kaum nasionalis menentang kehadiran NICA untuk memulihkan kedudukan kekuasaan kolonial Belanda di Makassar dan beberapa tempat lain di Sulawesi Selatan. Tindakan perlawanan itu berakibat terjadinya pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa. Selain itu diinformasikan pula bahwa kelompok republiken di Wotu (Luwu) merencanakan akan datang untuk meminta pertanggungjawaban atas dukungan raja dan untuk menangkap Klinkhamer.<sup>12</sup>

Raja Mori, setelah membaca surat itu, mengirim utusan untuk menyampaikan kepada kepala-kepala distrik-distrik dan kampung-kampung agar mengorganisasikan warga yang

---

<sup>9</sup> Mardjono adalah bekas KNIL dari detasemen Kolonodale yang juga ikut dalam pasukan gerilya pimpinan Letnan De Jong. Sementara Soeroso Maderoem adalah petugas radiotelegrafis.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 245.

<sup>11</sup> Haji Abdul Rahim adalah bekas kepala distrik di Bungku pada periode pemerintahan Jepang. Ia adalah

seorang tokoh Muhamadiyah dan berpikiran nasionalis, sehingga setelah Jepang kalah melakukan perjalanan ke Makassar dan sekitarnya untuk menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis di daerah itu., Baca: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 248.

<sup>12</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 247.



Besau Marunduh. Koleksi pribadi: Ny. Eleonora Tumakaka-Marunduh, Palu.

potensi agar sewaktu-waktu dapat dikerahkan menjaga keamanan dan ketertiban di Kolonodale apabila dibutuhkan. Selain itu juga memberitahukan kepada kepala pemerintahan sementara (kontrolir) Kolonedale. Berita ini mendorong Klinkhamer memerintahkan kepada pasukan yang dibentuknya itu untuk menjaga keamanannya secara bergiliran dalam kelompok 3 orang. Tidak berapa lama kemudian Raja Mori juga menginformasikan bahwa telah siap 1.500 orang bersenjatakan tombak dan panah apabila dibutuhkan menjaga ketertiban dan keamanan.

Informasi tentang perjuangan kaum republik terhadap NICA yang diperoleh dari Abdul Rahim, seorang bekas kepala distrik pada periode Jepang itu, menimbulkan kecurigaan Klinkhamer kepada semua orang yang dahulu bekerjasama dengan Jepang. Kecurigaan itu beralasan karena selama pendudukan Jepang, pihak pemerintah Jepang menjanjikan kemer-



Wongko Lemba Talasa, Raja Muda Poso. Koleksi pribadi: dr. Robert Talasa M. Epid, Palu.

dekaan, dan bahkan kemudian mengorganisasikan lembaga BPUPKI dan kemudian PPKI yang bermuara pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kecurigaan itu mendorongnya agar dapat menindaki mereka yang bekerjasama dengan Jepang. Hal itu tampak dalam kisah dari Besau Marunduh, tentang perlakuan Klinkhamer ketika ia datang di kantor kepala distrik dan meminta kembali 3 pucuk senjata karabin, yang atas persetujuan Raja Mori, disembunyikan dalam sebuah lemasi besi (kluis) bersama satu karabin milik Raja Mori. Ketika itu ia menawarkan untuk membaginya: masing-masing mendapat dua pucuk karabin. Namun setelah diambilnya salah satu karabin, ia langsung mengarahkan senjata itu kepada Besau Marunduh dan memaksanya untuk menyerahkan seluruh senjata itu kepadanya. Ia juga menuduh kepala distrik yang pada periode Jepang itu sebagai seorang penghianat. Akhir-



nya semua karabin itu diambil dan dibawa ke Kolonodale.

Kejadian itu dilaporkan kepada ayahnya, Raja Mori, namun hal itu hanya diingat sebagai suatu tindak kesewenangan. Raja Mori tidak dapat membatalkan dukungannya dan janji memberikan dukungannya kepada Klinkhamer. Janji seorang raja pantang diingkari, karena secara kultural pengingkaran janji akan berakibat bencana yang digambarkan sama seperti sebutir telur yang dihempaskan ke tanah. Oleh karena itu ia tidak menghalangi sikap puteranya menentang kedudukan kekuasaan kolonial Belanda dengan menjadi salah seorang tokoh gerakan Pemuda Merah-Putih. Kelompok Pemuda Merah-Putih di daerah ini memiliki jaringan kerjasama dengan kelompok "Pemuda Merah-Putih di Poso.

Kelompok Pemuda Merah-Putih di Poso didirikan atas prakarsa Raja Muda Poso, Wongko Lemba Talasa.<sup>13</sup> Yang terpilih menjadi ketua organisasi ini adalah Yakob Lama-juda, seorang bekas komandan Heiho pada masa Jepang. Organisasi ini didirikan setelah tentara Sekutu yang datang ke Poso dibawah pimpinan mantan Asisten Residen Poso, L.C.J. Resdijk, pada 1 November 1945, mengurus pengangkutan tentara Jepang. Keberangkatan tentara Sekutu mengantar personil militer dan sipil Jepang ke Makassar menyebabkan terjadinya kevakuman pemerintahan. Oleh karena itu organisasi Pemuda Merah-Putih inilah yang mengambil alih tugas mempertahankan kea-

manan dan ketertiban membantu Raja Muda Poso. Pada bulan Desember 1945, baru Sekutu mulai mengorganisir penempatan pejabat pemerintahan sipil di Sulawesi Tengah.

Domini Jan Kruyt yang ikut bersama rombongan pejabat sipil yang dikawal oleh tentara Australia dengan menggunakan korvet mencatat bahwa pada dini hari, tanggal 9 Desember 1945, rombongan tiba di pelabuhan Poso. Kota itu ternyata telah dikuasai oleh Pemuda Merah-Putih. Diantara kelompok itu hadir pula seorang anggota cabang organisasi itu dari Kolonodale. Mereka mengancam akan menembak jika aparat NICA diturunkan. Namun setelah komandan pasukan Australia berbicara bahwa tugas yang diemban adalah untuk mengurus kepulangan tentara Jepang dan menyuruh mereka membubarkan diri, maka mereka pun membubarkan diri.<sup>14</sup> Tidak dapat disangkal bahwa mereka mengikuti perintah komandan tentara Australia itu karena Raja Talasa juga melarang mereka berkonfrontasi dengan pihak Sekutu. Namun ternyata kemudian diketahui bahwa tentara Australia itu hanya mengawal aparat NICA yang dikirim untuk mengambil alih pemerintahan di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu organisasi Pemuda Merah-Putih terus bergiat di luar kota Poso untuk menggalang massa menentang kedudukan kekuasaan Belanda.

Kapten Verhagen yang ditetapkan menjadi Asisten Residen Afdeling Poso, setelah menata kedudukannya, mulai mengorganisasikan

---

<sup>13</sup> Wongko Lemba Talasa dilantik oleh pemerintah Jepang untuk menggantikan ayahnya (Talasa) sebagai Suco Poso pada tahun 1943. Ia disebut Raja Muda mengingat ayahnya ketika itu belum meninggal. Secara tradisional penggantian seorang raja baru dilakukan setelah sang raja wafat. Baca: Hasan, dkk., *op.cit.*, hal. 235-236.

<sup>14</sup> Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 247-248; Bandingkan dengan: Hasan, dkk, *op.cit.*, hal. 257. Dalam buku ini

diungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 1 November 1945, ketika pasukan Sekutu tiba untuk mengurus personil militer dan sipil Jepang. Diungkapkan juga bahwa rencana Pemuda Merah-Putih untuk menyerang pasukan Sekutu itu dilarang oleh Raja Talasa sehingga mereka membubarkan diri. Selain itu mereka juga menyerahkan sejumlah senjata yang dimiliki kepada pasukan Australia itu.

pengiriman pejabat pemerintah sipil ke wilayah onderafdeling. Letnan Satu Drs. Van Strien ditetapkan menjadi Kontrolir Kolonodale dan diberangkatkan bersama 4 orang polisi Papua dengan mobil. Mereka tiba pada 8 Januari 1946 dan diterima dengan upacara penyambutan pejabat baru. Setelah melakukan serah terima jabatan, Klinkhamer meninggalkan Kolonodale dan selanjutnya berangkat ke Makassar.

Kehadiran aparat NICA itu mendorong kelompok Pemuda Merah-Putih di Kolonodale mengorganisasikan aksi perlawanan dengan bergiat mengobarkan semangat pada pemuda menentang pemerintahan kolonial Belanda. Aksi itu mendorong kontrolir memerintahkan kesatuan polisi yang terdiri dari 11 orang polisi dibawah komandan Soeroso untuk melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Pemuda Merah-Putih, antara lain: Besau Marunduh, Sungka Marunduh, Junius Kurami Tumakaka, Marius Tumakaka, Soeroso Maderoem, Gabriel, dan William Friets Taroreh. Sebelum rencana penangkapan itu dilaksanakan, mereka telah berangkat meninggalkan Kolonodale pada malam hari tanggal 5 Pebruari 1946. Kepergian mereka itu, selain meloloskan diri dari rencana penangkapan mereka, juga bergiat untuk menjalin hubungan dengan kelompok Pemuda Merah-Putih dari Wotu (Luwu) yang konon berkeinginan untuk datang ke Mori dan menangkap Klinkhamer. Namun ketika mereka beristirahat di satu kampung yang berjarak sekitar 11 km dari Malili, mereka memperoleh informasi bahwa Malili dan wilayah Luwu telah diduduki oleh tentara NICA dan semua pejuang telah terpecah sehingga sulit dapat dihubungi.

Berita itu tidak saja membuyarkan rencana mereka untuk mendapat bantuan dan dukungan untuk membinasakan kedudukan kekuasaan kolonial di Kolonodale tetapi juga merasa diri mereka terancam oleh tentara NICA. Oleh karena itu mereka langsung meninggalkan kampung itu dan bergerak ke arah Danau Matano. Setiba di sana mereka berunding untuk menetapkan langkah selanjutnya. Dalam pembicaraan itu disadari bahwa mereka tidak dapat bertindak menentang pemerintah Belanda tanpa bantuan dari Pemuda Merah Putih Luwu. Akan tetapi jalan untuk mendapat bantuan sudah tidak mungkin lagi terlaksana. Peluang untuk mempengaruhi penduduk Mori agar mendukung mereka menentang pemerintah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan sangat sulit mengingat kunjungan Klinkhamer ke daerah-daerah mendapat sambutan yang meriah. Oleh karena itu diputuskan untuk kembali ke Kolonodale sambil mempelajari keadaan dan tetap melakukan perjuangan secara terselubung (gerakan bawah tanah). Hasan dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa gerakan bawah tanah pemuda pejuang Mori menetapkan empat tujuan pokok yaitu: (1) memajukan Indonesia, (2) memperkuat Indonesia, (3) mempersatukan Indonesia, dan (4) membantu Republik Indonesia di Jawa.<sup>15</sup>

Ketika tiba di Kolonodale, diketahui bahwa pemerintah telah meningkatkan kesatuan militernya dengan mendatangkan satu kompi pasukan baret hijau dari Manado, atas permintaan Kontrolir. Pasukan itu didaratkan dengan menggunakan kapal perang Jombang dengan tugas untuk mempertahankan kedudukan kekuasaan NICA dan memadamkan aksi perlawanan penduduk. Asisten Residen Poso

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 260. Namun perlu dicermati data yang ditampilkan karena disebutkan bahwa NICA datang ke Mori pada bulan September 1945. Kenyataannya pasukan Sekutu yang datang mengurus kepulauan

personil militer dan sipil Jepang baru datang pada akhir Oktober 1945. Personil NICA baru masuk ke Kolonodale pada 8 Januari 1946. Baca: Michiel Hegener, *op.cit.*, hal. 248.

memanfaatkan kehadiran pasukan itu untuk mendemonstrasikan kekuatan agar dapat menimbulkan ketakutan psikologis penduduk yang ingin melakukan perlawanan. Menurut pertimbangannya, berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok pemuda pejuang itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bekerjasama dengan pemerintahan Jepang. Mereka menentang kehadiran kembali pemerintah Belanda dan mengorganisasikan perlawanan demi kemerdekaan karena memandang pihak pemerintah akan menuduh mereka sebagai penghianat. Dugaan itu juga beralasan karena Klinkhamer telah berbuat demikian dengan menuduh tokoh-tokoh Mori yang bekerjasama dengan Jepang sebagai penghianat. Oleh karena itu Asisten Residen Poso menentukan sikap untuk menghadapi tokoh-tokoh Pemuda Merah Putih secara persuasif dan menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang dituduhkan oleh Klinkamer itu keliru. Ia memohon maaf atas kesalahan tindakan itu dan mengajak mereka berkerjasama.<sup>16</sup>

Selain itu ia juga mengungkapkan dan menegaskan gagasan pemerintah Belanda untuk membangun Uni Belanda-Indonesia, yang sementara diusahakan realisasinya oleh Letnan Gubernur Hindia Belanda, Herbertus J. van Mook.<sup>17</sup> Gagasan ini pada dasarnya menawarkan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia namun tidak lepas dari Belanda. Indonesia akan dibangun dalam bentuk negara federal, dan menjadi bagian dalam Uni Belanda-Indonesia. Ratu Belanda akan menjadi pemimpin simbolis dari Indonesia Serikat.

---

<sup>16</sup> W.F. Taroreh, "Himpunan Bahan tentang Negeri dan Kepahlawanan Rakyat Mori (Sulawesi Tengah) melawan Penjajahan" (Manado: manuskrip, 1992).

<sup>17</sup> Gagasan Uni Belanda-Indonesia itu juga kemudian menjadi butir pembicaraan yang penting dalam Konferensi Linggarjati pada 12 November 1946. Dalam Perjanjian Linggarjati, pemerintahan NICA

Pendekatan persuasif yang disertai penjelasan tentang keinginan pemerintah Belanda dan tawaran kerjasama itu berhasil meredakan semangat perjuangan Pemuda Merah Putih dan bersedia bekerjasama.

## **Mori Bergolak: Periode Negara Indonesia Timur**

Kebijakan persuasif yang dilaksanakan pada awal kegiatan untuk memulihkan kedudukan kekuasaan itu tampak hanya merupakan strategi politik belaka. Itulah sebabnya setelah menata dan memulihkan kedudukan kekuasaannya, pemerintah mulai melaksanakan tindakan tegas terhadap mereka yang diketahui berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Tindakan pemerintah untuk memperkuat kedudukan kekuasaannya dan memudarkan gerakan perjuangan rakyat untuk memperjuangkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara RI itu yang diungkapkan dan dijelaskan dalam bagian pokok bahasan ini.

Pada tanggal 23 April 1946, kapal api Van den Bosch tiba di Kolonodale dengan tugas untuk mengangkut semua keluarga KNIL yang berada di Onderafdeling Kolonodale ke Manado. Setelah menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan berakhirnya Perang Asia Timur Raya, pemerintah Kolonodale mulai menata pemerintahan. Selain memperkuat kedudukan kekuasaan NICA, pemerintah juga bergiat menata organisasi pemerintahan swapraja. Pejabat pemerintah Swapraja Mori ketika itu diiban oleh Owolu Marunduh. Raja

mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, sementara di luar daerah itu berada dalam kekuasaan NICA. Selain itu disepakati pula untuk bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat untuk masuk dalam Uni Belanda-Indonesia. Baca: M.C. Ricklefs, op.cit., hal. 237.

ini telah berusia uzur sehingga Kontrolir Kolonodale menugaskan Pirau Marunduh (1919-1990) untuk menjalankan pekerjaan Raja Mori. Itulah sebabnya ia yang diutus mengikuti Konferensi Denpasar pada Desember 1946, atas nama Raja Mori. Jabatan baru ini mendapatkan pengabsahan berdasarkan Surat Keputusan Residen Manado No. 1/3/21 tertanggal 31 Maret 1949, yang ditetapkan mulai terhitung 1 April 1949. Penambahan tugas yang diembangkannya itu setelah Pirau Marunduh ditetapkan menjadi Asisten Pemerintahan (Bestuur Asistent) merangkap jabatan Jaksa, berdasarkan Surat Keputusan Kontrolir Kolonodale No. 14 tertanggal 1 April 1946, dan dinyatakan terhitung mulai tanggal penetapannya sejak 1 April 1946.<sup>18</sup>

Usaha pembenahan kedudukan kekuasaan ini dipandang oleh tokoh-tokoh yang berhaluan republikan sebagai usaha pemantapan kedudukan kekuasaan kolonial. Hal ini berhubungan dengan reaksi aparat NICA mengungkit kembali keterlibatan tokoh-tokoh yang bekerjasama dengan tentara pendudukan Jepang. Pilihan itu dipandang patut dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Van Mook yang bergiat merealisasikan pembentukan negara federal yang direncanakan, yang telah diawali dengan Konferensi Malino pada Juli 1946. Selain itu kebijakan itu dipandang dapat meredam gerak para republikan untuk bergiat mempengaruhi opini publik menentang rencana pembentukan negara federal, mengikuti gerak perlawanan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Meskipun di beberapa daerah terjadi gerakan menentang rencana Van Mook, namun pihak pemerintah Belanda bertekad merealisasikan dengan mengundang tokoh-tokoh politik untuk hadir pada Konferensi Denpasar yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember 1946. Berdasarkan rencana itu, sebelum waktu yang ditetapkan telah berkumpul utusan-utusan dari berbagai daerah dalam wilayah Provinsi Timur Besar di Denpasar. Termasuk utusan dari Daerah Sulawesi Tengah sebanyak 6 orang,<sup>19</sup> salah seorang diantaranya adalah Pirau Marunduh yang hadir mewakili Raja Mori. Konferensi yang sedianya dibuka oleh Letnan Gubernur Jenderal H. J. Van Mook itu mengalami penundaan, dan baru dibuka secara resmi pada tanggal 17 Desember dan berlangsung hingga 24 Desember 1946.

Tampaknya Van Mook khawatir akan keberhasilan untuk memaksa para delegasi menerima gagasan negara federal. Itulah sebabnya, setelah utusan dari berbagai daerah telah berkumpul di Denpasar, secara sepihak ia mengumumkan "Keadaan Darurat Perang" (*Staat van Orlog en Beleg-SOB*) untuk wilayah Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946. Pengumuman itu diikuti dengan aksi pembersihan (*zuiveringsactie*) yang dilaksanakan oleh *Detaschement Speciale Troepen* (DST) yang beranggotakan 123 tentara berbaret merah dibawah pimpinan Kapten Raymond Paul Pierre Westerling.<sup>20</sup>

Aksi pembersihan itu dilaksanakan dengan cara menggiring penduduk pada dinihari ke

<sup>18</sup> Sumber: Arsip Keluarga Pirau Marunduh, Daftar Riwayat Hidup Singkat Almarhum, Palu 19 November 1990.

<sup>19</sup> Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, ed. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2* (Makassar: Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, 2005), hal 224. Urutan yang hadir mengikuti konferensi itu antara lain: Sulawesi Selatan sebanyak 20 orang, Sulawesi

Tengah sebanyak 6 orang, Sulawesi Utara mengutus 3 orang, Bali menghadirkan 7 orang tokohnya, NTB mengutus orang, dan NTT menghadirkan 6 orang. Jumlah peserta konferensi seluruhnya adalah 70 orang, diantaranya utusan dari daerah-daerah sebanyak 55 orang.

<sup>20</sup> Kapten Raymond P. Westerling lahir di Istanbul, Turki pada 31 Agustus 1919, ayahnya Belanda dan



Perayaan Ulang Tahun pertama Negara Indonesia Timur (NIT) di Kolonodale. Duduk sebelah kanan depan memakai kebaya Ny. Meneo Marunduh Tumakaka, istri Pirau Marunduh. Koleksi: Istana Raja Mori, Kolonodale.

lokasi lapangan terbuka dan kemudian menembak mati kelompok yang dipandang ekstrimis (kaum penentang kekuasaan kolonial dan pendukung negara kesatuan). Tindakan itu menunjukkan bahwa aksi pembersihan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan psikologi massa (*masale angst psychose*), terutama ditujukan kepada para delegasi yang telah berada di Denpasar agar menerima gagasan federal itu secara aklamasi. Itulah sebabnya 10 hari kemudian setelah pernyataan SOB dan Westerling melaksanakan aksi pembersihan, baru Van Mook berangkat ke Denpasar untuk membuka konferensi. Dampak dari strategik militer itu adalah para delegasi menerima gagasan pembentukan Negara

Indonesia Timur yang terwujud pada penutupan konferensi pada 24 Desember 1946. Tokoh yang terpilih menjadi Presiden adalah Tjokorde Gde Rake Soekawati. Sementara yang menjadi Perdana Menteri adalah Nadjamuddin Daeng Malewa dan Ketua Parlemen Sementara NIT adalah Tadjuddin Noer.

Tindakan tegas pemerintah kolonial Belanda terhadap tokoh dan pendukung republik itu bergema dan dilaksanakan juga terhadap tokoh dan pendukung republik di Mori. Itulah sebabnya pada 16 Desember 1946, Kontrolir Kolonodale melakukan penahanan terhadap Besau Marunduh, dengan tuduhan melakukan provokasi menentang pemerintah. Ia kemudian diajukan ke hadapan Pengadilan Hadat di Poso,

---

ibunya Yunani. Westerling memulai karir militer di awal Perang Dunia II. Ia kemudian mendaftarkan diri ke Kantor Perwakilan Belanda di Istanbul untuk kemudian ia dikirim ke Inggris negara dimana pemerintah Belanda mengungsi pada waktu itu. Di

negara ini mendapat pelatihan sebagai paratrooper di pusat pelatihan *Special Air Service* (SAS). Pada waktu perang kemerdekaan, ia kemudian dikirim ke Indonesia sebagai anggota pasukan khusus dengan pangkat Kapten.



J.K. Tumakaka sebagai Jaksa merangkap Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu di Palopo, September 1952 - Februari 1954. Di samping kiri ialah William Friets Taroreh, Kepala Polisi Palopo. Koleksi pribadi: Ny. Ribka Mustikawati Tumakaka, Jakarta.

yang diketuai oleh Asisten Residen De Vlak.<sup>21</sup> Ia kemudian dijatuhkan hukuman pembuangan selama 2 tahun. Tempat pembuangannya adalah Makassar, daerah yang ketika itu sedang berstatus dalam keadaan darurat perang yang diwarnai dengan aksi pembersihan oleh Westerling.

Perlakuan terhadap tokoh republikan itu mendorong para pengurus organisasi Selangkah Demi Selangkah (SDS) bergiat untuk dapat menyelamatkan para tokoh republikan lainnya yang belum ditangkap dengan mendorong mereka keluar dari Mori untuk belajar dan memperdalam ilmu mereka. Organisasi sosial ini dibentuk atas inisiatif dari Sungka Marun-

duh, yang berhasil dibentuk pada 1 April 1946. Ketua organisasi itu dipercayakan kepada Ande Kurami Tumakaka dan sebagai bendahara terpilih N. Peuru. Organisasi ini dibentuk dengan memilih tujuan yang sama seperti Budi Utomo (BU) di Jawa yaitu untuk menggalang dan menghimpun dana guna membiayai putera dan puteri Mori mengikuti pendidikan sebagai reaksi atas anggapan pihak pemerintah Belanda bahwa rakyat Mori belum mampu untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri. Sehubungan dengan tujuan organisasi dalam kondisi yang mencekam itu, pengurusnya memilih kebijakan, untuk mencegah pemerintah melakukan penangkapan yang pada gilirannya akan menciptakan ketidaktertaman sosial dan politik - membiayai pendidikan tokoh-tokoh republikan. Mereka yang didorong untuk belajar ke luar Mori, antara lain: Sungka Marunduh dikirim untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Pertanian di Makassar, Junius Kurami Tumakaka dikirim untuk mengikuti pendidikan kadaster di Manado, dan William Friets Taroreh mengikuti pendidikan kepolisian, sementara Soeroso Maderoem<sup>22</sup> berangkat pulang ke Jawa.

J. K. Tumakaka, yang kemudian lebih akrab dipanggil Bung Nius Tumakaka ini, adalah seorang pemuda yang sangat progresif. Selama mengikuti pendidikan, ia juga bergiat dalam bidang politik dengan memilih menjadi anggota Barisan Nasional Indonesia (BNI) pimpinan Dauhar, di Manado. Partai ini merupakan partai kaum republikan karena menerima dan mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan bergiat mendukung Republik Indonesia yang berpusat di Yogya-

<sup>21</sup> Pengadilan Hadat yang dibentuk umumnya beranggotakan para raja dalam wilayah pemerintahan yang diketuai oleh Asisten Residen. Dalam kasus Besau Marunduh, anggota dewan hadat yang hadir adalah Raja Napu dan Raja Tojo. Hakim yang

mengadili adalah Poli'i, dan yang bertindak sebagai juru bahasa terdakwa adalah A.K. Tumakaka.

<sup>22</sup> Soeroso Maderoem pada 1966 menjadi Kepala Pengawas Lalu Lintas Udara lapangan terbang Kemayoran.

karta. Keterlibatan dalam organisasi politik itu menjadikannya menjadi kader politik yang progresif. Itulah sebabnya setelah menyelesaikan pendidikan kadaster di Manado dan kembali ke Mori pada 1947, ia bergiat menghimpun sejumlah tokoh dan pemuda Mori untuk membentuk cabang organisasi itu dan sekaligus ia yang terpilih menjadi ketua BNI cabang Mori.<sup>23</sup> Selanjutnya untuk dapat melibatkan penduduk, ia juga mendirikan wadah sosial sebagai bagian dari organisasi politik ini pada tahun 1947, yang dinamakan Koperasi Kita. Wadah koperasi ini dimaksudkan untuk dapat memikat penduduk menjadi anggota sekaligus memberikan nuansa bahwa aktivitas organisasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kegiatannya untuk menyadarkan masyarakat tentang perjuangan kemerdekaan, ia melibatkan diri ikut serta dalam kegiatan perkumpulan-perkumpulan keagamaan, seperti: Perkumpulan Pembacaan Alkitab (PPA) dan Perkumpulan Pemuda Pembaca Alkitab (PPPA),<sup>24</sup> sambil menjelaskan arah dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ketekunannya untuk menyadarkan penduduk akhirnya membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Sejumlah tokoh masyarakat dan rakyat menggabungkan diri menjadi anggota organisasinya.

Untuk memupuk semangat perjuangan dan menggemakan perjuangan partainya, bersama pengurus partai yang lain, ia merencanakan untuk mengorganisasikan suatu acara dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional di Kolonodale. Untuk tujuan itu, panitia

perayaan mendapatkan izin dari pengurus sekolah Tionghoa untuk menggunakan ruang sekolahnya. Upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional itu dihadiri pula aparat pemerintah setempat, termasuk Kontrolir Drs. Van Strien. Ia mendapat kehormatan untuk memberikan sambutan yang pertama. Dalam sambutannya diungkapkan dan dijelaskan tentang tujuan pendirian Budi Utomo (BU) yang dipandang sejalan dengan tujuan pendirian SDS yang diprakarsai oleh Sungka Marunduh. Tujuannya adalah menggalang dan menghimpun dana untuk membiayai pendidikan dari putera dan puteri rakyat Mori.

Setelah sambutan itu, selanjutnya Bung Nius Tumakaka menyampaikan orasinya, sebagai ketua BNI cabang Kolonodale. Dalam orasinya, ia mencoba membangkitkan semangat perjuangan dari peserta perayaan itu dengan menelusuri sejarah perjuangan bangsa yang bermula dengan didirikannya Budi Utomo yang kemudian diiringi dengan pembentukan partai politik, organisasi pemuda yang dalam kongresnya pada 26-28 Oktober 1928 mengikrarkan Sumpah Pemuda dan pada akhirnya bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah mengungkapkan dan menjelaskan sejarah perjuangan bangsa, ia akhiri dengan mengajak seluruh peserta untuk terus berjuang demi terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Orasinya itu disambut meriah, tidak hanya dengan tepuk tangan, tetapi juga diiringi dengan pekik "merdeka" yang berulang-ulang dari hadirin.

---

<sup>23</sup> A.K. Tumakaka, "Catatan Sejarah Mori" (Manuskrip).

<sup>24</sup> Dua perkumpulan itu dibentuk atas prakarsa para zendeling untuk memantapkan pemahaman umat tentang Firman Allah. PPA adalah wadah penelahan Alkitab untuk kegiatan ibadah keluarga, ayah dan ibu.

Perkumpulan itu didirikan pada tahun 1939, dan diketuai oleh Sungka Marunduh, penulis: Matainda Tumakaka, dan bendahara: A.K. Tumakaka. Sementara PPPA adalah wadah penelahan Alkitab untuk para pemuda. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1940 dan diketuai oleh A.K. Tumakaka.

Kenyataan itu menyadarkan pihak pemerintah bahwa di wilayah pemerintahannya terdapat juga kelompok republiken, kelompok yang biasa juga disebut kaum uniteralis, kelompok yang selama ini berjuang menentang gagasan negara federal yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk membendung perkembangannya dan sedapat mungkin memudarkannya. Usaha ke arah itu dipandang sangat penting mengingat rencana ke arah pembentukan negara federal tinggal menanti waktu yang tepat. Usaha Belanda untuk memecah dan membagi wilayah Indonesia dalam beberapa bagian dan menjadikannya negara yang berdiri sendiri untuk kelak dijadikan anggota dari negara federal sudah terwujud. Negara-negara yang telah dibentuk itu antara lain: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), dan Negara Madura (1948). Oleh karena itu, sama seperti yang dilakukan di negara-negara yang dibentuk itu, di Kolonodale juga pemerintah bergiat menekan kelompok republiken. Usaha yang dipikirkan adalah bagaimana dapat menangkap dan menawan tokoh, khususnya ketua BNI Kolonodale, Bung Nius Tumakaka.

Untuk mencapai tujuan itu, Lucky Wenas, Inspektur polisi Kolonodale, atas persetujuan kontrolir memprovokasi rakyat tentang aksi yang disebut "poru-poru", atau "gorodi", yaitu bentuk pengayauan anak-anak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan berkeliaran pada malam hari untuk menangkap anak-anak dan memenggal kepalanya. Berdasarkan isu gorodi itu, pihak kepolisian menerapkan

kebijakan "jam malam". Penduduk dilarang melakukan aktivitas pada malam hari. Untuk menunjukkan bahwa isu itu benar, sejumlah anggota polisi ditugaskan berlakon sebagai gorodi pada malam hari.<sup>25</sup> Hal itu dimaksud, bukan hanya untuk menakut-nakuti penduduk dan meredakan kegiatan Bung Nius Tumakaka, tetapi juga dapat dijadikan alasan untuk menangkapnya apabila dia keluar malam untuk mengunjungi keluarga, kerabat, dan penduduk untuk menggalang mereka menjadi kelompok republiken. Rencana penangkapan itu dimaksudkan pula untuk dapat menghalanginya mengikuti kongres BNI yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Juni 1948 di Manado. Jebakan yang diciptakan itu disadari oleh Nius Tumakaka, sehingga sejak diberlakukannya jam malam, atas isu adanya gorodi, ia tidak pernah keluar malam sehingga rencana penangkapan itu menjadi sia-sia belaka.

Pada awal Juni 1948, Bung Nius Tumakaka berangkat ke Manado untuk mengikuti kongres BNI. Keikutsertaannya pada kongres itu dipandang akan lebih mempermatang pandangan perjuangan politiknya yang kelak akan digunakan sebagai kendaraan politik untuk menggalang dan memperkuat kelompok aliran politik uniteralis di Kolonodale. Oleh karena itu dirancang strategik baru untuk dapat menangkapnya apabila kelak ia kembali dari kongres. Muncul gagasan untuk membangun drama strategik baru yang dikenal dengan sebutan "si mantel hitam". Berkembanglah isu bahwa aksi gorodi itu didalangi oleh seseorang yang menamakan diri "mantel hitam" dan aksinya telah meluas ke seluruh wilayah Mori. Tersebarlah berita bahwa ketika aksi gorodi

<sup>25</sup> Penduduk mengetahui bahwa isu gorodi itu digagas oleh pihak kepolisian, karena dalam satu kasus di kampung Bugis, pelaku gorodi yang tertangkap itu adalah Tauno, seorang agen polisi berpakaian preman.

Untung penduduk segera mengenalinya sehingga tidak dianiaya, meskipun dia mengaku bukan gorodi tetapi melaksanakan tugas untuk menangkap gorodi. A.K. Tumakaka, *op.cit.*



terjadi di Tiu, tertangkap seorang pemuda bernama Kede, yang mengaku bahwa dia adalah anggota si mantel hitam. Oleh karena itu polisi bergegas ke kampung itu dan menangkap Kede dan membawanya ke Kolonodale. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan. Selama berada di sel, ia disiksa dan dipaksa mengaku bahwa dia disuruh oleh si mantel hitam, yaitu Nius Tumakaka untuk melaksanakan tugas sebagai gorodi. Untuk memperkuat pernyataan itu dipanggil pula Rendu, kepala kampung Tiu, untuk memperkuat pernyataan Kede. Dengan taktik ini pihak kepolisian, yang umumnya beraliran federalis, berpeluang untuk menangkap Bung Nius Tumakaka apabila ia kembali ke Kolonodale.

Pada tanggal 23 Juni 1948, tiba kapal Balanipa di pelabuhan Kolonodale. Para anggota partai dan simpatisan datang ke pelabuhan untuk menjemput Bung Nius Tumakaka. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian mengambil tindakan untuk menangkapnya. Dihadapan kerumunan para anggota partai dan simpatisan, Bung Nius Tumakaka diapit oleh kesatuan kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Pihak kepolisian kemudian menginterogasinya dengan tuduhan sebagai penggagas aksi mantel hitam, dengan mengajukan saksi Kede. Namun ketika Rendu, dipanggil untuk membenarkan saksi pertama, ia mengakui bahwa Kede adalah salah seorang warga kampungnya, tetapi menyangkal telah terjadi aksi gorodi di kampungnya. Namun demikian pihak polisi kembali mengajukan saksi lainnya, namun tidak ada seorang pun yang membenarkan tuduhan itu. Akhirnya pihak kepolisian tidak dapat menahannya, karena tidak dapat lagi menggunakan konsep kolonial yang dikenal dengan istilah "demi ketertiban dan keamanan" (*rust en orde*) untuk menangkap dan menahan seseorang, karena pada periode NIT kaum uniteralis dan federalis

diterima sebagai bagian dari perjuangan politik. Ia kemudian dibebaskan pada 25 Juni 1948.

Dengan keikutsertaannya pada kongres BNI di Manado telah membuka cakrawala pemikirannya untuk menggalang rakyat Mori yang berpendidikan untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam wadah Republik Indonesia. Ia menyadari bahwa mereka bersimpati kepada perjuangannya tetapi masih enggan untuk ikut menjadi anggota partainya, karena keberadaan organisasi politik merupakan sesuatu yang masih baru bagi warga Mori. Selain itu juga proses penangkapan terhadap Nius Tumakaka sebagai ketua BNI menimbulkan keengganan mereka untuk berpolitik lewat partainya. Oleh karena itu ia memilih alternatif lain dengan menggagas pembentukan wadah sosial. Sehubungan dengan niat itu ia mengundang penduduk yang berpendidikan, termasuk para guru sekolah untuk menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan pada 15-16 Juli 1948 di Tinompo. Pada pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk membentuk satu wadah bersama yang mereka namakan Persatuan Mori Terpelajar (PMT). Mereka juga secara aklamasi memilih Bung Nius Tumakaka menjadi ketua. Lewat wadah ini, ia bergiat membangkitkan kesadaran mereka untuk ikut berjuang demi terwujudnya negara kesatuan Proklamasi Kemerdekaan. Ia juga menjelaskan bahwa niat pemerintah Belanda untuk membentuk negara federal adalah untuk memecahbelah rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan agar kemudian dapat kembali menguasainya.

Gerak langkah perjuangan Junius Kurami Tumakaka ini telah meresahkan pemerintah karena dipandang bahwa ia bergiat menghimpun dan membentuk kekuatan kelompok republiken. Oleh karena itu atas persetujuan Asisten Residen Poso, digagas rencana untuk dapat mengeluarkannya dari wilayah Mori.

Atas dasar itu, Asisten Residen Poso mengirim sepucuk surat kepadanya yang isinya menyatakan bahwa satu-satunya warga Sulawesi Tengah yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pada sekolah kejaksaan (*magistraat*) di Makassar adalah J. K. Tumakaka. Bagi pihak pemerintah, ini merupakan strategik pengasingan tokoh republiken, namun bagi sang tokoh itu, ini adalah peluang yang berharga baginya untuk dapat menjalin kerjasama dengan kelompok republiken yang bergiat di Makassar.<sup>26</sup> Oleh karena itu tawaran tersebut diterima dengan senang hati. Ia tidak ragu akan keberadaan kelompok republiken, karena kaum terpelajar Mori telah menyadari dan memahami perjuangan mereka, dan para guru di Mori telah menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan republiken.

Gerakan kaum republiken yang mendukung pemerintah RI di Yogyakarta itu, tampak dipandang oleh pihak pemerintah kolonial

Belanda sebagai faktor penghalang yang sangat menentukan bagi terwujudnya gagasan federalnya. Karena hal itu bukan saja berkembang di Mori tetapi juga di berbagai wilayah negara bagian yang didirikan oleh Belanda, terutama dalam parlemen negara-negara itu. Usaha untuk mendorong negara bagian-negara bagian yang telah dihimpun dalam satu wadah yang disebut "Majelis Permusyawaratan Federal" (*Bijenkost voor Federale Overleg - BFO*) untuk tidak menyertakan RI-Yogyakarta pada perundingan pembentukan negara federal mendapat penolakan yang tegas. Oleh karena itu pemerintah Belanda kembali berusaha bagaimana dapat membuyarkan kedudukan RI. Akhirnya dipilih dengan melakukan aksi militer yang dikenal sebagai Aksi Polisional II pada 18 Desember 1948.<sup>27</sup> Pasukan militer Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin negara dan seluruh anggota kabinetnya, kecuali beberapa anggota

J.K. Tumakaka ketika dilantik oleh Presiden Soekarno 24 Februari 1966 di Istana Negara menjadi Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional dalam Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Koleksi pribadi: Ny. Ribka Mustikawati Tumakaka, Jakarta.



<sup>26</sup> Junius Tumakaka akhirnya berangkat ke Makassar mengikuti pendidikan *Magistraat* dan berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Setelah menamatkan pendidikan, ia kembali ke Mori pada 23 November 1949 dengan menggunakan kapal General van

Geen.

<sup>27</sup> Aksi Polisional II ini baca: M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 347-348. Aksi Polisional I dilaksanakan pada 20 Juli 1947. Baca: *Ibid*, hal. 338-339.

kabinet yang ketika itu tidak berada di tempat.

Aksi militer itu terjadi ketika Komite Jasa-Jasa Baik PBB sementara berada di Kaliurang, tempat peristirahatan yang terletak sekitar beberapa kilometer dari Yogyakarta. Oleh karena itu PBB dan Amerika Serikat memandang tindakan militer Belanda itu menodai martabat, wewenang, dan jasa-jasa baik mereka. Itulah sebabnya Amerika Serikat dengan tegas menyatakan, menghentikan segala bantuannya kepada Belanda pada 22 Desember 1948, apabila tidak merehabilitasi kembali kedudukan Republik Indonesia. Sementara Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi pada 29 Desember 1948 yang menuntut agar pihak Belanda menghentikan aksi militer dan melakukan gencatan senjata, membebaskan tawanan politik, merehabilitasi kedudukan pemerintahan RI di Yogyakarta, melakukan perundingan untuk menyelesaikan persoalan politik mereka, dan penyerahan kedaulatan sepenuhnya sebelum 1 Juni 1950.

Pihak pemerintah Belanda baru menyadari bahwa aksi militernya untuk membuyarkan kedudukan RI dengan tipu muslihat itu mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Dr. Beel yang mendapat tugas untuk berunding dengan BFO, ketika Yogyakarta telah diduduki oleh militer Belanda pada 19 Desember 1948, menyangkut penyerahan kedaulatan tanpa RI ternyata juga mendapat reaksi penolakan tegas dari BFO. Akhirnya pihak Belanda harus bersedia memenuhi segala tuntutan PBB, Amerika Serikat, dan BFO untuk melakukan gencatan senjata pada 30 Desember 1948 dan kemudian melakukan perundingan dengan pemerintah RI. Perundingan berlangsung pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Delegasi RI diketuai oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda oleh Dr. H.J. van Rooyen. Itulah sebabnya kesepakatan

mereka dikenal dengan sebutan *Roem-Rooyen Statement*. Pada perundingan itu disepakati untuk: (1) membebaskan semua tawanan politik, (2) sekembali Soekarno dan Hatta ke Yogyakarta akan memerintahkan gencatan senjata, (3) Belanda akan menerima pihak RI pada suatu Konferensi Meja Bundar, dan (4) mereka berjanji tidak akan mendirikan negara-negara baru untuk kelak menjadi anggota negara federal. Kesepakatan itu menjadi syarat untuk melanjutkan perundingan yang menjadi tuntutan dunia internasional.

Perundingan selanjutnya berlangsung di Den Haag ('s Gravenhage, The Hague) pada 23 Agustus - 2 November 1949. Dalam perundingan itu delegasi RI terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Dr. Soepomo, Mr. Moh Roem, dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Delegasi dari BFO adalah Sultan Abdul Hamid II dan Ida Anak Agung Gde Agung, dan dari pihak pemerintah Belanda adalah: Mr. Marseveen, Dr. D. Scrikkel, H.J. van Rooyen, dan Mr. M. Blaam. Konferensi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain; (1) negara-negara di Indonesia membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS), (2) antara negeri Belanda dan RIS dibentuk satu uni yang longgar dan disepakati ratu Belanda menjadi pemimpin simbolis Uni Belanda - RIS, (3) Soekarno menjadi Presiden RIS dan Hatta menjadi Perdana Menteri merangkap Wakil Presiden, (4) RIS memberikan jaminan bagi investasi Belanda di Indonesia, (5) Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Papua Barat, (6) RIS memikul tanggung-jawab hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 Milyar gulden, dan (7) pemerintah Belanda akan memberikan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan RIS.<sup>28</sup>

Pemerintah Belanda memenuhi janjinya dengan menyelenggarakan upacara pengakuan kedaulatan di Den Haag dan di Jakarta pada 27

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 350.

Desember 1949. Upacara pengakuan kedaulatan di Den Haag diserahkan langsung oleh Ratu Belanda, Juliana van Oranye-Nassau kepada Drs. Moh. Hatta, sementara di Jakarta dari A.H.J. Lowijnk kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Upacara penyerahan kedaulatan itu disambut oleh pemerintah di Kolonodale sebagai suatu kemenangan kelompok federal. Oleh karena itu Kontrolir M.D. Thijs yang menggantikan Kontrolir Drs. van Strien menyelenggarakan pesta kemenangan yang meriah. Ia memerintahkan pengibaran bendera merah-putih dan mengundang para pejabat pemerintah lokal, pemuka masyarakat, dan rakyat Mori dan Bungku untuk merayakan pesta kemerdekaan dari 27 Desember 30 Desember 1949, di kota Kolonodale. Pesta ini disambut juga oleh kelompok republiken, sebagai keberhasilan awal untuk melapangkan langkah mencapai cita-cita perjuangan mereka membentuk negara kesatuan RI.

### Republiken Versus Federalis

Program pemerintah Belanda untuk mewujudkan negara RIS mendorong aparatnya yang ditempatkan sebagai pejabat pelaksana pemerintahan pada daerah-daerah di wilayah NIT terus bergiat agar tokoh-tokoh federalis yang mendapat tempat dalam pengambilan keputusan politik, walaupun dalam parlemen terdapat kelompok republiken atau uniteralis. Hal itu juga terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Swapraja Mori. Sejak awal penempatan pejabat untuk Onderafdeling Kolonodale, pihak pemerintah bergiat menyingkirkan kelompok rakyat yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Diantara kelompok ini, terdapat keluarga kerajaan (putera-putera raja Mori) antara lain: Besau Marunduh dan Sungka Marunduh. Gerakan kelompok republiken ini mendorong pihak NICA berusaha secara persuasif memikat mereka untuk mendukung

pemerintah dengan jaminan kelak akan diberikan kemerdekaan dalam bentuk negara federal. Jaminan kemerdekaan itu sesungguhnya bukan faktor yang meredakan gerakan mereka. Persoalan sesungguhnya terletak pada pertimbangan potensi yang dimiliki untuk melakukan aksi pengusiran NICA dari wilayah Kerajaan Mori. Selain itu disadari bahwa penduduk Mori ketika itu belum menyadari dan memahami arti proklamasi kemerdekaan itu, karena belum tersentuh dan mengenal organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pilihan yang dapat dilaksanakan adalah bergiat menyadarkan penduduk arti dari perjuangan bangsa yang bermuara pada proklamasi kemerdekaan itu.

Gerakan kelompok republiken ini dipandang oleh pemerintah NICA sebagai suatu ancaman terhadap gagasan pembentukan negara federal yang sementara dicanangkan. Oleh karena itu, sementara para tokoh telah diundang ke Denpasar, kontrolir mengambil tindakan menangkap dan mengasingkannya, diantaranya Besau Marunduh. Tindakan itu yang mendorong organisasi SDS mengambil kebijakan mendorong tokoh-tokoh republiken ke luar dari Mori untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi bagi mereka yang memilih prinsip non-kooperatif, sementara bagi mereka yang memilih sikap kooperatif dapat terus bergiat dalam pemerintahan.

Menjelang akhir tahun 1946, hasil Konferensi Denpasar, terbentuk Negara Indonesia Timur yang wilayahnya meliputi bekas wilayah Provinsi Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*). Negara boneka NICA ini, meskipun masih mengikutsertakan sejumlah bekas pejabat Belanda dalam organisasi pemerintahan, namun telah melapangkan dan mengikutsertakan semua aliran yang berkembang dalam pemerintahan. Kebijakan itu melapangkan aliran republiken (uniteral) untuk terus ber-

juang secara terbuka. Itulah sebabnya J. K. Tumakaka, yang mengikuti pendidikan di Manado, melibatkan diri pada organisasi politik yang berhaluan republiken yaitu BNI, dan setelah kembali di Kolonodale mendirikan cabang organisasi politik itu.

Pendirian partai politik itu dimungkinkan karena ketika itu NIT menganut dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan membuka peluang bagi aliran politik yang berkembang untuk mendirikan organisasi politik. Dengan demikian partai-partai politik dapat berlomba untuk memenangkan perolehan kursi di parlemen NIT (pusat), atau dapat masuk dalam Badan Perwakilan Rakyat (BPR - sekarang dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD) di setiap daerah otonom. Dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (umumnya disebut *Indische Staatsblad*, disingkat IS) No. 27 tahun 1946 yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan pada awal pembentukan NIT mengisyaratkan kepada daerah swapraja secara mandiri maupun beberapa swapraja dapat bekerja sama untuk mengadakan: (1) Dewan Pembuat Undang-undang (*Wet Gevenderaad*) dan (2) Dewan yang turut membuat Undang-Undang (*Mede Wet Bevenderaad*).<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki daerah otonom memiliki lembaga legislatif. Gagasan pembentukan dewan legislatif yang kelak menampung aliran politik yang berkem-

bang itu mengisyaratkan pada pelaksana pemerintah Kolonodale bahwa wakil dari Mori yang kelak tampil dan duduk dalam lembaga itu adalah ketua dari satu-satunya partai politik di daerah itu, yaitu ketua BNI yang dasar aliran politiknya adalah uniteralis.

Sehubungan dengan perkembangan politik itulah, dan untuk melapangkan kelompok federalis menjadi anggota dewan legislatif dan menyingkirkan kelompok uniteralis, maka dicanangkan program pendidikan bagi tokoh-tokoh uniteralis agar keluar dari Sulawesi Tengah, termasuk J. K. Tumakaka. Strategik politik itu bukan tidak disadari sehingga tawaran untuk mengikuti pendidikan di Makassar diterima dengan senang hati. Penerimaan tawaran itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa di Makassar kelak dapat menjalin hubungan dengan kelompok uniteralis yang berkecimpung dalam parlemen NIT.

Setelah pemerintah berhasil mengeluarkan kelompok uniteralis dari Sulawesi Tengah, maka dicanangkan muktamar raja-raja Sulawesi Tengah pada 27-30 November 1948 di Parigi. Muktamar itu dihadiri oleh semua raja-raja (kepala pemerintahan swapraja), dan yang tercatat sebagai Raja Mori adalah Mainda Rumampuo.<sup>30</sup> Pada tahun itu Rumampuo adalah kepala distrik Tomata, salah satu distrik dalam Swapraja Mori. Yang menjadi raja adalah Owolu Marunduh, dan yang menjadi Wakil Raja adalah Pirau Marunduh (1946-

---

<sup>29</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *op.cit.*, hal. 297. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki daerah memiliki lembaga legislatif. Gagasan pembentukan dewan legislatif yang kelak menampung aliran politik yang berkembang itu mengisyaratkan pada pelaksana pemerintah Kolonodale bahwa wakil dari Mori yang kelak tampil duduk dalam badan legislatif adalah ketua dari satu-satunya partai politik di daerah itu adalah Ketua BNI, yang dasar aliran politiknya adalah uniteralis.

<sup>30</sup> Hasan, dkk., *op.cit.*, hal 274. Raja-raja yang mengikuti Muktamar itu adalah: W.L. Talasa (Raja Poso), Muslaini (Raja Tojo), Lasahido (Raja Unana), Abdul Rabie (Raja Bungku), Lamakampali (Raja Tawaeli), Tombolotutu (Raja Moutong), Tagunu (Raja Parigi), Rumampuo (Raja Mori), Lamakarate (Raja Sigidolo), S.A. Amir (Raja Banggai), Tjatjo Idjazah (Raja Palu), S. Kabo (Raja Lore), L. Lamarauna (Raja Banawa), W. Djiloi (Raja Kulawi), dan R.M. Pusadan (Raja Tolitoli).

1950), tokoh yang menjadi wakil kerajaan mengikuti konferensi Denpasar. Keikutsertaan Rumampuo pada muktamar itu merupakan strategik dari Kepala Pemerintahan Negeri (KPN-kontrolir), M.D. Thijs untuk menyisihkan kelompok yang beraliran uniteralis, walaupun tokoh-tokoh republiken itu memilih bersikap bekerjasama dengan pemerintah.

Muktamar para raja-raja Sulawesi Tengah berhasil membentuk wadah yang dikenal dengan sebutan "Komisi Swapraja" (*Zelfsbestuurskommisie*). Yang terpilih menjadi ketua wadah itu adalah R.M. Pusadan. Pertemuan itu berhasil menyusun Undang-Undang melaksanakan pemerintahan otonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan daerah, yang kemudian diajukan kepada Residen Manado untuk mendapatkan pengabsahannya (pengabsahannya tertanggal 25 Januari 1949, No. R.21/1/4).<sup>31</sup> Hal itu berkenan dengan menetapkan swapraja-swapraja di Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah otonom dari penetapan 13 daerah otonom, yang berdasarkan IS No. 143 tahun 1946 disebut Federatie Landschap-Landschap Sulawesi Tengah yang kemudian dalam Undang-Undang NIT, No. 44 tahun 1950, disebut Daerah Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan pengaturan pemerintahan otonomi itu, maka pada 31 Maret 1949, diselenggarakan pemilihan wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga legislatif daerah. J. K. Tumakaka, ketua BNI, satu-satunya tokoh partai politik di Mori yang berhak maju untuk menduduki kursi legislatif, sedang mengikuti pendidikan di Makassar. Kondisi ini melapangkan KPN M.D. Thijs mengajukan Mainda

Rumampuo seorang tokoh yang dipandang beraliran federalis yang selama ini bekerjasama secara erat dengan M.D. Thijs untuk tampil menjadi wakil rakyat Mori duduk dalam lembaga terhormat itu.

Keberhasilan mengorbitkan tokoh aliran federalis menjadi wakil rakyat Mori duduk dalam lembaga legislatif itu selanjutnya dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan kelompok federalis dalam pemerintahan. Hal itu tampak ketika pemerintah Swapraja Mori menghendaki pergantian kepala distrik. Sehubungan dengan rencana itu, Wakil Raja Pirau Marunduh bersama KPN Kolonedale, M.D. Thijs, berangkat ke Tinompo untuk menyampaikan kepada Makita Marunduh bahwa ia akan diberhentikan sebagai kepala distrik dan digantikan oleh Matainda Tumakaka. Untuk maksud itu, Raja Mori Owolu Marunduh mengirim surat permohonan tertanggal 7 Juli 1949 kepada Menteri Kesehatan NIT, d.p. Tabib Keresidenan Manado agar bersedia memberhentikan Matainda Tumakaka sebagai mantri cacar Kolonodale agar dapat diangkat menjadi kepala distrik (lihat lampiran).

Keikutsertaan M.D. Thijs sesungguhnya mengabsahkan penunjukan raja bagi pergantian kepala distrik, karena pasal 1 UU No. 22 tahun 1948 yang menetapkan bahwa:

- (1) Daerah Negara RI tersusun dalam tiga tingkatan ialah provinsi, kabupaten (kota besar dan desa (kota kecil), negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 274. Hasan, dkk. Mengutip dari: "Buku Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso tentang Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan pada Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Poso ke-49, tanggal 2 Oktober 1997", yang menyatakan bahwa muktamar itu berhasil menetapkan

Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah, suatu hal yang bukan kewenangan dari suatu daerah otonom dalam negara. Sesungguhnya berdasarkan IS 1946, hanya memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan tentang lembaga legislatif daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan UU pembentukan termasuk dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat dengan provinsi, kabupaten, atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(3) Nama, batas, tingkatan hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bahkan dalam IS No. 143 tahun 1946 yang mengatur wilayah Provinsi Timur Besar dan menjadi rujukan kemudian bagi UU NIT No. 44 tahun 1950, juga menetapkan wilayah NIT terbagi atas 13 Daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan budaya politik lokal. Namun demikian, ketika Mainda Rumampuo menggagas surat penyampaian kepada Raja Mori, dengan tembusan kepada KPN setempat, untuk menetapkan pengganti kepala distrik melalui pemilihan calon (gagasan demokrasi), hal itu tidak ditentang oleh M.D. Thijs bahkan mendukungnya.<sup>32</sup> Penunjukan langsung dipandang sebagai tindakan diktator dan bukan demokrasi. Sementara ketika itu belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum oleh rakyat. Undang-undang yang ada melampangkan pelaksanaan sesuai dengan budaya politik lokal dengan mengakui hak otonomi kerajaan.

Tidak dapat disangkal bahwa gagasan itu dicanangkan untuk menggeser kelompok aliran politik uniteralis, dan menggantikan dengan tokoh-tokoh pendukung aliran federalis yang digagas oleh aparat NICA yang diperbantukan

dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah. Oleh karena itulah undang-undang yang mengatur otonomi daerah swapraja tidak disosialisasikan kepada aparat pemerintahan swapraja. Akibatnya gagasan yang tidak berlandas pada aturan hukum, yang menggunakan alasan suara rakyat, tidak dapat direspon dengan ketetapan dalam undang-undang otonomi, dan tetap melampangkan pelaksanaan suara rakyat yang tidak memiliki dasar hukum.

Keberhasilan dalam menggagas sistem pemilihan kepala distrik itu, kemudian dimanfaatkan oleh M.D. Thijs untuk kembali menggagas pemilihan calon pengganti Raja Owolu Marunduh. Menurut budaya politik Kerajaan Mori yang lazim berlaku, seorang raja, baru dapat dicari penggantinya apabila sang raja telah wafat. Pada masa perkabungan itu, pejabat *karua* bekerjasama dengan pejabat *bonto* berwenang untuk menetapkan pengganti raja **dengan tetap memperhatikan permintaan raja menyangkut calon yang telah dipersiapkan**. Setelah ada kesepakatan tentang



Pirau Marunduh, Putra Mahkota Kerajaan Mori. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-D Propinsi Sulawesi Tengah 1971-1976 di Palu. Koleksi pribadi: Ny. Tirta Mudrika-Marunduh, Bandung.

<sup>32</sup> Baca: Lampiran No. 2: Surat yang dirancang oleh Rumampuo yang ditandatangani oleh kepala-kepala kampung, dan Lampiran No. 3: Surat Tanggapan dari

Kelompok Marunduh dan Tumakaka, yang mempersoalkan surat itu kemudian ketika Rumampuo telah menjadi pengganti raja.

pengganti raja, barulah jenazah sang raja dimakamkan. Gagasan yang dicanangkan oleh M.D. Thijs justru bertolak belakang dan sama sekali menyalahi aturan budaya politik lokal, karena dengan alasan raja yang uzur dan tidak mampu lagi mengemban tugas dengan lancar, maka perlu segera dicarikan penggantinya. Meskipun dalam kenyataannya raja telah mengembangkan tugas perwaliannya kepada puteranya, Pirau Marunduh, yang telah melaksanakan tugas untuk dan atas nama raja, dalam kedudukannya sebagai wakil raja. Penetapan perwalian itu, dipandang dari sisi budaya politik lokal, telah memiliki pengabsahan secara tradisional, atau dengan meminjam istilah Max Weber "**telah memiliki legitimasi tradisional**" sehingga Pirau Marunduh yang harus menduduki takhta kerajaan apabila raja telah berhalangan tetap (wafat), atau dengan kata lain, secara tradisional ia telah ditetapkan menjadi **Putera Mahkota**. Bahkan penyerahan tugas perwalian (legitimasi tradisional) itu kemudian mendapat persetujuan pemerintah sehingga Residen Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 1/3/21 tertanggal 31 Maret 1949 yang menetapkan Pirau Marunduh, disamping tugas selaku Asisten Pemerintah (*Bestuur Asistent*) ditugaskan menjalankan pekerjaan Raja Mori, yang dinyatakan berlaku terhitung tanggal 1 April 1949.

M.D. Thijs secara gigih merancang skenario politik untuk memperkuat kedudukan kelompok federalis di Mori tentu berkaitan dengan perkembangan politik di Indonesia, hasil Konferensi Meja Bundar (*Ronde Tafel Conferentie*). Konferensi ini berhasil mewujudkan gagasan federal dengan terbentuknya negara RIS, namun dibalik itu pemegang kekuasaan politik berada dalam tangan kelompok uniteralis. Presiden RIS adalah Soekarno (Presiden RI), perdana menteri merangkap

wakil presiden RIS adalah Moh. Hatta (Wakil Presiden RI). Itu berarti RIS berada dalam genggaman kekuasaan kelompok uniteralis. Kondisi itu yang mendorong personil NICA yang diperbantukan dalam pemerintahan negara bagian-negara bagian terus berusaha memperkuat kedudukan kelompok federalis agar dapat menghambat keinginan kelompok uniteralis membubarkan RIS dan mempertahankan negara proklamasi RI. Oleh karena itu dirancangkan agar swapraja Mori juga berada dalam kekuasaan kelompok federalis.

Sehubungan dengan itu M.D. Thijs merencanakan akan menyelenggarakan acara pemilihan calon pengganti Raja Mori di Tinompo. Gagasan itu mendapat reaksi protes dari Raja Mori dan juga Pirau Marunduh yang ketika itu telah menerima surat keputusan Residen Manado yang menetapkannya menjadi pelaksana tugas Raja Mori. Pirau Marunduh menolak gagasan itu karena ia telah memperoleh legitimasi tradisional berdasarkan budaya politik lokal untuk kelak menggantikan ayahnya, dan bahkan telah memperoleh pengakuan berdasarkan Surat Keputusan Residen Manado No. 1/3/21, tertanggal 31 Maret 1949 untuk melaksanakan tugas sebagai Raja Mori. Meskipun demikian reaksi protes itu mendapat tanggapan penolakan dari Kontrolir M.D. Thijs dengan alasan sejumlah keluarga dan kerabat kerajaan memandang berhak juga menjadi calon pengganti raja sehingga menghendaki diadakannya pemilihan langsung. Beberapa keluarga istana juga berkeinginan menjadi pengganti raja, satu diantaranya Maranua Lawolio yang memperisterikan Wehadima Marunduh, puteri dari Raja Owolu Marunduh yang adalah kakak perempuan dari Pirau Marunduh.

Alasan-alasan yang diajukan oleh M.D. Thijs itu, menyebabkan Pirau Marunduh tidak ingin berkeras pada pendiriannya. Tambahan



pula kondisi kesehatan ayahnya, Raja Owolu Marunduh ketika itu sedang sakit keras sehingga membutuhkan ketenangan. Melihat kondisi pada saat itu yang dapat menimbulkan perpecahan diantara kerabat kerajaan serta untuk tidak mengecewakan ayahnya, ia dengan terpaksa tampil menjadi salah satu calon dalam pemilihan calon raja. Pencalonan dirinya itu sesungguhnya sekedar ingin memenuhi keinginan ayahnya yang menghendaki ia menjadi penggantinya kelak.

Pada pemilihan calon pengganti Raja Mori yang dilaksanakan pada 20 Pebruari 1950 di Tinompo, terdaftar empat orang calon, yaitu: (1) Pirau Marunduh sebagai calon yang diajukan oleh Raja Mori, (2) Maranua Lawolio sebagai calon dari golongan *mokole*, (3) Sungka Marunduh sebagai calon dari golongan *bonto*, dan (4) Mainda Rumampuo sebagai calon dari golongan *karua*.<sup>33</sup> Yang berhak ikut dalam pemilihan ini adalah para kepala kampung. Apabila dicermati calon tertentu yang diusung dalam pemilihan ini tampak terdapat rekayasa politik yang kental. Sungka Marunduh, keluarga istana dari strata *mokole* namun diusung oleh golongan *bonto*, sementara Maranua Lawolio, seorang tokoh federalis (sealiran dengan Mainda Rumampuo) diusung oleh golongan *mokole*. Pada sisi lain, Pirau Marunduh yang menjadi perwalian raja dan dicalonkan oleh raja adalah seorang keluarga istana dari strata *mokole* namun tidak menjadi calon yang diusung oleh golongan dari stratanya. Hal ini memberikan isyarat adanya keinginan untuk membagi suara kepala-kepala kampung yang menghendaki pengganti raja dari strata *mokole* ataupun jika mereka sepakat pasti suara mereka diperuntukkan bagi calon yang diusung oleh golongan strata itu. Jika suara mereka terbagi, maka dipastikan jumlah

suara untuk calon yang diusung oleh kelompok *karua* yang akan menang. Selain itu tampilnya Mainda Rumampuo sebagai calon pengganti raja yang diusung oleh kelompok *karua* itu dapat menunjukkan bahwa M.D. Thijs sebenarnya memahami budaya politik lokal dan menghendaki Mainda Rumampuo yang kelak menjadi calon pengganti raja. Tatanan budaya politik lokal menempatkan *karua* sebagai pejabat yang berwenang memilih dan mengangkat pengganti raja. Hal ini secara kultural pasti berpengaruh terhadap para kepala kampung yang kelak memberikan suara dalam pemilihan. Mereka pasti berpandangan bahwa calon yang dipilih *karua* itu yang sesuai dengan budaya politik Mori.

Skenario jahat dan licik yang digagas oleh M.D. Thijs itu ternyata berhasil. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa Mainda Rumampuo seorang tokoh federalis yang mendapat suara terbanyak. Hal ini telah diperkirakan sebelumnya, karena ia tampil sebagai calon yang diusung oleh pejabat yang berwenang memilih dan mengangkat raja, meskipun dalam praktek pelaksanaan setelah ada pejabat *bonto*, ia juga ikut terlibat bersama *karua* untuk menetapkan calon pengganti raja. Berdasarkan hasil pemilihan calon pengganti Raja Owolu Marunduh itu, maka Mainda Rumampuo terpilih menjadi pengganti Raja Owolu Marunduh.

Disadari bahwa budaya politik Mori mengisyaratkan pergantian raja baru dapat dilaksanakan apabila raja telah berhalangan tetap (wafat). Oleh karena itu, meskipun Mainda Rumampuo telah terpilih menjadi pengganti Raja Mori, namun M.D. Thijs tidak berkeinginan untuk menyelenggarakan upacara serahterima jabatan dan pelantikan raja baru. Ia memperkirakan bahwa jika serahterima dilak-

---

<sup>33</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal 177.

sanakan pasti mendapat reaksi penolakan dari rakyat, karena dipandang telah memperlakukan raja mereka. Selain itu tindakan itu juga dapat dipandang membatalkan surat keputusan atasannya, yaitu Residen Manado yang telah menetapkan pengangkatan Pirau Marunduh untuk menjalankan pekerjaan Raja Mori, karena pemilihan pengganti raja telah dilaksanakan M.D. Thijs tanpa persetujuan dari otoritas pemerintah yang lebih tinggi di Manado. Oleh karena itu pelaksana tugas raja tetap dilaksanakan oleh Pirau Marunduh, sementara Mainda Rumampuo tetap melaksanakan tugas sebagai kepala distrik Tomata.

Sementara para aparat NICA bergiat memperkuat kedudukan golongan federalis di daerah masing-masing, berbagai organisasi politik dan sosial yang beraliran uniteralis di pusat pemerintahan NIT di Makassar bergiat untuk dapat membubarkan gagasan negara federal yang direalisasikan oleh pemerintah Belanda. Mereka melakukan konferensi di Polobangkeng pada tanggal 5-7 Pebruari 1950. Hasil dari konferensi itu adalah membentuk wadah bersama yang dinamakan Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (Biro PPRI) dan menghasilkan resolusi yang berisikan tuntutan: (1) Bubarkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Yogyakarta; (2) Datangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga keamanan di Sulawesi Selatan.<sup>34</sup> Berdasarkan kesepakatan itu, maka pada tanggal 17 Maret 1950 dibentuk panitia demonstrasi, yang dipimpin langsung oleh Yusuf Bauty, melaksanakan demonstrasi dengan jumlah demonstran berkisar 20.000 orang. Mereka berjalan menuju kantor Kepresidenan NIT, kemudian A.N. Hajarawati tampil membacakan Resolusi Biro

PPRI dan selanjutnya menyerahkan naskah resolusi itu kepada Akting Presiden NIT, Husein Puang Limboro.

Tuntutan itu pada satu sisi mendesak aparat pemerintah Belanda melaksanakan dengan segera pengalihan anggota KNIL yang berkebangsaan Indonesia yang ingin menjadi warga-negara Indonesia untuk dilebur dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Akhirnya berlangsung upacara pengalihan di Makassar pada 30 Maret 1950, anggota militer bekas KNIL itu berada dalam pimpinan Kapten Andi Azis. Pelantikan anggota bekas militer dan kepolisian di Makassar menjadi APRIS, secara resmi merubah seluruh aparat militer dan kepolisian di daerah-daerah dalam wilayah NIT mengemban predikat tentara dan kepolisian APRIS. Pada pihak lain, tuntutan Biro PPRI juga mendesak pihak pemerintah RI mengirim pasukan TNI, batalyon Worang dari Brigade XVIII/ Jawa Timur ke Makassar.

Ketika pasukan TNI (Batalyon Worang) akan mendarat, Kapten Andi Azis dan pasukannya melakukan tindakan melucuti senjata personil militer Indonesia yang berada di Makassar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 April 1950, sehingga disebut "Peristiwa Rabu Pagi", atau sering juga disebut "Peristiwa Andi Azis". Tindakan militer itu mendorong pemerintah RIS menyatakan keadaan darurat perang untuk wilayah Makassar, dan memerintahkan Kapten Andi Azis untuk segera datang ke Jakarta dan menyerahkan diri.

Pertikaian antara APRIS dan TNI itu mendorong sejumlah daerah otonom di wilayah NIT tampil memproklamasikan daerahnya keluar dari NIT dan menggabungkan daerahnya menjadi bagian dari RI dengan kedudukannya sebagai satu provinsi. Pada 26 April 1950, Andi

<sup>34</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *op.cit.*, hal 304. Dewan itu dipimpin oleh Yusuf Bauty, Makaraeng Daeng Manjarunyi, Muh.

Riri Amin Daud, Abd. Rahman Tamma, R. Soekarno, dan Sunari.

Idjo Karaeng Lololang (wakil ketua Hadat Tinggi Sulawesi Selatan) didampingi oleh Andi Burhanuddin (Ketua Dewan Sulawesi Selatan) memproklamasikan Sulawesi Selatan menjadi satu bagian provinsi dari RI (*Noodbewind van de Provincie Zuid-Celebes*). Hal yang sama juga dilakukan pula oleh Adjuba Wartabone untuk daerah Sulawesi Utara.<sup>35</sup> Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa aliran politik uniteralis menolak sepenuhnya pembentukan negara federal. Selain itu para pemuda pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat untuk mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan. Untuk maksud itulah dibentuk satu wadah yang disebut Gerilya Kesatuan Sulawesi Selatan (GKSS).

Pergolakan yang terjadi itu mendorong pemerintah Belanda mempercepat penarikan aparat pemerintah dan militernya, termasuk di Kolonodale. Pada tanggal 2 Mei 1950, perahu motor Djombang tiba di Kolonodale dengan tujuan mengangkut KPN M.D. Thijs dan keluarganya ke Manado, dan selanjutnya akan kembali ke negeri Belanda. Oleh karena itu dilaksanakan serahterima jabatan KPN dari M.D. Thijs kepada Abdul Rabie (Raja Bungku). Yang menjadi wakil KPN adalah Pirau Marunduh. Setelah serah terima jabatan, pada tanggal 14 Mei, M.D. Thijs bersama keluarga berangkat meninggalkan Kolonodale.

Pergolakan yang terjadi di Makassar itu juga bergema hingga ke Sulawesi Tengah. Hal itu mendorong Dewan Hadat Sulawesi Tengah untuk merencanakan pertemuan para raja di daerahnya untuk menanggapi pergolakan politik yang sedang berlangsung di pusat pemerintahan NIT. Sebelum rencana itu dilangsungkan, datang Andi Mappesangka, delegasi GKSS dari

Malili (Luwu) di Kolonodale pada 7 Mei 1950. Delegasi itu tidak melakukan pertemuan dengan kepala pemerintahan setempat, tetapi berusaha menghubungi anggota pemuda organisasi Barisan Kesatuan Indonesia (BKI). Organisasi ini didirikan sebagai respon atas pergolakan kaum uniteralis untuk membubarkan NIT dan RIS. Wadah ini didirikan pada tanggal 6 April 1950 dan dipimpin oleh Sungka Marunduh. Pada pertemuan itu, anggota BKI yang hadir, antara lain: Nurland, Rivai, Lubron Marunduh, Herman, dan Paimin. Delegasi GKSS menyatakan bahwa perjuangan ke arah pembentukan kembali RI sementara terus bergulir, karena itu diharapkan kepada pemuda pro republik bergiat melucuti senjata polisi RIS dan mengambilalih tugas menjaga keamanan. Bila tidak mampu, kelompok GKSS Malili akan mengirimkan bantuan untuk melaksanakan tugas itu.

Persoalan yang dibicarakan itu selanjutnya diusung bersama untuk disampaikan kepada Maranua Lawolio, pejabat wakil Raja Mori. Para pemuda itu tidak menyadari bahwa Maranua Lawolio adalah kader federalis dari M.D. Thijs. Pada pertemuan itu hadir pula M. Masoko dan Kaurelusan, masing-masing secara berurutan adalah kepala polisi dan wakil kepala polisi Kolonodale. Pertemuan itu menetapkan dua hal perintah penting: (1) Rivai dan Nurland ditugaskan untuk menemui pemuda GKSS dari Malili dan menyampaikan pesan agar mereka tidak datang ke Kolonodale karena para pemuda Mori menyanggupi menjaga keamanan; (2) Lubron Marunduh dan Herman ditugaskan untuk menjaga ketenteraman di Tinompo.<sup>36</sup> Tinompo mendapat perhatian karena menurut rencana pemuda GKSS akan memasuki Kolonodale melalui Tinompo.

<sup>35</sup> Harun Kadir, dkk, *op.cit.*, hal. 366-367.

<sup>36</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal 179.

Ketetapan ini menunjukkan bahwa Maranua Lawolio, dan kawan-kawan tidak menghendaki kelompok GKSS datang ke Kolonodale. Sementara para pemuda BKI menghendaki kerjasama dengan GKSS untuk menyingkirkan kelompok federalis. Namun demikian mereka tidak berusaha untuk membicarakan rencana itu dengan Abd. Rabie (KPN) atau Pirau Marunduh, tokoh republiken, yang pada waktu itu menjadi pejabat pemerintahan. Oleh karena itu Andi Mapesangka dan Said Abu Bakar, setelah pertemuan itu, langsung berangkat ke Tinompo. Demikian juga para pemuda yang telah diembankan tugas itu tampak bergegas melaksanakan tugas masing-masing, walaupun sesungguhnya keputusan pertemuan itu bertentangan dengan keinginan mereka.

Maranua Lawolio, melalui kepala kepolisian Kolonodale, memohon bantuan kepolisian dari Poso untuk ikut membantu menghalangi rencana pemuda GKSS, karena menurut rencana ia akan berangkat ke Donggala untuk mengikuti pertemuan para raja-raja se Sulawesi Tengah atas nama Wakil Raja Mori. Permintaan bantuan pasukan polisi Poso itu tanpa sepengetahuan pimpinan pemerintahan setempat karena mereka adalah tokoh republiken. Pada tanggal 12 Mei 1950, Maranua Lawolio bersama Abd. Rabie berangkat ke Donggala untuk menghadiri pertemuan raja-raja se Sulawesi Tengah. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan persoalan politik yang sedang menghangat, dengan tampilnya golongan uniteralis berjuang membubarkan NIT dan RIS dan memperjuangkan kembali negara RI hasil proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengikuti jejak daerah Sulawesi Selatan dan daerah Manado, dengan memproklamasikan daerahnya keluar dari wilayah NIT dan menjadi bagian dari wilayah RI. Menurut A.K. Tumakaka, pernyataan sikap para raja-raja Sulawesi

Tengah itu terdengar juga di Mori, sehingga berita itu disambut dengan gembira.

Berita yang menggembirakan itu mendorong Rivai dan Nurland yang menemui pemuda GKSS Malili itu bahkan mengantar mereka masuk ke Tompira pada 16 Mei 1950. Kehadiran mereka itu mendorong pihak kepolisian melakukan tindakan penangkapan terhadap Rivai, Nurland, dan para pemuda GKSS yang berada dalam komando Ranggo pada siang hari. Penangkapan itu dilaksanakan dengan alasan Rivai dan Nurland melanggar keputusan rapat untuk melarang pemuda GKSS masuk ke Mori. Itulah sebabnya pemuda GKSS juga ditangkap. Mereka kemudian diangkut menuju ke Kolonodale.

Sementara rombongan GKSS yang pertama ini dalam perjalanannya ke pusat pemerintahan setempat, datang lagi rombongan pemuda GKSS yang kedua, yang dipimpin oleh Andi Pangirisang. Rombongan itu disambut oleh Andi Mapesangka yang telah menunggu di Tompira. Bertepatan dengan keberadaan mereka, tiba juga pasukan polisi dari Poso yang dipimpin oleh Talumikir. Ketika pihak kepolisian mengetahui bahwa mereka itu adalah rombongan pemuda GKSS, komandan polisi langsung meneriakkan perintah "menyerah". Perintah itu ternyata dijawab dengan melepaskan tembakan ke arah pasukan kepolisian itu, sebagai reaksi perlawanan. Pihak kepolisian akhirnya melancarkan serangan balasan sehingga pemuda GKSS menjadi kocar-kacir. Mereka tidak dapat membendung serangan itu karena hanya memiliki satu pucuk senapan saja, sementara yang lainnya hanya membawa senapan dan granat tiruan yang terbuat dari kayu, yang dipakai sekedar untuk menakut-nakuti belaka. Serangan pasukan kepolisian Poso itu menewaskan 8 orang pemuda Malili, diantaranya adalah Andi Pangirisang dan Andi Mapesangka, sementara beberapa diantara

mereka berhasil ditangkap dan beberapa lagi berhasil meloloskan diri. Mereka yang ditawan dan yang meninggal diangkut ke Kolonodale. Jenazah mereka yang meninggal diserahkan kepada pihak pengurus rumah sakit Kolonodale untuk dimandikan dan dimakamkan.

Keesokan harinya, 17 Mei 1950, terlihat satu kapal api sedang menuju ke Kolonodale. Kenyataan itu mencemaskan pihak kepolisian dan juga pejabat wakil KPN, mengingat kemarin telah terbunuh 8 orang pemuda GKSS. Terpetik dugaan, kapal itu mengangkut pasukan untuk menduduki Kolonodale dan menuntut pembalasan atas peristiwa Tompira itu. Itulah sebabnya anggota kepolisian Kolonodale mengungsi bersama keluarganya ke Poso. Dr. Kruyt dan Pendeta Van Welie mengungsikan keluarganya masing-masing ke Rumah Sakit Kolonodale. Sementara pegawai sipil dan militer lainnya mengungsi ke kampung Bahontula, yang terletak tidak jauh dari Kolonodale. Kondisi itu mendorong Pirau Marunduh, meskipun ayahnya (Raja Mori) sedang sakit, berangkat ke Poso untuk meminta bantuan pasukan keamanan.

Ketika kapal itu merapat di dermaga, ternyata yang turun adalah Soleman Amir, anggota Parlemen NIT (wakil rakyat dari Sulawesi Tengah) dan Monoarfa, salah seorang tokoh GKSS. Mereka datang ke Kolonodale karena mengetahui bahwa tokoh-tokoh yang memegang kendali politik di daerah ini adalah mereka yang beraliran uniteralis. Akan tetapi mereka tidak dapat bertemu pejabat pemerintahan setempat karena Abdul Rabie masih berada di Donggala, sementara Pirau Marunduh masih berada di Poso, sehingga hanya dapat berbincang dengan aparat pemerintahan yang ada saja. Dari perbincangan itu diketahui bahwa pemuda GKSS Malili telah memasuki daerah

ini, namun telah berakibat terjadinya peristiwa Tompira dengan gugurnya 8 orang anggotanya. Pada kesempatan itu, Soleman Amir memberitahukan bahwa GKSS adalah organisasi yang resmi dari golongan republiken yaitu perjuangan ke arah penyatuan kembali ke pangkuan RI yang sedang berlangsung. Pertemuan antara Presiden NIT, Soekowati, dengan wakil dari Nagara Sumatera Timur, dan wakil presiden RIS, Moh. Hatta, pada 3-5 Mei 1950 telah memberikan titik terang keberhasilan perjuangan kaum uniteralis. Ini jelas dalam pidato radio dari Wakil Presiden RIS pada 9 Mei 1950, yang menyatakan bahwa negara kesatuan harus dibentuk melalui cara-cara yang legal dan bukan melalui tindakan-tindakan yang bersifat sepihak dan dipaksakan.<sup>37</sup>

Keterangan yang diperoleh itu cukup menggembirakan pada satu sisi, menyangkut perjuangan kaum uniteralis, namun pada sisi lain menimbulkan ketakutan karena peristiwa Tompira. Suasana kegetiran yang mencekam itu, tiba-tiba pecah dirundung nestapa. Pada tanggal 18 Mei 1950, terdengar ratap tangis yang memilukan dari istana Kerajaan Mori di Kolonodale, suatu pertanda yang menunjukkan bahwa tokoh kecintaan rakyat Mori, Owolu Marunduh Raja Mori XIII, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir (mangkat). Ia mangkat di tengah kemelut dan kesunyian kota Kolonodale dan disaat rakyatnya berada dalam ketakutan. Walaupun demikian, keluarga, kerabat, dan rakyat Mori yang mendengar berita wafatnya Raja Mori itu berkumpul pada malam harinya untuk menyelenggarakan upacara perkabungan yang dikenal dengan sebutan *montombori*. Keesokan harinya jenazah Raja Mori dimakamkan di Kolonodale.

Pada waktu kematian dan pemakaman Raja Mori, kondisi pemerintahan di Kolonodale be-

---

<sup>37</sup> Harun Kadir, dkk, *op.cit.*, hal. 367.

rada dalam kevakuman. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memegang kendali politik kewedanaan (*onderafdeling*) maupun Swapraja Mori yang berada di tempat. Baru pada tanggal 20 Mei 1950, satu demi satu pejabat pemerintahan kembali ke Kolonodale. Yang pertama tiba adalah Pirau Marunduh, wakil KPN ber-sama dengan anggota kepolisian yang meng-ungsi ke Poso. Baru kemudian menyusul Abdul Rabie (KPN Kolonodale) dan Maranua Lawolio (Wakil Raja Mori) kembali dari Donggala. Meskipun pejabat pemerintah telah kembali namun tampaknya belum memikirkan dan merencanakan pengangkatan pejabat Kepala Pemerintahan Swapraja (KPS) Mori. Hal yang hangat diperbincangkan adalah kondisi politik yang berkembang dengan gelora perjuangan aliran politik uniteralis.

Keinginan untuk mengetahui kelanjutan perjuangan aliran uniteralis itu akhirnya terungkap. Pada tanggal 24 Juli 1950, berlabuh di dermaga Kolonodale sebuah kapal terbang amfibi, yang membawa Akting Presiden NIT, Husein Puang Liboro bersama rombongan. Dalam kunjungan itu diinformasikan pula kepada pejabat pemerintah setempat bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimenangkan oleh patriot-patriot pembela Proklamasi".<sup>38</sup> Pernyataan itu tentunya didasarkan atas hasil yang telah dicapai. Perundingan-perundingan yang dilakukan antar negara bagian telah mencapai kesepakatan resmi menyangkut formasi negara kesatuan, yang ditandatangani pada 19 Mei 1950. Atas dasar itu dibentuklah Panitia Perancang Pembentukan Negara Kesatuan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 20 Juli 1950, naskah rancangan itu telah diserahkan kepada DPR dan Senat RIS untuk dipelajari dan

Kumampu Marunduh, Putra bungsu Owolu Marunduh Raja Mori XIII. Koleksi pribadi: Ny. Hosana Sarungallo-Marunduh, Kolonodale.



disahkan. Kenyataan ini yang mendasari pernyataan Husein Puang Limboro.

Rancangan naskah pembentukan negara kesatuan RI itu ternyata diterima oleh DPR dan Senat RIS dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara negara yang telah diterima dan disahkan itu secara resmi diumumkan sehari sesudahnya yaitu tanggal 15 Agustus 1950. Atas dasar itulah, dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan ke-5, secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berita keberhasilan perjuangan aliran politik uniteralis dengan pembentukan NKRI

<sup>38</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 182. Diantara rombongan Husein Puang Lomboro itu adalah: E. Katopo,

bekas Menteri Pengajaran NIT pada periode Kabinet Ida Anak Agung Gde Agung.

itu disambut gembira oleh pemerintah dan rakyat Kolonodale. Sebagai tanda ungkapan kegembiraan itu, mereka menyelenggarakan pesta peringatan HUT ke-5 dengan sangat meriah dan dipusatkan di pusat pemerintahan, Kolonodale. Upacara peringatan dan kegembiraan itu berlangsung dari tanggal 17 Agustus - 22 Agustus 1950 sebagai wujud kemenangan aliran uniteralis.

### **Swapraja Mori Sesudah Raja Owolu Marunduh**

Upacara perkabungan Raja Owolu Marunduh ini memiliki keunikan, karena tidak berlandaskan pada budaya politik kerajaan yang berlaku. Tidak ada aktivitas para karua yang dibantu oleh para bonto untuk melakukan penetapan calon pengganti raja. Secara kultural, setelah memperoleh kepastian mengenai calon pengganti raja, maka kepada calon tersebut diberikan kewenangan untuk mengenakan atribut kerajaan sebagai simbol prosesi serah terima dan memimpin upacara pengantaran jenazah raja yang wafat ke tempat peristirahatannya yang terakhir sebagai bukti prosesi pengangkatannya menjadi pengganti raja yang wafat. Tatanan budaya politik itu tidak dilaksanakan karena calon pengganti raja telah dilakukan sebelumnya dengan tidak melalui mekanisme budaya politik lokal tetapi melalui mekanisme pemilihan.

Ande Kurami Tumakaka, dalam manuskripnya, menyatakan bahwa Mainda Rumampuo, setelah terpilih menjadi calon pengganti raja, tidak diadakan serah terima jabatan raja dan tidak pula dilaksanakan pesta pelantikannya. Pernyataan itu mengisyaratkan secara tegas bahwa Mainda Rumampuo tidak diakui sebagai Raja Mori sehingga ia tidak hadir pada upacara montombori Raja Owolu Marunduh, walaupun ketika itu ia sedang berada di Tomata, dalam kedudukannya sebagai kepala distrik. Hal yang

sama juga dengan Pirau Marunduh yang dicalonkan oleh ayahnya sebagai penggantinya walaupun tidak mendapat suara terbanyak dalam pemilihan calon pengganti raja, karena sebelum kembali dari Poso, jenazah ayahnya telah dimakamkan. Upacara perkabungan hanya berlangsung singkat, satu hari saja, dan pada tanggal 19 Mei 1950 dimakamkan di Kolonodale, sementara Pirau Marunduh baru kembali ke Kolonodale sehari sesudah pemakaman. Kenyataan itu dapat mengisyaratkan tentang adanya perbedaan pendapat diantara keluarga dan kerabat kerajaan juga para *bonto* dan pemimpin-pemimpin *palili* yang melakukan pesta perkabungan itu, antara lain: (1) mereka tidak dapat menerima calon pengganti raja terpilih dari kelompok *karua*, Mainda Rumampuo, menjadi pengganti raja yang mangkat; (2) bahwa mereka juga belum bersedia menobatkan Pirau Marunduh, calon yang diamanahkan oleh raja yang mangkat dan telah mendapat pengukuhan melalui Surat Keputusan Residen Manado untuk menjalankan pekerjaan Raja Mori menggantikan kedudukan Raja Mori; (3) bahwa proses pemakaman raja yang hanya berselang sehari setelah kematiannya pada 18 Mei 1950 terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa karena tanpa menunggu kepulangan Pirau Marunduh dari tugas di Poso yang secara tradisional seharusnya memimpin upacara prosesi pemakaman tersebut (4) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka ingin mengabsahkan bahwa raja terakhir Kerajaan Mori adalah Owolu Marunduh yang kini telah mangkat.

Pirau Marunduh, setelah pengalihan pemerintahan dari M.D. Thijs kepada Abdul Rabie, memusatkan kegiatannya sebagai wakil dari KPN Kolonodale. Ia tidak melaksanakan kewenangan yang diembankan kepadanya untuk melaksanakan pekerjaan Raja Mori, sesuai dengan surat keputusan dari Residen Manado.

Hal ini tentu berkaitan dengan intrik politik yang terus terjadi di kalangan keluarga dan kerabat kerajaan sehubungan dengan proses pemilihan calon pengganti raja yang digagas oleh M.D. Thijs. Oleh karena itu mereka terlena untuk tidak lagi memikirkan kepentingan keberlanjutan kepemimpinan kerajaan dengan mengambil tindakan mengabsahkan Raja Mori XIII, Owolu Marunduh (1928-1950), sebagai Raja Kerajaan Mori yang terakhir. Sejak kerajaan ini menjadi daerah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda pada 1907, Kerajaan Mori berstatus swapraja (*zelfbestuur landschaap*) dalam struktur pemerintahan kolonial.

Kenyataan itu yang mendasari Abdul Rabie menunjuk Maranua Lawolio, menantu dari almarhum Raja Mori, menjadi wakil raja untuk mengikuti pertemuan anggota Komisi Swa-

praja di Donggala. Oleh karena itu, setelah kembali dari Donggala, Maranua Lawolio yang mengemban tugas pemerintahan swapraja. Pengangkatan Kepala Pemerintahan Swapraja (KPS) Mori, Mainda Rumampuo baru terjadi pada bulan Oktober 1950. Pelantikannya menjadi KPS itu mewajibkannya menyerahkan jabatan sebelumnya sebagai kepala distrik Tomata. Sehubungan dengan itu, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan pejabat pengganti kepala distrik Tomata.

Lowongnya pejabat kepala distrik Tomata itu mendorong Matainda Tumakaka, Sungka Marunduh, Besau Marunduh dan Arie Marunduh mengirim sepucuk surat kepada KPS, Mainda Rumampuo, yang mereka sebut "p.t. wakil raja Mori", pada tanggal 31 Oktober 1950, agar dapat memenuhi permohonan



Saat-saat yang berbahagia. Pernikahan Meneo Tumakaka dengan Pirau Marunduh, 30 Maret 1939 di Tinompo. Koleksi pribadi: Ny. Johana Sumampouw-Marunduh, Surabaya.



mereka untuk menampilkan juga Ginta Benyamin Kamesi menjadi calon kepala distrik Tomata.<sup>39</sup> Calon yang diajukan itu tampak diabaikan oleh Mainda Rumampuo, bahkan dia yang dahulu menghendaki penentuan kepala distrik melalui pemilihan, membatalkan secara sepihak. Itulah sebabnya pada tanggal 3 November 1950, Mainda Rumampuo, (KPS Mori) dan Pirau Marunduh (wakil KPN) berangkat ke Tomata bersama H. Lapasila, kandidat yang dipersiapkan akan ditempatkan di Tomata menjadi kepala distrik. Ketika berada di tempat itu Rumampuo menyatakan bahwa: "pengangkatan kepala distrik adalah "hak raja". Kepala distrik tak dapat dipilih oleh rakyat... rakyat tak dapat mencampuri urusan raja".<sup>40</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mainda Rumampuo adalah seorang yang tidak konsisten berpedoman pada gagasan yang telah diajukan sebelumnya, ketika ia belum menjadi KPS.

Sikap KPS yang tidak demokratis itu mendorong sejumlah tokoh masyarakat mengajukan surat gugatan terhadapnya. Besau Marunduh dan kawan-kawan mengajukan surat gugatan, tertanggal 7 November 1950.<sup>41</sup> Sementara seluruh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ranting Tomata menandatangani surat gugatannya terhadap KPS atas pengangkatan kepala distrik Tomata, tertanggal 15 November 1950.<sup>42</sup> Jika disimak surat-surat gugatan itu tampak jelas sekali bahwa mereka tidak ingin mengakui Mainda Rumampuo, KPS Mori, sebagai pengganti Raja

Owolu Marunduh. Itulah sebabnya mereka hanya menyebutnya sebagai "wakil raja Mori". Selain itu juga mereka menuduh ia (Mainda Rumampuo) telah memeralat rakyat dengan gagasan demokrasi untuk merebut jabatan KPS. Itulah sebabnya, walaupun sebagai peng-gagas ide demokrasi, namun dalam kedudukannya sebagai KPS telah bertindak menyimpang dan otoriter menurut pandangan mereka.

KPN Kolonedale tidak pernah memandang bahwa tindakan Mainda Rumampuo itu menyimpang, karena Undang-Undang tentang pemerintahan, baik yang dikeluarkan oleh NIT maupun oleh pemerintah RI mengakui hak otonomi daerah swapraja. Kekeliruan telah terjadi dalam pemerintahan Swapraja Mori pada tahun 1949, ketika pemerintah menerima dan melaksanakan gagasan demokratis dalam pemilihan calon pejabat kepala distrik Ngusumbatu. Penerimaan itu dimanfaatkan oleh KPN M.D. Thijs untuk merekayasa pemilihan calon pengganti raja, yang akhirnya terpilih Mainda Rumampuo dengan menyingkirkan Pirau Marunduh calon yang diharapkan oleh Raja Owolu Marunduh untuk kelak mewarisi takhta pemerintahannya. Sehubungan dengan itu, pihak pemerintah Kolonodale memandang timbulnya ketegangan politik yang terjadi berkaitan dengan dukungan mereka kepada Pirau Marunduh. Oleh karena itu diusulkan kepada Komisi Swapraja Sulawesi Tengah agar Pirau Marunduh dipindahkan dari Mori.

---

<sup>39</sup> Surat para pemohon ini, baca Lampiran No.3. Matainda Tumakaka adalah pejabat mantri cacar Kolonodale yang pada tahun 1949 diangkat oleh Raja Mori untuk menduduki jabatan Kepala Distrik Ngusumbatu, tetapi mendapat protes dari M. Rumampuo, dengan mengajukan saran agar pengangkatan Kepala Distrik harus melalui sistem pemilihan.

<sup>40</sup> A.K. Tumakaka, *op.cit.*, hal. 185-186. Pernyataan itu dirujuk dari surat Besau Marunduh, dkk tertanggal

7 November 1950.

<sup>41</sup> Surat itu ditandatangani oleh: Besau Marunduh, Marius Tumakaka, Sungka Marunduh, Ande Kurami Tumakaka, dan Arie Marunduh.

<sup>42</sup> Surat pengurus PGRI ranting Tomata ini ditandatangani oleh: P. Toripalu (ketua), K. Pelombe (ketua muda), H. Tumimomor (panitera), M. Parawi (bendahara), T. Rumbani (pembantu), dan A.K. Tumakaka, atas nama ketua organisasi Rakyat Terpelajar Mori.

Akhirnya dikeluarkan Surat Keputusan No. 9 tertanggal 17 November 1951 bahwa Pirau Marunduh diangkat menjadi *Landschap Bestuur Assisten* di Biromaru (Palu) terhitung sejak 16 September 1950. Berdasarkan Surat Keputusan itu, ia dan keluarga akhirnya pindah ke Palu.<sup>43</sup> Jika dicermati Surat Keputusan No. 9 tertanggal 17 November 1951 tampak bahwa surat ini juga diberi fungsi untuk mengabsahkan kedudukan Mainda Rumampuo yang dilantik pada Oktober 1950. Itulah sebabnya Surat Keputusan tugas baru untuk Pirau Marunduh diperhitungkan surut hingga kurang lebih 15 bulan, bertepatan dengan satu bulan sebelum pelantikan KPS baru, Mainda Rumampuo. Itu berarti surat keputusan itu juga dimaksudkan untuk mengabsahkan pelantikan KPS Mori yang berlangsung pada bulan Oktober 1950, karena dalam perhitungan waktu, pelantikan itu berlangsung ketika pewaris takhta sesungguhnya Kerajaan Mori, Pirau Marunduh, sedang menjabat wakil KPS di Biromaru.

Pada tahun 1957, pemerintah menggagas struktur pemerintahan yang seragam bagi penataan pemerintahan di seluruh Indonesia. Hal itu dipandang perlu mengingat kenyataan bahwa bentuk pemerintahan dengan pembentukan Kewedanaan, Swapraja, dan Distrik menampakkan dualisme dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah menghendaki pembubaran wilayah kewedanaan, swapraja,

dan distrik dan membentuk wilayah "kecamatan". Pelaksanaan penataan pemerintahan ini mulai terealisasi pada tahun 1961. Berdasarkan peraturan itu, berakhir pula kedudukan Mainda Rumampuo sebagai KPS Mori, karena Swapraja Mori dibubarkan dan wilayah Mori dinyatakan menjadi Kewedanaan Kolonodale.

---

<sup>43</sup> Selanjutnya, berturut-turut penugasan di ranah Kaili: Dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Sulawesi Tengah No. 1521 tanggal 10-8-1952 tmt 11-8-1952 diangkat sebagai *Landschap Bestuur Assisten* (Onderafdeling Donggala) melaksanakan tugas Kepala Swapraja Tawaeli. Dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Donggala No.5 tanggal 1-9-1952 di perbantukan pada Kepala Pemerintah Negeri Donggala di Donggala. Dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi di Makassar No. 178/BP tanggal 13-4-1953 tmt

1-4-1953 dipindahkan ke kantor BKDH Donggala di Palu selaku Kepala Bagian Politik. Dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Swatantra Donggala di Palu No. Kep. 29/D. P. R. D. S/55 tmt 1-6-1955 terpilih menjadi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Donggala di Palu. Pirau Marunduh lahir di Sampalowo (Sulawesi Tengah) 28 Mei 1919 dan meninggal dunia di Palu pada 19 November 1990.

## **BAB IX**

# **PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI**

Penataan pemerintahan pada periode awal setelah Proklamasi Kemerdekaan RI belum terselenggara dengan baik. Berdasarkan Rapat PPKI, wilayah Sulawesi dinyatakan menjadi satu Provinsi, dengan menetapkan Dr. G.S.S.J Ratulangi menjadi Gubernur Sulawesi.<sup>1</sup> Pengaturan wilayah ketika itu hanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 18 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Penjelasan tentang pasal ini, khususnya menyangkut daerah yang bersifat istimewa,

dijabarkan dalam angka II yang berbunyi:

"II. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut."

Penjelasan itu menunjukkan bahwa status kerajaan yang pada periode pemerintah kolonial disebut *swapraja* (*zelfbestuurende*

---

<sup>1</sup> Rapat PPKI menetapkan wilayah Indonesia terbagi atas 8 provinsi, yaitu provinsi: Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara).

*landschappen*) tetap dipertahankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Itulah sebabnya PPKI hanya menata daerah besar yang disebut provinsi.

Penataan pemerintahan ini, khususnya menyangkut Provinsi Sulawesi, belum dapat dilaksanakan dengan baik, pasukan Sekutu bersama *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) telah tiba di Makassar. Keikutsertaan NICA dalam pasukan Sekutu itu didasarkan pada *Civil Affaire Agreement* (CAA) yang dicapai antara pihak Inggris dengan pemerintah Belanda. Isi pokok naskah kesepakatan itu adalah NICA diterima menjadi bagian yang integral dalam pasukan Sekutu dan berfungsi sebagai lembaga intendan untuk mengurus persoalan-persoalan sipil.

Keikutsertaan NICA pada pasukan Sekutu itu ternyata mengundang reaksi penolakan rakyat yang telah menerima dan mengakui wilayahnya sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Reaksi perlawanan itu terjadi karena aparat NICA berusaha untuk memulihkan kembali kedudukan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Meskipun mendapat perlawanan, namun berkat dukungan Sekutu dan tawaran pembentukan bekas jajahannya itu menjadi satu negara federal, mereka berhasil menghidupkan kembali kekuasaan kolonialnya. Untuk menata pemerintahan maka diterbitkannya undang-undang menyangkut penataan pemerintahan untuk wilayah Provinsi Kalimantan dan Provinsi Timur Besar (Lembaran Negara Hindia Belanda, umumnya disebut *Indische Staatsblad* (IS) Nomor 27 Tahun 1946).

<sup>2</sup> Daerah-daerah otonom di wilayah NIT itu adalah: Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Sangir-Talau, Daerah Sulawesi Tengah, Daerah Sulawesi Selatan, Daerah Maluku Utara, Daerah Maluku Selatan, Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Sumbawa, Daerah Flores, Daerah Sumba, dan

Undang-Undang ini kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan NIT.

Dalam Undang-Undang itu, wilayah Provinsi Timur Besar yang kemudian menjadi wilayah NIT dibagi atas 13 daerah otonom dengan predikat sebagai *neo landschap* atau *federatie landschap*. Salah satu daerah otonom itu adalah Federatie Landschap-landschap Sulawesi Tengah.<sup>2</sup> Pembagian wilayah otonom itu tidak mengalami perubahan berdasarkan UU-NIT No 44 Tahun 1950, kecuali penyebutan yang diubah dengan sebutan "daerah". Berdasar pada data itu, dalam penulisan ini dipergunakan saja penyebutan Daerah Sulawesi Tengah.

### Daerah Sulawesi Tengah

Penataan daerah otonom bagi pemerintahan daerah berdasarkan IS No. 27 tahun 1946 itu mengisyaratkan kepada daerah swapraja, baik secara mandiri maupun gabungan beberapa swapraja dapat bekerjasama untuk mengadakan: (a) Dewan Pembuat Undang-Undang (*Wetgevenderaad*) dan (b) Dewan yang turut Membuat Undang-Undang (*Mede Wetgevenderaad*).<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki daerah otonom memiliki lembaga legislatif. Selain itu beberapa daerah otonom yang terdiri dari beberapa swapraja dapat membentuk satu pemerintahan gabungan, yang bertugas antara lain: memegang pemerintahan gabungan, menetapkan peraturan untuk mengatur rumah tangga pemerintahan gabungan, dan mengesahkan anggaran keuangan masing-masing swapraja.

Untuk merelisasikan pelaksanaan UU itu,

Daerah Timor. Daerah yang berdasarkan IS 1946 No. 27 yang berpredikat *neo-landschap* hanya Daerah Minahasa dan Daerah Lombok, sementara yang lainnya berpredikat sebagai *federatie landschappen*.

<sup>3</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, op.cit., hal. 297.

maka dicanangkan Mukhtar Raja-raja Sulawesi Tengah pada 27 - 30 November 1948 di Parigi. Mukhtar itu dihadiri oleh semua raja-raja (kepala pemerintahan swapraja) di Sulawesi Tengah. Raja-raja yang mengikuti mukhtar itu adalah: W.L. Talasa (Raja Poso), Muslaini (Raja Tojo), Lasahido (Raja Unau), Abd. Rabie (Raja Bungku), Lamakampali (Raja Tawaeli), Tombolotutu (Raja Moutong), Tagunu (Raja Parigi), Mainda Rumampuo (Raja Mori), Lamakarate (Raja Sigidolo), S.A. Amir (Raja Banggai), Tjatjo Ijazah (Raja Palu), S. Kabo (Raja Lore), L. Lamarauna (Raja Banawa), W. Djiloi (Raja Kulawi), dan R.M. Pusadan (Raja Tolitoli).<sup>4</sup>

Mukhtar para raja-raja Sulawesi Tengah berhasil membentuk satu dewan pemerintahan gabungan yang sebutan "Komisi Swapraja" (*Zelfbestuurscommissie*). Yang terpilih menjadi kepala daerah pertama Daerah Sulawesi Tengah adalah R.M. Pusadan, raja Tolitoli. Namun karena pemerintah gabungan itu disebut Komisi Swapraja, maka ia lebih dikenal dengan sebutan "Ketua Komisi". Selain pembentukan pemerintahan gabungan, pertemuan itu juga berhasil menyusun Undang-Undang pelaksanaan pemerintahan otonomi dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan daerah, yang kemudian diajukan kepada Residen Manado untuk mendapatkan pengesahannya (pengesahannya tertanggal 25 Januari 1949, No. R. 21/1/4.).<sup>5</sup> Pengabsahan UU itu oleh Residen Manado itu berkaitan dengan struktur pemerintahan sebelumnya, yang menempatkan dua *afdeling* di Sulawesi Tengah

sebagai bagian dari wilayah Keresidenan Manado, yaitu Afdeling Poso dan Afdeling Donggala.

Setelah pembentukan daerah otonom, pemerintah NIT membubarkan kedudukan wilayah keresidenan, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah NIT tertanggal 19 Desember 1949 (Lembaran negara NIT No. 5 tahun 1950) tentang pembentukan Komisaris Pemerintahan NIT. Dalam peraturan itu ditetapkan 3 Komisaris Pemerintahan NIT, yaitu: (1) Komisaris Pemerintahan Negara Utara, yang berkedudukan di Manado, dengan wilayahnya meliputi daerah otonom: Minahasa, Sangir-Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara; (2) Komisaris Pemerintahan Negara Tengah yang berkedudukan di Makassar, dengan wilayahnya meliputi daerah otonom: Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan, dan (3) Komisaris Pemerintahan Negara Selatan, berkedudukan di Singaraja, dengan wilayahnya meliputi daerah otonom: Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor dan Kepulauan di sekitarnya.

Perubahan penataan organisasi pemerintahan ini tetap tidak mengubah kedudukan bekas Kerajaan Mori sebagai satu daerah pemerintahan yang otonom yang disebut swapraja. Swapraja Mori adalah salah satu dari dua swapraja yang menjadi wilayah Onderafdeling Kolonodale. Daerah Sulawesi Tengah, dalam struktur organisasi pemerintahan, meliputi dua afdeling, yaitu Afdeling Poso dan Afdeling Donggala. Afdeling Poso tertata dalam 3

menetapkan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah, suatu hal yang bukan kewenangan dari suatu daerah otonom dalam negara. Sesungguhnya berdasarkan IS 1946 hanya memberikan kewenangan kepada daerah menetapkan peraturan tentang lembaga legislatif daerah dan pendapatan dan belanja daerah.

<sup>4</sup> Hasan, dkk., op.cit., hal. 274.

<sup>5</sup> Ibid., hal. 274. Hasan, dkk mengutip dari "Buku Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso tentang Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Poso ke-49 tanggal 2 Oktober 1997, yang menyatakan bahwa mukhtar itu berhasil

onderafdeling, yaitu onderafdeling: Poso, Kolonodale, dan Banggai. Sementara Afdeling Donggala tertata dalam 4 onderafdeling yaitu onderafdeling: Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitoli. Struktur pemerintahan ini bertahan hingga tahun 1952, meskipun terjadi perubahan dalam kedudukan kenegaraan.

Konstitusi RIS yang dihasilkan pada Konferensi Meja Bundar tetap mengakui penataan pemerintahan pada negara bagian, seperti yang tertuang dalam pasal 54 ayat (1) dan (2). Hal yang sama juga terjadi ketika negara-negara bagian dan RIS dibubarkan pada Agustus 1950. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam pasal 132 dan 133. Dalam pasal 132, dinyatakan bahwa: "Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132, maka peraturan yang sudah ada, tetap berlaku dengan pengertian bahwa pejabat-pejabat daerah bagian dahulu yang disebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pejabat-pejabat yang demikian pada Republik Indonesia". Perubahan yang terjadi hanyalah kedudukan negara bagian dibubarkan dan penataan kembali mengikuti penataan pada rapat PPKI tahun 1945. Itu berarti Sulawesi kembali menjadi satu provinsi. Pengaturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 82 tahun 1951 dan tambahan Lembaran Negara No. 148). Peraturan Pemerintah itu mengatur tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini melapangkan kegiatan Gubernur Provinsi Sulawesi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setelah aktivitas pemerintahan berlangsung dirasakan bahwa penetapan pemerintahan otonom daerah berdasarkan UU-NIT No. 44 tahun 1950 kurang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu pada tahun 1952, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

baru untuk menghapuskan Daerah Otonom yang berada di Sulawesi, dan menetapkan daerah pemerintahan afdeling menjadi daerah otonom baru. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, daerah Sulawesi Tengah dibubarkan dan ditetapkan dua daerah swatantra, yaitu Daerah Swatantra Donggala dan Daerah Swatantra Poso. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa perubahan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan alat-alat dan penyelenggaraan pemerintahan sambil menunggu adanya satu peraturan mengenai daerah-daerah swatantra (otonom) yang seragam (uniform). Oleh karena itu pemerintah membubarkan daerah Sulawesi Tengah dan menata wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan ketentuan itu, maka R.M Pusadan, yang pada awalnya berkedudukan sebagai ketua komisi dan kemudian setelah perubahan kedudukan daerah ini menjadi Daerah Sulawesi Tengah, berkedudukan sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tengah, menyerahkan kedudukan kekuasaan kepada Abd. Latief Daeng Masiki yang terpilih menjadi Kepala Daerah Swatantra Poso, dan untuk Daerah Swatantra Donggala diembankan kepada Intje Naim. Penataan itu didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi yang ditetapkan pada 4 Maret 1952 Nomor 118. Penataan pemerintahan ketika itu masih memberikan status swapraja bagi bekas kerajaan. Daerah Swapraja yang merupakan wilayah Daerah Swatantra Poso meliputi 7 (tujuh) daerah swapraja yaitu Swapraja Poso, Swapraja Lore, Swapraja Mori, Swapraja Bungku, Swapraja Una-una, Swapraja Tojo, empadan Swapraja Banggai.

Pada tahun 1953, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 633 Tahun 1953, wilayah Swapraja Banggai dipisahkan dari wilayah

Swatantra Poso. Dengan demikian Daerah Swatantra Poso hanya membawahi 6 (enam) daerah swapraja. Setiap daerah swapraja dibagi atas beberapa distrik. Swapraja Mori berdasarkan peraturan pemerintah ini terbagi atas empat peng wilayah distrik, yaitu Distrik Tomata, Distrik Sampalowo, Distrik Tinompo, dan Distrik Soyo.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan kemudian, dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan di Sulawesi pada umumnya dan keadaan keamanan dan perhubungan pada khususnya, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan wilayah provinsi administrasi. Sehubungan dengan itu dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 1960 tanggal 31 Maret pada 1960. Pasal 1 peraturan ini menetapkan:

"Dengan mengubah ketentuan yang berlaku tentang pembagian daerah provinsi administrasi, menghapuskan Daerah Provinsi Administrasi Sulawesi, dan membentuk:

1. Provinsi Administrasi Sulawesi Utara, dengan tempat kedudukan pemerintahan di Manado, dan
2. Provinsi Administrasi Sulawesi Selatan, dengan tempat kedudukan pemerintahan di Makassar.

Penataan ini tampak mengikuti penataan sebelumnya (periode pemerintahan kolonial) dengan mengubah Residensi Manado menjadi Provinsi Sulawesi Utara, dan Residensi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Penataan ini kemudian diperbaiki dengan UU No. 47, tahun 1960 (Lembaran Negara No. 151 Tahun 1960) yang menempatkan Provinsi Administrasi menjadi Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, yang dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1961.

## **Pembentukan Kabupaten Morowali**

Penataan daerah besar kembali mengalami perubahan pada tahun 1964. Berdasarkan UU No. 13, Tahun 1964, pemerintah kembali memekarkan Daerah Tingkat I di wilayah Sulawesi. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dimekarkan menjadi dua daerah Tingkat I, yaitu Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Hal yang sama juga berlaku pada Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, yang dimekarkan menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Pemekaran wilayah pemerintahan provinsi itu menempatkan bekas wilayah Kerajaan Mori menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemekaran wilayah pemerintahan ini kemudian mendorong DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah merancang pemekaran dan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. Untuk mewujudkan maksud itu, DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 15 Maret 1965, dengan tugas menyelidiki kemungkinan-kemungkinan pembentukan kabupaten / kotamadya baru. Kepengurusan Pansus itu terdiri dari:

1. Ketua, merangkap anggota: Drs. A. M. Rozani
2. Sekretaris merangkap anggota: Theo Tuma-

Bungku, Wosu, Salabangka, Bahodopi, Bungku Utara, dan Wana. Swapraja Una-una meliputi distrik: Una-una, Togeana, Walea; Swapraja Tojo terdiri dari distrik: Uekuli, Ulubongka, dan Ampana.

<sup>6</sup> Hasan, dkk. *Op.cit.*, hal. 277. Swapraja Poso terdiri atas distrik: Poso-Lage, Pebato, Tentena, Pu'umboto, dan Ondae. Swapraja Lore meliputi distrik: Napu, Besoa, dan Bada. Swapraja Bungku meliputi distrik:

kaka

3. Anggota-anggota: S. Tambing, A.K. Moidady, Ds. J. Melaha, Ch. Ruswanto

Hasil kerja dari Pansus itu dituangkan dalam satu laporan studi kelayakan pemekaran kabupaten daerah Tingkat II / Kotamadya. Berdasarkan laporan itu, DPRD-GR Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dalam sidang plenonya yang berlangsung pada 16 Pebruari 1966, menyetujui keputusan dalam bentuk resolusi DPRD-GR Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, No. 1 /DPRD-GR/ 1966 tertanggal 16 Pebruari 1966 menetapkan, antara lain: wilayah bekas Kewedanaan Kolonodale dimekarkan menjadi satu kabupaten daerah tingkat II dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Mori Bungku, dengan ibukota pemerintahan di Kolonodale. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang direncanakan itu akan ditata dalam 7 kecamatan, yaitu kecamatan: Mori Atas, Mori Tengah, Mori Bawah, Bungku Utara, Bungku Tengah, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan.

Program pemekaran wilayah pemerintahan dan pembentukan Kabupaten Mori Bungku yang dicanangkan oleh DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah itu tidak dapat diperjuangkan dan direalisasikan. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan kondisi politik di negara kita ketika itu yang masih hangat karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Peristiwa itu berkaitan dengan aksi pembunuhan 7 orang perwira tinggi Angkatan Darat RI yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa (pasukan pengawal Presiden RI) dibawah pimpinan Kolonel

Untung pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dipandang sebagai percobaan kudeta yang berakhir dengan pengumuman terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberikan kekuasaan kepada Mayor Jenderal Soeharto, yang selanjutnya diikuti dengan kebijakan pembersihan lawan-lawan politik yang dipandang mendalangi peristiwa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Tragedi kemanusiaan yang terjadi berkenaan dengan pengalihan dari Pemerintahan Orde Lama (Orla) kepada pemerintahan Orde Baru (Orba) menimbulkan ketakutan massa dan membuyarkan inisiatif lokal sehingga gagasan pemekaran Kabupaten Poso dengan membentuk kabupaten baru yang sudah dicantumkan itu, akhirnya didiamkan.

Meskipun demikian penetapan DPR-GR itu dapat dipandang sebagai usaha persiapan pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mori Bungku. Penetapan ibukota pemerintahan di Kolonodale itu berkaitan dengan kenyataan penggabungan dua bekas daerah kewedanaan dari Daerah Tingkat II Kabupaten Poso, yaitu ibukota Kewedanaan Mori yang berkedudukan di Kolonodale dan ibukota Kewedanaan Bungku yang berkedudukan di Bungku.<sup>7</sup> Berdasarkan keputusan itu, kegiatan administrasi pemerintahan kabupaten persiapan dipusatkan di bekas ibukota Kewedanaan Mori, yaitu Kolonodale. Penetapan itu juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang lebih baik dan telah tersedia di kota itu, yang pada periode kolonial telah dijadikan sebagai ibukota Onderafdeling Kolonodale.

Dalam perkembangan kemudian, ketika pemerintah menggulirkan gagasan otonomi

<sup>7</sup> Daerah Tingkat II Kabupaten Poso, pada awalnya terdiri dari 4 daerah Kewedanaan, yaitu (1) Kewedanaan Poso/Lore, (2) Kewedanaan Tojo/Una-una, (3) Kewedanaan Mori, dan (4) Kewedanaan Bungku. Baca: Patta Tope, dkk, *Kajian Strategis Aspek Teknis*

*Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Morowali Utara* (Palu: Naskah Akademik Pemekaran Wilayah Kabupaten Morowali Utara, 2007), hal. II-3 - II-4.



daerah, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bermunculan wacana pemekaran wilayah kabupaten, tidak terkecuali juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu diterima oleh Pemerintah Pusat dan disetujui oleh DPR RI, sehingga diterbitkannya Undang-Undang No. 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai dan Kepulauan. Dalam UU Nomor 51 Tahun 1999, yang mengatur pemekaran wilayah di Sulawesi Tengah, wilayah Mori dan Bungku, yang semula dicanangkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Mori Bungku tetap dijadikan satu kabupaten dengan nama Kabupaten Morowali. Kabupaten baru ini terdiri dari 8 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Petasia dengan ibukota di Kolonodale;
2. Kecamatan Mori Atas dengan ibukota di Tomata;
3. Kecamatan Lembo dengan ibukota di Beteleme;
4. Kecamatan Bungku Barat dengan ibukota di Wosu;
5. Kecamatan Bungku Utara dengan ibukota di Baturube;
6. Kecamatan Bungku Tengah dengan ibukota di Bungku;
7. Kecamatan Bungku Selatan dengan ibukota di Kaleorang, dan
8. Kecamatan Menui Kepulauan dengan ibukota di Ukunambo.

Luas wilayah kabupaten yang baru ini adalah 15.490,12 kilometer persegi, dengan

jumlah penduduk pada tahun 2000 adalah 152.531 orang. Wilayah ini terbagi atas 210 desa definitif dan 10 desa yang berstatus kelurahan.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 1999, ibukota pemerintahan Kabupaten Morowali ditetapkan berkedudukan di Bungku (pasal 10 ayat 2). Namun mengingat kenyataan bahwa prasarana dan sarana di Bungku belum memadai menjadi ibukota pemerintahan kabupaten, sehingga pemerintah menetapkan untuk sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota pemerintahan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ibukota sementara ditetapkan di Kolonodale (Pasal 22 ayat (1)). Jangka waktu yang ditetapkan untuk kelak mendefinitifkan penetapan Bungku menjadi ibukota itu selambat-lambatnya lima tahun (Pasal 22 ayat (2)).

## **Rencana Pemekaran Kabupaten Morowali.**

Undang-undang pembentukan Kabupaten Morowali ini, khususnya menyangkut ketentuan penetapan ibukota pemerintahan itu menunjukkan kesan adanya rekayasa politik dibalik latar sejarah daerah ini. Secara historis, seperti yang telah diungkapkan dalam pokok-pokok pembahasan terdahulu, tampak bahwa dua kerajaan yang memiliki hubungan genealogi dan kesamaan budaya itu, tidak pernah membangun hubungan bilateral dalam kegiatan politik pemerintahan. Kerajaan Mori senantiasa menempatkan diri sebagai kerajaan yang terkuat dan sering melakukan intervensi ke wilayah Kerajaan Bungku dengan alasan membantu kelompok keluarga yang terancam oleh kelompok pengayau. Pemberian bantuan

Daerah Kabupaten Morowali dengan Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, 2000), hal III-13.

---

<sup>8</sup> Lembaga Penelitian Untad, *Penyusunan Tipologi Kabupaten Morowali* (Palu: Kerjasama Pemerintah

itu senantiasa diikuti dengan strategik menguasai sumber kesejahteraan penduduk yang pada gilirannya mendorong penduduk menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada penguasa Mori, sehingga dipandang oleh penguasa Bungku sebagai kebijakan politik untuk memperlengkap kedudukan kekuasaannya. Meskipun tingkat permusuhan itu tidak berakibat terjadinya eskalasi perang antara dua kerajaan bertetangga dan memiliki hubungan genealogis itu, namun masing-masing pihak tidak pernah melakukan hubungan politik yang setara.

Latar kesejarahan itu mendapat perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga ketika berhasil menduduki dan menguasai Kerajaan Mori pada tahun 1907, pemerintah berusaha menggabungkan wilayah dua kerajaan bertetangga itu menjadi satu kesatuan pemerintahan yang disebut Onderafdeling Pesisir Timur Sulawesi. Meskipun pemerintah kolonial Hindia Belanda telah lama memiliki kantor perwakilan pemerintahan di Bungku (sejak awal paruh kedua abad ke-19) pusat pemerintahan onderafdeling itu tidak ditempatkan di Bungku, melainkan tetap di Kolonodale, wilayah di sekitar Teluk Tomori yang baru dibuka pada awal tahun 1907, ketika pemerintah Hindia Belanda memohon izin kepada penguasa Kerajaan Mori untuk menempatkan anggota militernya guna mengawasi pekerjaan pembukaan jalan di kerajaan itu. Tekanan dan paksaan oleh kesatuan militer Hindia Belanda terhadap rakyat Mori yang membantu untuk penyediaan prasarana jalan telah berakibat terjadinya peristiwa Matandau dan Ranoitole.

Peristiwa-peristiwa itu dapat dipandang sebagai faktor pendorong utama mengapa pemerintah kolonial memilih dan menetapkan Kolonodale sebagai ibukota pemerintahan Onderafdeling Pesisir Timur Sulawesi, yang kemudian berubah nama menjadi Onder-

afdeling Kolonodale. Patut diakui bahwa penetapan itu juga mempertimbangkan latar belakang sejarah Kerajaan Mori. Karena itu, meskipun Kolonodale ketika itu merupakan kampung kecil yang dihuni oleh anggota militer Hindia Belanda namun tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan untuk kemudian dikembangkan menjadi kota utama di wilayah pemerintahan itu.

Ketika pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah mencanangkan pemekaran wilayah pemerintahan dan menetapkan bekas Onderafdeling Kolonodale, yang pada waktu itu telah terbagi atas dua Sulawesi daerah kewedanaan, yaitu Kewedanaan Mori dan Kewedanaan Bungku, menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bungku-Mori masih memandang bahwa Kolonodale yang jauh lebih pantas dijadikan ibukota pemerintahan. Bahkan bila disimak Undang Undang No 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai dan Kepulauan tampak bahwa pihak pemerintah sangat menyadari bahwa kota Kolonodale yang lebih memenuhi syarat menjadi ibukota kabupaten, sementara kota Bungku belum memadai karena prasarana dan sarana yang sangat tidak mendukung. Walaupun demikian, menetapkan ibukota kabupaten adalah kota Bungku yang nyatanya tidak segera dapat difungsikan, dan karena itu menetapkan kota Kolonodale menjadi ibukota sementara untuk masa waktu paling lama 5 tahun.

Kebijakan pemerintah itu mendorong pemuka masyarakat dan rakyat Bungku bekerja keras untuk menyediakan prasarana dan sarana pendukung untuk dapat menampilkan kota Bungku menjadi kota yang dapat difungsikan sebagai ibukota kabupaten. Setelah bekerja mempersiapkan Bungku menjadi ibukota, rakyat Bungku melakukan demonstrasi pada September 2001, menuntut pemerintah kabupaten

segera merealisasikan amanat UU No. 51 Tahun 1999 menyangkut ibukota pemerintahan definitif. Keingin untuk merealisasikannya itu mendorong kelompok yang ingin mempertahankan Kolonodale sebagai ibukota pemerintahan tampil memperjuangkan agar Kolonodale tetap menjadi ibukota pemerintahan.

Persoalan menyangkut ibukota pemerintahan kabupaten itu akhirnya mendorong Bupati Morowali, Andi Muhammad A.B. mewacanakan pemekaran Kabupaten Morowali pada Juli 2003. Wacana pemekaran Kabupaten Morowali itu merupakan keputusan yang disepakati dalam pertemuan antara pemerintah dan pemuda masyarakat Bungku pada 8 Juli 2003. Isi pokok kesepakatan itu antara lain: (1) Kabupaten Morowali akan dimekarkan menjadi dua kabupaten, (2) tokoh-tokoh masyarakat Bungku siap dan bertekad mendukung kebijakan Bupati Morowali untuk menjadikan Bungku menjadi satu Kabupaten; (3) wacana pemindahan ibukota pemerintahan ke Bungku tidak lagi dipersoalkan, dan mendukung pemekaran Kabupaten Morowali.<sup>9</sup>

Keputusan ini ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Bungku yang tidak mengikuti pertemuan itu. Oleh karena itu mereka melakukan pertemuan dan kemudian mendeklarasikan difungsikannya Bungku menjadi ibukota pemerintahan Kabupaten Morowali pada 20 Oktober 2003. Setelah pendeklarasian itu, mereka melaksanakan demonstrasi pada tanggal 21 Oktober 2003 yang diikuti sekitar 3.000 orang Bungku menuntut agar pemerintah merealisasikan secepatnya deklarasi mereka, yang pada dasarnya berpatokan kepada amanah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 1999, bahwa ibukota Kabupaten Morowali di Kota Bungku.

Tuntutan rakyat Bungku itu mendorong pula penduduk Kolonodale melakukan "aksi damai" pada tanggal 22 dan 24 Oktober 2003. Aksi damai itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah agar tidak memindahkan ibukota pemerintahan ke Bungku. Para demonstran mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengusulkan pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten, sebagai langkah strategik untuk mengakhiri aksi demonstrasi untuk memindahkan ibukota kabupaten.

Pergolakan yang terjadi itu mendorong pihak pemerintah Morowali bergiat untuk segera mewujudkan gagasan pemekaran wilayah pemerintahan itu. DPRD Morowali, dalam sidangnya pada 17 Oktober 2003, berhasil mencapai kesepakatan untuk pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten (SK No. 10/KEP/DPRD/2003). Berdasarkan keputusan ini, Bupati Morowali menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/2033/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten. Yang ditunjuk menjadi ketua tim itu adalah H. Zainal Abidin Ishak. Panitia yang terbentuk ini dipandang kurang aktif bergiat untuk merealisasikan keinginan rakyat Morowali sehingga pada tahun 2004, pemerintah kembali memperbaharui kepanitiaan tim pemekaran Kabupaten Morowali.

Dalam Surat Keputusan Bupati Morowali No. 188.45/1733/ TAPEM/2004 tertanggal 1 Oktober 2004 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali ditetapkan bahwa kabupaten ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, masing-masing: (1) Kabupaten Morowali dengan ibukota pemerintahan di Kolonodale, yang wilayahnya meliputi keca-

---

<sup>9</sup> Patta Tope, dkk, *op.cit.*, hal. II-6. Baca juga: Tim Kajian Teknis Pemekaran Kabupaten Morowali,

"Kajian Teknis Pemekaran Kabupaten Morowali" (Kolonodale: laporan, 2006), hal. 17-20.

matan: Mori Atas, Lembo, Witaponda, Petasia, Sayojaya, Bungku Utara, dan Mamosalato, dan (2) Kabupaten Labua dengan ibukota di Bungku, dengan wilayahnya meliputi kecamatan: Bumi Harapan, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Bahodopi, dan Menui Kepulauan. Surat keputusan ini dikeluarkan untuk menggantikan surat keputusan terdahulu tentang panitia pemekaran yang dipandang tidak bekerja sebagaimana harusnya. Menurut Patta Tope, dkk, panitia yang dibentuk pada tahun 2004 menghasilkan satu dokumen yang berisi Usulan Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi 2 (dua) kabupaten sudah sampai dan diproses di DPR Pusat. Pada tahun yang sama DPR telah mengusulkan RUU tentang pembentukan 8 (delapan) daerah otonom kepada Presiden RI tertanggal 27 Mei 2004 yang di dalamnya termasuk rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Labua di Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>10</sup> Hal ini sesungguhnya merupakan isapan jempol belaka karena RUU tentang pembentukan 8 daerah otonom itu telah lima bulan lebih awal diajukan sebelum panitia baru itu dibentuk (Surat Keputusan tertanggal 1 Oktober 2004).

Informasi tentang telah berprosesnya pengusulan pemekaran kabupaten itu dan pertimbangan akan berakhirnya batas waktu kedudukan Kolonodale sebagai ibukota sementara, mendorong masyarakat Morowali mengirim delegasi ke Jakarta pada 14 November 2004. Delegasi itu berjumlah sekitar 200 orang. Setelah tiba di Jakarta, delegasi yang dikirim itu melakukan unjuk rasa menuntut pihak pemerintah pusat agar tidak melakukan pemindahan ibukota pemerintahan dari Kolonodale ke kota Bungku. Mereka memohon agar pemerintah melakukan percepatan pemekaran wilayah Kabupaten Morowali menjadi dua

kabupaten. Demonstrasi itu dilakukan, karena menurut perkiraan mereka usul pemekaran Kabupaten Morowali telah sampai kepada Menteri Dalam Negeri RI dan sementara diproses.

Usul pemekaran Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Labua tampaknya harus menunggu waktu yang lama, sementara masyarakat Bungku menghendaki segera difungsikan Bungku sebagai ibukota kabupaten. Itulah sebabnya pada tanggal 17 Maret 2005 mereka kembali melakukan demonstrasi besar-besaran di Kolonodale menuntut pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikannya, karena jangka waktu yang diamanahkan UU No. 51 tahun 1999 telah berakhir. Pemerintah menanggapi para demonstran itu dengan menyatakan bahwa usul pemekaran kabupaten telah diajukan kepada pemerintah pusat dan sementara bergulir untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh pemerintah melalui DPR-RI. Oleh karena itu dimohon bersabar, meskipun batas waktu kedudukan Kolonodale sebagai ibukota sementara telah berakhir.

Harapan akan segera diterbitkannya undang-undang pemekaran wilayah kabupaten hingga akhir tahun 2005 belum juga terwujud. Untuk tidak menuai lagi aksi demonstrasi, maka Plt Bupati Morowali, Datlin Tamalagi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/018/HKM/2006 tertanggal 2 Mei 2006 tentang Pempungsian Bungku sebagai ibukota definitif Kabupaten Morowali. Keputusan Datlin Tamalagi berdampak pada naskah pemekaran yang telah diusulkan yang dasar pemikirannya menetapkan Kabupaten Morowali sebagai kabupaten induk dengan ibukota Kolonodale, dan kabupaten baru yang merupakan pemekarannya menjadi Kabupaten Labua dengan

---

<sup>10</sup> Patta Tope, *op.cit.*, hal. III-8.

ibukota Bungku. Setelah Bungku menjadi ibukota maka Kabupaten Morowali sebagai kabupaten inti harus berpusat di Bungku, dengan demikian kabupaten baru dari rencana pemekaran harus diubah, karena wilayah Mori yang merupakan kabupaten baru dalam kebijakan pemekaran.

Sehubungan dengan itu Plt Bupati Marowali menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/0258/Hukum/2006, tertanggal 24 Juli 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Kabupaten Morowali. Dengan dikeluarkannya surat keputusan baru ini, maka dengan sendirinya Surat Keputusan terdahulu menyangkut hal serupa tidak berlaku lagi (SK No. 188.4/0902/TAPEM/2005) yang pada gilirannya membatalkan juga dokumen pemekaran wilayah yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut:

Pelindung/Penasihat: Datlin Tamalagi, Plt Bupati Morowali H. Zainal Abidin Ishak, Ketua DPRD Kabupaten Morowali

Ketua: Drs Rasyid Manenong

Wakil Ketua: Hasim Sonaro

Anggota-anggota: Otniel Tampake, BA, H. Moh. Kasim Syajadat, Ginto Lameanda.

Setelah pembentukan panitia ini, Plt Bupati Marowali mengeluarkan Surat Tentang Keputusan Penetapan Pembagian Wilayah Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi Dua Kabupaten (SK No.126/SK.0420/UM/2006 tertanggal 14 Agustus 2006). Dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa:

I. Batas wilayah Kabupaten Morowali sebagai kabupaten induk berkedudukan di Bungku, wilayahnya meliputi wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Menui Kepulauan,
2. Kecamatan Bungku Selatan,

3. Kecamatan Bahodopi,
4. Kecamatan Bungku Tengah,
5. Kecamatan Bungku Barat,
6. Kecamatan Bumi Raya,
7. Kecamatan Witaponda

II. Batas wilayah Kabupaten Morowali yang dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonodale meliputi wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mori Atas,
2. Kecamatan Lembo,
3. Kecamatan Petasia,
4. Kecamatan Soyojaya,
5. Kecamatan Bungku Utara,
6. Kecamatan Mamosalato.

Panitia pemekaran kabupaten ini telah berhasil menyusun satu dokumen penting tentang kebijakan pemekaran Kabupaten Morowali. Dokumen itu telah dikirim kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan diajukan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan pemekaran itu telah mendapatkan persetujuan, sehingga diterbitkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah No. 14/DPRD/2007 tertanggal 16 April 2007. Berdasarkan surat keputusan itu, panitia memohon rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya dikirim kepada Menteri Dalam Negeri. Kini pemerintah dan rakyat di kabupaten ini mengharapkan semoga Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

## EPILOG

Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan dari sejumlah kerajaan yang berkembang di Indonesia. Sama seperti kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, kerajaan ini juga dibentuk dan diberikan pengabsahannya berdasarkan kisah-kisah lokal dari memori kolektif masyarakat yang bercorak legenda. Pembentukan kerajaan ini berawal ketika tampilnya seorang tokoh yang diberikan predikat Mokole Moiki. Ia menikah dengan seorang *mokole* dari wilayah sekitar Danau Matano, yang disebut Mokole Mohainga. Pernikahan itu memberi pengaruh yang luas terhadap kelompok kaum yang menghuni wilayah sekitarnya. Pemimpin kelompok kaum (para *mia mota'u*) datang memberi hormat dan memohon menjadi pemimpin mereka, dan bahkan mengajaknya pindah bermukim di negeri mereka dan menjadi yang dipertuan. Sehubungan dengan itu Mokole Moiki dan permaisurinya pindah dan bermukim di Wawontuko dan membangun satu pemerintahan kerajaan yang membawahi sejumlah komunitas kaum yang bermukim di sekitarnya. Mokole Moiki menjadi Raja I (Mokole I) dari persekutuan kaum yang membentuk satu pemerintahan itu yang disebut Kerajaan Mori.

Kerajaan ini diperkirakan terbentuk sekitar tahun 1580 dengan Raja I yang disebut Marunduh I (1580-1620). Sejarah kerajaan ini menampilkan kisah yang unik sehubungan dengan tekad dan keinginan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan dan rakyatnya. Perluasan wilayah dan pengaruh kekuasaan tidak dilaksanakan melalui perang penaklukan. Pemegang kendali politik kerajaan umumnya hanya melayani dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kelompok kaum yang menjadi rakyatnya. Bila terjadi pertikaian antara kelompok kaum yang

belum bergabung pada kerajaannya, ia tidak bergiat mencampurnya. Namun bila ada yang memohon bantuannya, penguasa kerajaan memberikan bantuan untuk menyelesaikannya. Dalam kasus yang demikian ini, keberhasilan atas bantuan yang diberikan itu, berpengaruh terhadap pihak yang menerima bantuan sehingga dengan sukarela menggabungkan diri dengan Kerajaan Mori. Bahkan kelompok kaum yang menjadi lawan kelompok yang dibantu juga menyatakan kesediaan tunduk dan takluk kepada kekuasaan Kerajaan Mori.

Perkembangan yang dicapai oleh kerajaan ini mendorong Kerajaan Luwu bergiat menganeksasinya. Perang Mori-Luwu yang terjadi pada tahun 1670 berhasil dimenangkan oleh Kerajaan Luwu. Ratu Wedange dan putera mahkota Sungkawawo serta pejabat *karua* ditawan dan dibawa ke Palopo sebagai syarat untuk menetapkan Kerajaan Mori menjadi kerajaan taklukan (*palili*). Penguasa kerajaan Luwu mengizinkan ratu Wedange dikembalikan ke Wawontuko untuk memerintah kembali sebagai ratu *palili*, namun ia menolak. Penolakan itu membuktikan bahwa ia tidak ingin negerinya menjadi *palili*, ia menghendaki kerajaannya tetap merdeka dan berdaulat. Ia menghendaki kerajaannya berstatus setara dengan Kerajaan Luwu. Oleh karena itu pejabat *karua* yang dianjurkan kembali dan melakukan pemilihan dan pengangkatan penguasa baru di luar keinginan penguasa Luwu. Metode itu dilakukan dengan tujuan membebaskan kerajaan itu dari predikat sebagai *palili* Kerajaan Luwu.

Penguasa Luwu kemudian menawarkan jasa baik kepada putera mahkota Sungkawawo untuk dilantik menjadi raja *palili* (Kerajaan Mori). Setelah melakukan upacara pelantikan, ia diperkenankan berangkat kembali ke Wawontuko. Kehadirannya sebagai raja *palili* tidak diterima, karena *karua* telah memilih dan

melantik Anamba (1670-1680) menjadi raja. Sungkawawo menyadari dan memahami strategik politik yang telah dilakukan itu untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negerinya sehingga tidak bergiat merebut kekuasaan, tetapi memilih meninggalkan Wawontuko dan pergi menetap di Matano. Keputusan itu dipandang kurang menguntungkan kedudukan kerajaan, sehingga dicanangkan untuk memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Paantoule. Pemindahan pusat pemerintahan itu telah membatalkan kedudukan Sungkawawo sebagai raja *palili* dan menjadi Raja Mori yang merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya ia tidak memenuhi kewajibannya untuk menghantar upeti ke Palopo.

Pemerintah Hindia Belanda juga bergiat untuk menganeksasi kerajaan ini pada tahun 1856. Pasukan ekspedisi yang jumlah 2690 orang tentara yang dipimpin oleh Gubernur Maluku, C. G. Goldman, tidak berhasil menaklukkan kerajaan itu. Pada pertempuran di Benteng Ensaondau, pasukan ekspedisi berhasil memaksa pemberani Mori yang berjumlah 60 orang menyerah. Sesungguhnya pemberani Mori ingin terus berperang, namun kagum dan heran dengan ledakan mortir yang ditembakkan dari jarak jauh dan menghancurkan pemukiman mereka, keampuhan senjata yang belum pernah didengar atau diketahui sebelumnya sehingga dipandang sebagai senjata pemusnah yang ajaib. Oleh karena itu komandan benteng Ensaondau, Sangaji, mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Tindakan Sangaji itu tidak dibenarkan oleh dua orang pemberani dari Raja Mori yang diikutkan dalam pasukan pemberani yang mempertahankan benteng itu, sehingga melakukan tindakan amuk, membunuh penghuni benteng itu. Untung ketika itu telah ditempatkan regu pengawal bendera yang dikibarkan di benteng itu sebagai bukti telah direbut, berhasil

melumpuhkan dua pengamuk itu.

Sangaji menjelaskan kepada panglima dan perwira militer ekspedisi itu bahwa raja dan pemberaninya tidak pernah menyatakan menyerah apabila telah terlibat dalam perang. Karena itu, Sangaji, juga memohon agar seluruh pemberani dan rakyatnya diterima dan dibawa keluar dari kerajaan ini, jika tidak, akan dibunuh habis oleh pemberani kerajaan karena dipandang telah melanggar perintah raja untuk berperang hingga titik darah penghabisan. Permohonan itu dikabulkan dan tindakan penaklukan juga dihentikan dengan alasan kemanusiaan, yang dihubungkan juga dengan cuaca yang kurang menguntungkan (hujan), banyak kuli yang jatuh sakit, dan sejumlah anggota pasukan sakit (menderita luka terkena ranjau). Penghentian tindakan penaklukan itu mengundang kritik dari berbagai pihak karena operasi militer tersebut telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan pengerahan pasukan yang banyak, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali.

Pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909) dicanangkan pengiriman Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan (Zuid-Celebes Expeditie) 1905 untuk menaklukkan dan memaksa penguasa kerajaan-kerajaan yang merdeka menandatangani "pernyataan pendek" (*korte verklaring*). Pasukan ekspedisi itu mengembangkan tindakan penaklukannya juga ke Sulawesi Tengah dan menaklukkan beberapa kerajaan di daerah itu. Tindakan penaklukan itu justru tidak dilakukan terhadap Kerajaan Mori. Penguasa militer hanya bergiat menjalin kerjasama dengan Raja Marunduh Datu ri Tana (1870- 1907) untuk pembuatan prasarana jalan di kerajaan itu dan memohon kiranya kepada penguasa Kerajaan Mori dapat menyediakan pos militer dan rumah untuk anggota militer Hindia Belanda yang di tempatkan untuk

mengawasi proyek pembuatan jalan. Permittaan itu dikabulkan sehingga raja mengerahkan penduduknya untuk membuka satu perkampungan baru dekat Teluk Tomori yang kemudian hari dikenal dengan nama Kolonodale pada awal 1907.

Penerimaan yang baik oleh pihak penguasa Kerajaan Mori itu dipandang sebagai tanda takluk oleh Belanda. Oleh karena itu anggota militer yang ditempatkan untuk mengawasi kegiatan pembuatan prasarana jalan itu melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang dikerahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan menghardik mereka sebagai pekerja yang malas. Oleh karena itu banyak diantara mereka yang dengan diam-diam meninggalkan pekerjaan itu. Sikap penduduk itu menyebabkan aparat militer tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan berniat melaporkan kepada raja mereka. Ketika mereka tiba di Matandau, raja tidak berada di tempat dan diinformasikan bahwa raja lagi melakukan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tidak terkendalinya emosi mereka itu, mendorong mereka memporakporandakan istana kerajaan. Tindakan itu dipandang telah menodai harkat dan martabat raja dan kerajaan sekaligus menodai kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan dan rakyat Mori.

Raja Marunduh Datu ri Tana adalah seorang raja yang gagah berani dengan gigih mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Mori dan rakyatnya. Itulah sebabnya ia selalu menentang pernyataan pemerintah kolonial bahwa kerajaannya adalah bagian dari wilayah pemerintah Hindia Belanda. Tindakan personil militer yang suka menghardik rakyatnya, menghina mereka sebagai pekerja yang malas, dan memporakporandakan istana kerajaan itu harus dihukum. Oleh karena itu, raja memanggil para pembesar kerajaan dan tadulako untuk berkumpul di *lobo* kerajaan.

Pada pertemuan itu disepakati memberikan sanksi hukuman mati terhadap aparat militer Belanda itu, dan untuk itu diatur strategi tindakan penghukuman.

Aksi pertama dilakukan pada tanggal 19 Juli 1907 di Matandau. Semua anggota militer dan strapan yang ditinggalkan oleh Letnan B.E. Kies terbunuh. Aksi kedua dilakukan pada tanggal 21 Juli 1907 di Renaitole. Letnan Kies yang meninggalkan pasukannya, dalam perjalanan pulang singgah di Renaitole, karena Letnan H.W. Matthes dan pasukannya berada di kampung itu. Pada aksi ini hampir semua anggota militer dan strapan terbunuh, kecuali seorang strapan yang berhasil meloloskan diri dan kembali ke Kolonodale. Jumlah korban seluruhnya 44 orang, dengan rincian 13 orang tentara Belanda (2 orang berpangkat letnan, 2 orang berpangkat sersan, 1 orang kopral, dan 8 orang prajurit), 21 orang tentara bumiputera, dan 10 orang strapan. Senjata (berjumlah 28 pucuk) dan amunisinya disita.

Peristiwa Matandau dan peristiwa Ranoitole ini menjadi pemicu pemerintah kolonial mengirim pasukan marsose untuk menghukum dan menaklukkan Kerajaan Mori. Pasukan yang berada dibawah komando Kapten Krapers yang berjumlah 54 orang marsose itu tiba di Bungintimbe pada 3 Agustus 1907 dan segera menghubungi Kapiten Mahide. Pejabat pemungut pajak pemerintah kolonial itu menginformasikan bahwa raja telah pindah ke Benteng Wulanderi dan menjadikan pertahanan terakhir serta menempatkan Benteng Tokialangkai menjadi benteng pertahanan terdepan. Kapten Krapers, setelah memperoleh informasi itu, tidak langsung melakukan serangan, karena telah mengetahui keahlian pemberani Mori memasang ranjau. Karena itu Kapiten Mahide diminta untuk pertama-tama menghantar pasukannya ke Ngusumbatu untuk menemui Mokole Ede Kamesi yang telah bekerjasama



dengan pemerintah kolonial. Mokole ini diminta mengibarkan bendera putih tanda takluk dan kemudian dipaksa menjadi penunjuk jalan ke Benteng Wulanderi tanpa melalui Benteng Tokialangkai, untuk menghindari jebakan ranjau.

Pertempuran mulai berkobar ketika pasukan marsose memasuki daerah Duake pada 16 Agustus 1907. Pasukan pertahanan di Duake tidak berhasil memukul mundur pasukan elit pemerintah Hindia Belanda ini sehingga sejumlah pemberani yang selamat mengundurkan diri ke Benteng Wulanderi. Keesokan harinya dilakukan pengintaian untuk menentukan strategik penyerangan. Tiba-tiba dari benteng pertahanan yang tampaknya sunyi itu melancarkan tembakan ke arah para pengintai. Perang pun berkobar dengan sengitnya. Satu demi satu pasukan pertahanan barisan depan dan barisan pendukung gugur dalam medan pertempuran. Berita itu mendorong Raja Marunduh Datu ri Tana mengambil senjatanya, diikuti oleh putera-puteranya dan para tadulako lainnya, untuk maju menyerang lawan. Ketika semakin terdesak, dan beberapa puteranya telah tertembak, ia perintahkan kepada puteranya yang masih hidup, Owolu Marunduh, untuk mengungsi ke Benteng Tokialangkai (Pa'antobu), karena ia ingin berperang agar dapat membinasakan pasukan Belanda.

Pada waktu tengah hari, sudah tidak terdengar lagi tembakan dari dalam benteng. Namun demikian, dengan sangat waspada pasukan marsose itu bergerak maju, karena kuatir penghentian tembakan itu merupakan suatu muslihat. Namun ternyata, ketika memasuki benteng itu, tampak bahwa pasukan pertahanan telah berguguran. Diantara mayat-mayat itu terlihat satu jenazah yang tinggi kekar dan gagah berseragam hitam dan memakai destar. Juru bicara Kapiten Mahide, yang dipanggil untuk mengidentifikasi jenazah itu

menyatakan bahwa dia adalah jenazah Raja Marunduh Datu ri Tana, dan jenazah di sampingnya adalah putera-puteranya, yaitu: Lawolio, Wuaweu, dan Pono. Raja Marunduh Datu ri Tana gugur dalam baktinya sebagai seorang pahlawan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsanya.

Gugurnya Marunduh Datu ri Tana pada 17 Agustus 1907 menandai berakhirnya kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Mori dan mengawali periode penjajahan Belanda atas kerajaan ini. Periode penjajahan Belanda itu berlangsung dari 17 Agustus 1907 hingga 8 Maret 1942, atau sekitar 35 tahun. Kedudukan pemerintah kolonial Belanda ini kemudian digantikan oleh bala tentara Nippon sekitar tiga setengah tahun (8 Maret 1942 - 15 Agustus 1945). Pernyataan kapitulasi Kekaisaran Jepang itu mendorong tokoh nasional Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berdasarkan pada data ini jelas bahwa Kerajaan Mori hanya mengalami periode pemerintahan kolonial, baik oleh pemerintah Belanda maupun oleh pemerintah Kekaisaran Jepang selama kurun waktu 38 (tiga puluh delapan) tahun saja, terhitung sejak 17 Agustus 1907 - 17 Agustus 1945.

Tokoh utama yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara dari daerah ini adalah Marunduh Datu ri Tana. Ia telah mengorbankan diri sepenuhnya, kejayaan, jiwa, dan raga dengan menunjukkan tindakan kepahlawanan yang luar biasa menentang pemerintah kolonial. Ia gugur di medan juang demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaannya. Sebagai tanda hormat dan penghargaan rakyatnya, ia dianugerahkan tambahan gelar pada namanya, Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi, **Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi** telah tiada. Ia telah pergi selamanya dengan

meninggalkan jasa dan baktinya dan tindakan kepahlawanannya yang patut menjadi panutan bagi generasi muda bangsa untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu sepatutnya pemerintah Kabupaten cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan segera mengusulkannya kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Raja Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

Algemeen Rijksarchief (ARA) di Den Haag  
- Memorie van Overgave

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta

- Arsip Makassar  
- Arsip Manado

Arsip Pribadi Keluarga Pirau Marunduh

Arsip Pribadi Keluarga Besau Marunduh

Arsip Yang Diterbitkan  
*Regerings Almanak*

Sartono Kartodirdjo, dkk. 1971. *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837)*, Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 4.

1973 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta: ANRI. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie (SI)*

### Buku, Artikel, dan Makala

Adriani, N. 1909, "Land en Volk van Midden-Celebes", dalam: *TNAG (Tijdschrift van Nederlandsch-Indie Aardrijkskunde Genootschap)*, No. 25, Vo. I

1915, "Maatschapelijke Speciaal Economische Verandering der Bevolking van Midden-Celebes, sedert de Invoering van het Nederlandsch Gezag Aldaar", dalam: *Tijdschrift van het Koninklijk Norderlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, Seri II, Vol. XXXII, No. 4, hal. 457-475.

Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y. Andaya, 1982. *A History of Malaysia* London: The MacMillan Press Ltd.

Anonim, 1960, "Junge Kieche in Mittel-Celebes", dalam: *Ruft in die Welt. Een Missionblatt for Junge Menschen* (thn ke-9, Januari 1960).

Becker, Carl L., 1935. *Everyman His Own Historian*, New York: 1935

Buchari, dkk. 1978. *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan

- Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Burke, Peter, 1993. *History and Sociel Theory*, Ithaca: Cornell University Press.
- Carr, Edward H., 1965. *What is History?*, Harmondsworth: Pelican Books.
- End, Th. Van den dan J. Weithens, S.J. 1993. *Ragi Carita 2*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gardiner, Juliet, 1988. *What is History Today*, London: Macmillan Education Ltd.
- Gaediner, Patrick, 1959. *Theories of History*, London: The Free Press.
- Harris, Peter dan Ben Reilly, 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Stockholm, IDEA.
- Hasan. Dkk. 2004. *Sejarah Poso*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Harun Kadir, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan*, Ujungpandang: Laporan Penelitian.
- Hegener, Michiel, 1990. *Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de Tweede Oorlog*, Amsterdam: Uitgeverij Contact.
- Ijzereef, Willem, 1984. *De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de Standrechtelijke Executie*, Dieren: Battafsche Leeuw.
- Johnson, Doyle Paul, 1980. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II*, Jakarta: Gramedia.
- Kalaena, Romus M, 1995. "Perang Wulanderi (Agustus 1907)", Palu: Skripsi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Kemp, P.H. van der, 1904. "De Gescheidenis van het London Tractaat van 17 Maart 1824", dalam *BKI* (No. 56)
- Koentjaraningrat, (ed.), 1975. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kol, H. Van, 1911. *Nederlandsch-Indie in de Staten Generaal, 1897-1909*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kruyt, Alb. C., 1979. *Kerajaan Mori*, Jakarta: P.T. Inti Idayu Press.
- 1938 *De West-Toradjas op Midden-Celebes*, Amsterdam; N.V. Hollandsche Uitgevers-Maatschappij.
- 1924 "De Hoofden in Midden Celebes onder het Nederlandsch-Indisch Gouvernement", dalam: *Koloniaal Tijdschrift*, No. 13, hal. 23-44.
- 1899 "Eenige ethnografische aantekeningen omtrent de Toemboengkoë en de Tomori", dalam: *MNZ (Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap)*, No. 44.
- Kruyt, J. 1924. "De Moriers van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes)", dalam: *BKI*, No. 80, hal. 33-213.
- 1977 *Kabar Keselamatan di Poso*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lembaga Penelitian Untad, 2000. *Penyusunan Tipologi Kabupaten Morowali*, Palu: Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Lembaga Penelitian Universitas Tadulako.
- Majelis Adat Suku Mori Ngusumbatu, 1985. "Hukum Adat Suku Mori dari Sembilan Anak Suku di Kecamatan Lembo, Anak Suku Ngusumbatu Tinompo", Tinompo: Makalah Seminar 20 November 1985.
- Maengkom, F.R. 1907. "Dagboek van een Tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes) en terug naar het Poso meer", dalam: *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, Seri II, Vol. XXIV, hal. 855-871.
- Mahadi, 1988. *Monografi Hukum Adat I*,

- Bandung: Percetakan Binacipta.
- Marunduh, Dhira Y. 2005. "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Suku Mori Tinompo Terhadap Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Nurhayati Nainggolan, dkk. 1977. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud.
- 1982 *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud.
- Nursam, (ed), 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Pemerintah Kabupaten Morowali, 2003. "Penyusunan Rencana Tata Ruang - Wilayah Kabupaten Morowali 2003-2013", Morowali: Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Pemda Tingkat II Poso, 1987. *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Kabupaten Dati II Poso*. Poso: Pemda Tingkat II Poso.
- Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Jakarta: KPG.
- 2004 *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan, Makassar 1906-1942*, Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. dan Suriadi Mappangara, ed. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*, Makassar: Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ricklefs, M.C., 1993. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*. London: The Macmillan Press Ltd.
- 1995 *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sarwono Kusumaatmadja, 2000. "Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil", dalam: Sudibyakto, dkk (peny.), *Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Siebelhoff, M.W. 1907, "De Verovering van de Rotsvesting Oesosdau in het Rijk Mori op Celebes", dalam: *Indische Militaire Tijdschrift* (No. III), hal. 228-240.
- Somer, J.M., 1934. *De Korte Verklaring*, Breda: Corona.
- Stuers, De. 1856. "De Expeditie tegen Tomorie, op de Oostkust van Celebes, (April-Julie 1856)", dalam: *Militaire Spectator, Tijdschrift voor het Nederlandsche Leger*, Breda: Bu Broese & Comp., Vol. III, No. 1, hal. 325-547.
- Sulaiman Mamar, 1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud.
- Sudibyakto, dkk (peny.), 2000, *Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Suyono, R.P. 2003. *Peperangan Kerajaan di Nusantara. Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, Jakarta: P.T. Grasindo.
- Taroreh, W.F. 1992. "Himpunan Bahan tentang Negeri dan Kepahlawanan Rakyat Mori (Sulawesi Tengah) melawan Penjajahan", Manado: Manuskrip.
- 1992 "Kumpulan Tulisan Mengenai Silsilah Keturunan Raja-raja (Mokole) Petasia-Pa'antole Datu ri Tana Mokole Wawania - Makole Langkai di Tanah Mori, Manado: Makalah Seminar
- Taufik Abdullah, (ed.), 1985. *Sejarah Lokal di*

- Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomardjo, (ed.), 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi. Arah dan Perspektif*, Jakarta: P.T. Gramedia.
- Tempali, Y.S., 1977. "Perang Wulanderi", Kolonodale: Makalah.
- Tim Kajian Teknis Pemekaran Kabupaten Morowali, 2006. "Kajian Teknis Pemekaran Kabupaten Morowali", Kolonodale: Laporan.
- Tolesa, Laban. 1993. "Sejarah Hadat Kebudayaan To Ngusumbatu", Tinompo: Makalah Seminar Adat Kebudayaan To Ngusumbatu pada 15 November 1993.
- 2005 "Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Mori Ngusumbatu", Tinompo: Makalah Seminar.
- Tumakaka, A.K. 1979. "Sekelumit Sejarah Kepahlawanan di Mori, 1899-1907", Kolonodale: Manuskrip.
- 1979 "Catatan Sejarah Mori, Kolonodale: Manuskrip.
- Tumakaka, J.K. tanpa tahun. *Hiduplah Sabar dan Rendah Hati. Kasih Tuhan ditunjukkannya dengan Ajaib*, Jakarta: Yayasan Visi Lima Sejahtera.
- Ubbe, Achmad, 1995. *Monografi Hukum Adat Sulawesi Tengah*, Jakarta: Pemerintah Dep. -BPHN
- Visser, J. 1978. *Sejarah Kebudayaan Suku-suku Sulawesi Tengah*, Tentena: Lembaga Penelitian Studi Gereja Kristen Sulawesi Tengah.
- Visser, et al. 1978. "Beberapa Garis Besar Sejarah Kebudayaan Mori, Khususnya To Mori di Tinompo (To Ngusumbatu)", Tentena: Makalah Seminar.
- Wong Lin Keng, 1961. *The Trade of Singapore, 1819-1869*, Singapore: Tie Wah Press, JMBRAS Vol. XXXIII, No. 1.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Silsilah Raja-Raja Mori

##### Nama Mokole (Raja) - Periode Pemerintahan

1. Marunduh I, Mokole Moiki ca 1580-1620
2. Marunduh II, Mokole Wawontuko ca 1620-1650
3. Ratu Wedange 1650-1670
4. Anamba 1670-1680
5. Sungkawawo 1680-1720
6. Lawolio 1720-1750
7. Landika 1750-1780
8. Alala Owolu Lamale 1780-1810
9. Lambautoh 1810-1840
10. Tosaleko 1840-1870
11. Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia  
Tawe I Wulanderi (Marunduh III) 1870 - 1907
12. Ede Kamesi 1907-1928
13. Owolu Marunduh (Marunduh IV) 1928-1950

### Lampiran No. 2

#### Surat Raja Mori kepada Menteri Kesehatan NIT (salinan)

Kehadapan  
P.J.M. Menteri Kesehatan NIT  
Di Makassar  
d.p. P.T. Thabib  
Keresidenan Manado

Dengan hormat

Mengingat dan menaruh kira tentang soal pemindahan dalam daerah Lanschap Mori, Onderafdeling Kolonodale, Afdeling Sulawesi Tengah sangat berkekurangan tenaga jang tjakap untuk mengendalikan pemerintahan landschap kita, olehnja dengan hormat mohon P.J.M. dapat melepaskan dalam Manteri Tjatjar M. Tumakaka bertinggal di Kolonodale dari jabatannya selaku Manteri Tjatjar, dengan maksud mengisi lowongan jang terbuka dalam Lanschap Mori selaku Kepala District.

Bahwa Manteri Tjatjar M. Tumakaka adalah penduduk asli dari Lanschap Mori. Oleh sebab itu tenaganja kita sangat memerluinja dalam kalangan pemerintahan.

Kiranjaja kelepasan Manteri tjatjar tersebut selekas mungkin hendaknja.

Kolonodale, 7 Djuli 1948

Kami Radja Mori

Tjap t.t.d.

Owolu

Sumber: A.K. Tumakaka, "Catatan Sedjarah Mori": (Kolonodale: Manuskrip), hal. 192-193.

### Lampiran No. 3

#### Surat dari Para Kepala Kampung kepada Raja Mori (salinan)

Kolonodale, 20 Djuli 1949

Kehadapan

S.P.T. Radja Mori jang terhormat

dan mulia

Di Kolonodale

Dengan berlimpah hormat dari kami hambamu (kepala-kepala kampung dalam Distrik Petasia) memberanikan diri serta membubuh hitam di atas putih ini ialah sebagai pengganti diri kami hamba-hambamu datang bersungkur dihadapan S.P.T. sambil mempersembahkan suatu permohonan sebagai terpapar di bawah ini.

Bahwa mendengar chabar jang pasti dipertjajai adalah pada tanggal 1 Djuli 1949, P.T. Contr. Thijs Kolonodale telah tiba di Tinompo serta memberitahukan kepada Tn Kep. Distric M. Marunduh, yang beliau mulai tanggal 1 Djuli 1949 telah diperhentikan dari djabatannya beliau sebagai Kep. District tetapi belum resmi betul.

Maka pada tanggal 5 Djuli 1949 P.T. Wakil

Radja Mori dan P.T. KPN Kolonodale telah tiba pula di Tinompo meresmikan tentang keberhentian beliau M. Marunduh dan terus mengangkat seorang Bonto nama M. Tumakaka sebagai pengganti dari Tn. M. Marunduh tersebut.

Bahwa mendapat keterangan jang boleh dipertjajai bahwa pengangkatan beliau tersebut diatas ini adalah P.T. Radja sendiri tak mengetahui bahwa pada hari itu djuga beres-beres dengan pengresmian pengangkatan dari M. Tumakaka sebagai pengganti dari M. Marunduh.

Oleh karena hal itu telah terdjadi sedemikian, maka hati kami rakjat ada lebih begitu bimbang bertambah pula kami rakjat tak mengetahui betul-betul entahlah aturan jang dimana jang dipakai dalam pengangkatan ini, jang mana dalam kiraan kami sahadjka sudah ini jang dikatakan diktator ataukah hadat jang mana ? Mohon maaf atas kebimbangan hati kami ini.

Djikalau ditindjau hadat-hadat pada hadat purbakala, atau hadat aturan pada waktu pendjadjahan (Hindia Belanda dahulu) ataukah dalam hadat demokrasi, benar-benar tak ada jang selaras dengan kedjadian pengangkatan jang tersebut di atas ini.

Djikalau dilihat pula pada aturan keradjaan sendiri tahun 38 maka disitu dapat diketemukan betul-betul bahwa tentang susunan anggota-anggota keradjaan harus tersusun menurut adat pada setempat, maka njata hadat ini diutamakan benar-benar dalam tanah-tanah landschap.

Maka oleh sebab djaman ini adalah djaman demokrasi jang selaras dengan hadat pada djaman purbakala pada mengangkat anggota-anggota keradjaan, maka kami rakjat memohon dalam tetapi dengan sangat kiranya pada pengangkatan dan pergantian tuan M. Marunduh sebagai Kepala District Tinompo itu dapat dibuat dan diberi hak pada kami rakjat untuk

memilih seorang Bapak kami dalam satu district.

Bahwa kami rakjat mengetahui benar-benar bahwa di dalam keradjaan ini ada beberapa orang jang berhak dan djuga dipandang patut mendjadi tjalon pada pemilihan atas kedudukan ini.

Sekiranya pada lain-lain oleh kami rakjat beres-beres S.P.T ada memandang belum patut, maka tentu pada tindakan jang telah terdjadi ini kami rakjatpun akan mengakui seratus persen tetapi hal ini sekarang ada aneh sedikit.

Kami rakjat mengandjurkan sekali lagi kiranja permohonan kami ini S.P.T. akan dapat mempertimbangkan seraja mendjatuhkan belas kasihan dalam menjetudjui akan permohonan kami ini agar sungguh-sungguh S.P.T tetap menghargai akan kami rakjat-rakjatmu agar kiranja dapat terdjamin kerdja bersama dan harga menghargai antara rakjat dan Radjanja untuk pembangunan negeri bersama. Amin!

Dan permohonan jang pengabisan kami rakjat-rakjat mohon beribu-ribu maaf sekiranya permohonan kami ini njata tak diindahkan, maka kami mohon kiranja S.P.T akan tiada menaruh sjak wasangka bahwa kami rakjat tak mendjundjung lagi nama S.P. Tuan.

Karena tentu hal ini kami rakjat akan menjusul lengan menurut tangga-tangga perkeperintahan sehingga dapat memuaskan. Sekali lagi kami mohon maaf kebawah kaki S.P. Tuan.

Akhirnja kami rakjat menguntjikan kata-kata kalimat kami ini seraya memohon kemu-rahaman dan maaf dari S.P. Tuan atas kedorongan kata-kata dan kalimat jang terbentang dalam surat kami ini.

Dan pula kami rakjat mendahulukan utjapan-utjapan sjukur dan terima kasih atas belas kasihan, penghargaan S.P. Tuan kepada anak-anak rakjatmu yang rendah ini. Insjahl Allah

Dari kami rakjat (kepala-kepala kampung)



yang membubuhkan tandatangan dibawah ini.

Tembusan kami kirimkan kepada:

1. P.T. Countroleur Kolonodale, 1. ttd. (tak terbatja)
2. P.T. Kep. District Petasia, 2. ttd. Ms. Lawolio
3. P.T. Wkl Rakyat Mori di Tomata, 3. ttd. M. Pokia
4. ttd. (tak terbatja)
5. ttd. (tak terbatja)
6. ttd. A. Hati
7. ttd. (tak terbatja)
8. ttd. T. Masangu
9. ttd. (tak terbatja)
10. ttd. P. Keru
11. ttd. Siara
12. ttd. H. Bugis
13. ttd. (tak terbatja)
14. ttd. (tak terbatja)
15. ttd. Sio Pudja
16. ttd. Bamo
17. ttd. (tak terbatja) b abashed gasi in
18. ttd. (tak terbatja)
19. ttd. (tak terbatja).
20. ttd. (tak terbatja)
21. ttd. Konta
22. ttd. Kinelo
23. ttd. (tak terbatja)
24. ttd. (tak terbatja)
25. ttd. (tak terbatja)
26. ttd. (tak terbatja)
27. ttd (tak terbatja)

Sumber: A.K. Tumakaka, "Catatan Sedjarah Mori": (Kolonodale: Manuskrip), hal. 193-196.

#### **Lampiran No. 4**

#### **Surat Permohonan M. Tumakaka, dkk (salinan)**

Kolonodale, 31 Oktober 1950

Surat Permohonan  
Kehadapan Bapak Wakil KPN Kolonodale Jth  
Di Kolonodale.

Dengan segala hormat, kami jang bertanda diachir ini menjampaiakan permohonan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Bahwa menurut chabar pasti jang kami dengar, maka dalam hari-hari jang akan datang ini akan diadakan pemilihan kembali seorang kepala district untuk menggantikan M. Rumampuo dalam District Tomata
2. Bahwa oleh M. Rumampuo sebagai P.T Wakil Radja Mori, hanja diakui dua tjalon untuk dipilih oleh kepala-kepala kampung dalam district Tomata.
3. Bahwa menurut perasaan keadilan (*recht-gevoel*) kami maka tindakan itu sungguh-sungguh tidak tepat dan kurang bidjak karena:
  - a. Pentjalonan dibatasi, hal mana adalah bertentangan dalam aturan-aturan pemilihan dalam negara demokrasi
  - b. Djikalau mengikuti tjara-tjara pemilihan jang demokratis maka kepala-kepala kampung djuga berhak memberikan tjalonnja.
4. Bahwa kami jang bertanda di bawah ini dengan berdasarkan kebiasaan demokrasi bahwa tiap-tiap orang berhak dipilih, memadjukan tjalon kami untuk kepala district Tomata, Gintah Benjamin Kamesi, sekarang bertinggal di Tomata.
5. Demikianlah permohonan kami tutup dengan pengharapan kiranja Bapak mengambil per-hatian adanja, serta dengan permintaan pula supaja sekiranja hendak

mengambil keputusan dalam hal ini tidak sadja mendengarkan keterangan dari pihak lain akan tetapi djuga sudi mendengarkan terangan-keterangan dari pihak kami.

Kami jang bermohon:  
s.b. M. Tumakaka  
s.b. S. Marunduh  
s.b. B. Marunduh  
s.b. Arie Marunduh

Sumber: A.K. Tumakaka, "Catatan Sedjarah Mori": (Kolonodale: Manuskrip), hal. 198-199.

**Lampiran No. 5**  
**Surat Gugatan Kepada M. Rumampuo**  
**(Wakil Raja Mori) - salinan.**

Kolonodale, 7 Nopember 1950  
Lamp.: 1 (satu)  
Surat Pendjelasan

Dengan hormat, jang bertanda tangan diachir ini, menjampaikan permintaan sebagai berikut:

1. Menurut pendengaran kami, maka oknum jang menggantikan tuan dalam district Tomata, kini telah ditempatkan di Tomata
2. Oleh karena hal itu bertentangan dengan apa jang telah kedjadian dalam district Ngusumbatu dalam tahun jang lalu, maka kami meminta supaya selekas mungkin diadakan pemilihan kepala district Tomata.
3. Kami meminta balasan surat terhadap pendirian tuan dalam soal ep ini.
4. Alasan-alasan kami meminta ini dapat dibaca dalam surat ini

Kami jang bertanda  
t.t.d. Besau Marunduh  
t.t.d. Matheus Tumakaka  
t.t.d. Sungka Marunduh

t.t.d. Ande Kurami Tumakaka  
t.t.d. Arie Marunduh

Kepada  
Wakil Radja Mori  
Di Kolonodale  
Tembusan dikirim kepada:  
KPN di Kolonodale  
Pa. Terr. 9 Kolonodale  
Kepala Daerah S. Tengah di Poso  
Pa.Kom. Sector V di Poso, dan  
Pa.Kom. P.M. di Poso, untuk diketahui dan dipergunakan

Pendjelasan: Surat tgl 7-11-1950 jang ditanda tangani oleh Besau Marunduh, Matheus Tuma-kaka, Sungka Marunduh, Ande Kurami Tuma-kaka, dan Arie Marunduh.

**Quo vadis.....?**

Disebabkan keberhentian tuan M. Marunduh sebagai kepala district Ngusumbatu dalam permulaan bulan Djuli 1949, sebelum meninggal Raja Mori, Owolu Marunduh, mengambil keputusan hendak menundjuk seorang untuk mengisi lowongan kepala district Ngusumbatu. Pada waktu itu beliau diwakili dalam pekerdjaannya oleh Pembantu Pangreh Pradja Pirau Marunduh.

Maka dengan persetudjuan KPN M.D. Thijs pada waktu itu ditundjuklah tuan M. Tumakaka yang akan mengisi lowongan tersebut. Demikianlah pada tanggal 7 Djuli 1949, Radja Mori, Owolu Marunduh, mengirim surat kepada Menteri Kesehatan NIT, dengan perantaraan Tabib Keresidenan Manado untuk meminta supaya M. Tumakaka diperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Manteri Tjatjar karena hendak diangkat menjadi kepala District (lihat Lampiran No. 1, salinan).

Pada tanggal 15 Djuli 1949, berangkat dengan oto ke Tinompo, KPN M.D.Thijs dan

Pembantu Pangreh Pradja, P. Marunduh, untuk memberitahukan kepada kepala-kepala kampung yang pada hari itu berhimpun di Tinompo, bahwa jang akan menggantikan tuan M. Marunduh ialah tuan M. Tumakaka. Tak ada seorangpun dari kepala-kepala kampung jang hadir membantah keputusan itu, karena mereka mengetahui bahwa keputusan sedemikian itu adalah hak Radja Mori.

Apa djadi?

Kira-kira pada tanggal 18 atau 19 Djuli, tuan Rumampuo, jang pada waktu itu menjadi kepala district Tomata dan anggota DPR Sulawesi Tengah datang di Kolonodale dengan maksud khusus untuk itu, lalu mengarang suatu surat permohonan (lihat Lampiran II, salinan). Surat permohonan itu ditinggalkan di Kolonodale karena ia sendiri pada tanggal 20 Djuli 1949, pagi-pagi sekali, telah berangkat pulang ke Tomata. Hari itu bertepatan dengan hari perhimpunan kepala-kepala kampung dalam district Petasia. Oleh itu kepala district Petasia, surat permohonan itu disuruh tanda tangani kepada kepala-kepala kampung jang hadir dan salinan dari surat permohonan itu dikirim pula kepada kepala-kepala kampung dalam district Ngusumbatu dan Tomata dengan surat pengiringnja, jang terlampir sebagai Lampiran III, salinan.

Boleh dikata seluruh kepala-kepala kampung dalam landschap Mori tidak menjetudju pengangkatan kepala district, melainkan menuntut pemilihan kepala district jang ditundjang penuh oleh kepala district pada waktu itu sehingga mau tak mau Radja harus mengikuti aliran paham ini karena KEHENDAK RAKJAT.

Kita tiba pada babakan kedua !

Dalam bulan Oktober 1950 diresmikan keangkatan M. Rumampuo (bekas anggota

Dewan jang mentjiptakan surat Lampiran II) mendjadi wakil Radja Mori dan dengan ini terlowonglah djabatan kepala district Tomata. Berdasarkan pada "kehendak rakjat" jang lahir dalam bulan Djuli 1949 itu, maka kami menulis surat kepada Bapak Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Kolonodale tertanggal 31 Oktober 1950 (Lampiran IV) jang isinja pula menghendaki pemilihan kepala district Tomata dengan tjalon-tjalon jang tidak terbatas.

Tetapi... pada tanggal 3 Nopember 1950, Wakil KPN bersama Wakil Radja Mori berangkat ke Tomata dengan membawa serta Sdr H. Lapasila jang akan mendjadi Wakil kepala district. Disana diumumkan kepada rakjat bahwa mengangkat kepala district adalah "Hak Radja, Kepala district tak dapat dipilih oleh rakjat, tegasnya rakjat tak dapat mentjampuri urusan-urusan Radja.

Pemandangan-pemandangan kami

1. Baiklah lebih dahulu dikemukakan bahwa jang mendjadi pokok penjelidikan kami ialah isi surat permohonan Lampiran II itu. Olehnja surat itu disalinan dan ditjetak memakai nomor untuk Arah memudahkan penjelidikan nanti.
2. Surat jang ditanda tangani oleh kepala-kepala kampung dalam district Petasia itu, bukan dibuat oleh mereka sendiri ataupun diperbuat dengan kehadiran kepala-kepala kampung, surat itu dikarang (ditjipta) oleh Wakil Rakyat M. Rumampuo. Njata ketika saat menanda tangani surat itu, salah seorang dari kepala-kepala kampung menanjakan apakah maksud surat itu. Kepala district Petasia mendjawab "saya tidak tahu; surat ini hanja ditinggalkan disini oleh Wakil Rakjat".
3. Tuan Pembantu Pamong Pradja, Pirau Marunduh diakui oleh surat permohonan itu sebagai wakil radja. Njata dengan sebutan

- dalam kalimat No. 3. Djadi djika tuan P. Marunduh mengadakan keputusan itu sjah dan menurut pula Hak Radja yang diwakilinja (beliau almarhum Owolu Marunduh).
4. Keterangan di kalimat No. 4 yang menjatakan bahwa Radja Owolu Marunduh tidak mengetahui apa-apa tentang dirinja M. Tumakaka akan diangkat mendjadi kepala district Ngusumbatu adalah isapan djempol semata. Buktinya ialah surat dari Radja sendiri tertanggal 7 i Djuli 1949 (Lampiran I). Demikian pula kalimat No. 4 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Djuli 1949 telah diresmikan pengangkatan tuan M. Tumakaka sebagai kepala district Ngusumbatu. Ini djuga nellu tidak benar. Jang diumumkan pada hari itu ialah pemberhentian tuan M. Marunduh. Jang akan menggantikannya ialah M. Tumakaka dan untuk sementara waktu tuan Leo Rio, djuru tulis Tomata akan di mewakili pekerdjaan-pekerdjaan kepala district.
  5. Kalimat No. 5 menegaskan pendirian rakjat jang diwakili oleh M. Rumampuo bahwa rakjat tak menghendaki pengangkatan. Perbuatan atau tindakan sematjam itu dianggap diktatoris. Rakjat menuntut pemilihan kepala districtnja, tetapi tidak diangkat. Ini to ditegaskan lagi dalam kalimat No. 8.!!!
  6. Kalimat no. 6 dan 7 menundjukan bukti bahwa pengangkatan jang II telah diadakan oleh P. Marunduh sebagai Wakil Radja tidak sesuai dengan paham demokrasi dan paham adat. Dengan kata lain, jang del diakui oleh rakjat demokratis dan menurut adat istiadat Mori ialah pemilihan, agar supaja pendirian rakjat dihargai. Sebagai kata olabig kalimat No. 11 jang dikuntji dengan perkataan "Amin".
  7. Kalimat No. 12 dan 13, ialah sendjata jang dipakai untuk mengantjam Radja, djika kehendak Radja dijalankan terus dengan tidak menghiraukan kehendak rakjat. Sebab djika tak diindahkan maka para penanda tangan (tegasnja pentjipta surat) akan melangsungkan hal ini kepada atasan sampai dimana djuapun, asal sadja maksud tertjapai!
  8. Demikian isi surat permohonan itu!
  9. Djikalau kami tidak salah dengar, maka sebelum Wakil Radja Mori pindah ke Kolonodale, di Tomata telah diadakan "pemilihan" kepala district. Akan tetapi pemilihan itu ialah "pemilihan aneh". Sebab jang mendjadi tjalon-tjalon ialah sdr L. Reo, kepala district Ngusumbatu. Anehnja (kami mengadakan memakai memakai perkataan aneh sebab surat permohonan Lampiran II, kalimat No. 10 djuga memakai istilah itu) ialah bahwa jang sebenarnja hanja satu tjalon sadja jakni sdr H. Lapasila, karena sdr L. Reo memang telah mendjadi kepala district. Tegasnya peristiwa jang terdjadi itu bukan pemilihan tetapi pengangkatan. Djadi ini diktator pula, setudju dengan kalimat No. 5 Lampiran II itu. Pada hal menurut pandangan kami, rakjat dalam district Tomata ingin djuga mentjalonkan beberapa orang jang dianggapnja dapat mendjalankan kewadjiban itu (lihat kalimat No. 9 dari surat permohonan, Lampiran II, jakni sdr-sdr Mantaroso Parawi, Sulaini Panduu, Gintah, Benjamin Kamesi, dan Hule Lapasila.
  10. Bertentangan dengan pendirian-pendirian jang tertjantum dalam surat permohonan Lampiran II itu, Wakil Radja menempatkan H. Lapasila di Tomata untuk mendjalankan tugas sebagai wakil kepala by district Tomata serta berkenan dengan itu Wakil KPN Kolonodale mengumumkan di Tomata bahwa hadat jang sebenarnja dari zaman purbakala tak diadakan pemilihan.
  11. Pihak kami sebelum tuan M. Tumakaka diangkat oleh Radja Mori memang sepen-

- dirian dengan Wakil KPN ini. Akan tetapi, walaupun pada waktu itu kami juga terus mempertahankan pengangkatan M. Tuma-kaka itu, kami harus mengalah sebab surat permohonan Lampiran II, No. 11 itu men-jatakan bahwa rakjat menuntut pemilihan.
12. Djadi... peristiwa pengangkatan di Tomata itu bertentangan sebagai siang dan malam dengan pendirian rakjat yang dikemukakan oleh M. Rumampuo dalam surat permohonan, Lampiran II, kalimat No. 5 dan 6 menegaskan bahwa tindakan sematjam itu "Diktatoris" dan tidak pula menurut hadat istiadat zaman purba!! Tegasnya, kami melihat sekarang dua pendirian yang bertentangan. Pendirian Bapak Wakil KPN. dan... pendirian Wakil Radja Mori!!!
  13. Kami bertanya:
    - a. Apakah sebabnya sehingga pendirian dari Bapak Wakil KPN ini tidak dibantah oleh M. Rumampuo yang dahulu menjadi Wakil Rakjat dan pentjipta surat permohonan Lampiran II, sekarang Wakil Radja Mori?
    - b. Bukankah dalam surat Lampiran II itu telah tuntutan oleh rakjat bahwa kepala district harus dipilih?
    - c. Bukankah Suara Rakjat adalah Suara Allah menurut pidato Wakil Rakjat M. Rumampuo pada tanggal 17-8-1950 di Kolonodale?
    - d. Kalau tindakan yang diambil oleh Wakil Radja, P. Marunduh, dianggap diktatoris yang tak ada bedanya dengan peristiwa sekarang ini; apakah tindakan sekarang ini tidak diktatoris?
    - e. Manakah sikap mempertahankan Hak Rakjat selama ini ?
  14. Mungkin juga keterangan-keterangan ini ditolak dengan perkataannya, tetapi sekarang pendirian rakjat sudah lain dan sekarang tak ada rakjat yang berkeberatan tentang hal ini. Kami bertanya:
    - a. Bukankah memang dari dahulu, pada waktu peristiwa Tinompo tak ada yang berkeberatan jika bukan dipelopori oleh pencipta surat permohonan Lampiran II dan disuruh tanda tangani kepada kepala-kepala kampung?
    - b. Apakah kami harus mendapat kesan dalam hal ini bahwa tudjuan oknumlah yang membawa pendirian pada hal sebenarnya pendirian itu tinggal tetap dalam sesuatu oknum?
    - c. Akan kemana rakjat kita? Tahun ini lain pendirian, tahun datang lain pula? Bukankah suara Allah tidak berubah? Ataukah kami harus mendapat kesan pula bahwa suara rakjat yang dikemukakan oleh surat permohonan Lampiran II itu bukan Suara Allah?
  15. Njata kini bahwa politik *vac victis, vade retro* yang sementara dijalankan.
  16. Tiap orang dapat mengadakan perbandingan antara dua hal, dapat mengerti bahwa peristiwa di Tinompo dan di Tomata ini tidak berjalan atas ratio yang sehat tetapi setidak-tidaknya telah berdasarkan kepentingan-kepentingan oknum.
  17. Ada pula orang yang menyatakan bahwa kini tidak perlu lagi diadakan pemilihan kepala district. Oleh karena Radja telah dipilih dan adalah HAK RADJA untuk menundjukan kepala districtnya. Pendapat ini hanya sekedar diujjapkan untuk Jadul membela peristiwa Tomata itu, sebab dalam surat permohonan Lampiran II itu ada kalimat yang menerangkan bahwa "dituntut pemilihan kepala district Ngusumbatu karena Radja tidak dipilih"!! Kami berpendapat sebaliknya. Besar kemungkinan tuntutan pemilihan kepala district Ngusumbatu bukannya karena hendak menuntut pemilihan seterusnya, akan tetapi yang hendak membuka jalan "untuk pemilihan radja"!! Inilah soalnya.
  18. Kalau peristiwa Tomata dibenarkan maka ini hanya dapat dilakukan menurutkan

sentimentele overweging.

19. Njata terang, baik mengenai peristiwa Tinompo, baikpun tentang peristiwa Tomata ini, ada jang anti dan ada pula jang pro. Rakjat memilih tempatnja berpihak. Memang tak dapat disangkal bahwa kami berada dalam golongan minoriteit, akan tetapi hendaknja supaja dalam hal ini djangan dipandang dari sudut quantiteit, qualiteit dan penderianlah jang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah atasan.
20. Disebabkan oleh surat permohonan Lampiran II itu, maka banjak diantara rakjat sekarang jang membentji akan sdr Pirau Marunduh, karena ia seorang diktator menurut surat permohonan itu. Dan kalau sekarang ada neo diktator, jang dahulu anti diktatuur, bagaimana lagi?
21. Njata pula bahwa hak ini tidak dapat dibereskan disini sadja, ketjual diadakan doorbraak atau schending dari recht-gevoelen golongan minoriteit di swapradja.
22. Ada pula segolongan orang-orang dalam swapradja ini jang sengadja hendak mengadakan perpetjahan antara rakjat dan golongan jang dinamakan bangsawan itu, mereka rupa-rupa berpendirian bahwa apa jang dinamakan bangsawan itu bukan rakjat, pendirian mana njata-njata salah, karena oknum-oknum bangsawan itu djuga rakjat.
23. Tidak ada djalan lain jang dapat ditempuh dengan mengadakan komisi dari luar onderafdeling Kolonodale (umpamanja dari Poso) untuk menjelidiki soal-soal ini dari segala sudut dan dari segala pihak dan mengadakan perbaikan, pada waktu mana kedua belah pihak harus bersedia untuk saling memberi conceesie dan goodwill, terlebih pula tundjangan moreel kepada komisi itu. Tetapi djika keadaan sekarang ini dibiarkan sadja oleh atasan, maka kami tak dapat berbuat lain daripada bertanja kepada seluruh

anggota pemerintahan Swapradja Mori

Quo vadis?

- Lampiran I: (baca Lampiran No. 2 dari buku ini)
- Lampiran II: (baca Lampiran No. 3 dari buku ini)
- Lampiran III: Surat pengantar dari Lampiran II (Lampiran No. 3 dari buku ini) untuk kepala kampung-kepala kampung di Tinompo dan Tomata.
- Lampiran IV: Surat Permohonan dari M. Tumakaka, dkk (baca Lampiran No. 4 dari buku ini).

A.K. Tumakaka, "Catatan Sedjarah Mori": (Kolonodale: Manuskrip), hal. 183-199.

## Tentang Penulis



**Edward Lamberthus Poelinggomang**, lahir di Kabir, Nusa Tenggara Timur, 21 Oktober 1948, adalah Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Selain itu aktif pula mengajar dan membimbing penyelesaian studi mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Sekolah Tinggi Theologia (STT) Intim.

Ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada Tahun 1980; kemudian mengikuti *Post Graduate Training for Historian* di Leidsche Universiteit Leiden, Belanda, dari Maret 1981 sampai April 1983. Setelah kembali ke Indonesia menyelesaikan penyetaraan program S2 di Universitas Indonesia pada tahun 1984. Gelar Doktor ia peroleh dari Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, pada 1991.

Pada tahun 1993 diundang untuk mempresentasikan makalah pada seminar *Island Southeast Asia and the World Economy* di Canberra (Australia) dengan judul *The Dutch Trade Policy and its Impact on Makassar's Trade*. Tahun 1999 diundang sebagai profesor tamu di Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University, Jepang.

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan,

antara lain: Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942 (Yogyakarta: Ombak, 2004), dan karya bersama Dr. Mukhlis Paeni adalah: Batara Gowa. Gerakan Mesianisme di Tanah Makassar (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). Bersama Drs Suriadi Mappangara, M. Hum, meneliti dan menerbitkan buku: Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1 (Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2004) dan Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 (Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2005)

## Profil Penggagas



**Dhira Yudini Marunduh** lahir di Jakarta 10 Juni 1983, sulung dari dua bersaudara, cucunda dari Mokole Pirau Marunduh dan Raja Muda Poso Wongko Lemba Talasa. Lulus Cumlaude sebagai Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara (2005) dengan indeks prestasi 3,97/4.00. Semasa kuliah di Fakultas Hukum berbagai seminar, kursus dan pelatihan pernah diikuti olehnya, beberapa diantaranya adalah

menyelesaikan *English Course Advanced Level, English Translating Course of Advanced Level, English Legal Document Translating Course, Teacher Training for Experienced English Teacher, TOEFL Preperation Advanced Level, Seminar The National Conference on Closing The Gap in Business Management, Panel Discussion on The Protection of Indonesia Migrant Labours: Problem and Solution, National Seminar on Psychopath* dan Kursus Bahasa Belanda di Pusat Bahasa Belanda Erasmus.

Pada 2002 memperoleh *Annual Best of The Best Student Award* dari Oxford Course Indonesia (OCI) dan 2004 terpilih untuk melaksanakan penelitian hukum terbatas atas aset-aset PT. Pengelola Aset (Persero) di Bandar Lampung, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Universitas Negeri Lampung.

Dhira Y. Marunduh meraih gelar Magister Hukum (Januari 2008) dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia bidang studi Hukum Ekonomi dan saat ini bekerja di Legal Department di salah satu perusahaan otomotif terkemuka, Kantor Pusat Jakarta.



**Murdan U. Marunduh** lahir di Kolonodale (Sulawesi Tengah) 9 Maret 1949, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, sejak 1976-1980 sebagai *Accountant in Charge* di Freeport Indonesia Inc. (*copper mining operation*) Tembagapura, Papua. Selama bekerja di Freeport Indonesia Inc, berhasil meraih dua kali penghargaan tahunan yaitu *Special Anniversary Award* 1979 dan kembali mendapat penghargaan yang sama pada 1980.

Agustus 1980 bergabung dengan PT. PP. Berdikari (BUMN) dan menjabat berbagai posisi penting antara lain sebagai Kabag Perencanaan Anggaran, Kacab PT. Kapas Indah Indonesia, Kendari, Kabag *Aerial Agricultural Spraying Service*, Pekanbaru, Riau, Kabag Perdagangan Dalam Negeri, Kabag HRD, Kepala Divisi SDM dan Pengembangan Organisasi, *Corporate Secretary* dan terakhir sebagai Direktur Administrasi & PSDM PT. Berdikari Nusantara {*The subsidiary of PT. Berdikari (Persero)*} Pandaan, Jatim, dan sejak 2007 pensiun pada posisi ini.

Ia juga menjadi Ketua Tim Reorganisasi & Restrukturisasi PT. PP. Berdikari menjadi PT. Berdikari (Persero) 1998, Ketua Tim Pembentukan Serikat Pekerja PT. Berdikari (Persero) 1999 dan Ketua Tim Penyusunan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Berdikari (Persero) 2002.



Mengikuti berbagai kursus, seminar, dan penataran, beberapa diantaranya ialah *Intensive Training Program on Food Policy in a Changing World*, Food Research Institute, Stanford University USA (kerjasama dengan Bulog) 1983, P4 Tipe A (Depkop) 1984, TARPADNAS (Lemhanas) 1985, Manajemen Komunikasi dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPT-UI) bekerja sama dengan *Wolters Kluwer Professional Training*, Amsterdam 1988 dan Manajemen Organisasi dari Lembaga yang sama 1989, Musyawarah Kerja Bersama: Paradigma Baru Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan SDM pada BUMN 1999, Pelatihan Pembentukan Serikat Pekerja di Lingkungan BUMN Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Bagian Selatan 1999, sebagai Peserta Pendiri Federasi Serikat Pekerja di Lingkungan BUMN 1999. Penghargaan lain yang diraihnya adalah dari DPP Golongan Karya (Golkar) 1987. Pada 27 Oktober 1979 menjejakkan kaki di puncak Gunung Jayawijaya (Puncak Jaya) bersama grup pecinta alam Jayawijaya, Tembagapura. Mantan Ketua Umum Mori Posintuwua se Jabodetabek periode 1995-2000 dan Penasehat Mori Posintuwua 2000 - sekarang.